PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN
MOROWALI UTARA

LAPORAN KEUANGAN
2024
AUDITED



UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
TANGGAL 31 DESEMBER 2024
TAHUN ANGGARAN 2024



LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA

T A H U N P E L A P O R A N 2 0 2 4



KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pemerintah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang dilampiri dengan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, hal ini telah sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024, perlu kami kemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024, disusun berdasarkan gabungan laporan keuangan seluruh entitas Akuntansi/ pelaporan dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara dan telah direview oleh Inspektorat Kabupaten Morowali Utara.
2. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024 menyajikan informasi tentang ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelolah oleh Pemerintah Daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan sebagai berikut :
   Realisasi Pendapatan Daerah adalah sebesar Rp1.613.844.117.767,99 atau 96,88% dari target yang ditetapkan dalam APBD Tahun 2024 sebesar Rp1.665.857.452.335,00. Sedangkan Realisasi Belanja Daerah adalah sebesar Rp1.547.446.405.511,66 atau 92,91% dari yang dianggarkan dalam APBD Tahun 2024 sebesar Rp1.665.492.192.835,00 sehingga surplus/defisit anggaran sebesar Rp66.397.712.256,33. Dari sisi pembiayaan Daerah terdapat Realisasi Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp52.299.328.048,49 dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp50.974.849.892,00 sehingga diperoleh Pembiayaan Netto sebesar Rp1.324.478.156,49.
3. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 Menyajikan informasi kenaikan dan penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan di bandingkan dengan tahun sebelumnya dengan saldo anggaran lebih akhir sebesar Rp67.722.190.412,82

4. Neraca menyajikan informasi tentang posisi Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana Pemerintahan Daerah per 31 Desember 2024 masing-masing Aset sebesar Rp2.506.434.174.755,29 Kewajiban sebesar Rp119.682.720.180,87 dan Ekuitas sebesar Rp2.387.132.577.188,85 sehingga Kewajiban dan Ekuitas Dana Pemerintahan Daerah adalah sebesar Rp2.506.479.497.369,72.
5. Laporan Operasional yang berakhir sampai 31 Desember 2024 menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelolah oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan dalam satu periode pelaporan yaitu Pendapatan-LO sebesar Rp1.360.578.512.826,99 Beban sebesar Rp1.248.749.417.403,79 serta Surplus/Defisit-LO sebesar Rp114.021.831.725,50
6. Laporan Arus Kas menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas melalui Kas Umum Daerah, baik arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, arus kas dari aktivitas pendanaan maupun arus kas dari transitoris selama tahun anggaran 2024 menyajikan saldo akhir kas sebesar Rp67.722.190.412,82
7. Laporan Perubahan Ekuitas yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 menyajikan Informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dengan Ekuitas awal sebesar Rp2.270.452.390.192,32 dan Ekuitas Akhir sebesar Rp2.386.751.454.574,42
8. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan dalam penyajian, pengukuran dan pengungkapan atas nilai pos-pos Laporan Keuangan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Pemerintah menyadari bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024 ini masih perlu disempurnakan demi memenuhi amanat berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna (*stakeholders*) serta semua pihak. Pemerintah Daerah akan terus berupaya untuk dapat menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang tepat waktu dan akurat demi terwujudnya penyelenggaran pemerintahan yang baik, dan akhirnya kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 ini, Saya atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara mengucapkan banyak terima kasih.

BUPATI MOROWALI UTARA,

Dr.dr.DELIS JULKARSON HEHI, MARS



SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

BUPATI MOROWALI UTARA

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); b Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL); (c) Neraca; (d) Laporan Operasional (LO); (e) Laporan Arus Kas (LAK); (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, serta perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kolonodale, 25 Mei 2025

BUPATI MOROWALI UTARA,

DR. dr. DELIS JULKARSON HEHI, MARS



D A F T A R I S I

D A F T A R I S I

KATA PENGANTAR.....i

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....iii

LAPORAN REALISASI ANGGARAN……..1

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH……..2

NERACA……3

LAPORAN OPERASIONAL……5

LAPORAN ARUS KAS……..6

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS……..8

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN……9

BAB I : PENDAHULUAN……..9

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan..... 10

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan…….10

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan..... 11

BAB II : EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD.....13

2.1. Ekonomi Makro……...13

2.2. Tingkat Kemiskinan……...13

2.3. Tingkat Pengangguran Terbuka……...15

2.3.1 Indeks Gini (Gini Ratio)……...15

2.3.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)……..……..17

2.3.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)……..……18

2.3.4 Inflasi……..……..19

2.3.5 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRBADHB).....…..……20

2.4. Mandatory Spending…….....21

2.5 Kebijakan Keuangan……..……22

2.5.1 Pendapatan Daerah ……..23

2.5.2 Belanja Daerah……..……..24

2.5.3 Pembiayaan Daerah……..…31

2.5.4 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan (SiLPA)……....32

2.6 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD……...32

2.6.1 Pendapatan Daerah……....32

2.6.2 Belanja Daerah…….....33

2.6.3 Pembiayaan……..33

BAB III : IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN……34

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan……..……...34
3.2. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target Kinerja Keuangan……..…..39

BAB IV : KEBIJAKAN AKUNTANSI……..41

4.1. Entitas Pelaporan…….....41
4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan……..……...43
4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan……44
4.3.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LRA dan LO……...44
4.3.2 Kebijakan Akuntansi Belanja…….....45
4.4. Kebijakan Akuntansi Kewajiban……...45
4.5. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap…….……..46
4.6. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya……..……50
4.7. Kebijakan Akuntansi Persediaan…….……..51
4.8. Kebijakan Akuntansi Beban……..……..51
4.9. Kebijakan Akuntansi Transfer……..……..52
4.10. Kebijakan Akuntansi Piutang……..……...52
4.11. Kebijakan Akuntansi Investasi……..……56
4.12. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan…….…...57
4.13. Laporan Operasional…….…..57
4.14. Koreksi Kesalahan…….....58
4.15. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam SAP…..……58
4.16. Kebijakan Akuntansi Tertentu……..……59

BAB V : PENJELASAN POS - POS LAPORAN KEUANGAN……..……60

5.1. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran…… ……..……60
5.1.1 Pendapatan Daerah……..……60
5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah……..……60
5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah…….…..61
5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah…….…...63
5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan…….....65
5.1.1.1.4 Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah…….……..65
5.1.1.2 Pendapatan Transfer…….……..68
5.1.1.2.1 Dana Perimbangan…….…..68
5.1.1.2.2 Dana Desa……..……71
5.1.1.2.3 Insentif Fiskal…….…...71
5.1.1.2.4 Pendapatan Bagi Hasil…….…...71
5.1.1.3 Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah……..……..73
5.1.1.3.1 Lain – Lain Pendapatan sesuai Dengan Ketentuan Perundang - Undangan……..73
5.1.2 Belanja Daerah…….……..74
5.1.2.1 Belanja Operasi……..74

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai……75
5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa……75
5.1.2.1.3 Belanja Bunga……77
5.1.2.1.4 Belanja Hibah……78
5.1.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial……81
5.1.2.2 Belanja Modal……81
5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah……82
5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin……82
5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan……83
5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan……84
5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya……85
5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga……85
5.1.2.4 Belanja Transfer……86
5.1.2.4.1 Belanja Bagi Hasil……86
5.1.2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan……86
5.1.3 Pembiayaan……87
5.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah……87
5.1.3.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah……88
5.1.3.2.1 Penyertaan Modal Daerah……88
5.1.3.2.2 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo……90
5.1.4 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)……90
5.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP- SAL)……92
5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal ……92
5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan ……92
5.2.3 Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)……93
5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya……93
5.25 Saldo Anggaran Lebih Akhir……94
5.3. Neraca……94
5.3.2 Aset……95
5.3.2.2 Aset Lancar……95
5.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah……96
5.3.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan……97
5.3.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran……97
5.3.1.1.4 Kas di Badan Layanan Umum Daerah……98
5.3.1.1.5 Kas di Bendahara BOS……98
5.3.1.1.6 Kas di Bendahara FKTP……99
5.3.1.1.7 Kas Lainnya……100
5.3.1.1.8 Piutang Pajak Daerah……101
5.3.1.1.9 Piutang Retribusi……101
5.3.1.1.10 Piutang Lain Lain PAD yang Sah……102
5.3.1.1.11 Piutang Transfer Antar Daerah……102
5.3.1.1.12 Penyisihan Piutang……102

5.3.1.1.13 Beban di bayar dimuka……103
5.3.1.1.14 Persediaan……104
5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang……104
5.3.1.3 Aset Tetap……105
5.3.1.3.1 Tanah……106
5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin……107
5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan……110
5.3.1.3.4 Aset Tetap - Jalan, Irigasi dan Jaringan……112
5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya……115
5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan……116
5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan……119
5.3.1.4 Aset Lainnya……121
5.3.1.4.1 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah……121
5.3.1.4.2 Aset Tidak Berwujud……121
5.3.1.4.3 Aset Lain-lain……122
5.3.1.4.4 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud……123
5.3.1.4.5 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya……123
5.3.1.4.6 Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)……124
5.3.2 Kewajiban……124
5.3.2.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)……124
5.3.2.2 Utang Bunga……125
5.3.2.3 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang……125
5.3.2.4 Utang Belanja……125
5.3.2.5 Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)……126
5.3.3 Ekuitas……126
5.4. Laporan Operasional (LO) ……126
5.4.1 Pendapatan Daerah – LO……126
5.4.2.2 Pendapatan Asli Daerah – LO……126
5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah - LO……127
5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah - LO……128
5.4.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LO……129
5.4.1.1.4 Lain – Lain PAD Yang Sah – LO……129
5.4.1.2 Pendapatan Transfer – LO……131
5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah - LO……131
5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO……132
5.4.1.3 Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang sah - LO……133
5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah -LO……133
5.4.1.3.2 Lain - Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan – LO ……135
5.4.2 Beban Operasi……135
5.4.2.1 Beban Pegawai – LO……136
5.4.2.2 Beban Barang dan Jasa……138

5.4.2.3 Beban Bunga....140
5.4.2.4 Beban Hibah....140
5.4.2.5 Beban Bantuan Sosial....141
5.4.2.6 Beban Penyisihan Piutang....142
5.4.2.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi....143
5.4.3 Beban Transfer....145
5.4.3.1 Beban Bagi Hasil....145
5.4.3.2 Beban Bantuan Keuangan....145
5.4.4 Beban Tidak Terduga....146
5.4.5 Surplus Non Operasional....147
5.4.6 Defisit Non Operasional....147
5.4.7 Surplus/Defisit – LO....147
5.5 Laporan Arus Kas....148
5.5.1 Arus Kas Dari Aktivitas....148
5.5.1.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi....149
5.5.1.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi....151
5.5.2 Penjelasan Arus Kas dari Aktivitas Investasi....152
5.5.2.1 Penjelasan Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi....153
5.5.2.2 Penjelasan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi....153
5.5.3 Penjelasan atas Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan....154
5.5.3.1 Penjelasan atas Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan....155
5.5.4 Penjelasan atas Arus Kas dari Aktivitas Transitoris....155
5.5.4.1 Penjelasan atas Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris....155
5.5.4.2 Penjelasan atas Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris....156
5.5.5 Kenaikan/Penurunan Bersih Kas....156
5.6.6 Saldo Awal Kas....156
5.5.6 Koreksi SiLPA Tahun Lalu....157
5.5.7 Saldo Akhir....157
5.6 Laporan Perubahan Ekuitas....158
5.6.1 Ekuitas Awal....158
5.6.2 Surplus/(Defisit) – LO....158
5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar....158
5.6.4 Saldo Akhir Ekuitas....159
5.7 Pengungkapan Lainnya Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024....159
5.8 Dana Tugas Pembantuan....162
5.9 Standar Pelayanan Minimal (SPM)....163
5.10 Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)....168
5.11 Aset Tetap Fisik yang tidak ditemukan....169
5.12 Realisasi Pendapatan dan Belanja Dana Bantuan Operasional Daerah (BOSDA)....170

BAB VI : PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN 171

6.1 Domisili dan Bentuk Hukum Entitas Pelaporan 171
6.2 Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas 175
6.3 Pemimpin Lembaga Legislatif 183
6.4 Pemimpin Lembaga Eksekutif 183
6.5 Tugas Pokok Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara 183
6.6 Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara 183
6.7 Penjelasan tentang Kewajiban Kontingensi 185

BAB VII : PENUTUP 188



DAFTAR TABEL

DAFTAR TABEL

2.1 Garis Kemiskinan, Jumlah dan Prosentase Penduduk Miskin di Kabupaten Morowali Utara 2018 – 2024……....14

2.2 Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten / Kota di Provinsi Sulawesi Tengah (Ribu) 2023 – 2024....14

2.3 Jumlah Penduduk Angkatan Kerja, Bukan Angkatan Kerja dan Jenis Kegiatan di Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024……...……...15

2.4 Indeks Gini Ratio Kabupaten/Kota se – Sulawesi Tengah Tahun 2023 -2024……....16

2.5 Posisi Peringkat IPM Kabupaten /Kota Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 – 2024..……17

2.6 Prosentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Morowali Utara (Persen) Tahun 2020- 2024……18

2.7 Tingkat Inflasi Kabupaten Morowali Utara……...……...19

2.8 Persentase Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstant 2010 Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021 - 2024……...20

2.9 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen) di Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020 – 2024……...21

2.10 Mandatory Spending……...22

2.11 Pendapatan Daerah...……...33

2.12 Belanja Daerah……...33

3.1 Pendapatan Daerah Menurut Organisasi ..... ……34

3.2 Urusan Wajib Pelayanan Dasar..... ……35

3.3 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar..... ……36

3.4 Urusan Pemerintahan Pilihan ..... ……37

3.5 Unsur pendukung, Penunjang, Pengawasan dan Kewilayahan Urusan Pemerintahan ..... ……37

3.6 Belanja Menurut Klasifikasi Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara ..... ……38

4.1 Masa Manfaat Aset Tetap..... ……47

4.2 Batasan Minimal Kapitalisasi Aset Tetap..... ……49

4.3 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ..... ……55

4.4 Presentase Penyisihan Investasi ..... ……57

5.1 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2024 ..... ……60

5.2 Pendapatan Asli Daerah ..... ……61

5.3 Pendapatan Pajak Daerah Menurut Objek ..... ……61

5.4 Pendapatan Retribusi Daerah menurut Objek ..... ……63

5.5 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Menurut Objek…….....66

5.6 Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan ..... ……67

5.7 Pendapatan Transfer……...……68

5.8 Dana Perimbangan..... ……68

5.9 Dana Bagi Hasil ..... ……69

5.10 Dana Alokasi Umum ..... ……69

5.11 Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik……70

5.12 Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik……...……70

5.13 Pendapatan Bagi Hasil Pajak ..... ……72

5.14 Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 73
5.15 Pendapatan Dana Kapitasi JKN 73
5.16 Belanja Daerah 74
5.17 Belanja Operasi 75
5.18 Belanja Pegawai 75
5.19 Belanja Barang dan Jasa 76
5.20 Belanja Bunga 77
5.21 Belanja Hibah 78
5.22 Belanja Hibah Dana BOS - P 79
5.23 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 80
5.24 Belanja Bantuan Sosial 81
5.25 Belanja Modal 82
5.26 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 83
5.27 Belanja Modal Gedung Dan Bangunan 84
5.28 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 84
5.29 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 85
5.30 Belanja Tak Terduga 85
5.31 Belanja Transfer 86
5.3.2 Belanja Bantuan Keuangan 86
5.33 Pembiayaan 87
5.34 Penerimaan Pembiayaan Daerah 88
5.35 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 88
5.36 Penyertaan Modal Daerah 89
5.37 Daftar Konversi Dana Setoran Modal dari BPD Capem Morowali 89
5.38 Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo 90
5.39 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 90
5.40 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terikat dan nonterikat 91
5.41 Keberadaan SiLPA 91
5.42 Saldo Anggaran Lebih Awal 92
5.43 Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan 92
5.44 SiLPA/SiKPA 93
5.45 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya 93
5.46 Saldo Anggaran Lebih Akhir 94
5.47 Neraca 94
5.48 Aset 95
5.49 Aset Lancar 95
5.50 Kas di Kas Daerah 96
5.51 Kas di Bendahara Penerimaan 97
5.52 Kas di Bendahara Pengeluaran 97
5.53 Kas di Badan Layanan Umum Daerah 98
5.54 Kas di Bendahara BOS 99
5.55 Kas Di Bendahara FKTP 99

5.56 Kas Lainnya ..... ……..100
5.57 Piutang Pajak Retribusi ..... ……..101
5.58 Piutang Retribusi..... ……..101
5.59 Piutang Dana Bagi Hasil Pemerintah Provinsi..... ……..102
5.60 Penyisihan Piutang ..... ……..103
5.61 Persediaan ..... ……..104
5.62 Investasi Jangka Panjang ..... ……..104
5.63 Aset Tetap ..... ……..105
5.64 Aset TetapTanah ..... ……..106
5.65 Mutasi Aset Tanah ..... ……..107
5.66 Aset Tetap - Peralatan dan Mesin ..... ……..107
5.67 Mutasi Aset Peralatan dan Mesin ..... ……..108
5.68 Aset Tetap - Gedung dan Bangunan ..... ……..110
5.69 Mutasi Aset – Gedung dan Bangunan..... ……..110
5.70 Aset Tetap -Jalan. Irigasi dan Jaringan..... ……..112
5.71 Mutasi Aset – Jalan, Irigasi dan Jaringan ..... ……..113
5.72 Aset Tetap Lainnya ..... ……..115
5.73 Mutasi Aset Tetap Lainnya ..... ……..115
5.74 Aset Tetap - Konstruksi Dalam Pengerjaan..... ……..116
5.75 Mutasi Konstruksi Dalam Pengerajaan..... ……..118
5.7.6 Aset Tetap – Akumulasi Penyusutan..……...120
5.77 Aset Lainnya ..... ……..121
5.78 Nilai Buku Aset Tidak Berwujud ..... ……..122
5.79 Kenaikan/Penurunan Nilai Buku Aset Tidak Berwujud ..... ……..122
5.80 Aset Lain - Lain ..... ……..122
5.81 Kewajiban..... ……..124
5.82 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)..... ……..124
5.83 Utang Belanja ..... ……..125
5.84 Pendapatan -LO..... ……..126
5.85 Pendapatan Asli Daerah - LO..... ……..127
5.86 Pendapatan Pajak Daerah-LO ..... ……..127
5.87 Perbandingan Pendapatan Pajak Daerah LO dan LRA Tahun 2024 ..... ……..128
5.88 Retribusi Daerah - LO..... ……..128
5.89 Perbandingan Pendapatan Retribusi Daerah – LO dan LRA Tahun 2024..... ……..129
5.90 Lain – Lain PAD Yang Sah - LO..... ……..130
5.91 Perbandingan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah LO dan LRA Tahun 2024..... ……..131
5.92 Pendapatan Transfer - LO..... ……..131
5.93 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO..... ……..131
5.94 Perbandingan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Daerah LO dan LRA Tahun 2024 ..... ……..132
5.95 Pendapatan Transfe Antar Daerah - LO..... ……..133
5.96 Perbandingan Pendapatan Transfer Antar Daerah LO dan LRA Tahun 2024..... ……..133
5.97 Lan-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO ..... ……..134

5.98 Pendapatan Hibah - LO 134
5.99 Perbandingan Pendapatan Hibah – LO dan LRA Tahun 2024 134
5.100 Lain – Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan – LO 135
5.101 Beban Operasional 135
5.102 Beban Pegawai - LO 136
5.103 Perbandingan Beban Pegawai LO dan LRA Tahun 2024 138
5.104 Beban Barang dan Jasa 138
5.105 Perbandingan Beban Barang dan Jasa LO – dan LRA Tahun 2024 139
5.106 Beban Bunga 140
5.107 Perbandingan Beban Bunga LO dan LRA Tahun 2024 140
5.108 Beban Hibah 141
5.109 Beban Bantuan Sosial 141
5.110 Perbandingan Beban Bantuan Sosial LO dan LRA Tahun 2024 142
5.111 Beban Penyisihan Piutang 142
5.112 Perbandingan Beban Penyisihan Piutang LO dan Neraca Tahun 2024 143
5.113 Beban Penyusutan dan Amortisasi 143
5.114 Beban Transfer 145
5.115 Beban Bantuan Keuangan 145
5.116 Perbandingan Beban Transfer LO dan LRA Tahun 2024 146
5.117 Perbandingan Beban Tidak Terduga LO dan LRA Tahun 2024 146
5.118 Surplus Non Operasional 147
5.119 Defisit Non Operasional 147
5.120 Surplus/Defisit - LO 147
5.121 Arus Kas dari Aktivitas Operasi 149
5.122 Arus Kas dari Aktivitas Operasi 149
5.123 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi 151
5.124 Arus Kas dari Aktivitas Investasi 152
5.125 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi 157
5.127 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan 154
5.128 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan 155
5.129 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris 155
5.130 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris 155
5.131 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris 156
5.132 Kenaikan/Penurunan Bersih Kas 156
5.133 Saldo Awal Kas 156
5.134 Koreksi SiLPA Tahun Lalu 157
5.135 Saldo Akhir 157
5.136 Ekuitas awal 158
5.1.37 Surplus/Defisit 158
5.138 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar 159
5.139 Saldo Akhir Ekuitas 159

5.140 Realisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Tugas Pembantuan Yang Diterima Pada Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Tahun 2024……..162
5.141 Rekapitulasi Realisasi Belanja Untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) TA 2024……...163
5.142 Aset Tetap yang Fisiknya Tidak Ditemukan…….170
6.1 Luas Wilayah Kabupaten Morowali Utara Menurut Kecamatan ..... ……..172
6.2 Luas Wilayah Daratan Menurut Kecamatan, Kelurahan/Desa Kabupaten Morowali Utara……172
6.3 Unit Organisasi..... ……..176
6.4 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan..... ……..184
6.5 Dasar Hukum Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah ..... ……..184
6.6 Penanganan Kasus Pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara/Tingkat Pengadilan Lainnya Dalam Proses Persidangan ..... ……..186



DAFTAR GRAFIK

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Prosentase Penduduk Miskin di Kabupaten Morowali Utara 2018 – 2024…..……..……...14

Grafik 2.2 Posisi Peringkat IPM Kabupaten / Kota Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 – 2024…….. …….....18

Grafik 2.3 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020-2023……..18

Grafik 5.1 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun .....…….....60

Grafik 5.2 Realisasi Belanja Operasi……..74

Grafik 5.3 Neraca…….....94



DAFTAR GAMBAR

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kurva Lorenz ……....16

Gambar 6.1 Peta Wilayah Kabupaten Morowali Utara……..171



DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

I	Daftar Rincian Pendapatan Dari Pengembalian
II	Daftar Pendapatan Hibah Dana BOS
III	Daftar Realisasi Dana Desa
IV	Daftar Transfer Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Propinsi
V	Daftar Rincian Klasifikasi Belanja Daerah (A - J)
VI	Daftar Belanja Barang Diserahkan Kepada Masyarakat
VII	Daftar Belanja Barang Dana B O S
VIII	Daftar Rincian Bantuan Keuangan Kepada Desa
IX	Daftar Rekon Bank
X	Daftar Kas B O S
XI	Daftar Rekapitulasi Kas JKN
XII	Daftar Piutang Pajak (A – E)
XIII	Daftar Piutang Retribusi
XIV	Daftar Piutang TPTGR
XV	Daftar Penyisihan Piutang
XVI	Daftar Rincian Persediaan
XVII	Daftar Mutasi Aset Tetap (A-F)
XVIII	Daftar Rincian KDP
XIX	Daftar Rincian Aset Lain – Lain Rusak Berat
XX	Daftar Akumulasi Amortisasi Atas Aset Tidak Berwujud (ATB)
XXI	Daftar Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya
XXII	Daftar Utang Belanja
XXlll	Daftar Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
XXlV	Daftar Penggunaan Dana PEN
XXV	Daftar Rincian Penggunaan Dana BOSDA
XXVl	Daftar Laporan Keuangan BLUD RSUD
XXVll	Daftar LAKIP



DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

Singkatan	Kepanjangan
A	
ADHB	Atas Dasar Harga yang Berlaku
ADHK	Atas Dasar Harga Konstan
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ASKES	Asuransi Kesehatan
ATB	Aset Tak Berwujud
ADD	Alokasi Dana Desa
AP	Akumulasi Penyusutan
B	
BAPPEDA	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BBNKB	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
BLUD	Badan Layanan Umum Daerah
BOK	Bantuan Operasional Kesehatan
BOS	Bantuan Operasional Sekolah
BPD	Bank Pembangunan Daerah
BPHTB	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
BPJS	Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
BPS	Badan Pusat Statistik
BUD	Bendahara Umum Daerah
BUMD	Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
BPKD	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
BLUD	Badan Layanan Umum Daerah
C	
CaLK	Catatan atas Laporan Keuangan
CV	*Commanditaire Vennootschap*
CF	*Commitment Fee*
CI	*Creeping Inflation*
COVID-19	*Corona Virus Disesase*
D	
DAK	Dana Alokasi Khusus
DAU	Dana Alokasi Umum
DBH	Dana Bagi Hasil
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DHB	Dasar Harga Berlaku
DHK	Dasar Harga Konstan
DOB	Daerah Otonomi Baru
DP	Dana Perimbangan
DSM	Dana Setoran Modal

Singkatan	Kepanjangan
E	
EP	Ekuitas Pelaporan
EC	Extra Comptable
F	
FKTP	Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
G	
GU	Ganti Uang
GI	*Galloping Inflation*
H	
HI	*High Inflation*
I	
IPTK	Indikator Pencapaian Target Kinerja
IE	*Intergenerational Equity*
IPM	Indeks Pembangunan Manusia
IGR	Indeks Gini Ratio
IHK	Indeks Harga Konsumen
IBMPD	Inventarisasi Barang Milik Pemerintah Daerah
IMB	Izin Mendirikan Bangunan
IMTA	Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing
J	
JKN	Jaminan Kesehatan Nasional
JAMKESNAS	Jaminan Kesehatan Nasional
K	
KDH	Kepala Daerah
KDP	Konstruksi Dalam Pengerjaan
KGB	Kenaikan Gaji Berkala
KIB	Kartu Inventaris Barang
KONI	Komite Olahraga Nasional Indonesia
KUMKM	Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
L	
LAK	Laporan Arus Kas
LKPD	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
LO	Laporan Operasional
LPE	Laporan Perubahan Ekuitas
LP-SAL	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
LRA	Laporan Realisasi Anggaran
LS	Langsung
LPJ	Laporan Pertanggungjawaban
LPE	Laju Pertumbuhan Ekonomi

Singkatan	Kepanjangan
M	
MCARP	Matching Cost Against Revenue Principle
Mandatory Spending	Belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur dalam undang-undang
O	
OPD	Organisasi Perangkat Daerah
P	
PAD	Pendapatan Asli Daerah
Panwaslu	Panitia Pengawas Pemilihan Umum
PBB	Pajak Bumi dan Bangunan
PBB P2	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
PBBKB	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
PDH	Pakaian Dinas Harian
PDRB	Produk Domestik Regional Bruto
PDU	Pakaian Dinas Upacara
Pemkab	Pemerintah Kabupaten
PFK	Perhitungan Fihak Ketiga
Perbup	Peraturan Bupati
PAR	Pajak Air Permukaan
PKB	Pajak Kendaraan Bermotor
Perda	Peraturan Daerah
PFK	Perhitungan Fihak Ketiga
PKM	Pusat Kesehatan Masyarakat
PMK	Peraturan Menteri Keuangan
PNS	Pegawai Negeri Sipil
PNSD	Pegawai Negeri Sipil Daerah
PP	Peraturan Pemerintah
PPh	Pajak Penghasilan
PPJ	Pajak Penerangan Jalan
PPKD	Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
PSDH	Provisi Sumber Daya Hutan
PSH	Pakaian Sipil Harian
PSR	Pakaian Sipil Resmi
PABPPD	Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah
PT	Pendapatan Transfer
PO	*Principal Outstanding*
PUSAP	Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan
R	
RKUD	Rekening Kas Umum Daerah
RPJMD	Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RSUD	Rumah Sakit Umum Daerah

Singkatan	Kepanjangan
S	
SAL	Saldo Anggaran Lebih
SAP	Standar Akuntansi Pemerintahan
SDA	Sumber Daya Alam
SDM	Sumber Daya Manusia
SiLPA	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
SiKPA	Sisa Kurang Perhitungan Anggaran
SK	Surat Keputusan
SKP	Surat Ketetapan Pajak
SKPD	Satuan Kerja Perangkat Daerah / Surat Ketetapan Pajak Daerah
SKR	Surat Ketetapan Retribusi
SSHBJ	Standar Satuan Harga Barang dan Jasa
SP2D	Surat Perintah Pencairan Dana
SP2B	Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja
SP3B	Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja
SAPBA	Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.
T	
TA	Tahun Anggaran
TB	Tahun Berjalan
TP/TGR	Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi
TU	Tambah Uang
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka
TPID	Tim Pengendali Inflasi Daerah
U	
UKM	Usaha Kecil dan Menengah
UMKM	Usaha Mikro Kecil dan Menengah
UU	Undang-Undang
UP	Uang Persediaan
UWPD	Urusan Wajib Pajak Daerah
UPFP	Urusan Pajak Fungsi Penunjang
W	
WKDH	Wakil Kepala Daerah
WP	Wajib Pajak



LAPORAN REALISASI ANGGARAN (L R A)

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	REFERENSI	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	(%)	REALISASI 2023
1	**PENDAPATAN**					
2	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**					
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	118,875,000,000.00	74,555,959,818.00	62.72	35,305,535,224.00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	39,125,000,000.00	22,045,729,269.00	56.35	34,769,349,686.00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	5,861,556,000.00	5,229,148,166.00	89.21	3,864,163,872.00
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.1.1.1.4	64,748,577,180.00	67,003,477,838.99	103.48	60,668,193,934.42
7	**Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)**	**5.1.1.1**	**228,610,133,180.00**	**168,834,315,091.99**	**73.85**	**134,607,242,716.42**
8	**PENDAPATAN TRANSFER**					
9	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					
10	Dana Perimbangan	5.1.1.2.1	1,267,799,946,000.00	1,264,779,580,248.00	99.76	921,236,099,328.00
11	Dana Desa	5.1.1.2.2	109,581,662,000.00	109,581,662,000.00	100.00	110,554,350,000.00
12	Insentif Fiskal	5.1.1.2.3	6,678,006,000.00	12,528,131,000.00	187.60	0.00
13	**Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (10 s/d 12)**	**5.1.1.2**	**1,384,059,614,000.00**	**1,386,889,373,248.00**	**100.20**	**1,031,790,449,328.00**
14	Pendapatan Transfer Antar Daerah					
15	Pendapatan Bagi Hasil	5.1.1.2.4	44,105,624,843.00	49,843,333,666.00	113.01	40,134,041,100.00
16	Bantuan Keuangan		0.00	0.00	0.00	2,277,440,000.00
17	**Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah (15 s/d 16)**	**5.1.1.2**	**44,105,624,843.00**	**49,843,333,666.00**	**113.01**	**42,411,481,100.00**
18	**Total Pendapatan Transfer (13 + 17)**	**5.1.1.2**	**1,428,165,238,843.00**	**1,436,732,706,914.00**	**100.60**	**1,074,201,930,428.00**
19	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**					
20	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.1.1.3.1	9,082,080,312.00	8,277,095,762.00	91.14	0.00
21	**Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah (20)**	**5.1.1.3**	**9,082,080,312.00**	**8,277,095,762.00**	**91.14**	**0.00**
22	**JUMLAH PENDAPATAN (7+18+21)**	**5.1.1**	**1,665,857,452,335.00**	**1,613,844,117,767.99**	**96.88**	**1,208,809,173,144.42**
23	**BELANJA**					
24	**BELANJA OPERASI**					
25	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	546,843,749,515.36	497,246,280,767.00	90.93	425,231,570,909.00
26	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	451,830,016,908.82	418,957,792,995.49	92.72	376,440,314,339.00
27	Belanja Bunga	5.1.2.1.3	8,841,204,660.00	8,622,865,171.00	97.53	1,659,124,491.00
28	Belanja Hibah	5.1.2.1.4	59,376,050,082.00	58,682,833,607.99	98.83	22,516,369,666.00
29	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.5	28,521,924,055.00	28,481,937,055.00	99.86	33,215,227,288.26
30	**Jumlah Belanja Operasi (25 s/d 29)**	**5.1.2.1**	**1,095,412,945,221.18**	**1,011,991,709,596.48**	**92.38**	**859,062,606,693.26**
31	**BELANJA MODAL**					
32	Belanja Tanah	5.1.2.2.1	5,570,407,150.00	1,963,260,000.00	35.24	1,110,890,900.00
33	Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	82,070,107,453.00	76,216,049,055.00	92.87	36,930,658,470.00
34	Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	96,842,669,687.51	88,382,929,824.18	91.26	80,182,171,788.27
35	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.4	154,128,202,371.31	141,028,364,474.00	91.50	113,670,285,431.00
36	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	255,000,000.00	254,614,700.00	99.85	94,125,000.00
37	**Jumlah Belanja Modal (32 s/d 36)**	**5.1.2.2**	**338,866,386,661.82**	**307,845,218,053.18**	**90.85**	**231,988,131,589.27**
38	**BELANJA TAK TERDUGA**					
39	Belanja Tak Terduga	5.1.2.3	3,150,000,000.00	1,157,886,000.00	36.76	140,000,000.00
40	**Jumlah Belanja Tidak Terduga (39)**	**5.1.2.3**	**3,150,000,000.00**	**1,157,886,000.00**	**36.76**	**140,000,000.00**
41	**BELANJA TRANSFER**					
42	Belanja Bagi Hasil	5.1.2.4.1	944,103,854.00	0.00	0.00	933,454,571.00
43	Belanja Bantuan Keuangan	5.1.2.4.2	227,118,757,098.00	226,451,591,862.00	99.71	214,140,316,018.00
44	**Jumlah Belanja Transfer (42 s/d 43)**	**5.1.2.4**	**228,062,860,952.00**	**226,451,591,862.00**	**99.29**	**215,073,770,589.00**
45	**JUMLAH BELANJA (30+37+40+44)**	**5.1.2**	**1,665,492,192,835.00**	**1,547,446,405,511.66**	**92.91**	**1,306,264,508,871.53**
46	**SURPLUS/DEFISIT (22 - 45)**		**365,259,500.00**	**66,397,712,256.33**	**18,058.17**	**(97,455,335,727.11)**
47	**PEMBIAYAAN**					
48	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**					
49	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	5.1.3.1	52,332,702,392.00	52,299,328,048.49	99.94	190,873,934,975.64
50	**Jumlah Penerimaan Pembiayaan (49)**	**5.1.3.1**	**52,332,702,392.00**	**52,299,328,048.49**	**99.94**	**190,873,934,975.64**
51	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**					
52	Penyertaan Modal Daerah	5.1.3.2.1	3,861,556,000.00	2,138,444,000.00	55.38	3,500,000,000.00
53	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	5.1.3.2.2	48,836,405,892.00	48,836,405,892.00	100.00	37,585,896,256.00
54	**Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (52 s/d 53)**	**5.1.3.2**	**52,697,961,892.00**	**50,974,849,892.00**	**96.73**	**41,085,896,256.00**
55	**PEMBIAYAAN NETTO (50 - 54)**	**5.1.3**	**(365,259,500.00)**	**1,324,478,156.49**	**(362.61)**	**149,788,038,719.64**
56	**SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (46 + 55)**	**5.1.4**	**0.00**	**67,722,190,412.82**	**0.00**	**52,332,702,992.53**

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Merupakan Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan

BUPATI MOROWALI UTARA,

Dr.dr.DELIS JULKARSON HEHI,MARS



LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
(L P – S A L)

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REFERENSI	2024	2023
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	**5.2.1**	52,332,702,992.53	190,974,549,361.64
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	**5.2.2**	52,299,328,048.49	190,873,934,975.64
3	**Sub Total (1-2)**		**33,374,944.04**	**100,614,386.00**
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	**5.2.3**	67,722,190,412.82	52,332,702,992.53
5	**Sub Total (3+4)**		**67,755,565,356.86**	**52,433,317,378.53**
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	**5.2.4**	(33,374,944.04)	(100,614,386.00)
7	**Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6)**	**5.2.5**	**67,722,190,412.82**	**52,332,702,992.53**

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Merupakan Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan

BUPATI MOROWALI UTARA,

Dr.dr.DELIS JULKARSON HEHI,MARS



N E R A C A

NERACA
PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
Per 31 Desember 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REFERENSI	2024	2023
1	**ASET**			
2	**ASET LANCAR**			
3	Kas Di Kas Daerah	5.3.1.1.1	57,388,377,822.99	43,477,573,668.94
4	Kas Di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.2	249,377,625.00	17,202,000.00
5	Kas Di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.3	6,698,555.00	435,276,242.00
6	Kas Di Badan Layanan Umum Daerah	5.3.1.1.4	9,709,774,829.24	7,968,540,362.00
7	Kas di Bendahara BOS	5.3.1.1.5	337,855,207.59	220,597,113.59
8	Kas Di Bendahara FKTP	5.3.1.1.6	30,106,373.00	213,513,606.00
9	Kas Lainnya	5.3.1.1.7	81,152,868.67	186,448,697.00
10	Piutang Pajak Daerah	5.3.1.1.8	77,685,331,624.50	78,202,695,663.50
11	Piutang Retribusi Daerah	5.3.1.1.9	41,247,825.00	82,047,825.00
12	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1.1.10	70,098,601.97	70,098,601.97
13	Piutang Transfer Antar Daerah	5.3.1.1.11	11,560,625,860.00	6,271,855,162.00
14	Penyisihan Piutang	5.3.1.1.12	(15,016,692,782.53)	(8,334,733,537.73)
15	Beban dibayar dimuka	5.3.1.1.13	2,605,789,625.00	2,467,220,984.87
16	Persediaan	5.3.1.1.14	8,763,392,194.00	10,708,889,707.33
17	**JUMLAH ASET LANCAR (3 s/d 16)**	**5.3.1.1**	**153,513,136,229.43**	**141,987,226,096.47**
18	**INVESTASI JANGKA PANJANG**			
19	Investasi Jangka Panjang Permanen			
20	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.3.1.2	25,074,641,963.00	22,936,197,963.00
21	**JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen (20)**	**5.3.1.2**	**25,074,641,963.00**	**22,936,197,963.00**
22	**JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG (21)**	**5.3.1.2**	**25,074,641,963.00**	**22,936,197,963.00**
23	**ASET TETAP**			
24	Tanah	5.3.1.3,1	104,788,561,428.00	99,870,808,551.00
25	Peralatan dan Mesin	5.3.1.3,2	510,842,336,803.99	443,916,784,251.99
26	Gedung dan Bangunan	5.3.1.3,3	936,554,676,961.87	817,801,391,584.60
27	Jalan, irigasi dan jaringan	5.3.1.3,4	1,711,908,144,151.70	1,569,798,060,994.76
28	Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3,5	15,436,098,446.00	14,227,864,046.00
29	Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3,6	82,807,703,692.84	82,046,969,848.86
30	Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3,7	(1,181,366,544,726.19)	(1,043,371,858,449.94)
31	**JUMLAH ASET TETAP (24 s/d 30)**	**5.3.1.3**	**2,180,970,976,758.21**	**1,984,290,020,827.27**
32	**ASET LAINNYA**			
33	Tuntutan Jangka Panjang	5.3.1.4.1	482,006,633.00	482,006,633.00
34	Aset Tidak Berwujud	5.3.1.4.2	2,830,422,650.00	2,651,052,950.00
35	Aset Lain-lain	5.3.1.4.3	105,509,932,425.26	102,457,734,497.26
36	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.3.1.4.4	(2,313,182,478.33)	(2,125,623,083.34)
37	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	5.3.1.4.5	(10,249,568,425.28)	(10,249,143,425.28)
38	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	5.3.1.4.6	50,615,809,000.00	196,206,290,000.00
39	**JUMLAH ASET LAINNYA (33 s/d 38)**	**5.3.1.4**	**146,875,419,804.65**	**289,422,317,571.64**
40	**JUMLAH ASET (17+22+31+39)**	**5.3.1**	**2,506,434,174,755.29**	**2,438,635,762,458.38**

NO	URAIAN	REFERENSI	2024	2023
41	**KEWAJIBAN**			
42	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**			
43	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1	81,146,123.67	147,384,772.00
44	Utang Bunga	5.3.2.2	218,339,489.00	308,686,840.00
45	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	5.3.2.3	48,836,405,892.00	48,836,405,892.00
46	Utang Belanja	5.3.2.4	1,361,889,071.20	398,005,698.06
47	Utang Jangka Pendek Lainnya		0.00	471,543,567.00
48	**JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK (43 s/d 47)**	**5.3.2**	**50,497,780,575.87**	**50,162,026,769.06**
49	**KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**			
50	Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	5.3.2.5	69,184,939,605.00	118,021,345,497.00
51	**JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG (50)**	**5.3.2**	**69,184,939,605.00**	**118,021,345,497.00**
52	**JUMLAH KEWAJIBAN (48+51)**	**5.3.2**	**119,682,720,180.87**	**168,183,372,266.06**
53	**EKUITAS**			
54	Ekuitas	5.3.3	2,386,751,454,574.42	2,270,452,390,192.32
55	**JUMLAH EKUITAS (54)**	**5.3.3**	**2,386,751,454,574.42**	**2,270,452,390,192.32**
56	**JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (52+55)**	**5.3.3**	**2,506,434,174,755.29**	**2,438,635,762,458.38**

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Merupakan Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan

BUPATI MOROWALI UTARA,

Dr.dr.DELIS JULKARSON HEHI,MARS



LAPORAN OPERASIONAL (L O)

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REFERENSI	SALDO 2024	SALDO 2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	**PENDAPATAN - LO**					
2	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO**					
3	Pendapatan Pajak Daerah - LO	5.4.1.1.1	74,038,595,779.00	80,559,929,792.20	(6,521,334,013.20)	(8.10)
4	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	5.4.1.1.2	22,004,929,269.00	33,910,237,686.00	(11,905,308,417.00)	(35.11)
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	5.4.1.1.3	5,229,148,166.00	3,864,163,872.00	1,364,984,294.00	35.32
6	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	5.4.1.1.4	64,143,014,238.99	59,514,298,734.42	4,628,715,504.57	7.78
7	**Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO (3 s/d 6)**	**5.4.1.1**	**165,415,687,452.99**	**177,848,630,084.62**	**(12,432,942,631.63)**	**(6.99)**
8	**PENDAPATAN TRANSFER - LO**					
9	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	5.4.1.2.1	1,131,717,230,248.00	1,109,428,785,683.00	22,288,444,565.00	2.01
10	Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO	5.4.1.2.2	55,132,104,364.00	43,848,667,931.00	11,283,436,433.00	25.73
11	**Jumlah Pendapatan Transfer - LO (9 s/d 10)**	**5.4.1.2**	**1,186,849,334,612.00**	**1,153,277,453,614.00**	**33,571,880,998.00**	**2.91**
12	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO**					
13	Pendapatan Hibah - LO	5.4.1.3.1	36,395,000.00	798,122,902.00	(761,727,902.00)	(95.44)
14	Lain - lain Pendapatan Sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang undangan - LO	5.4.1.3.2	8,277,095,762.00	0.00	8,277,095,762.00	
15	**Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO (13 s/d 14)**	**5.4.1.3**	**8,313,490,762.00**	**798,122,902.00**	**7,515,367,860.00**	**941.63**
16	**Jumlah Pendapatan - LO (7+11+15)**	**5.4.1**	**1,360,578,512,826.99**	**1,331,924,206,600.62**	**28,654,306,226.37**	**2.15**
17	**BEBAN - LO**					
18	Beban Pegawai	5.4.2.1	497,582,380,767.00	425,231,570,909.00	72,350,809,858.00	17.01
19	Beban Barang dan Jasa	5.4.2.2	382,061,489,250.82	350,755,548,972.15	31,305,940,278.67	8.93
20	Beban Bunga	5.4.2.3	8,532,517,820.00	11,065,804,150.00	(2,533,286,330.00)	(22.89)
21	Beban Hibah	5.4.2.4	58,682,833,607.99	25,369,825,466.00	33,313,008,141.99	131.31
22	Beban Bantuan Sosial	5.4.2.5	28,282,087,055.00	31,965,226,788.26	(3,683,139,733.26)	(11.52)
23	Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.6	6,682,168,494.80	1,110,246,240.42	5,571,922,254.38	501.86
24	Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.4.2.7	149,648,534,546.18	136,930,964,996.64	12,717,569,549.54	9.29
25	Beban Bagi Hasil	5.4.3.1	0.00	933,454,571.00	(933,454,571.00)	(100.00)
26	Beban Bantuan Keuangan	5.4.3.2	116,869,929,862.00	103,583,030,310.00	13,286,899,552.00	12.83
27	Beban Tidak Terduga	5.4.3.2	407,476,000.00	-	407,476,000.00	0.00
28	**Jumlah Beban (18 s/d 27)**	**5.4.2**	**1,248,749,417,403.79**	**1,086,945,672,403.47**	**161,803,745,000.32**	**14.89**
29	**SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (16 - 28)**		**111,829,095,423.20**	**244,978,534,197.15**	**(133,149,438,773.95)**	**(54.35)**
30	**KEGIATAN NON OPERASIONAL - LO**					
31	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO	5.4.5	2,860,463,600.00	1,153,895,200.00	1,706,568,400.00	147.90
32	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	5.4.5	209,250.00	639,580.00	(430,330.00)	(67.28)
33	**Jumlah Kegiatan Non Operasional (31 s/d 32)**	**5.4.5**	**2,860,672,850.00**	**1,154,534,780.00**	**1,706,138,070.00**	**147.78**
34	**DEFISIT NON OPERASIONAL - LO**					
35	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO	5.4.6	667,936,548.00	0.00	667,936,548.00	
36	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO		0.00	3,240,225.00	(3,240,225.00)	(100.00)
37	**Jumlah Defisit Non Operasional (35 s/d 36)**	**5.4.6**	**667,936,548.00**	**3,240,225.00**	**664,696,323.00**	**20,513.89**
38	**SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (33 - 37)**	**5.4.6**	**2,192,736,302.00**	**1,151,294,555.00**	**1,041,441,747.00**	**90.46**
39	**SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (29 + 38)**	**5.4.6**	**114,021,831,725.20**	**246,129,828,752.15**	**(132,107,997,026.95)**	**(53.67)**
40	**POS LUAR BIASA - LO**					
41	Beban Luar Biasa	5.4.6	0.00	140,000,000.00	(140,000,000.00)	(100.00)
42	**SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA**	**5.4.6**	**-**	**(140,000,000.00)**	**140,000,000.00**	**(100.00)**
43	**SURPLUS/DEFISIT - LO (39 + 42)**	**5.4.7**	**114,021,831,725.20**	**245,989,828,752.15**	**(131,967,997,026.95)**	**(53.65)**

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Merupakan Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan

BUPATI MOROWALI UTARA,

Dr.dr.DELIS JULKARSON HEHI,MARS



L A P O R A N A R U S K A S (L A K)

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

LAPORAN ARUS KAS

Per 31 Desember 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REFERENSI	2024	2023
1	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI**			
2	ARUS MASUK KAS			
3	Penerimaan Pajak Daerah	5.5.1.1	74,555,959,818.00	35,305,535,224.00
4	Penerimaan Retribusi Daerah	5.5.1.1	22,045,729,269.00	34,769,349,686.00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	5.5.1.1	5,229,148,166.00	3,864,163,872.00
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	5.5.1.1	64,143,014,238.99	59,514,298,734.42
7	Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat	5.5.1.1	1,386,889,373,248.00	1,031,790,449,328.00
8	Penerimaan Transfer Pemerintah Daerah	5.5.1.1	49,843,333,666.00	42,411,481,100.00
9	Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.5.1.1	8,277,095,762.00	0.00
10	***Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 9)***	**5.5.1.1**	**1,610,983,654,167.99**	**1,207,655,277,944.42**
11	ARUS KELUAR KAS			
12	Pembayaran Pegawai	5.5.1.2	497,246,280,767.00	425,231,570,909.00
13	Pembayaran Barang dan Jasa	5.5.1.2	418,957,792,995.49	376,440,314,339.00
14	Pembayaran Bunga	5.5.1.2	8,622,865,171.00	10,757,117,310.00
15	Pembayaran Belanja Hibah	5.5.1.2	58,682,833,607.99	22,516,369,666.00
16	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	5.5.1.2	28,481,937,055.00	33,215,227,288.26
17	Pembayaran Tak Terduga	5.5.1.2	1,157,886,000.00	140,000,000.00
18	Pembayaran Bagi Hasil	5.5.1.2	0.00	933,454,571.00
19	Pembayaran Bantuan Keuangan kepada Desa	5.5.1.2	226,451,591,862.00	214,140,316,018.00
20	***Jumlah Arus Keluar Kas (12 s/d 19)***	**5.5.1.2**	**1,239,601,187,458.48**	**1,083,374,370,101.26**
21	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (10-20)**	**5.5.1**	**371,382,466,709.51**	**124,280,907,843.16**
22	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI**			
23	ARUS MASUK KAS			
24	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	5.5.2.1	2,860,463,600.00	1,153,895,200.00
25	***Jumlah Arus Masuk Kas (24)***	**5.5.2.1**	**2,860,463,600.00**	**1,153,895,200.00**
26	ARUS KELUAR KAS			
27	Perolehan Tanah	5.5.2.2	1,963,260,000.00	1,110,890,900.00
28	Perolehan Peralatan dan Mesin	5.5.2.2	76,216,049,055.00	36,930,658,470.00
29	Perolehan Gedung dan Bangunan	5.5.2.2	88,382,929,824.18	80,182,171,788.27
30	Perolehan Jalan,Irigasi dan Jaringan	5.5.2.2	141,028,364,474.00	113,670,285,431.00
31	Perolehan Aset Tetap Lainnya	5.5.2.2	254,614,700.00	94,125,000.00
32	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.5.2.2	2,138,444,000.00	3,500,000,000.00
33	***Jumlah Arus Keluar Kas (27 s/d 32)***	***5.5.2.2***	**309,983,662,053.18**	**235,488,131,589.27**
34	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (25-33)**	**5.5.2**	**(307,123,198,453.18)**	**(234,334,236,389.27)**
35	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN**			
36	ARUS MASUK KAS			
37	Penerimaan Pinjaman Daerah		0.00	0.00
38	***Jumlah Arus Masuk Kas (37)***		**0.00**	**0.00**
39	ARUS KELUAR KAS			
40	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Jatuh Tempo	5.5.3.1	48,836,405,892.00	28,487,903,437.00
41	***Jumlah Arus Keluar Kas (40)***	**5.5.3.1**	**48,836,405,892.00**	**28,487,903,437.00**
42	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (38 - 41)**	**5.5.3**	**(48,836,405,892.00)**	**(28,487,903,437.00)**
43	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS**			
44	ARUS MASUK KAS			
45	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) BUD	5.5.4.1	109,343,513,811.50	81,154,234,484.90
46	***Jumlah Arus Masuk Kas (45)***	**5.5.4.1**	**109,343,513,811.50**	**81,154,234,484.90**
47	ARUS KELUAR KAS			
48	Pembayaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) BUD	5.5.4.2	109,343,513,811.50	81,154,234,484.90
49	***Jumlah Arus Keluar Kas (48)***	***5.5.4.2***	**109,343,513,811.50**	**81,154,234,484.90**

NO	URAIAN	REFERENSI	2024	2023

50	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (46 - 49)**	**5.5.4**	**-**	**-**
51	**Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode (21+34+42+50)**	**5.5.5**	**15,422,862,364.33**	**(138,541,231,983.11)**
52	**Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran & Kas di Bendahara Penerimaan (53 s/d 58)**	**5.5.6**	**52,332,702,992.53**	**190,974,549,361.64**
53	Saldo Awal Kas di BUD	5.5.6	43,477,573,668.94	188,662,223,511.05
54	Saldo Awal Kas di Bendahara Penerimaan	5.5.6	17,202,000.00	578,627,154.00
55	Saldo Awal Kas di Bendahara Pengeluaran	5.5.6	435,276,242.00	2,669,709.00
56	Saldo Akhir Kas di Badan Layanan Umum Daerah	5.5.6	7,968,540,362.00	0.00
57	Saldo Awal Kas Di Bendahara BOS	5.5.6	220,597,113.59	1,429,903,790.59
58	Saldo Awal Kas Di Bendahara Puskesmas FKTP	5.5.6	213,513,606.00	301,125,197.00
59	**Koreksi SILPA**	5.5.6	**(33,374,944.04)**	**(100,614,386.00)**
60	**Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran & Kas di Bendahara Penerimaan**	**5.5.7**	**67,722,190,412.82**	**52,332,702,992.53**
61	Saldo Akhir Kas di BUD	5.5.7	57,388,377,822.99	43,477,573,668.94
62	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	5.5.7	249,377,625.00	17,202,000.00
63	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	5.5.7	6,698,555.00	435,276,242.00
64	Saldo Akhir Kas di Badan Layanan Umum Daerah	5.5.7	9,709,774,829.24	7,968,540,362.00
65	Kas Di Bendahara BOS	5.5.7	337,855,207.59	220,597,113.59
66	Kas Di Bendahara Puskesmas FKTP	5.5.7	30,106,373.00	213,513,606.00
67	**Saldo Akhir Kas (61 s/d 66)**	**5.5.7**	**67,722,190,412.82**	**52,332,702,992.53**

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Merupakan Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan

BUPATI MOROWALI UTARA,

Dr.dr.DELIS JULKARSON HEHI,MARS



L A P O R A N P E R U B A H A N E K U I T A S
(L P E)

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REFERENSI	2024	2023
1	**EKUITAS AWAL**	5.6.1	**2,270,452,390,192.32**	**2,024,706,773,521.61**
2	**SURPLUS/DEFISIT-LO**	5.6.2	**114,021,831,725.20**	**245,989,828,752.15**
3	**DAMPAK KOMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR**			
4	**Koreksi ekuitas/ Lain-lain**	5.6.3	2,277,232,656.90	(244,212,081.44)
5	**EKUITAS AKHIR**	**5.6.4**	**2,386,751,454,574.42**	**2,270,452,390,192.32**

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Merupakan Bagian Yang Tidak Terpisahkan dari Laporan Keuangan Secara Keseluruhan

BUPATI MOROWALI UTARA,

Dr.dr.DELIS JULKARSON HEHI,MARS



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Ca L K)

BAB I

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Pemberian otonomi tersebut bermaksud untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

Untuk mencapai tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah harus berpedoman kepada asas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yaitu kepastian hukum, tertib penyelenggara negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan keadilan.

Dalam rangka mewujudkan amanat otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Morowali Utara telah merencanakan Pembangunan jangka menengah yang tertuang melalui Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 7 Tahun 2021 tentangRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026, dengan Visi **"Terwujudnya Masyarakat Morowali Utara yang Sehat, Cerdas, Sejahtera"** dan Misi Kabupaten Morowali Utara yaitu:

1. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pelayanan kesehatan
2. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber dayayang unggul dan berdaya saing
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis potensi wilayah
4. Meningkatkan Infrastruktur dan sarana untuk menunjang konektivitas dan penataanwilayah
5. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, dalamrangka tata kelola pemerintahan yang baik.

Selanjutnya untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai Rencana Kerja Tahunan yang menjadi acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Morowali Utara.

Berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pelaksanaan tugas dan wewenang Pengelola Keuangan Daerah dapat melibatkan informasi, aliran data, penggunaan danpenyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik dan disajikan dalam bentuk ilustrasi dokumen berupa contoh yang menggambarkan kebutuhan informasi yang bersifat dinamis dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, telah menetapkan Pembagian Kewenangan *(power sharing)* dan Pembagian Keuangan *(financial sharing)*
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Setiap Pemerintah Daerah diberikankebebasan dan kewenangan penuh untuk melaksanakan dan mengelola kegiatan Pemerintahan secara mandiri, dengan tujuan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan di segala bidang secara merata.

Sesuai dengan azas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik *"Good Governance"* salah satunya adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Azas tersebut juga merupakan komitmen dari Pemerintah Kabupaten Morowali Utara sebagaimana disebutkan dalam Visi dan Misi yaitu terwujudnya Masyarakat Morowali Utara Yang Sehat, Cerdas, Sejahtera.

Pemerintah Kabupaten Morowali Utara berusaha untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pembangunan dan penganggaran daerah diantaranya dengan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi Pemerintahan Daerah. Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mengharuskan Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang- undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan dapat diwujudkan.

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten MorowaliUtara Berbasis Akrual Tahun 2024 adalah:

1) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Morowali Utara disusun untuk memenuhi ketentuan peraturan perundangan bidang pengelolaankeuangan daerah, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

   Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara menyajikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), Laporan Arus Kas (LAK), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
2) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Morowali Utara terutama digunakan sebagai sarana pertanggungjawaban Kepala Daerah atas pelaksanaan Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sebagai wujud transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dalam hal tata Kelola pemerintahan yang baik. Tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik. Selain itu juga untuk menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih atau kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit laporan operasional, aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas Pemerintah Daerah.
3) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai yang mempengaruhi penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara sehingga Catatan atas Laporan Keuangan membantu pembacanya untuk dapat memahami kondisi dan posisi keuangan entitas pelaporan secara keseluruhan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah KabupatenMorowali Utara Tahun 2024 meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan serta Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar AkuntansiPemerintah (SAP);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan KeuanganDaerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Daerah Morowali Utara Nomor 6Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
17. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 23 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
18. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
19. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 01 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
20. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 09 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 23 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; dan
21. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 09 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 23 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali UtaraBerbasis Akrual Tahun Anggaran 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN
- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II : EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DANPENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD
- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Tingkat Kemiskinan
- 2.3. Tingkat Pengangguran Terbuka
- 2.4. Kebijakan Keuangan

2.5. Kebijakan Keuangan
2.6. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III : IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan
3.2. Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target Kinerja Keuangan

BAB IV : KEBIJAKAN AKUNTANSI
4.1. Entitas Pelaporan
4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
4.4. Kebijakan Akuntansi Kewajiban
4.5. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap
4.6. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya
4.7. Kebijakan Akuntansi Persediaan
4.8. Kebijakan Akuntansi Beban
4.9. Kebijakan Akuntansi Transfer
4.10. Kebijakan Akuntansi Piutang
4.11. Kebijakan Akuntansi Investasi
4.12. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan
4.13. Laporan Operasional
4.14. Koreksi Kesalahan
4.15. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam SAP
4.16. Kebijakan Akuntansi Tertentu

BAB V : PENJELASAN POS - POS LAPORAN KEUANGAN
5.1. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
5.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP- SAL)
5.3. Neraca
5.4. Laporan Operasional (LO)
5.5. Laporan Arus Kas (LAK)
5.6. Laporan Perubahan Ekuitas
5.7. Pengungkapan Lainnya Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara
5.8. Dana Tugas Pembantuan
5.9. Standar Pelayanan Minimal (SPM)
5.10. Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)
5.11. Aset Tetap Fisik yang tidak ditemukan
5.12. Realisasi Pendapatan dan Belanja Dana Bantuan Operasional Daerah (BOSDA)

BAB VI: PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN
6.1. Domisili dan Bentuk Hukum Entitas Pelaporan
6.2. Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas
6.3. Pemimpin Lembaga Legislatif
6.4. Pemimpin Lembaga Eksekutif
6.5. Tugas Pokok Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara
6.6. Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah Kabupaten MorowaliUtara
6.7. Penjelasan tentang Kewajiban Kontingensi

BAB VII : PENUTUP

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Ekonomi Makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi Makro dapat digunakan sebagai alat Pemerintah untuk menganalisis cara terbaik dalam mempengaruhi target-target kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan, menstabilkan keadaan perekonomian, meratakan distribusi pendapatan, mengembangkan kapasitas produksi, membuat neraca pembayaran seimbang, meningkatkan kesempatan kerja, dan mengendalikan inflasi. Dalam upaya peningkatan kehidupan ekonomi, individu dan anggota masyarakat tidak lagi hanya tergantung pada peranan pasar sektor swasta. Peran pemerintah dan mekanisme pasar (interaksi permintaan dan penawaran pasar) merupakan hal yang bersifat komplementer (bukan substitusi) dengan pelaku ekonomi lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Morowali Utara sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 - 2026 sebagai ukuran pencapaian Visi dan Misi Daerah yang terdiri atas beberapa indikator yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Rata-rata Harapan Lama Sekolah (HLS), Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Usia Harapan Hidup (UHH), Persentase Penduduk Miskin, Gini Ratio, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Nilai Tukar Petani, Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah, Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi tanggap darurat bencana, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Kemajuan perekonomian adalah suatu proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai baik selama jangka waktu tertentu. Kemajuan perekonomian di Kabupaten Morowali Utara secara makro dengan memperhatikan beberapa hal:

1. Menciptakan lapangan pekerjaan yang mampu meminimalisir tingginya pengangguran yang akan membawa dampak buruk bagi perekonomian suatu negara.
2. Menciptakan kemampuan produksi dan penghasilan Masyarakat untuk menunjang perekonomian rumah tangga.
3. Pemerataan pendapatan terhadap hasil olahan sumber daya alam dan sumber daya manusia sehingga mampu meningkatkan tingkat konsumsi atau daya beli Masyarakat.

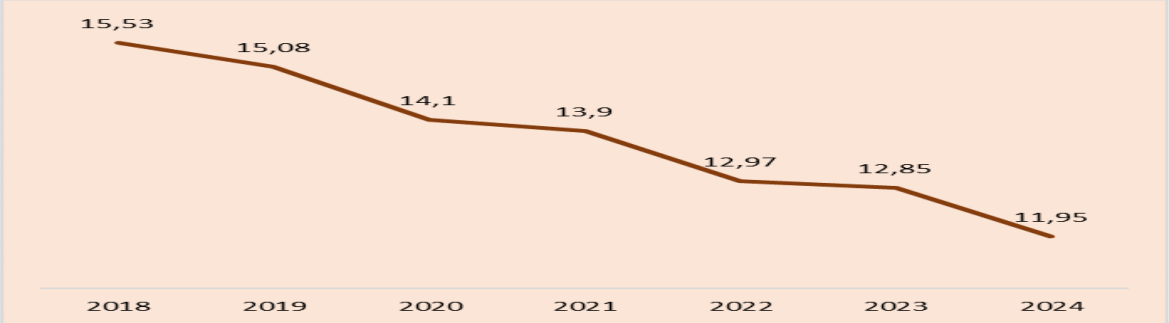
2.2 Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu dasar penentuan Tingkat kesejahteraan masyarakat. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Secara umum gambaran kemiskinan dapat dilihat dari data konsumsi rumah tangga yang dibagi menjadi dua kelompok, yaitu konsumsi pengeluaran makanan dan bukan makanan, tingkat kebutuhan permintaan (*demand*) terhadap pengeluaran tersebut pada dasarnya berbeda. Dalam kondisi pendapatan terbatas, terdapat kecenderungan untuk mendahulukan kebutuhan makanan, sehingga pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah akan terlihat bahwa sebagian besar pendapatan mereka digunakan untuk mengkonsumsi makanan.

Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2023 jumlah penduduk miskin yaitu pada angka 556.204 atau 12.85 % dengan jumlah jiwa 17.660 jiwa. Dan pada tahun 2024 tingkat kemiskinan berada pada angka 594.137. Adapun persentase penduduk miskin pada tahun 2024 mengalami penurunan yaitu sebesar 11,95 % dari seluruh penduduk Kabupaten Morowali Utara.

Prosentase penduduk misikin di Kabupaten Morowali Utara Tahun 2018 – 2024 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.1
Prosentase Penduduk Miskin
di Kabupaten Morowali Utara 2018 – 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Kab.Morowali Utara

Hal ini disebabkan karena pendapatan ekonomi rakyat semakin meningkat yang didukung sektor pertambangan sehingga membantu masyarakat dibidang usaha kecil, menengah sehingga membuka lapangan pekerjaan. Penurunan tingkat kemiskinan dari Tahun 2018 - 2024 dapat di sajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Garis Kemiskinan, Jumlah, Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Morowali Utara, 2018-2024

Tahun	Garis Kemiskinan (jiwa)	Penduduk Miskin (Jiwa)	
		Jumlah (jiwa)	Persentase
2018	412.942	91.401	15,53
2019	441.554	19.250	15,08
2020	474.170	18.380	14,1
2021	486.511	18.400	13,9
2022	507.523	17.490	12,58
2023	556.204	17.660	12,85
2024	594.137	16.740	11,95

Sumber: *Badan Pusat Statistik Kab.Morowali Utara*

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah (ribu) 2023 – 2024

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin		Presentase Penduduk Miskin	
	2023	2024	2023	2024
Banggai Kepulauan	15.50	18.86	12.90	12.32
Banggai	27.38	26.21	6.94	6.56
Morowali	15.75	14.99	12.31	11.55
Poso	41.48	39.63	15.16	14.23
Donggala	50.37	47.68	16.25	15.30
Toli – Toli	31.13	30.39	12.85	12.45
Buol	23.13	23.05	13.36	13.08
Parigi Moutong	77.18	74.57	14.91	14.20
Tojo Una – Una	26.51	26.12	16.74	16.36

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin		Presentase Penduduk Miskin	
	2023	2024	2023	2024
Sigi	31.47	29.80	12.83	12.06
Banggai Laut	11.27	11.16	14.15	13.78
Morowali Utara	**17.66**	**16.74**	**12.85**	**11.95**
Palu	26.83	24.57	6.56	5.94
Sulawesi Tengah	395.66	379.76	12.41	11.77

Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Tengah

2.3 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap angkatan kerja. Pengangguran merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran, yaitu: penduduk yang aktif mencari pekerjaan, penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Salah satu indikator yang biasa digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraanmasyarakat adalah laju pertumbuhan angkatan kerja yang terserap pada lapangan pekerjaan. Tingginya angkatan kerja di suatu daerah secara langsung dapat menggerakkan perekonomian daerah baik perkotaan maupun pedesaan. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat apakah benar-benar digerakkan oleh produksi yang melibatkan tenaga kerja yang ada di daerah atau karena pengaruh faktor lain.

Pada tahun 2024 tercatat penduduk yang bekerja di Kabupaten Morowali Utara sebanyak 64.838 orang, pengangguran sebanyak 1.578 orang dan yang bukan angkatan kerja sebanyak 27.986 orang.

Tabel 2.3
Jumlah Penduduk Angkatan Kerja, Bukan Angkatan Kerja dan Jenis Kegiatan di Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024

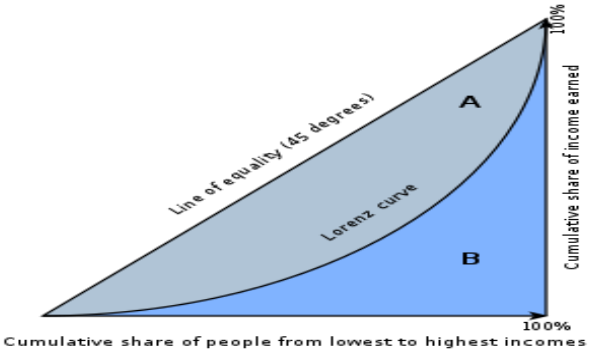
Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Angkatan Kerja	**41.960**	**24.456**	**66.416**
Bekerja	40.981	23.857	64.838
Pengangguran Terbuka	979	599	1.578
Bukan Angkatan Kerja	**7.567**	**20.419**	**27.986**
Sekolah	4.172	4.307	8.479
Mengurus Rumah Tangga	1.638	15.168	16.806
Lainnya	1.757	944	2.701
Jumlah	**49.527**	**44.857**	**94.402**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab.Morowali Utara

2.3.1 Indeks Gini (*Gini Ratio*)

Indeks Gini *atau Gini Ratio* adalah merupakan alat analisis yang digunakan untukmenghitung atau mengukur ketimpangan pendapatan masyarakat suatu negara atau suatu daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada *Kurva Lorenz* yaitu kurva yang menggambarkan gabungan antara titik-titik pendapatan seseorang dengan total populasi. Dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.1
Kurva Lorenz



Untuk menghitung ratio gini menggunakan metode *Kurva Lorenz,* dengan rumus : G = A /(A + B).

Nilai *Indeks Gini* berada diantara 0 sampai dengan 1 dimana:

a. Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama;
b. Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Meskipun mengukur ketimpangan pendapatan, namun perlu diingat bahwa indikator ini tidak mengukur ketimpangan kesejahteraan (*wealth*) secara keseluruhan. Hal ini mengingat indikator kesejahteraan relatif lebih susah dihitung dibandingkan dengan pendapatan.

Tabel 2.4
Indeks Gini Ratio Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah Tahun 2023-2024

Kabupaten / Kota	Gini Ratio	
	2023	2024
Sulawesi Tengah	0.304	0,301
Banggai Kepulauan	0.272	0,276
Banggai	0.283	0,316
Morowali	0.281	0,275
Poso	0.265	0,247
Donggala	0.237	0,251
Toli – Toli	0.345	0,277
Buol	0.258	0,266
Parigi Moutong	0.298	0,25
Tojo Una – Una	0.262	0,244
Sigi	0.281	0,246
Banggai Laut	0.244	0,221
Morowali Utara	0.284	0,245
Kota Palu	0.324	0,337

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Pada Tahun 2024, Indeks Gini Ratio tertinggi di Kota Palu 0,337. Sedangkan Kabupaten Morowali Utara berada pada urutan ke-11 yaitu 0,245 serta beberapa daerah dengan indeks Gini Ratio terendah adalah Kabupaten Donggala dan Kabupaten Banggai Laut yaitu 0,221.

2.3.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah suatu Indeks Komposit yang diharapkan mampu mencerminkan kinerja pembangunan manusia, sehingga dapat dibandingkan antar wilayah dan menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Dapat terlihat dari tiga indikator utama yaitu kesehatan, pendidikan dan daya beli. Sumber Daya Manusia berkualitas ditandai dengan semakin meningkatnya IPM.

Peningkatan IPM Tahun 2024, Kabupaten/Kota, yaitu Kabupaten Morowali terbesar 74,36 dan Kabupaten Morowali Utara berada di urutan ke-empat sebesar 71,64 sedangkan Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk terendah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan sebanyak 67,65.

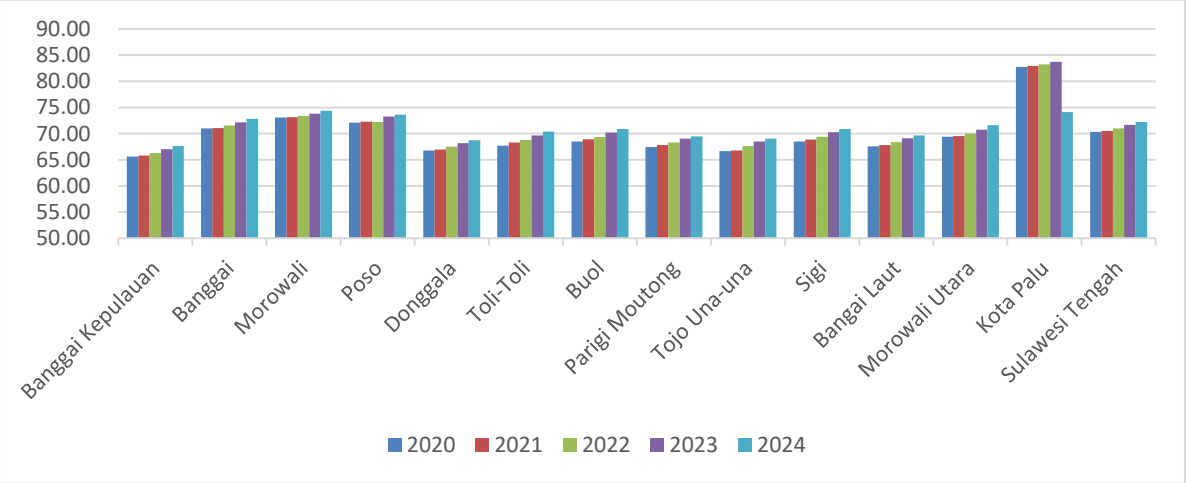
Tabel 2.5
Posisi Peringkat IPM Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 – 2024

Kabupaten / Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Banggai Kepulauan	65.61	65.82	66.30	67.05	67.65
Banggai	71.01	71.09	71.58	72.19	72.86
Morowali	73.06	73.12	73.39	73.82	74.36
Poso	72.10	72.27	72.25	73.25	73.65
Donggala	66.80	66.96	67.49	68.17	68.71
Toli-Toli	67.70	68.31	68.77	69.68	70.38
Buol	68.49	68.92	69.37	70.18	70.89
Parigi Moutong	67.46	67.84	68.29	69.06	69.48
Tojo Una-una	66.67	66.81	67.62	68.47	69.04
Sigi	68.48	68.84	69.40	70.28	70.90
Bangai Laut	67.60	67.82	68.40	69.12	69.65
Morowali Utara	69.42	69.52	70.02	70.74	71.64
Kota Palu	82.74	82.96	83.26	83.71	74.12
Sulawesi Tengah	**70.31**	**70.54**	**71.01**	**71.66**	**72.24**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab.Morowali Utara

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Morowali Utara sangat ditentukan oleh capaian tiga dimensi dasar pembangunan manusia. Dilihat dari tingkatannya, ternyataIndeks Pembangunan Manusia dari komponen angka harapan hidup, daya beli, pendidikan terjadi peningkatan. Peningkatan tertinggi dicapai indeks pendidikan, indeks kesehatan dan indeks daya beli.

Grafik 2.2
Posisi Peringkat IPM Kabupaten / Kota Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 - 2024



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Realisasi pencapaian IPM kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 mencapai 71,64 dibandingkan Tahun 2023 sebesar 70,74 mengalami kenaikan sebesar 0,9. Namun demikian capaian IPM Kabupaten Morowali Utara masih lebih rendah dibandingkan Provinsi Sulawesi Tengah pada angka 72,24.

2.3.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Laju pertumbuhan ekonomi adalah ukuran pertumbuhan ekonomi dari satu periode ke periode lain menggunakan persentase. Ukuran ini tidak menyesuaikan inflasi, namun dinyatakan dalam istilah normal. Tingkat pertumbuhan ekonomi menunjukkan perubahan pendapatan suatu negara atau ekonomi yang lebih besar, selama periode waktu tertentu.

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dengan membandingkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun aktif dengan tahun sebelumnya. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu.

PDRB atas dasar harga konstan 2010 Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Distribusi terbesar yaitu pada sektor pertambangan dan penggalian yakni sebesar 33.76%

Tabel 2.6
Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Morowali Utara (Persen), 2020–2024

Kabupaten / Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing	31,52	29,55	20,17	16,99	17,1
Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	32,85	33,55	43,91	38,61	33,76
Industri Pengolahan/ Manufacturing	2,51	4,6	12,57	24,22	29,79
Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities	0,06	0,05	0,04	0,03	0,03
Konstruksi/Construction	16,08	16,46	10,66	9,11	8,44
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	6,79	6,39	5,74	5,03	5,09

Kabupaten / Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Transportasi dan Pergudangan/ Transportation and Storage	0,24	0,32	0,69	0,59	0,58
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	0,22	0,21	0,17	0,16	0,16
Informasi dan Komunikasi/ Information and Communication	2,19	2,02	1,4	1,18	1,1
Jasa Keuangan dan Asuransi/ Financial and Insurance Activities	0,49	0,47	0,36	0,29	0,29
Real Estat/Real Estate Activities	1,67	1,52	1,08	1,05	1,03
Jasa Perusahaan/Business Activities	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	2,42	2,21	1,45	1,23	1,16
Jasa Pendidikan/Education	1,39	1,21	0,79	0,68	0,66
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	0,91	0,84	0,57	0,49	0,46
Jasa Lainnya/Other Services Activities	0,65	0,59	0,4	0,34	0,33
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber:: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

2.3.4 Inflasi

Inflasi adalah situasi yang terjadi karena adanya kenaikan harga secara umum danterus menerus. Perkembangan sektor ekonomi sangat tergantung pada kondisi fiskal dan moneter. Apabila keadaan tersebut tidak terkendali mengakibatkan tingginya inflasi, sehingga daya beli masyarakat terhadap barang menurun, atau sebagai indikasi bahwa nilai uang merosot. Laju inflasi didasarkan pada akumulasi perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) perbulan yaitu indeks rata-rata perubahan harga barang dan jasa yang di konsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu.

Ada banyak indikator yang dapat mengukur pembangunan, baik itu indikator ekonomi maupun indikator sosial. Salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan atau penurunan jumlah rumah tangga/masyarakat miskin adalah Inflasi. Naiknya inflasi menyebabkan harga-harga semakin meningkat dan membebani daya beli masyarakat Kabupaten Morowali Utara. Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Morowali Utara Tingkat Inflasi Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 tidak didata dengan kategori ringan/sedang/berat/sangat berat sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.7
Tingkat Inflasi Kabupaten Morowali Utara

Uraian	2021	2022	2023	2024	Ket.
Tingkat Inflasi Kabupaten	*	*	*	*	(* belum dirilis)
Tingkat Inflasi Provinsi (%)	*	*	*	*	(* belum dirilis)
Tingkat inflasi Nasional (%)	*	*	*	*	(* belum dirilis)

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Pada Tahun 2023 dan Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Morowali Utara belum melakukan perhitungan untuk menghitung angka inflasi sebagaimana tahun sebelumnya. Tingkat pengendalian inflasi di Kabupaten Morowali Utara dapat dikatakan berhasil. Hal ini terlihat dari keberhasilan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang mampu menekan angka inflasi dan tetap menjaga kemampuan daya beli masyarakat di Kabupaten Morowali Utara.

2.3.5 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB -ADHB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik Atas Dasar Barga Berlaku (PDRB-ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (PDRB- ADHK). PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir (neto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Selain itu nilai PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui nilai produk yang dihasilkan oleh seluruh faktor produksi dan mengetahui kondisi struktur perekonomian Kabupaten Morowali Utara. Ada dua cara penilaian yang dilakukan dalam perhitungan PDRB yaitu atas Dasar Harga Berlaku dan atas Dasar Harga Konstan.

PDRB-ADHB menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedang PDRB-ADHK menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran dan struktur ekonomi suatu daerah.

Untuk Menyusun PDRB digunakan dua pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya sedangkan menurut pengeluaran terdiri atas tujuh komponen yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi LNRT, pengeluaran konsumsi pemerintah,pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori, eksport barang dan jasa dan impor barang dan jasa.

Tabel 2.8
Produk Persentase Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021 – 2024

Pengeluaran	2021	2022	2023	2024
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,43	10,57	2,03	4,05
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,17	6,95	4,32	12,88
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3,57	0,88	2,84	5,02
Pembentukkan Modal Tetap Bruto	95,97	444,61	1,32	3,31
Perubahan Inventori	-	-	-	-
Net Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-	-
Produk Domestik Regional Bruto	**10,56**	**36,37**	**23,04**	**14,03**

Sumber : BPS Kabupaten Morowali Utara

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dengan membandingkan ProdukDomestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun aktif dengan tahun sebelumnya. PDRB atas dasar harga konstan Tahun 2010 Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel 2.9 berikut:

Tabel 2.9

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan 2010 MenurutLapanganUsaha (persen) di Kabupaten Morowal Utara Tahun 2020−2024

Kategori	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-1.12	4.32	3.57	2.02	3.64
B	Pertambangan dan Pengalihan	1.69	10.28	56.73	13.30	7.88
C	Industri Pengolahan	3.89	91.32	264.21	173.48	45.27
D	Pengadaaan Listrik dan Gas	7.16	4.27	5.77	5.03	4.50
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan LImbah Daur Ulang	-0.10	5.15	2.81	1.74	4.59
F	Kontruksi	-.3.74	18.73	1.97	2.19	1.13
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-6.19	7.51	37.21	6.19	9.50
H	Transportasi dan Pergudangan	-27.92	46.02	221.10	2.97	16.17
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-10.17	10.52	26.33	11.11	16.14
J	Informasi dan Komunikasi	8.96	7.74	11.07	6.22	5.76
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6.49	10.55	12.72	0.44	12.37
L	Real Estate	0.17	3.10	12.62	12.40	11.92
M	Jasa Perusahaan	-1.98	7.57	12.39	5.02	4.11
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0.52	5.23	2.03	1.84	3.97
O	Jasa Pendidikan	-0.11	1.27	2.91	3.64	5.61
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5.74	3.61	3.30	2.87	5.65
Q	Jasa Lainnya	-0.28	4.12	6.32	5.12	8.35
	Poduk Domestik Regional Bruto	**-23**	**10.56**	**36.37**	**23.04**	**14.03**

Sumber : BPS Pusat Statistik Kab.Morowali Utara
*Catatan :*Angka Sementara,**Angka Sangat Sementara*

Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor industri pengolahan yakni sebesar 45.27%, diikuti oleh sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 16,17%. Kontribusi sektoral dapat dilihat dari PDRB menurut harga berlaku. Sektor penyumbang PDRB terbesar dari tahun ke tahun mengalami perubahan, dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menjadi sektor pertambangan dan penggalian dan industri pengolahan.

2.4 *Mandatory Spending*

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang, yang bertujuan untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Program dan kegiatan yang diimplementasikan harus secara tegas berorientasi kepada layanan. Perencanaan dan pelaksanaan harus mengutamakan pelayanan dengan memastikan bahwa belanja untuk program dan kegiatan harus senyatanya berorientasi layanan kepada masyarakat. Mandatory spending yang besarannya telah diatur oleh ketentuan perundang-undangan antara lain sebagai berikut.

1. Belanja Pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan);
2. Belanja Infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/ atau transfer kepada daerah dan/atau desa., dan belanja pegawai

(Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah);

3. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah (UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa);
4. Belanja Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa);
5. Belanja Pengawasan pada pemerintah kabupaten/kota (Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024):
    a. sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) paling sedikit sebesar 1,00% (satu persen) dari total belanja daerah;
    b. diatas Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan
    c. diatas Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Hasil perhitungan mandaroty spending pada kabupaten morowali utara dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.10
Mandatory Spending

Bidang	Anggaran		Realisasi		Kriteria	Kesimpulan
	Nilai (Rp)	Persentase	Nilai (Rp)	Persentase		
Pendidikan	320.009.547.430,00	19,21%	270.295.115.249,00	17,47%	20,00%	Tidak Memenuhi Mandatory Spending
Infrastruktur	381.806.719.880,82	37,18%	347.655.940.030,00	33,32%	40,00%	Tidak Memenuhi Mandatory Spending
Transfer Desa	944.103.854,00	0,60%	0	0,00%	10,00%	Tidak Memenuhi Mandatory Spending
ADD	92.307.586.898,00	8,25%	80.602.288.885,00	7,17%	10,00%	Tidak Memenuhi Mandatory Spending
Pengawasan	16.409.972.099,00	0,99%	14.929.915.776,00	0,96%	0,75%	Memenuhi Mandatory Spending

Sumber: SIPD 2024

Diperjelaskan bahwa belum tercapainya realisasi *mandatory spanding* secara umum dapat dijelaskan karena adanya perencanaan dan pengawasan lemah, akibatnya anggaran yang di alokasikan tidak memberikan manfaat maksimal terhadap peningkatan kualitas Pendidikan, Kesehatan, maupun infrastruktur,

Untuk itu kedepannya pemerintah daerah akan berupaya meningkatkan efisiensi belanja melalui strategi "*spending better*" yang bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran dengan focus pada program-program prioritas yang memberikan dampak langsung kepada Masyarakat.

2.5 Kebijakan Keuangan

Pokok-pokok Kebijakan Keuangan yang mendapat perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 terkait dengan kebijakan Pendapatan Daerah, kebijakan Belanja Daerah serta kebijakan Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.5.1 Pendapatan Daerah

Dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Daerah harus diperhatikan upaya untuk meningkatkan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah tanpa harus menambah beban bagi masyarakat. Pendapatan Daerah dalam struktur APBD masih merupakan elemen yang cukup penting peranannya baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan kepada publik.

Dengan memperhatikan potensi dan permasalahan yang dihadapi pada Tahun 2024, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2024 sebesar Rp 168.834.315.091,99 Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp134.607.242.716,00 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Morowali Utara mengalami kenaikan sebesar Rp34.227.072.375,57 atau 25,43%. Sedangkan Pendapatan Daerah dari sektor Non PAD Tahun 2024 adalah jumlah Pendapatan Transfer terealisasi sebesar Rp1.436.732.706.914,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp8.277.095.762,00 jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp1.074.201.930.428,00 mengalami kenaikan sebesar Rp370.807.872.248,00 atau 34,19%.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga 31 desember 2024 bertumbuh dengan baik. Dari sektor Pajak daerah dan Pendapatan Lain-Lain PAD yang sah menjadi penyumbang terbesar PAD di Tahun 2024 dengan porsi mencapai 91,14%. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Ekuitas Dana Lancar yang merupakan hak Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dalam satu Tahun Anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pendapatan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Pendapatan. Seluruh Pendapatan Daerah yang dianggarkan dalam APBD dianggarkan secara bruto, yang mempunyai makna bahwa jumlah Pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan Belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan Pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian Pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Pendapatan Daerah meliputi PAD, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah.

1) Pendapatan Asli Daerah
   a) PAD ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan potensi, dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi masing-masing jenis penerimaan, obyek penerimaan dan rincian obyek penerimaan.
   b) Dalam upaya peningkatan penerimaan PAD, Pemerintah Daerah tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya peningkatan PAD ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah, meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar Retribusi Daerah serta peningkatan pengendalian intern.
   c) Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dalam upaya pemungutan PAD Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel, Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan, Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran, Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame. Sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah. Sedangkan khusus untuk alokasi biaya pemungutan PKB dan BBNKB berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya

Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2004.

d) Melakukan upaya peningkatan penerimaan bagian laba/deviden atas Penyertaan Modal atau Investasi Daerah Lainnya ditempuh melalui inventarisasi dan menata serta mengevaluasi nilai kekayaan daerah yang dipisahkan baik dalam bentuk uangmaupun barang sebagai Penyertaan Modal (investasi daerah).

e) Komisi, rabat, potongan atau penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta penerimaan dari hasil penggunaan kekayaaan daerah merupakan Pendapatan Daerah.

2) Pendapatan Transfer

Adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Pengakuan Pendapatan Transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan Kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat Penyusunan Laporan Keuangan, Pendapatan Transfer dapat diakui sebelum Penerimaan Kas apabila terdapat penetapan hak Pendapatan Daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terdiri dari:

a) Dana Darurat yang diterima dari Pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam.

b) Hibah yang diterima uang harus dianggarkan dalam APBD didasarkan atas Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemberi Hibah.

c) Sumbangan yang diterima dari organisasi/lembaga tertentu/perorangan atau pihak ketiga, yang tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran maupun pengurangan kewajiban pihak ketiga/pemberi sumbangan diatur dalam Peraturan Daerah.

d) Lain-lain Pendapatan yang ditetapkan Pemerintah termasuk Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus dianggarkan pada Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

e) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi yang diterima oleh Kabupaten merupakan Lain- lain Pendapatan Daerah yang Sah.

f) Penganggaran Dana Alokasi Umum, Dana Bagi hasil, Hibah, Dana Darurat dan sumbangan pihak ketiga dianggarkan pada Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

2.5.2 Belanja Daerah

Belanja Daerah diarahkan pada peningkatan proporsi Belanja untuk memihak kepentingan publik disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan Pemerintah. Dalam penggunaannya, Belanja Daerah harus tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai dengan prioritas yang diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis daerah. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam Periode Tahun Anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah. Belanja Daerah yang dianggarkan dalam APBD, mempedomani hal-hal sebagai berikut:

1) Belanja Daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusanwajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan Pemerintahan fungsi penunjang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

2) Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
3) Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
4) Penyusunan Belanja Daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi tanggungjawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5) Penggunaan Dana Perimbangan diprioritaskan untuk kebutuhan sebagai berikut:
   a) Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak diprioritaskan untuk mendanai perbaikan lingkungan pemukiman perkotaan dan perdesaan, pembangunan irigasi, jaringan jalan dan jembatan;
   b) Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam diutamakan pengalokasiannya untuk mendanai pelestarian lingkungan areal pertambangan, perbaikan dan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial, fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan untuk tercapainya standar pelayanan minimal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan;
   c) Dana Alokasi Umum diprioritaskan penggunaannya untuk mendanai gaji dan tunjangan pegawai, kesejahteraan pegawai, kegiatan operasi dan pemeliharaanserta pembangunan fisik sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum yang dibutuhkan masyarakat;
   d) Dana Alokasi Khusus digunakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.
6) Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi antara lain meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, dan Belanja BantuanKeuangan.
   a) Belanja Pegawai, merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil (PNS), dan pegawai yang diperkerjakan oleh Pemerintah Daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal, yang diatur sebagai berikut:
      (1) Besarnya penyediaan gaji pokok/tunjangan PNS Daerah mempedomani ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyesuaian gaji pokok pegawai negeri sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang peraturan gaji pegawai negeri sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang perubahan kesembilan belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang peraturan gaji pegawai negeri sipil.
      (2) Penganggaran gaji dan tunjangan ketiga belas PNS dan tunjangan jabatan struktural/fungsional dan tunjangan lainnya dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
      (3) Dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan produktivitas PNS Daerah, khususnya bagi PNS Daerah yang tidak menerima Tunjangan Jabatan Struktural, Tunjangan Jabatan Fungsional atau yang dipersamakan dengan Tunjangan Jabatan, diberikan Tunjangan Umum setiap bulan;

(4) Besarnya Tunjangan Umum dimaksud berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum bagi PNS;

(5) Penyediaan dana penyelenggaraan asuransi kesehatan yang dibebankan pada APBD berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan bagi PNS dan Penerima Pensiun serta Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 616.A/MENKES/SKB/VI/2004 Nomor 155 A Tahun 2004 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas dan di Rumah Sakit Daerah;

(6) Dalam merencanakan Belanja Pegawai diperhitungkan "accres" gaji paling tinggi 2,5% yang disesuaikan dengan kebutuhan untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, dan penambahan jumlah pegawai akibat adanya mutasi;

(7) Berdasarkan ketentuan Pasal 58 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, kepada PNS Daerah dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian tambahan penghasilan diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja;

(8) Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Daerah Kabupaten tidak mengangkat pegawai honorer/pegawai harian lepas/pegawai tidak tetap. Pemberian penghasilan bagi pegawai honorer/pegawai harian lepas/pegawai tidak tetap yang sudah ada dianggarkan menyatu dengan program kegiatan yang melibatkan pegawai dimaksud yang besarannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah berdasarkan asas kepatutan dan kewajaran;

(9) Untuk meningkatkan disiplin kualitas pelayanan, kualitas kinerja danmeningkatkan kesejahteraan PNS maka diberikan tambahan penghasilan PNSsesuai Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor 188-45/KEP-B.MU/0067/lll/2024 Tentang Penerimaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara menurut kelas jabatan Tahun Anggaran 2024.

b) Belanja Barang dan Jasa, adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintahan dengan kebijakan sebagai berikut:

(1) Penyediaan anggaran untuk Belanja Barang Pakai Habis agar disesuaikan dengan kebutuhan nyata dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dengan mempertimbangkan jumlah pegawai dan volume pekerjaan. Oleh karena itu, perencanaan pengadaan barang agar didahului dengan evaluasi persediaan barang serta barang dalam pemakaian;

(2) Dalam upaya meningkatkan dan memberdayakan kegiatan perekonomian daerah, perencanaan pengadaan barang dan jasa mengutamakan hasilproduksi dalam negeri dan melibatkan pengusaha kecil, menengah dan koperasi;

(3) Dalam merencanakan kebutuhan barang, Pemerintah Daerah Kabupaten menggunakan Daftar Inventarisasi Barang Milik Pemerintah Daerah Kabupaten dan Standar Penggunaan Barang sebagai dasar perencanaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;

(4) Penganggaran belanja untuk penggunaan energi agar mempedomani Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penghematan Energi dan Air;

(5) Penyusunan rencana kebutuhan pengadaan barang dan jasa mempedomani ketentuan tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa yang ditetapkan dalam keputusan kepala daerah;

(6) Belanja Perjalanan Dinas baik dalam daerah maupun luar daerah untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelayanan masyarakat dianggarkan dalam jenis Belanja Barang dan Jasa;

(7) Penyediaan Belanja Perjalanan Dinas dalam rangka studi banding dibatasi baik jumlah orang, jumlah hari maupun frekuensinya dan dilakukan secara selektif agar tidak terlalu lama meninggalkan tugas dan tanggung jawab yang diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan;

(8) Pelaksanaan studi banding dapat dilakukan sepanjang memiliki nilai manfaat guna kemajuan daerah yang hasilnya dipublikasikan kepada masyarakat;

(9) Penugasan untuk mengikuti undangan dalam rangka workshop, seminar, dan lokakarya atas undangan atau tawaran dari organisasi/lembaga tertentu di luarinstansi Pemerintah dilakukan secara selektif agar tidak membebani Belanja Perjalanan Dinas;

(10) Standar Biaya Perjalanan Dinas yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah memedomani Keputusan Menteri Keuangan tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presdiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;

c) Belanja Bunga, merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding)* termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.

d) Belanja Subsidi, adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang dasar pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

e) Belanja Hibah, digunakan untuk menganggarkan pemberian uang, barang dan/atau jasa kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah Kabupaten lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telahditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidaksecara terus menerus. Uang dan barang yang diberikan dalam bentuk hibah harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah, dengan kebijakan sebagai berikut:

(1) Pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD.

(2) Hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah Kabupaten lainnya dapat diberikan dalam rangka menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi Pemerintahan di daerah dan layanan dasar umum sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan.

(3) Hibah dapat diberikan kepada perusahaan daerah dalam rangka menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan hibah kepada badan/lembaga/organisasi swasta dan/atau kelompok masyarakat/perorangan sepanjang berpartisipasi dalam

penyelenggaraan pembangunan daerah.

(4) Pemberian hibah dalam bentuk uang dianggarkan apabila Pemerintah Daerah Kabupaten telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

(5) Pemberian hibah dalam bentuk barang dilakukan apabila barang tersebut tidak mernpunyai nilai ekonomis bagi Pemerintah Daerah Kabupaten yang bersangkutan tetapi bermanfaat bagi Pemerintah atau Pemerintah Daerah Kabupaten lainnya dan/atau kelompok masyarakat/perorangan

f) Belanja Bantuan Sosial

(1) Bantuan Sosial untuk organisasi kemasyarakatan harus selektif dan memiliki kejelasan peruntukkan penggunaannya. Pemberian bantuan tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap Tahun Anggaran pada organisasi kemasyarakatan yang sama.

(2) Untuk memenuhi fungsi APBD sebagai instrumen keadilan dan pemerataan dalam upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, bantuan dalam bentuk uang dianggarkan apabila Pemerintah Daerah Kabupaten telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna terpenuhinya standarpelayanan minimal yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

(3) Untuk optimalisasi fungsi APBD sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 23 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Untuk itu diharapkan pengalokasian bantuan sosial Tahun demi Tahun harus menunjukkan jumlah yang semakin berkurang agar APBD berfungsi sebagai instrumen pemerataan dan keadilan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengurangan jumlah bantuan sosial bertujuan agar dana APBD dapat dialokasikan mendanai program-program dan kegiatan Pemerintahan Daerah yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian.Dengan demikian dapat dihindari adanya diskriminasi pengalokasian dana APBD yang hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu

(4) Penyediaan anggaran untuk Bantuan kepada Partai Politik mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, dengan ketentuan pasal 5 sebagai berikut:

- *Ayat 5*:

Besaran nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara.

- *Ayat 6*:

Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota yang alokasi anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik telah melebihi Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) persuara sah, alokasi anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik Tahun berikutnya sama dengan jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik Tahun anggaran berjalan

Ayat 7 :

Besaran nilai bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dapat dinaikkan sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah setelah mendapat Persetujuan Menteri Dalam Negeri

7) Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan Aset Tetap dan Aset Lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi antara lain Belanja Modal untuk Perolehan Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan, dan Aset Tak Berwujud. Nilai yang dianggarkan dalam Belanja Modal sebesar harga beli/bangunan Aset ditambah seluruh Belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan Aset sampai Aset tersebut siap digunakan.

Belanja Modal merupakan pengeluaran yang dianggarkan untuk pembelian/pengadaan Aset Tetap dan Aset Lainnya untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintahan yang memiliki kriteria sebagai berikut:

a) Masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan:
b) Merupakan objek pemeliharaan:
c) Jumlah nilai rupiahnya material sesuai dengan Kebijakan Akuntansi.
d) Pengadaan *software* dalam rangka pengembangan Sistem Informasi Manajemendianggarkan pada Belanja Modal.

8) Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.

9) Belanja Transfer

Belanja Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

10) Belanja DPRD

a) Penganggaran Belanja DPRD, agar memedomani ketentuan Peraturan PemerintahNomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peraturan, Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/006/BAKD Tanggal 4 Januari 2006 Perihal Tambahan Penjelasan Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005.
b) Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang meliputi uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan panitia musyawarah, tunjangan komisi, tunjangan panitia anggaran, tunjangan badan kehormatan, tunjangan alat kelengkapan lainnya, tunjangan khusus PPh Pasal 21, tunjangan perumahan, uang duka tewas dan wafat serta pengurusan jenazah dan uang jasa pengabdian dianggarkan dalam Belanja DPRD. Sedangkan Belanja Tunjangan Kesejahteraan dan Belanja Penunjang Kegiatan DPRD dianggarkan dalam Belanja Sekretariat DPRD.
c) Pajak Penghasilan yang dikenakan terhadap Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota ABRI dan Para Pensiunan atas Penghasilan yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 636/KMK.04/1994 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Para Pensiunan atas Penghasilan yang dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah. Pajak Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD yang dibebankan pada APBD dianggarkan pada Objek Belanja Tunjangan Khusus PPh Pasal 21.

d) Untuk penganggaran Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD dan Tunjangan Komunikasi Intensif bagi pimpinan dan anggota DPRD dianggarkan pada kode rincian objek belanja berkenaan dalam pos DPRD. Belanja dimaksud dapat dilaksanakan sepanjang ketentuan yang mengaturnya telah ditetapkan oleh Pemerintah.

11) Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

a) Penganggaran Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berpedoman padaketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

b) Gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dianggarkan pada Belanja Tidak Langsung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

c) Biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 yang semula tertulis "Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah Kabupaten/Kota "harus dibaca" Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota".

d) Belanja Rumah Tangga, beserta pembelian inventaris/perlengkapan rumah jabatan dan kendaraan dinas serta biaya pemeliharaannya, biaya pemeliharaan kesehatan, Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Pakaian Dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dianggarkan pada Belanja Langsung Sekretariat Daerah.

e) Penganggaran Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan satu kesatuan dalam Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau tidak dianggarkan secara terpisah dan pengaturannya lebih lanjut ditetapkan denganPeraturan Kepala Daerah.

12) Penyediaan dana untuk penanggulangan bencana alam/bencana sosial dan/atau memberikan bantuan kepada daerah lain dalam penanggulangan bencana alam/bencana sosial dapat memanfaatkan saldo anggaran yang tersedia dalam Sisa Lebih PerhitunganAPBD Tahun Anggaran Sebelumnya dan/atau dengan melakukan penggeseran Belanja Tidak Terduga atau dengan melakukan penjadwalan ulang atas program dan kegiatan yang tidak mendesak, dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Penyediaan kredit anggaran untuk memobilisasi tenaga medis dan obat-obatan, logistik/sandang dan pangan supaya diformulasikan kedalam RKA-SKPD yang secara fungsional terkait dengan pelaksanaan kegiatan dimaksud.

b) Penyediaan kredit anggaran untuk bantuan keuangan yang akan disalurkan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota yang dilanda bencana alam/bencana sosial dianggarkan pada Belanja Bantuan Keuangan.

c) Pemanfaatan saldo anggaran yang tersedia dalam Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Anggaran sebelumnya dan/atau dengan melakukan penggeseran Belanja Tidak Terduga untuk bantuan penanggulangan bencana alam/bencana sosial dilaporkan kepada DPRD.

d) Untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya, penganggaran dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2024 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah, serta amanat peraturan perundang-undangan.

Penentuan kriteria keperluan mendesak sebagaimana diamanatkan dalam penjelasan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD, yang antara lain mencakup:

a) Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam Tahun Anggaran Berjalan; dan

b) Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan masyarakat.

13) Belanja Bagi Hasil

Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pendapatan Kabupaten kepada Pemerintah Desa atau Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten tertentu kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Iainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

14) Belanja Bantuan Keuangan

a) Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari Kabupaten kepada Pemerintah Desa, dan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten lainnya atau dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah Kabupaten lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

b) Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Pemerintah desa penerima bantuan. Sedangkan bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten pemberi bantuan. Untuk pemberi bantuan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Penerima Bantuan.

c) Penganggaran untuk Alokasi Dana Desa agar memedomani ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

d) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94/PMK.07/2021 tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang pengelolaan transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya.

e) Bantuan keuangan sebagaimana tersebut pada huruf (a) disalurkan ke Kas Daerah/Desa yang bersangkutan.

2.5.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran yang bersangkutan maupun pada Tahun-Tahun anggaran berikutnya:

1) Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi Pemerintah Daerah,hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Lalu

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Lalu merupakan selisih lebih antara Realisasi Pendapatan dengan Belanja Daerah yang dalam APBD induk dianggarkan berdasarkan estimasi.

Sedangkan realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Lalu dianggarkan dalam Perubahan APBD sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Sebelumnya.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Lalu mencakup sisa dana untuk mendanai kegiatan lanjutan, utang pihak ketiga yang belum terselesaikan, pelampauan target Pendapatan Daerah, penerimaan dan pengeluaran lainnya yang belum terselesaikan sampai akhir Tahun anggaran.

2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada entitas lain, Penyertaan modal Pemerintah Daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periodeTahun Anggaran tertentu dan Pembentukan Dana Cadangan.

a) Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan Dana Cadangan digunakan untuk menganggarkan dana yang disisihkan untuk dicadangkan dalam Tahun Anggaran 2024 yang akan ditransfer ke rekening dana cadangan dari Rekening Kas umum Daerah. Jumlah yang dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan.

b) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten digunakan untuk menganggarkan sejumlah dana yang akan diinvestasikan/disertakan untuk merealisasikan kerjasama dengan pihak ketiga dan/atau kepada Perusahaan Daerah.

c) Jumlah yang dianggarkan, disesuaikan dengan jumlah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal dengan pihak ketiga atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah pada BUMD atau BUMN berkenaan.

d) Investasi (penyertaan modal) Daerah sebagaimana dimaksud di atas dapat merupakan dana yang disisihkan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam rangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat seperti penyertaan untuk modal kerja, pembentukan dana secara bergulir kepada kelompok masyarakat, pemberian fasilitas kepada usaha mikro dan menengah.

2.5.4 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan (SiLPA)

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan merupakan penjumlahan dari Surplus/Defisit APBD Tahun Berjalan dengan Pembiayaan Netto. Sedangkan Pembiayaan Netto merupakan selisih antara Penerimaan Pembiayaan dengan Pengeluaran Pembiayaan yang harus dapat menutup Defisit Anggaran yang direncanakan.

2.6 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

2.6.1 Pendapatan Daerah

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.613.844.117.767,99 dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.665.857.452.335,00 sehingga capaian target Pendapatan Daerah mencapai 96,88%. Dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.208.809.173.144,42 mengalami kenaikan sebesar Rp405.034.944.623,57 atau 33,51%. Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 tersebut jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan pada Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp34.227.072.375,57 atau 25,43%, dan pada Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami kenaikan sebesar Rp370.807.872.248,00 atau 34,19%.

Anggaran dan realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 2.11
Pendapatan daerah

Uraian	Tahun 2024		% capaian	Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4 =3:2x100)	(5)
Pendapatan Asli Daerah	228.610.133.180,00	168.834.315.091,99	73,85	134.607.242.716,42
Pendapatan Transfer	1.428.165.238.843,00	1.436.732.706.914,00	100,60	1.074.201.930.428,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	9.082.080.312,00	8.277.095.762,00	91,14	0,00
Jumlah	**1.665.857.452.335,00**	**1.613.844.117.767,99**	**96,88**	**1.208.809.173.144,42**

Sumber: SIPD 2024

2.6.2 Belanja Daerah

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.547.409.805.511,66 atau 92,91% dari anggaran sebesar Rp1.665.492.192.835,00. Pencapaian anggaran dan realisasi belanja dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.12
Belanja daerah

Uraian	Tahun 2024		% capaian	Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4 =3:2x100)	(5)
Belanja Operasi	1.095.412.945.221,18	1.011.991.709.596,48	92,38	859.062.606.693,26
Belanja Modal	338.866.386.661,82	307.845.218.053,18	90,85	231.988.131.589,27
Belanja Tak Terduga	3.150.000.000,00	1.157.886.000,00	36,76	140.000.000,00
Belanja Transfer	228.062.860.952,00	226.451.591.862,00	99,29	215.073.770.589,00
Jumlah	**1.665.492.192.835,00**	**1.547.446.405.511,66**	**92,91**	**1.306.264.508.871,53**

Sumber: SIPD RI 2024

2.6.3 Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan di anggarkan sebesar Rp52.332.702.392,53 dan terealisasi sebesar Rp52.332.702.992,00 atau 100.00%, dan di bandingkan dengan realisasi penerimaan pembiayaan Tahun 2023 sebesar Rp190.873.934.975,64 mengalami penurunan sebesar Rp138.541.231.983,11 atau 72,58%. Untuk Pengeluaran Pembiayaan di anggarkan sebesar Rp52.697.961.892,00 dan terealisasi sebesar Rp50.974.849.892,00 atau 96,73%. Dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp41.085.896.256,00.

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Kinerja *(Performance)* diartikan sebagai aktivitas terukur dari suatu entitas selama periode tertentu sebagai bagian dari ukuran keberhasilan pekerjaan. Selanjutnya *measurement* atau pengukuran kinerja diartikan sebagai suatu indikator keuangan dan non keuangan dari suatu pekerjaan yang dilaksanakan atau hasil yang dicapai dari suatu aktivitas, suatu proses atau suatu unit organisasi. Pengukuran kinerja merupakan wujud akuntabilitas, dimana penilaian yang lebih tinggi menjadi tuntunan yang harus dipenuhi, data pengukuran kinerja dapat menjadi peningkatan programselanjutnya.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD.

Prestasi pelaksanaan program yang dapat diukur akan mendorong pencapaian prestasi tersebut. Pengukuran prestasi yang dilakukan secara berkelanjutan memberikan umpan balik untuk upaya perbaikan secara terus menerus dan pencapaian tujuan di masa mendatang.

Salah satu alat menganalisis kinerja Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan Análisis Rasio Keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan, yang bertujuan untuk:

1) Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.
2) Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan Pendapatan Daerah.
3) Mengukur sejauh mana aktivitas Pemerintah Daerah dalam membelanjakan Pendapatan Daerahnya.
4) Mengukur kontribusi masing-masing sumber Pendapatan dalam pembentukan Pendapatan Daerah.
5) Melihat pertumbuhan/perkembangan perolehan Pendapatan dan Pengeluaran yang dilakukan selama periode tertentu.

Penggunaan indikator kinerja sangat penting untuk mengetahui apakah suatu program kerja telah dilaksanakan secara efisien dan efektif.

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pengelolaan Keuangan Daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana Tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu Tahun, APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.

Dengan terbitnya Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Morowali Utara menganut anggaran surplus/defisit.

a. Pendapatan Daerah Menurut Organisasi

Pendapatan dari masing-masing Perangkat Daerah dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.1

Pendapatan Daerah Menurut Organisasi

No	Perangkat Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang	%
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Daerah	0,00	196.438.321,00	196.438.321,00	0,00

No	Perangkat Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang	%
2	Dinas Kesehatan Daerah	12.082.080.312,00	11.505.509.160,00	(576.571.152,00)	95,23
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	50.000.000,00	54.948.934.858,00	54.898.934.858,00	109897,87
4	Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale	49.968.540.363,00	22.000.000,00	(49.946.540.363,00)	0,04
5	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Daerah	15.000.000.000,00	17.525.861.100,00,	2.525.861.100,00	116,84
6	Dinas Perhubungan	375.000.000,00	387.449.491,00	12.449.491,00	103,32
7	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	600.000.000,00	482.495.000,00	(117.505.000,00)	80,42
8	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	20.000.000.000,00	355.910.213,00	(19.644.089.787,00)	1,78
9	Dinas Perikanan	50.000.000,00	63.001.000,00	13.001.000,00	126,00
10	Dinas Pertanian	50.000.000,00	25.740.000,00	(24.260.000,00)	51,48
11	Sekretariat Daerah	0,00	25.770.025,00	25.770.025,00	0,00
12	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	1.428.165.238.843,00	1.436.696.106.914,00	8.530.868.071,00	100,60
13	Badan Pendapatan Daerah	139.516.592.817,00	91.607.384.513,00	(47.909.208.304,00)	65,66
	Jumlah	**1.665.857.452.335,00**	**1.613.842.600.595,00**	**(52.014.851.740,00)**	**96,85**

Sumber: SIPD 2024

b. Belanja Daerah Menurut Organisasi

Belanja berdasarkan klasifikasi organisasi untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 anggarannya sebesar Rp1.665.492.192.835,00 dan terealisasi sebesar Rp1.547.446.405.511,66 atau 92,91%.

c. Target Belanja Daerah Menurut Kelompok Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga Dan Belanja Transfer

Realisasi Belanja Tahun 2024 sebesar Rp1.547.446.405.511,66 dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp1.011.991.709.596,48. Belanja Modal sebesar Rp307.845.218.053,18, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp1.157.886.000,00 dan Belanja Transfer Rp226.451.591.862,00.

d. Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah

Target Pencapaian Kinerja APBD menurut Urusan Pemerintahan dapat disajikan pada tabel berikut:

1) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Tabel 3.2
Urusan Wajib Pelayanan Dasar

No	Perangkat Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang	%
1	Bidang Pendidikan	291.056.974.816,00	250.205.126.444,00	(40.851.848.372,00)	85,96
2	Bidang Kesehatan	324.746.657.431,00	320.387.532.802,00	(4.359.124.629,00)	98,66
3	Bidang Pekerjaan Umum Dan	206.956.909.520,00	159.477.210.939,00	(47.479.698.581,00)	77,06

No	Perangkat Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang	%
	Penataan Ruang				
5	Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	38.308.464.430,00	36.452.599.022,00	(1.855.865.408,00)	95,16
6	Bidang Sosial	7.486.237.616,00	6.789.756.722,00	(696.480.894,00)	90,70
	Jumlah	**868.555.243.813,00**	**773.312.225.929,00**	**(95.243.017.884,00)**	**89,03**

Sumber: SIPD 2024

2) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Tabel 3.3

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

No	Perangkat Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang	%
1	Bidang Tenaga Kerja	5.866.520.972,00	5.577.594.925,00	(288.926.047,00)	95,08
2	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.035.793.000,00	1.008.543.175,00	(27.249.825,00)	97,37
3	Bidang Pangan	439.607.250,00	399.448.500,00	(40.158.750,00)	90,86
4	Bidang Lingkugan Hidup	9.645.912.327,00	9.356.460.064,00	(289.452.263,00)	97,00
5	Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.378.791.796,00	6.376.518.293,00	(2.002.273.503,00)	76,10
6	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	14.212.264.322,00	13.610.404.183,00	(601.860.139,00)	95,77
7	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	14.405.959.881,00	13.642.558.257,00	(763.401.624,00)	94,70
8	Bidang Perhubungan	17.184.294.910,00	16.393.892.260,00	(790.402.650,00)	95,40
9	Bidang Komunikasi dan Informatika	8.923.339.444,00	8.228.136.495,00	(695.202.949,00)	92,21
10	Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4.688.271.747,00	4.378.962.088,00	(309.309.659,00)	93,40
11	Bidang Penanaman Modal	18.393.372.553,00	17.973.849.493,00	(419.523.060,00)	97,72
12	Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	4.739.472.850,00	4.241.320.488,00	(498.152.362,00)	89,49
13	Bidang Statistik	175.145.000,00	128.451.992,00	(46.693.008,00)	73,34
14	Bidang Persandian	48.726.000,00	45.382.916,00	(3.343.084,00)	93,14
15	Bidang Kebudayaan	1.464.829.700,00	1.223.125.213,00	(241.704.487,00)	83,50
16	Bidang Perpustakaan	16.951.830.064,00	14.625.543.104,00	(2.326.286.960,00)	86,28
17	Bidang Kearsipan	183.527.200,00	183.219.516,00	(307.684,00)	99,83
	Jumlah	**126.737.659.016,00**	**117.393.410.962,00**	**(9.344.248.054,00)**	**92,63**

Sumber : SIPD 2024

3) Urusan Pemerintahan Pilihan

Tabel 3.4
Urusan Pemerintahan Pilihan

No	Perangkat Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang	%
1	Bidang Kelautan dan Perikanan	14.242.224.270,00	13.810.662.774,00	(431.561.496,00)	96,97
2	Bidang Pariwisata	9.545.628.328,00	8.777.686.023,00	(767.942.305,00)	95,29
3	Bidang Pertanian	51.886.776.102,00	49.442.659.456,00	(2.444.116.646,00)	95,29
4	Bidang Perdagangan	4.635.847.429,00	4.604.378.610,00	(31.468.819,00)	99,32
5	Bidang Perindustrian	534.999.850,00	511.256.750,00	(23.743.100,00)	95,56
6	Bidang Transmigrasi	4.915.024.400,00	4.737.251.852,00	(177.772.548,00)	96,38
	Jumlah	**85.760.500.379,00**	**81.883.895.465,00**	**(3.876.604.914,00)**	**95,48**

Sumber: SIPD 2024

4) Unsur Pendukung, Penunjang, Pengawasan dan Kewilayahan UrusanPemerintahan

Tabel 3.5
Unsur Pendukung, Penunjang, Pengawasan dan Kewilayahan Urusan Pemerintahan

No	Perangkat Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang	%
1	Sekretariat Daerah	101.617.270.551,00	93.362.540.803,00	(8.254.729.748,00)	91,88
2	Sekretariat DPRD	44.251.658.661,00	41.505.992.211,00	(2.745.666.450,00)	93,80
3	Perencanaan	9.283.872.097,00	8.918.155.495,00	(365.716.602,00)	96,06
4	Keuangan	311.344.930.040,00	288.215.911.985,00	(23.129.018.055,00)	92,57
5	Kepegawaian	8.132.288.209,00	7.725.664.975,00	(406.623.234,00)	95,00
7	Pendidikan dan Pelatihan	2.550.810.800,00	32.146.124.591,66	29.595.313.791,66	1260,23
8	Penelitian dan Pengembangan	473.524.290,00	473.248.390,00	(275.900,00)	99,94
9	Inspektorat Daerah	16.409.972.099,00	14.929.915.776,00	(1.480.056.323,00)	90,98
10	Kecamatan	38.616.678.815,00	36.623.631.461,00	(1.993.047.354,00)	94,84
11	Kesatuan Bangsa dan Politik	51.757.784.062,00	50.955.687.468,00	(802.096.594,00)	98,45
	Jumlah	**584.438.789.624,00**	**574.856.873.155,66**	(9.581.916.468,34)	98,36
	Total Jumlah	**1.665.492.192.832,00**	**1.547.446.405.511,66**	**118.045.787.320,34**	**92,91**

Sumber: SIPD 2024

e. Belanja Menurut Klasifikasi Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Realisasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Tabel 3.6
Belanja Menurut Klasifikasi Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara

No	Perangkat Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Bidang Pendidikan	291.056.974.816,00	250.205.126.444,00	85,96

No	Perangkat Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2	Bidang Kesehatan	324.746.657.431,00	320.387.532.802,00	98,66
3	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	178.767.796.341,00	159.477.210.939,00	89,21
4	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	28.189.113.179,00	27.994.104.891,00	99,31
5	Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	38.308.464.430,00	36.452.599.022,00	95,16
6	Bidang Sosial	7.486.237.616,00	6.789.756.722,00	90,70
7	Bidng Tenaga Kerja	5.866.520.972,00	5.577.594.925,00	95,08
8	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.035.793.000,00	1.008.543.175,00	97,37
9	Bidang Pangan	439.607.250,00	399.448.500,00	90,86
10	Bidang Lingkungan Hidup	9.645.912.327,00	9.356.460.064,00	97,00
11	Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	8.378.791.796,00	6.376.518.293,00	76,10
12	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	14.212.264.322,00	13.610.404.183,00	95,77
12	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	14.405.959.881,00	13.642.558.257,00	94,70
13	Bidang Perhubungan	17.184.294.910,00	16.393.892.260,00	95,40
14	Bidang Komunikasi dan Informatika	8.923.339.444,00	8.228.136.495,00	92,21
15	Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4.688.271.747,00	4.378.962.088,00	93,40
16	Bidang Penanaman Modal	18.393.372.553,00	17.973.849.493,00	97,72
17	Bidang Kepemudaan dan Olahraga	4.739.472.850,00	4.241.320.488,00	89,49
18	Bidang Statistik	175.145.000,00	128.451.992,00	73,34
19	Bidang Persandian	48.726.000,00	45.382.916,00	93,14
20	Bidang Kebudayaan	1.464.829.700,00	1.223.125.213,00	83,50
21	Bidang Perpustakaan	16.951.830.064,00	14.625.543.104,00	86,28
22	Bidang Kearsipan	183.527.200,00	183.219.516,00	99,83
23	Bidang Kelautan dan Perikanan	14.242.224.270,00	13.810.662.774	96,97
24	Bidang Pariwisata	9.545.628.328,00	8.777.686.023,00	91,96
25	Bidang Pertanian	51.886.776.102,00	49.442.659.456,00	95,29
26	Bidang Perdagangan	4.635.847.429,00	4.604.378.610,00	99,32
27	Bidang Perindustrian	534.999.850,00	511.256.750,00	95,56
28	Bidang Transmigrasi	4.915.024.400,00	4.737.251.852,00	96,38
29	Sekretariat Daerah	101.617.270.551,00	93.362.540.803,00	91,88
30	Sekretariat DPRD	44.251.658.661,00	41.505.992.211,00	93,80
31	Perencanaan	9.283.872.097,00	8.918.155.495,00	96,06
32	Keuangan	311.344.930.040,00	276.659.182.899,00	88,86

No	Perangkat Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
33	Kepegawaian	8.132.288.209,00	7.725.664.975,00	95,00
34	Pendidikan dan Pelatihan	2.550.810.800,00	2.491.531.308,00	97,68
35	Penelitian dan Pengembangan	473.524.290,00	473.248.390,00	99,94
36	Inspektorat	16.409.972.099,00	14.929.915.776,00	90,98
37	Kecamatan	38.616.678.815,00	36.623.631.461,00	94,84
38	Kesatuan Bangsa dan Politik	51.757.784.062,00	50.955.687.468,00	98,45
	JUMLAH	**1.665.492.192.832,00**	**1.534.229.188.033,00**	**92,11**

Sumber: SIPD 2024

3.2. Hambatan Dan Kendala Dalam Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pendapatan dan Belanja Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan Perkiraan Terukur yang dapat dicapai untuk setiap Pos Pendapatan dan Belanja Daerah, namun dalam pengelolaannya ditemukan beberapa permasalahan yang mengakibatkan realisasi Pendapatan maupun Belanja Daerah pada Tahun 2024 tidak tercapai sesuai target yang ditetapkan.

a. Pendapatan Daerah

Permasalahan dalam pencapaian target Pendapatan Daerah adalah dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal antara lain kondisi politik, ekonomi, sosial budaya, ketertiban dan keamanan serta kondisi kesehatan global. Sedangkan faktor internal sangat tergantung pada kemampuan menentukan arah dan kebijakan unit Pengelola Pendapatan. Faktor eksternal dan internal tidak hanya mempengaruhi kondisi umum Pendapatan Daerah, tetapi juga dapat menjadi permasalahan utama terhadap Pendapatan Daerah.

Adapun permasalahan utama Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali Utara antara lain:

1) Masih kurangnya sumber daya manusia dalam hal menunjang pemutakhiran data pajak dan retribusi yang di kelola oleh pemerintah daerah.
2) Kurangnya sarana dan prasarana yang ada untuk menunjang penarikanPajak/Retribusi
3) Kurangnya penegakan sanksi bagi wajib pajak/wajib retribusi yang melanggar hukum
4) Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak/Retribusi
5) Penanganan Pajak dan Retribusi belum dilaksanakan satu pintu dan kurangnya sosialisasi peraturan daerah tentang Pajak dan Retribusi
6) Pendistribusian Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah yang kurang tepat waktu.

b. Belanja Daerah

Belanja Daerah mencakup semua pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah dan merupakan kewajiban daerah dalam satu Tahun Anggaran yang dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Permasalahandalam pencapaian target Belanja Daerah adalah:

1) Jumlah penduduk miskin masih cukup besar

   Program-program untuk menurunkan persentase penduduk miskin mencakup penanganan berbagai persoalan lintas sektoral seperti kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, industri rumah tangga/industri kecil, pertanian, infrastruktur (air bersih dan pengairan, transportasi, ketenagalistrikan).

2) Penyelenggaraan Pemerintahan

   Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam upaya peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan antara lain kurangnya aplikasi teknologi informasi, rendahnyakompetensi dan

profesionalisme aparatur Pemerintah, belum optimalnya perencanaan dan pengendalian pembangunan, lemahnya sistem pengawasan, kurang optimalnya pengelolaan aset, dan sarana prasarana pendukung kerja yang kurang memadai

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Tujuan Kebijakan Akuntansi adalah mengatur Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan Laporan Keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

Tujuan khusus Kebijakan Akuntansi adalah memberikan acuan bagi :

1. Penyusunan laporan keuangan dalam menyelesaikan permasalahan akuntansi yang belum diatur dalam SAP;
2. Pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah Laporan Keuangan disusun sesuai SAP; dan
3. Pengguna Laporan Keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan SAP.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Kebijakan Akuntansi ini mengatur seluruh pertimbangan dalam rangka Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang meliputi :

1. Lingkungan akuntansi;
2. Pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna;
3. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan;
4. Peranan dan tujuan pelaporan keuangan, komponen laporan keuangan, serta dasarhukum;
5. Asumsi dasar, karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi dalam laporan keuangan, prinsip-prinsip, serta kendala informasi akuntansi;
6. Unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan, pengakuan, dan pengukurannya;
7. Jenis laporan keuangan; dan
8. Definisi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan unsur laporan keuangan.

Kebijakan Akuntansi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara Berbasis Akrual berdasarkan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.

Berdasarkan hal tersebut dibuat Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual terdiri dari:

1. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
2. Sistem Akuntansi pemerintah Daerah dan.
3. Bagan Akun Standar.

Dan sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual terdiri dari:

1. Sistem Akuntansi Perangkat Daerah;.
2. Sistem Akuntansi PPKD.

4.1. Entitas Pelaporan

Entitas Pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

1. Akuntabilitas

   Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
2. Manajemen

   Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi
   Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
4. Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)
   Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan Pemerintah Daerah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.
5. Evaluasi Kinerja
   Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola Pemerintah Daerah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Dan berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414), domisili kantor Pemerintah Kabupaten Morowali Utara berada di Kolonodale Kompleks Perkantoran Bumi Nangka, Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara.

Pada Tahun 2024 dalam menjalankan fungsi Pemerintahan umum dan pembangunan, Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Morowali Utara memiliki unit organisasi yang meliputi :

1. Tujuh belas Dinas : (1) Dinas Pendidikan Kebudayaan, (2) Dinas Kesehatan, (3) DinasPekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah, (4)Dinas Sosial Daerah, (5) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, (6) Dinas Lingkungan
   Hidup, (7) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, (8) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, (9) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, (10) Dinas Perhubungan Daerah,(11) Dinas Komunikasi dan Informatika, (12) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, (13) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, (14) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, (15) Dinas Perikanan Daerah, (16) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, serta (17) Dinas Pertanian dan Pangan Daerah;
2. Empat belas Puskesmas: (1) Puskesmas Petumbea, (2) Puskesmas Mayumba, (3)Puskesmas Pandauke, (4) Puskesmas Baturube, (5) Puskesmas Tambayoli, (6) Puskesmas Panca Makmur, (7) Puskesmas Lee, (8) Puskesmas Tomata, (9) Puskesmas Beteleme, (10) Puskesmas Kolonodale, (11) Puskesmas Molino, (12) Puskesmas Anutoluwu, serta (13) Puskesmas Potowe Indo Lijo (14) Puskesmas Wongko Ndaya
3. Sekretariat Daerah dengan Sembilan Bagian : (1) Bagian Umum dan Perlengkapan, (2) Bagian Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam, (3) Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah, (4) Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan, (5) Bagian Hukum, (6) Bagian Organisasi, (7) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, (8) Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, serta (9) Bagian Administrasi Perekonomian.
4. Sepuluh Kecamatan : (1) Kecamatan Petasia, (2) Kecamatan Petasia Barat, (3) Kecamatan Petasia Timur, (4) Kecamatan Lembo, (5) Kecamatan Lembo Raya, (6) Kecamatan Mori Atas, (7) Kecamatan Mori Utara, (8) Kecamatan Soyo Jaya, (9) Kecamatan Bungku Utara, dan (10) Kecamatan Mamosalato;
5. Enam Badan : (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah, (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah, (3) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, (4) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, (5) Badan Pendapatan Daerah, dan (6) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Sekretariat DPRD;
8. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Badan Layanan Umum Daerah; dan
10. Inspektorat Daerah.

4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh Penyelenggara Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam memahami Laporan Keuangan yang disajikan.

Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara:

a) Basis Akuntansi

Basis Akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah adalahBasis Akrual, untuk pengakuan Pendapatan-LO, Beban, Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Dalam hal peraturan perundang-undangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis Kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

Basis Akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa Pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun Kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan Beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun Kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis Kas, maka LRA disusun berdasarkan basis Kas, berarti bahwa Pendapatan-LRA dan Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat Kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan. Serta Belanja, Transfer dan Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat Kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual maka LRA harus disusun berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa Aset, Kewajiban dan Ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian, tanpa memperhatikansaat Kas atau setara Kas diterima atau dibayar.

b) Prinsip Nilai Perolehan

Aset dicatat sebesar jumlah Kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh Aset tersebut pada saat perolehan. Utang dicatatsebesar jumlah Kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi Kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah.

Penggunaan nilai perolehan lebih dapat diandalkan daripada nilai yang lain, karenanilai perolehan lebih objektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar Aset atau Kewajiban terkait.

c) Prinsip Realisasi

Bagi Pemerintah Daerah, Pendapatan basis Kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran Pemerintah Daerah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis Kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi Kas.

Prinsip Layak Temu Biaya-Pendapatan (*matching cost against revenue principle*) tidak ditekankan dalam Akuntansi Pemerintah Daerah, sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi sektor swasta.

d) Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal

Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

e) Prinsip Periodesitas

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja Pemerintah Daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.

f) Prinsip Konsistensi

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

g) Prinsip Pengungkapan Lengkap

Laporan keuangan Pemerintah Daerah menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporankeuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) Laporan Keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

h) Prinsip Penyajian Wajar

Laporan Keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukanprakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga Aset atau Pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan Aset atau Pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat Kewajiban atau Belanja yang terlampau tinggi, sehingga Laporan Keuangan menjadi tidak netral dan tidak handal.

4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

4.3.1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA dan LO

1) Pendapatan -LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah Kabupaten dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pendapatan LRA terdiri dari:

a) Pendapatan Pajak Asli Daerah – LRA
b) Pendapatan Transfer – LRA
c) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA

Pengakuan Pendapatan-LRA ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai salah satu tempat penampungannya.

Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

2) Pendapatan -LO

Adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu:

a) Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan Penerimaan Kas selama Tahun berjalan.

Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan Penerimaan Kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi Pendapatan Daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak Pendapatan Daerah dan penerimaanKas daerah atau pada saat diterimanya Kas/Aset Non Kas yang menjadi hak Pemerintah Daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat Kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.

b) Pendapatan-LO diakui pada saat penetapan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) /Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)

Pendapatan-LO diakui Sebelum Penerimaan Kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak Pendapatan Daerah misalnya SKPD/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assesment* atau Perpres

/Permenkeu/Pergub/Perbup dimana hingga akhir Tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh Pemerintah Daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi Pemerintah Daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.

Apabila dalam hal proses transaksi Pendapatan Daerah terjadi perbedaan antara jumlah Kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain, atau Kastelah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat Kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun Pendapatan Diterima Dimuka.

4.3.2. Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode Tahun Anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah. Belanja terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, serta Belanja Transfer.

Belanja ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata saat dikeluarkannya Kas dari Rekening Kas Umum Daerah(RKUD). Belanja diakui pada saat:

1. Terjadinya pengeluaran dari RKUD;
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D-GU atau SP2D-Nihil; dan
3. Dalam hal Badan Layanan Umum, Belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.

4.4. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah. Dalam Neraca Pemerintah Daerah, kewajiban disajikan berdasarkan likuiditasnya dan terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu:

1. Kewajiban Jangka Pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
2. Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

4.5. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Aset Tetap adalah Aset Berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat ataufungsinya dalam aktivitas operasi entitas, sebagai berikut:

1. Tanah
   Tanah yang dikelompokkan sebagai Aset Tetap ialah Tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
2. Peralatan dan Mesin
   Peralatan dan Mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.
3. Gedung dan Bangunan
   Gedung dan Bangunan mencakup seluruh Gedung dan Bangunan yang diperolehdengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah dan dalamkondisi siap dipakai.
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan
   Jalan, Irigasi dan Jaringan mencakup Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalamkondisi siap dipakai.
5. Aset Tetap Lainnya
   Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset Tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah Kabupaten dan dalam kondisi siap dipakai.
6. Konstruksi Dalam Pengerjaan
   Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah Aset Tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan,Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Aset Tetap Lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan Aset Tetap sangat handal bila Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Aset Tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap didasarkan padanilai wajar pada saat perolehan. Untuk dapat diakui sebagai Aset Tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Berwujud;
2. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
3. Biaya perolehan Aset dapat diukur secara handal;
4. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
5. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
6. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
7. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi Aset Tetap yang telah ditetapkan.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat Aset yang bersangkutan.

Akumulasi Penyusutan (*accumulated depreciaton*) adalah bagian dari biaya perolehan Aktiva Tetap yang dialokasikan ke Penyusutan sejak aktiva tersebut diperoleh. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan akun kontra Aset Tetap yang berhubungan.

Penyusutan Aset Tetap diakui dengan nilai penyusutan untuk masing-masingperiode dan diakui sebagai pengurang nilai tercatat Aset Tetap dalam Neraca dan Beban Penyusutan dalam Laporan Operasional.
Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
Untuk Penyusutan atas Aset Tetap Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek (*which ever is shorter*) antara masa manfaat Aset dengan masa pinjaman/sewa.
Masa manfaat adalah:

1. Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas Pemerintahan dan/ataupelayanan publik; atau
2. Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari Aset untuk aktivitasPemerintahan dan/atau pelayanan publik.

Tabel 4.1
Masa Manfaat Aset Tetap

Kodefikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	**3**			**ASET TETAP**	
1	**3**	**2**		**Peralatan dan Mesin**	
1	3	2	01	Alat-Alat Besar Darat	10
1	3	2	02	Alat-Alat Besar Apung	8
1	3	2	03	Alat-alat Bantu	7
1	3	2	04	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2	05	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
1	3	2	06	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2	07	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	08	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1	3	2	09	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	11	Alat Ukur	5
1	3	2	12	Alat Pengolahan Pertanian	4
1	3	2	13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
1	3	2	14	Alat Kantor	5
1	3	2	15	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	16	Peralatan Komputer	4
1	3	2	17	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	18	Alat Studio	5
1	3	2	19	Alat Komunikasi	5
1	3	2	20	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	21	Alat Kedokteran	5

Kodefikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	22	Alat Kesehatan	5
1	3	2	23	Unit-Unit Laboratorium	8
1	3	2	24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
1	3	2	25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir /Elektronika	15
1	3	2	27	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	28	Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
1	3	2	29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2	31	Senjata Api	10
1	3	2	32	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	33	Alat Keamanan dan Perlindungan	5
1	**3**	**3**		**Gedung dan Bangunan**	
1	3	3	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	03	Bangunan Menara	40
1	3	3	04	Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	05	Tugu Peringatan	50
1	3	3	06	Candi	50
1	3	3	07	Monumen/Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	08	Tugu Peringatan Lain	50
1	3	3	09	Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
1	3	3	10	Rambu-Rambu	50
1	3	3	11	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50
1	**3**	**4**		**Jalan, Irigasi, dan Jaringan**	
1	3	4	01	Jalan	10
1	3	4	02	Jembatan	50
1	3	4	03	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	04	Bangunan Air Pasang Surut	50
1	3	4	05	Bangunan Air Rawa	25
1	3	4	06	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	07	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	08	Bangunan Air Bersih/Baku	40
1	3	4	09	Bangunan Air Kotor	40

Kodefikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	4	10	Bangunan Air	40
1	3	4	11	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
1	3	4	12	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	13	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	15	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	16	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	17	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	18	Instalasi Gas	30
1	3	4	19	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	20	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	21	Jaringan Listrik	40
1	3	4	22	Jaringan Telepon	20
1	3	4	23	Jaringan Gas	30

Sumber: Kebijakan Akuntansi Tahun 2024

Untuk perhitungan penyusutan, waktu yang digunakan dalam perhitungan penyusutan Aset Tetap adalah pendekatan bulan penggunaan. Dengan demikian waktu penyusutan ditentukan berdasarkan bulan saat Aset tersebut digunakan.

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*), dimana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama.

Metode garis lurus atau *straight line method* adalah metode penyusutan dimana besarnya penyusutan selalu sama dari tiap periode akuntansi selama umur ekonomis dari Aset Tetap yang bersangkutan. Metode ini dipilih karena metode ini dianggap sebagai metode yang paling mudah dan sederhana.

Aset Tetap yang disusutkan adalah Aset Tetap selain Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Tabel 4.2
Batasan minimal kapitalisasi aset tetap

NO.	ASET TETAP	KONDISI	NILAI KAPITALAISASI
1	Tanah		Tidak dibatasi
2	Peralatan Mesin		
	Pembelian selainangkutan darat tidakbermotor dan alatangkutan air tidak Bermotor	Harga per satuan barang	Rp300.000,00
	Perbaikan menyeluruh Termasuk turunmesin (over haul)	Selain angkutan Darat bermotor beroda dua	Rp5.000.000,00
	Perbaikan menyeluruh Termasuk turunmesin (over haul)	Angkutan darat bermotor beroda dua	Rp1.000.000,00
	Pembelian angkutan darat tidak bermotor dan alatangkutan air tidak	Harga per satuanbarang	Rp500.000,00

NO.	ASET TETAP	KONDISI	NILAI KAPITALAISASI
	bermotor		
3	Gedung dan Bangunan		
	Rehabilitasi total atau menambah ruang		Rp10.000.000,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan		
	Jalan, Jembatan dan jaringan air		Tidak Dibatasi
	Penerangan jalan, taman dan hutan kota dan instalasilistrik dan telepon		Rp300.000,00
5	Aset Tetap Lainnya		
	Buku dan Kepustakaan		Tidak dibatasi
	Bercorak kesenian/kebudayaan		Rp300.000,00
	Hewan/ternak/ tanaman	Sepanjang bukan dalam rangkauntuk iperjualbelikan dan/ atau pemberian bantuan	Tidak dibatasi
6	Konstruksi dalamPengerjaan		Tidak dibatasi

Sumber: Kebijakan Akuntansi Tahun 2022

Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria Aset Tetap diatas akan diperlakukan sebagai *ekstrakompatabel.* Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi Aset Tetap harus disajikan di pos Aset Lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

4.6.Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

Aset lainnya adalah Aset Pemerintah Daerah Kabupaten yang termasuk Aset TakBerwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, Aset kerjasama dengan Pihak ketiga (kemitraan) dan Kas yang dibatasi penggunaannya.

Aset Lainnya terdiri dari:

a. Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan Aset Pemerintah Daerah secara angsuran kepada pegawai Pemerintah Daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.
b. Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang dideritaoleh Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukumyang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
c. Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.
d. Aset Tidak Berwujud adalah Aset Tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkanbarang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten,

hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh Pemerintah Daerah.

e. Termasuk dalam Aset Lain-lain adalah Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan, atau Aset Tetap yang dipinjam pakai kepada unit Pemerintah yang lain, atau aset yang telah diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya.

4.7. Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah Aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah Kabupaten, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangkapelayanan kepada masyarakat.

Persediaan diakui:

a. Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan handal.
b. Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

Untuk melakukan pengukuran atas persediaan, maka pencatatan persediaan menjadi pertimbangan dalam melakukan pengukuran.

Pengukuran nilai persediaan dilakukan dengan menggunakan harga pembelian terakhir jika persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi.

4.8. Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi Aset atau timbulnya kewajiban. Beban terdiri dari:

Beban operasi terdiri dari beban pegawai, beban barang dan jasa, beban penyusutan dan amortisasi, beban penyisihan piutang, dan beban lain-lain

a. Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
b. Beban barang dan jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi asetatau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.
c. Beban bunga merupakan alokasi pengeluaran Pemerintah Daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.
d. Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
e. Beban hibah merupakan beban Pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepadaPemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
f. Beban bantuan sosial merupakan beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

g. Beban penyusutan dan amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan Aset bersangkutan/berlalunya waktu.
h. Beban penyisihan piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.
i. Beban lain-lain adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam kategori tersebut di atas.
j. Beban transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari Pemerintah Daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
k. Beban non operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.
l. Beban luar biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkanterjadi pada awal Tahun Anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang dan kejadian diluar kendali entitas Pemerintah.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi yaitu mengelompokkan beban berdasarkan jenis beban dalam Bagan Akun Standar.

Beban diakui pada:

1) Saat timbulnya kewajiban;
2) Saat terjadinya konsumsi aset; dan
3) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hakdari pihak lain ke Pemerintah Daerah tanpa di ikuti keluarnya Kas dari Kas Umum Daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar Pemerintah dapat diakui sebagai beban.

4.9. Kebijakan Akuntansi Transfer

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepadaentitas pelaporan lain, termasuk Dana Perimbangan dan Dana Bagi Hasil.

Pengakuan transfer sama dengan pengakuan belanja, hanya secara klasifikasi dantujuan dari Transfer itu yang berbeda dengan Belanja.

Transfer dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominalyang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

4.10. Kebijakan Akuntansi Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau hak Pemerintah Daerah Kabupaten yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya.

Klasifikasi Piutang secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

Piutang diakui pada saat Penyusunan Laporan Keuangan ketika timbul klaim/hak untukmenagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:

a) Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi;
b) Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagaipiutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

a. Harus didukung dengan Naskah Perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
b. Jumlah piutang dapat diukur.

Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan.

Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuaidengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah.

Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan dokumen persyaratan pencairan DAK yang telah diverifikasi dan dinyatakan lengkap dan sah oleh Pemerintah Pusat (Kementrian Keuangan) yang telah ditetapkan sebesar jumlah jumlah yang belum ditransfer berdasarkan ketentuan.

Piutang transfer lainnya diakui apabila:

a. Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir Tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
b. Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.

Piutang Bagi Hasil dari Provinsi dihitung berdasarkan alokasi yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan. (hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar)

Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian Pemerintah Daerah penerima yang belum dibayar.

Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu Tahun Anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukungdengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang
menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan, adalah sebagai berikut:

a. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiaptagihan yang ditetapkan berdasarkan Surat Ketetapan Kurang Bayar yang diterbitkan; atau
b. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiaptagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
c. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiaptagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh Majelis Tuntutan Ganti Rugi.

Pengukuran Piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:

a. Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari Kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian-pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yangterutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan;

b. Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yangterutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilaipiutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya;

c. Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalamnaskah perjanjian kemitraan;

d. Pemberian fasilitas/jasa.

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh Pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang mukayang telah diterima.

Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

a. Dana Bagi Hasil (DBH) disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
b. Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Kabupaten;
c. Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

a. Disajikan sebagai Aset Lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam Tahun berjalan danyang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
b. Disajikan sebagai Aset Lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya.

Pengukuran berikutnya *(Subsequent Measurement)* terhadap pengakuan awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutangyang dihapuskan.

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value)*, yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang. Kualitas piutangdikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

a. Kualitas Piutang Lancar;
b. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
c. Kualitas Piutang Diragukan; dan
d. Kualitas Piutang Macet.

Penggolongan Kualitas Piutang dilakukan dengan ketentuan:

a. Kualitas lancar;

Kualitas lancar adalah piutang yang belum dilakukan pelunasan sampai dengantanggal jatuh tempo yang ditetapkan dengan kriteria:

1) Umur piutang kurang dari 12 bulan; dan/atau
2) Wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
3) Wajib pajak kooperatif; dan/atau
4) Wajib pajak likuid; dan/atau
5) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

b. Kualitas kurang lancar;

Kualitas kurang lancar adalah piutang yang dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan dengankriteria:

1) Umur Piutang 12 bulan sampai dengan 24 bulan; dan/atau
2) Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
3) Wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
4) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding

c. Kualitas diragukan;

Kualitas diragukan adalah piutang yang dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan dengan kriteria:

1) Umur piutang diatas 24 bulan sampai dengan 36 bulan; dan/atau
2) Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
3) Wajib pajak tidak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
4) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.

d. Kualitas macet.

Kualitas macet adalah piutang dengan kriteria:

1) Umur piutang diatas 36 bulan; dan/atau
2) Wajib pajak tidak ditemukan; dan/atau
3) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
4) Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*) Penyisihan piutang tidak tertagih untuk pajak ditetapkan sebesar:

- Kualitas lancar sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus);
- Kualitas kurang lancar sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari piutang kualitas kuranglancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- Kualitas diragukan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari piutang dengan kualitasdiragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- Kualitas macet 100% (seratus per seratus) dari piutang dengan kualitas macet setelahdikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penggolongan kualitas piutang bukan pajak selain yang disebutkan retribusi,dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 4.3

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

No	Kualitas Piutang	Umut Piutang	Taksiran Piutang Tak Tetagih
A	Lancar	12 Bulan	0,5
B	Kurang Lancar	12 - 24 Bulan	10
C	Diragukan	24 - 36 Bulan	50
D	Macet	36 Bulan Keatas	100

Sumber: Kebijakan Akuntansi Tahun 2022

4.11. Kebijakan Akuntansi Investasi

Adalah Aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.Investasi diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

a) Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan kelompok Aset Lancar dan memiliki karakteristik sebagai berikut:

1) Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12bulan;
2) Ditujukan dalam rangka manajemen Kas dimana Pemerintah Daerah dapatmenjual/ mencairkan investasi tersebut jika timbul kebutuhan Kas;
3) Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah.
   Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dikategorikan sebagai investasi jangka pendek. Sedangkan deposito berjangka waktu kurang dari tiga bulan dikategorikan sebagai Kas dan Setara Kas.

b) Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebihdari 12 (dua belas) bulan dan merupakan kelompok Aset non lancar.

Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi duayaitu:

1) Investasi Jangka Panjang Non Permanen
   Investasi jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali;
2) Investasi Jangka Panjang Permanen
   Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Penilaian investasi Pemerintah Daerah dilakukan dengan tiga metode sebagai berikut:

1) Metode Biaya
   Dengan menggunakan Metode Biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
2) Metode Ekuitas
   Dengan menggunakan Metode Ekuitas, investasi Pemerintah Daerah dinilaisebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau
   rugi sebesar persentase kepemilikan Pemerintah Daerah setelah tanggalperolehan. Bagian laba yang diterima Pemerintah Daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi Pemerintah Daerah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi Pemerintah Daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi Aset tetap.
3) Metode Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan
   Metode Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi Pemerintah Daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.

   Perhitungan atas Nilai Bersih Investasi yang Dapat Direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi Pemerintah Daerah yang belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh temponya *(aging schedule)*.

   Besarnya penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali dihitung berdasarkan presentase penyisihan untuk masing-masing kelompok sebagai berikut:

Tabel 4.4

Presentase Penyisihan Investasi

No	Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi	Persentase Penyisihan
1	Jatuh tempo pada periode 1 - 2 Tahun	25%
2	Jatuh tempo pada periode 2 - 3 Tahun	50%
3	Jatuh tempok pada periode 3 - 4 Tahun	75%
4	Jatuh tempo pada periode di atas 4 Tahun	100%

Sumber: Kebijakan Akuntansi Tahun 2022

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagaiberikut:

1) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
2) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapimemiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
4) Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat nonpermanen menggunakanmetode nilai bersih yang direalisasikan.

4.12. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah Kabupaten terutama dimaksudkan untuk menutup defisit ataumemanfaatkan Surplus Anggaran.

Pembiayaan terdiri dari:

1) Penerimaan pembiayaan, dan
2) Pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi Pemerintah Daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepadaentitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Penerimaan Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari transaksi. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah (RKUD)antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, Penyertaan Modal Pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode Tahun Anggaran tertentu dan pembentukan dana cadangan.

Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran Kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Pengeluaran Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal transaksi. Pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto.

4.13. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang tercermin dalam Pendapatan-LO, Beban, dan Surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkandengan periode sebelumnya

Pengguna laporan membutuhkan Laporan Operasional dalam mengevaluasi Pendapatan-LO dan Beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas Pemerintahan, sehingga Laporan Operasional menyediakan informasi:

1) Mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh Pemerintah Daerah untuk menjalankan pelayanan;
2) Mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja Pemerintah Daerah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;
3) Yang berguna dalam memprediksi Pendapatan-LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan Pemerintah Daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif;
4) Mengenai penurunan ekuitas (bila deficit operasional), dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).

Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasisakrual *(full accrual accounting cycle)* sehingga Penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

4.14. Koreksi Kesalahan

Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.

Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih Laporan Keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.

Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

1) Kesalahan yang tidak berulang;
2) Kesalahan yang berulang dan sistemik.

Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

1) Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
2) Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang.

Contohnya adalah Penerimaan Pajak dari Wajib Pajak yang memerlukan koreksisehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran Kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi Pendapatan-LRA maupun Pendapatan-LO yang bersangkutan.

4.15. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP

Terkait penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, maka setiap Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dianggap perlu untuk menyusun suatu Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual. Hal ini dalam rangka untuk mendukung Program Pemerintah berupa Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual agar sukses dalam penerapannya di daerah.

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip akuntansi yang telah dipilih berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan untuk diterapkan dalam Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Penyusunan Kebijakan Akuntansi di daerah adalah murni kewenangan daerah dimana Kepala Daerah adalah pemutus persetujuan produk hukum berupa Peraturan Daerah yang telah melewati prosedur berupa koreksi hingga akhirnya diparaf oleh pejabat berwenang dan mendapat persetujuan oleh Kepala Daerah untuk selanjutnya dilimpahkan ke bagian terkait untuk dilaksanakan.

4.16. Kebijakan Akuntansi Tertentu

Kebijakan Akuntansi Tertentu diperlukan untuk memahami Laporan Keuangan. Asumsi dasar atau konsep dasar akuntansi tertentu mendasari penyusunan laporan keuangan, biasanya tidak diungkapkan secara spesifik. Pengungkapan diperlukan jika tidakmengikuti asumsi, atau konsep tersebut disertai alasan dan penjelasan.

Dalam menentukan apakah suatu kebijakan akuntansi perlu diungkapkan, manajemen harus mempertimbangkan apakah pengungkapan tersebut dapat membantu pengguna untukmemahami setiap transaksi yang tercermin dalam laporan keuangan. Kebijakan-kebijakan Akuntansi yang perlu dipertimbangkan untuk disajikan dalam Catatan atas Laporan Pemerintah Daerah

BAB V
PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

LRA merupakan Laporan yang mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan ini menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan. Secara lebih rinci LRA Pemerintah Kabupaten Morowali Utara pada Tahun Anggaran 2024 diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.1.1 Pendapatan Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun Anggaran 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun Anggaran 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 1
Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2024

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Pendapatan Asli Daerah	228.610.133.180,00	168.834.315.091,99	73,85	134.607.242.716,42
Pendapatan Transfer	1.428.165.238.843,00	1.436.732.706.914,00	100,60	1.074.201.930.428,00
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	9.082.080.312,00	8.277.095.762,00	91,14	0,00
Jumlah	**1.665.857.452.335,00**	**1.613.844.117.767,99**	**96,88**	**1.208.809.173.144,42**

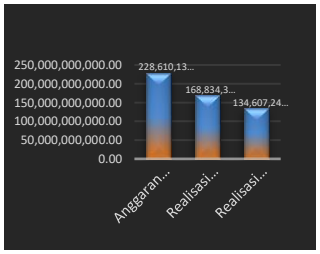
Sumber: SIPD 2024

Komposisi realisasi Pendapatan Daerah TA 2024 digambarkan dalam bentuk diagram di bawah ini:

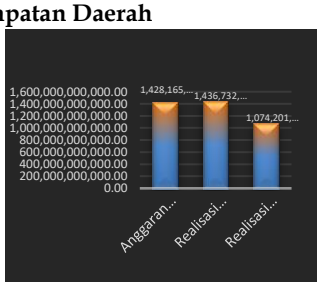
Grafik 5.1
Realisasi Pendapatan Daerah



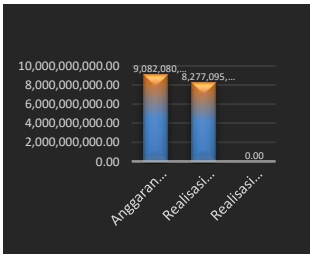
Komposisi Pendapatan Daerah



Pendapatan Asli Daerah



Pendapatan Transfer



Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Sumber : BPKAD Morowali Utara Tahun 2024

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Asli Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun Anggaran 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun Anggaran 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.2
Pendapatan Asli Daerah

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi(Rp)
Pendapatan Pajak Daerah	118.875.000.000,00	74.555.959.818,00	62,72	35.305.535.224,00
Pendapatan Retribusi Daerah	39.125.000.000,00	22.045.729.269,00	56,35	34.769.349.686,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.861.556.000,00	5.229.148.166,00	89,21	3.864.163.872,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	64.748.577.180,00	67.003.477.838,99	103,48	60.668.193.934,42
Jumlah	**228.610.133.180,00**	**168.834.315.091,99**	**73,84**	**134.607.242.716,42**

Sumber: SIPD 2024

5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Pajak Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun Anggaran 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun Anggaran 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.3
Pendapatan Pajak Daerah Menurut Objek

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Pajak Hotel	200.000.000,00	196.054.950,00	98,03	182.041.100,00
Pajak Restoran	1.500.000.000,00	2.347.793.741,00	156,52	2.121.715.078,00
Pajak Hiburan	25.000.000,00	11.800.000,00	47,20	8.920.000,00
Pajak Reklame	100.000.000,00	337.875.945,00	337,88	99.493.191,00
Pajak Penerangan Jalan	78.020.000.000,00	41.769.100.617,00	53,54	16.899.697.283,00
Pajak Air Tanah	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Gol.C	25.000.000.000,00	18.254.572.618,00	73,02	5.872.137.110,00
Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)	10.000.000.000,00	6.812.038.018,00	68,12	5.646.019.379,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)	4.000.000.000,00	4.826.723.929,00	120,67	4.475.512.083,00
Jumlah	**118.875.000.000,00**	74.555.959.818,00	62,72	**35.305.535.224,00**

Sumber: SIPD 2024

Penjelasan:

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Pajak Daerah di Tahun Anggaran dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang diuraikan diantaranya sebagai berikut:

1. Realisasi Pajak Hotel Tahun 2024 merupakan Realisasi dari Pajak Hotel/Cottage sebesar Rp196.054.950,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp200.000.000,00 atau 98,03%, Jika

dibandingkan Realisasi Tahun 2023 sebesar Rp182.041.100,00 mengalami kenaikan sebesar Rp14.013.850,00.

2. Realisasi Pajak Restoran Tahun 2024 adalah realisasi dari Pajak Rumah Makan sebesar Rp2.347.793.741,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.500.000.000,00 atau 156,52%. Jika dibandingkan Realisasi Tahun 2023 sebesar Rp2.121.715.078,00 mengalami kenaikan sebesar Rp226.078.663,00. Hal ini disebabkan adanya peningkatan jumlah wajib pajak sehingga penerimaan pajak menjadi meningkat sesuai target yang direncanakan berdasarkan wajib pajak yang sudah terdata atau terdaftar sebelumnya.

3. Realisasi Pajak hiburan Tahun 2024 merupakan realisasi dari pagelaran kesenian/ musik/ tari/ busana sebesar Rp11.800.000,00 dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp25.000.000,00 atau 47,20%, Jika dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp8.920.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.880.000,00.

4. Realisasi Pajak Reklame Tahun 2024 merupakan realisasi dari reklame papan/*billboard/videotron/megatron* sebesar Rp337.875.945,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp100.000.000,00 atau 337,88%, jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp99.493.191,00 mengalami kenaikan sebesar Rp238.382.754,00.

5. Realisasi Pajak Penerangan Jalan Tahun 2024 merupakan realisasi dari Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri sebesar Rp41.769.100.617,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp78.020.000.000,00 atau 53,54%, Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp16.899.697.283,00 mengalami kenaikan sebesar Rp24.869.403.334,00.

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Golongan C, realisasi Tahun 2024 sebesar Rp18.254.572.618,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp25.000.000.000,00 atau 73,02% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp5.872.137.110,00 mengalami kenaikan sebesar Rp12.382.435.508,00, terjadinya peningkatan disebabkan karena terjadi peningkatan aktivitas pengambilan/pemanfaatan Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan (Galian C) baik untuk keperluan komersial (jual/beli) maupun untuk keperluan lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan tentang perpajakan daerah, sehingga menyebabkan meningkatnya penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

7. Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2024 merupakan realisasi dari PBB sektor Pedesaan-Perkotaan sebesar Rp6.812.038.018,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp10.000.000.000,00 atau 68,12%, jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp5.646.019.379,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.166.018.639,00.

8. Realisasi Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Tahun 2024 merupakan realisasi dari BPHTB atas Perolehan Pemindahan Hak sebesar Rp4.826.723.929,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp4.000.000.000,00 atau 120,67%, jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp4.475.512.083,00 mengalami kenaikan sebesar Rp351.211.846,00, disebabkan karena terjadi peningkatan transaksi perolehan hak atas tanah baik hak perolehan baru maupun peralihan hak sehingga menyebabkan peningkatan penerimaan BPHTB Tahun 2024.

   Pemungutan Pajak Daerah diatas telah dilandasi oleh Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Retribusi Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun Anggaran 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun Anggaran 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.4
Pendapatan Retribusi Daerah menurut Objek

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Retribusi Jasa Umum	3.600.000.000,00	3.666.087.035,00	101,84	**6.824.553.030,00**
• Retribusi Pelayanan Kesehatan	3.000.000.000,00	3.183.592.035,00	106,12	6.313.053.030,00
• Retribusi Pelayanan Pasar	600.000.000,00	482.495.000,00	80,42	511.500.000,00
Retribusi Jasa Usaha	525.000.000,00	498.190.491,00	94,89	**312.512.204,00**
• Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	50.000.000,00	22.000.000,00	44,00	53.632.000,00
• Retribusi Tempat Khusus Parkir	175.000.000,00	72.750.000,00	41,57	68.868.000,00
• Retribusi Rumah Potong Hewan	50.000.000,00	25.740.000,00	51,48	35.020.000,00
• Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	200.000.000,00	314.699.491,00	157,35	122.662.204,00
• Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	50.000.000,00	63.001.000,00	126,00	32.330.000,00
Retribusi Perizinan Tertentu	35.000.000.000,00	17.881.451.743,00	51,09	**27.632.284.452,00**
• Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00	17.771.530.832,00
• Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	20.000.000.000,00	355.590.643,00	1,78	0,00
• Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing	15.000.000.000,00	17.525.861.100,00	116,84	9.860.753.620,00
Jumlah	**39.125.000.000,00**	22.045.729.269,00	56,35	**34.769.349.686,00**

Sumber: SIPD 2024

Penyebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada pendapatan retribusi daerah Tahun 2024 jika dibandingkan realisasi tahun sebelumnya antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Retribusi Jasa Umum

   a. Retribusi Pelayanan Kesehatan realisasi melebihi dari pagu anggaran yang ditetapkan hal ini disebabkan karena pada tahun anggaran 2024 adanya peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan yang berada di 14 Puskesmas Se-Kabupaten Morowali Utara sehingga masyarakat yang berobat merasa puas dengan layanan Kesehatan yang diberikan.

   b. Retribusi Pelayanan Pasar realisasi belum mencapai target yang ditetapkan. Adapun faktor yang mengakibatkan belum tercapainya target retribusi daerah yaitu fasilitas belum memadai, kurangnya pelayanan SDM yang belum memadai, dan kurangnya sosialisasi, faktor ekonomi dan rendahnya kesadaran masyarakat. Namun atas kendala tersebut OPD terkait terus melakukan pembenahan dengan menganggarkan dana untuk meningkatkan

atau memperbaiki fasilitas, meningkatkan pelayanan, memberikan pelatihan, dan memaksimalkan sosialisasi serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya retribusi daerah.

2. Retribusi Jasa Usaha

   a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas Pemakaian Kekayaan Daerah yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Pada Tahun Anggaran 2024 Pendapatan Daerah yang bersumber dari Retribusi Jasa Usaha sewa alat kendaraan bermotor pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumbahan Daerah terealisasi sebesar Rp22.000.000,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp50.000.000,00 atau 44%.

   b. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Pada tahun 2024 terelisasi sebesar Rp72.750.000,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp175.000.000,00 atau 41,57% dapat dijelaskan bahwa realisasi pendapatan retribusi parkir tahun anggaran 2024 masih sangat rendah hal ini disebabkan karena tarif yang ditetapkan masih sangat rendah dalam Peraturan Kepala Daerah terkait dengan ketetapan retribusi parkir, kemudian lahan-lahan parkir yang tersedia masih sangat kurang dan belum memadai serta tidak dikelola dengan baik. Namum kedepan OPD terkait dalam hal ini Dinas Perhubungan akan melakukan evaluasi dan perubahan Perkada tentang tarif baru yang mengatur tentang retribusi parkir.

   c. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp25.740.000,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp50.000.000,00 atau 51,48% dapat dijelaskan bahwa realisasi pendapatan retribusi pemotongan hewan Tahun Anggaran 2024 masih belum mencapai target hal ini disebabkan karena ketersediaan infrastruktur RPH yang memenuhi standar teknis kesehatan masyarakat veteriner, kesejahteraan hewan dan kehalalan masih sangat terbatas sehingga sangat berpengaruh terhadap pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Rumah Potong Hewan.

   d. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pembayaran retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp314.699.491,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp200.000.000,00 atau 157,35% dapat dijelaskan bahwa realisasi pendapatan retribusi pelayanan kepelabuhanan tahun anggaran 2024 masih belum mencapai target hal ini disebabkan karena masih kurangnya pemahaman Sumber Daya Manusia yang melakukan pemungutan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari retribusi kepelabuhanan sehingga menyebabkan belum optimalnya penerimaan yang bersumber dari retribusi kepelabuhanan tersebut.

   e. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas hasil produksi usaha daerah yang dijual oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Pada Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp63.001.000,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp50.000.000,00 atau 126% dapat dijelaskan bahwa realisasi pendapatan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Tahun Anggaran 2024 masih belum mencapai target hal ini disebabkan karena masih kurangya daya beli

masyarakat yang memanfaatkan penjualan hasil produksi usaha daerah baik itu dari bibit benih ikan maupun bibit benih tanaman.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

   a. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) adalah izin atau persetujuan yang diberikan oleh pemerintah daerah atau instansi terkait untuk pembangunan atau perubahan suatu bangunan. PBG diperlukan untuk memastikan bahwa rencana pembangunan atau renovasi suatu gedung sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, seperti peraturan tata ruang, keselamatan bangunan, dan lingkungan.

      Proses PBG mencakup pemeriksaan dokumen perencanaan bangunan, desain, struktur, dan aspek keselamatan, serta ketaatan terhadap peraturan zonasi, tata kota, dan lingkungan. Tanpa PBG, pembangunan atau perubahan pada bangunan tidak sah menurut hukum dan bisa dikenakan sanksi.

      Pada tahun 2024 Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) terealisasi sebesar Rp355.910.213,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp20.000.000.000,00 atau 1,78%. Dapat dijelaskan bahwa realisasi PBG tahun anggaran 2024 masih belum mencapai target hal ini disebabkan karena masih kurangnya sosialisasi kepada wajib pajak dan minimya kesadaran masyarakat dalam mengurus pembayaran PBG.

   b. Retribusi Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing merupakan pembayaran atas pemberian perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing yang telah memiliki IMTA dari menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau Pejabat yang ditunjuk. Pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp17.525.861.100,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp15.000.000.000,00 atau 116,84%.

   Pemungutan Pajak Daerah diatas telah dilandasi oleh Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2024 dan 2023 yang merupakan Pendapatan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD yang dianggarkan sebesar Rp5.861.556.000,00 dan direalisasikan pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5.229.148.166,00, persentase capaian realisasinya 89,21% dan yang direalisasikan pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.864.163.872,00, terjadi kenaikan sebesar Rp1.364.984.294,00. Terjadi kenaikan dari tahun sebelumnya disebabkan karena adanya penambahan penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Sulteng sehingga hal ini dapat meningkatkan kepemilikan saham yang berujung pada peningkatan porsi dividen yang diterima Pemerintah Daerah.

5.1.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun Anggaran 2024, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada Tahun Anggaran 2023 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.5
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah menurut Objek

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	2.860.463.600,00	0,00	1.153.895.200,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	25.750.000,00	0,00	0,00
Jasa Giro	3.000.000.000,00	2.232.544.021,00	74,42	4.143.819.084,00
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	1.630.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	2.100.000.000,00	1.608.177.761,59	76,58	1.760.001.994,00
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	319.570,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian	8.050.036.817,00	5.327.288.027,52	66,18	6.775.150.413,42
Pendapatan BLUD	49.968.540.363,00	54.948.934.858,88	109,97	38.673.695.152,00
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	0,00	0,00	0,00	8.161.632.091,00
Jumlah	**64.748.577.180,00**	**67.003.477.838,99**	**103,48**	**60.668.193.934,42**

Sumber: SIPD 2024

Penjelasan:

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah di Tahun Anggaran 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

1. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan

   Realisasi hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebesar Rp2.860.463.600,00 yang merupakan hasil penjualan alat angkutan darat dari hasil Lelang penjualan kendaraan dinas. Lelang Nomor: 393/16.03/2024-01 tanggal 28 Agustus 2024.

2. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

   Realisasi hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebesar Rp25.750.000,00 yang merupakan hasil sewa BMD berdasarkan SK Bupati Nomor 14 Tahun 2021 tentang pengelolaan Gedung sewa morokoa.

3. Penerimaan Jasa Giro Tahun 2024 terdiri dari**:**

   Realisasi penerimaan Jasa Giro Tahun 2024 sebesar Rp2.232.544.021,00 yang merupakan realisasi Jasa Giro Kas Daerah, dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp3.000.000.000,00 atau 74,42% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp4.143.819.084,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.911.275.063,00. Jasa giro pada kasda sebesar Rp2.228.979.159,00 dan jasa giro pada kas bendahara pengeluaran sebesar Rp3.564.862,00.

4. Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

   Realisasi Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun 2024 sebesar Rp1.608.177.761,59 berasal dari Badan Pendapatan Daerah dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.100.000.000,00 atau 76,58%. Dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp1.760.001.994,00 mengalami penurunan sebesar Rp156.217.632,41.

Tabel 5.6
Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

NO	Uraian	Nilai (Rp)
1	Denda Keterlambatan Pekerjaan pembuatan WC pelataran kantor bupati CV Boanerges	363.300,00
2	Pembayaran denda keterlambatan pekerjaan bagi CV. Marchelino Perkasa atas pekerjaan pembuatan tambangan penyeberangan desa mayumba Kec. Mori Utara	4.325.507,00
3	pembayaran denda keterlambatan pek. Bagi CV ARKA BISATA ENGINEERING atas pek. Pelebaran jalan SP3 jalan provonsi (Depot Pertamina Tahun 2023}	9.928.215,15
4	Setoran Tunai CV. Indah Sarana Denda Keterlamabatan Pekerjaan	150.000.000,00
5	Denda Keterlambatan Pekerjaan Pengaspalan Jalan SP3 Desa Peonea Kec. Mori Atas TA 2024 CV Lima Dua	31.762.553,39
6	Denda Keterlambatan atas pekerjaan CV Hanan Berjaya	4.946.156,38
7	Denda Keterlambatan atas pekerjaan CV Hanan Berjaya	9.291.156,48
8	Denda Keterlambatan Pekerjaan CV. Hosana	2.282.000,00
9	Denda Keterlambatan Pekerjaan CV. Hosana	693.000,00
10	Denda Keterlambatan atas penyaluran kegiatan pengadaan sembako bersubsidi	871.720,00
11	Setoran Tunai CV. Indah Sarana Denda Keterlamabatan Pekerjaan	150.000.000,00
12	Denda Kekuranga Volume pekerjaan rekonstruksi SP3 jalan provinsi - Taronggo Tahun 2022 an. Fita Bungku Persada	523.803.000,00
13	Denda Keterlambatan Pekerjaan peningkatan jalan ensa - lanumor (DAK) Tahun 2024 PT. Timur Putra Celebes	291.618.498,59
14	Denda Keterlambatan Pekerjaan Pembangunan jembatan puawu tahap II desa wawopada kec. Lembo TA 2024 CV Putra Bintang Pratama	8.142.829,00
15	Denda Keterlambatan Pekerjaan Pembangunan atas pelaksanaan Bronjong Desa Opo Dusun II Kec. Bungku Utara TA 2024 CV Ryzky Abadi	5.087.297,60
16	Setoran Tunai CV Indah Sarana	400.000.000,00
17	Denda Keterlambatan Pekerjaan CV CV. Bayu Dita Nugraha	10.669.128,00
18	Kor31 - Reklasifikasi pendapatan yang salah dicatat pada Pendapatan dari pengembalian BAPENDA Rp 4.393.400	4.393.400,00
	JUMLAH	**1.608.177.761,59**

Sumber: SIPD 2024

5. Pendapatan dari Pengembalian

Realisasi Pendapatan dari Pengembalian Tahun 2024 sebesar Rp5.327.288.027,52 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp8.050.036.817,00 atau sebesar 66,18%. Merupakan pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebesar Rp5.167.449.706,52 dan pengembalian belanja BOS sebesar Rp159.838.321,00. Rincian pendapatan dari pengembalian dapat dilihat pada lampiran I.

6. Pendapatan BLUD

Realisasi pendapatan BLUD Tahun 2024 sebesar Rp54.948.934.858,88 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp49.968.540.363,00 atau 109,97%. Dengan rincian pendapatan jasa layanan umum sebesar Rp54.721.960.864,00 dan Pendapatan lain-lain BLUD sebesar Rp226.973.994,88.

5.1.1.2 Pendapatan Transfer

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun Anggaran 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun Anggaran 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.7
Pendapatan Transfer

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.384.059.614.000	1.386.889.373.248,00	100,20	1.031.790.449.328
-Dana Perimbangan	1.267.799.946.000,00	1.264.779.580.248,00	99,76	921.236.099.328,00
Dana Desa	109.581.662.000,00	109.581.662.000,00	100,00	110.554.350.000,00
Insentif Fiskal	6.678.006.000,00	12.528.131.000,00	187,60	0,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	44.105.624.843,00	49.843.333.666,00	113,01	42.411.481.00
Pendapatan Bagi Hasil	44.105.624.843,00	49.843.333.666,00	113,01	40.134.041.100,00
Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	2.277.440.000,00
Jumlah	**1.428.165.238.843,00**	**1.436.732.706.914,00**	**100,60**	**1.074.201.930.428**

Sumber: SIPD 2024

5.1.1.2.1 Dana Perimbangan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka LRA untuk pendapatan dana perimbangan Tahun 2024 dan 2023, yaitu rincian atas saldo pendapatan dana perimbangan yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2024. Persentase pencapaian realisasi, dan nilai yang direalisasikan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5.8
Dana Perimbangan

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi(Rp)
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	522.391.471.000,00	528.688.970.555,00	101,21	248.076.707.621,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	596.907.908.000,00	595.195.257.065,00	99,71	555.056.781.671,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	63.782.277.000,00	62.110.361.172,00	97,38	42.255.915.242,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	84.718.290.000,00	78.784.991.456,00	93,00	75.846.694.794,00
Jumlah	**1.267.799.946.000,00**	**1.264.779.580.248,00**	**99,76**	**921.236.099.328,00**

Sumber:SIPD 2024

Rincian saldo Dana Perimbangan diuraikan sebagai berikut:

1. Dana Bagi Hasil

Tabel 5.9
Dana Bagi Hasil

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	24.621.760.000,00	82.256.909.150,00	334,08	23.498.960.621,00
DBH PPh Pasal 21	7.926.052.000,00	5.066.779.000,00	63,93	4.702.988.000,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0,00	66.626.000,00	0,00	0,00
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	17.220.000,00	7.825.000,00	45,44	1.208.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	109.574.610.000,00	12.093.218.000,00	11,04	12.740.860.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	31.383.780.000,00	94.842.760.000,00	302,20	54.169.631.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	6.210.905.000,00	1.652.138.000,00	26,60	0,00
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	332.698.763.000,00	322.859.438.405,00	97,04	141.682.131.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	430.182.000,00	315.078.000,00	73,24	9.023.533.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	2.002.581.000,00	2.002.581.000,00	100,00	2.257.396.000,00
DBH Sawit	7.525.618.000,00	7.525.618.000,00	100,00	0,00
Jumlah	**522.391.471.000,00**	528.688.970.555,00	101,21	**248.076.707.621,00**

Sumber: SIPD 2024

Dana Bagi Hasil yang diterima pada Tahun 2024 sebesar Rp528.688.970.555,00 telah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum.

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Rincian Saldo Dana Alokasi Umum yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun Anggaran 2024, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada Tahun Anggaran 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.10
Dana Alokasi Umum (DAU)

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
DAU	596.907.908.000,00	595.195.257.065,00	99,71	554.456.781.671,00
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	0,00	0,00	0,00	600.000.000,00
Jumlah	**596.907.908.000,00**	**595.195.257.065,00**	**99,71**	**555.056.781.671,00**

Sumber: SIPD 2024

Dana Alokasi Umum yang diterima pada Tahun 2024 sebesar Rp595.195.257.065,00 telah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum.

3. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Tabel 5.11
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	498.076.000,00	498.076.000,00	100,00	566.116.000,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	6.672.152.000,00	6.672.152.000,00	100,00	11.477.140.900,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	14.928.672.000,00	14.928.672.000,00	100,00	10.839.466.100,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	11.000.000.000,00	10.908.566.000,00	99,17	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	99.963.000,00	99.950.000,00	99,99	0,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	9.404.053.000,00	9.209.487.893,00	97,93	18.836.177.242,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	1.639.959.000,00	1.581.432.000,00	96,43	237.165.000,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	0,00	0,00		299.850.000,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	19.539.402.000,00	18.212.025.279,00	93,21	0,00
Jumlah	63.782.277.000,00	62.110.361.172,00	97,38	**42.255.915.242,00**

Sumber: SIPD 2024

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang diterima pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp62.110.361.172,00, ***telah*** sesuai dengan yang ditetapkan dalam PMK No. 25 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.

4. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik

Tabel 5.12
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
DAK Non Fisik-BOS Reguler	18.948.780.000,00	16.789.684.944,00	88,61	16.871.648.350,00
DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.070.000.000,00	897.500.000,00	83,88	1.005.000.000,00
DAK Non Fisik-TPG PNSD	35.780.156.000,00	36.266.234.800,00	101,36	32.386.533.000,00
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	0,00	0,00	0,00	1.645.500.000,00
DAK Non Fisik-TKG PNSD	4.799.250.000,00	6.047.225.200,00	0,00	3.926.468.000,00
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	435.000.000,00	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	0,00	0,00	0,00	5.536.011.481,00

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	0,00	0,00	0,00	11.447.076.935,00
DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	394.744.000,00	232.076.500,00	58,79	450.927.200,00
DAK Non Fisik-BOKB-KB	4.682.775.000,00	4.619.468.000,00	98,65	1.734.241.000,00
DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	406.000.000,00	200.920.900,00	49,49	438.800.000,00
DAK Non Fisik-PK2UMK	0,00	0,00	0,00	404.488.828,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	2.795.400.000,00	36.600.000,00	1,31	0,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	3.328.327.000,00	3.363.545.999,00	101,06	0,00
DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	316.631.000,00	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	11.731.227.000,00	10.331.735.113,00	88,07	0,00
Jumlah	**84.718.290.000,00**	78.784.991.456,00	93,00	**75.846.694.794,00**

Sumber: SIPD 2024

Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik yang diterima pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp78.784.991.456,00, ***telah*** sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non fisik. Rincian Pendapatan Dana BOS dapat dilihat dalam lampiran ll.

5.1.1.2.2 Dana Desa

Dana Desa yang diterima pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp109.581.662.000,00, ***telah*** sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perpres PMK Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa dan PMK Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024. Rincian Dana Desa dapat dilihat dalam lampiran lll.

5.1.1.2.3 Insentif Fiskal

Insentif Fiskal yang diterima pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp12.528.131.000,00, dengan rincian Dana Insentif Daerah sebesar Rp5.850.125.000,00 telah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Insentif Fiskal atas Pencapaian Kinerja Daerah dan Insentif Fiskal Kinerja tahun berjalan sebesar Rp6.678.006.000,00 telah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 353 Tahun 2024 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kelompok Kategori Kesejahteraan Masyarakat Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota.

5.1.1.2.4 Pendapatan Bagi Hasil

Rincian Pendapatan Bagi Hasil yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun Anggaran 2024, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada Tahun Anggaran 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.13
Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	7.078.666.714,00	6.895.774.080,00	97,42	6.718.905.427,00
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	8.296.953.566,00	8.019.832.291,00	96,66	7.205.161.489,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	15.473.367.484,00	22.719.078.806,00	146,83	14.909.457.838,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	4.262.848.077,00	3.465.855.075,00	81,30	2.905.626.373,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	8.993.789.002,00	8.742.793.414,00	97,21	8.394.889.973,00
Jumlah	**44.105.624.843,00**	**49.843.333.666,00**	**113,01**	**40.134.041.100,00**

Sumber: SIPD 2024

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Bagi Hasil di Tahun Anggaran 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

1. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor

   Semakin banyak kendaraan baru yang didaftarkan, sehingga semakin meningkat pendapatan dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

2. Kenaikan harga bahan bakar

   Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dihitung berdasarkan persentase dari harga jual bahan bakar, maka kenaikan harga BBM dapat meningkatkan penerimaan PBBKB di tahun 2024.

3. Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak

   Adanya peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaaraan.

4. Penegakan Hukum dan Razia Pajak

   Razia kendaraan yang dilaksanakan oleh BAPENDA bekerjasama dengan SAMSAT dalam hal menertibkan kendaraan yang menunggak pajak dapat mendorong wajib pajak melunasi kewajiban mereka.

5. Pertumbuhan Ekonomi Regional

   Dengan ekonomi yang lebih baik, daya beli masyarakat meningkat, termasuk pembelian kendaraan baru dan konsumsi BBM.

6. Kenaikan tarif cukai rokok

   Pemerintah secara berkala menaikan tarif cukai rokok, yang berdampak langsung pada peningkatan pendapatan pajak rokok, termasuk bagian yang dibagi hasil ke daerah.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 900.1.14.3/11/BAPENDA-G.ST/2024 Tentang Penetapan Besaran Target Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Bagian Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2024 dan SK Kurang Salur Dana Bagi Hasil Pajak daerah tahun anggaran 2023 Nomor: 900.1.14.3/29/BAPENDA-G.ST/2024.

Secara rinci dapat dilihat pada lampiran IV.

5.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Lain-Lain Pendapatan yang Sah Tahun Anggaran 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Lain-Lain Pendapatan yang Sah yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun Anggaran 2024, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada Tahun Anggaran 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.14
Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	9.082.080.312,00	8.277.095.762,00	91,14	0,00

Sumber: SIPD 2024

5.1.1.3.1 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Lain-Lain Pendapatan yang Sah Tahun Anggaran 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Lain-Lain Pendapatan yang Sah yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun Anggaran 2024, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada Tahun Anggaran 2023. Rincian lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan dana kapitasi JKN pada Rumah Sakit Non BLUD diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.15
Pendapatan Dana Kapitasi JKN

Nama Puskesmas	Realisasi Pendapatan Dana Kapitasi JKN 2024 (Rp)	Realisasi Pendapatan Dana Kapitasi JKN 2023 (Rp)
PKM Petumbea	576.824.666,00	575.005.364,00
PKM Mayumba	488.372.736,00	544.697.379,00
PKM Pandauke	637.486.454,00	694.062.374,00
PKM Baturube	911.773.027,00	1.003.283.153,00
PKM Tambayoli	230.040.014,00	238.468.139,00
PKM Pancamakmur	419.375.096,00	393.821.634,00
PKM Lee	209.201.762,00	223.270.316,00
PKM Tomata	796.221.935,00	702.168.219,00
PKM Beteleme	985.436.837,00	1.019.377.971,00
PKM Kolonodale	1.102.769.387,00	1.015.911.218,00
PKM Molino	1.149.946.201,00	1.100.492.305,00
PKM Anutoluwu	528.160.431,00	546.782.315,00
PKM Lijo	126.729.558,00	104.291.704,00
PKM Wongko Ndaya	114.757.658,00	0,00
Jumlah	**8.277.095.762,00**	**8.161.632.091,00**

Sumber: SIPD 2024

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Tahun Anggaran 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
   a. Bertambahnya jumlah dokter berpengaruh bertambahnya jumlah kapitasi
   b. Bertambahnya kepesertaan anggota BPJS.

5.1.2 Belanja Daerah

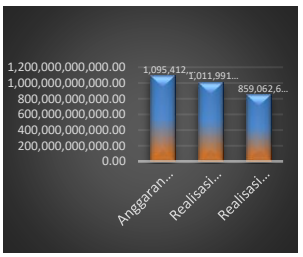
Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Belanja Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun Anggaran 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun Anggaran 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.16
Belanja Daerah

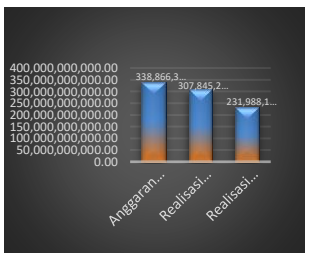
Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Operasi	1.095.412.945.221,18	**1.011.991.709.596,48**	**92,38**	859.062.606.693,26
Belanja Modal	338.866.386.661,82	**307.845.218.053,18**	**90,85**	231.988.131.589,27
Belanja Tidak Terduga	3.150.000.000,00	1.157.886.000,00	36,76	140.000.000,00
Belanja Transfer	228.062.860.952,00	226.451.591.862,00	99,29	215.073.770.589,00
Jumlah	**1.665.492.192.835,00**	**1.547.446.405.511,66**	**92,91**	**1.306.264.508.871,53**

Sumber: SIPD 2024

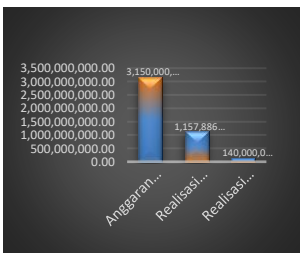
Grafik 5.2
Realisasi Belanja Operasi



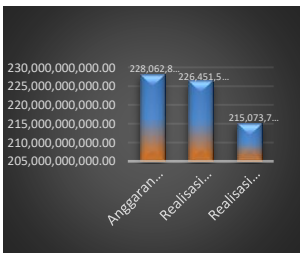
Belanja Operasi



Belania Modal



Belanja Tidak Terduga



Belanja Transfer

5.1.2.1 Belanja Operasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Belanja Operasi yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun Anggaran 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun Anggaran 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.17
Belanja Operasi

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja pegawai	546.843.749.515,36	497.246.280.767,00	90,93	425.231.570.909,00
Belanja barang dan jasa	451.830.016.908,82	418.957.792.995,49	92,72	376.440.314.339,00
Belanja bunga	8.841.204.660,00	8.622.865.171,00	97,53	1.659.124.491,00
Belanja hibah	59.376.050.082,00	58.682.833.607,99	98,83	22.516.369.666,00
Belanja bantuan sosial	28.521.924.055,00	28.481.937.055,00	99,86	33.215.227.288,26
Jumlah	**1.095.412.945.221,18**	**1.011.991.709.596,48**	**92,38**	**859.062.606.693,26**

Sumber: SIPD 2024

Komposisi realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 digambarkan dalam bentuk grafik dibawah ini:

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Belanja Pegawai yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun Anggaran 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun Anggaran 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.18
Belanja Pegawai

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	327.403.752.186,96	289.868.847.673,00	88,54	246.704.342.115,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	124.568.582.264,00	109.791.307.469,00	88,14	95.457.476.468,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	57.812.818.766,40	56.367.126.065,00	97,50	55.055.678.452,00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	11.049.685.981,00	10.951.341.721,00	99,11	10.835.454.019,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	196.640.136,00	172.506.157,00	87,73	173.075.819,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	828.000.000,00	746.000.000,00	90,10	1.080.600.000,00
Belanja Pegawai BLUD	24.984.270.181,00	29.349.151.682,00	117,47	15.924.944.036,00
Jumlah	**546.843.749.515,36**	**497.246.280.767,00**	**90,93**	**425.231.570.909,00**

Sumber: SIPD 2024

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Pegawai di Tahun Anggaran 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

a. Jika melihat tabel tersebut diatas, pada tahun anggaran 2024 realisasi belanja Gaji dan Tunjangan ASN, belanja Tambahan Penghasilan ASN, belanja penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN serta belanja gaji dan tunjangan DPRD jika dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2023 rata-rata mengalami kenaikan sebesar 90%. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan pegawai yang pembiayaanya bersumber dari PPP3K serta adanya penyesuaian tunjangan pada Aparatur Sipil Negara.

b. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH serta belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD jika dibandingkan realisasi tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 40% hal ini disebabkan karena adanya penyesuaian gaji dan tunjangan bagi Kepala daerah dan Wakil kepala daerah beserta Pimpinan DPRD sehingga menyebabkan terjadinya penurunan angka realisasi.

c. Belanja Pegawai BLUD mengalami kenaikan, karena terjadi kenaikan pendapatan BLUD pada RSUD Kolonodale dan juga karena bertambahnya jumlah Pegawai RSUD Kolonodale.

2. Rincian saldo Belanja Pegawai yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun Anggaran 2024, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada Tahun Anggaran 2023 di masing-masing OPD dapat dilihat pada lampiran V.a.

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun Anggaran 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun Anggaran 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.19
Belanja Barang dan Jasa

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Barang	104.549.758.439,84	97.796.917.133,89	93,54	86.155.198.379,00
Belanja Jasa	166.022.331.469,00	154.942.886.592,00	93,33	143.177.571.679,00
Belanja Pemeliharaan	42.940.333.219,98	39.790.645.977,00	92,66	43.001.431.073,00
Belanja Perjalanan Dinas	93.851.421.731,00	87.341.007.680,00	93,06	72.551.707.887,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	677.500.000,00	620.298.000,00	91,56	1.619.484.980,00
Belanja Barang dan Jasa BOS	20.679.177.468,00	16.912.608.419,00	81,79	17.284.204.955,00
Belanja Barang dan Jasa BOSP	465.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD	22.644.494.581,00	21.553.429.193,60	95,18	12.650.715.386,00
Jumlah	**451.830.016.908,82**	418.957.792.995,49	92,72	**376.440.314.339,00**

Sumber: SIPD 2024

Penjelasan:

1. Tahun anggaran 2024 belanja barang dan jasa dianggarkan sebesar Rp451.830.016.908,82 direalisasikan sebesar Rp418.957.792.995,49 atau 92,72%. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi anggaran pada belanja barang dan jasa tahun anggaran 2024 dan dibandingkan

dengan realisasi tahun sebelumnya mengalami kenaikan 11,29%. Secara umum dapat dijelaskan diantaranya sebagai berikut:

a. Keterlambatan Proses Pengadaan

Proses pengadaan barang/jasa pada tahun berkenaan terkesan lambat dilaksankan hal ini karena adanya kendala administrasi, teknis, dan lelang yang gagal, sehingga menjadi penyebab rendahnya realisasi anggaran.

b. Perubahan Prioritas atau Kebijakan

Adanya pergeseran kebijakan atau perubahan kegiatan mendadak, seperti pergeseran anggaran, sehingga dapat mempengaruhi pelaksanaan belanja barang dan jasa.

c. Kendala Teknis atau Alam

Adanya proyek pengadaan yang bergantung pada kondisi cuaca atau beberapa faktor geografis sehingga hal ini menyebabkan realisasi belanja rendah.

2. Rincian belanja barang yang diserahkan kepada pihak ketiga dapat dilihat pada lampiran VI.
3. Rincian belanja barang BOS dapat dilihat pada lampiran VII.
4. Rincian saldo Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun Anggaran 2024, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada Tahun Anggaran 2023 di masing-masing SKPD dapat dilihat pada lampiran V.b.

5.1.2.1.3 Belanja Bunga

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Bunga Tahun Anggaran 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Belanja Bunga yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun Anggaran 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun Anggaran 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.20
Belanja bunga

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	8.840.204.660,00	8.622.865.171,00	97.53	1.659.124.491,00

Sumber: SIPD 2024

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Bunga di Tahun Anggaran 2024 dan 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, karena Tahun Anggaran 2024 belanja bunga dianggarkan sebesar Rp8.840.204.660,00 dan direalisasikan sebesar Rp8.622.865.171,00 atau 97,53%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya mengalami kenaikan hal ini merupakan Pembayaran Kewajiban Bunga Pinjaman dalam rangka mendukung Program PEN Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Periode Bulan Januari s.d Desdmber 2024.
2. Rincian saldo Belanja Bunga yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun Anggaran 2024, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada Tahun Anggaran 2023 di masing-masing SKPD dapat dilihat pada lampiran V.c.

5.1.2.1.4 Belanja Hibah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Hibah Tahun Anggaran 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Belanja Hibah yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun Anggaran 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun Anggaran 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.21
Belanja Hibah

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	**43.400.000.000,00**	**43.200.000.000,00**	**99,54**	**9.666.957.000,00**
• Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	43.400.000.000,00	43.200.000.000,00	99,54	9.666.957.000,00
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	**14.850.637.218,00**	**14.358.626.945,00**	**96,69**	**12.197.632.666,00**
• Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	726.784.965,00	570.631.945,00	78,51	2.742.713.800,00
• Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	6.957.452.253,00	6.636.595.000,00	95,39	3.589.918.950,00
• Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	6.716.400.000,00	6.701.400.000,00	99,78	5.764.999.916,00
• Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	450.000.000,00	450.000.000,00	100,00	100.000.000,00
Belanja Hibah Dana BOS	**433.386.201,00**	**432.180.000,00**	**99,72**	**0,00**
• Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	433.386.201,00	432.180.000,00	99,72	0,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	**692.026.663,00**	**692.026.662,99**	**99,99**	**651.780.000,00**
• Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	**692.026.662,00**	**692.026.662,99**	**99,99**	**651.780.000,00**
Jumlah	**59.376.050.082,00**	**58.682.833.607,99**	**98,83**	**22.516.369.666,00**

Sumber: SIPD 2024

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Hibah di Tahun Anggaran 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
   a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat

      Belanja hibah kepada Pemerintah Pusat mengalami kenaikan sebesar Rp33.533.043.000,00, atau 77,62% jika dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena pada Tahun Anggaran 2024 dialokasikan anggaran bagi:

      1) TNI/POLRI sebesar Rp10.200.000.000,00, berdasarkan NPDH Nomor : 032/0256/KESBANGPOL/X/2024, Nomor : 8/508/X/2024,
      2) BAWASLU sebesar Rp7.875.000.000,00 berdasarkan NPHD Nomor : 032/0396/KESBANGPOL/XI/2023, Nomor : 011/KU.00.00/K.ST.07/11/2023; dan

3) KPU sebesar Rp25.125.000.000,00, berdasarkan NPHD Nomor : 180/0381/hkm/XI/2023, Nomor : 315/KU.07-NK/7212/2023 untuk mendanai kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah.

b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia mengalami kenaikan sebesar Rp2.160.994.279,00, atau 15,05% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan kebutuhan bantuan kepada Masyarakat/Lembaga, pelaksanaan program prioritas pemerintah daerah disesuaikan dengan alokasi anggaran berdasarkan usulan dan kebutuhan yang masuk. Yang terdiri dari:

1) Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, berdasarkan SK Bupati No:188.45/KEP-B.MU/0196/IIX/2024 Peningkatan Rumah Ibadah,

2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar, berdasarkan SK Bupati Nomor : 19/NPHD/KESRA/IX/2024, Permintaan Pembayaran Bantuan Hibah Peningkatan Kapasitas Tokoh Agama,

3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan, berdasarkan NPHD Nomor : 43/NPHD/KESRA/XII/2024, Kepada Lembaga Keagamaan, dan

4) Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, berdasarkan SK Bupati No.NPHD Ta.a Wana Raya, Nomor :032/022/umum/IX/2024, Nomor:06/BPH-AMAN/TW/IX/2024, No. NPHD kerukunan Keluarga Toraja Tahap II, Nomor :032/0230/umum/IX/2024, Nomor:005/KKT-MORUT/IX/2024, No. NPHD Kerukunan Keluarga Mori Toongku, Nomor:032/0229/umum/IX/2024, Nomor:13/KKMTT-PUSAT/IX/2024, No. NPHD Kerukunan Keluarga Nusa Tenggara Timur, Nomor : 032/0226/umum/IX/2024, Nomor:03/KKNTT/IX/2024.

c. Pemberian Hibah Dana BOSP merupakan pemberian hibah kepada:

Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta Tahun Anggaran 2024 yang didasarkan pada pada Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor 188.45/KEP-B.MU/0179/VIII/2024 Tahun 2024 tentang Pemberian Dana Hibah Biaya Operasional Sekolah Jenjang SD dan SMP Swasta Kabupaten Morowali Utara. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.22
Belanja Hibah Dana BOSP

Uraian	Realisasi 2024 (Rp)
SD ALESINTOWE	14.400.000,00
SD ANUGRAH	14.400.000,00
SD GKST TARONGGO	10.800.000,00
SD SALIANO	14.400.000,00
SD Woonsa	14.400.000,00
SEKOLAH DASAR FATUMARANDO TERPADU	14.400.000,00
SMP-ISLAM AL-MADINAH	10.800.000,00

Uraian	Realisasi 2024 (Rp)
SD GKST BETELEME	10.800.000,00
SMP GKST BETELEME	12.600.000,00
SD GKST RONTA	13.140.000,00
SD GKST SEA	14.400.000,00
SD Islam Terpadu AL-MUHAJIRIN	14.400.000,00
SD GKST ENSA	10.800.000,00
SD GKST GONTARA	10.800.000,00
SD Tunas Lestari Korola	30.060.000,00
SMP KRISTEN GKST ENSA	18.360.000,00
SD ALKHAIRAAT KOLONODALE	48.600.000,00
SD GKST KOLONODALE	37.080.000,00
SD IT WALADUN SHALIH KOROLAKI	10.800.000,00
SD GKST TIU	14.760.000,00
SD KRISTEN GKST SAMPALOWO	10.800.000,00
SMP KRISTEN GKST TIU	15.840.000,00
SD ALKHAERAAT BUNGINTIMBE	30.420.000,00
SMP ALKHAIRAAT BUNGINTIMBE	34.920.000,00
Jumlah	**432.180.000,00**

Sumber: SIPD 2024

d. Pemberian Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik merupakan pemberian hibah kepada Partai Politik yang didasarkan pada Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor :188.45/KEP-B.MU/0033/II/2024 dan telah diubah dengan Surat Keputusan Bupati Nomor :188.45/KEP-B.MU/0226/IX/2024 Tahun Anggaran 2024. Belanja hibah bantuan keuangan kepada Partai Politik mengalami kenaikan sebesar Rp36.166.463.941,99 atau 61,63% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan dari jumlah perolehan suara sehingga hal ini sangat mempengaruhi bertambahnya realisasi maupun pagu anggaran. Dengan nilai bantuan keuangan kepada masing-masing partai politik diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.23
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Uraian	Realisasi 2024 (Rp)
Hibah Bantuan Keuangan Kepda Partai Politik (GOLKAR)	199.493.333,00
Hibah Bantuan Keuangan Kepda Partai Politik (PERINDO)	35.166.666,00
Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (HANURA)	76.286.666,00
Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (NASDEM)	100.489.999,33
Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (DEMOKRAT)	52.250.000,00
Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (PDIP)	46.720.000,00
Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (GERINDRA)	57.703.333,00
Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (PKB)	72.693.333,00
Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (PKS)	27.843.332,66
Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (PBB)	23.380.000,00
Jumlah	**692.026.662,99**

Sumber: SIPD 2024

2. Rincian saldo Belanja Hibah yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada masing-masing OPD pada lampiran V.d.

5.1.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Belanja Bantuan Sosial yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun Anggaran 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun Anggaran 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.24
Belanja Bantuan Sosial

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	9.997.284.050,00	9.997.284.050,00	100	11.875.008.400,00
• Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	9.997.284.050,00	9.997.284.050,00	100	11.875.008.400,00
Belanja Bantuan Sosial kepada kelompok masyarakat	18.524.640.005,00	18.484.653.005,00	99,78	21.340.218.888,26
• Belanja Bantuan Sosial Uang **kepada kelompok masyarakat**	18.524.640.005,00	18.484.653.005,00	99,78	21.340.218.888,26
Jumlah	**28.521.924.055,00**	**28.481.937.055,00**	**99,86**	**33.215.227.288,26**

Sumber: SIPD 2024

Penjelasan:

1. Pada tahun anggaran 2024 untuk Belanja bantuan sosial yang direncanakan kepada individu dan kepada Masyarakat dibandingkan tahun anggaran 2023 mengalami penurunan hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran pada pemerintah daerah yang pada tahun berkenaan pemerintah lebih memprioritaskan pengeluaran belanja disektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.
2. Pemberian bantuan sosial di atas, sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 188.45/KEPB.MU/0080/III/2024 tentang pemberian bantuan hibah bantuan sosial kepada kelompok masyarakat.
3. Rincian saldo Belanja Bantuan Soial yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada masing-masing OPD pada lampiran V.e.

5.1.2.2 Belanja Modal

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun Anggaran 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun Anggaran 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.25
Belanja Modal

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Tanah	5.570.407.150,00	1.963.260.000,00	35,24	1.110.890.900,00
Belanja Peralatan Dan Mesin	82.070.107.453,00	76.216.049.055,00	92,87	36.930.658.470,00
Belanja Bangunan Dan Gedung	96.842.669.687,51	88.382.929.824,18	91,26	80.182.171.788,27
Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan	154.128.202.371,31	141.028.364.474,00	91,50	113.670.285.431,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	255.000.000,00	254.614.700,00	99,85	94.125.000,00
Jumlah	**338.866.386.661,82**	**307.845.218.053,18**	**90,85**	**231.988.131.589,27**

Sumber: SIPD 2024

Penjelasan Belanja Modal:

Pada tahun anggaran 2024 Belanja Modal pada pemerintah daerah Kabupaten Morowali Utara dianggarkan sebesar Rp338.866.386.661,82 dan terealisasi sebesar Rp307.845.218.053,18 atau 90,85%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar 32,70%. Persentase kenaikan ini disebabkan antara lain:

- Peningkatan kebutuhan infrastruktur

  Pemerintah daerah meningkatkan alokasi anggaran untuk Pembangunan dan perbaikan infrastruktur seperti jalan, jembatan, Gedung sekolah dan fasilitas Kesehatan.

- Program Prioritas Daerah

  Pemerintah daerah kabupaten morowali utara menganggarkan pengadaan alat-alat Kesehatan untuk menunjang operasional pelayanan Kesehatan pada rumah sakit umum daerah dan puskesmas Se Kabupaten Morowali Utara.

5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2024 sebesar Rp1.963.260.000,00 atau 35,24% dari anggaran sebesar Rp5.570.407.150,00, jika dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp1.110.890.900,00 mengalami kenaikan sebesar Rp852.369.100,00, disebabkan karena adanya kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara untuk pembangunan, dibutuhkan adanya pembebasan lahan. Belanja Modal Tanah sebesar Rp1.963.260.000,00 merupakan realisasi dari belanja modal lapangan yang digunakan sebagai tanah untuk jalan.

Rincian saldo Belanja Modal - Tanah yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun Anggaran 2024 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing SKPD dapat dilihat pada lampiran V.f.

5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal - Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal - Peralatan dan Mesin yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun Anggaran 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun Anggaran 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.26
Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Modal Alat Besar	224.293.351,00	219.385.000,00	97,81	35.500.000,00
Belanja Modal Alat Angkutan	17.656.242.700,00	14.642.085.300,00	82,93	3.496.981.100,00
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	44.887.405,00	44.881.000,00	99,99	52.848.600,00
Belanja Modal Alat Pertanian	35.742.000,00	29.514.000,00	82,58	1.727.590.520,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	10.034.901.134,00	9.699.253.688,00	96,66	15.355.110.317,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.725.339.517,00	1.664.039.500,00	96,45	2.863.690.885,00
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	33.547.601.141,00	33.411.169.861,00	99,59	2.197.267.554,00
Belanja Modal Alat Laboratorium	1.195.153.750,00	1.194.800.000,00	99,97	1.352.625.863,00
Belanja Modal Komputer	9.640.645.250,00	8.924.884.382,00	92,58	9.095.377.779,00
Belanja Modal Alat Pengeboran	0,00	0,00	0,00	2.101.176,00
Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	213.163.360,00	213.160.000,00	100,00	106.373.348,00
Belanja Modal Rambu-Rambu	0,00	0,00	0,00	599.089.200,00
Belanja Modal Peralatan Olahraga	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	46.102.128,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	5.604.362.245,00	4.107.532.824,00	73,29	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.139.775.600,00	2.057.343.500,00	96,15	0,00
Jumlah	**82.070.107.453,00**	76.216.049.055,00	92,87	**36.930.658.470,00**

Sumber: SIPD 2024

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal - Peralatan dan Mesin di Tahun Anggaran 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
   a. Karena banyaknya fasilitas instansi kantor yang tidak layak digunakan, sehingga banyak kebutuhan peralatan dan mesin.
   b. Karena Gedung dan bangunan baru yang memerlukan banyak peralatan dan mesin.
   c. Terjadi inflasi harga peraalatan dan mesin.
2. Rincian saldo Belanja Modal - Peralatan dan Mesin yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun Anggaran 2024 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing SKPD dapat dilihat pada lampiran V.g.

5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal - Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal - Gedung dan Bangunan yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun Anggaran 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun Anggaran 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.27
Belanja Modal Gedung Dan Bangunan

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Modal Bangunan Gedung	94.132.372.787,51	85.886.267.524,18	91,24	77.451.712.195,27
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	2.510.296.900,00	2.296.962.300,00	91,50	2.730.459.593,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	200.000.000,00	199.700.000,00	99,85	0,00
Jumlah	**96.842.669.687,51**	**88.382.929.824,18**	**91,26**	**80.182.171.788,27**

Sumber: SIPD 2024

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal - Gedung dan Bangunan di Tahun Anggaran 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diantaranya karena adanya pembangunan gedung kantor yang baru.
2. Rincian saldo Belanja Modal - Gedung dan Bangunan yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun Anggaran 2024 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing SKPD dapat dilihat pada lampiran V.h.

5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun Anggaran 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun Anggaran 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.28
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	106.524.179.989,20	97.440.430.969,00	91,47	86.057.885.870,00
Belanja Modal Bangunan Air	30.167.484.451,01	28.607.837.525,00	94,83	19.355.718.711,00
Belanja Modal Instalasi	50.000.000,00	49.425.000,00	98,85	87.536.000,00
Belanja Modal Jaringan	17.386.537.931,10	14.930.670.980,00	85,87	8.169.144.850,00
Jumlah	**154.128.202.371,31**	**141.028.364.474,00**	**91,50**	**113.670.285.431,00**

Sumber: SIPD 2024

Berdasarkan rincian objek Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan terdiri atas:

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal – Jalan, Irigasi dan Jaringan di Tahun Anggaran 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

a. Karena adanya peningkatan atau pemeliharaan pembangunan jalan dan jembatan di Kabupaten Morowali Utara;

b. Adanya Pembangunan perpipaan air bersih;

c. Adanya Pembangunan tanggul;

d. Adanya pengadaan pemasangan lampu jalan.

2. Rincian saldo Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun Anggaran 2024 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing SKPD dapat dilihat pada lampiran V.i.

5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun Anggaran 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun Anggaran 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.29
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	255.000.000,00	254.614.700,00	99.85	94.125.000,00

Sumber: SIPD 2024

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya di Tahun Anggaran 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya karena adanya permintaan penambahan buku untuk Perpustakaan yang baru.
2. Rincian saldo Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun Anggaran 2024 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing SKPD dapat dilihat pada lampiran V.j

5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2024 dan 2023 yang hanya terdiri dari rincian atas saldo Belanja Tidak Terduga yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun Anggaran 2024, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada Tahun Anggaran 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.30
Belanja Tak Terduga

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Tidak Terduga	3.150.000.000,00	1.157.886.000,00	36,76	140.000.000,00

Sumber: SIPD 2024

Penjelasan:

Pada tahun anggaran 2024 Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp3.150.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.157.886.000,00 atau 36,76%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar 87,91%. Persentase kenaikan ini disebabkan karena meningkatnya kebutuhan penanganan keadaan darurat dan kejadian-kejadian tak terduga yang memerlukan alokasi dana tambahan di antaranya bencana alam. Pengeluaran atas belanja tersebut berdasarkan Peraturan Bupati Nomor : 188.45/KEP-B.MU/0159/VII/2024 tentang Persetujuan Pemberian Bantuan Penanggulangan Bencana Alam Daerah Kabupaten Morowali Utara.

5.1.2.4 Belanja Transfer

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Transfer Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Transfer Daerah – LRA yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun Anggaran 2024, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada Tahun Anggaran 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.31
Belanja Transfer

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Bagi Hasil	944.103.854,00	0,00	0,00	933.454.571,00
Belanja Bantuan Keuangan	227.118.757.098,00	226.451.591.862,00	99,71	214.140.316.018,00
Jumlah	**228.062.860.952,00**	**226.451.591.862,00**	**99,29**	**215.073.770.589,00**

Sumber: SIPD 2024

5.1.2.4.1 Belanja Bagi Hasil

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Transfer Bagi Hasil Tahun Anggaran 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Transfer Bagi Hasil yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun Anggaran 2024. Realisasi Tahun Anggaran 2024 tidak terealisasi karena anggaran yang tersedia tidak mencukupi untuk membayar tagihan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi.

5.1.2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Transfer Bantuan Keuangan – LRA Tahun Anggaran 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Transfer Bantuan Keuangan yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun Anggaran 2024, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada Tahun Anggaran 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.32
Belanja Bantuan Keuangan

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa				

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
• Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	**227.118.757.098,00**	**226.451.591.862,00**	**99,71**	**214.140.316.018,00**

Sumber: SIPD 2024

Penjelasan:

Pada tahun anggaran 2024 Belanja Bantuan Keuangan dianggarkan sebesar Rp227.118.757.098,00 dan terealisasi sebesar Rp226.451.591.862,00 atau 99,71%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar 5,44%. Persentase kenaikan ini disebabkan karena adanya peningkatan kebutuhan Pembangunan infrastuktur, penambahan program prioritas daerah, serta penyesuaian terhadap kenaikan harga barang dan jasa. Selain itu, kebijakan pemerintah daerah dalam memperluas cakupan pelayanan public juga turut mendorong peningkatan alokasi anggaran tersebut.

Pengeluaran atas belanja tersebut berdasarkan Peraturan Bupati Nomor : 19 Tahun 2023 tentang tata cara pengalokasian, pembagian dan penyaluran alokasi dana desa setiap desa Tahun Anggaran 2024 Rincian desa penerima Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah dapat dilihat pada lampiran VIII.

5.1.3 Pembiayaan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023 yang dihitung dari:

Tabel 5.33
Pembiayaan

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Penerimaan Pembiayaan	**52.332.702.392,00**	**52.299.328.048,49**	**99,94**	**190.873.934.975,64**
Pengeluaran Pembiayaan	**52.697.961.892,00**	**50.974.849.892,00**	**96,73**	**41.085.896.256,00**
Jumlah	**(365.259.500,00)**	**1.324.478.156,49**	**362,61**	**149.788.038.719,64**

Sumber: SIPD 2024

5.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Penerimaan Pembiayaan yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun Anggaran 2024, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada Tahun Anggaran 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.34
Penerimaan Pembiayaan Daerah

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	52.332.702.392,00	**52.299.328.048,49**	**99,94**	190.873.934.975,64

Sumber: SIPD 2024

Penjelasan:

Pada tahun anggaran 2024 Penerimaan Pembiayaan Daerah bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya dianggarkan sebesar Rp52.332.702.392,00 dan terealisasi sebesar Rp52.299.328.048,49 atau 99,94%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar 264,73%. Persentase penurunan SILPA ini disebabkan antara lain adanya peningkatan penyerapan anggaran sehingga belanja daerah lebih terealisasi sesuai rencana.

5.1.3.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pengeluaran Pembiayaan yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun Anggaran 2024, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada Tahun Anggaran 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.35
Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Penyertaan Modal Daerah	3.861.556.000,00	2.138.444.000,00	55,38	3.500.000.000,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	48.836.405.892,00	48.836.405.892,00	100,00	37.585.896.256,00
Jumlah	**52.697.961.892,00**	**50.974.849.892,00**	**96,73**	**41.085.896.256,00**

Sumber: SIPD 2024

Penjelasan:

Pada tahun anggaran 2024 Pengeluaran Pembiayaan Daerah bersumber dari Penyertaan Modal Daerah dianggarkan sebesar Rp3.861.556.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.138.444.000,00 atau 55,38%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar 63,67%. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo dianggarkan sebesar Rp48.836.405.892.00 dan terealisasi sebesar Rp48.836.405.892,00 atau 100% mengalami penurunan sebesar 23,04% Persentase penurunan ini disebabkan antara lain karena keterebatasan anggaran daerah sehingga pemerintah daerah lebih memprioritaskan untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak seperti Pembangunan bidang infrastruktur,Kesehatan dan Pendidikan.

5.1.3.2.1 Penyertaan Modal Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Penyertaan Modal Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023 yang merupakan saldo Penyertaan Modal Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun Anggaran 2024 dan persentase capaian realisasinya serta yang direalisasikan pada Tahun Anggaran 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.36
Penyertaan Modal Daerah

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD):				
• PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH	3.861.556.000,00	2.138.444.000,00	55,38	3.500.000.000,00

Sumber: SIPD 2024

Tabel 5.37
Daftar Konversi Dana Setoran Modal dari BPD Capem Morowali

No	TGL SETOR	DANA SETORAN MODAL (DSM)	KONVERSI			TOTAL SAHAM	SISA
			NOMINAL	LEMBAR SAHAM	AGIO SAHAM		
			100,000		58,459		Belum cukup 1 lembar saham
1	23 Desember 2015	2.000.000.000,00	1.262.100.000,00	12.621,00	737.811.039,00	1.262.100.000,00	88.961,00
2	19 April 2016	2.000.000.000,00	1.262.100.000,00	12.621,00	737.811.039,00	1.262.100.000,00	88.961,00
3	AKUM,SISA DSM	-	100.000,00	1,00	58.459,00	100.000,00	(158.459,00)
4	31 Agustus 2017	3.500.000.000,00	2.208.700.000,00	22.087,00	1.291.183.933,00	2.208.700.000,00	116.067,00
5	09 Agustus 2018	5.100.000.000,00	3.218.400.000,00	32.184,00	1.881.444.456,00	3.218.400.000,00	155.544,00
6	03 Juli 2019	5.086.197.963,00	3.209.700.000,00	32.097,00	1.876.358.523,00	3.209.700.000,00	139.440,00
7	30 Desember 2022	1.750.000.000,00	1.104.300.000,00	11.043,00	645.562.737	1.104.300.000,00	137.263,00
8	29 Desember 2023	3.500.000.000,00	2.208.700.000,00	22.087,00	1.291.183.933,00	2.208.700.000,00	116.067,00
9	31 Desember 2024	2.138.444.000,00					
Total		**22.936.197.963,00**	**14.474.100.000,00**	**144.741**	**8.461.414.119,00**	**14.474.100.000,00**	**683.844,00**

Sumber: Bank Sulteng

Penjelasan:

1. Harga saham atas dana setoran modal Pemda sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 2012 adalah sebesar Rp100.000 per lembar saham.
2. Harga saham atas dana setoran Pemda tahun tahun 2013 sampai dengan saat ini addalah sebesar Rp158.459 per lembar saham dengan rincian Rp100.000 dibukukan sebagai nominal saham dan Rp58.459 dibukuikan sebagai Agio saham berdasarkan hasil penilaian dari Kantor Jasa penilai Publik 'Miduk Totok" yang telah diputuskan pada RUPS-LB tanggal 12 April 2013 dan tertuangh dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB PT.Bank Pembangunan Daerah Sulteng No.69 tanggal 21 Juni 2013.
3. Berdasarkan Laporan Keuangan Audited per 31 Desember 2023 total Modal disetor Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara tercatat sebesar Rp22.936.197.963,00
   Pengeluaran penyertaan modal tersebut didasarkan pada Keputusan Bupati Nomor : 188.45/KEP-B.MU/0287/XII/2024 tentang persetujuan pemberian dana penyertaan modal pemerintah daerah Kabupaten Morowali Utara tahun anggaran 2024.

5.1.3.2.2 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo Tahun Anggaran 2024 dan 2023 yang merupakan saldo Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo yang dianggarkan dan direalisasikan pada pada Tahun Anggaran 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada Tahun Anggaran 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.38
Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	48.836.405.892,00	48.836.405.892,00	100,00	37.585.896.256,00
Jumlah	48.836.405.892,00	48.836.405.892,00	100,00	37.585.896.256,00

Sumber: SIPD 2024

Penjelasan:
Pemerintah Kabupaten morowali Utara pada Tahun Anggaran 2024 telah membayar cicilan/kewajiban atas Pinjaman Daerah yang diterima dari BUMN yaitu PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Persero sebesar Rp.48.836.405.892,00 dari total nilai pinjaman sebesar Rp195.345.654.826,00 sehingga sampai dengan saat ini sisa Pinjaman Daerah yang masih tercatat dalam Neraca Pemerintah Daerah sebesar Rp118.021.345.497,00 sebagaimana dijelaskan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos Neraca pada ***poin 5.3***

5.1.4 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran - SiLPA/(SiKPA) Tahun Anggraan 2024 dan 2023 yang dihitung dari:

Tabel 5.39
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
➢ **Pendapatan Daerah**	**1.665.857.452.335,00**	**1.613.844.117.767,99**	**96,88**	**1.208.809.173.144,42**
✓ Pendapatan Asli Daerah	**228.610.133.180,00**	**168.834.315.091,99**	**73,85**	**134.607.242.716,42**
✓ Pendapatan Transfer	**1.428.165.238.843,00**	**1.436.732.706.914,00**	**100,60**	**1.074.201.930.428,00**
✓ Lain-Lain Pendapatan yang Sah	**9.082.080.312,00**	**8.277.095.762,00**	**91,14**	**0,00**
➢ **Belanja Daerah**	**1.665.492.192.835,00**	**1.547.446.405.511,66**	**92,91**	**1.306.264.508.871,53**
✓ Belanja Operasi	**1.095.412.945.221,18**	**1.011.991.709.596,48**	**92,38**	**859.062.606.693,26**
✓ Belanja Modal	**338.866.386.661,82**	**307.845.218.053,18**	**90,85**	**231.988.131.589,27**
✓ Belanja Tak Terduga	**3.150.000.000,00**	**1.157.886.000,00**	**36,76**	**140.000.000,00**
✓ Transfer Bagi Hasil Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00
✓ Transfer Bantuan Keuangan	**228.062.860.952,00**	**226.451.591.862,00**	**99,29**	**215.073.770.589,00**

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
➢ **Pembiayaan Daerah**				
✓ Penerimaan Pembiayaan	**52.332.702.392,00**	**52.299.328.048,49**	**99,94**	**190.873.934.975,64**
✓ Pengeluaran Pembiayaan	**52.697.961.892,00**	**50.974.849.892,00**	**96,73**	**41.085.896.256,00**
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**(365.259.500,00)**	**67.722.190.412,82**	**0,00**	**52.332.702.992,53**

Sumber: SIPD 2024

Penjelasan:

1. Berdasarkan perhitungan di atas, Kabupaten Morowali Utara pada Tahun Anggaran 2024 memiliki SiLPA sebesar Rp67.722.190.412,82 dari nilai SiLPA tersebut terdapat SiLPA Terikat dan SiLPA Non-Terikat yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.40
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terikat dan nonterikat

Uraian	Nilai (Rp)
➢ **Dana SiLPA Terikat**	
✓ Dana pada Kas di BLUD	9.709.774.829,24
✓ Dana pada Kas Dana BOS	337.855.207,59
✓ Dana pada Kas Dana Kapitasi pada FKTP	30.106.373,00
➢ **Dana SiLPA Non-Terikat**	
✓ Dana pada Kas di Bendahara Penerimaan	249.377.625,00
✓ Dana pada Kas di Bendahara Pengeluaran (sisa UP)	6.698.555,00
✓ Dana pada Kas di Kas Daerah, Setara Kas dan Investasi Jangka Pendek yang didalamnya memuat dana:	
• Pelampauan Lain - lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan	57.388.377.822,99
Jumlah	**67.722.190.412,82**

Sumber: SIPD 2024

2. Rincian keberadaan SiLPA tersebut sebagai berikut:

Tabel 5.41
Keberadaan SiLPA

Uraian	Nilai (Rp)
Kas di Kas Daerah	57.388.377.822,99
Kas di Bendahara Penerimaan	249.377.625,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	6.698.555,00
Kas di BLUD	9.709.774.829,24
Kas Dana BOS	337.855.207,59
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	30.106.373,00
Jumlah	**67.722.190.412,82**

Sumber: SIPD 2024

3. Jumlah SiLPA tersebut di atas sama dengan nilai Saldo Kas Akhir dalam LAK sebagaimana dijelaskan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos LAK pada **Poin 5.5** dan juga telah sama dengan Saldo Anggaran Lebih Akhir sebagaimana dijelaskan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos LP SAL pada **Poin 5.2**

5.2 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggarang Lebih merupakan laporan yang menyajikan gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Laporan Perubahan Saldo Anggarang Lebih Kabupaten Morowali Utara (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Angaran Lebih Awal Tahun 2024 dan 2023 yang terdiri dari:

Tabel 5.42
Saldo Anggaran Lebih Awal

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Kas di Kas Daerah	43.477.573.668,94	188.662.223.511,05	(145.184.649.842,11)
Kas di Bendahara Penerimaan	17.202.000,00	578.627.154,00	(561.425.154,00)
Kas di Bendahara Pengeluaran	435.276.242,00	2.669.709,00	432.606.533,00
Kas di BLUD	7.968.540.362,00	0,00	7.968.540.362,00
Kas Dana BOS	220.597.113,59	1.429.903.790,59	(1.209.306.677,00)
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	213.513.606,00	301.125.197,00	(87.611.591,00)
Jumlah	**52.332.702.992,53**	**190.974.549.361,64**	(138.641.846.369,11)

Sumber: SIPD 2024

Saldo di atas merupakan Saldo Akhir Anggaran Lebih Akhir di Tahun 2023 dan 2022 pada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Nilai Saldo Anggaran Lebih Awal ini juga merupakan saldo SiLPA pada tahun anggaran berkenaan dalam masing - masing LRA.

5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Tahun 2024 dan 2023 yang hanya terdiri dari:

Tabel 5.43
Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	52.299.328.048,49	190.873.934.975,64	(138.574.606.927,15)

Sumber: SIPD 2024

Saldo tersebut adalah SiLPA Pemerintah Kabupaten Morowali Utara pada Tahun Anggaran 2023 dan 2022 yang dialokasikan sebagai penerimaan pembiayaan pada Tahun Anggaran 2024 dan 2023 dan digunakan seluruhnya dalam kegiatan operasional serta pembiayaan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara pada Tahun Anggaran 2024 dan 2023. Untuk saldo SiLPA Tahun Anggaran 2023, penggunaannya sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan mengalami perbedaan dengan saldo SiLPA dalam LRA Tahun Anggaran 2023 dikarenakan adanya koreksi penyajian atas kesalahan pengakuan SiLPA Pemerintah Kabupaten Morowali Utara pada Tahun Anggaran 2023 sebagaimana diungkapkan dalam catatan ***poin 5.2.3*** di bawah.

5.2.3 Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Tahun Anggaran 2024 dan 2023 yang hanya terdiri dari:

Tabel 5.44
SiLPA/SiKPA

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	67.722.190.412,81	52.332.702.992,53	15.389.487.420,28

Sumber: SIPD 2024

Saldo tersebut adalah SiLPA Pemerintah Kabupaten Morowali Utara pada Tahun Anggaran 2024 dan 2023 yang akan dialokasikan sebagai penerimaan pembiayaan pada Tahun Anggaran 2024 dan 2023. Saldo tersebut sama dengan jumlah SiLPA pada tahun anggaran berkenaan dalam masing - masing LRA pada tahun berkenaan sebagaimana juga telah diungkapkan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos LRA pada ***poin 5.1***. Saldo tersebut juga sama dengan jumlah saldo dalam Saldo Anggaran Lebih Akhir sebagaimana telah dijelaskan pada ***poin*** 5.2.

5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Tahun 2024 dan 2023 yang terdiri dari:

Tabel 5.45
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
Koreksi atas rekonsiliasi Kas Daerah	0,00	(2.126.686,00)	2.126.686,00
Koreksi atas saldo Kas di Bendahara BLUD	(48.076.016,04)	0,00	(48.076.016,04)
Koreksi kesalahan Kas di Bendahara BOS	14.701.072,00	102.741.072,00	(88.040.000,00)
Jumlah	**(33.374.944,04)**	**100.614.386,00**	**(133.989.330,04)**

Sumber: SIPD 2024

Rincian dari koreksi SiLPA sebesar Rp33.374.944,04 adalah sebagai berikut:

1. Kelebihan setoran untuk pembukaan rekening Bank Mandiri oleh direktur RSUD sebesar Rp775.000,00
2. Pengembalian kas tekor SDN 2 Korowou sebesar Rp14.585.072,00
3. Kas bos sebesar pada SDN 1 Kolaka dan SDN 3 Baturube sebesar Rp116.000,00,
4. Kurang catat belanja BLUD dari kelebihan setor pajak Tahun Anggaran 2023 serta biaya pajak dan administrasi rekening sebesar (Rp48.851.016,04).

5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo di bawah merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Anggaran Lebih Akhir milik Pemerintah abupaten Morowali Utara pada Tahun Anggaran 2024 dan 2023 yang terdiri dari:

Tabel 5.46
Saldo Anggaran Lebih Akhir

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Kas di Kas Daerah	57.388.377.822,99	43.477.573.668,94	13.910.804.154,05
Kas di Bendahara Penerimaan	249.377.625,00	17.202.000,00	232.175.625,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	6.698.555,00	435.276.242,00	(428.577.687,00)
Kas di BLUD	9.709.774.829,24	7.968.540.362,00	1.741.234.467,24
Kas Dana BOS	337.855.207,59	220.597.113,59	117.258.094,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	30.106.373,00	213.513.606,00	(183.407.233,00)
Jumlah	67.722.190.412,82	**52.332.702.992,53**	15.389.487.420,29

Sumber: SIPD 2024

Saldo Anggaran Lebih Akhir yang tersaji dalam LP SAL ini sama besarnya dengan jumlah SiLPA pada tahun anggaran berkenaan dalam masing - masing LRA pada tahun berkenaan sebagaimana juga telah diungkapkan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos LRA pada ***poin*** Saldo tersebut juga sama dengan jumlah saldo dalam Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) sebagaimana telah dijelaskan pada ***poin*** di atas.

5.3 NERACA

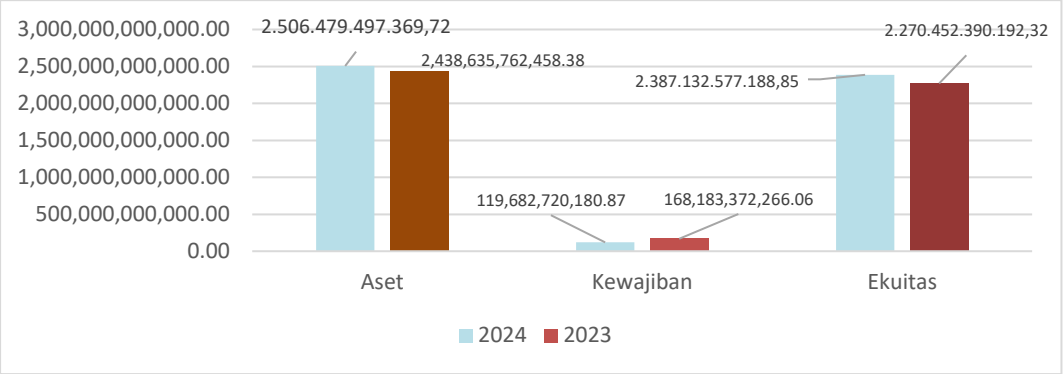
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas pada tanggal tertentu. Posisi keuangan dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Morowali Utara per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 secara umum dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.47
Neraca

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/penurunan
Aset	2.506.434.174.755,29	2.438.635.762.458,38	67.798.412.296,91
Kewajiban	119.682.720.180,87	168.183.372.266,06	(48.500.652.085,19)
Ekuitas	2.386.751.454.574,42	2.270.452.390.192,32	116.299.064.382,10

Sumber: SIPD 2024

Grafik 5.3
Neraca



Rincian Neraca Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

5.3.2 ASET

Aset Pemerintah Kabupaten Morowali Utara per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.506.434.174.755,29 atau mengalami kenaikan sebesar Rp67.798.412.296,21 dibandingkan nilai aset per 31 Desember 2023 yang tercatat sebesar Rp2.438.635.762.458,38.

Tabel 5.48
Aset

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)
Aset Lancar	153.513.136.229,43	141.987.226.096,47	11.525.910.132,96
Investasi Jangka Panjang	25.074.641.963,00	22.936.197.963,00	2.138.444.000,00
Aset Tetap	2.180.970.976.758,21	1.984.290.020.827,27	196.680.955.930,94
Aset Lainnya	146.875.419.804,65	289.422.317.571,64	(142.546.897.766,99)
Jumlah	**2.506.434.174.755,29**	**2.438.635.762.458,38**	**67.798.412.296,91**

Sumber: SIPD 2024

5.3.2.2 Aset Lancar

Aset lancar meliputi Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas di Bendahara BOS, Kas di Bendahara FKTP, Kas Lainnya, Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Piutang Lain-lain PAD yang Sah, Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya, Penyisihan Piutang, Beban dibayar dimuka dan Persediaan.

Nilai Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Morowali Utara per 31 Desember 2024 sebesar Rp153.513.136.229,43 mengalami kenaikan sebesar Rp11.525.910.132,96 dibandingkan Aset Lancar per 31 Desember 2023 yang tercatat sebesar Rp141.987.226.096,47 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.49
Aset Lancar

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Kas di Kas Daerah	57.388.377.822,99	43.477.573.668,94	13.910.804.154,05
Kas di Bendahara Penerimaan	249.377.625,00	17.202.000,00	232.175.625,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	6.698.555,00	435.276.242,00	(428.577.687,00)

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Kas di Badan Layanan Umum Daerah	9.709.774.829,24	7.968.540.362,00	1.741.234.467,24
Kas Dana BOS	337.855.207,59	220.597.113,59	117.258.094,00
Kas Di Bendahara FKTP	30.106.373,00	213.513.606,00	(183.407.233,00)
Kas Lainnya	81.152.868,67	186.448.697,00	(105.295.828,33)
Piutang Pajak Daerah	77.685.331.624,50	78.202.695.663,50	(517.364.039,00)
Piutang Retribusi Daerah	41.247.825,00	82.047.825,00	(40.800.000,00)
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	70.098.601,97	70.098.601,97	0,00
Piutang Transfer Antar Daerah	11.560.625.860,00	6.271.855.162,00	5.288.770.698,00
Penyisihan Piutang	(15.016.692.782,53)	(8.334.733.537,73)	(6.681.959.244,80)
Beban Dibayar Dimuka	2.605.789.625,00	2.467.220.984,87	138.568.640,13
Persediaan	8.763.392.194,00	10.708.889.707,33	(1.945.497.513,33)
Persediaan	**153.513.136.229,43**	**141.987.226.096,47**	**11.525.910.132,96**

Sumber: SIPD 2024

5.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Kas di Kas Daerah sebesar Rp57.388.377.822,99 merupakan saldo Kas Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang tersimpan di rekening Kas Daerah pada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.50
Kas di Kas Daerah

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
PT.Bank Sulteng (BPD) Cabang Pembantu Morowali Nomor Rekening : 401-01-03-20682-2	46.704.312.910,60	32.732.854.900,75	13.971.458.009,85
Bank Rakyat Indonesia(BRI) Wita Mori Poso Nomor Rekening : 00003634-01-000096-30-2	129.403.064,80	128.369.498,80	1.033.566,00
Bank Negara Indonesia (BNI)	8.491.705.288,00	8.332.193.748,00	159.511.540,00
GIRO HIT BUNGA (IMTA)	9.607.618.308,00	9.860.753.620,00	(253.135.312,00)
PT.Bank Sulteng (BPD) Cabang Kolonodale (CSR) Nomor Rekening : 401-01-03-03030-3	317.334.883,00	316.065.009,00	1.269.874,00
Selisih tambah	**301.277.254,00**	**301.277.254,00**	**0,00**
Selisih kurang	**8.163.273.885,41**	**8.193.940.361,61**	**(30.666.476,20)**
Jumlah Kas di Kas daerah seharusnya	**57.388.377.822,99**	**43.477.573.668,94**	**13.910.804.154,05**

Sumber: Bidang Perbendaharaan BPKAD

Saldo Kas di Kas Daerah merupakan hasil rekonsiliasi antara saldo menurut Buku Kas Umum per 31 Desember 2024 dengan saldo menurut Rekening Koran pada Bank BPD Capem Morowali, Bank BPD Cabang Kolonodale (CSR), Bank BRI Witamori, Bank BNI dan GIRO HIT BUNGA (IMTA).

Pemblokiran saldo di Bank BNI disebabkan karena adanya kasus dugaan tindak pidana korupsi atas pembangunan kantor DPRD Tahap I tahun anggaran 2016. Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah sebesar Rp8.163.169.616,00 merupakan Dana Rekening BNI yang di Blokir KPK tahun 2022. Berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor STPBB/ 09/DIK.01.05/23/01/2023 pada tanggal 5 Januari 2023. Secara rinci Kas di Kas Daerah dapat dilihat dalam lampiran IX.

5.3.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp249.377.625,00 Kas di Bendahara Penerimaan merupakan pos untuk menampung saldo kas di Bendahara Penerimaan, yang berasal dari Penerimaan Pendapatan Daerah yang belum disetorkan ke Kas Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Rincian dari kas di bendahara penerimaan di tiap OPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.51
Kas di Bendahara Penerimaan

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)
Diskumperindag	45.010.000,00	0,00	45.010.000,00
Dinas Perikanan	8.100.000,00	0,00	8.100.000,00
Bapenda	195.467.625,00	0,00	195.467.625,00
Dinas Pertanian	800.000,00	0,00	800.000,00
Dinas Kesehatan	0,00	17.202.000,00	(17.202.000,00)
Jumlah	**249.377.625,00**	**17.202.000,00**	**232.175.625,00**

Sumber: SIPD 2024

5.3.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di bendahara pengeluaran Tahun 2024 adalah Aset Lancar berupa kas yang tersimpan pada rekening bendahara pengeluaran perangkat daerah sebesar Rp6.698.555,00 yang sampai dengan 31 desember 2024 belum disetor ke rekening kas daerah. Jika dibandingkan dengan kas dibendahara pengeluaran Tahun 2023 sebesar Rp435.276.242,00 terjadi penurunan sebesar Rp428.577.687,00. Dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.52
Kas di Bendahara Pengeluaran

Uraian	Sisa Belanja Rp	Jasa Giro Rp	Jumlah Rp	Keterangan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5.155.000,00	0,00	5.155.000,00	Sisa TU dikbud BOSDA Rp5.100.000 + 55.000
Puskesmas Wongko Ndaya	0,00	6.358,00	6.358,00	Jasa giro 2024 Rp5.290,00 + 2023 Rp1.068,00
Bagian Administrasi Pembangunan	0,00	28.498,00	28.498,00	Jasa Giro 2024
Bagian Hukum	0,00	3.711,00	3.711,00	Jasa Giro 2024

Uraian	Sisa Belanja Rp	Jasa Giro Rp	Jumlah Rp	Keterangan
Bagian Kesejahteraan Rakyat	0,00	1.409.410,00	1.409.410,00	Jasa Giro 2024
Bagian Organisasi	0,00	3.916,00	3.916,00	Jasa Giro 2024
Bagian Pemerintahan	0,00	2.200,00	2.200,00	Jasa Giro 2024
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	53.332,00	53.332,00	Jasa Giro 2024
Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	0,00	7.327,00	7.327,00	Jasa Giro 2024
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	0,00	8.778,00	8.778,00	Jasa Giro 2024
Bagian Umum	0,00	20.025,00	20.025,00	Jasa Giro 2024
Jumlah	**5.155.000,00**	**1.543.555,00**	**6.698.555,00**	

Sumber: SIPD 2024

5.3.1.1.4 Kas di Badan Layanan Umum Daerah

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kera pada Satuan Kera Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas. Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale ditetapkan sebagai BLUD sejak tanggal 22 Februari 2023 berdasarkan SK Bupati Nomor 188.45/KEB-B-MU/0054/II/2023 tentang Penetapan Badan Layanan Umum Dearah Rumah Sakit Umum Dearah Kolonodale. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 saldo Kas Dibendahara BLUD sebesar Rp9.709.774.829,24 dengan rincian berikut:

Tabel 5.53
Kas di Badan Layanan Umum Daerah

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)
Bank Mandiri	9.593.677.057,24	725.000,00	9.592.952.057,24
Bank BPD	80.540.072,00	7.556.564.647,00	(7.476.024.575,00)
Tunai Bendahara Penerimaan	25.035.000,00	0,00	25.035.000,00
Tunai Bendahara Pengeluaran	10.522.700,00	411.250.715,00	(400.728.015,00)
Jumlah	**9.709.774.829,24**	**7.968.540.362,00**	1.741.234.467,24

Sumber: SIPD 2024

5.3.1.1.5 Kas di Bendahara BOS

Saldo Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2024 sebesar Rp337.855.207,59 mengalami kenaikan sebesar Rp117.258.094,00 dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp220.597.113,59. Saldo kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2024 yang merupakan sisa saldo Dana BOS pada 174 SD dan SMP Negeri yang akan digunakan untuk operasional sekolah pada tahun anggaran berikutnya. Rincian kas di Bendaharan Dana BOS dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.54
Kas di Bendahara BOS

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Dana Bos Reguler	285.883.488,59	171.987.675,59	113.895.813,00
Dana Bos Kinerja	48.362.281,00	45.000.000,00	3.362.281,00
Dana Bos Afirmasi	3.599.438,00	3.599.438,00	0,00
Dana Bos Daerah	10.000,00	10.000,00	0,00
Jumlah	337.855.207,59	220.597.113,59	117.258.094,00

Sumber: SIPD 2024

Secara rinci kas di Bendahara Bos dapat dilihat pada lampiran X.

5.3.1.1.6 Kas di Bendahara FKTP

Sesuai Peraturan Presiden nomor 32 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah, Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan, Dana Kapitasi JKN dibayarkan langsung oleh BPJS Kesehatan kepada Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP, Pengelolaan Dana Kapitasi JKN dicatat dan dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Saldo Kas di Bendahara FKTP sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp30.106.373,00, jika dibandingkan dengan kas di bendahara FKTP Tahun 2023 sebesar Rp213.513.606,00 terjadi penurunan sebesar Rp183.407.233,00. Adapun rincian saldo Kas di Bendahara FKTP dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.55
Kas di Bendahara FKTP

Penyelenggara JKN	Saldo Dana Kapitasi		Jasa Giro (Rp)	Jumlah (Rp)
	Rekening (Rp)	Tunai (Rp)		
PKM LEE	6.539.074,00	2.379.421,00	0,00	8.918.495,00
PKM TOMATA	474.326,00	2.663.735,00	105.684,00	3.243.745,00
PKM MAYUMBA	838.667,00	1.082.061,00	137.954,00	2.058.682,00
PKM BETELEME	193.859,00	0,00	236.986,00	430.845,00
PKM PETUMBEA	2.176.428,00	68.189,00	0,00	2.244.617,00
PKM MOLINO	1.438.919,00	0,00	335.793,00	1.774.712,00
PKM KOLONODALE	6.164.133,00	0,00	379.471,00	6.543.604,00
PKM ANUTOLUWU	66.026,00	0,00	176.291,00	242.317,00
PKM TAMBAYOLI	3.218.804,00	76.475,00	0,00	3.295.279,00
PKM PANCAMAKMUR	178.772,00	0,00	115.388,00	294.160,00
PKM BATURUBE	76,00	0,00	309.952,00	310.028,00

Penyelenggara JKN	Saldo Dana Kapitasi		Jasa Giro	Jumlah
	Rekening (Rp)	Tunai (Rp)	(Rp)	(Rp)
PKM PANDAUKE	0,00	0,00	224.856,00	224.856,00
PKM LIJO	3.449,00	422.614,00	0,00	426.063,00
PKM WONGKO NDAYA	11.694,00	87.276,00	0,00	98.970,00
Jumlah	**21.304.227,00**	**6.779.771,00**	**2.022.375,00**	**30.106.373,00**

Sumber: Masing-masing Puskesmas

Secara rinci kas Di Bendahara FKTP dapat dilihat pada lampiran XI.

5.3.1.1.7 Kas Lainnya

Kas lainnya Tahun Anggaran 2024 senilai Rp81.152.868,67, dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp186.448.697,00 mengalami penurunan sebesar Rp105.295.828,33. Adapun rincian dari kas lainnya terdiri dari Utang PFK FKTP sebesar Rp81.146.123,67 dan kas yang masih dalam penguasaan bendahara pengeluaran Inspektorat sebesar Rp6.745,00 yang merupakan kurang salur belanja pada Tahun Anggaran 2023. Adapun rincian saldo Kas Lainnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.56
Kas Lainnya

Uraian	PPH 21 (Rp)	PPH 22 (Rp)	PPH 23 (Rp)	PPN (Rp)	Jumlah (Rp)
Puskesmas Tomata	28.253.487,00	1.259.656,00	132.000,00	2.634.848,00	32.279.991,00
Puskesmas Baturube	0,00	810.811,00	0,0	12.169.369,00	12.980.180,00
Puskesmas Beteleme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Puskesmas Pandauke	9.476.000,00	1.196.756,00	0,0	5.109.549,00	15.782.305,00
Puskesmas Mayumba	7.879.586,00	1.272.459,00	57.000,00	9.331.369,67	18.540.414,67
Puskesmas Petumbea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Puskesmas Pancamakmur	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Puskesmas Potowe Indolijo	0,0	0,0	66.120,00	0,0	66.120,00
Puskesmas Lee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Puskesmas Molino	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Puskesmas Anuntoluwu	0,0	798.917,00	0,0	0,0	798.917,00
Puskesmas WongkoNdaya	0,0	83.784,00	0,0	614.412,00	698.196,00
Puskesmas Tambayoli	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Puskesmas Kolonodale	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inspektorat Daerah					6.745,00
Jumlah	**45.609.073,00**	**5.422.383,00**	**255.120,00**	**29.859.547,67**	**81.152.868,67**

Sumber: SIPD 2024

5.3.1.1.8 Piutang Pajak Daerah

Piutang Pajak Daerah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Morowali Utara per tanggal 31 Desember 2024 senilai Rp77.685.331.624,50 mengalami penurunan sebesar Rp517.364.039,00 dibandingkan Piutang pajak per 31 Desember 2023 yang tercatat sebesar Rp78.202.695.663,50 dengan rincian tabel sebagai berikut:

Tabel 5.57
Piutang Pajak Daerah

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Piutang Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	0,00	1.050.000,00	(1.050.000,00)
Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron	118.072.981,00	97.446.981,00	20.626.000,00
Piutang Pajak Penerangan Dihasilkan Sendiri	48.032.583.025,20	43.352.136.352,20	4.680.446.673,00
Piutang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	8.480.280.196,60	18.890.009.322,60	(10.409.729.126,00)
Piutang PBBP2	21.017.541.671,70	15.825.199.257,70	5.192.342.414,00
Piutang BPHTB-Pemindahan Hak	36.853.750,00	36.853.750,00	0,00
Jumlah	**77.685.331.624,50**	**78.202.695.663,50**	**(517.364.039,00)**

Sumber: SIPD 2024

Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa umur piutang Pajak Daerah Piutang Pajak Rumah Makan, Piutang Pajak Reklame, Piutang Penerangan Jalan dan BPHTB Tahun Anggaran 2024 tergolong dalam kualitas lancar karena umur piutang masih dibawah 12 bulan, sedangkan untuk Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan PBB-P2 tergolong dalam kualitas diragukan karena umur piutang sudah mencapai 36 Bulan. Secara rinci piutang pajak dapat dilihat pada lampiran XII.

5.3.1.1.9 Piutang Retribusi

Piutang Retribusi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Morowali Utara per tanggal 31 Desember 2024 senilai Rp41.247.825,00 dengan rincian tabel sebagai berikut:

Tabel 5.58
Piutang Retribusi

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	36.125.000,00	36.125.000,00	0,00
Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	0,00	40.800.000,00	(40.800.000,00)
Piutang Retribusi Terminal	5.122.825,00	5.122.825,00	0,00
Jumlah	**41.247.825,00**	**82.047.825,00**	**(40.800.000,00)**

Sumber: SIPD 2024

Dapat di jelaskan bahwa Piutang Retribusi Tahun 2024 sebesar Rp41.247.825,00 merupakan piutang yang belum tertagih sampai dengan 31 Desember 2024.

Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah nilai Piutang Retribusi Pelayanan Pasar yang nilainya sebesar Rp36.125.000,00 tergolong dalam kualitas kurang lancar karena umur

piutang masih diatas 12 bulan sedangkan piutang Retribusi Pelayanan Pasar yang nilainya sebesar Rp5.122.825,00 tergolong dalam kualitas macet karena umur piutang telah lebih dari 36 bulan. Untuk Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Tahun Anggaran 2024 tergolong dalam kualitas lancar karena umur piutang masih dibawah 12 bulan. Secara rinci piutang retribusi dapat dilihat pada lampiran XIII.

5.3.1.1.10 Piutang Lain Lain PAD yang Sah

Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2024 sebesar Rp70.098.601,97 merupakan Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebesar 68.155.059,39 sampai dengan 31 Desember 2024 belum tertagih dan Piutang tansfer renumerasi dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) Tahun 2022 yang belum diterima sebesar Rp1.943.542,58. Tidak terjadi kenaikan atau penurunan dari Tahun 2023 ke 2024.

Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah nilai Piutang Lain-lain PAD yang Sah dalam hal ini TGR tergolong dalam kualitas macet karena umur piutang melebihi dari 36 bulan. Secara rinci piutang lain-lain PAD yang sah dapat dilihat pada lampiran XIV.

5.3.1.1.11 Piutang Transfer Antar Daerah

Saldo piutang transfer per 31 Desember 2024 sebesar Rp11.560.625.860,00 terdiri atas piutang transfer dana bagi hasil pajak provinsi sebesar Rp11.555.454.850,00 dan Piutang Bantuan Keuangan yang merupakan lebih Salur Alokasi Dana Desa tahun 2021 sebesar Rp5.171.010,00. Piutang Dana Bagi Hasil Provinsi merupakan Kurang Salur dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi yang belum diterima sampai dengan 31 Desember 2024 sesuai SK Gubernur Sulawesi Tengah tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Kurang Salur atas Penerimaan Pajak Daerah Nomor 900.1.14.3/28/BAPENDA-G.ST/2025 tanggal 31 Januari 2025. Pembayaran akan dilakukan setelah Pemerintah Provinsi menganggarkan Piutang tersebut pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2024.

Tabel 5.59
Piutang Dana Bagi Hasil Pemerintah Provinsi

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	2.117.343.076,00	1.554.428.480,00	562.914.596,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	2.048.227.584,00	1.319.136.814,00	729.090.770,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	6.677.782.729,00	2.912.282.868,00	3.765.499.861,00
Pajak Air Permukaan (PAP)	712.101.461,00	480.835.990,00	231.265.471,00
Jumlah	**11.555.454.850,00**	**6.266.684.152,00**	**5.288.770.698,00**

Sumber: SIPD 2024

Penjelasan Secara rinci dapat dilihat pada lampiran IV.

5.3.1.1.12 Penyisihan Piutang

Sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual dan Peraturan Bupati Kabupaten Morowali Utara Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Berbasis Akrual, dilakukan Penyisihan Piutang tak tertagih berdasarkan umur piutang dan jenis piutang Penyisihan Piutang Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 sebesar Rp15.016.692.782,53 dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp8.334.733.537,73 terjadi kenaikan sebesar Rp6.681.959.244,80.

Tabel 5.60
Penyisihan Piutang

Uraian	Tahun 2024		Tahun 2023	
	Piutang (Rp)	Penyisihan (Rp)	Piutang (Rp)	Penyisihan (Rp)
Piutang Pajak	**77.685.331.624,50**	**14.881.313.668,62**	**78.202.695.663,50**	**8.229.125.506,58**
• Piutang Pajak Restoran	0,00	0,00	1.050.000,00	5.250,00
• Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron	**118.072.981,00**	**9.627.713,10**	97.446.981,00	6.263.803,10
• Piutang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	**8.480.280.196,60**	**3.538.289.760,44**	18.890.009.322,60	1.970.668.102,19
• Piutang PBBP2	**21.017.541.671,70**	**6.526.452.517,57**	15.825.199.257,70	6.035.243.400,78
• Piutang BPHTB	**36.853.750,00**	**3.685.375,00**	36.853.750,00	184.268,75
• Piutang PPJ	**48.032.583.025,20**	**4.803.258.302,52**	43.352.136.352,20	216.760.681,76
Piutang Retribusi	**41.247.825,00**	**8.735.325,00**	**82.047.825,00**	**5.408.095,74**
• Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	0,00	**0,00**	40.800.000,00	204.000,00
• Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	**41.247.825,00**	**8.735.325,00**	41.247.825,00	5.204.095,74
Piutang Dana Bagi Hasil	**11.555.454.850,00**	**57.777.274,25**	**6.266.684.152,00**	**31.333.420,76**
• PKB	2.117.343.076,00	10.586.715,38	1.554.428.480,00	7.772.142,40
• BBN-KB	2.048.227.584,00	10.241.137,92	1.319.136.814,00	6.595.684,07
• PBB-KB	6.677.782.729,00	33.388.913,65	2.912.282.868,00	14.561.414,34
• PAP	712.101.461,00	3.560.507,31	480.835.990,00	2.404.179,95
Piutang Lain-lain	**68.155.059,39**	**68.155.059,39**	**68.155.059,39**	**68.155.059,39**
• TP-TGR	68.155.059,39	68.155.059,39	63.414.759,39	63.414.759,39
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	**5.171.010,00**	**517.101,00**	**4.740.300,00**	**4.740.300,00**
Piutang Transfer Remunerasi Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	**1.943.542,58**	**194.354,26**	**7.114.552,58**	**711.455,26**
• Piutang Bantuan Keuangan	0,00	0,00	5.171.010,00	517.101,00
• Piutang Transfer Remunerasi Dana Transfer Treasury Deposit Facility (Tdf)-2022	1.943.542,58	194.354,26	1.943.542,58	194.354,26
Jumlah	**89.357.303.911,47**	**15.016.692.782,52**	**84.626.697.252,47**	**8.334.733.537,73**

Sumber: Bidang Akuntansi , BPKAD

Penjelasan Secara rinci penyisihan piutang dapat dilihat pada lampiran XV.

5.3.1.1.13 Beban di bayar dimuka

Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi Pemerintah Daerah.

Beban dibayar dimuka Tahun 2024 sebesar Rp2.605.789.625,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp2.467.220.84,87 mengalami kenaikan sebesar Rp138.568.640,13. Saldo beban dibayar dimuka merupakan Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang pada Bagian Umum sebesar Rp2.557.789.625,00 dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp48.000.000,00.

5.3.1.1.14 Persediaan

Saldo Persediaan Operasional per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp8.763.392.194,00 merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo Persediaan merupakan persediaan akhir seluruh OPD sesuai hasil Stok opname yang dilakukan oleh masing-masing pengurus barang OPD tanggal neraca dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.61
Persediaan

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Bahan	4.864.696.336,00	4.566.928.125,53	297.768.210,47
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	424.490.500,00	324.973.278,00	99.517.222,00
Obat-obatan	3.461.688.158,00	5.816.988.303,80	(2.355.300.145,80)
Komponen	12.517.200,00	0,00	12.517.200,00
Jumlah	**8.763.392.194,00**	**10.708.889.707,33**	**(1.945.497.513,33)**

Sumber: SIPD 2024

Secara rinci persediaan dapat dilihat pada lampiran XVI.

5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

Nilai investasi jangka panjang yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Morowali Utara sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp25.074.641.963,00 adalah nilai investasi jangka panjang permanen. Jumlah tersebut merupakan nilai Penyertaan Modal pada BUMD, PT.Bank Sulteng Cabang Pembantu Morowali.

Investasi jangka panjang pada pemerintah daerah menggunakanmetode biaya (cost method). Metode ini digunakan ketika pemerintah daerah memiliki kepemilikan kurang dari 20% pada suatu entitas dan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas tersebut. Investasi dicatat sebesar biaya perolehan awal, dan pendapatan dari investasi diakui hanya ketika dividen atau hasil lainnya diterima, tanpa mempengaruhi nilai tercatat investasi.

Nilai investasi jangka panjang yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Morowali Utara sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp25.074.641.963,00 dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp22.936.197.963,00 terjadi kenaikan sebesar Rp 2.138.444.000,00. Jumlah tersebut merupakan nilai Penyertaan Modal pada BUMD, PT.Bank Sulteng Capem Morowali pada:

Tabel 5.62
Investasi Jangka Panjang

Tahun	Nilai (Rp)	Nomor SP2D	Nomor SK
2015	2.000.000.000,00	3877/SP2D-LS/BNT/BPKAD/2015	Perda Nomor 3 Tahun 2015 dan Perda Nomor 1 Tahun 2017, tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemda pada PT. Bank Sulteng
2016	2.000.000.000,00	434/SP2D-LS/BY/DPPKAD/2016	Perda Nomor 3 Tahun 2015 dan Perda Nomor 1 Tahun 2017, tentang Perubahan atas Perda Nomor 3

Tahun	Nilai (Rp)	Nomor SP2D	Nomor SK
			Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemda pada PT. Bank Sulteng
2017	3.500.000.000,00	3712/SP2D-LS/BY/BPKAD/2017	Perda Nomor 3 Tahun 2015 dan Perda Nomor 1 Tahun 2017, tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemda pada PT. Bank Sulteng
2018	5.100.000.000,00	3065/SP2D-LS/BY/BPKAD/2018	Perda Nomor 3 Tahun 2015 dan Perda Nomor 1 Tahun 2017, tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemda pada PT. Bank Sulteng
2019	5.086.197.963,00	2609/SP2D-LS/BY/BPKAD/2019	Perda Nomor 3 Tahun 2015 dan Perda Nomor 1 Tahun 2017, tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemda pada PT. Bank Sulteng
2022	1.750.000.000,00	09419/SP2D/5-02.0-00.0-00.1.0.0/III/2022	Perda Nomor 8 Tahun 2020, tentang Penyertaan Modal Pemda pada Perseroan Terbatas Bank Sulteng
2023	3.500.000.000.000	09591/SP2D/LS/5-02.0-00. 0-00.1.1.1/XII/2023	Perda Nomor 8 Tahun 2020, tentang Penyertaan Modal Pemda pada Perseroan Terbatas Bank Sulteng
2024	2.138.444.000,00	72.12/04.0/000013/Pembiayaan/5.02.02.00.0.00.01.0000/M/12/2024	Perda Nomor 8 Tahun 2020, tentang Penyertaan Modal Pemda pada Perseroan Terbatas Bank Sulteng
Jumlah	**25.074.641.963,00**		

Sumber: SIPD 2024

5.3.1.3 Aset Tetap

Aset Tetap adalah Aset Berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset Tetap milik Pemerintah Kabupaten Morowali Utara per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.180.970.976.758,21 atau meningkat sebesar Rp196.680.955.930,94 jika dibandingkan dengan nilai Aset Tetap Tahun 2023 sebesar Rp1.984.290.020.827,27.

Rincian Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Morowali Utara per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.63
Aset Tetap

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah/Berkurang
Tanah	104.788.561.428,00	99.870.808.551,00	4.917.752.877,00
Peralatan Mesin	510.842.336.803,99	443.916.784.251,99	66.925.552.552,00
Gedung dan Bangunan	936.554.676.961,87	817.801.391.584,60	118.753.285.377,27
Jalan, Irigasi, Jaringan	1.711.908.144.151,70	1.569.798.060.994,76	142.110.083.156,94
Aset Tetap Lainnya	15.436.098.446,00	14.227.864.046,00	1.208.234.400,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	82.807.703.692,84	82.046.969.848,86	760.733.843,98
Akumulasi Penyusutan	(1.181.366.544.726,19)	(1.043.371.858.449,94)	(137.994.686.276,25)
Jumlah	**2.180.970.976.758,21**	**1.984.290.020.827,27**	196.680.955.930,94

Sumber: Simda BMB 2023

Data rincian Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Morowali Utara disajikan dalam Neraca Kartu Inventaris Barang (KIB), yang terdiri dari KIB A untuk Aset Tanah, KIB B untuk Aset Peralatan dan Mesin, KIB C untuk Aset Gedung dan Bangunan, KIB D untuk Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan, KIB E untuk Aset Tetap Lainnya dan KIB F untuk Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Penjelasan lebih lanjut atas Nilai Aset tetap Tahun 2024 akan dijelaskan pada masing-masing jenis aset berikut:

5.3.1.3.1 Tanah

Nilai aset tanah Pemerintah Kabupaten Morowali Utara per 31 Desember 2024 menurut rincian objek sebesar Rp104.788.561.428,00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp4.872.953.877,00 dibandingkan nilai Aset Tanah per 31 Desember 2023 yang tercatat sebesar Rp99.870.808.551,00.

Tabel 5.64
Aset Tetap-Tanah

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Tanah Bangunan Perumahan/G.Tempat Tinggal	11.560.664.089,00	11.560.664.089,00	0,00
Tanah Untuk Bangunan Ged.Perdagangan/Perusahaan	4.814.142.000,00	4.814.142.000,00	0,00
Tanah Untuk Bangunan Industri	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja	51.167.536.892,00	51.167.536.892,00	0,00
Tanah Untuk Bangunan Tempat Ibadah	41.260.000,00	41.260.000,00	0,00
Tanah Perkebunan	29.850.000,00	29.850.000,00	0,00
Tanah Hutan	588.700.000,00	588.700.000,00	0,00
Tanah Lapangan Olah Raga	639.639.000,00	639.639.000,00	0,00
Tanah Lapangan Penimbunan Barang	1.449.629.200,00	1.449.629.200,00	0,00
Tanah Untuk Jalan	22.357.790.000,00	20.349.731.000,00	2.008.059.000,00
Tanah Untuk Bangunan Air	2.191.179.570,00	2.191.179.570,00	0,00
Tanah Untuk Makam	805.000.000,00	805.000.000,00	0,00
Tanah Untuk Taman	35.035.000,00	35.035.000,00	0,00
Tanah Kampung	823.468.800,00	823.468.800,00	0,00
Tanah Hasil Reklamasi	8.254.666.877,00	5.344.973.000,00	2.909.693.877,00
Jumlah	**104.788.561.428,00**	**99.870.808.551,00**	**4.917.752.877,00**

Sumber: Simda BMD 2024

Ringkasan mutasi Aset Tanah selama Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.65
Mutasi Aset Tanah

Saldo akhir aset tanah per 31 Desember 2023			**Rp**	**99.870.808.551,00**
Penambahan:				
1. Realisasi Belanja modal aset tanah	Rp	1.963.260.000,00		
2. Reklas dari KIB C	Rp	2.719.362.177,00		
3. Kapitalisasi Aset dari barang dan jasa	Rp	235.130.700,00		
Jumlah Penambah	**Rp**	**4.917.752.877,00**		
Jumlah Penambahan/(Pengurangan) aset tanah Tahun 2024			**Rp**	**4.917.752.877,00**
Saldo akhir aset tanah per 31 Desember 2024			**Rp**	**104.788.561.428,00**

Sumber: Bidang Aset

Penjelasan atas mutasi Aset Tetap Tanah selama Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Mutasi tambah :
   a. Penambahan Aset Tetap Tanah berasal dari realisasi Belanja Modal Aset Tanah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.963.260.000,00
   b. Penambahan Reklas Aset Tanah 2024 berasal dari KIB C sebesar Rp2.719.362.177,00, wujud dari bangunan tersebut adalah Penimbunan atau Reklamasi pantai.
   c. Penambahan Kapitalisasi aset dari barang dan jasa sebesar Rp235.130.700,00, wujud dari Barang dan Jasa adalah Pembebasan, Perencanaan, dan Pengawasan Penimbunan

Sehingga Total Mutasi Tambah Aset Tetap Tanah pada tahun 2024 sebesar Rp4.917.752.877,00

Jumlah saldo akhir Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2024 sebesar Rp104.788.561.428,00, secara rinci aset tetap tanah dapat dilihat pada lampiran XVII.a.

5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Morowali Utara per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp510.842.336.803,99 atau mengalami peningkatan sebesar Rp66.925.552.552,00 dibandingkan dengan Nilai Aset Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp443.916.784.251,99 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.66
Aset Tetap-Peralatan dan Mesin

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Alat Besar	6.366.076.211,00	6.351.824.911,00	14.251.300,00
Alat Angkutan	100.205.083.731,00	95.051.728.413,00	5.153.355.318,00
Alat Bengkel dan Alat Ukur	5.129.411.931,00	5.044.994.931,00	84.417.000,00
Alat Pertanian	5.807.758.220,00	5.783.723.220,00	24.035.000,00
Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga	106.640.941.637,19	93.416.168.770,19	13.224.772.867,00

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	15.149.422.034,00	12.717.506.734,00	2.431.915.300,00
Alat Kedokteran dan Kesehatan	126.953.363.936,80	92.729.383.245,80	34.223.980.691,00
Alat Laboratorium	55.730.693.553,00	54.774.353.453,00	956.340.100,00
Alat Persenjataan	422.915.638,00	410.423.744,00	12.491.894,00
Komputer	78.815.052.488,00	68.471.789.306,00	10.343.263.182,00
Alat-alat Eksplorasi	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00
Alat Keselamatan Kerja	4.722.152.025,00	4.430.576.025,00	291.576.000,00
Alat Peraga	950.000,00	950.000,00	0,00
Peralatan Proses/Produksi	3.300.002,00	3.300.002,00	0,00
Rambu-Rambu	3.028.258.390,00	3.028.258.390,00	0,00
Peralatan Olah Raga	1.824.457.007,00	1.659.303.107,00	165.153.900,00
Jumlah	**510.842.336.803,99**	**443.916.784.251,99**	66.925.552.552,00

Sumber: Simda BMD 2023

Perhitungan Mutasi Nilai Aset Peralatan Dan Mesin Per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:

Tabel 5.67
Mutasi Aset Peralatan dan Mesin

Saldo aset peralatan dan mesin per 31 Desember 2023			**Rp**	**443.916.784.251,99**
Penambahan:				
1. Realisasi Belanja modal aset Peralatan dan Mesin	Rp	76.216.049.055,00		
2. Kapitalisasi Aset dari Barang Jasa	Rp	2.509.748.670,00		
3. Kapitalisasi Aset dari Barang Jasa (BTT)	Rp	750.410.000,00		
4. Hibah	Rp	36.395.000,00		
5. Reklasifikasi Antar KIB	Rp	621.213.000,00		
6. Mutasi antar SKPD	Rp	3.291.712.000,00		
Jumlah Penambah	**Rp**	**83.425.527.725,00**		
Pengurang:				
1. Penghentian Penggunaan/Penghapusan 2024 (-)	Rp	11.561.998.500,00		
2. Mutasi Antar SKPD (-)	Rp	3.291.712.000,00		
3. Reklas Antar KIB (-)	Rp	1.034.644.400,00		
4. Reklas ATB (-)	Rp	124.455.000,00		
5 Belanja Modal yang tidak Menjadi Aset Tetap (-)	Rp	10.211.020,00		
6. Ekstrakompatabel 2024 (-)	Rp	248.586.613,00		
7. Belanja yang diserahkan kepada masyarakat (-)	Rp	219.867.640,00		

8. Reklas ke Aset Lain-lain	Rp	8.500.000,00		
Jumlah Pengurang	**Rp**	**16.499.975.173,00**		
Jumlah Penambahan/(Pengurangan) aset Peralatan dan Mesin Tahun 2024			**Rp**	**66.925.552.552,00**
Saldo akhir aset Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024			**Rp**	**510.842.336.803,99**

Sumber: Bidang Aset

Penjelasan atas mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin selama Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Mutasi tambah :
   a. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin merupakan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024 sebesar Rp76.216.049.055,00
   b. Penambahan Kapitalisasi Aset dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp2.509.748.670,00, Wujud Aset dari Belanja Barang dan Jasa tediri dari Alat Angkutan dan Alat Kantor
   c. Penambahan Kapitalisasi Aset dari Belanja Barang dan Jasa (Belanja Tidak Terduga) sebesar Rp750.410.000 Wujud Aset dari Belanja Tidak Terduga adalah Laptop, Peralatan Personal Komputer dan Alat Kantor dan Rumah Tangga.
   d. Penambahan Hibah pada Satuan Pamong Praja dan Kebakaran sebesar Rp36.395.000,00, Wujud dari Hibah Aset tersebut adalah Tenda Peleton.
   e. Penambahan reklas antar KIB sebesar Rp621.213.000,00 Wujud Aset dari penambahan reklas antar KIB adalah alat kantor dan rumah tangga.
   f. Penambahan Mutasi antar SKPD Rp3.291.712.000,00 Wujud Aset dari penambahan mutasi antar SKPD adalah Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan dan alat angkutan apung bermotor.

   Sehingga total mutasi tambah Aset Peralatan Dan Mesin sebesar Rp83.425.527.725,00.
2. Mutasi kurang :
   a. Pengurangan penghentian penggunaan/penghapusan 2024 Rp11.561.998.500,00 Wujud Aset dari Penghapusan Aset adalah Kendaraan Dinas Roda Empat. Dengan Nomor Penghapusan Aset : 188.45/KEP-B.MU/0263/XII/2024 dan Nomor Risalah Lelang: 393/16.03/2024-01 tgl 28 Agustus 2024
   b. Pengurangan Reklas Antar KIB sebesar Rp1.034.644.400,00 Wujud Aset dari Pengurangan Reklas Antar KIB adalah Buku Pelajaran
   c. Pengurangan Reklas ATB sebesar Rp124.455.000,00 Wujud dari Pengurangan Reklas ATB adalah Aplikasi SITAMU (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah)
   d. Pengurangan Barang diserahkan Kepada Masyarakat/Pakai Habis sebesar Rp219.867.640,00 Wujud Aset dari Pengurangan Barang di serahkan Kepada Masyarakat adalah Peralatan Kantor dan Alat Praktek Bidang Studi IPA yang di serahkan ke Sekolah Swasta.
   e. Pengurangan Ekstrakompatabel 2024 sebesar Rp248.586.613,00 Wujud dari Aset Ekstrakompatabel adalah Alat Kantor dan Rumah Tangga dan Alat Kedokteran.

f. Pengurangan Reklasifikasi Belanja Modal yamg tidak menjadi aset tetap sebesar Rp10.211.020,00. Wujud Aset Pengurangan Reklasifikasi Belanja modal yang tidak menjadi aset tetap adalah Barang Pakai Habis dan alat pemeriksaan hewan.

g. Pengurangan Mutasi antar SKPD Rp3.291.712.000,00 Wujud Aset dari Pengurangan Mutasi antar SKPD adalah Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan dan alat angkutan apung bermotor

h. Pengurangan Reklas lain-lain sebesar Rp8.500.000,00 Wujud dari Pengurangan Reklas lain-lain adalah Laptop pada SDN Undoro.

Sehingga total mutasi kurang Aset Peralatan Dan Mesin sebesar Rp16.505.475.173,00

Pada Tahun 2024 dilakukan lelang barang milik daerah untuk kendaraan dinas perorangan. jabatan dan operasional. Dan telah dilakukan proses penghapusan dari daftar aset tetap peralatan dan mesin dengan total nilai Rp11.561.998.500,00. Pada Tahun 2024 ada Penambahan Aset Peralatan dan Mesin dari Belanja Tidak Terduga dengan nilai Rp750.410.000,00 akibat terjadi nya Kebakaran pada Kantor Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah.

Jumlah saldo akhir Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 sebesar Rp510.842.336.803,99, secara rinci aset tetap peralatan dan mesin dapat dilihat pada lampiran XVII.b

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp936.554.676.961,87 Dibandingkan Nilai Aset Gedung dan Bangunan Tahun 2023 sebesar Rp817.801.391.584,60. atau mengalami peningkatan sebesar Rp118.753.285.377,27dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.68
Aset Tetap-Gedung dan Bangunan

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Bangunan Gedung Tempat Kerja	925.554.676.961,87	809.000.215.084,60	116.554.461.877,27
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	2.263.377.633,00	2.263.377.633,00	0,00
Tugu/Tanda Batas	8.705.888.167,00	6.537.798.867,00	2.168.089.300,00
Jumlah	**936.554.676.961,87**	**817.801.391.584,60**	**118.753.285.377,27**

Sumber: Simda BMD2024

Ringkasan Mutasi Aset Gedung Dan Bangunan selama Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.69
Mutasi Aset Gedung dan Bangunan

Saldo aset gedung dan bangunan per 31 Desember 2023			**Rp**	**817.801.391.584,60**
Penambahan:				
1. Realisasi Belanja modal aset gedung dan bangunan	Rp	88.382.929.824,18		
2. Kapitalisasi Aset dari Barang dan Jasa	Rp	21.316.099.278,00		
3. Kapitalisasi Aset dari Barang dan Jasa (Bansos)	Rp	199.850.000,00		

4. Reklas dari KIB B	Rp	12.260.000,00		
5. Reklas dari KIB D	Rp	1.013.645.460,00		
5. Reklas dari KDP	Rp	42.294.069.034,44		
6. Utang belanja modal	Rp	839.712.587,00		
7. Mutasi antar OPD	Rp	5.798.822.323,00		
8. Beban Bayar di Muka	Rp	1.560.779.209,83		
Jumlah penambah	**Rp**	**161.418.167.716,45**		
Pengurang:				
1. Penghapusan Aset	Rp	635.225.250,00		
2. Reklas ke KIB A	Rp	2.719.362.177,00		
3. Reklas ke KIB B	Rp	621.213.000,00		
4. Reklas ke KIB D	Rp	7.474.608.500,00		
5. Pembayaran Hutang	Rp	4.822.931,00		
6. Diserahkan kepada Masyarakat/Hibah	Rp	1.672.657.602,00		
7. Direklas ke asset lainnya	Rp	669.667.000,00		
7. Reklas KDP	Rp	23.068.503.556,18		
8. Mutasi antar OPD	Rp	5.798.822.323,00		
Jumlah pengurang	**Rp**	**(42.664.882.339,18)**		
Jumlah Penambahan/(Pengurangan) aset gedung dan bangunan Tahun 2024			**Rp**	**118.753.285.377,27**
Saldo akhir aset gedung dan bangunan per 31 Desember 2024			**Rp**	**936.554.676.961,87**

Sumber: Bidang Aset

Penjelasan atas Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan selama Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Mutasi tambah :
   a. Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan berasal dari realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2024 sebesar Rp88.382.929.824,18
   b. Penambahan Kapitalisasi Aset dari Barang dan Jasa sebesar Rp21.316.099.278,00, Wujud dari Aset Barang dan Jasa adalah bangunan Tempat Pendidikan dan Bangunan Kantor, dan Bangunan Rumah Sakit
   c. Penambahan Kapitalisasi Aset dari Barang dan Jasa (Bansos) Sebesar Rp199.850.000,00 Wujud dari Aset Bansos adalah Pemasangan Tegel Pelataran Mushollah Kantor Bupati.
   d. Penambahan Reklas dari KIB B sebesar Rp12.260.000,00 Wujud Reklas Aset Antar KIB adalah Bangunan Rumah Sakit Umum
   e. Penambahan Reklas dari KIB D sebesar Rp1.013.645.460,00 Wujud Reklas Aset Antar KIB adalah Bangunan Gedung Kantor.
   f. Penambahan Reklas dari KDP sebesar Rp42.294.069.034,44, Wujud Reklas dari KDP adalah Bangunan Tempat Ibadah yang direklas dari KDP.
   g. Penambahan Utang Belanja Modal Rp839.712.587,00 Wujud dari Utang Belanja Modal adalah Bangunan Tempat Ibadah (Islamic Center Morowali Utara) dikarenakan fisik sudah 100%.

h. Penambahan mutasi antar SKPD sebesar Rp5.798.822.323,00 wujud dari mutasi antar SKPD adalah Bangunan Gedung Kantor Permanen.

i. Penambahan Beban Bayar di muka sebesar Rp1.560.779.209,83 Wujud dari Beban Bayar di muka adalah Bangunan Rumah Sakit

Sehingga total mutasi tambah Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp161.418.167.716,45.

2. Mutasi kurang :

a. Pengurangan Aset Gedung dan Bangunan berasal dari Penghapusan Aset sebesar Rp635.225.250,00 Wujud Aset dari Penghapusan Aset tersebut adalah Bangunan Gedung VIP RSUD Kolonodale dengan Nomor Penghapusan Aset: 188.45/KEP-B.MU/0026.4/I/2023

b. Pengurangan Reklas Aset Antar KIB sebesar Rp10.815.183.677,00 Wujud Aset dari Reklas antar KIB adalah Penimbunan Reklamasi Pantai, Tanggul dan Bangunan Dermaga

c. Pengurangan Pembayaran Utang sebesar Rp4.822.931,00 Wujud Aset dari Pembayaran Utang adalah pekerjaan yang telah di akui pada tahun 2023

d. Pengurangan Barang Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp1.672.657.602,00 Wujud Aset dari Barang yang di serahkan kepada Masyarakat adalah Bangunan Tempat Pendidikan.

e. Pengurangan reklas ke aset lainnya sebesar Rp669.667.000,00 yang merupakan Pembangunan kantor KPU.

f. Koreksi pekerjaan menjadi KDP Rp23.068.503.556,18 Wujud aset dari Reklas KDP adalah Bangunan Gedung kantor permanen dan Bangunan Klinik/puskesmas.

g. Pengurangan mutasi antar SKPD sebesar Rp5.798.822.323,00 Wujud Aset dari Mutasi antar SKPD adalah Bangunan Gedung kantor Permanen

Sehingga total mutasi kurang Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp42.664.882.339,18.

Jumlah saldo akhir Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 sebesar Rp936.554.676.961,87. Secara rinci dapat dilihat pada lampiran XVII.c.

5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Jalan. Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.711.908.144.151,70 atau mengalami peningkatan sebesar Rp142.110.083.156,94 dibandingkan dengan Nilai Aset Jalan. Irigasi dan Jaringan per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp1.569.798.060.994,76 berdasarkan rincian objek sebagai berikut:

Tabel 5.70
Aset Tetap - Jalan. Irigasi dan Jaringan

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Jalan	991.177.192.754,33	896.523.916.707,39	94.653.276.046,94
Jembatan	127.906.899.489,59	121.169.436.273,59	6.737.463.216,00
Bangunan Air Irigasi	224.512.803.558,42	217.391.437.998,42	7.121.365.560,00
Bangunan Pengairan Pasang Surut	1.829.624.613,00	1.829.624.613,00	0,00
Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder	2.190.967.383,00	2.041.448.056,00	149.519.327,00
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	145.944.873.487,99	125.706.836.837,99	20.238.036.650,00

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	9.149.686.500,00	8.124.460.000,00	1.025.226.500,00
Bangunan Air Bersih/Air Baku	71.231.907.274,00	69.485.939.676,00	1.745.967.598,00
Bangunan Air Kotor	12.558.666.120,90	11.065.771.120,90	1.492.895.000,00
Instalasi Air Bersih / Air Baku	16.458.862.172,46	14.132.062.172,46	2.326.800.000,00
Instalasi Air Kotor	10.512.459.044,00	10.452.459.044,00	60.000.000,00
Instalasi Pembangkit Listrik	8.814.032.100,00	8.814.032.100,00	0,00
Instalasi Gardu Listrik	4.170.386.258,00	4.170.386.258,00	0,00
Instalasi Pertahanan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
Instalasi Gas	9.950.000,00	9.950.000,00	0,00
Instalasi Pengaman	29.930.000,00	29.930.000,00	0,00
Jaringan Air Minum	20.324.918.139,00	19.819.683.240,00	505.234.899,00
Jaringan Listrik	65.051.985.257,00	58.997.686.897,00	6.054.298.360,00
Jaringan Telepon	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
Jumlah	**1.711.908.144.151,70**	**1.569.798.060.994,76**	142.110.083.156,94

Sumber: Simda BMD 2024

Ringkasan Mutasi Aset Jalan. Irigasi dan Jaringan Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.71
Mutasi Aset Jalan. Irigasi dan Jaringan

Saldo aset jalan. irigasi dan jaringan per 31 Desember 2023			**Rp**	**1.569.798.060.994,76**
Penambahan:				
1. Realisasi Belanja modal aset jalan. irigasi dan jaringan	Rp	141.028.364.474,00		
2. Kapitalisasi aset dari barang dan jasa	Rp	11.367.926.990,00		
3. Reklas dari KIB B	Rp	13.850.000,00		
4. Reklas dari KIB C	Rp	7.474.608.500,00		
5. Reklas dari KDP	Rp	6.972.249.819,50		
6.Utang belanja modal	Rp	72.699.100,00		
7. Mutasi antar OPD	Rp	728.978.000,00		
8. Beban Bayar di muka	Rp	906.441.775,04		
Jumlah penambah	**Rp**	**168.565.118.658,54**		
Pengurang:				
1. Reklas ke KIB C	Rp	1.013.645.460,00		
2. Diserahkan kepada masyarakat	Rp	1.402.185.000,00		
3. Pembayaran Hutang	Rp	433.846.316,60		
4. Mutasi antar OPD	Rp	728.978.000,00		
5. Reklas KDP	Rp	22.876.380.725,00		

Jumlah Pengurang	**Rp**	**(26.455.035.501,60)**		
Jumlah Penambahan/(Pengurangan) aset jalan. irigasi dan jaringan Tahun 2024			**Rp**	**142.110.083.156,94**
Saldo akhir aset jalan. irigasi dan jaringan per 31 Desember 2024			**Rp**	**1.711.908.144.151,70**

Sumber: Bidang Aset

Penjelasan atas mutasi Aset Tetap Jalan. Irigasi dan Jaringan selama Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Mutasi tambah :
   a. Penambahan Aset Tetap berasal dari realisasi Belanja Modal Jalan. Irigasi Dan Jaringan Tahun 2024 sebesar Rp141.028.364.474,00
   b. Penambahan Kapitalisasi Aset dari Barang dan Jasa sebesar Rp11.367.926.990,00 Wujud dari Penambahan Kapitalisasi Aset dari Barang dan Jasa adalah Jalan dan Jembatan.
   c. Penambahan Reklas Aset Antar KIB sebesar Rp14.360.807.319,50 Wujud dari Penambahan Reklas Aset antar KIB adalah Jalan, Jembatan dan Tanggul.
   d. Penambahan Utang Belanja Modal sebesar Rp72.699.100,00 Wujud dari Penambahan utang belanja modal adalah Saluran Pembuang
   e. Penambahan Reklas KDP atas pekerjaan telah selesai pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp99.901.000,00 Wujud dari Penambahan Reklas KDP adalah Bangunan Penguat tebing
   f. Penambahan mutasi antar SKPD sebesar Rp728.978.000,00 Wujud dari Penambahan mutasi antar SKPD adalah Jalan dan tanggul
   g. Penambahan Beban bayar dimuka sebesar Rp906.441.775,04 Wujud dari Penambahan Beban bayar dimuka adalah Jalan Kabupaten

   Sehingga total mutasi tambah Aset Tetap Jalan. Irigasi dan Jaringan sebesar Rp168.565.118.658.54.

2. Mutasi kurang :
   a. Pengurangan Reklas ke KIB C sebesar Rp1.013.645.460,00 Wujud dari Pengurangan reklas ke KIB C adalah Bangunan Gedung kantor lain-lain
   b. Pengurangan Barang Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp1.402.185.000,00 Wujud dari Pengurangan Barang diserahkan kepada Masyarakat adalah jalan usaha tani
   c. Pengurangan Pembayaran Hutang sebesar Rp433.846.316,00 Wujud dari Pengurangan Pembayaran Hutang adalah Saluran pembuang
   d. Pengurangan Reklas KDP Sebesar Rp22.876.380.725,00 Wujud dari Pengurangan Reklas KDP adalah Jalan kabupaten, jembatan dan bangunan pembawa air bersih lain-lain
   e. Pengurangan mutasi antar SKPD sebesar Rp728.978.000,00 Wujud dari Pengurangan mutase antar SKPD adalah Bangunan kantor lain-lain, jalan kabupaten dan tanggul

   Sehingga Total mutasi kurang Aset Tetap Jalan. Irigasi Dan Jaringan sebesar Rp26.455.035.501,60

   Jumlah saldo akhir Aset Tetap Jalan. Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.711.908.144.151,70

   Berdasarkan SK Bupati Morowali Utara Nomor : 188.45/KEP-B.MU/0094.a/VIII/2014 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan menurut statusnya sebagai jalan Kabupaten dan Jalan Desa di

Kabuapten Morowali Utara dan terakhir di ubah dengan SK Bupati Morowali Utara Nomor : 188.45/KEP-B.MU/0022/I/2024 tentang Penetapan Ruas Jalan menurut statusnya sebagai jalan Kabupaten di Kabuapten Morowali Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati tersebut diketahui panjang ruas jalan di Kabupaten Morowali Utara adalah 784.96 Km. Secara rinci dapat dilihat dalam lampiran XVII.d.

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Morowali Utara per 31 Desember 2024 sebesar Rp15.436.098.446,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp1.208.234.400,00 dibandingkan dengan Nilai Aset Tetap Lainnya per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp Rp14.227.864.046,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.72
Aset Tetap Lainnya

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Bahan Perpustakaan Tercetak	11.509.817.485,00	10.302.683.085,00	1.207.134.400,00
Kartografi. Naskah dan Lukisan	74.360.000,00	74.360.000,00	0,00
Musik	76.100.000,00	75.000.000,00	1.100.000,00
Barang Bercorak Kesenian	1.261.344.961,00	1.261.344.961,00	0,00
Alat Bercorak Kebudayaan	5.590.000,00	5.590.000,00	0,00
Ternak	83.160.000,00	83.160.000,00	0,00
Tanaman	655.654.000,00	655.654.000,00	0,00
Aset Tetap Dalam Renovasi	1.770.072.000,00	1.770.072.000,00	0,00
Jumlah	**15.436.098.446,00**	**14.227.864.046,00**	**1.208.234.400,00**

Sumber: Simda BMD 2024

Ringkasan mutasi Aset Tetap Lainnya selama Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.73
Mutasi Aset Tetap Lainnya

Saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2023			**Rp**	**14.227.864.046,00**
Penambahan:				
1. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp	254.614.700,00		
2. Reklas Aset Antar KIB	Rp	1.008.534.400,00		
Jumlah Penambah	**Rp**	**1.263.149.100,00**		
Pengurang:				
1. Reklas ATB	Rp	54.914.700,00		
Jumlah Penambah	**Rp**	**54.914.700,00**		
Jumlah Penambahan/(Pengurangan) aset tetap lainnya Tahun 2024			**Rp**	**1.208.234.400,00**
Saldo akhir aset tetap lainnya per 31 Desember 2024			**Rp**	**15.436.098.446,00**

Sumber: Bidang Aset

Penjelasan atas mutasi Aset Tetap Lainnya selama Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Mutasi tambah :
   a. Penambahan Realisasi Aset Tetap Lainnya berasal dari Belanja Modal tahun 2024 sebesar Rp254.614.700,00
   b. Penambahan Reklas Aset Antar KIB Sebesar Rp1.008.534.400,00 Wujud dari Penambahan Reklas aset antar KIB adalah Buku

   Sehingga total mutasi tambah aset tetap lainnya sebesar Rp1.263.149.100,00
2. Mutasi kurang :
   a. Pengurangan Reklas Aset ATB Sebesar Rp54.914.700,00 Wujud dari Pengurangan Reklas Aset ATB adalah Aplikasi / software BASAOMO Dinas Perpustakaan Daerah.

   Sehingga total mutasi kurang aset tetap lainnya sebesar Rp54.914.700,00.

   Sehingga jumlah saldo Akhir Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp15.436.098.446,00. Secara rinci dapat dilihat dalam lampiran XVII.e.

5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah Aset Tetap Berwujud. yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 belum selesai dikerjakan. yang oleh karenanya tidak dapat di kelompokkan dalam Aset Tetap bersangkutan. Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara per 31 Desember 2024 sebesar Rp82.807.703.692,84 atau mengalami peningkatan sebesar Rp760.733.843,98 dibandingkan dengan Nilai konstruksi dalam pengerjaan per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp82.046.969.848,86.

Berdasarkan Realisasi Fisik Dan Keuangan Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan sampai dengan 31 Desemmber 2024 dapat kami sajikan sebagai berikut:

Tabel 5.74
Aset Tetap-Konstruksi Dalam Pengerjaan

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen	73.499.000,00	73.499.000,00	0,00
Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	41.120.000,00	41.120.000,00	0,00
Rumah Negara Golongan III Tipe C Permanen	19.900.000,00	19.900.000,00	0,00
Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen	835.065.000,00	835.065.000,00	0,00
Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	285.392.000,00	486.307.000,00	(200.915.000,00)
Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-Lain (Dst)	55.856.700,00	55.856.700,00	0,00
Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	263.858.000,00	19.965.000,00	243.893.000,00
Bangunan Tempat Ibadah Lain-Lain (Dst)	0,00	8.755.996.081,49	(8.755.996.081,49)
Asrama Permanen	992.487.600,00	992.487.600,00	0,00
Pagar Permanen	129.720.000,00	99.750.000,00	29.970.000,00
Bangunan Gedung Kantor Permanen	32.225.412.317,38	10.911.193.237,20	21.314.219.080,18
Bangunan Gedung Kantor Lain-Lain	108.436.000,00	49.630.000,00	58.806.000,00
Bangunan Gudang Tertutup Permanen	0,00	49.280.000,00	(49.280.000,00)
Bangunan Fasilitas Umum lainnya	121.380.000,00	49.966.000,00	71.414.000,00

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Bangunan Gedung Hiburan/Kesenian Permanen	198.722.500,00	198.722.500,00	0,00
Bangunan Rumah Sakit Umum	129.252.750,00	30.956.308.953,95	(30.827.056.203,95)
Bangunan Rumah Sakit Lain-Lain Dst	118.999.100,00	118.999.100,00	0,00
Bangunan Klinik/Puskesmas	7.827.521.746,00	7.446.358.749,00	381.162.997,00
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
Sumur Resapan	199.550.000,00	199.550.000,00	0,00
Bangunan Pembawa Air Bersih Lain-Lain	9.241.604.320,00	99.824.000,00	9.141.780.320,00
Saluran Drainage	144.646.700,00	144.646.700,00	0,00
Bangunan Pelengkap Irigasi Lain-Lain	49.900.000,00	49.900.000,00	0,00
Bendung	0,00	99.800.000,00	(99.800.000,00)
Bangunan Pembawa Irigasi Lain-Lain	3.076.909.199,40	3.106.692.199,40	(29.783.000,00)
Jembatan Khusus Lain-Lain	126.012.100,00	49.900.000,00	76.112.100,00
Jembatan Desa Lain-Lain	1.001.547.842,00	448.557.200,00	552.990.642,00
Jembatan Pada Jalan Desa	4.778.459.481,06	1.872.604.378,26	2.905.855.102,80
Jembatan Pada Jalan Kabupaten Lokal	0,00	688.093.616,60	(688.093.616,60)
Jembatan Gantung	1.479.972.932,00	327.614.000,00	1.152.358.932,00
Jembatan Penyebrangan Lain-lain	119.911.150,00	46.411.500,00	73.499.650,00
Jembatan Pada Jalan Kabupaten Arteri	194.704.000,00	0,00	194.704.000,00
Jalan Khusus Lain-Lain	180.502.950,00	180.502.950,00	0,00
Jalan Khusus Lainnya	438.139.800,00	320.416.800,00	117.723.000,00
Jalan Khusus Kompleks	49.850.000,00	49.850.000,00	0,00
Jalan Desa	3.449.020.566,00	216.830.278,00	3.232.190.288,00
Jalan Kabupaten Lain-Lain	199.525.000,00	274.429.500,00	(74.904.500,00)
Jalan Kabupaten Lokal	7.701.683.710,00	7.240.652.569,96	461.031.140,04
Jalan Kabupaten Kolektor	95.480.000,00	95.480.000,00	0,00
Jalan Kabupaten Arteri	4.523.024.582,00	1.466.806.950,00	3.056.217.632,00
Jalan Khusus Pejalan Kaki (Trotoar)	0,00	3.385.360.155,00	(3.385.360.155,00)
Jaringan Distribusi Lain-Lain	24.462.130,00	24.462.130,00	0,00
Tanggul Banjir (Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai)	189.110.000,00	189.110.000,00	0,00
Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai Lain-lain (dst)	0,00	59.896.000,00	(59.896.000,00)
tugu lainnya (dst)	64.774.000,00	39.778.000,00	24.996.000,00
alat angkutan apung bermotor khusus lainnya (dst)	59.895.000,00	59.895.000,00	0,00
Bangunan Penguat Tebing/Pantai	0,00	99.901.000,00	(99.901.000,00)

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Lemari Kayu	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
Papan Tulis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
Meja Sekolah	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00
Bangku Sekolah	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00
Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	149.737.000,00	0,00	149.737.000,00
Jalan Kabupaten Bernilai Strategis Kabupaten	342.111.517,00	0,00	342.111.517,00
Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya Lain-lain	957.097.500,00	0,00	957.097.500,00
Bangunan Penampung Sampah Lain-lain	393.994.500,00	0,00	393.994.500,00
Jaringan Pembawa Lain-lain	99.855.000,00	0,00	99.855.000,00
Jumlah	**82.807.703.692,84**	**82.046.969.848,86**	760.733.843,98

Sumber: Simda BMD

Dan berdasarkan SKPD nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp82.807.703.692,84 dengan rincian sebagai berikut:

Ringkasan mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan selama Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.75
Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2023			**Rp**	**82.807.703.692,84**
Penambahan:				
1. Reklas dari KIB C	Rp	23.068.503.556,18		
2. Reklas dari KIB D	Rp	22.876.380.725,00		
3. Kapitalisasi dari belanja barang dan jasa	Rp	4.239.163.870,00		
Jumlah Penambah	**Rp**	**50.184.048.151,18**		
Pengurang:				
1. Reklas ke KIB C	Rp	42.294.069.034,44		
2. Reklas ke KIB D	Rp	6.972.249.819,50		
2. Pembayaran Utang	Rp	156.995.453,26		
Jumlah Pengurang	**Rp**	**49.423.314.307,20**		
Jumlah Penambahan/(Pengurangan) Konstruksi dalam pengerjaan Tahun 2024			**Rp**	**760.733.843,98**
Saldo akhir aset Konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2024			**Rp**	**82.807.703.692,84**

Sumber: Bidang Aset

Penjelasan atas mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan selama Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Mutasi tambah :

   a. Reklas dari KIB C ke KDP Rp23.068.503.556,18 Wujud aset dari dari KIB C ke KDP adalah Bangunan Gedung kantor permanen dan Bangunan Klinik/puskesmas

   b. Reklas dari KIB D ke KDP Sebesar Rp22.876.380.725,00 Wujud dari Pengurangan Reklas dari KIB D ke KDP adalah Jalan kabupaten, jembatan dan bangunan pembawa air bersih lain-lain

   c. Penambahan Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa Sebesar Rp4.239.163.870,00 Wujud dari Penambahan Kapitalisasi belanja Barang dan Jasa adalah Bangunan Kantor Permanen, Jalan Desa, Jembatan, Bangunan klinik/puskesmas dan bangunan pembawa air bersih lain - lain

   Sehingga total mutasi tambah Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp50.184.048.151,18.

2. Mutasi kurang :

   a. Reklas dari KDP ke KIB C sebesar Rp42.294.069.034,44, Wujud Reklas dari Reklas dari KDP ke KIB C adalah Bangunan Tempat Ibadah yang direklas dari KDP.

   b. Reklas dari KDP ke KIB D sebesar Rp6.972.249.819,50 Wujud dari Penambahan Reklas dari KDP ke KIB D adalah Jalan dan Jembatan.

   c. Pengurangan Pembayaran Utang Rp156.995.453 Wujud dari Pengurangan Pembayaran utang adalah Jembatan.

   Sehingga total mutasi kurang Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp49.423.314.307,94. Saldo akhir Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp82.807.703.692,84. Secara rinci dapat dilihat pada Lampiran XVII.f dan XVIII.

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan merupakan kumpulan Penyusutan pada Aset Milik Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dari Tahun ke Tahun sampai dengan tanggal Neraca, sedangkan penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas manfaat suatu Aset Tetap selain Tanah.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2024 sebesar Rp1.181.366.544.726,19 dan Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.043.371.858.449,94.

Akumulasi Penyusutan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 disajikan komparatif dengan Akumulasi Penyusutan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara per 31 Desember 2024. Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Morowali Utara menggunakan metode garis lurus bulanan. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2024 masing-masing berdasarkan rincian objek Aset sebagai berikut:

Tabel 5.76
Aset Tetap-Akumulasi Penyusutan

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Nilai Buku
Peralatan dan Mesin	**355.200.244.267,19**	**320.145.688.162,34**	**35.054.556.104,85**	**27.905.245.330,00**
Alat-alat Besar	5.600.789.747,00	5.122.841.240,00	477.948.507,00	765.286.464.00
Alat-alat Angkutan	72.055.565.324,00	76.718.936.576,00	(4.663.371.252,00)	28.149.518.407.00
Alat Bengkel dan Alat Ukur	2.743.017.471,00	2.095.280.337,00	647.737.134,00	2.386.394.460.00
Alat Pertanian	5.613.498.984,00	5.217.427.584,33	396.071.399,67	194.259.236,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga	78.929.955.543,19	70.551.795.241,67	8.378.160.301,52	27.710.986.094,00
Alat Studio. Komunikasi dan Pemancar	9.629.297.086,00	8.140.207.718,67	1.489.089.367,33	5.520.124.948.00
Alat Kedokteran dan Kesehatan	85.598.726.414,00	73.076.455.777,00	12.522.270.637,00	41.354.637.522.80
Alat Laboratorium	36.849.286.626,00	31.398.169.209,00	5.451.117.417,00	18.881.406.927.00
Alat Persenjataan	355.274.154,00	281.533.102,00	73.741.052,00	67.641.484.00
Komputer	52.526.407.816,00	42.901.410.180,67	9.624.997.635,33	26.297.144.672.00
Alat Ekplorasi	5.200.000,00	400.000,00	4.800.000,00	18.800.000.00
Alat Produksi.Pengolahan Dan Pemurnian	3.195.833,00	1.345.833,00	1.850.000,00	15.304.167.00
Alat Keselamatan Kerja	4.322.886.827,00	4.004.549.100,00	318.337.727,00	399.265.198.00
Alat Peraga	261.250,00	166.250,00	95.000,00	688.750.00
Peralatan Proses/Produksi	543.749,00	131.249,00	412.500,00	2.756.253.00
Rambu-rambu	571.099.466,00	396.458.407,00	174.641.059,00	2.457.158.924.00
Peralatan Olahraga	395.237.977,00	238.580.357,00	156.657.620,00	1.429.219.030.00
Gedung dan Bangunan	**140.367.064.979,00**	**123.743.841.431,60**	**16.623.223.547,40**	**786.037.954.562,87**
Bangunan Gedung	139.547.456.599,00	123.107.947.978,60	16.439.508.620,40	786.037.954.562,87
Monumen	319.499.026,00	274.744.159,00	44.754.867,00	1.943.878.607.00
Tugu Titik Kontrol/Pasti	500.109.354,00	361.149.294,00	138.960.060,00	8.205.778.813.00
Jalan dan Jembatan dan Irigasi	**685.761.034.246,00**	**599.447.825.123,00**	**86.313.209.123,00**	**1.026.147.109.905,69**
Jalan dan Jembatan	516.080.973.436,00	450.497.625.868,00	65.583.347.568,00	603.003.118.807,92
Bangunan Air	145.313.313.711,00	127.927.985.735,00	17.385.327.976,00	322.105.215.226,31
Instalasi	7.003.831.696,00	5.835.955.476,00	1.167.876.220,00	33.021.787.878,46
Jaringan	17.362.915.403,00	15.186.258.044,00	2.176.657.359,00	68.016.987.993,00
Aset Tetap Lainnya	**38.626.233,00**	**34.503.733,00**	**4.122.500,00**	**15.397.472.213,00**
Bahan Perpustakaan	29.699.780,00	29.699.780,00	0,00	11.630.577.705,00
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	8.926.453,00	4.803.953,00	4.122.500,00	1.258.008.508,00
Hewan	0,00	0,00	0,00	83.160.000,00
Tanaman	0,00	0,00	0,00	655.654.000,00

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Nilai Buku
Aset Tetap Dalam Renovasi	0,00	0,00	0,00	1.770.072.000.00
Jumlah	**1.181.366.969.725,19**	**1.043.435.281.789,00**	137.931.687.936,19	**2.180.934.252.759,21**

Sumber: Simda BMD

5.3.1.4 Aset Lainnya

Nilai Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Morowali Utara per 31 Desember 2024 sebesar Rp143.893.890.631,08. Rincian Aset lainnya Pemerintah Kabupaten Morowali Utara per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.77
Aset Lainnya

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	482.006.633,00	482.006.633,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	2.830.422.650,00	2.651.052.950,00	179.369.700,00
Aset Lain-Lain	105.509.932.425,26	102.457.734.497,26	3.052.197.928,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(2.313.182.478,33)	(2.125.623.083,34)	(187.559.394,99)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(10.249.568.425,28)	(10.249.143.425,28)	(425.000,00)
Kas yang Dibatasi Penggunaannya	0,00	196.206.290.000,00	(196.206.290.000,00)
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	50.615.809.000,00	0,00	50.615.809.000,00
Jumlah	**146.875.419.804,65**	**289.422.317.571,64**	(142.546.897.766,99)

Sumber: SIPD 2024

Penjelasan Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Morowali Utara sebagai berikut:

5.3.1.4.1 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Dapat dijelaskan bahwa Saldo Awal Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp482.006.633,00 merupakan koreksi pengakuan temuan atas kekurangan Kas pada LKPD Tahun Anggaran 2018 di Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan Daerah atas penerimaan BPJS dan Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas yang sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2024 belum disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp275.470.913,00 berdasarkan Berita Acara Majelis Pertimbangan TP-TGR Nomor : 045/MP TP-TGR/MU/XII/2020 dan atas pengakuan temuan kekurangan Kas pada LKPD Tahun Anggaran 2018 di bendahara penerimaan RSUD Kolonodale atas Penerimaan Klaim Ambulans sebesar Rp207.535.720.

5.3.1.4.2 Aset Tidak Berwujud

Nilai yang tertera pada Aset Tidak Berwujud Per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.830.422.650,00. Nilai tersebut merupakan nilai perolehan Aset Tidak Berwujud sampai dengan Tahun 2024, terdapat penambahan Aset Tidak Berwujud Tahun 2023 yang merupakan perangkat lunak (*Software*) sebesar Rp100.000.000,00 dari Inspektorat, dan sebesar Rp24.950.000,00 dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Tahun 2024 perangkat lunak (*Software*) sebesar Rp124.455.000,00 dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan sebesar Rp54.914.700,00 dari Dinas Perpustakaan Daerah. Dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai Rp2.651.052.950,00

Selengkapnya mengenai Aset Tidak Berwujud dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.78
Nilai Buku Aset Tidak Berwujud

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
Nilai Perolehan Aset Tidak Berwujud	2.830.422.650,00	2.651.052.950,00	179.369.700,00
Akumulasi Amortisasi ATB	(2.313.182.478,33)	(2.125.623.083,34)	(187.559.394,99)
Nilai Buku Aset Tidak Berwujud	**517.240.171,67**	**525.429.866,66**	**(8.189.694,99)**

Sumber: SIPD 2024

Tabel 5.79
Kenaikan/Penurunan Nilai Buku Aset Tidak Berwujud

Saldo aset tidak berwujud per 31 Desember 2023			**Rp**	**2.651.052.950,00**
Penambahan:				
1. Realisasi Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	Rp	0.00		
2. Reklas Aset Antar KIB	Rp	179.369.700,00		
Jumlah Penambah	**Rp**	**179.369.700,00**		
Jumlah Penambahan/(Pengurangan) aset tetap lainnya Tahun 2024			**Rp**	**179.369.700,00**
Saldo akhir aset tetap lainnya per 31 Desember 2024			**Rp**	**2.830.422.650,00**

Penjelasan atas mutasi Aset Tidak Berwujud selama Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Mutasi tambah :

   a. Penambahan Reklas Aset Antar KIB Sebesar Rp179.369.700,00 Wujud dari Penambahan Reklas aset antar KIB adalah Aplikasi BASAOMO (Dinas Perpustakaan Daerah) dan SITAMU (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah)

   Sehingga total mutasi tambah aset tetap lainnya sebesar Rp179.369.700,00.

5.3.1.4.3 Aset Lain-lain

Aset Lain-Lain Pemerintah Kabupaten Morowali Utara per 31 Desember 2024 sebesar Rp105.509.932.425,26 Aset Lain-Lain tersebut terdiri dari:

Tabel 5.80
Aset Lain-lain

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
Aset Rusak Berat/Usang	97.346.762.809,26	94.294.564.881,26	3.052.197.928,00
Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	8.163.169.616,00	8.163.169.616,00	0,00
Jumlah	105.509.932.425,26	102.457.734.497,26	3.052.197.928,00

Sumber: Simda BMD

Penjelasan:

1. Dapat dijelaskan bahwa Aset Rusak Berat/Usang sebesar Rp97.346.762.809,26 berasal dari:
   a. Reklas Aset Lainnya Tagihan Jangka Panjang sebesar Rp636.948.427,00 yang merupakan kekurangan kas pada Dinas Kesehatan, Puskesmas Pandauke dan Puskesmas Anutotoluwu Tahun Anggaran 2017.
   b. Pengadaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Dinas Pendidikan yang tidak ditemukan keberadaannya sebesar Rp8.500.000,00.
   c. Pengadaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Dinas Sosial yang tidak ditemukan keberadaannya sebesar Rp14.380.050,00 Tahun Anggaran 2023.
   d. Pengadaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari DPUPRDPPD yang tidak ditemukan keberadaannya sebesar Rp3.022.500,00 Tahun Anggaran 2023.
   e. Aset Rusak Berat sebesar Rp93.625.628.832,26. Saldo awal sebesar Rp93.445.753.832,26 dan terdapat penambahan Aset Rusak Berat Roda Dua sebesar Rp179.875.000,00 yang terdapat pada Bagian Umum sebesar Rp35.600.000,00, Dinas Tenaga Kerja sebesar Rp43.425.000,00, Kecamatan Lembo sebesar Rp17.300.000,00, Kecamatan Mori Utara sebesar Rp15.850.000, Kecamatan Petasia sebesar Rp16.800.000, Kecamatan Petasia Barat sebesar Rp50.900.000,00.
   f. Pembangunan kantor KPU sebesar Rp3.058.283.000,00 yang akan diserahkan Tahun 2025.

   Secara rinci aset tetap rusak berat dapat dilihat pada lampiran XIX.
2. Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah sebesar Rp8.163.169.616,00 merupakan Dana Rekening BNI yang di Blokir KPK tahun 2022. Berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor STPBB/ 09/DIK.01.05/23/01/2023 pada tanggal 5 Januari 2023.

5.3.1.4.4 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud Per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.313.182.478,33 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp2.125.623.083,34 terjadi penurunan sebesar Rp187.559.394,99, hal ini disebabkan karena adanya Perubahan Estimasi Masa Manfaat Aset sehingga beban amortisasi tahunan akan berkurang. Hal ini yang menyebabkan penurunan dalam akumulasi amortisasi dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud merupakan penyusutan dari software sebesar Rp2.313.182.478,33. Secara rinci dapat dilihat pada lampiran XX.

5.3.1.4.5 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Tahun 2024 sebesar Rp10.249.568.425,28 terdiri dari akumulasi penyusutan aset tetap kendaraan bermotor beroda dua yang direklasifikasi ke akumulasi penyusutan aset rusak berat/usang sebesar Rp172.964.287,00, koreksi atas kesalahan pencatatan akumulasi aset tetap rusak berat Rp10.076.179.138,28, dan koreksi ketekoran kas bos akibat belanja tanpa disertai SPJ pada enam sekolah sebesar Rp425.000,00. Dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp10.249.143.425,28 terjadi kenaikan sebesar Rp425.000,00, hal ini dapat dijelaskan bahwa adanya koreksi Aset dari sekolah terkait pembelian barang yang menambah aset sehingga penambahan aset ini secara langsung meningkatkan total akumulasi penyusutan karena beban penyusutan tahunan bertambah. Secara rinci dapat dilihat pada lampiran XXI.

5.3.1.4.6 Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)

Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) adalah Dana Bagi Hasil yang merupakan fasilitas penyimpanan uang di Bank Indonesia dalam bentuk overnight pada rekening lain BI TDF-TKD Pemerintah Daerah yang disediakan oleh bendahara umum negara bagi Pemerintah Daerah sebesar Rp50.615.809.000,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp196.206.290.000,00 terjadi penurunan sebesar Rp145.590.481.000,00, hal ini disebabkan karena adanya perubahan kebijakan fiskal atau pengelolaan keuangan negara, seperti penyesuaian alokasi dana transfer pusat ataupun perubahan dalam mekanisme penyaluran dana ke daerah sehingga dapat mempengaruhi jumlah dana yang ditempatkan di TDF tersebut.

5.3.2 Kewajiban

Kewajiban Pemerintah Kabupaten Morowali Utara yang masih harus dibayar per 31 Desember 2024 sebesar Rp119.682.720.180,87 mengalami penurunan sebesar Rp48.500.652.085,19 jika dibandingkan nilai Kewajiban per 31 Desember 2023 sebesar Rp168.183.372.266,06 yang seluruhnya merupakan Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang terdiri dari:

Tabel 5.81
Kewajiban

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
Kewajiban Jangka Pendek	**50.497.780.575,87**	**50.162.026.769,06**	335.753.806,81
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	81.146.123,67	147.384.772,00	(66.238.648,33)
Utang Bunga	218.339.489,00	308.686.840,00	(90.347.351,00)
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	48.836.405.892,00	48.836.405.892,00	0,00
Utang Belanja	1.361.889.071,20	398.005.698,06	963.883.373,14
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	471.543.567,00	(471.543.567,00)
Kewajiban Jangka Panjang	**69.184.939.605,00**	**118.021.345.497,00**	**(48.836.405.892,00)**
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	69.184.939.605,00	118.021.345.497,00	(48.836.405.892,00)
Jumlah	**119.682.720.180,87**	**168.183.372.266,06**	(48.500.652.085,19)

Sumber: SIPD 2024

5.3.2.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2024 sebesar Rp81.446.123,67 merupakan utang PFK pada bendahara JKN sebesar Rp81.146.123,67. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.82
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
Utang PPh 21	45.609.073,00	8.658.025,00	36.951.048,00
Utang PPh 22	5.422.383,00	1.914.786,00	3.507.597,00
Utang PPh 23	255.120,00	13.399.848,00	(13.144.728,00)

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
Utang PPN Pusat	29.859.547,67	123.412.113,00	(93.552.565,33)
Jumlah	**81.146.123,67**	**147.384.772,00**	**(66.238.648,33)**

Sumber: SIPD 2024

5.3.2.2 Utang Bunga

Utang Bunga (Accrued Interest) adalah biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar yang harus diakui dan dicatat pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan. Utang Bunga sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 sebesar Rp218.339.489,00 merupakan biaya pengelolaan pinjaman PEN Tahun Anggaran 2024. Jika dibandingan dengan Tahun 2023 sebesar Rp308.686.840,00 terjadi penurunan sebesar Rp90.347.351,00.

5.3.2.3 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan bagian utang jangka panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Neraca. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Tahun 2024 sebesar Rp48.836.405.892,00 dengan rincian pembayaran per bulan sebesar Rp4.069.700.491,00 merupakan Pokok Pinjaman Dana PEN yang tertuang dalam surat perjanjian Nomor PERJ-226/SMI/1221 tanggal 30 desember 2021. Pada Tahun 2023 sebesar Rp48.836.405.892,00 sehingga tidak terdapat penambahan pada bagian lancar utang jangka panjang.

5.3.2.4 Utang Belanja

Utang belanja adalah kewajiban yang timbul akibat hak atas barang/jasa yang telah diterima atau dinikmati atas perjanjian komitmen yang telah dilakukan, namun sampai akhir periode pelaporan belum dilakukan pembayaran/pelunasan atas hak perjanjian komitmen tersebut. Utang Belanja pada saldo akhir Neraca per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.361.889.071,20 merupakan utang belanja yang belum yang sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2024 belum terealisasi karena tagihan atas utang tersebut belum ada. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.83
Utang Belanja

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	336.100.000,00	600,00	336.099.400,00
Utang Belanja Jasa	121.345,00	134.563.325,00	(134.441.980,00)
Utang Belanja Modal Bangunan Gedung	940.875.626,20	60.507.003,20	880.368.623,00
Utang Belanja Modal Jalan, dan Jembatan	0,00	190.841.769,86	(190.841.769,86)
Utang Belanja Modal Bangunan Air	72.699.100,00	0,00	72.699.100,00
Utang Belanja Modal Instalasi	4.093.000,00	4.093.000,00	0,00
Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
Jumlah	**1.361.889.071,20**	**398.005.698,06**	**963.883.373,14**

Sumber: SIPD 2024

Secara rinci dapat dilihat pada lampiran XXII.

5.3.2.5 Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)

Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) Tahun 2024 sebesar Rp69.184.939.605,00. Merupakan sisa utang/kewajiban Pokok Pinjaman Daerah Kabupaten Morowali Utara per 31 Desember 2024 kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang akan dilunasi sampai dengan Tahun 2027 berdasarkan surat perjanjian Nomor PERJ-226/SMI/1221 tanggal 30 desember 2021. Dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp118.021.345.497,00 terjadi penurunan sebesar Rp48.836.405.892,00.

5.3.3 EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, yang merupakan selisih antara Aset Dan Kewajiban Pemerintah Kabupaten Morowali Utara.

Ekuitas Pemerintah Kabupaten Morowali Utara per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp2.386.751.454.574,42 mengalami kenaikan sebesar Rp116.299.064.382,10 jika dibandingkan nilai Ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.270.452.390.192,32.

5.4 LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan informasi ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2024 dan 2023 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.4.1. Pendapatan Daerah – LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan - LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Daerah - LO yang diakui oleh Kabupaten Morowali Utara selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.84
Pendapatan LO

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Pendapatan Asli Daerah – LO	**165.415.687.452,99**	**177.848.630.084,62**	**(12.432.942.631,63)**
Pendapatan Transfer – LO	1.186.849.334.612,00	1.153.277.453.614,00	33.571.880.998,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO	8.313.490.762,00	798.122.902,00	7.515.367.860,00
Jumlah	**1.360.578.512.826,99**	**1.331.924.206.600,62**	**28.654.306.226,37**

Sumber: SIPD 2024

5.4.2.2 Pendapatan Asli Daerah – Lo

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Asli Daerah - LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Asli Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.85
Pendapatan Asli Daerah-LO

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Pajak Daerah – LO	74.038.595.779,00	80.559.929.792,20	(6.521.334.013,20)
Retribusi Daerah – LO	22.004.929.269,00	33.910.237.686,00	(11.905.308.417,00)
Hasil Pengelolaan KekayaanDaerah yang Dipisahkan - LO	5.229.148.166,00	3.864.163.872,00	1.364.984.294,00
Lain-lain PAD Yang Sah – LO	64.143.014.238,99	59.514.298.734,42	4.628.715.504,57
Jumlah	**165.415.687.452,99**	**177.848.630.084,62**	**(12.432.942.631,63)**

Sumber: SIPD 2024

5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah – LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Pajak Daerah - LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Pajak Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai beriku:

Tabel 5.86
Pendapatan Pajak Daerah-LO

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Pajak Hotel-LO	196.054.950,00	182.041.100,00	14.013.850,00
Pajak Restoran–LO	2.346.743.741,00	2.122.765.078,00	223.978.663,00
Pajak Hiburan-LO	11.800.000,00	8.920.000,00	2.880.000,00
Pajak Reklame-LO	358.501.945,00	136.134.191,00	222.367.754,00
Pajak Penerangan Jalan-LO	46.449.547.290,00	60.251.833.635,20	(13.802.286.345,20)
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	7.844.843.492,00	4.663.530.536,00	3.181.312.956,00
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	12.004.380.432,00	8.682.339.419,00	3.322.041.013,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	4.826.723.929,00	4.512.365.833,00	314.358.096,00
Jumlah	**74.038.595.779,00**	**80.559.929.792,20**	**(6.521.334.013,20)**

Sumber:: SIPD 2024

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Pajak Daerah – LO Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut:
   a. Adanya tunggakan piutang pajak pajak daerah yang dibayarkan atau dilunasi.
   b. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang meningkat
2. Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah dalam LO Tahun 2024 ini lebih kecil dari saldo Pendapatan Pajak Daerah dalam LRA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp517.364.039,00 (Rp74.038.595.779,00 - Rp74.555.959.818,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Pajak Daerah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.87
Perbandingan Pendapatan Pajak Daerah LO dan LRA Tahun 2024

Saldo Pendapatan Pajak Daerah – LRA			**Rp**	**74.555.959.818,00**
Penambah :				
1. Realisasi Piutang Pajak Reklame di thn 2024 Rp2.317.000 – tambahan piutang Pajak Reklame Thn 2024 Rp22.943.000	Rp	20.626.000,00		
2. Tambahan Piutang PPJ Thn 2024	Rp	4.680.446.673,00		
3. Realiasi Piutang PBB-P2 Thn 2024 Rp906.808.585 – tambahan Piutang PBB-P2 Thn 2024 Rp.6.099.150.999	Rp	5.192.342.414,00		
Jumlah Penambah	**Rp**	**9.893.415.087,00**		
Pengurang :				
1. Pelunasan Piutang Pajak Restoran Thn 2023	Rp	(1.050.000,00)		
2. Pelunasan Piutang Pajak Gal C Thn 2024 Rp11.709.960.733 dan Tambahan Piutang Gal C Thn 2024 Rp.1.300.231.607	Rp	(10.409.729.126,00)		
Jumlah Pengurang	**Rp**	**(10.410.779.126,00)**		
Total Tambah/(Kurang)			**Rp**	**(517.364.039,00)**
Saldo Pendapatan Pajak Daerah– LO			**Rp**	**74.038.595.779,00**

5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Retribusi Daerah - LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Retribusi Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.88
Retribusi Daerah-LO

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	3.183.592.035,00	5.378.016.030,00	(2.194.423.995,00)
Retribusi Pelayanan Pasar-LO	482.495.000,00	546.625.000,00	(64.130.000,00)
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	22.000.000,00	53.632.000,00	(31.632.000,00)
Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO	72.750.000,00	68.868.000,00	3.882.000,00
Retribusi Rumah Potong Hewan-LO	25.740.000,00	35.020.000,00	(9.280.000,00)
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO	273.899.491,00	163.462.204,00	110.437.287,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah- LO	63.001.000,00	32.330.000,00	30.671.000,00
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LO	0,00	17.771.530.832,00	(17.771.530.832,00)
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	355.590.643,00	0,00	355.590.643,00
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)-LO	17.525.861.100,00	9.860.753.620,00	7.665.107.480,00
Jumlah	**22.004.929.269,00**	**33.910.237.686,00**	(11.905.308.417,00)

Sumber: SIPD 2024

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Retribusi Daerah – LO Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut:
   a. Perubahan Jumlah Wajib Retribusi anataranya retribusi pasar,parkir, layanan kesehatan, IMTA, dan PBG.
   b. Adanya Efektivitas Pengelolaan dan Pengawasan dalam system pemungutan retribusi belum sepenuhnya optimal dilaksankan.
2. Pengakuan Pendapatan Retribusi Daerah dalam LO Tahun 2024 ini lebih kecil dari saldo Pendapatan Retribusi Daerah dalam LRA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp40.800.000,00 (Rp22.004.929.269,00 - Rp22.045.729.269,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Retribusi Daerah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.89
Perbandingan Pendapatan Retribusi Daerah LO dan LRA Tahun 2024

Saldo Pendapatan Retribusi Daerah – LRA			**Rp**	**22.045.729.269,00**
Pengurang :				
1. Piutang retribusi pelayanan kepelabuhan yang telah dilunasi	Rp	**40.800.000,00**		
Jumlah Pengurang	**Rp**	**40.800.000,00**		
Total Tambah/(Kurang)			**Rp**	**(40.800.000,00)**
Saldo Pendapatan Retribusi Daerah– LO			**Rp**	**22.004.929.269,00**

5.4.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO Tahun 2024 sebesar Rp5.229.148.166,00 dan Tahun 2023 sebesar Rp3.864.163.872,00 terjadi kenaikan sebesar Rp1.364.984.294,00. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Daerah - LO Tahun 2024 dari Tahun 2023 antara lain diesebkan karena Kinerja Keuangan Perusahaan meningkat sehingga deviden yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah meningkat.
2. Pengakuan Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam LO Tahun 2024 ini sama dengan saldo Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam LRA Tahun Anggaran 2024 (Rp5.229.148.166,00 - Rp5.229.148.166,00).

5.4.1.1.4 Lain-lain PAD Yang Sah – LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.90
Lain-lain PAD Yang Sah-LO

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Hasil Sewa BMD-LO	25.750.000,00	0,00	25.750.000,00
Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	2.228.979.159,00	4.143.818.016,00	(1.914.838.857,00)
Jasa Giro pada Kas di Bendahara-LO	3.564.862,00	1.068,00	3.565.930,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	1.608.177.761,59	1.760.001.994,00	(151.824.232,41)
Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-LO	319.570,00	0,00	319.570,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO	0,00	27.961.434,00	(27.961.434,00)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas-LO	5.167.449.706,52	6.747.188.979,42	(1.579.739.272,90)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS-LO	159.838.321,00	0,00	159.838.321,00
Pendapatan dari BLUD-LO	0,00	38.673.695.152,00	(38.673.695.152,00)
Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan-LO	54.923.899.858,88	0,00	54.923.899.858,88
Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah-LO	25.035.000,00	0,00	25.035.000,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO	0,00	8.161.632.091,00	(8.161.632.091,00)
Jumlah	**64.143.014.238,99**	**59.514.298.734,42**	**4.628.715.504,57**

Sumber: SIPD 2024

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut:
   a. Pendapatan dari denda,sanksi administrasi dari temuan-temuan pemeriksaan oleh APIP maupun BPK telah ditindak lanjuti sehingga mempengaruhi pendapatan daerah meningkat.
   b. Pendapatan dari layanan BLUD pada Rumah Sakit Umum meningkat.
2. Pengakuan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam LO Tahun 2024 ini lebih kecil dari saldo Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam LRA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.860.463.600,00 (Rp64.143.014.238,99 - Rp67.003.477.838,99). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.91
Perbandingan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah LO dan LRA Tahun 2024

Saldo Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LRA				**Rp**	**67.003.477.838,99**
Pengurang :					
1.hasil lelang kendaraan roda 4		Rp	2.860.463.600,00		
	Jumlah Pengurang	**Rp**	**2.860.463.600,00**		
Total Tambah/(Kurang)				**Rp**	**(2.860.463.600,00)**
Saldo Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO				**Rp**	**64.143.014.238,99**

5.4.1.2 Pendapatan Transfer – Lo

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Transfer - LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.92
Pendapatan Transfer-LO

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat –LO	1.131.717.230.248,00	1.109.428.785.683,00	(2.241.146.015.931,00)
Pendapatan Transfer Antar Daerah Lainnya – LO	55.132.104.364,00	43.848.667.931,00	(98.980.772.295,00)
Jumlah	**1.186.849.334.612,00**	**1.153.277.453.614,00**	(2.340.126.788.226,00)

Sumber: SIPD 2024

5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.93
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
• **Dana Perimbangan**			
-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)- LO	383.098.489.555,00	436.269.393.976,00	(53.170.904.421,00)
-Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	595.195.257.065,00	555.056.781.671,00	40.138.475.394,00
-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	62.110.361.172,00	42.255.915.242,00	19.854.445.930,00
-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	78.784.991.456,00	75.846.694.794,00	2.938.296.662,00
• **Insentif Fiskal-LO**			
-Insentif Fiskal-LO	12.528.131.000,00	0,00	12.528.131.000,00

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Jumlah	**1.131.717.230.248,00**	**1.109.428.785.683,00**	**22.288.444.565,00**

Sumber: SIPD 2024

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut:
   a. Adanya perubahan kebijakan Pemerintah Pusat terkait dengan penyesuaian alokasi Dana Umum (DAU), alokasi Dana Khusus (DAK) dan Dana transfer lainnya akbiat perubahan prioritas nasional
   b. Kinerja Daerah dalam memenuhi pendapatan transfer yang memerlukan pemenuhan indikator tertentu.
   c. Adanya pencairan dana TDF yang mempengaruhi kenaikan saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.
2. Pengakuan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam LO Tahun 2024 ini lebih kecil dari saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam LRA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp255.172.143.000,00 (Rp1.131.717.230.248,00 - Rp1.386.889.373.248,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.94
Perbandingan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Daerah LO dan LRA Tahun 2024

Saldo Pendapatan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat LRA			**Rp**	**1.386.889.373.248,00**
Penambah:				
1. Penambahan Dana TDF Tahun 2024	Rp	50.615.809.000,00		
Jumlah Penambah	**Rp**	**50.615.809.000,00**		
Pengurang:				
1. Pencairan Dana TDF Tahun 2023	**Rp**	Rp196.206.290.000,00		
2. Dana desa	**Rp**	109.581.662.000,00		
Jumlah Pengurang	**Rp**	**305.787.952.000,00**		
Total Tambah/(Kurang)			**Rp**	**(255.172.143.000,00)**
Saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat LO			**Rp**	**1.131.717.230.248,00**

5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah– LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pos Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO yang diakui oleh Kabupaten Morowali Utara selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.95
Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Pendapatan Bagi Hasil-LO	55.132.104.364,00	41.571.227.931,00	13.560.876.433,00
Bantuan Keuangan	0,00	2.277.440.000,00	(2.277.440.000,00)
Jumlah	**55.132.104.364,00**	**43.848.667.931,00**	11.283.436.433,00

Sumber: SIPD 2024

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut:
   b. Adanya peningkatan alokasi dana bagi hasil pajak dari pemerintah provinsi
   c. Adanya pelunasan bagi hasil pajak tahun sebelumnnya.
2. Pengakuan Pendapatan Transfer Antar Daerah dalam LO Tahun 2024 ini lebih besar dari saldo Pendapatan Transfer Antar Daerah dalam LRA Tahun Anggran 2024 sebesar Rp5.288.770.698,00 (Rp55.132.104.364,00 - Rp49.843.333.666,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Pendapatan Transfer Antar Daerah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.96
Perbandingan Pendapatan Transfer Antar Daerah LO dan LRA Tahun 2024

Saldo Pendapatan Transfer Antar Daerah - LRA			**Rp**	**49.843.333.666,00**
Penambahan:				
1. Pelunasan dan pengakuan piutang DBH Propinsi Pajak Kendaraan Bermotor	**Rp**	562.914.596,00		
2. Pelunasan dan pengakuan piutang DBH Propinsi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	**Rp**	729.090.770,00		
3. Pelunasan dan pengakuan piutang DBH Propinsi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	**Rp**	3.765.499.861,00		
4. Pelunasan dan pengakuan piutang DBH Propinsi Pajak Air Permukaan	**Rp**	231.265.471,00		
Jumlah Penambah	**Rp**	5.288.770.698,00		
Total Tambah/(Kurang)			**Rp**	**5.288.770.698,00**
Saldo Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO			**Rp**	**55.132.104.364,00**

5.4.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-Lo

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Lain-Lain Pendapatan yang Sah - LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Lain-Lain Pendapatan yang Sah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.97
Lan-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Pendapatan Hibah – LO	36.395.000,00	798.122.902,00	(761.727.902,00)
Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan – LO	8.277.095.762,00	0,00	8.277.095.762,00
Jumlah	**8.313.490.762,00**	**798.122.902,00**	7.515.367.860,00

Sumber: SIPD 2024

5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah – LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Hibah - LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Hibah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.98
Pendapatan Hibah-LO

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	36.395.000,00	798.122.902,00	(761.727.902,00)

Sumber: SIPD 2024

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Pendapatan Hibah – LO Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan antara lain adanya kondisi darurat atau bencana sehingga dalam situasi tertentu pemerintah pusat dapat memberikan tambahan hibah yang dapat menyesuiakan alokasi anggarannya ke daerah terdampak seperti di tahun 2024 Pemerintah daerah mendapatkan hibah tenda dari kementrian melalui kantor Satuan Poilisi Pamong Praja.
2. Pengakuan Pendapatan Hibah dalam LO Tahun 2024 lebih besar dari saldo Pendapatan Hibah dalam LRA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp36.395.000,00 (Rp36.395.000,00 – Rp0,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan Pendapatan Hibah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.99
Perbandingan Pendapatan Hibah LO dan LRA Tahun 2024

Saldo Pendapatan Hibah Daerah - LRA			**Rp**	**0,00**
Penambahan:				
1. Hibah dari kementrian dalam negeri berupa tenda	**Rp**	36.395.000,00		
Jumlah Penambah	**Rp**	**36.395.000,00**		
Total Tambah/(Kurang)			**Rp**	**36.395.000,00**
Saldo Pendapatan Hibah Daerah - LO			**Rp**	**36.395.000,00**

5.4.1.3.2 Lain - Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan – Lo

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan - LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu saldo rincian Pendapatan Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.100
Lain - Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan-LO

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP			
• Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	8.277.095.762,00	0,00	8.277.095.762,00

Sumber: SIPD 2024

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan - LO Tahun 2024 merupakan Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada 14 (empat belas) FKTP sebesar Rp8.277.095.762,00 selama satu tahun anggaran.
2. Pengakuan Pendapatan Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan dalam LO Tahun 2024 ini sama dengan saldo Pendapatan Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan dalam LRA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp0,00 (Rp8.277.095.762,00 - Rp8.277.095.762,00).

5.4.2 Beban Operasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Operasional Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian saldo Beban Operasional yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.101
Beban Operasioanal

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Beban Pegawai	497.582.380.767,00	425.231.570.909,00	72.350.809.858,00
Beban Barang dan Jasa	382.061.489.250,82	350.755.548.972,15	31.305.940.278,67
Beban Bunga	8.532.517.820,00	11.065.804.150,00	(2.533.286.330,00)
Beban Hibah	58.682.833.607,99	25.369.825.466,00	33.313.008.141,99
Beban Bantuan Sosial	28.282.087.055,00	31.965.226.788,26	(3.683.139.733,26)
Beban Penyisihan Piutang	6.682.168.494,80	1.110.246.240,42	5.571.922.254,38
Beban Penyusutan dan Amortisasi	149.648.534.546,18	136.930.964.996,64	12.717.569.549,54
Beban Bagi Hasil	0,00	933.454.571,00	(933.454.571,00)
Beban Bantuan Keuangan	116.869.929.862,00	103.583.030.310,00	13.286.899.552,00

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Beban Tidak Terduga	407.476.000,00	0,00	407.476.000,00
Jumlah	**1.248.749.417.403,79**	**1.086.945.672.403,47**	**161.803.745.000,32**

Sumber: SIPD 2024

Penjelasan:
Komposisi realisasi Beban Operasional Tahun 2024 pada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara digambarkan dalam bentuk diagram di bawah ini.

5.4.2.1 Beban Pegawai – LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Pegawai Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Pegawai yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.102
Beban Pegawai-LO

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Beban Gaji Pokok ASN	220.890.693.943,00	187.213.344.078,00	33.677.349.865,00
Beban Tunjangan Keluarga ASN	19.927.674.155,00	17.166.207.732,00	2.761.466.423,00
Beban Tunjangan Jabatan ASN	4.717.333.096,00	4.752.923.800,00	(35.590.704,00)
Beban Tunjangan Fungsional ASN	16.794.336.004,00	14.101.040.100,00	2.693.295.904,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.085.374.000,00	2.386.075.000,00	(300.701.000,00)
Beban Tunjangan Beras ASN	11.903.458.140,00	10.843.012.080,00	1.060.446.060,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	904.534.863,00	598.206.252,00	306.328.611,00
Beban Pembulatan Gaji ASN	3.156.582,00	2.869.980,00	286.602,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	11.349.308.031,00	7.755.259.790,00	3.594.048.241,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	433.123.351,00	534.943.988,00	(101.820.637,00)
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	1.195.955.508,00	1.350.459.315,00	(154.503.807,00)
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	109.791.307.469,00	91.945.002.457,00	17.846.305.012,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	0,00	3.512.474.011,00	(3.512.474.011,00)
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	2.514.919.500,00	1.582.942.895,00	931.976.605,00
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	597.874.250,00	1.439.911.379,00	(842.037.129,00)
Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	37.259.773.150,00	33.517.602.844,00	3.742.170.306,00
Beban Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	4.810.891.500,00	4.427.400.300,00	383.491.200,00
Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.592.250.000,00	1.689.230.000,00	(96.980.000,00)
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	6.007.589.265,00	9.641.311.034,00	(3.633.721.769,00)
Beban Honorarium	3.354.320.000,00	2.751.280.000,00	603.040.000,00
Beban Jasa Pengelolaan BMD	4.800.000,00	6.000.000,00	(1.200.000,00)

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK	140.958.400,00	0,00	140.958.400,00
Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK	83.750.000,00	0,00	83.750.000,00
Beban Uang Representasi DPRD	558.495.000,00	557.340.000,00	1.155.000,00
Beban Tunjangan Keluarga DPRD	38.885.700,00	36.514.800,00	2.370.900,00
Beban Tunjangan Beras DPRD	49.535.280,00	47.724.780,00	1.810.500,00
Beban Uang Paket DPRD	39.952.500,00	47.712.000,00	(7.759.500,00)
Beban Tunjangan Jabatan DPRD	816.551.291,00	808.143.000,00	8.408.291,00
Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	24.953.359,00	29.795.325,00	(4.841.966,00)
Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	33.373.200,00	45.340.050,00	(11.966.850,00)
Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.170.000.000,00	3.139.500.000,00	30.500.000,00
Beban Tunjangan Reses DPRD	514.500.000,00	777.000.000,00	(262.500.000,00)
Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	322.829,00	373.528,00	(50.699,00)
Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.169.197.562,00	2.160.010.536,00	9.187.026,00
Beban Tunjangan Transportasi DPRD	3.313.500.000,00	3.186.000.000,00	127.500.000,00
Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD	222.075.000,00	0,00	222.075.000,00
Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00	54.600.000,00	0,00
Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.140.000,00	6.630.000,00	510.000,00
Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	98.280.000,00	0,00
Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.590.220,00	6.590.220,00	0,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	407.557,00	1.487.219,00	(1.079.662,00)
Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.980,00	1.980,00	0,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	5.486.400,00	5.486.400,00	0,00
Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	168.000.000,00	264.600.000,00	(96.600.000,00)
Beban Dana Operasional KDH/WKDH	578.000.000,00	816.000.000,00	(238.000.000,00)
Beban Pegawai BLUD	29.349.151.682,00	15.924.944.036,00	13.424.207.646,00
Jumlah	**497.582.380.767,00**	**425.231.570.909,00**	**72.350.809.858,00**

Sumber: SIPD 2024

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Pegawai Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut:
   a. Adanya perubahan kenaikan gaji maupun tunjangan
   b. Adanya penambahan maupun pengurangan pegawai seperti mutasi maupun pensiun.
   c. Adanya kebijalkan dalam pemberian THR maupun pemberian insentif lainnya bagi ASN
2. Pengakuan Beban Pegawai dalam LO Tahun 2024 ini lebih besar dari saldo Belanja Pegawai dalam LRA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp336.100.000,00 (Rp497.582.380.767,00 - Rp497.246.280.767,00).

Tabel 5.103
Perbandingan Beban Pegawai LO dan LRA Tahun 2024

Saldo Belanja Pegawai Daerah - LRA			**Rp**	**497.246.280.767,00**
Penambahan:				
1. Utang Belanja Pegawai atas tunjangan fungsional P3K TA 2024 yang belum dibayarkan	**Rp**	336.100.000,00		
Jumlah Penambah	**Rp**	**336.100.000,00**		
Total Tambah/(Kurang)			**Rp**	**336.100.000,00**
Saldo Beban Pegawai Daerah - LO			**Rp**	**497.582.380.767,00**

5.4.2.2 Beban Barang dan Jasa

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Barang dan Jasa yang diakui oleh Pemerintah kabupaten Morowali Utara selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut

Tabel 5.104
Beban Barang dan Jasa

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Beban Barang Pakai Habis	99.888.904.244,22	93.333.077.783,15	6.555.826.461,07
Beban Barang Tak Habis Pakai	105.482.800,00	0,00	105.482.800,00
Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	943.797.478,00	219.928.082,00	723.869.396,00
Beban Jasa Kantor	104.634.115.553,00	101.895.476.427,00	2.738.639.126,00
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	22.973.384.384,00	20.070.297.000,00	2.903.087.384,00
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	4.172.577.905,00	2.379.696.500,00	1.792.881.405,00
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	1.549.065.000,00	1.162.143.000,00	386.922.000,00
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	2.923.419.599,00	5.748.242.000,00	(2.824.822.401,00)
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2.180.568.000,00	947.337.400,00	1.233.230.600,00
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	900.000.000,00	640.000.000,00	260.000.000,00
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.449.753.200,00	4.759.167.220,00	(309.414.020,00)
Beban Pemeliharaan Tanah	0,00	405.212.000,00	(405.212.000,00)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.816.489.984,00	4.988.540.281,00	(172.050.297,00)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.887.464.811,00	5.342.450.171,00	(2.454.985.360,00)
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.215.623.000,00	4.750.437.900,00	(1.534.814.900,00)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	87.341.007.680,00	72.217.472.279,00	15.123.535.401,00
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	334.235.608,00	(334.235.608,00)
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	425.550.000,00	1.619.484.980,00	(1.193.934.980,00)
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak	194.748.000,00	0,00	194.748.000,00

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat			
Beban Barang dan Jasa BOS	16.906.108.419,00	17.291.634.955,00	(385.526.536,00)
Beban Barang dan Jasa BLUD	21.553.429.193,60	12.650.715.386,00	8.902.713.807,60
Jumlah	382.061.489.250,82	350.755.548.972,15	31.305.940.278,67

Sumber: SIPD 2024

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut:
   a. Adanya perubahan harga barang dan jasa akibat inflasi yang dapat menyebabkan harga barang dan jasa naik mupun turun
   b. Adanya perubahan kebijakan pemerintah daerah dalam efisiensi anggaran, realokasi dana sehingga berdampak pada nilai beban.
2. Pengakuan Beban Barang dan Jasa dalam LO Tahun 2024 ini lebih kecil dari saldo Belanja Barang dan Jasa dalam LRA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp36.896.303.744,67 (Rp382.061.489.250,82 - Rp418.957.792.995,49.). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Beban Barang dan Jasa dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.105
Perbandingan Beban Barang dan Jasa LO dan LRA Tahun 2024

Saldo Perbandingan Beban Barang dan Jasa LRA			**Rp**	**418.957.792.995,49**
Penambah :				
Pelunasan Utang Belanja Barjas (Kas Lainnya)	Rp	39.056.580,00		
Pengurangan Persediaan TA 2024	Rp	1.945.497.513,33		
Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Rp	478.665.273,00		
Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Rp	1.672.657.602,00		
Reklasifikasi dari Aset Tetap JIJ	Rp	1.402.185.000,00		
Jumlah Penambah	**Rp**	**5.538.061.968,33**		
Pengurang :				
Kapitalisasi ke Aset Tetap Tanah	Rp	235.130.700,00		
Kapitalisasi ke Aset Peralatan dan Mesin	Rp	2.509.748.670,00		
Kapitalisasi ke Aset Gedung dan Bangunan	Rp	21.316.099.278,00		
Kapitalisasi ke Aset Tetap JIJ	Rp	11.367.926.990,00		
Kapitalisasi ke KDP	Rp	4.239.163.870,00		
Pelunasan Utang Jangka Pendek Lainnya	Rp	25.950.000,00		
Kesalahan catat Utang Jangka Pendek Lainnya yang seharusnya Utang Belanja	Rp	114.600,00		
Pengurangan Utang Belanja Barjas	Rp	134.441.980,00		
Penambahan Belanja Dibayar Dimuka - Sewa Kendaraan	Rp	2.605.789.625,00		
Jumlah Pengurang	**Rp**	**42.434.365.713,00**		

Total Tambah/(Kurang)	**Rp**	**(36.896.303.744,67)**
Saldo Perbandingan Beban Barang dan Jasa LO	**Rp**	**382.061.489.250,82**

5.4.2.3 Beban Bunga

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Bunga Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Bunga yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.106
Beban Bunga

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat	8.314.178.331,00	1.659.124.491,00	6.655.053.840,00
Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	218.339.489,00	9.406.679.659,00	(9.625.019.148,00)
Jumlah	**8.532.517.820,00**	**11.065.804.150,00**	(2.533.286.330,00)

Sumber: SIPD 2024

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Bunga Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan antara lain Adanya perubahan perhitungan jumlah suku bunga menurun setiap tahunya
2. Pengakuan Beban Bunga dalam LO Tahun 2024 ini lebih kecil dari saldo Belanja Bunga dalam LRA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp90.347.351,00 (Rp8.532.517.820,00 - Rp8.622.865.171,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Bunga dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.107
Perbandingan Beban Bunga LO dan LRA Tahun 2024

Saldo Perbandingan Beban Bunga LRA			**Rp**	**8.622.865.171,00**
Penambah				
Utang bunga biaya pengelolaan utang jangka panjang pada PT. SMI 2024	Rp	218.339.489,00		
Jumlah Penambah	**Rp**	**218.339.489,00**		
Pengurang :				
Pembayaran utang bunga biaya pengolaan utang jangka Panjang pada PT. SMI TA 2023	Rp	308.686.840,00		
Jumlah Pengurang	**Rp**	**(308.686.840,00)**		
Total Tambah/(Kurang)			**Rp**	**(90.347.351,00)**
Saldo Perbandingan Beban Bunga LO			**Rp**	**8.532.517.820,00**

5.4.2.4 Beban Hibah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Hibah Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Hibah yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.108
Beban Hibah

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	43.200.000.000,00	9.500.000.000,00	33.700.000.000,00
Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	0,00	166.957.000,00	(166.957.000,00)
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	570.631.945,00	5.596.169.600,00	(5.025.537.655,00)
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	6.636.595.000,00	3.589.918.950,00	3.046.676.050,00
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	6.701.400.000,00	5.764.999.916,00	936.400.084,00
Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	450.000.000,00	100.000.000,00	350.000.000,00
Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	432.180.000,00	0,00	432.180.000,00
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	692.026.662,99	651.780.000,00	40.246. 662,99
Jumlah	**58.682.833.607,99**	**25.369.825.466,00**	**33.313.008.141,99**

Sumber: SIPD 2024

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Hibah Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut:
   a. Adanya peningkatan kebutuhan bantuan kepada Masyarakat/Lembaga, pelaksanaan program prioritas pemerintah daerah disesuaikan dengan alokasi anggaran berdasarkan usulan dan kebutuhan yang masuk.
   b. Adanya kebutuhan untuk mendanai kegiatan Pemilihan Umum pada tahun anggaran 2024.
2. Pengakuan Beban Hibah dalam LO Tahun 2024 ini sama dengan saldo Belanja Hibah dalam LRA Tahun Anggaran 2024 (Rp58.682.833.607,99 - Rp58.682.833.607,99).

5.4.2.5 Beban Bantuan Sosial

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Bantuan Sosial Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Bantuan Sosial yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.109
Beban Bantuan Sosial

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	9.997.284.050,00	11.875.008.400,00	(1.877.724.350,00)
Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada	2.398.525.925,00	0,00	2.398.525.925,00

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Kelompok Masyarakat			
Beban Bantuan Sosial Barang kepada Kelompok Masyarakat	15.886.277.080,00	20.090.218.388,26	(4.203.941.308,26)
Jumlah	**28.282.087.055,00**	**31.965.226.788,26**	(3.683.139.736,26)

Sumber: SIPD 2024

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Bantuan Sosial Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan antara lain karena keterbatasan anggaran pada pemerintah daerah yang pada tahun berkenaan pemerintah lebih memprioritaskan pengeluaran belanja disektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.
2. Pengakuan Beban Bantuan Sosial dalam LO Tahun 2024 ini lebih kecil dari saldo Belanja Bantuan Sosial dalam LRA Tahun Anggaran 2024 Rp199.850.000,00 (Rp28.282.087.055,00 - Rp28.481.937.055,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan Beban Bantuan Sosial dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.110
Perbandingan Beban Bantuan Sosial LO dan LRA Tahun 2024

Saldo Perbandingan Beban Bantuan Sosial LRA			**Rp**	**28.481.937.055,00**
Pengurang:				
1. Reklasifikasi dari Belanja Bansos ke Bangunan Gedung (Kesra)	Rp	199.850.000,00		
Jumlah Pengurang	**Rp**	199.850.000,00		
Total Tambah/(Kurang)			**Rp**	(199.850.000,00)
Saldo Perbandingan Beban Bantuan Sosial LO			**Rp**	**28.282.087.055,00**

Reklasifikasi dari Belanja Bansos Ke Bangunan Gedung sebesar Rp199.850.000,00 merupakan kesalahan penganggaran yang seharusnya masuk ke rekening belanja modal berupa pekerjaan pemasangan tehel pada pelataran Musholla kantor Bupati Morowali Utara.

5.4.2.6 Beban Penyisihan Piutang

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyisihan Piutang Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Penyisihan Piutang yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.111
Beban Penyisihan Piutang

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Beban Penyisihan Pajak Restoran	0,00	5.250,00	(5.250,00)
Beban Penyisihan Pajak Reklame	3.363.910,00	(51.311.077,90)	54.674.987,90
Beban Penyisihan Pajak Penerangan Jalan	4.586.497.620,76	216.760.681,76	4.369.736.939,00
Beban Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.567.621.658,25	40.023.180,45	1.527.598.477,80
Beban Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	491.209.116,79	896.401.277,21	(405.192.160,42)

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Beban Penyisihan Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	3.501.106,25	184.268,75	3.316.837,50
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum	0,00	275.625,00	(275.625,00)
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha	0,00	204.000,00	(204.000,00)
Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah	3.336.875,00	0,00	3.336.875,00
Beban Penyisihan Piutang Bagi Hasil	26.443.853,49	7.185.934,15	19.257.919,34
Beban Penyisihan Piutang Bantuan Keuangan	194.354,26	517.101,00	(322.746,74)
Jumlah	**6.682.168.494,80**	**1.110.246.240,42**	5.571.922.254,38

Sumber: SIPD 2024

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Penyisihan Piutang Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan antara lain adanya perubahan kualitas nilai piutang yang belum tertagih atau menunggak sehingga hal ini sangat nmempengaruhi nilai beban penyisihan piutang.
2. Pengakuan Beban Penyisihan Piutang dalam LO Tahun 2024 ini lebih besar dari selisih/perubahan saldo Penyisihan Piutang dari Tahun 2023 ke Tahun 2024 dalam Neraca per 31 Desember 2024 sebesar Rp6.681.959.244,80 (Rp8.334.733.537,73 - Rp15.016.692.782,53). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Kenaikan Penyisihan Piutang dalam Neraca, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.112
Perbandingan Beban Penyisihan Piutang LO dan Neraca Tahun 2024

Saldo Perbandingan Selisih Penyisihan Piutang Neraca			**Rp**	**6.681.959.244,80**
Penambahan:				
1. Piutang retribusi pelayanan kepelabuhan yang telah dilunasi	Rp	204.000,00		
2. Piutang pajak resto yang telah dilunasi	Rp	5.250,00		
Jumlah Penamnahan	**Rp**	**209.250,00**		
Total Tambah/(Kurang)			**Rp**	**209.250,00**
Saldo Perbandingan Beban Penyisihan Piutang LO			**Rp**	**6.682.168.494,80**

5.4.2.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.113
Beban Penyusutan dan Amortisasi

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Beban Penyusutan Alat Besar	489.686.765,91	1.463.269.308,00	(973.582.542,09)
Beban Penyusutan Alat Angkutan	6.706.529.623,75	14.968.412.627,00	(8.261.883.003,25)

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	647.231.801,00	538.910.427,00	108.321.374,00
Beban Penyusutan Alat Pertanian	436.312.836,00	1.417.366.207,00	(981.053.371,00)
Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	8.378.172.628,00	(53.887.416.048,00)	62.265.588.676,00
Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.494.403.853,00	1.490.192.325,00	4.211.528,00
Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	12.515.942.757,00	48.250.903.371,00	(35.734.960.614,00)
Beban Penyusutan Alat Laboratorium	5.335.058.667,00	18.925.671.180,00	(13.590.612.513,00)
Beban Penyusutan	42.239.665,00	63.154.777,00	(20.915.112,00)
Beban Penyusutan Komputer	9.741.002.706,53	11.285.660.564,00	(1.544.657.857,47)
Beban Penyusutan Alat Eksplorasi	4.800.000,00	400.000,00	4.400.000,00
Beban Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	1.850.000,00	1.162.500,00	687.500,00
Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	295.027.727,00	472.737.781,00	(177.710.054,00)
Beban Penyusutan Alat Peraga	0,00	95.000,00	(95.000,00)
Beban Penyusutan Peralatan Proses/Produksi	162.500,00	131.249,00	31.251,00
Beban Penyusutan Rambu-Rambu	174.551.059,00	126.554.945,00	47.996.114,00
Beban Penyusutan Peralatan Olahraga	156.746.344,00	96.861.176,00	59.885.168,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung	16.562.654.250,00	15.331.341.450,30	1.231.312.799,70
Beban Penyusutan Monumen	44.754.870,00	43.396.997,00	1.357.873,00
Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	134.850.810,00	138.927.336,00	(4.076.526,00)
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	65.345.575.161,00	58.072.372.372,00	7.273.202.789,00
Beban Penyusutan Bangunan Air	17.587.029.198,00	12.773.398.475,00	4.813.630.723,00
Beban Penyusutan Instalasi	756.127.681,00	3.026.488.867,00	(2.270.361.186,00)
Beban Penyusutan Jaringan	2.606.141.748,00	2.142.578.459,00	463.563.289,00
Beban Penyusutan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	4.122.500,00	3.407.918,00	714.582,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	187.559.394,99	184.985.733,34	2.573.661,65
Jumlah	**149.648.534.546,18**	**136.930.964.996,64**	**12.717.569.549,54**

Sumber: SIPD 2024

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut:
   a. Adanya penghapusan dan pelepasan Aset berupa kendaraan roda empat akibat Lelang dan Gedung VIP RSUD.
   b. Adanya Nilai Perolehan dan penambahan Nilai Aset tetap.

2. Perbedaan pengakuan Beban Penyusutan dan Amortisasi dalam LO Tahun 2024 dengan selisih/perubahan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya serta perubahan saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud dari Tahun 2023 ke Tahun 2024 dalam Neraca per 31 Desember 2024 diungkapkan dalam CaLK terkait Penjelasan atas Pos-Pos Neraca pada ***Poin 5.2.***

   Rincian nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi pada masing-masing SKPD telah diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Penjelasan atas Pos-Pos Neraca pada ***Poin 5.27,*** dan juga dapat dilihat pada Lampiran XXIII.

5.4.3 Beban Transfer

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Transfer Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Transfer yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.114
Beban Transfer

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Beban Bagi Hasil	0,00	933.454.571,00	(933.454.571,00)
Beban Bantuan Keuangan	116.869.929.862,00	103.583.030.310,00	13.286.899.552,00
Jumlah	**116.869.929.862,00**	**104.519.725.106,00**	**12.350.204.756,00**

Sumber: SIPD 2024

5.4.3.1 Beban Bagi Hasil

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023. Realisasi Tahun Anggaran 2024 tidak terealisasi karena anggaran yang tersedia tidak mencukupi untuk membayar tagihan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi.

5.4.3.2 Beban Bantuan Keuangan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.115
Beban Bantuan Keuangan

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Beban Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	0,00	8.000.000,00	(8.000.000,00)
Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	116.869.929.862,00	103.575.030.310,00	13.294.899.552,00
Jumlah	**116.869.929.862,00**	**103.583.030.310,00**	**13.286.899.552,00**

Sumber: SIPD 2024

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Transfer Bagi Hasil Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut:
   a. Adanya peningkatan alokasi dana desa sebagai bagian dari Upaya pemerataan Pembangunan dan peningkatan kesejahteraan desa.
   b. Adanya kenaikan kebutuhan Pembangunan desa sehingga memerlukan tambahan dana.
2. Pengakuan Beban Transfer Bantuan Keuangan dalam LO Tahun 2024 ini lebih kecil dengan saldo Transfer Bantuan Keuangan dalam LRA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp109.581.662.00,00 (Rp116.869.929.862,00 - Rp226.451.591.862,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Transfer Bantuan Keuangan dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.116
Perbandingan Beban Transfer LO dan LRA Tahun 2024

Saldo Perbandingan Belanja Bantuan Keuangan LRA			**Rp**	**226.451.591.862,00**
Pengurang:				
1. Dana desa	Rp	**109.581.662.000,00**		
Jumlah Pengurang	**Rp**	**(109.581.662.000,00)**		
Total Tambah/(Kurang)			**Rp**	**(109.581.662.000,00)**
Saldo Perbandingan Beban Bantuan Keuangan LO			**Rp**	**116.869.929.862,00**

5.4.4 Beban Tidak Terduga

Beban tidak terduga, atau sering disebut sebagai biaya tak terduga, adalah pengeluaran yang muncul secara mendadak dan tidak direncanakan sebelumnya dalam anggaran. Pengeluaran ini biasanya terjadi akibat kejadian yang tidak dapat diprediksi, seperti kerusakan peralatan, bencana alam, atau kebutuhan mendesak lainnya. Beban tidak terduga Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp407.476.000,00 jika dibandingkan dengan beban tidak terduga Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp140.000.000,00, mengalami kenaikan sebesar Rp267.476.000,00, hal ini disebabkan karena pada Tahun 2024 ada bebarapa kegiatan yang sangat mendesar seperti adanay bencana banjir, longsor dan kebakaran.

Pengakuan Beban Luar Biasa dalam LO Tahun 2024 ini lebih kecil dari saldo Belanja Tidak Terduga dalam LRA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp750.410.000,00 (Rp407.476.000,00 – Rp1.157.886.000,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Luar Biasa dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.117
Perbandingan Beban Tidak Terduga LO dan LRA Tahun 2024

Saldo Perbandingan Belanja Tidak Terduga LRA			**Rp**	**1.157.886.000,00**
Pengurang:				
1. Kapitalisasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Rp	750.410.000,00		
Jumlah Pengurang	**Rp**	**750.410.000,00**		
Total Tambah/(Kurang)			**Rp**	**(750.410.000,00)**
Saldo Perbandingan Beban Tidak Terduga LO			**Rp**	**407.476.000,00**

5.4.5 Surplus Non Operasional

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Surplus Non-Operasional Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Surplus Non-Operasional yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara selama melakukan kegiatan non operasional di Tahun 2024 dan 2023. Surplus BMD merupakan hasil Lelang kendaraan dinas dan surplus lainnya merupakan pelunasan piutang, yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.118
Surplus Non Operasional

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO			
• Surplus Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO	2.860.463.600,00	1.153.895.200,00	1.706.568.400,00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO			
• Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	209.250,00	639.580,00	(430.330,00)
Jumlah	**2.860.672.850,00**	**1.154.534.780,00**	1.706.138.070,00

Sumber: SIPD 2024

5.4.6 Defisit Non Operasional

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Defisit Non-Operasional Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Defisit Non-Operasional yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara selama melakukan kegiatan non operasional di Tahun 2024 dan 2023. Dapat dijelaskan nilai sebesar RpRp469.007.976,00 merupakan bangunan VIP RSUD dan sebesar RpRp198.928.572,00 merupakan hasil Lelang kendaraan dinas pada Sek. DPRD,serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.119
Defisit Non Operasional

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO			
• Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO	667.936.548,00	0,00	667.936.548,00

Sumber: SIPD 2024

5.4.7 Surplus/Defisit-Lo

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Surplus/(Defisit) - LO Tahun 2024 dan 2023 yang dihitung dari:

Tabel 5.120
Surplus/Defisit- LO

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
Kegiatan Operasional			
➢ **Pendapatan Daerah – LO**			
✓ Pendapatan Asli Daerah – LO	**165.415.687.452,99**	**177.848.630.084,62**	**(12.432.942.631,63)**
✓ Pendapatan Transfer – LO	**1.186.849.334.612,00**	**1.153.277.453.614,00**	33.571.880.998,00

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
✓ Lain-Lain Pendapatan yang Sah – LO	**8.313.490.762,00**	**798.122.902,00**	7.515.367.860,00
➢ **Beban Operasional**			
✓ Beban Operasional	**1.248.749.417.403,79**	**1.086.948.912.628,47**	**161.800.504.775,32**
Kegiatan Non-Operasional			
➢ **Surplus Non-Operasional**			
✓ Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO	2.860.463.600,00	1.153.895.200,00	1.706.568.400,00
✓ Surplus dari Kegiatan Non-Operasional Lainnya - LO	209.250,00	639.580,00	(430.330,00)
➢ **Defisit Non-Operasional**			
✓ Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO	667.936.548,00	0,00	667.936.548,00
Pos Luar Biasa			
✓ Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00	0,00
✓ Beban Luar Biasa	0,00	140.000.000,00	(140.000.000,00)
Jumlah	**114.021.831.725,20**	**245.989.828.752,15**	**(131.967.997.026,95)**

Sumber: SIPD 2024

Jumlah saldo Surplus/(Defisit) - LO di atas juga sama dengan saldo Surplus/(Defisit) - LO yang diungkapkan dalam CaLK terkait Penjelasan atas Pos-Pos LPE pada ***Poin 5.7.2***

5.5 LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan Kas dan Setara Kas selama satu periode akuntansi, dan saldo Kas dan Setara Kas pada tanggal pelaporan. Terdapat empat aktivitas yang mempengaruhi perubahan Kas dan Setara Kas selama satu periode akuntansi yaitu: aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.

Penjelasan atas Pos-Pos LAK Pemerintah Kabupaten Morowali Utara untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan disajikan sebagai berikut:

5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Aktivitas operasi menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasi Pemerintah. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi meliputi arus masuk kas dan arus keluar kas, yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu tahun anggaran. Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 dan 2023, yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.121
Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	**1.610.983.654.167,99**	**1.207.655.277.944,42**	403.328.376.223,57
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	1.239.601.187.458,48	1.083.374.370.101,26	156.226.817.357,22
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	**371.382.466.709,51**	**124.280.907.843,16**	247.101.558.866,35

Sumber: SIPD 2024

Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi yaitu Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Kas dari Aktivitas Operasi sebagai berikut.

5.5.1.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi sebagai berikut:

Tabel 5.122
Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
➢ Penerimaan Pajak Daerah			
✓ Pajak Hotel	196.054.950,00	182.041.100,00	14.013.850,00
✓ Pajak Restoran	2.347.793.741,00	2.121.715.078,00	226.078.663,00
✓ Pajak Hiburan	11.800.000,00	8.920.000,00	2.880.000,00
✓ Pajak Reklame	337.875.945,00	99.493.191,00	238.382.754,00
✓ Pajak Penerangan Jalan	41.769.100.617,00	16.899.697.283,00	24.869.403.334,00
✓ Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	18.254.572.618,00	5.872.137.110,00	12.382.435.508,00
✓ Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	6.812.038.018,00	5.646.019.379,00	1.166.018.639,00
✓ Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	4.826.723.929,00	4.475.512.083,00	351.211.846,00
➢ **Penerimaan Retribusi Daerah**			
✓ **Retribusi Jasa Umum**			
• Retribusi Pelayanan Kesehatan	3.183.592.035,00	6.313.053.030,00	(3.129.460.995,00)
• Retribusi Pelayanan Pasar	482.495.000,00	511.500.000,00	(29.005.000,00)
✓ **Retribusi Jasa Usaha**			
• Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	22.000.000,00	312.512.204,00	(290.512.204,00)
• Retribusi Tempat Khusus Parkir	72.750.000,00	68.868.000,00	3.882.000,00
• Retribusi Rumah Potong Hewan	25.740.000,00	35.020.000,00	(9.280.000,00)
• Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	314.699.491,00	122.662.204,00	192.037.287,00

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
• Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	63.001.000,00	32.330.000,00	30.671.000,00
✓ **Retribusi Perizinan Tertentu**			
• Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	355.590.643,00	0,00	355.590.643,00
• Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	17.525.861.100,00	9.860.753.620,00	7.665.107.480,00
➢ **Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**			
✓ Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	5.229.148.166,00	3.864.163.872,00	1.364.984.294,00
➢ **Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah**			
✓ Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	25.750.000,00	0,00	25.750.000,00
✓ Jasa Giro	2.232.544.021,00	4.143.819.084,00	(1.911.275.063,00)
✓ Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.608.177.761,59	1.760.001.994,00	(151.824.232,41)
✓ Pendapatan Denda Retribusi Daerah	319.570,00		319.570,00
✓ Pendapatan dari Pengembalian	5.327.288.027,52	6.775.150.413,42	(1.447.862.385,90)
✓ Pendapatan BLUD	54.948.934.858,88	38.673.695.152,00	16.275.239.706,88
✓ Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	0,00	8.161.632.091,00	(8.161.632.091,00)
➢ **Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat**			
✓ Dana Perimbangan	1.264.779.580.248,00	921.236.099.328,00	343.543.480.920,00
✓ Dana Desa	109.581.662.000,00	110.554.350.000,00	(972.688.000,00)
✓ Insentif Fiskal	12.528.131.000,00	0,00	12.528.131.000,00
➢ **Penerimaan Transfer Antar Pemerintah Daerah**			
✓ **Pendapatan Bagi Hasil**			
• Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	6.895.774.080,00	6.718.905.427,00	176.868.653,00
• Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	8.019.832.291,00	7.205.161.489,00	814.670.802,00
• Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	22.719.078.806,00	14.909.457.838,00	7.809.620.968,00
• Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	3.465.855.075,00	2.905.626.373,00	560.228.702,00
• Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	8.742.793.414,00	8.394.889.973,00	347.903.441,00
✓ **Bantuan Keuangan**			

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
• Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	0,00	2.277.440.000,00	(2.277.440.000,00)
➢ **Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**			
✓ **Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP**	8.277.095.762,00	0,00	8.277.095.762,00
Jumlah	**1.610.983.654.167,99**	**1.207.655.277.944,42**	**403.328.376.223,57**

Sumber: SIPD 2024

5.5.1.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi sebagai berikut:

Tabel 5.123
Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
➢ **Pembayaran Belanja Pegawai**			
✓ Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	289.868.847.673,00	246.704.342.115,00	43.164.505.558,00
✓ Belanja Tambahan Penghasilan ASN	109.791.307.469,00	95.457.476.468,00	14.333.831.001,00
✓ Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	56.367.126.065,00	55.055.678.452,00	1.311.447.613,00
✓ Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	10.951.341.721,00	10.835.454.019,00	115.887.702,00
✓ Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	172.506.157,00	173.075.819,00	(569.662,00)
✓ Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	746.000.000,00	1.080.600.000,00	(334.600.000,00)
✓ Belanja Pegawai BLUD	29.349.151.682,00	15.924.944.036,00	13.424.207.646,00
➢ **Pembayaran Belanja Barang dan Jasa**			
✓ Belanja Barang	97.796.917.133,89	86.155.198.379,00	11.641.718.754,89
✓ Belanja Jasa	154.942.886.592,00	143.177.571.679,00	11.765.314.913,00
✓ Belanja Pemeliharaan	39.790.645.977,00	43.001.431.073,00	(3.210.785.096,00)
✓ Belanja Perjalanan Dinas	87.341.007.680,00	72.551.707.887,00	14.789.299.793,00
✓ Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	620.298.000,00	1.619.484.980,00	(999.186.980,00)
✓ Belanja Barang dan Jasa BOS	16.912.608.419,00	17.284.204.955,00	(371.596.536,00)
✓ Belanja Barang dan Jasa BLUD	21.553.429.193,60	12.650.715.386,00	8.902.713.807,60
➢ **Pembayaran Belanja Bunga**			
✓ Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	8.622.865.171,00	1.659.124.491,00	6.963.740.680,00

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
➢ **Pembayaran Belanja Hibah**			
✓ Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	43.200.000.000,00	9.666.957.000,00	33.533.043.000,00
✓ Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	14.358.626.945,00	12.197.632.666,00	2.160.994.279,00
✓ Belanja Hibah Dana BOS	432.180.000,00	0,00	432.180.000,00
✓ Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	692.026.662,99	651.780.000,00	40.246.662,99
➢ **Pembayaran Belanja Bantuan Sosial**			
✓ Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	9.997.284.050,00	11.875.008.400,00	(1.877.724.350,00)
✓ Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	18.484.653.005,00	21.340.218.888,26	(2.855.565.883,26)
➢ **Pembayaran Belanja Tak Terduga**			
✓ Belanja Tak Terduga	1.157.886.000,00	140.000.000,00	1.017.886.000,00
➢ **Pembayaran Belanja Transfer Bagi Hasil**			
✓ Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	0,00	506.340.755,00	(506.340.755,00)
✓ Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	0,00	427.113.816,00	(427.113.816,00)
➢ **Pembayaran Belanja Transfer Bantuan Keuangan**			
✓ Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	226.451.591.862,00	214.140.316.018,00	12.311.275.844,00
Jumlah	**1.239.601.187.458,48**	**1.083.374.370.101,26**	**156.226.817.357,22**

Sumber: Bidang Akuntansi BPKAD

5.5.2 Penjelasan Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Realisasi Kas Bersih dari Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan perolehan dan pelepasan sumber daya yang bertujuan untuk meningkatkan operasi Pemerintah dan menghasilkan pendapatan dimasa yang akan datang. Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Pemerintah Kabupaten Morowali Utara selama Tahun 2024 dan 2023, yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.124
Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi	2.860.463.600,00	1.153.895.200,00	2.860.463.600,00
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	309.983.662.053,18	235.488.131.589,27	309.983.662.053,18
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	**(307.123.198.453,18)**	**(234.334.236.389,27)**	**(72.788.962.063,91)**

Sumber: Bidang Akuntansi BPKAD

Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi yaitu Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Investasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Kas dari Aktivitas Investasi sebagai berikut:

5.5.2.1 Penjelasan Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi sebagai berikut:

Tabel 5.125
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
➢ **Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan**			
✓ Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	2.860.463.600,00	1.153.895.200,00	1.706.568.400,00

Sumber: Bidang Akuntansi BPKAD

5.5.2.2 Penjelasan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi sebagai berikut:

Tabel 5.126
Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
➢ **Perolehan Tanah**			
✓ Belanja Modal Tanah Persil	1.963.260.000,00	1.110.890.900,00	852.369.100,00
✓ Belanja Modal Tanah Non Persil	0,00	330.006.300,00	(330.006.300,00)
✓ Belanja Modal Lapangan	0,00	780.884.600,00	(780.884.600,00)
➢ **Perolehan Peralatan dan Mesin**			0,00
✓ Belanja Modal Alat Besar	219.385.000,00	35.500.000,00	183.885.000,00
✓ Belanja Modal Alat Angkutan	14.642.085.300,00	3.496.981.100,00	11.145.104.200,00
✓ Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	44.881.000,00	52.848.600,00	(7.967.600,00)
✓ Belanja Modal Alat Pertanian	29.514.000,00	1.727.590.520,00	(1.698.076.520,00)
✓ Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	9.699.253.688,00	15.355.110.317,00	(5.655.856.629,00)
✓ Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.664.039.500,00	2.863.690.885,00	(1.199.651.385,00)
✓ Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	33.411.169.861,00	2.197.267.554,00	31.213.902.307,00
✓ Belanja Modal Alat Laboratorium	1.194.800.000,00	1.352.625.863,00	(157.825.863,00)
✓ Belanja Modal Komputer	8.924.884.382,00	9.095.377.779,00	(170.493.397,00)
✓ Belanja Modal Alat Pengeboran	0,00	2.101.176,00	(2.101.176,00)
✓ Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	213.160.000,00	106.373.348,00	106.786.652,00

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
✓ Belanja Modal Rambu-Rambu	0,00	599.089.200,00	(599.089.200,00)
✓ Belanja Modal Peralatan Olahraga	8.000.000,00	46.102.128,00	(38.102.128,00)
✓ Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	4.107.532.824,00	0,00	4.107.532.824,00
✓ Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.057.343.500,00	0,00	2.057.343.500,00
➢ **Perolehan Gedung dan Bangunan**			0,00
✓ Belanja Modal Bangunan Gedung	85.886.267.524,18	77.451.712.195,27	8.434.555.328,91
✓ Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	2.296.962.300,00	2.730.459.593,00	(433.497.293,00)
✓ Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	199.700.000,00	0,00	199.700.000,00
➢ **Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan**			0,00
✓ Belanja Modal Jalan dan Jembatan	97.440.430.969,00	86.057.885.870,00	11.382.545.099,00
✓ Belanja Modal Bangunan Air	28.607.837.525,00	19.355.718.711,00	9.252.118.814,00
✓ Belanja Modal Instalasi	49.425.000,00	87.536.000,00	(38.111.000,00)
✓ Belanja Modal Jaringan	14.930.670.980,00	8.169.144.850,00	6.761.526.130,00
➢ **Perolehan Aset Tetap Lainnya**			0,00
✓ Belanja Modal Bahan Perpustakaan	254.614.700,00	94.125.000,00	160.489.700,00
➢ **Penyertaan Modal Daerah**			0,00
✓ Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	2.138.444.000,00	3.500.000.000,00	(1.361.556.000,00)
Jumlah	**309.983.662.053,18**	**235.488.131.589,27**	**74.495.530.463,91**

Sumber: Bidang Akuntansi BPKAD

5.5.3 Penjelasan atas Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara selama Tahun 2024 dan 2023, yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.127

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00	0,00
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan	48.836.405.892,00	28.487.903.437,00	20.348.502.455,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	**(48.836.405.892,00)**	**(28.487.903.437,00)**	**(20.348.502.455,00)**

Sumber: Bidang Akuntansi BPKAD

Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan yaitu Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan. Rincian Arus Kas dari

Aktivitas Pendanaan yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan sebagai berikut:

5.5.3.1 Penjelasan atas Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan

Arus Masuk: Kas dari Aktivitas Pendanaan yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan sebagai berikut:

Tabel 5.128
Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
➢ **Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo**			
✓ Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	48.836.405.892,00	48.836.405.892,00	0,00

Sumber: Bidang Akuntansi BPKAD

5.5.4 Penjelasan atas Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban dan pendanaan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara untuk Tahun 2024. Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Pemerintah Kabupaten Morowali Utara selama Tahun 2024 dan 2023, yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.129
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris	**109.343.513.811,50**	**81.154.234.484,90**	28.189.279.326,60
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris	**109.343.513.811,50**	**81.154.234.484,90**	28.189.279.326,60
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Sumber: Bidang Akuntansi BPKAD

Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris yaitu Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Transitoris yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Kas dari Aktivitas Transitoris sebagai berikut:

5.5.4.1 Penjelasan atas Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris sebagai berikut:

Tabel 5.130
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
➢ **Penerimaan Perhitungan FIhak Ketiga (PFK)**			
✓ PFK BUD	109.343.513.811,50	81.154.234.484,90	28.189.279.326,60

Sumber: Bidang Akuntansi BPKAD

5.5.4.2 Penjelasan atas Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris sebagai berikut:

Tabel 5.131
Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
➢ **Pengeluaran Perhitungan Flhak Ketiga (PFK)**			
✓ PFK BUD	109.343.513.811,50	81.154.234.484,90	28.189.279.326,60

Sumber: Bidang Akuntansi BPKAD

5.5.5 Kenaikan/Penurunan Bersih Kas

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Kenaikan/(Penurunan) Kas yang disebabkan keempat aktivitas yang dijabarkan di atas dengan diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.132
Kenaikan/Penurunan Bersih Kas

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	**371.382.466.709,51**	**124.280.907.843,16**	247.101.558.866,35
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(307.123.198.453,18)	(234.334.236.389,27)	(72.788.962.063,91)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(48.836.405.892,00)	(28.487.903.437,00)	(20.348.502.455,00)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**15.422.862.364,33**	**(138.541.231.983,11)**	**153.964.094.347,44**

Sumber: Bidang Akuntansi BPKAD

5.6.6 Saldo Awal Kas

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Awal Kas Tahun 2024 dan 2023 yang terdiri dari:

Tabel 5.133
Saldo Awal Kas

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Kas di Kas Daerah	43.477.573.668,94	188.662.223.511,05	(145.184.649.842,11)
Kas di Bendahara Penerimaan	17.202.000,00	578.627.154,00	(561.425.154,00)
Kas di Bendahara Pengeluaran	435.276.242,00	2.669.709,00	432.606.533,00
Kas di BLUD	7.968.540.362,00	0,00	7.968.540.362,00
Kas Dana BOS	220.597.113,59	1.429.903.790,59	(1.209.306.677,00)
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	213.513.606,00	301.125.197,00	(87.611.591,00)

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Jumlah	**52.332.702.992,53**	**190.974.549.361,64**	**(138.641.846.369,11)**

Sumber: Bidang Akuntansi BPKAD

5.5.6 Koreksi SiLPA Tahun Lalu

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Koreksi SiLPA Tahun Lalu pada Tahun 2024 dan 2023 yang terdiri dari:

Tabel 5.134
Koreksi SiLPA Tahun Lalu

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Koreksi atas rekonsiliasi Kas Daerah	0,00	(2.126.686,00)	2.126.686,00
Koreksi atas saldo Kas di Bendahara BLUD	(48.076.016,04)	0,00	(48.076.016,04)
Koreksi kesalahan Kas di Bendahara BOS	14.701.072,00	102.741.072,00	(88.040.000,00)
Jumlah	**(33.374.944,04)**	**(100.614.386,00)**	**67.239.441,96**

Sumber: Bidang Akuntansi BPKAD

Koreksi SiLPA Tahun Lalu yang disajikan di atas juga telah dijelaskan dan diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos-Pos LP SAL pada ***Poin 5.2*** di atas.

5.5.7 Saldo Akhir

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Akhir Kas Tahun 2024 dan 2023 yang terdiri dari:

Tabel 5.135
Saldo Akhir

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Kas di Kas Daerah	57.388.377.822,99	43.477.573.668,94	13.910.804.154,05
Kas di Bendahara Penerimaan	249.377.625,00	17.202.000,00	232.175.625,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	6.698.555,00	435.276.242,00	(428.577.687,00)
Kas di BLUD	9.709.774.829,24	7.968.540.362,00	1.741.234.467,24
Kas Dana BOS	337.855.207,59	220.597.113,59	117.258.094,00
Kas Dana Kapitasi di FKTP	30.106.373,00	213.513.606,00	(183.407.233,00)
Jumlah	**67.722.190.412,82**	**52.332.702.992,53**	**15.389.487.420,29**

Sumber: Bidang Akuntansi BPKAD

Pada Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Morowali Utara menyajikan Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD) atas utang yang disajikan sebagai utang PFK dalam saldo akhir kas. Sedangkan di Tahun 2024 Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD) yang merupakan saldo utang PFK dan disajikan sebagai bagian dari saldo akhir kas, sehingga saldo akhir kas sama dengan saldo kas dan setara kas di Neraca per 31 Desember 2024.

Dalam Dana Saldo Akhir Kas tersebut di atas terdapat Dana SiLPA Terikat dan SiLPA Non-Terikat yang dapat digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara untuk pelaksanaan aktivitas-aktivitas arus kas di tahun mendatang. Rincian Dana SiLPA Terikat dan SiLPA Non-Terikat telah diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos-Pos LRA pada ***Poin 5.1.3*** di atas.

5.6 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas (dalam satuan mata uang Rupiah) dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.6.1 Ekuitas Awal

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas saldo Ekuitas Awal Tahun 2024 dan 2023 yang hanya terdiri dari:

Tabel 5.136
Ekuitas awal

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Ekuitas Awal	2.270.452.390.192,32	2.024.706.773.521	245.745.616.671,32

Sumber: SIPD 2024

Pemerintah Kabupaten Morowali Utara menyajikan saldo Ekuitas Awal Tahun 2024 dan 2023 yang merupakan Saldo Ekuitas Akhir tahun 2023 dan 2022 pada Pemerintah Pemerintah Kabupaten Morowali Utara yang disajikan dalam LPE pada masing-masing tahun berkenaan:

5.6.2 Surplus/(Defisit) – LO

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Surplus/(Defisit) - LO Tahun 2024 dan 2023 yang hanya terdiri dari:

Tabel 5.137
Surplus/Defisit

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Surplus/(Defisit) - LO	114.021.831.725,20	245.989.828.752,00	(131.967.997.026,80)

Sumber: SIPD 2024

Pada Tahun 2024 dan 2023, Pemerintah Kabupaten Morowali Utara masing-masing memiliki suplus dan defisit atas kegiatan operasional dan nonoperasional serta atas kejadian luar biasa yang berpengaruh terhadap kas maupun tanpa mempengaruhi posisi kas atau merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024. Saldo Surplus/(Defisit)-LO yang disajikan di atas sama dengan nilai saldo Surplus/(Defisit)-LO yang disajikan dalam LO sebagaimana telah diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos-Pos LO pada ***poin 5.5.4***

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Saldo di bawah merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang teridiri dari:

Tabel 5.138
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Koreksi Ekuitas Aset Lancar	(33.374.944,04)	0,00	(33.374.944,04)
Koreksi Ekuitas atas Aset Tetap	(63.423.327,06)	(244.212.081,00)	180.788.753,94
Koreksi Ekuitas atas Aset Lainnya	2.374.030.928,00	0,00	2.374.030.928,00
Jumlah	**2.277.232.656,90**	**(244.212.081,44)**	**2.521.444.737,90**

Sumber: SIPD 2024

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang merupakan transaksi penyesuaian aset dan kewajiban yang disebabkan oleh adanya koreksi baik lebih catat maupun kurang catat dari tahun-tahun sebelumnya sehingga pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Morowali melakukan penyesuaian. Berikut kejadian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang **siginifikan** mempengaruhi nilai koreksi penyajian Aset dan Kewajiban diantaranya yaitu:

1. Koreksi Ekuitas atas Aset Lancar sebesar (Rp33.374.944,04) yang merupakan koreksi atas saldo Kas di Bendahara BLUD sebesar (Rp48.076.016,04) dan Kas di Bendahara BOS sebesar Rp116.000,00 akibat salah saji pendapatan dan belanja di tahun sebelumnya dan koreksi atas pengembalian ketekoran kas pada SDN 2 Korowou sebesar Rp14.585.072,00
2. Koreksi Ekuitas atas Aset Tetap sebesar (Rp63.423.327,06) yang merupakan koreksi atas saldo awal Akumulasi Penyusutan akibat kurang catat dan lebih catat beban penyusutan di tahun sebelumnya
3. Koreksi Ekuitas atas Aset Lainnya sebesar 2.374.030.928,00 merupakan koreksi atas pengembalian ketekoran kas pada SDN 2 Korowou sebesar (Rp14.585.072,00) dan aset lainnya yang belum tercatat sebesar Rp2.388.616.000,00 yang merupakan Pembangunan kantor KPU Tahun Anggaran 2023.

5.6.4 Saldo Akhir Ekuitas

Saldo di bawah merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas saldo Ekuitas Akhir milik Pemerintah Kabupaten Morowali Utara per 31 Desember 2024 dan 2023.

Tabel 5.139
Saldo Akhir Ekuitas

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
Saldo Ekuitas Akhir	**2.386.751.454.574,42**	**2.270.452.390.192,00**	**116.299.064.382,42**

Sumber: SIPD 2024

Saldo ekuitas akhir yang tersaji dalam Laporan Ekuitas ini sama besarnya dengan nilai Ekuitas yang tersaji di Neraca per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagaimana dijelaskan pada Penjelasan atas Pos-Pos Neraca pada ***poin 5.3.***

5.7 Pengungkapan Lainnya Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024

Pengungkapan lainnya atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 untuk memberikan gambaran yang lengkap agar memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan, serta dalam rangka memenuhi pengungkapan yang memadai (*full disclosure*). Maka perlu kami ungkapkan hal–hal yang belum dijelaskan dalam penjelasan pos-pos laporan keuangan, sebagai berikut:

1. Kronologis pengajuan keberatan, banding dan gugatan BPHTB PT. TIMUR JAYA INDOMAKMUR:

   Pada Tahun 2014 PT. Timur Jaya Indomakmur mengajukan permohonan penetapan BPHTB kepada Bupati Morowali Utara atas lokasi Perkebunan Sawit yang terletak di Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara melalui surat Nomor 046/D&L/TJIM/THA/VI/2014 tanggal 12 Juni 2014, dimana subtansi surat tersebut pihak Perusahaan memohon agar penetapan BPHTB didasarkan pada Nilai Tanah Terendah sebagaimana tercantum dalam Rincian Perhitungan Nilai (RPN) yang diterbitkan oleh KPP Pratama Poso.

   a. Berdasarkan surat permohonan tersebut Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) cq.Bidang Pendapatan melakukan perhitungan dan penetapan BPHTB terhutang berdasarkan Nilai Dasar Tanah sebagaimana yang tercantum dalam Rincian Perhitungan Nilai (RPN), yang hasilnya dituangkan dalam Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD-BPHTB):

      - SSPD-BPHTB Nomor 0005.BPHTB/VII/2014 tanggal 11 Juli 2014 sebesar Rp2.801.065.000,00 (Dua Milyar Delapan Ratus Satu Juta Enam Puluh Lima Ribu Rupiah).
      - SSPD-BPHTB Nomor 0008/VII/2014 tanggal 11 Juli 2014 sebesar Rp528.106.957,00 (Lima Ratus Dua Puluh Delapan Juta Seratus Enam Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah).

      Berdasarkan SSPD-BPHTB tersebut perusahaan melakukan penyetoran pada tanggal 20 Juli 2014 langsung ke Rekening Kas Daerah pada Bank BRI Unit Wita Mori Kolonodale dengan Nomor Rekening 36.34.01.000096-30-2.

   b. Pada Tahun 2015 BPK-RI Perwakilan Sulawesi Tengah melakukan Pemeriksaan atas LKPD Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2014 dan ditemukan bahwa terdapat kurang bayar BPHTB terhutang atas nama Wajib Pajak PT Timur Jaya Indomakmur sebagaimana yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan No.13.C/LHP/XIX.PLU/06/2015 tanggal 14 Juni 2015.

      Kemudian BPK-RI merekomendasikankepada DPPKAD cq. Bidang Pendapatan untuk melakukan penagihan atas kurang bayar BPHTB Tahun 2014 atas nama WP PT. Timu Jaya Indomakmur.

   c. Atas rekomendasi BPK-RI tersebut DPPKAD Morowali Utara cq. Bidang Pendapatan melakukan perhitungan kembali BPHTB terhutang atas nama WP PT Timur Jaya Indomakmur dan dituangkan dalam kertas kerja perhitungan kembali BPHTB (terlampir) dengan jumlah selisih kurang bayar BPHTB Timur Jaya Indomakmur sebesar Rp8.624.916.543,00(Delapan Milyar Enam Raus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah). Selisih kurang bayar tersebut kemudian ditetapkan dalam SKPDKB-BPHTB Nomor 01/SLPDKB/DPPKAD/VIII/2015 tanggal 10 Agustus 2015 .

   d. SKPDKB-BPHTB tersebut kemudian disampaikan kepada WP PT. Timur Jaya Indomakmur melalui surat Bupati Morowali Utara Nomor 970/0342/DPPKAD/VIII/2015 tanggal 10 Agustus 2015 perihal Penyampaian Ketetapan BPHTB Kurang Bayar yang diterima oleh Wajib Pajak pada tanggal 19 Agustus 2015.

   e. Selanjutnya sebagai tindak lanjut Surat Bupati Morowali Utara tersebut diatas, Bupati Morowali Utara kembali mengirim Surat Nomor 910/0451/DPPKAD/IX/2015, tanggal 30 September 2015, perihal Tindak Lanjut BPHTB Kurang Bayar, dimana dalam Surat tersebut ditegaskan kembali agar Wajib Pajak segera melakukan penyetoran BPHTB Kurang Bayar paling lambat Bulan Desember 2015.

   f. Kemudian pada Bulan Oktober 2015 WP memberikan tanggapan atas surat Bupati tesebut melalui Surat Nomor 037/TJIM-PEMDA/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015, perihal Tanggapan/Klarifikasi atas BPHTB kurang bayar PT. Timur Jaya Indomakmur sebesar Rp8.624.936.448,00 (Delapan Milyar Enam Ratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Empat Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah). Subtansi dari surat ini adalah bahwa WP tidak setuju dengan penetapan BPHTB kurang bayar sejumlah

Rp8.624.936.448,00 dan menyatakan akan mengajukan keberatan sesuai peraturan yang berlaku dan meminta penjelasan kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara tentang tata cara pengajuan keberatan termasuk meminta alamat resmi surat menyurat sebagai dasar WP mengirimkan surat keberatan.

g. Surat WP tersebut kemudian dijawab oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara melalui Surat Kepala DPPKAD Nomor 900/796/DPPKAD/XI/2015 tanggal 4 November 2015, perihal penjelasan tentang Prosedur/Tata cara keberatan atas BPHTB Kurang bayar.

h. Pada tanggal 09 November 2015 WP mengajukan keberatan atas SKPDKB-BPHTB dengan Surat Keberatan Nomor 040/TJIM-PEMDA/XI/2015, yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara pada tanggal 09 November 2015. Atas pengajuan surat keberatan tersebut sebelumnya WP telah menyetor kurang bayar BPHTB sebesar Rp4.398.707.437,00 (Empat Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujub Rupiah) pada tanggal yang sama.

i. Atas surat keberatan WP tersebut Pemerintah Kabupaten Morowali Utara memberikan tanggapan dengan Surat Bupati Morowali Utara Nomor 973/0576/DPPKAD/XI/2015 tanggal 30 November 2015, yang pada prinsipnya isi surat menegaskan menolak keberatan WP dengan menyatakan bahwa penetapan kurang bayar BPHTB dimaksud adalah berdasarkan Rekomendasi BPK-RI dan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara surat tersebut sudah merupakan sikap/keputusan formil terhadap keberatan wajib pajak.

j. Selanjutnya sebagai penegasan kembali atas surat Nomor 973/0576/DPPKAD/XI/2015, Bupati Morowali Utara menerbitkan Surat Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor 188.45/KEP-B.MU/0290/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 yang kemudian dikirim ke WP dan diterima oleh WP pada tanggal 23 Januari 2017 yang isinya menolak permohonan keberatan PT. Timur Jaya Indomakmur dan menyatakan bahwa penetapan SKPDKB-BPHTB sebesar Rp8.624.916.543,00 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

l. Atas Surat Keputusan Bupati Morowali Utara tesebut WP kemudian mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak Jakarta dan sejak itu secara resmi sengketa pajak ini terdaftar sebagai sengketa banding di Pengadilan Pajak Jakarta dengan Nomor Sengketa 32-1111647-2014.

m. Sebelum sidang Sengketa Banding dimulai, atas permintaan Pengadilan Pajak Jakarta, Bupati Morowali Utara membuat Surat Uraian Banding (SUB) Nomor 180/0466/HKM/VI/2017 dan kemudian disampaikan dan diterima oleh Pengadilan Pajak Jakarta pada tanggal 06 Juli 2017.

n. Kemudian Pengadilan Pajak menyelenggarakan beberapa kali sidang sengketa pajak yang dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa (PT. Timur Jaya Indomakmur selaku Pemohon Banding dan Bupati Morowali Utara selaku Terbanding)

o. Sidang tersebut kemudian menghasilkan Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap yaitu Putusan Nomor PUT-111647.32/2014/PP/M.XIA Tahun 2018 tanggal 19 Maret 2018 dimana dalam amar Putusan berbunyi : *"mengabulkan seluruhnya Permohonan Banding dari Pemohon"*

p. Kemudian menindak lanjuti Putusan Pengadilan Pajak tersebut WP atas Nama PT.Timur Jaya Indomakmur mengajukan Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak melalui Surat Nomor 017/TJIM-PEMDA/IV/2018, dengan jumlah yang dimohonkan untuk dikembalikan dalam surat sebesar Rp6.505.934.684,00 (Enam Milyar Lima Ratus Lima Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah).

q. Atas surat tersebut Bapenda Morowali Utara kemudian melakukan kajian dan penelitian dan hasilnya dituangkan dalam Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor 188.45/KEP-B.MU/0206.b/IV/2019, tanggal 25 April 2019, dimana isi keputusan adalah menolak Permohonan Wajib Pajak Atas Nama PT Timur Jaya Indomakmur.

r. Kemudian atas Keputusan Bupati Morowali Utara tersebut WP kembali mendaftarkan Gugatan BPHTB ke Pengadilan Pajak Jakarta.

s. Selanjutnya Pengadilan Pajak Jakarta telah menggelar beberapa kali sidang atas sengketa gugatan tersebut namun sampai dengan saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara selaku Tergugat belum pernah menerima Putusan Pengadilan Pajak terkait kasus ini.

5.8 Dana Tugas Pembantuan

Tabel 5.140
Realisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Tugas Pembantuan Yang Diterima Pada Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)		
Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas						
1	**Irigasi Perpompaan Besar Wilayah Tengah**					
	Persiapan					
	1 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	18.750.000,00	18.750.000,00	-	Dokumen Pengendalian	1 Dokumen
	Pelaksanaan Konstruksi Irigasi Perpompaan					
	1 Belanja Jasa Konsultan	37.800.000,00	37.800.000,00	-	Dokumen Perencanaan	1 Dokumen
	2 Pelaksanaan Konstruksi Irigasi Perpompaan	1.579.200.000,00	1.579.200.000,00	-	Irigasi Perpompaan	1 Unit
	3 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11.850.000,00	11.850.000,00	-	Dokumen Pengendalian	1 Dokumen
	Monitoring dan Pelaporan					
	1 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	23.350.000,00	23.350.000,00	-	Dokumen Pengendalian	1 Dokumen
2	**Irigasi Perpipaa**					
	Persiapan					
	1 Belanja Bahan	300.000,00	300.000,00	-		
	2 Belanja Jasa Konsultan	10.500.000,00	10.500.000,00	-	Dokumen Pengelolaan	1 Dokumen
	3 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.500.000,00	4.500.000,00	-		
	Pelaksanaan Konstruksi Irigasi Perpipaan					
	1 Pekerjaan Konstruksi Irigasi Perpipaan	282.000.000,00	282.000.000,00	-	Irigasi Perpipaan	1 Dokumen
	Monitoring dan Pelaporan					
	1 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.700.000,00	2.700.000,00		Dokumen Pengelolaan	
Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian						

No	Program/Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)		
1	**Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Lingkup Alat dan Mesin Pertanian**					
	Identifikasi Kebutuhan Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen					
	1 Belanja Bahan	1.000.000,00	1.000.000,00			
	2 Belanja Honor Output Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00		Dokumen Pengelolaan	1 Dokumen
	3 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.400.000,00	5.400.000,00			
Program Dukungan Manajemen						
1	**Layanan Manajemen Keuangan**					
	1 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	22.700.000,00	22.700.000,00			
	2 Belanja Bahan	700.000,00	700.000,00		Dokumen Pengelolaan	1 Dokumen
	3 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.450.000,00	6.450.000,00			
Jumlah		**2.010.800.000,00**	**2.010.800.000,00**	-		

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kab. Morowali Utara Tahun 2024

5.9 Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Sebagian substansi Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar ditetapkan sebagai SPM. Standar pelayanan minimal meliputi Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat, Ketentraman Ketertiban Umum dan perlindungan masyarakat dan Sosial.

Pada Tahun anggaran 2024 Alokasi belanja dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Morowali Utara dialokasikan sebesar Rp83.881.453.346,10 dan terealisasi sebesar Rp54.534.858.792,00 atau 65,01% secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.141
Rekapitulasi Realisasi Belanja Untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) TA 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase %
1	2	3	4	5	6
A. SPM Bidang Pendidikan					
1	Pendidikan Dasar	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.929.454.480,00	1.815.058.333,00	94,07
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	5.828.117.770,00	5.816.087.999,00	99,79
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	334.328.498,00	300.716.484,00	89,95

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase %
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	24.226.828.914,00	3.980.598.950,00	16,43
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	3.286.330.200,00	3.146.058.202,00	95,73
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	15.144.980.050,00	15.141.713.075,00	99,98
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	6.897.196.100,00	4.961.544.714,00	71,94
		Total	***57.647.236.012,00***	***35.161.777.757,00***	**60,99**
2	Pendidikan Anak Usia Dini	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	217.721.257,00	217.662.000,00	99,97
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	1.629.999.692,00	1.627.527.392,00	99,85
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	299.484.400,00	292.853.312,00	97,79
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	2.985.393.800,00	144.212.293,00	4,83
		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	20.999.964,00	20.990.000,00	99,95
		Total	***5.153.599.113,00***	***2.303.244.997,00***	44,69
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pendidikan			**62.800.835.125,00**	**37.465.022.754,00**	59,66
B. SPM Bidang Kesehatan					
1	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	9.257.200,00	9.250.000,00	99,92
		Total	***9.257.200,00***	***9.250.000,00***	99,92
2	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	-	-	
		Total	**-**	**-**	
3	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	40.728.400,00	40.728.000,00	100,00
		Total	***40.728.400,00***	***40.728.000,00***	100,00
4	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	19.500.800,00	15.066.000,00	77,26
		Total	***19.500.800,00***	***15.066.000,00***	77,26
5	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	-	-	
		Total	**-**	**-**	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase %
6	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	15.405.500,00	12.720.000,00	82,57
		Total	***15.405.500,00***	***12.720.000,00***	82,57
7	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	19.991.200,00	17.871.000,00	89,39
		Total	***19.991.200,00***	***17.871.000,00***	89,39
8	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	19.991.200,00	18.031.000,00	90,19
		Total	***19.991.200,00***	***18.031.000,00***	90,19
9	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	-	-	
		Total	***-***	***-***	
10	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	19.980.000,00	19.980.000,00	100,00
		Total	***19.980.000,00***	***19.980.000,00***	100,00
11	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	-	-	
		Total	***-***	***-***	
12	Pelayanan Kesehatan Balita	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	19.990.400,00	19.985.500,00	99,98
		Total	***19.990.400,00***	***19.985.500,00***	99,98
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Kesehatan			**164.844.700,00**	**153.631.500,00**	93,20
C. SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang					
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	304.971.200,00	304.860.800,00	99,96
		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	2.335.496.400,00	2.250.914.900,00	96,38
		Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	300.000.000,00	199.830.000,00	66,61
		Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	12.531.643.131,10	10.078.687.219,00	80,43
		Total	***15.472.110.731,10***	***12.834.292.919,00***	82,95
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	550.288.400,00	543.419.943,00	98,75
		Total	***550.288.400,00***	***543.419.943,00***	98,75

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase %
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang			**16.022.399.131,10**	**13.377.712.862,00**	83,49
D. SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum					
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	215.857.500,00	215.779.500,00	99,96
		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	-	-	
		Total	***215.857.500,00***	***215.779.500,00***	99,96
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	45.773.800,00	42.430.000,00	92,69
		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	112.636.900,00	87.295.400,00	77,50
		Total	***158.410.700,00***	***129.725.400,00***	81,89
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	56.918.800,00	51.396.004,00	90,30
		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	33.867.000,00	32.975.000,00	97,37
		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	125.862.400,00	124.000.000,00	98,52
		Total	***216.648.200,00***	***208.371.004,00***	96,18
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	178.329.760,00	177.724.200,00	99,66
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	51.750.850,00	49.294.000,00	95,25
		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	1.878.286.400,00	1.875.905.000,00	99,87
		Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	20.899.600,00	19.965.000,00	95,53
		Total	***.129.266.610,00***	***2.122.888.200,00***	99,70
5		Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	-	-	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase %
	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	16.511.400,00	16.511.400,00	100,00
		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	97.373.350,00	97.373.350,00	100,00
		Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	-	-	
		Total	***113.884.750,00***	***113.884.750,00***	100,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum			**2.834.067.760,00**	**2.790.648.854,00**	98,47
E. SPM Bidang Sosial					
1	Rehablitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	139.237.200,00	137.092.000,00	98,46
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	8.060.000,00	8.060.000,00	100,00
		Penyediaan Alat Bantu	155.437.600,00	135.790.000,00	87,36
		Penyediaan Permakanan	124.909.600,00	119.435.000,00	95,62
		Total	**427.644.400,00**	**400.377.000,00**	93,62
2	Rehablitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	139.237.200,00	-	-
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	8.060.000,00	-	-
		Penyediaan Alat Bantu	155.437.600,00	-	-
		Penyediaan Permakanan	124.909.600,00	-	-
		Total	**427.644.400,00**	**-**	-
3	Rehablitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	139.237.200,00	-	-
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	8.060.000,00	-	-
		Penyediaan Alat Bantu	155.437.600,00	-	-
		Penyediaan Permakanan	124.909.600,00	-	-
		Total	**427.644.400,00**	**-**	-
4	Rehablitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar di luar panti	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	139.237.200,00	-	-
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	8.060.000,00	-	-
		Penyediaan Alat Bantu	155.437.600,00	-	-

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase %
		Penyediaan Permakanan	124.909.600,00	-	-
		Total	**427.644.400,00**	**-**	-
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	Pelayanan Dukungan Psikososial	85.341.000,00	84.588.822,00	99,12
		Penyediaan Makanan	263.388.030,00	262.977.000,00	99,84
		Total	**348.729.030,00**	**347.565.822,00**	99,67
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Sosial			**2.059.306.630,00**	**747.942.822,00**	36,32
JUMLAH TOTAL			**83.881.453.346,10**	**54.534.958.792,00**	**65,01**

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

5.10 Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.1 Program PEN merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan untuk mengurangi dampak Covid-19 terhadap perekonomian.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/PMK.06/2020 tentang Investasi Pemerintah dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional dijelaskan bahwa Investasi Pemerintah PEN adalah investasi Pemerintah nonpermanen yang dilaksanakan oleh pelaksana Investasi dalam bentuk investasi berupa surat utang yang diterbitkan oleh BUMN atau Lembaga sebagai penerima investasi dan/atau investasi langsung. Sejalan dengan hal tersebut, dalam Pasal 15 ayat (2) PP Nomor 23 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 43 Tahun 2020 telah dijelaskan bahwa Investasi Pemerintah dalam rangka pelaksanaan Program PEN dapat berupa investasi langsung dalam bentuk:

a) Pemberian pinjaman kepada BUMN;

b) Pemberian pinjaman kepada lembaga; dan/atau

c) Pinjaman PEN daerah. Invetasi langsung adalah pinjaman dengan atau tanpa hak konversi dan/atau hak ekuitas lainnya.

Pemberian pinjaman kepada BUMN dan kepada lembaga dilaksanakan dalam rangka memberikan dukungan kepada BUMN dan lembaga guna memperkuat dan menumbuhkan kemampuan ekonomi BUMN dan lembaga yang bersangkutan; dan/atau membantu Pelaku Usaha yang terdampak pandemi Covid-19 yang mendapatkan dukungan dari BUMN dan/atau lembaga.

Investasi Pemerintah berupa Pinjaman PEN Daerah dilaksanakan dengan ketentuan:

a) Pinjaman PEN Daerah diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero);

b) dapat berupa pinjaman program dan/atau pinjaman kegiatan; dan

c) diberikan dengan suku bunga tertentu yang ditetapkan oleh Menteri.

Pinjaman PEN Daerah adalah dukungan pembiayaan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah berupa pinjaman untuk digunakan dalam rangka melakukan percepatan pemulihan ekonomi di Daerah sebagai bagian dari Program PEN. Untuk memperoleh Pinjaman PEN Daerah, Pemerintah Daerah dapat mengajukan permohonan kepada Menteri dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri, dengan memenuhi persyaratan paling sedikit:

a) Merupakan daerah yang terdampak pandemi Covid-19;

b) Memiliki program pemulihan ekonomi daerah yang mendukung Program PEN;

c) Jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah Pinjaman PEN Daerah tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk tahun sebelumnya; dan

d) Memenuhi nilai rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan Pinjaman PEN Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pada Tahun anggaran 2022 Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara melalui kesepakatan bersama dengan pihak Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang tertuang dalam surat perjanjian Nomor PERJ-226/SMI/1221 tanggal 30 desember 2021 menyepakati Pinjaman Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (Dana PEN) dengan plafond pinjaman sebesar Rp200.000.000.000,00 dan jangka waktu pinjaman ditetapkan selama 60 bulan yaitu dimulai sejak tanggal pencairan pinjaman pertama kali. Dana tersebut diperuntukan untuk membiayai Sektor Infrastruktur pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp135.216.175.000,00, pada Dinas Kesehatan Daerah sebesar Rp24.522.300.000,00 dan Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp40.261.525.000,00.

Sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2022 dana PEN yang masuk ke rekening Kas daerah sebesar Rp195.345.654.826,00 yang ditransfer secara bertahap sesuai dengan mekanisme dan aturan yang telah ditetapkan dan disepakati oleh pihak SMI dan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara. Pencairan Tahap I sebesar Rp50.000.000.000,00 tanggal 09 juni 2022, tahap II sebesar Rp90.000.000.000,00 tanggal 09 November 2022 dan Tahap III sebesar Rp55.345.654.826,00 tanggal 30 Desember 2022. Sampai dengan tanggal 31 desember 2024 dana yang telah dibayarkan kepada pelaksana kegiatan terealisasi sebesar Rp195.345.654.826,00 atau 100%. Tahun anggaran 2024 Pemerintah daerah Kabupaten Morowali Utara melalui BPKAD telah membayar bunga Pinjaman Dana PEN sebesar Rp8.314.178.331,00 dari total Biaya Bunga sebesar Rp29.837.279.022,00 sehingga total biaya bunga pinjaman yang telah terbayarkan mulai bulan Juni 2022 sampai dengan per 31 desember 2024 sebesar Rp21.286.556.750,00 sisa bunga pinjaman yang harus dibayarkan sebesar Rp8.471.583.383,00.

Adapun biaya Pokok Pinjaman tahun 2024 yang telah terbayarkan sebesar Rp48.836.405.892,00. Total biaya Pokok pinjaman PEN yang telah terbayarkan mulai bulan Juni tahun 2023 s.d per 31 desember 2024 sebesar Rp77.324.309.329,00 sehingga sisa pokok pinjaman yang harus dibayarkan sebesar Rp118.021.345.497,00. Secara rinci dapat dilihat pada lampiran XXIV.

5.11 Aset Tetap Fisik yang tidak ditemukan

Sesuai dengan hasil inventarisasi Bidang Aset Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2019 terdapat aset tetap yang fisiknya tidak ditemukan dan kondisi tidak jelas sebesar Rp34.210.457.309,72 yang merupakan penyerahan dari Kabupaten Morowali dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.142
Aset Tetap yang Fisiknya Tidak Ditemukan

No	Nama Barang	Nilai (Rp)
1	Tanah	2.348.090.500,00
2	Peralatan dan Mesin	924.681.910,00
3	Gedung dan Bangunan	26.885.730.149,72
4	Jalan,Irigasi dan Jaringan	3.919.033.000,00
5	Aset Tetap lainnya	132.921.750,00
Jumlah		**34.210.457.309,72**

Sumber: Bidang Aset BPKAD

Terhadap hal itu pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara melalui Bidang Aset telah melakukan konfirmasi kepada Bidang Aset Kabupaten Morowali terkait dengan permasalahan Aset tersebut .

Namum pihak dari Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali tidak dapat menerima kembali aset tersebut dengan mengeluarkan surat keputusan Bupati Morowali tentang rekonsiliasi data aset penyerahan tahap I Nomor 028/0317/BUP-BPKAD/III/2018.

Atas hal tersebut di atas Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara telah melakukan reklasifikasi aset sebesar Rp34.210.457.309,72 ke dalam aset lainnya untuk selanjutnya diusulkan dalam penghapusan.

5.12 Realisasi Pendapatan dan Belanja Dana Bantuan Operasional Daerah (BOSDA)

Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) adalah alokasi pendanaan belanja operasional yang diberikan kepada Satuan Pendidikan untuk memenuhi standar nasional pendidikan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Morowali Utara. Pada tahun 2024 dana BOSDA yang telah disalurkan ke 174 sekolah sebesar Rp3.247.260.000,00 sedangkan total belanja Dana BOSDA sebesar Rp3.244.175.000,00. Sisa saldo Dana BOSDA sebesar Rp3.085.000,00 telah disetorkan ke Kas Daerah. Dan pada Tahun 2024 juga terdapat kas tunai dana BOSDA sebesar Rp5.632.000,00 dan pada bulan maret Tahun 2025 telah disetorkan ke kas daerah. Secara rinci dapat dilihat pada lampiran XXV.

BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Domisili dan Bentuk Hukum Entitas Pelaporan

Kabupaten Morowali Utara merupakan salah satu Daerah Otonomi Baru yang berkedudukan di Kolonodale Provinsi Sulawesi Tengah hasil pemekaran dari Kabupaten Morowali, yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414).

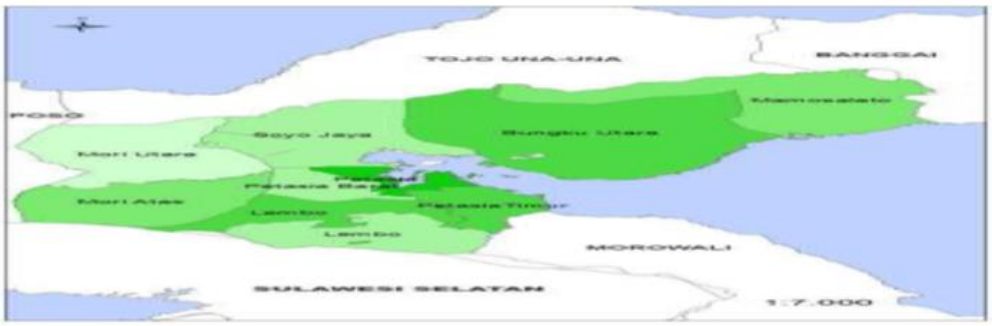
Dalam hal kependudukan luas Wilayah Morowali Utara sebesar 14,73 persen dari total luas daratan Sulawesi Tengah. Dilihat dari posisi di permukaan bumi, wilayah Kabupaten Morowali Utara terletak pada pesisir pantai di Perairan Teluk Tolo, serta kawasan lainnya terletak di kawasan dataran, lembah dan lereng pegunungan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

❖ Sebelah Utara	:	Berbatasan dengan wilayah Kabupaten Tojo Una-una
❖ Sebelah Selatan	:	Berbatasan dengan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Morowali
❖ Sebelah Timur	:	Berbatasan dengan wilayah Kabupaten Banggai dan Perairan Teluk Tolo
❖ Sebelah Barat	:	Berbatasan dengan wilayah Kabupaten Poso

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Morowali Utara, Luas wilayah Kabupaten Morowali Utara terdiri dari wilayah daratan seluas 10.004,28 Km² dan wilayah Lautan seluas 8.344,27 Km².

Total luas wilayah Kabupaten Morowali Utara adalah 18.348,55 Km², dengan wilayah kecamatan terluas adalah Kecamatan Bungku Utara seluas 2.406,79 Km² atau 24,02 persen dari luas wilayah KabupatenMorowali Utara, sedangkan wilayah Kecamatan terkecil adalah Kecamatan Petasia Barat dengan luas 465,29 Km² atau sebesar 4,79 persen dari luas keseluruhan wilayah Kabupaten Morowali Utara.

Gambar 6 .1
Peta Wilayah Kabupaten Morowali Utara



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Morowali

Secara lebih jelas data luas wilayah setiap Kecamatan di Kabupaten Morowali Utara dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6.1
Luas Wilayah Kabupaten Morowali Utara Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas (Km²)	Presentase (%)
1	Mamosalato	Tanasumpu	1.464,99	14,64
2	Bungku Utara	Baturube	2.406,79	24,06
3	Soyo Jaya	Lembah Sumara	605,51	6,05
4	Petasia	Kolonodale	646,34	6,46
5	Petasia Barat	Tiu	480,30	4,80
6	Petasia Timur	Bungintimbe	509,77	5,10
7	Lembo	Beteleme	675,23	6,75
8	Lembo Raya	Petumbea	657,61	6,57
9	Mori Utara	Mayumba	1.048,93	10,48
10	Mori Atas	Tomata	1.508,81	15,08
Morowali Utara			10.004,28	100,00

Sumber: Kabupaten Morowali Utara Dalam Angka 2020

Kabupaten Morowali Utara terbagi atas 10 Kecamatan, 122 Desa dan 3 Kelurahan. Wilayah kecamatan terluas di Kecamatan Bungku Utara dengan luas 2.406,79 Km² dan Kecamatan terkecil di Kecamatan Petasia Barat seluas 480,30 Km². Pembagian wilayah administrasi desa dalam Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.2
Luas Wilayah Daratan Menurut Kecamatan, Kelurahan/Desa Kabupaten Morowali Utara, Tahun 2024

NO.	Kecamatan/ Kelurahan / Desa	Luas Wilayah (Km²)	(%)	No	Kecamatan/ Kelurahan / Desa	Luas Wilayah (Km²)	(%)
(01)	(02)	(03)	(04)	(01)	(02)	(03)	(04)
01	**MAMOSALATO**	**1.464,99**	**100,00**				
01.01	Kolo Atas	131,95	8,92	01.08	Tambale	108,99	7,36
01.02	Kolo Bawah	29,50	1,99	01.09	Winangabino	201,12	13,59
01.03	Momo	70,30	4,75	01.10	Sea	138,50	9,36
01.04	Tananagaya	18,75	1,27	01.10	Uepakatu	85,59	5,78
01.05	Giri Mulya	5,25	0,35	01.12	Parangisi	128,74	8,70
01.06	Tana Sumpu	20,00	1,35	01.13	Lijo	252,30	17,22
01.07	Pandauke	125,03	8,45	01.14	Menyoe	148,97	10,07
02.	**BUNGKU UTARA**	**2.406,79**	**100,00**	**02.12**	**Kolombang**	**43,19**	**1,79**
02.01	Tokonanaka	30,22	1,26	02.13	Tirongan Bawah	32,20	1,34
02.02	Matube	539,39	22,41	02.14	Tanaku Raya	6,95	0,29
02.03	Posangke	284,92	11,84	02.15	Opa	118,41	4,92

NO.	Kecamatan/ Kelurahan / Desa	Luas Wilayah (Km^2)	(%)	No	Kecamatan/ Kelurahan / Desa	Luas Wilayah (Km^2)	(%)
02.04	Tokala Atas	177,03	7,36	02.16	Siliti	30,77	1,28
02.05	Uewajo	3,71	0,15	02.17	Ueruru	15,08	0,63
02.06	Baturube	78,95	3,28	02.18	Lemo	42,35	1,76
02.07	Woomparigi	22,38	0,93	02.19	Boba	31,59	1,31
02.08	Tambarabone	7,86	0,33	02.20	Salubiro	117,94	4,90
02.09	Taronggo	580,51	24,12	02.21	Pokeang	17,00	0,17
02.10	Uemasi	116,34	4,83	02.22	Uempanapa	21,00	0,87
02.11	Tirongan Atas	59,00	2,45	02.23	Lemowaliya	30,00	1,25
03.	**SOYO JAYA**	**605,51**	**100,00**				
03.01	Tamainusi	127,75	21,10	03,06	Bau	68,53	11,32
03.02	Tambayoli	114,42	18,990	03.07	Malino Jaya	15,00	2,48
03.03	Lembah Sumara	50,00	8,26	03.08	Malino	121,45	20,06
03.04	Tandoyondo	66,36	10,96	03.09	Sumara Jaya	25,00	4,13
03.05	Panca Makmur	17,00	2,81	03.10	ToddopuliUebangke (G)	…	…
04.	**PETASIA**	**646,34**	**100,00**				
04.01	Koromatantu	69,00	10,68	04.06	Kel. Kolonodale	30,57	4,73
04.02	Korololama	45,28	7,01	04.07	Kel. Bahontula	68,69	10,63
04.03	Korolaki	35,48	5,49	04.08	Kel. Bahoue	45,46	7,03
04.04	Gililana	107,40	16,62	04.09	Ganda-Ganda	161,18	24,94
04.05	Koya	65,28	10,10	04.10	Tanuge	18,00	2,78
05.	**PETASIA BARAT**	**480,30**	**100,00**				
05.01	Onepute	55,00	11,82	05.06	Tiu	69,30	14,43
05.02	Sampalowo	65,57	14,09	05.07	Togomulya	8,00	1,67
05.03	Moleono	65,31	14,04	05.08	Tontowea	101,06	21,04
05.04	Mondowe	40,51	8,71	05.09	Tandaku Jaya	15,02	3,13
05.05	Maralee	45,52	9,78	05.10	Ululaa	15,01	3,12
06.	**PETASIA TIMUR**	**509,77**	**100,00**				
06.01	Masara	3,40	0,67	06.07	Tompira	65,00	12,75
06.02	Molores	60,00	11,77	06.08	Bunta	67,65	13,27
06.03	Mohoni	55,31	10,85	06,09	Keuno	25,00	4,90
06.04	Molino	24,00	4,71	06.10	Polewali	6,35	1,25
06.05	Towara	87,38	19,69	06.11	Towara Pantai (G)	13,00	2,55
06.06	Bungintimbe	92,45	18,14	06.12	Peboa (G)	10,23	2,01

NO.	Kecamatan/ Kelurahan / Desa	Luas Wilayah (Km^2)	(%)	No	Kecamatan/ Kelurahan / Desa	Luas Wilayah (Km^2)	(%)
07.	**LEMBO**	**675,23**	**100,00**				
07.01	Lembobaru	12,45	1,84	07.08	Beteleme	21,71	3,22
07.02	Korobonde	10,04	1,49	07.08	Tinompo	28,85	4,27
07.03	Wawopada	143,02	21,18	07.08	Korowalelo	64,62	9,57
07.04	Waraa	12,13	1,80	07.11	Kumpi	16,29	2,41
07.05	Tingkeao	40,23	5,96	07.12	Korompeli	72,40	10,72
07.06	Mora	34,48	5,11	07.13	Lemboroma	88,11	13,05
07.07	Uluanso	31,29	4,63	07.14	Korowou	99,61	14,75
08.	**LEMBO RAYA**	**657,61**	**100,00**				
08.01	Dolupo Karya	169,90	25,84	08.09	Potangoa	43,00	6,54
08.02	Poona	40,00	6,08	08.09	Bintangor Mukti	73,04	11,11
08.03	Mandula	60,00	9,12	08.08	Jamor Jaya	60,29	9,17
08.04	Petumbea	48,00	7,30	08.09	Paawaru	60,17	9,15
08.05	Ronta	40,00	6,08	08.10	Lembobelala	63,21	9,61
09.	**MORI ATAS**	**1.508,81**	**100,00**				
09.01	Gontara	98,91	6,56	09.08	Taende	194,28	12,88
09.02	Kasingoli	83,75	5,55	09.09	Ensa	189,78	12,58
09.03	Lee	100,85	6,68	09.10	Peonea	97,17	6,44
09.04	Saemba	123,54	8,19	09.11	Kolaka	271,12	17,97
09.05	Tomui Karya	12,00	0,80	09.12	Lanumor	120,99	8,02
09.06	Tomata	92,71	6,14	09.13	Saemba Walati	17,90	1,19
09.07	Londi	90,81	6,02	09.14	Pambarea	15,00	0,99
10.	**MORI UTARA**	**1.048,93**	**100,00**				
10.01	Era	198,88	18,96	10.05	Tiwaa	91,28	8,70
10.02	Peleru	111,61	10,64	10.06	Lembontonara	189,50	18,07
10.03	Wawondula	108,98	10,39	10.07	Mayumba	103,62	9,88
10.04	Tabarano	125,38	11,95	10.08	Tamonjengi	119,68	11,41

Sumber: Profil Kabupaten Morowali Utara

Profil singkat kecamatan-kecamatan di wilayah Kabupaten Morowali Utara sebagai berikut:

Mamosalato : Luas wilayah 1.464,99 Km^2 atau sebesar 14,64 persen dari total luas wilayah Kabupaten Morowali Utara, berjarak 50 Mil Laut dari IbuKota Kabupaten Morowali Utara, yang hanya dapat ditempuh dengan kendaraan Laut dengan IbuKota Kecamatan Tanasumpu.

Bungku Utara	:	Memiliki jarak 45 Mil Laut dari IbuKota Kabupaten Morowali Utara ditempuh dengan kendaraan Laut, dengan luas wilayah 2.406,79 Km² atau sebesar 24,06 persen dari total wilayah Kabupaten Morowali Utara dan merupakan yang terluas di Kabupaten Morowali Utara dengan IbuKota Kecamatan di Baturube
Petasia Barat	:	Merupakan Kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil di Kabupaten Morowali Utara dengan ibuKota Kecamatan di Tiu, memiliki luas wilayah 480,30 Km²atau 4,80 persen dari total luas wilayah Kabupaten Morowali Utara berjarak 16 Km dari IbuKota Kabupaten;
Petasia Timur	:	IbuKota Kecamatan Petasia Timur di Bungintimbe dengan Luas wilayah sebesar 509,77 Km² atau 5,10 persen dari total luas wilayah Kabupaten Morowali Utara dan berjarak 34 Km dari IbuKota Kabupaten ditempuh dengan kendaraan darat;
Lembo	:	Berjarak 34 Km dari IbuKota Kabupaten Morowali Utara, memiliki Luas wilayah 675,23 Km² atau 6,75 persen dari total wilayah Kabupaten Morowali Utara dengan IbuKota Kecamatan di Beteleme;
Lembo Raya	:	Luas wilayah Kecamatan Lembo Raya seluas 657,61 Km², berjarak kurang lebih 44 Km dari IbuKota Kabupaten Morowali Utara, dengan IbuKota Kecamatan di Petumbea;
Mori Atas	:	Luas wilayah 1.508.81 Km² atau 15,08 persen dari total wilayah Kabupaten Morowali Utara berjarak 85 Km dari IbuKota Kabupaten Morowali Utara dengan IbuKota Kecamatan desa Tomata;
Mori Utara	:	Luas wilayah 1.048,93 Km² atau 10,48 persen dari total luas wilayah Kabupaten Morowali Utara dan berjarak 90 Km dari IbuKota Kabupaten, dengan IbuKota Kecamatan di Mayumba.

Batas wilayah Kabupaten Morowali Utara di Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Buyuntaripa, Desa Korondoda, Desa Bugi Kecamatan Tojo dan Desa Rompi Kecamatan Ulubongka Kabupaten TojoUna-Una. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Rata, Desa Gunung Kramat, Desa Matawa, Desa Mangkapa Kecamatan Toili Barat Kabupaten Banggai dan Laut Banda; Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Solonsa Kecamatan Wita Ponda Kabupaten Morowali dan Desa Nuha, Desa Matano, dan Desa Sorowako Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan; dan Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Uelene, Desa Mayasari Kecamatan Pamona Selatan dan Desa Pancasila, Desa Kamba, Desa Matialemba, Desa Kancu'u dan Desa Masewe Kecamatan Pamona Timur Kabupaten Poso.

6.2 Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas

Pemerintah Kabupaten Morowali Utara adalah Organisasi Pemerintah Daerah yang bersifat Nir Laba (tidak bertujuan mencari keuntungan), dengan kegiatan pokok adalah pemberian layanan kepada Masyarakat, dan Peningkatan kesejahteraan rakyat dengan sasaran pembangunan yang terarah, Pemerintah Kabupaten Morowali Utara sebagai bagian dari Pemerintah pusat.

Selain menyelenggarakan kewenangannya sendiri sesuai kewenangan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Morowali Utara juga menyelenggarakan kewenangan Pemerintah pusat yang dilimpahkan ke daerah, baik melalui desentralisasi maupun tugas pembantuan.

Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan di Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020, meliputi Urusan Wajib Pelayananan Dasar, Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan dan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang, yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD yaitu:

Tabel 6.3
Unit Organisasi

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN / BIDANG	OPD PELAKSANA
I	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
1	Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		SD INPRES 5 KOLONODALE
		INPRES GANDA-GANDA
		SD INPRES KOYA
		SD INPRES LEMBAH SUMARA
		SD INPRES SUMARA JAYA
		SD INPRES TANDOYONDO
		SD INPRES TIU
		SD NEGERI 1 BATURUBE
		SD NEGERI 1 BETELEME
		SD NEGERI 1 BUNTA
		SD NEGERI 1 KOLAKA
		SD NEGERI 1 KOLONODALE
		SD NEGERI 1 KOROWOU
		SD NEGERI 1 PELERU
		SD NEGERI 1 TALIWAN
		SD NEGERI 1 TANANAGAYA
		SD NEGERI 1 TANASUMPU
		SD NEGERI 1 TOMATA
		SD NEGERI 2 BATURUBE
		SD NEGERI 2 BETELEME
		SD NEGERI 2 BUNTA
		SD NEGERI 2 KOLAKA
		SD NEGERI 2 KOLONODALE
		SD NEGERI 2 KOROWOU
		SD NEGERI 2 PELERU
		SD NEGERI 2 TALIWAN
		SD NEGERI 2 TANASUMPU
		SD NEGERI 2 TOMATA
		SD NEGERI 3 BATURUBE
		SD NEGERI 3 KOLONODALE
		SD NEGERI 4 KOLONODALE

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN / BIDANG	OPD PELAKSANA
		SD NEGERI ANDOLIA
		SD NEGERI BAU
		SD NEGERI BENCUE
		SD NEGERI BIMOR JAYA
		SD NEGERI BINTAGOR MUKTI
		SD NEGERI BOBA
		SD NEGERI BUNGINTIMBE
		SD NEGERI DASAR
		SD NEGERI DOLUPO KARYA
		SD NEGERI ENSA
		SD NEGERI ERA
		SD NEGERI GILILANA
		SD NEGERI GIRI MULYA
		SD NEGERI JAMOR JAYA
		SD NEGERI KALOMBANG
		SD NEGERI KAMUNJANG
		SD NEGERI KARAWASA
		SD NEGERI KASINGOLI
		SD NEGERI KEUNO
		SD NEGERI KOLO ATAS
		SD NEGERI KOLO BAWAH
		SD NEGERI KOROBONDE
		SD NEGERI KOROLOLAMA
		SD NEGERI KOROMATANTU
		SD NEGERI KOROMONTO
		SD NEGERI KORONGKAMA
		SD NEGERI KOROWALELO
		SD NEGERI KUMPI
		SD NEGERI LAMBOLO
		SD NEGERI LANUMOR SMP NEGERI SATAP MORI ATAS
		SD NEGERI LEE
		SD NEGERI LEMBOBARU
		SD NEGERI LEMBOBELALA
		SD NEGERI LEMBONTONARA
		SD NEGERI LEMBOROMA

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN / BIDANG	OPD PELAKSANA
		SD NEGERI LEMO
		SD NEGERI LEMOWALIA
		SD NEGERI LONDI
		SD NEGERI LOSONG
		SD NEGERI MALEI
		SD NEGERI MALINO
		SD NEGERI MALINO JAYA
		SD NEGERI MATUBE
		SD NEGERI MAYUMBA
		SD NEGERI MOHONI
		SD NEGERI MOKOTO
		SD NEGERI MOLEONO
		SD NEGERI MOLINO
		SD NEGERI MOLORES
		SD NEGERI MOMO
		SD NEGERI MONDOWE
		SD NEGERI ONE PUTE
		SD NEGERI PANCA MAKMUR
		SD NEGERI PANDAUKE
		SD NEGERI PARAMBA
		SD NEGERI PARAWI
		SD NEGERI PEBOA
		SD NEGERI PEILIA
		SD NEGERI PEONEA
		SD NEGERI PETUMBEA
		SD NEGERI POKEANG
		SD NEGERI PONTANGOA
		SD NEGERI POONA
		SD NEGERI POSANGKE
		SD NEGERI SAEMBA
		SD NEGERI SAEMBA WALATI
		SD NEGERI SALUBIRO
		SD NEGERI SILITI
		SD NEGERI TADAKU
		SD NEGERI TAENDE

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN / BIDANG	OPD PELAKSANA
		SD NEGERI TAMAINUSI
		SD NEGERI TAMBALE
		SD NEGERI TAMBAROBONE
		SD NEGERI TAMBAYOLI
		SD NEGERI TAMONJENGI
		SD NEGERI TANAUGE
		SD NEGERI TINGKEAO
		SD NEGERI TINGKULUI
		SD NEGERI TINOMPO
		SD NEGERI TIRONGAN ATAS
		SD NEGERI TIRONGAN BAWAH
		SD NEGERI TIWAA
		SD NEGERI TOGO MULYA
		SD NEGERI TOKALA ATAS
		SD NEGERI TOKONANAKA
		SD NEGERI TOMPIRA
		SD NEGERI TOMUI KARYA
		SD NEGERI TONTOWEA
		SD NEGERI TOWARA
		SD NEGERI TOWI
		SD NEGERI UEBANGKE
		SD NEGERI UEMALINGKU
		SD NEGERI UEMASI
		SD NEGERI UERURU
		SD NEGERI ULULAA
		SD NEGERI UNDORO
		SD NEGERI UNGKEA
		SD NEGERI WARAA
		SD NEGERI WAWOPADA
		SD NEGERI WINANGABINO
		SEKOLAH DASAR NEGERI MANDULA
		SD SMP SATU ATAP NEGERI LEMBO
		SMP NEGERI 1 BUNGKU UTARA
		SMP NEGERI 1 LEMBO
		SMP NEGERI 1 LEMBO RAYA

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN / BIDANG	OPD PELAKSANA
		SMP NEGERI 1 MAMOSALATO
		SMP NEGERI 1 MORI ATAS
		SMP NEGERI 1 MORI UTARA
		SMP NEGERI 1 PETASIA
		SMP NEGERI 1 PETASIA BARAT
		SMP NEGERI 1 PETASIA TIMUR
		SMP NEGERI 1 SOYO JAYA
		SMP NEGERI 2 BUNGKU UTARA
		SMP NEGERI 2 LEMBO RAYA
		SMP NEGERI 2 MAMOSALATO
		SMP NEGERI 2 MORI ATAS
		SMP NEGERI 2 PETASIA
		SMP NEGERI 2 PETASIA BARAT SATU ATAP
		SMP NEGERI 2 PETASIA TIMUR SATU ATAP
		SMP NEGERI 2 SOYO JAYA
		SMP NEGERI 3 LEMBO
		SMP NEGERI 3 MAMOSALATO SATU ATAP
		SMP NEGERI 3 MORI ATAS SATAP
		SMP NEGERI 3 MORI UTARA SATU ATAP
		SMP NEGERI 3 PETASIA BARAT SATU ATAP
		SMP NEGERI 3 PETASIA TIMUR
		SMP NEGERI 3 SATU ATAP BUNGKU UTARA
		SMP NEGERI 4 BUNGKU UTARA SATU ATAP
		SMP NEGERI 4 LEMBO
		SMP NEGERI 4 LEMBORAYA
		SMP NEGERI 4 MORI ATAS SATU ATAP
		SMP NEGERI 4 MORI UTARA
		SMP NEGERI 4 PETASIA TIMUR SATU ATAP
		SMP NEGERI 7 BUNGKU UTARA
		SMPN 2 LEMBO
		SMPN 2 MORI UTARA
		SMPN 3 PETASIA SATU ATAP
		SMPN 4 MAMOSALATO SATU ATAP
		SMPN 5 BUNGKU UTARA SATU ATAP
		SMPN 5 MORI ATAS SATU ATAP

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN / BIDANG	OPD PELAKSANA
		SMPN NEGERI 6 BUNGKU UTARA SATU ATAP
		SDN NEGERI SEA
		SDN UEPAKATU
2	**Kesehatan**	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS PETUMBEA
		PUSKESMAS MAYUMBA
		PUSKESMAS PANDAUKE
		PUSKESMAS BATURUBE
		PUSKESMAS TAMBAYOLI
		PUSKESMAS PANCA MAKMUR
		PUSKESMAS LEE
		PUSKESMAS TOMATA
		PUSKESMAS BETELEME
		PUSKESMAS KOLONODALE
		PUSKESMAS MOLINO
		PUSKESMAS ANUTOLUWU
		PUSKESMAS LIJO
		PUSKESMAS WONGKO NDAYA
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOLONODALE
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAERAH
4	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
5	Sosial	DINAS SOSIAL DAERAH
II	**URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR**	
1	Tenaga Kerja	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	Lingkungan Hidup	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
3	Administrasi Kependudukan dan Capil	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4	Pemberdayaan Masyarakat Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
5	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
6	Perhubungan	DINAS PERHUBUNGAN, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
7	Komunikasi dan Informatika	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
8	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN / BIDANG	OPD PELAKSANA
9	Penanaman Modal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
10	Perpustakaan	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
III	**URUSAN PILIHAN**	
1	Kelautan dan Perikanan	DINAS PERIKANAN DAERAH
2	Pariwisata	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
3	Pertanian	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DAERAH
IV	**URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG**	
1	Administrasi Pemerintahan	BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN
		BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
		BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM
		BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN PEREKONOMIAN
		BAGIAN HUKUM
		BAGIAN ORGANISASI
		BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
		BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
		BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
2	Pengawasan	INSPEKTORAT DAERAH
3	Perencanaan	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
4	Keuangan	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
		BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	Kepegawaian	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
6	Kewilayahan-Administrasi Pemerintahan	KECAMATAN PETASIA
		KECAMATAN PETASIA TIMUR
		KECAMATAN PETASIA BARAT
		KECAMATAN BUNGKU UTARA
		KECAMATAN SOYO JAYA
		KECAMATAN MAMOSALATO
		KECAMATAN LEMBO
		KECAMATAN LEMBO RAYA
		KECAMATAN MORI ATAS
		KECAMATAN MORI UTARA
7	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

6.3 Lembaga Legislatif

Pada periode pelaporan keuangan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Morowali Utara dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh dua orang Wakil Ketua.

1. Ketua DPRD	:	Warda Dg. Mamala, SE
2. Wakil Ketua DPRD	:	1. Hj.Megawati Ambo Asa.S.I.P
		2. H. AMBO MAI

6.4 Pemimpin Lembaga Eksekutif

Susunan Lembaga Eksekutif Kabupaten Morowali Utara saat ini adalah sebagai berikut:

1. Bupati	:	Dr. dr. Delis Julkarson Hehi, MARS
2. Wakil Bupati	:	H. Djira K.S.Pd, M.Pd
3. Sekretaris Daerah	:	Ir.Musda Guntur, MM

6.5 Tugas pokok Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara

Tugas pokok Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Untuk lebih memudahkan melaksanakan Tugas Pokok Pemerintah Daerah Morowali Utara menjabarkan pelimpahan kewenangan yang diamanatkan oleh undang-undang melalui perangkat daerah, baik melalui dinas, kantor, maupun badan, dengan menetapkan:

1. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 3 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara;
2. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 4 Tahun 2013, tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara;
3. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Morowali Utara ;
4. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomo:r 6 Tahun 2013 tentang organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan lembaga Teknis Daerah Kabupaten Morowali Utara;

Dalam melaksanakan tugas pokok pada Tahun pelaporan 2020 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dibantu oleh seorang Sekretaris Daerah, seorang Sekretaris Dewan, 17 orang Kepala Dinas, 6 orang Kepala Badan, 1 orang Inspektur Kabupaten, 1 orang Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, 10 orang Camat dan 13 kepala puskesmas

6.6 Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara

Berdasarkan data dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara Jumlah SDM Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara Per 31 Desember 2024 sebanyak 3.257 orang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. 4
Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Golongan

NAMA GOLONGAN	ESELON 1	ESELON 2	ESELON 3	ESELON 4	ESELON 5	TENAGA FUNGSIONAL			STAF	JUMLAH PEGAWAI
						T.PENDIDIKAN	T.KESEHATAN	T.LAINNYA		
Golongan IV/e	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan IV/d	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Golongan IV/c	-	15	-	-	-	6	2	2	-	25
Golongan IV/b	-	-	31	1	-	174	24	12	5	261
Golongan IV/a	-	-	69	16	-	176	25	9	13	309
SUB JUMLAH	-	-	**100**	**17**	-	**356**	**51**	**23**	**18**	**596**
Golongan III/d	-	-	37	99	-	206	91	116	26	575
Golongan III/c	-	-	3	57	-	107	90	34	42	333
Golongan III/b	-	-		34	-	422	162	37	121	776
Golongan III/a	-	-		10	-	75	128	20	287	520
SUB JUMLAH	-	-	**40**	**200**	-	**810**	**471**	**207**	**476**	**2204**
Golongan II/d	-	-	-	-	-	9	38	5	141	193
Golongan II/c	-	-	-	-	-	15	96	5	75	191
Golongan II/b	-	-	-	-	-	9	2	5	37	53
Golongan II/a	-	-	-	-	-	-	-	9	10	19
SUB JUMLAH	-	-	-	-	-	**33**	**136**	**24**	**263**	**456**
Golongan I/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan I/c	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Golongan I/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan I/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB JUMLAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	**31**	**140**	**217**		**1199**	**658**	**254**	**758**	**3.257**

Sumber: BPKAD

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kabupaten Morowali Utara per 31 Desember 2024 kualifikasi pendidikan, perangkat golongan dan jumlah pejabat struktural dan fungsional Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Morowali Utara berjumlah 3.257 pegawai.

Informasi mengenai dasar hukum pemugutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari tiap jenis Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 6. 5
Dasar Hukum Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah

No	Uraian	Dasar Hukum
1	PAJAK HOTEL	PERDA NO. 14 TAHUN 2015 TENTANG PAJAK DAERAH
2	PAJAK RESTORAN	PERDA NO. 14 TAHUN 2015 TENTANG PAJAK DAERAH
3	PAJAK HIBURAN	PERDA NO. 14 TAHUN 2015 TENTANG PAJAK DAERAH
4	PAJAK REKLAME	PERDA NO. 14 TAHUN 2015 TENTANG PAJAK DAERAH
5	PBB-P2	PERDA NO. 14 TAHUN 2015 TENTANG PAJAK DAERAH
6	BPHTB	PERDA NO. 14 TAHUN 2015 TENTANG PAJAK DAERAH

No	Uraian	Dasar Hukum
7	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN GOL, C	PERDA NO. 14 TAHUN 2015 TENTANG PAJAK DAERAH
8	RET, PELAYANAN KESEHATAN	PERDA NO. 13 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
9	RET, PELAYAYAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM	PERDA NO. 15 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
10	RET, PELAYANAN PASAR	PERDA NO. 15 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
11	RET, PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	PERDA NO. 15 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
12	RET, PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH - PENYEWAAN TANAH DAN BANGUNAN	PERDA NO. 16 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
13	RET, PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH - KENDARAAN BERMOTOR	PERDA NO. 16 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
14	RET, TERMINAL	PERDA NO. 16 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
15	RET, TEMPAT KHUSUS PARKIR	PERDA NO. 16 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
16	RET, RUMAH POTONG HEWAN	PERDA NO. 16 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
17	RET, PELAYAYAN KEPELABUHANAN	PERDA NO. 16 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
18	RET, IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN	PERDA NO. 17 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
19	RET, IZIN GANGGUAN TEMPAT USAHA/KEGIATAN KEPADA BADAN	PERDA NO. 17 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
20	RET, PEMBERIAN IZIN TRAYEK KEPADA BADAN	PERDA NO. 17 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
21	PEMBERIAN IZIN USAHA PERIKANAN KEPADA ORANG PRIBADI	PERDA NO. 17 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

6.7 Penjelasan tentang Kewajiban Kontingensi

Sesuai dengan Buletin Teknis Nomor 22 tentang Akuntansi Utang Berbasis Akrual. Kewajiban kontingensi adalah kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu, dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah; atau kewajiban kini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu, tetapi tidak diakui karena tidak terdapat kemungkinan besar *(not probable)* pemerintah mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya atau jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal. Terkait Kewajiban Kontingensi ini, adapun kasus-kasus yang sedang berada dalam masa sidang atau sudah masuk kepengadilan sampai dengan 31 Desember 2023 yaitu:

Tabel 6. 6

Penanganan Kasus Pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara/Tingkat Pengadilan Lainnya Dalam Proses Persidangan

No	Nomor Perkara/Para Pihak	Objek Sengketa	Tanggal Mulai Penanganan Kasus	Status Perkara
1.	36/G/2021/PTUN.PL (PEMDA MELAWAN MOH.YAMIN ABD.SAMAD, DKK)	KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI UTARA NOMOR: 821/122/RHS/KEP-B.MU/III/2021 TANGGAL 12 MARET 2021 TENTANG PEMBATALAN KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI UTARA NOMOR: 821.23/01/KEP-B.MU/I/2021; NOMOR: 821.24/02/KEP-B.MU/I/2021; NOMOR: 821/03/KEP-B.MU/I/2021; NOMOR: 821.23/04/KEP-B.MU/I/2021; NOMOR: 821.24/05/KEP-B.MU/I/2021; NOMOR: 821.22/07/KEP-B.MU/II/2021; NOMOR: 821.23/08/KEP-B.MU/II/2021; NOMOR: 821.24/09/KEP-B.MU/II/2021 DAN NOMOR: 821/010/KEP-B.MU/II/2021	19 JULI 2021	DALAM PROSES BANDINGPTTUN MAKASSAR (PEMERIKSAAN PENGADILAN TINGGI TUN MAKASSAR)
2.	78/G/2021/PTUN.PL (PEMDA MELAWAN SAHARUDIN BU'TUNG	KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI UTARA NOMOR: 188.45/KEP-B.MU/0049.A/V/2014 TENTANG PENETAPAN RUAS-RUAS JALAN MENURUT STATUSNYA SEBAGAI JALAN KABUPATEN DAN JALAN DESA DI KABUPATEN MOROWALI UTARA	24 NOVEMBER 2021	DALAM PROSES PERSIDANGAN (PENYERAHAN KESIMPULAN)
3.	/G/TF/2021/PTUN.PL (PEMDA MELAWAN PT. ODDELL INDONESIA)	TINDAKAN PEMDA YANG TIDAK MENYERAHKAN DOKUMEN IZIN USAHA PERTAMBANGAN PT. ODDELL INDONESIA BERUPA KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR 540.3/SK.020/DESDM/IV/2010 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI PT. ODDELL INDONESIA TANGGAL 20 APRIL 2010 BESERTA DOKUMEN PENDUKUNGNYA KEPADA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	30 DESEMBER 2021	DALAM PROSES PERSIDANGAN (MENUNGGU PUTUSAN HAKIM MAJELIS)
4.	23/G/TF/2022/PTUN.PL (PEMDA MELAWAN	TINDAKAN PEMDA YANG TIDAK MENYERAHKAN DOKUMEN IZIN USAHA PERTAMBANGAN PT. BULUNGAN SEJAHTERA MINING	28 MARET 2022	DALAM PROSES PERSIDANGAN TAHAP

No	Nomor Perkara/Para Pihak	Objek Sengketa	Tanggal Mulai Penanganan Kasus	Status Perkara
	PT. BULUNGAN SEJAHTERA MINING)	BERUPA KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR 540.3/SK.015/DESDM/VI/2011 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI PT. BULUNGAN SEJAHTERA MINING TANGGAL 16 JUNI 2011 KEPADA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH		(PEMERIKSAAN AWAL)
5	13/Pdt.G/2022/PN.Pso (BPBD MELAWAN FIRMANSYAH)	WANPRESTASI ATAS PENGERJAAN TANGGUL DIWILAYAH BUNGKU UTARA	22 MARET 2022	DALAM PROSES (MEDIASI)

BAB VII
PENUTUP

Sebagai penutup Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2024 disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Keuangan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara disusun dan disajikan sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024;
2. Total realisasi Pendapatan – LRA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.613.844.117.767,99 atau 96,88% dari anggaran pendapatan yang ditargetkan pada Tahun 2023 sebesar Rp1.665.857.452.335,00;
3. Total realisasi Belanja dan Transfer Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.547.446.405.511,66 atau 92,91% dari anggaran belanja yang direncanakan pada Tahun 2024 sebesar Rp1.665.492.192.835,00;
4. Total realisasi penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp52.299.328.048,49 atau 99,94% dari anggaran penerimaan pembiayaan daerah yang ditargetkan pada Tahun 2024 sebesar Rp52.332.702.392,00;
5. Total realisasi pengeluaran penerimaan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp50.974.849.892,00 atau 96,73% dari anggaran sebesar Rp52.697.961.892,00;
6. Total Saldo Pendapatan – LO Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.360.578.512.826,99;
7. Total Saldo Beban Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.248.749.417.403,79;
8. Nilai Aset yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Morowali Utara per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.506.434.174.755,29;
9. Nilai Kewajiban yang masih menjadi tanggungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara per 31 Desember 2024 sebesar Rp119.682.720.180,87;
10. Nilai Ekuitas yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Morowali Utara per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.386.751.454.574,42;
11. Arus Kas Tahun 2024 terdiri dari:

a) Arus masuk Kas dari aktivitas operasi sebesar	Rp	1.610.983.654.167,99
b) Arus keluar Kas dari aktivitas operasi sebesar	Rp	1.239.601.187.458,48
c) Arus masuk Kas dari aktivitas investasi sebesar	Rp	2.860.463.600,00
d) Arus keluar Kas dari aktivitas investasi sebesar	Rp	309.983.662.053,18
e) Arus Kas masuk dari aktivitas Pendanaan sebesar	Rp	0,00
f) Arus keluar Kas dari aktivitas Pendanaan sebesar	Rp	48.836.405.892,00
g) Arus masuk Kas dari aktivitas transitoris sebesar	Rp	109.343.513.811,50
h) Arus keluar Kas dari aktivitas transitoris sebesar	Rp	109.343.513.811,50
i) Saldo akhir Kas per 31 Desember 2024 sebesar	Rp	67.722.190.412,82

Demikian laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2024 ini kami susun, agar dapat dipergunakan oleh semua pihak yang berkepentingan di Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Pusat Republik Indonesia di Jakarta dan dapat memperjelas dalam memahami Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2024.

BUPATI MOROWALI UTARA,

Dr.dr.DELIS JULKARSON HEHI, MARS



DAFTAR LAMPIRAN



LAMPIRAN I :

DAFTAR RINCIAN PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN

RINCIAN PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN TAHUN 2024

Lampiran 1

NO	TANGGAL	KETERANGAN	JUMLAH
1	02/01/2024	Brinidja Span	1,245,000.00
2	03/01/2024	Citiidjx	1,743,175.00
3	03/01/2024	Setoran Tunai Diskominfo	2,684,530.50
4	03/01/2024	Setoran Tunai Diskominfo	3,044,687.42
5	03/01/2024	Atm Transfer Sahrul Bank Mandiri	34,682,024.42
6	04/01/2024	Setoran Tunai Cv 27	103,698,593.42
7	05/01/2024	Setoran Tunai Cv Karya Buana Mandiri	105,698,593.42
8	05/01/2024	Setoran Tunai Cv Insan Anda Mandiri	115,698,593.42
9	08/01/2024	Setoran Tunai Kaleb T Mongkarembo	136,674,322.64
10	08/01/2024	Setoran Tunai Kaleb T Mongkarembo	158,006,322.64
11	09/01/2024	Brinidja Kasda Desember 2023	162,339,422.64
12	09/01/2024	Setoran Tunai Asgar	164,339,422.64
13	12/01/2024	Setoran Tunai Bagian Umum	166,339,422.64
14	15/01/2024	Bninidja	221,594,827.64
15	18/01/2024	Pengembalian Utang Iuran Semester Ii Thn 2023 (Daip, Tht, Jkk & Jkm) Kepada Pemda Morowali Utara	222,763,903.64
16	18/01/2024	Setoran Tunai Cv Insan Anda Mandiri (Temuan Bpk)	232,763,903.64
17	18/01/2024	Setoran Tunai Ilham Bahruddin	232,768,844.64
18	18/01/2024	Setoran Tunai Cv Karya Buana Mandiri (Pembayaran Temuan Bpk)	234,768,844.64
19	22/01/2024	Setoran Tunai Kas Daerah Morowali Utara	237,268,844.64
20	23/01/2024	Setoran Tunai Feby Veronica Kelebihan Bayar Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung	237,756,844.64
21	24/01/2024	Setoran Tunai Disdikbud Pengembalian Temuan Perjalan Dinas	238,496,844.64
22	24/01/2024	Setoran Tunai Uptb Kec Mori Atas	238,497,844.64
23	24/01/2024	Ob Peng Dana Gercep Yang Tidak	246,497,844.64
24	25/01/2024	Setoran Tunai Bagian Umum Pengembalian Kelebihan Pengadaan Genset Rujab	251,497,844.64
25	26/01/2024	Setoran Tunai Kas Daerah Kab. Morowali Utara Peminjaman Gedung Morokoa	253,997,844.64
26	28/01/2024	506293560872_Atmb_Trf_6013011047181424_-Bank_Bri_134-Bank_Sulteng 4010103206826	254,100,844.64
27	30/01/2024	Setoran Tunai Hj Zamrud H	275,827,948.64
28	30/01/2024	Setoran Tunai Danang Argo Yowono (Retribusi Dpuprd)	475,240,723.64
29	31/01/2024	Setoran Tunai Dinas Perpustakaan Pengembalian Perjalanan Dinas	476,140,723.64
30	31/01/2024	Setoran Tunai Set Dprd Pengembalian Temuan Inspektorat 2023 Perjalanan Dinas	491,857,723.64
31	31/01/2024	Setoran Tunai Dinas Perpustakaan Pengembalian Perjalanan Dinas	492,757,723.64
32	31/01/2024	Setoran Tunai Dinas Perpustakaan Pengembalian Perjalanan Dinas	492,957,723.64
33	31/01/2024	Setoran Tunai Dinas Perpustakaan Pengembalian Perjalanan Dinas	493,157,723.64
34	31/01/2024	Setoran Tunai Dinas Perpustakaan Pengembalian Perjalanan Dinas	493,357,723.64
35	31/01/2024	Setoran Tunai Dinas Perpustakaan Pengembalian Perjalanan Dinas	493,557,723.64
36	31/01/2024	Setoran Tunai Helmi	505,665,776.64
37	02/02/2024	Setoran Tunai Famiati Paranggai	506,000,071.64
38	02/02/2024	Setoran Tunai Indrayati Laguni	506,227,412.64
39	07/02/2024	"Atmb_Trf _Arman Armanbank_ Mandiri_Rkud_Kab Morowali_Utara"	506,256,212.64
40	07/02/2024	"Atmb_Trf _Arman Armanbank_ Mandiri_Rkud_Kab Morowali_Utara"	506,584,100.64
41	07/02/2024	Setoran Tunai Dinas Pendidikan	506,784,100.64
42	07/02/2024	Setoran Tunai Satpol Pp Dan Damkar	508,264,100.64
43	07/02/2024	Setoran Tunai Satpol Pp Dan Damkar	509,514,100.64
44	12/02/2024	Setoran Tunai Nurindah Sari	509,610,853.64
45	12/02/2024	Setoran Tunai Bappelitbangda	512,110,853.64
46	12/02/2024	Setoran Tunai	512,330,853.64
47	12/02/2024	Setoran Tunai Nurindah Sari	512,693,927.64
48	12/02/2024	Setoran Tunai	512,793,927.64
49	12/02/2024	Setoran Tunai	513,093,927.64
50	12/02/2024	Setoran Tunai Bok Pkm Lee	514,053,327.64
51	12/02/2024	Brinidja Taspen	524,971,967.64
52	13/02/2024	Setoran Tunai Cv Putra Bintang Pratama	531,811,967.64
53	13/02/2024	Setoran Tunai Aprianti Hamzah/Lisbeth	534,311,967.64
54	15/02/2024	Setoran Tunai Bok Pkm Beteleme	537,260,067.64
55	15/02/2024	Setoran Tunai Bok Pkm Beteleme	538,654,067.64
56	19/02/2024	Setoran Tunai Mariana	539,579,204.64
57	19/02/2024	Setoran Tunai Nurmiati	539,696,112.64
58	19/02/2024	Setoran Tunai Yofersan Lumbo	564,696,112.64
59	20/02/2024	Pengembalian Perjalanan Dinas Yapri Yanti Mandui	565,171,112.64
60	20/02/2024	Bninidja	619,371,889.64
61	20/02/2024	Setoran Tunai Cv Dwi Putri	669,371,889.64
62	20/02/2024	Setoran Tunai Rapiyudin Tomas	671,371,889.64
63	21/02/2024	Setoran Tunai	673,371,889.64
64	22/02/2024	Setoran Tunai Puskesmas Baturube	676,074,765.64
65	22/02/2024	Setoran Tunai Indah	679,242,765.64
66	23/02/2024	Setoran Tunai Puskesmas Petumbea	680,311,865.64
67	23/02/2024	Setoran Tunai Cv Palindo Cipta Nusantara	730,311,865.64
68	23/02/2024	Setoran Tunai Kecamatan Bungku Utara	730,831,865.64
69	26/02/2024	Setoran Tunai Puskesmas Beteleme	732,889,175.64
70	26/02/2024	Setoran Tunai H Djira K	733,039,175.64
71	26/02/2024	Setoran Tunai Reynaldi Alexander	733,339,175.64
72	26/02/2024	Setoran Tunai Erick Tansala	733,489,175.64
73	26/02/2024	Setoran Tunai Ir Musda Guntur	733,736,175.64
74	27/02/2024	Setoran Tunai Suwarton Pembayaran Perjalanan Dinas	733,836,175.64

Lampiran 1

NO	TANGGAL	KETERANGAN	JUMLAH
75	28/02/2024	Setoran Tunai Cv Manohara Ferdianus	735,041,239.64
76	28/02/2024	Setoran Tunai Helmi	747,546,877.64
77	29/02/2024	Setoran Tunai Cv Abil/Pengembalian Thn 2023	750,546,877.64
78	29/02/2024	Setoran Tunai Temuan Bpk Selisih Penyetoran Retribusi Kepelabuhanan	767,739,777.64
79	29/02/2024	Setoran Tunai Temuan Bpk Selisih Penyetoran Retribusi Kepelabuhanan	776,955,077.64
80	29/02/2024	S Etoran Tunai Dinas Perpustakaan Daerah	777,155,077.64
81	29/02/2024	Setoran Tunai Kantor Kec Petasia	777,694,717.64
82	29/02/2024	Setoran Tunai Dinas Perpustakaan Daerah	778,594,717.64
83	29/02/2024	Setoran Tunai Romel Erwin	779,454,717.64
84	01/03/2024	Setoran Tunai Cv Karya Buwana Mandiri	782,454,717.64
85	01/03/2024	Setoran Tunai Cv Insan Muda Mandiri	789,454,717.64
86	04/03/2024	Setoran Tunai Bend Smpn 1 Lemboraya	790,446,817.64
87	04/03/2024	Setoran Tunai Bend Smpn 1 Lemboraya	791,227,817.64
88	05/03/2024	Samsuddin Peng Temuan Perjadin 2019	791,682,817.64
89	05/03/2024	Apgreid P Mandake Peng Temuan Perjadin	791,802,817.64
90	05/03/2024	Peng Temuan Perjadin 2019 An Ferik Kongah	792,257,817.64
91	06/03/2024	Setoran Tunai Inspektorat	792,757,817.64
92	07/03/2024	Setoran Tunai Dinas Pendidikan	792,807,817.64
93	08/03/2024	Brinidja Taspen Kasda Feb 2024	812,063,277.64
94	08/03/2024	Setoran Tunai Bend Dlhd Amira Nurdin	812,213,277.64
95	15/03/2024	Setoran Tunai Bend Peng Dpuprpkpd Pengembalian Dana Temuan Bpk Atas Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Lijo-Menyor Cv Putra	948,937,641.88
96	15/03/2024	Setoran Tunai Bend Add Ronta	953,583,241.88
97	18/03/2024	Setoran Temuan Hasil Audit Ta. 2023 Dinas Capil	957,465,241.88
98	18/03/2024	Setoran Tunai Ahmad Yusril G (Peminjaman Gedung Morokoa)	959,465,241.88
99	18/03/2024	Setoran Tunai Cv Abil	961,056,286.88
100	19/03/2024	Setoran Tunai Bagian Protokol	962,156,286.88
101	19/03/2024	Setoran Tunai Kesbangpol - Yuliana L	963,556,286.88
102	20/03/2024	Setoran Tunai Lisbeth Simuru (Peminjaman Gedung Morokoa)	965,556,286.88
103	20/03/2024	Bninidja	1,017,374,337.88
104	20/03/2024	Setoran Tunai Bend Add Lembobaru	1,018,743,837.88
105	22/03/2024	Setoran Tunai Dinas Pertanian Pembayaran Kekurangan Timbunan Pilihan Atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Tani Korondui Desa Saemba Cv. Zeind Queen Perkasa	1,020,233,042.00
106	26/03/2024	Setoran Tunai Helmi Insentif Tagihan Angsuran Pt Bpr Modern Express Cab Morowali Utara Periode Maret 2024	1,032,338,380.00
107	27/03/2024	Setoran Tunai Elvira Merry C	1,033,488,380.00
108	28/03/2024	Setoran Tunai Amkit Lauo	1,034,488,380.00
109	28/03/2024	Setoran Tunai Rapiyudin Tomas	1,036,488,380.00
110	28/03/2024	Setoran Tunai Dinas Perpustakaan	1,037,388,380.00
111	28/03/2024	Setoran Tunai Dinas Perpustakaan	1,038,288,380.00
112	28/03/2024	Setoran Tunai Dinas Perpustakaan	1,038,488,380.00
113	01/04/2024	Setoran Tunai Kec Lemboraya	1,039,148,380.00
114	02/04/2024	Setoran Tunai Disdikbud	1,039,244,781.00
115	02/04/2024	Setoran Tunai Disdikbud	1,039,278,805.00
116	02/04/2024	Setoran Tunai Sat Pol Pp Dan Damkar	1,049,278,805.00
117	03/04/2024	Brinidja Billing Pajak Daerah (Alj3)	1,067,278,805.00
118	04/04/2024	Setoran Tunai Pt Karya Buwana Mandiri	1,069,278,805.00
119	04/04/2024	Setoran Tunai Cv Insan Muda Mandiri	1,072,278,805.00
120	04/04/2024	Brinidja Taspen;Pothutang Kasda Maret 2024;	1,076,486,105.00
121	05/04/2024	Setoran Tunai Bend Kec Mori Utara	1,077,385,105.00
122	05/04/2024	Setoran Tunai Megaminarti Baoli	1,077,885,105.00
123	16/04/2024	Setoran Tunai Isran Damati	1,079,885,105.00
124	17/04/2024	Setoran Tunai Set Dprd	1,083,960,105.00
125	18/04/2024	Setoran Tunai Dinas Pertanian	1,084,996,905.00
126	19/04/2024	Ob Sts Sp2D 000050/Ls Cv Suci Ramadhani	1,121,367,538.00
127	22/04/2024	Bninidja	1,182,618,128.00
128	23/04/2024	Setoran Tunai Danang Argo Produksi Usaha Daerah Air Minum Spam Ikk Dinas Pu	1,297,909,431.00
129	23/04/2024	Bmriidja Sts No.001Rsud Kdalev2024-Kelebihan Ongk	1,317,945,171.00
130	24/04/2024	Setoran Tunai Cv Siombo Pratama	1,318,696,155.00
131	24/04/2024	Setoran Tunai Nur Mubarak Malla	1,319,810,147.00
132	24/04/2024	Setoran Tunai Pembayaran Selisih/Kelebihan Atas Pengadaan 1 Laptop 1 Guru Oleh Pt Complus	1,321,098,435.00
133	24/04/2024	Setoran Tunai Pembayaran Selisih/Kelebihan Atas Pengadaan Peralatan Tik Tersebar 11 Sekolah Oleh	1,323,598,435.00
134	24/04/2024	Setoran Tunai Pembayaran Selisih/Kelebihan Atas Pengadaan Atk 1 Sekolah Laptop Oleh Pt Complus	1,325,481,318.00
135	25/04/2024	Setoran Tunai Wiwin	1,340,326,327.00
136	25/04/2024	_Atmb_Trf Adolfin_Pan	1,341,360,705.00
137	25/04/2024	Setoran Tunai Helmi	1,353,516,635.00
138	26/04/2024	Setoran Tunai Meyske	1,361,814,635.00
139	26/04/2024	Setoran Tunai Cv Baim Pratama	1,368,640,257.00
140	30/04/2024	Setoran Tunai Kantor Kec Mamosalato	1,368,900,257.00
141	02/05/2024	Setoran Tunai Nurpan	1,375,514,469.00
142	02/05/2024	Setoran Tunai Nurpan	1,381,482,800.00
143	03/05/2024	Pengembalian Kelebihan Honorarium Dinas Pendidikan	1,381,682,800.00
144	06/05/2024	Setoran Tunai Kantor Camat Lembo Raya	1,382,342,800.00
145	06/05/2024	Kelebihan Setor Sts Sisa Tu Bappeda	1,382,342,801.00

Lampiran 1

NO	TANGGAL	KETERANGAN	JUMLAH
146	07/05/2024	Brinidja Kasda April 2024;	1,382,742,801.00
147	08/05/2024	Pengembalian Kelebihan Bayar Insentif Imb Tahun 2021 Iqbal Hasyim Amin	1,384,000,623.00
148	08/05/2024	Pengembalian Kelebihan Bayar Insentif Imb Tahun 2022 Syarifudin Sinala	1,384,300,623.00
149	08/05/2024	Pengembalian Kelebihan Bayar Insentif Imb Tahun 2022 Hasni Palayukan	1,385,300,623.00
150	08/05/2024	Pengembalian Kelebihan Bayar Insentif Imb Tahun 2022 Hasni Palayukan	1,386,300,623.00
151	08/05/2024	Setoran Tunai Rapiyudin Tomas	1,388,300,623.00
152	08/05/2024	Pembayaran Peminjaman Gedung Morokoa Pada Kegiatan Pelepasan Sma 1 Petasia	1,390,300,623.00
153	13/05/2024	Dbsbidja Epn-Tb	1,398,162,502.00
154	13/05/2024	Dbsbidja Epn-Tb	1,404,790,634.00
155	13/05/2024	Pembayaran Kelebihan Tunjangan Anak Susyanti Alimbuto	1,405,063,662.00
156	14/05/2024	Pengembalian Kelebihan Bayar Insentif Imb Muh. Rum Semma	1,408,417,852.00
157	14/05/2024	Pengembalian Kelebihan Bayar Insentif Imb Muh. Rum Semma	1,416,388,812.00
158	14/05/2024	Setoran Tunai Kantor Camat Bungku Utara	1,416,871,812.00
159	15/05/2024	Pengembalian Kelebihan Bayar Imb Tahun 2021 Paulus Payung	1,419,371,812.00
160	15/05/2024	Pengembalian Kelebihan Bayar Imb Tahun 2022 Paulus Payung	1,421,871,812.00
161	15/05/2024	Atmb Trf	1,424,894,312.00
162	16/05/2024	Pengembalian Kelebihan Bayar Imb Riyanto	1,425,997,672.00
163	16/05/2024	Pengembalian Kelebihan Bayar Imb Abd Rahman	1,426,349,068.65
164	16/05/2024	Pengembalian Kelebihan Bayar Imb Abd Rahman	1,426,446,933.35
165	16/05/2024	Pengembalian Kelebihan Bayar Imb Ahniar L Salaka	1,427,550,285.35
166	16/05/2024	Pengembalian Temuan Bpk Kelebihan Pembayaran Pembangunan Gedung Pkm Tambayoli Cv. Karya Buwana Mandiri	1,429,550,285.35
167	16/05/2024	Pengembalian Temuan Bpk Kekurangan Volume Pekerjaan Peningkatan Jalan - Malino - Panca Makmur Cv. Insan Muda Mandiri	1,432,550,285.35
168	17/05/2024	Pengembalian Kelebihan Bayar Imb Habibi M	1,434,227,380.35
169	17/05/2024	Pengembalian Kelebihan Bayar Imb Moh. Andika Dermawan	1,435,904,475.35
170	17/05/2024	Pengembalian Kelebihan Bayar Imb Rivovan Alqadri	1,437,581,570.35
171	17/05/2024	Ob Sts Rsud Kolonodale Hasil Temuan Pemeriksaan Bpk Ri Kekurangan Volume	1,550,754,643.37
172	17/05/2024	Bninidja	1,611,634,483.37
173	20/05/2024	Pengembalian Temuan Bpk Tunjangan Umum Bend Pengeluaran Rsud Kolonodale	1,611,994,483.37
174	20/05/2024	Setoran Tunai Bend Add Pontangoa	1,617,115,083.37
175	20/05/2024	Pembayaran Kelebihan Tunjangan Suami Dan Beras Ni Made Susilawaty	1,617,498,193.37
176	22/05/2024	Pengembalian Kelebihan Bayar Imb Putu Pirda Karyana	1,618,756,015.37
177	22/05/2024	Pengembalian Kelebihan Bayar Imb Ida Ketut Putra Yasa	1,620,013,837.37
178	22/05/2024	Atmb Trf Heri Yanto	1,620,025,037.37
179	22/05/2024	Pembayaran Kelebihan Belanja Tunjangan Ketua Dprd Kab. Morut Set Dprd	1,639,525,037.37
180	22/05/2024	Atmb Trf Heri Yanto	1,639,536,237.37
181	27/05/2024	Pembayaran Temuan Inspektorat Kelebihan Kekurangan Volume Pekerjaan Pasang Paving Blok Cv Tiga Putra Pratama	1,643,105,577.37
182	28/05/2024	Pengembalian Kelebihan Bayar Imb Yanita Pradita	1,643,405,577.37
183	28/05/2024	Pengembalian Kelebihan Bayar Insentif 2022 Lili Kristiani Siombo	1,650,533,231.37
184	28/05/2024	Setoran Tunai Kantor Camat Lembo	1,650,797,231.37
185	28/05/2024	Setoran Tunai Hasmin Bada	1,651,947,231.37
186	29/05/2024	Jasa Giro Jan - April 2024 Pkm Beteleme	1,652,405,632.37
187	29/05/2024	Jasa Giro Jan - April 2024 Pkm Panca Makmur	1,652,859,804.37
188	29/05/2024	Jasa Giro Jan - April 2024 Pkm Tambayoli	1,653,177,593.37
189	29/05/2024	Jasa Giro Jan - April 2024 Pkm Mayumba	1,653,610,687.37
190	29/05/2024	Setoran Tunai Helmi	1,665,843,735.37
191	30/05/2024	Pengembalian Temuan Bpk Kekurangan Volumepekerjaan Peningkatanjalan Malino - Panca Makmur Cv Insan Muda Mandiri	1,668,843,735.37
192	30/05/2024	Pengembalian Temuan Bpk Atas Kelebihan Bayar Pkm Tambayoli Oleh Cv Karya Buwana Mandiri	1,670,843,735.37
193	30/05/2024	Pengembalian Kelebihan Bayar Imb Nurhayati	1,671,343,735.37
194	30/05/2024	Pengembalian Kelebihan Bayar Imb Mawar	1,671,843,735.37
195	30/05/2024	Pengembalian Kelebihan Bayar Imb Paulus Tabba	1,673,470,272.37
196	30/05/2024	Pengembalian Kelebihan Bayar Imb Aprian E Rantepatang	1,674,728,094.37
197	30/05/2024	Pengembalian Kelebihan Bayar Imb Steven Rijal	1,675,985,916.37
198	30/05/2024	Pengembalian Kelebihan Bayar Imb I Kt Ari Wiguna	1,677,243,738.37
199	31/05/2024	Pengembalian Kelebihan Bayar Imb Miranda W Mantouw	1,678,921,738.37
200	03/06/2024	Atmb Radiatul Cikal	1,678,935,238.37
201	03/06/2024	Atmb Radiatul Cikal	1,678,963,048.37
202	06/06/2024	Atmb Trf Bpk Andi Indra Sakti	1,685,631,930.37
203	07/06/2024	Brinidja Kasda Mei 2024	1,686,031,930.37
204	10/06/2024	Setoran Tunai Bend Add Wawopada	1,692,671,430.37
205	10/06/2024	Atmb_Trf Pt_Timur_Putra_Celebes	1,702,239,031.37
206	10/06/2024	Atmb_Trf Dzikrullah Toadji	1,702,915,148.37
207	10/06/2024	Setoran Tunai Ritna	1,708,643,178.37
208	11/06/2024	Pembayaran Peminjaman Gedung Morokoa Pada Keg. Perkawinan	1,710,643,178.37
209	11/06/2024	Setoran Tunai Rapiyudin Tomas	1,712,643,178.37
210	14/06/2024	Atmb_Trf Transactional_Banking Servic	1,713,108,778.37
211	14/06/2024	Atmb_Trf Transactional_Banking Servic	1,713,214,378.37
212	14/06/2024	Pembayaran Pengembalian Insentif Imb/Pbg Ta. 2022 An. Destuber Mato'Ori. St. M.Sc	1,715,844,378.37
213	14/06/2024	Pengembalian Gaji Dan Tunjangan Asn	1,716,278,898.37
214	14/06/2024	Pengembalian Gaji Dan Tunjangan Asn	1,716,692,358.37
215	14/06/2024	Pengembalian Lebih Bayar Tpp Bayar Bulan Februari 2024 An. Widya A. Kondurura	1,717,774,804.37
216	14/06/2024	Pengembalian Kelebihan Bayar Insentif Imb Tahun 2021 An. Yuliet Tamaoli	1,718,774,804.37
217	14/06/2024	Pengembalian Temuan Kekurangan Volume Pekerjaan Penyelesaian Gedung Kantor Baru Dprd Cv. Karya Permata Agung	1,733,405,804.37
218	14/06/2024	Pengembalian Kelebihan Bayar Insentif Imb Tahun 2022	1,734,509,804.37

Lampiran 1

NO	TANGGAL	KETERANGAN	JUMLAH
219	14/06/2024	Setoran Tunai Dulmat	1,738,235,930.37
220	14/06/2024	Setoran Tunai Dulmat	1,740,284,812.37
221	19/06/2024	Pengembalian Kelebihan Bayar Insentif Imb Tahun 2022 An. Alsih Yunita	1,741,388,812.37
222	19/06/2024	Bninidja 2406120000268334	1,798,234,808.37
223	20/06/2024	_Atmb_Trf Aki_-	1,798,314,808.37
224	20/06/2024	_Atmb_Trf Aki_-	1,798,552,608.37
225	20/06/2024	Atmb_Trf Pmt_Lokal	1,799,224,608.37
226	20/06/2024	Setoran Tunai Rapiyudin Tomas	1,801,224,608.37
227	20/06/2024	Atmb Trf Manajemen Puskesmas Bank Bni Rkud Kab Morowali	1,801,386,608.37
228	20/06/2024	Atmb Trf Manajemen Puskesmas Bank Bni Rkud Kab Morowali	1,801,578,608.37
229	20/06/2024	Atmb Trf Manajemen Puskesmas Bank Bni Rkud Kab Morowali	1,801,740,608.37
230	20/06/2024	Atmb Trf Manajemen Puskesmas Bank Bni Rkud Kab Morowali	1,801,902,608.37
231	20/06/2024	Atmb Trf Manajemen Puskesmas Bank Bni Rkud Kab Morowali	1,802,064,608.37
232	20/06/2024	Atmb Trf Manajemen Puskesmas Bank Bni Rkud Kab Morowali	1,802,226,608.37
233	21/06/2024	Pembayaran Temuan Bpk Ta. 2017 Atas Kekurangan Penyetoran Pendapatan Retribusi Kesehatan Pkm Anuntoluwu	1,803,066,608.37
234	21/06/2024	Setoran Tunai Rusjan Tungkawana	1,803,760,608.37
235	21/06/2024	Setoran Tunai Bok Pkm Beteleme	1,803,983,808.37
236	21/06/2024	Setoran Tunai Bok Pkm Beteleme	1,804,822,008.37
237	24/06/2024	Transactional_Banking Servic	1,805,282,808.37
238	24/06/2024	Pengembalian Temuan Kelebihan Pembayaran Peningkatan Struktur Jalan Dalam Desa Sumara Jaya Cv. Bukit Malino Indah	1,835,282,808.37
239	24/06/2024	Pengembalian Temuan Kelebihan Pembayaran Peningkatan Struktur Jalan Dalam Desa Sumara Jaya Cv. Bukit Malino Indah	1,835,283,808.37
240	24/06/2024	Setoran Tunai Dishub Pengembalian Tunjangan Anak	1,837,288,654.37
241	24/06/2024	Setoran Tunai Harnol	1,843,872,154.37
242	26/06/2024	Pembayaran Peminjaman Gedung Morokoa Pada Kegiatan Perkawinan	1,845,872,154.37
243	26/06/2024	Setoran Produksi Usaha Daerah Air Minum (Pad) Spam Ikk Petasia Dan Spam Ikk Mamosalato Kab. Morowali Utara Bulan Januari S/D Februari 2024	1,931,624,892.37
244	26/06/2024	Pengembalian Pembayaran Pengadaan Genset Rujab Bupati Cv. Alfa Mitra Utama	1,940,584,892.37
245	27/06/2024	Atmb_Trf Transactional_Banking_Servic	1,941,050,492.37
246	27/06/2024	Setoran Tunai Pujiati	1,941,288,492.37
247	27/06/2024	Setoran Tunai Wiwid	1,941,416,492.37
248	27/06/2024	Setoran Tunai Wiwid	1,941,776,492.37
249	27/06/2024	Setoran Tunai Pujiati	1,942,014,492.37
250	27/06/2024	Setoran Tunai Pujiati	1,942,252,492.37
251	27/06/2024	Setoran Tunai Pujiati	1,942,490,492.37
252	27/06/2024	Setoran Tunai Martin Modjampa	1,944,019,292.37
253	27/06/2024	Setoran Temuan Hasil Pemeriksaan Bpk Atas Belanja Modal Dan Belanja Barang Dan Jasa Ta. 2022 - 2023	1,946,753,237.22
254	27/06/2024	Pengembalian Utang Iuran Pns & Pppk Per Des 23 S/D Apr 24 Kepada Rkud Kab Morowali Utara	1,947,326,575.22
255	27/06/2024	Setoran Tunai Upt Puskesmas Baturube	1,948,353,775.22
256	27/06/2024	Setoran Tunai Cv Karya Buwana Mandiri	1,950,353,775.22
257	27/06/2024	Setoran Tunai Cv Insan Muda Mandiri	1,955,353,775.22
258	27/06/2024	Setoran Tunai Helmi	1,967,650,343.22
259	28/06/2024	Setoran Tunai Pujiati	1,967,659,343.22
260	28/06/2024	Setoran Tunai Hadra	1,967,746,843.22
261	28/06/2024	Setoran Tunai Pujiati	1,967,757,343.22
262	28/06/2024	Setoran Tunai Pujiati	1,967,778,343.22
263	28/06/2024	Setoran Tunai Pujiati	1,967,799,343.22
264	28/06/2024	Setoran Tunai Magfira	1,967,808,343.22
265	28/06/2024	Setoran Tunai Magfira	1,967,817,343.22
266	28/06/2024	Setoran Tunai Magfira	1,967,826,343.22
267	28/06/2024	Setoran Tunai Magfira	1,967,835,343.22
268	28/06/2024	Setoran Tunai Magfira	1,967,844,343.22
269	28/06/2024	Setoran Tunai Magfira	1,967,853,343.22
270	28/06/2024	Setoran Tunai Magfira	1,967,862,343.22
271	28/06/2024	Setoran Tunai Magfira	1,967,871,343.22
272	28/06/2024	Setoran Tunai Magfira	1,967,880,343.22
273	28/06/2024	Setoran Tunai Magfira	1,967,889,343.22
274	28/06/2024	Setoran Tunai Magfira	1,967,898,343.22
275	28/06/2024	Setoran Tunai Magfira	1,967,907,343.22
276	28/06/2024	Setoran Tunai Magfira	1,967,916,343.22
277	28/06/2024	Setoran Tunai Magfira	1,967,925,343.22
278	28/06/2024	Setoran Tunai Magfira	1,967,934,343.22
279	28/06/2024	Setoran Tunai Magfira	1,967,943,343.22
280	28/06/2024	Setoran Tunai Magfira	1,967,952,343.22
281	28/06/2024	Setoran Tunai Magfira	1,967,961,343.22
282	28/06/2024	Pembayaran Temuan Bpk Atas Belanja Modal Ta. 2021-2022 Pengadaan Sistem Pemantauan Kualitas Air Secara Kontinyu, Otomatis Dan Online Pada Dinas Lingkungan Hidup	1,971,366,545.22
283	28/06/2024	Rtgs Cenaidja Industr 00267112067 Gedung Bursa Efek	3,637,421,208.22
284	28/06/2024	Setoran Tunai Muhammad Safri - Lelang Mobil Dn 8 U	3,775,026,808.22
285	01/07/2024	Pengembalian Kesalahan Pembayaran Gaji Susulan Pppk Daerah Kab. Morowali Utara Bulan April S/D Juni Ta. 2024 Bpkad	3,776,626,808.22
286	03/07/2024	Setoran Tunai Bend Add Lembobaru	3,777,949,808.22
287	04/07/2024	Setoran Tunai Bend Desa Bintangor	3,792,060,620.22
288	08/07/2024	Brinidja Kasda Juni 2024	3,792,460,620.22

Lampiran 1

NO	TANGGAL	KETERANGAN	JUMLAH
289	08/07/2024	Brinidja Taspen	3,804,360,082.22
290	08/07/2024	Brinidja Taspen; ; ; ;	3,808,326,569.22
291	09/07/2024	Pembayaran Temuan Bpk Ta. 2018 Atas Ketekoran Retribusi Pelayanan Kesehatan Pkm Dan Dana Non Kapitasi Bendahara Penerima Dinkes	3,811,326,569.22
292	11/07/2024	Setoran Tunai Rapiyudin Tomas	3,813,326,569.22
293	12/07/2024	Pengembalian Temuan Bpk Ta. 2023 Atas Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Bag Kesra	3,823,936,217.22
294	17/07/2024	Setoran Tunai Bend Pengeluaran Pkm Tomata	3,824,633,217.22
295	17/07/2024	Bninidja	3,878,465,262.22
296	19/07/2024	Pengembalian Tpp Bulan Mei 2024 An. Treis Sanggona	3,882,872,765.22
297	22/07/2024	Pengembalian Hasil Temuan Bpk Ta. 2023 Atas Kekurangan Volume Dan Pemahalan Harga Atas Paket Pek. Pemeliharaan Rutin Gedung Perawatan Bedah Dan Penyakit Dalam Cv Aliya Palu Rafania	3,885,872,765.22
298	22/07/2024	Pengembalian Hasil Temuan Bpk Ta. 2023 Atas Kekurangan Volume Dan Pemahalan Harga Atas Paket Pek. Pemeliharaan Rutin Gedung Perawatan Obgyn Dan Anak Cv Mitra Libra	3,887,872,765.22
299	24/07/2024	Setoran Tunai Bend Smpn 1 Lembo	3,888,259,765.22
300	25/07/2024	Pengembalian Kelebihan Bayar Insentif Imb Tahun 2021 An. Armansyah	3,893,259,765.22
301	25/07/2024	Pengembalian Kelebihan Bayar Insentif Imb Tahun 2022 An. Armansyah	3,895,259,765.22
302	26/07/2024	Setoran Tunai Wiwid	3,895,322,765.22
303	26/07/2024	Setoran Tunai Wiwid	3,895,478,765.22
304	26/07/2024	Setoran Tunai Wiwid	3,895,634,765.22
305	26/07/2024	Setoran Tunai Wiwid	3,895,787,765.22
306	26/07/2024	Setoran Tunai Helmi	3,908,106,333.22
307	29/07/2024	Ob Pengembalian Dana Bosda Tahap 2 Tahun 2023	3,915,306,333.22
308	29/07/2024	Ob Pengembalian Dana Bosda Tahap 2 Tahun 2023	3,920,706,333.22
309	29/07/2024	Ob Pengembalian Dana Bosda Tahap 2 Tahun 2023	3,929,526,333.22
310	29/07/2024	Ob Pengembalian Dana Bosda Tahap 2 Tahun 2023	3,929,626,333.22
311	30/07/2024	Setoran Tunai Upt Puskesmas Potowe Indo	3,929,837,533.22
312	30/07/2024	Setoran Tunai Upt Puskesmas Potowe Indo	3,930,058,333.22
313	30/07/2024	Setoran Tunai Upt Puskesmas Potowe Indo	3,930,279,133.22
314	30/07/2024	Setoran Tunai Upt Puskesmas Potowe Indo	3,930,490,333.22
315	31/07/2024	Pengembalian Pek. Kekurangan Volume Pek. Pembangunan Pkm Tambayoli Cv Karya Buwana Mandiri	3,933,490,333.22
316	31/07/2024	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Peningkatan Struktur Jalan Dalam Desa Sumara Jaya Cv Bukit Malino Indah	3,936,490,333.22
317	31/07/2024	Pengembalian Pek. Kekurangan Volume Pek. Peningkatan Jalan Malino - Panca Makmur Cv Insan Muda Mandiri	3,941,490,333.22
318	01/08/2024	Kantor Camat Lemboraya	3,942,150,333.22
319	02/08/2024	Atmb Trf Manajemen Puskesmas Bank Bni Rkud Kab Morowali	3,942,342,333.22
320	02/08/2024	Atmb Trf Manajemen Puskesmas Bank Bni Rkud Kab Morowali	3,942,504,333.22
321	02/08/2024	Atmb_Trf Christiani	3,948,299,458.22
322	02/08/2024	Atmb_Trf Megawati	3,949,137,058.22
323	02/08/2024	Atmb_Trf Megawati	3,952,245,408.22
324	02/08/2024	Atmb_Trf Megawati	3,953,135,358.22
325	03/08/2024	Atmb_Trf _Christiani	3,958,573,983.22
326	07/08/2024	Setoran Tunai Gratia	3,958,693,163.22
327	08/08/2024	Brinidja Taspen	3,959,595,413.22
328	08/08/2024	Setoran Tunai Rapiyudin Tomas	3,961,595,413.22
329	08/08/2024	Set Tunai Martin Modjampa	3,962,329,213.22
330	09/08/2024	Setoran Tunai Kec Lemboraya	3,963,649,213.22
331	13/08/2024	Bninidja	4,016,034,804.22
332	23/08/2024	Setoran Tunai Helmi	4,028,320,294.22
333	29/08/2024	Pengembalian Dana Tunjangan Suami & Anak An. Sulastri Agnesia Pelao	4,031,011,318.22
334	29/08/2024	Setoran Tunai Bok Pkm Beteleme	4,031,234,518.22
335	29/08/2024	Setoran Tunai Bok Pkm Beteleme	4,031,474,518.22
336	29/08/2024	Setoran Tunai Upt Puskesmas Baturube	4,031,848,918.22
337	02/09/2024	Kelebihan Pembayaran Atas Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Lapangan Futsal Desa Sumara Jaya Kec. Soyo Jaya Ta 2023	4,033,848,217.22
338	02/09/2024	Setoran Tunai Kec. Lembo Raya	4,035,168,217.22
339	02/09/2024	Setoran Tunai Kec. Lembo Raya	4,036,548,317.22
340	03/09/2024	Setoran Tunai Cv Karya Buwana Mandiri	4,038,548,317.22
341	03/09/2024	Setoran Tunai Cv Insan Muda Mandiri	4,043,548,317.22
342	03/09/2024	Setoran Tunai Cv Bukit Malino Indah	4,045,548,317.22
343	04/09/2024	Setoran Tunai Santi Dumpele Pengembalian Biaya Penginapan	4,046,348,317.22
344	05/09/2024	Setoran Tunai Cv Arda Perkasa	4,050,248,317.22
345	05/09/2024	Setoran Tunai Cv Arda Perkasa	4,054,648,317.22
346	09/09/2024	Brinidja Debet Rek Kasda Juni 2024	4,059,004,397.22
347	10/09/2024	Setoran Tunai Upt Pkm Beteleme	4,059,227,597.22
348	10/09/2024	Setoran Tunai Upt Pkm Beteleme	4,060,045,997.22
349	10/09/2024	Setoran Tunai Upt Pkm Petumbea	4,061,663,597.22
350	11/09/2024	Set Tunai Upt Pkm Potowe Indo Lijo	4,061,908,397.22
351	11/09/2024	Set Tunai Upt Pkm Potowe Indo Lijo	4,062,153,197.22
352	11/09/2024	Set Tunai Upt Pkm Potowe Indo Lijo	4,062,537,197.22
353	11/09/2024	Set Tunai Upt Pkm Potowe Indo Lijo	4,062,786,797.22
354	11/09/2024	Set Tunai Upt Pkm Potowe Indo Lijo	4,063,026,797.22
355	12/09/2024	Pembayaran Atas Temuan Kekurangan Volume Pekerjaan Jut Harapan Jaya Desa Tananagaya Oleh Cv. Karya Fajril	4,069,904,938.79
356	13/09/2024	Setoran Tunai Pkm Anutoluwu	4,070,254,751.79

Lampiran 1

NO	TANGGAL	KETERANGAN	JUMLAH
357	13/09/2024	Bninidja	4,125,995,592.79
358	17/09/2024	Setoran Tunai Bkpsdm Pembayaran Selisih Uang Perjalanan	4,128,715,592.79
359	17/09/2024	Setoran Tunai Indrayati Laguni	4,128,822,381.79
360	18/09/2024	Atmb Trf Aki	4,129,033,581.79
361	21/09/2024	Atmb Trf Manajemen Puskesmas	4,129,195,581.79
362	21/09/2024	Atmb Trf Manajemen Puskesmas	4,129,357,581.79
363	21/09/2024	Atmb_Trf _Aki_	4,129,437,581.79
364	21/09/2024	Atmb_Trf _Aki_	4,129,544,181.79
365	21/09/2024	Atmb_Trf _Aki_	4,129,781,981.79
366	21/09/2024	Atmb_Trf _Aki_	4,129,995,181.79
367	23/09/2024	Setoran Tunai Pkm Beteleme	4,130,547,132.79
368	24/09/2024	Setoran Tunai Helmi	4,142,954,142.79
369	24/09/2024	Setoran Tunai Wiwid	4,143,054,142.79
370	25/09/2024	Pembayaran Atas Temuan Kekurangan Volume Pekerjaan Penimbunan Jut Desa Tokala Atas Ta 2023	4,143,954,142.79
371	25/09/2024	Pembayaran Atas Temuan Kekurangan Volume Pekerjaan Penimbunan Jut Desa Woomparigi Ta 2023	4,145,054,142.79
372	25/09/2024	Pembayaran Kekurangan Volume Atas Pembangunan Ruang Belajar Mts Desa Tokala Atas 2 Lokal Ta 2023	4,146,306,907.79
373	25/09/2024	Setoran Tunai Bagian Umum Sewa Gedung	4,147,056,907.79
374	25/09/2024	Atmb Trf Ahliddin	4,147,424,407.79
375	25/09/2024	Setoran Tunai Leni	4,147,467,596.79
376	26/09/2024	Setoran Tunai Mubarak Mala Pembayaran Kekurangan Volume Atas Pekerjaan Pembangunan Rkb Sdn Tokala Atas	4,148,579,761.79
377	26/09/2024	Setoran Tunai Upt Pkm Panca Makmur	4,148,755,309.79
378	30/09/2024	Setoran Tunai Pujiati	4,148,785,309.79
379	30/09/2024	Setoran Tunai Pujiati	4,148,806,309.79
380	30/09/2024	Setoran Tunai Pujiati	4,148,821,309.79
381	30/09/2024	Setoran Tunai Pujiati	4,148,851,309.79
382	30/09/2024	Setoran Tunai Pujiati	4,148,872,309.79
383	30/09/2024	Setoran Tunai Pujiati	4,148,893,309.79
384	30/09/2024	Setoran Tunai Pujiati	4,148,908,309.79
385	30/09/2024	Setoran Tunai Pujiati	4,148,930,809.79
386	30/09/2024	Setoran Tunai Pujiati	4,148,960,809.79
387	30/09/2024	Setoran Tunai Pujiati	4,148,986,309.79
388	30/09/2024	Setoran Tunai Pujiati	4,149,011,809.79
389	30/09/2024	Setoran Tunai Pujiati	4,149,037,309.79
390	30/09/2024	Setoran Tunai Pujiati	4,149,049,309.79
391	30/09/2024	Setoran Tunai Pujiati	4,149,061,309.79
392	30/09/2024	Setoran Tunai Pujiati	4,149,073,309.79
393	30/09/2024	Pengembalian Temuan Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Pkm Tambayoli Oleh Cv Karya Buwana Mandiri	4,151,073,309.79
394	30/09/2024	Pengembalian Temuan Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Malino - Panca Makmur Cv Insan Muda Mandiri	4,156,073,309.79
395	30/09/2024	Pengembalian Temuan Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Dalam Desa Sumara Jaya Oleh Cv Bukit Malino Indah	4,159,073,309.79
396	30/09/2024	Setoran Tunai Pujiati	4,159,103,309.79
397	30/09/2024	Setoran Tunai Pujiati	4,159,133,309.79
398	30/09/2024	Setoran Tunai Pujiati	4,159,148,309.79
399	30/09/2024	Setoran Tunai Pujiati	4,159,178,309.79
400	30/09/2024	Setoran Tunai Pujiati	4,159,193,309.79
401	30/09/2024	Setoran Tunai Pujiati	4,159,208,309.79
402	30/09/2024	Setoran Tunai Pkm Pandauke	4,159,449,809.79
403	30/09/2024	Setoran Tunai Pkm Pandauke	4,159,759,809.79
404	30/09/2024	Atmb Trf Kaleb T Mongkarembo	4,161,131,409.79
405	30/09/2024	Setoran Tunai Pkm Pandauke	4,161,379,909.79
406	30/09/2024	Setoran Tunai Pkm Pandauke	4,161,804,909.79
407	30/09/2024	Setoran Tunai Pkm Pandauke	4,161,994,909.79
408	30/09/2024	Setoran Tunai Pkm Pandauke	4,162,243,409.79
409	30/09/2024	Setoran Tunai Pkm Pandauke	4,162,491,909.79
410	30/09/2024	Setoran Tunai Upt Pkm Petumbea	4,167,469,509.79
411	02/10/2024	Setoran Tunai Dpuprpkpd Penyetoran Kelebihan Pembayaran Atas Pekerjaan Rehabiliasidrainase Jalan Mangga Dua Kec. Petasia Ta 2023 Oleh Cv. Project Inti Sulawesi	4,168,019,509.79
412	03/10/2024	Setoran Tunai Nurul Istiqomah	4,170,850,909.79
413	03/10/2024	Setoran Tunai Upt Puskesmas Baturube	4,172,554,909.79
414	03/10/2024	Rtgs Bninidja Rpl 051 Kpknl Palu Utk Lelang Hasil Bersih Retir Rl Pemda Morowali Utara	6,895,352,909.79
415	03/10/2024	Atmb Trf Transactional Banking Servic Bni	6,895,439,529.79
416	04/10/2024	Atmb Trf Grace Fransiska Bate	6,895,541,508.79
417	08/10/2024	Setoran Tunai Andri Gunawan	6,903,056,508.79
418	10/10/2024	Atmb Trf Tan Engka	6,903,117,690.79
419	10/10/2024	Atmb Trf Tan Engka	6,903,181,508.79
420	10/10/2024	Brinidja Kasda Oktober 2024	6,903,981,508.79
421	11/10/2024	Atmb Trf Manajemen Puskesmas	6,904,143,508.79
422	11/10/2024	Atmb Trf Manajemen Puskesmas	6,904,335,508.79
423	14/10/2024	Atmb Trf Parawansa	6,904,516,558.79
424	15/10/2024	Bninidja	6,960,411,192.79
425	17/10/2024	Setoran Tunai Rapiyudin Tomas	6,962,411,192.79

NO	TANGGAL	KETERANGAN	JUMLAH
426	17/10/2024	Pengembalian Temuan Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Pembuatan Jalan Lingkungan Belakang Mesjid Kantor Bupati Cv. Ayundyakarya	6,963,411,192.79
427	18/10/2024	Pengembalian Sisa Dana Bosda Tahap 1 Smp Gkst Tiu	6,963,421,192.79
428	18/10/2024	Pengembalian Temuan Biaya Transportasi Dpmptspd	6,963,921,192.79
429	18/10/2024	Pembayaran Dari Kelebihan Biaya Penginapan Di Kec Mamosalato An. Meilda Veronica	6,964,061,192.79
430	18/10/2024	Pembayaran Dari Kelebihan Biaya Penginapan Di Kec Mamosalato An. Oliva Toreh	6,964,131,192.79
431	22/10/2024	Setoran Tunai Wiwid	6,964,230,192.79
432	23/10/2024	Bsmdidja Cv. Putra Tumbelala Paket Pln Baturube	6,966,841,862.79
433	23/10/2024	Setoran Tunai Upt Puskesmas Baturube	6,967,674,362.79
434	23/10/2024	Setoran Tunai Kec. Lembo Raya	6,968,028,662.79
435	23/10/2024	Setoran Tunai Helmi	6,980,502,023.79
436	24/10/2024	Pembayaran Kelebihan Bayar Atas Pekerjaan Perbaiki Saluran Irigasi Persawahan	6,983,002,023.79
437	24/10/2024	Pembayaran Peminjaman Gedung Morokoa Oleh Pt. Prima Eo Pada Kegiatan Debat Pertama	6,985,502,023.79
438	25/10/2024	Bninidja Jagir Bok Bulan September 2024	6,985,517,138.79
439	30/10/2024	Pembayaran Peminjaman Gedung Morokoa Oleh Kpu	6,988,017,138.79
440	30/10/2024	Ob Set Jaminan Pelaksanaan Atas Pekerjaan Pembangunan Drainase & Trotoar Cv. Diah Zahrani	7,286,716,326.79
441	30/10/2024	Setoran Tunai Jos	7,286,819,788.79
442	30/10/2024	Setoran Tunai Jos	7,286,878,651.79
443	30/10/2024	Setoran Tunai Jos	7,286,936,805.79
444	30/10/2024	Setoran Tunai Jos	7,287,004,625.79
445	30/10/2024	Setoran Tunai Jos	7,287,060,018.79
446	30/10/2024	Setoran Tunai Adolfina Odo Ruttu	7,287,119,037.79
447	30/10/2024	Setoran Tunai Jos	7,287,177,905.79
448	30/10/2024	Setoran Tunai Jos	7,287,230,337.79
449	30/10/2024	Setoran Tunai Jos	7,287,273,140.79
450	30/10/2024	Pengembalian Temuan Kelebihan Pemabayaran Pek. Peningkatan Struktur Jalan Dalam Desa Malino - Panca Makmur Cv. Insan Muda Mandiri	7,290,273,140.79
451	30/10/2024	Denda Keterlambatan Pekerjaan Atas Pekerjaan Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Tempat Parkir Rumah Sakit Cv. Hanan Berjaya	7,294,666,540.79
452	30/10/2024	Pengembalian Temuan Kelebihan Pemabayaran Pek. Peningkatan Struktur Jalan Dalam Desa Sumara Jaya Cv. Bukit Malino Utara	7,296,666,540.79
453	30/10/2024	Pengembalian Temuan Kelebihan Pemabayaran Pek. Pembangunan Gedung Pkm Tambayoli Cv. Karya Buwana Mandiri	7,298,666,540.79
454	04/11/2024	Setoran Tunai Wiwid	7,300,736,540.79
455	05/11/2024	Pembayaran Kelebihan Tpp Bulan September An. Christovel	7,302,078,410.79
456	06/11/2024	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Penginapan Perjadin An. Isnayawati Siman	7,302,878,410.79
457	07/11/2024	Brinidja Kasda Nov 2024	7,307,048,046.79
458	08/11/2024	Setoran Tunai Wiwied	7,308,632,046.79
459	08/11/2024	Sts Kumperindag	7,313,840,046.79
460	12/11/2024	Penyetoran Temuan Pemeriksaan Bpk 2023 Set Dprd	7,314,210,546.79
461	12/11/2024	Penyetoran Temuan Pemeriksaan Bpk 2023 Set Dprd	7,314,712,716.79
462	12/11/2024	Setoran Tunai Rudi Pengembalian Dana Bosda Tahap 1	7,314,720,216.79
463	12/11/2024	Setoran Tunai Kpu Peminjaman Gedung	7,317,220,216.79
464	13/11/2024	Bninidja	7,375,498,011.79
465	13/11/2024	Setoran Tunai Disparpora	7,377,382,011.79
466	14/11/2024	Setoran Tunai Bok Pkm Beteleme	7,377,679,011.79
467	14/11/2024	Setoran Tunai Bok Pkm Beteleme	7,377,844,011.79
468	14/11/2024	Setoran Tunai Bok Pkm Beteleme	7,378,009,011.79
469	14/11/2024	Setoran Tunai Bok Pkm Beteleme	7,378,174,011.79
470	14/11/2024	Setoran Tunai Bok Pkm Beteleme	7,378,414,011.79
471	14/11/2024	Setoran Tunai Bend Rsud Kolonodale Pembayaran Gaji Pengembalian Gaji Pns	7,383,911,611.79
472	14/11/2024	Pembayaran Kekurangan Volume Pembuatan Jalan Usaha Tani Desa Gontara Oleh Cv Anugrah Tomata	7,384,911,611.79
473	18/11/2024	Atmb Trf Manajemen Puskesmas	7,385,073,611.79
474	19/11/2024	Pembayaran Kelebihan Atas Pekerjaan Jumlah Hari Tumpang Tindih Cv. Arsitama Konsultan	7,388,073,611.79
475	20/11/2024	Atmb Mardianto	7,389,873,943.79
476	20/11/2024	Setoran Tunai Rapiyudin Tomas	7,391,873,943.79
477	21/11/2024	Setoran Tunai Helmi	7,404,374,901.79
478	21/11/2024	Pembayaran Temuan Inpektorat 2024 Atas Kelebihan Biaya Penginapan Pada Bagian Protokol	7,404,524,901.79
479	25/11/2024	Setoran Tunai Darman	7,405,024,901.79
480	25/11/2024	Setoran Tunai Arnilow	7,405,058,901.79
481	25/11/2024	Setoran Tunai Arnilow	7,405,108,901.79
482	26/11/2024	Mcoridja	7,583,913,251.79
483	26/11/2024	Penyetoran Atas Temuan Pemeriksaan Bpk Tidak Sesuai Komdisi Set Dprd	7,604,576,789.79
484	28/11/2024	Setoran Tunai Ritna	7,606,691,589.79
485	28/11/2024	Atmb Agnes	7,611,997,363.79
486	29/11/2024	Setoran Tunai Kristowal	7,612,807,363.79
487	29/11/2024	Pengembalian Pembayaran Penginapan Charles T	7,613,407,363.79
488	02/12/2024	Setoran Tunai Wiwied Nur Wedyo Hening	7,614,328,963.79
489	03/12/2024	Setoran Tunai Cv. Rizky Abadi	7,620,626,629.79
490	03/12/2024	Setoran Tunai Cv Gtm/Anwar Syam	7,626,222,097.71
491	03/12/2024	Setoran Tunai Cv Tdg/Anwar Syam	7,633,499,277.19
492	03/12/2024	Setoran Tunai Bend Add Ronta	7,634,664,794.19
493	04/12/2024	Setoran Tunai Dishub	7,635,117,194.19
494	04/12/2024	Setoran Tunai Dishub	7,635,389,794.19
495	04/12/2024	Atmb Trf Agus Putranda	7,636,389,794.19
496	04/12/2024	Atmb Trf Agus Putranda	7,638,989,794.19
497	05/12/2024	Setoran Tunai Cv Bukit Malino Indah	7,643,989,794.19

Lampiran 1

NO	TANGGAL	KETERANGAN	JUMLAH
498	05/12/2024	Setoran Tunai Cv Karya Buwana Mandiri	7,645,989,794.19
499	05/12/2024	Setoran Tunai Cv Insan Muda Mandiri	7,650,989,794.19
500	06/12/2024	Setoran Tunai Nurpan	7,660,493,794.19
501	06/12/2024	Setoran Temuan Fisik Pekerjaan Pembangunan Tanggul Belakang Mesjid Desa Tandayondo Kec. Soyo Jaya Yang Di Keluarkan Oleh Bpk Oleh Cv Scudetto	7,710,187,672.19
502	09/12/2024	Brinidja Kasda Des 2024	7,710,987,672.19
503	09/12/2024	Setoran Tunai Add Desa Bintangor Mukti	7,714,941,728.19
504	09/12/2024	Setoran Tunai Rapiyudin Tomas	7,716,941,728.19
505	10/12/2024	Pembayaran Peminjaman Gedung Morokoa Oleh Moh Yusran Rachman	7,719,441,728.19
506	10/12/2024	Pengembalian Temuan Bpk Atas Pengadaan Laptop, Printer Dan Scanner Pada Bapenda Morut	7,758,862,577.52
507	10/12/2024	Atmb Trf Lisman Sinauru	7,760,302,577.52
508	10/12/2024	Setoran Tunai Kantor Camat Lembo	7,761,762,377.52
509	11/12/2024	Pembayaran Uang Muka (30%) Pekerjaan Ruang/Toilet Di Lokasi Wisata Pasanggarahan Km3	7,763,762,377.52
510	11/12/2024	Setoran Dinas Perpustakaan	7,763,819,557.52
511	12/12/2024	Pembayaran Peminjaman Gedung Morokoa Oleh Wia Kab. Morut	7,766,319,557.52
512	12/12/2024	Bninidja	7,825,275,846.52
513	13/12/2024	Atmb Trf Manajemen Puskesmas	7,825,741,446.52
514	13/12/2024	Atmb Trf Manajemen Puskesmas	7,826,207,046.52
515	13/12/2024	Atmb Trf Aki	7,826,399,046.52
516	13/12/2024	Atmb Trf Aki	7,826,591,046.52
517	13/12/2024	Atmb Trf Aki	7,826,696,646.52
518	13/12/2024	Atmb Trf Aki	7,826,792,646.52
519	16/12/2024	Pengembalian Utang Iuran Pns & Pppk Per Mei S/D Agustus 2024	7,828,731,242.52
520	16/12/2024	Setoran Tunai Suraian	7,830,753,242.52
521	16/12/2024	Setoran Tunai Wiwid	7,830,885,242.52
522	16/12/2024	Setoran Tunai Wiwid	7,831,349,042.52
523	16/12/2024	Setoran Tunai Wiwid	7,831,355,192.52
524	16/12/2024	Pengembalian Pengadaan Laptop Dan Scanner Disparpora	7,835,437,592.52
525	17/12/2024	Martin Modjampa	7,836,898,592.52
526	17/12/2024	Pengembalian Temuan Bpk Atas Pengadaan Laptop Asus 1 Unit Ta 2024 Oleh Bpkad	7,839,606,250.52
527	17/12/2024	Setoran Tunai Hadra Ap	7,839,704,250.52
528	17/12/2024	Setoran Tunai Pujiati	7,839,738,750.52
529	17/12/2024	Setoran Tunai Pujiati	7,839,758,250.52
530	17/12/2024	Setoran Tunai Pujiati	7,839,831,750.52
531	17/12/2024	Setoran Tunai Pujiati	7,839,890,250.52
532	17/12/2024	Setoran Tunai Pujiati	7,839,912,750.52
533	17/12/2024	Setoran Tunai Pujiati	7,839,980,250.52
534	17/12/2024	Setoran Tunai Pujiati	7,840,052,250.52
535	17/12/2024	Setoran Tunai Pujiati	7,840,143,750.52
536	17/12/2024	Setoran Tunai Pujiati	7,840,181,250.52
537	17/12/2024	Setoran Tunai Pkm Pandauke	7,840,431,250.52
538	17/12/2024	Setoran Tunai Pkm Pandauke	7,840,676,250.52
539	17/12/2024	Setoran Tunai Pkm Pandauke	7,840,938,750.52
540	17/12/2024	Setoran Tunai Pkm Pandauke	7,841,183,750.52
541	17/12/2024	Setoran Tunai Pkm Pandauke	7,841,428,750.52
542	18/12/2024	Setoran Tunai Kec. Lembo Raya	7,842,022,390.52
543	18/12/2024	Setoran Tunai Gratia Christine	7,842,145,390.52
544	19/12/2024	Atmb Trf Manajemen Puskesmas	7,842,307,390.52
545	19/12/2024	Atmb Trf Manajemen Puskesmas	7,842,499,390.52
546	19/12/2024	Atmb Trf Manajemen Puskesmas	7,842,661,390.52
547	19/12/2024	Setoran Tunai Hadra Ap	7,842,755,890.52
548	19/12/2024	Set Tunai Upt Pkm Petumbea	7,846,504,690.52
549	20/12/2024	Pembayaran Atas Kekurangan Volume Pekerjaan Peningkatan Jalan Ensa - Lanumor (Dak) Tahun 2024 Pt. Timur Putra Celebes	7,853,227,339.52
550	23/12/2024	Setoran Tunai Wiwin	7,854,664,339.52
551	24/12/2024	Setoran Tunai Helmi Insentif Tagihan Angsuran Pt. Bpr Modern Expres Cab. Morowali Utara Periode Desember 2024	7,867,188,261.52
552	24/12/2024	Setoran Tunai Kantor Camat Lembo	7,867,558,241.52
553	27/12/2024	Setoran Tunai Kantor Camat Lembo	7,868,514,661.52
554	27/12/2024	Setoran Tunai Kantor Camat Lembo	7,869,079,861.52
555	27/12/2024	Setoran Tunai Bok Pkm Beteleme	7,869,689,461.52
556	27/12/2024	Setoran Tunai Bok Pkm Beteleme	7,869,918,061.52
557	27/12/2024	Setoran Tunai Bok Pkm Beteleme	7,870,527,661.52
558	27/12/2024	Setoran Tunai Bok Pkm Beteleme	7,870,750,861.52
559	27/12/2024	Setoran Tunai Bok Pkm Beteleme	7,870,979,461.52
560	27/12/2024	Setoran Tunai Bok Pkm Beteleme	7,871,817,661.52
561	27/12/2024	Setoran Tunai Bok Pkm Beteleme	7,872,046,261.52
562	27/12/2024	Setoran Tunai Bok Pkm Beteleme	7,872,286,261.52
563	27/12/2024	Setoran Tunai Bok Pkm Beteleme	7,872,514,861.52
564	27/12/2024	Setoran Tunai Bok Pkm Beteleme	7,872,811,861.52
565	27/12/2024	Setoran Tunai Upt Pkm Beteleme	7,873,195,861.52
566	27/12/2024	Setoran Tunai Upt Pkm Beteleme	7,873,579,861.52
567	30/12/2024	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Tunjangan Anak Dan Tunjangan Beras Anak	7,875,542,293.52
568	30/12/2024	Setoran Tunai Bagian Kesra	7,875,542,923.52
569	30/12/2024	Setoran Tunai Bagian Hukum	7,875,544,148.52
570	30/12/2024	Setoran Tunai Upt Pkm Baturube	7,877,377,748.52
571	30/12/2024	Setoran Tunai Kec. Lembo Raya	7,877,476,688.52
572	30/12/2024	Set Tunai Pkm Wongko Ndaya	7,877,764,688.52
573	31/12/2024	Setoran Tunai Cv Abil	7,884,155,852.52

Lampiran 1

NO	TANGGAL	KETERANGAN	JUMLAH
574	31/12/2024	Pengembalian Temuan Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Pkm Tambayoli Cv Karya Buwana Mandiri	7,886,155,852.52
575	31/12/2024	Pengembalian Temuan Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Malino - Panca Makmur Cv Insan Muda Mandiri	7,896,155,852.52
576	31/12/2024	Pengembalian Temuan Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Dalam Desa Sumara Jaya Cv Bukit Malino Indah	7,901,155,852.52
577	31/12/2024	Setoran Tunai Bend Add Desa Ronta	7,907,045,235.52
578	31/12/2024	Brinidja Span	7,907,046,235.52
579	31/12/2024	Kor13 - Koreksi Pendapatan Yang Belum Tercatat Dan Masih Berupa Kas Tunai Pada Empat Dinas (Pendapatan Rp.195.467.625,-)	8,102,513,860.52
580	31/12/2024	Kor16 - Koreksi Kesalahan Catat Penghapusan Aset Peralatan Dan Mesin Yang Dicatat Sebagai Koreksi Ekuitas Rp 2.860.463.600	5,242,050,260.52
581	31/12/2024	Kor31 - Reklasifikasi Pendapatan Yang Salah Dicatat Pada Pendapatan Dari Pengembalian Bapenda Rp 4.393.400	5,237,656,860.52
582	31/12/2024	Kor31 - Reklasifikasi Pendapatan Yang Salah Dicatat Pada Pendapatan Dari Pengembalian Bapenda Rp 1.663.456	5,235,993,404.52
583	31/12/2024	Kor31 - Reklasifikasi Pendapatan Yang Salah Dicatat Pada Pendapatan Dari Pengembalian Bapenda Rp 25.750.000	5,210,243,404.52
584	31/12/2024	Kor38 - Kesalahan Pencatatan Pendapatan Pengembalian Perjalanan Dinas Yang Seharusnya Jasa Giro Dan Pajak Resto Pada Bapenda Rp 42.793.698	5,167,449,706.52
585	31/12/2024	Kor41 - Koreksi Kurang Catat Pendapatan Dari Pengembalian Kas Bos Rp 128.407.109	5,295,856,815.52
JUMLAH			**5,295,856,815.52**



LAMPIRAN II :

DAFTAR PENDAPATAN HIBAH DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (B O S)

PENDAPATAN HIBAH DANA BOS TAHUN 2024

Lampiran ll

No	Nama Sekolah	Jumlah Pendapatan
	KECAMATAN PETASIA TIMUR	
1	SD NEGERI 1 BUNTA	218,080,000.00
2	SD NEGERI MOLINO	261,320,000.00
3	SD NEGERI BIMOR JAYA	86,480,000.00
4	SD NEGERI MOLORES	107,160,000.00
5	SD NEGERI 2 BUNTA	243,455,000.00
6	SD NEGERI BUNGINTIMBE	263,359,800.00
7	SD NEGERI PEBOOA	94,000,000.00
8	SD NEGERI TOMPIRA	192,700,000.00
9	SD NEGERI TOWARA	141,000,000.00
10	SD NEGERI UNGKEA	99,620,000.00
11	SD NEGERI KEUNO	57,340,000.00
12	SD NEGERI MOHONI	121,818,600.00
13	SMP NEGERI 1 PETASIA TIMUR	368,880,000.00
14	SMP NEGERI 2 PETASIA TIMUR SATU ATAP	160,027,000.00
15	SMP NEGERI 3 PETASIA TIMUR	216,920,000.00
16	SMP NEGERI 4 PETASIA TIMUR SATU ATAP	44,080,000.00
	KECAMATAN LEMBO	
17	SD NEGERI TINOMPO	141,876,000.00
18	SD NEGERI TINGKEAO	41,360,000.00
19	SD NEGERI KOROBONDE	118,436,000.00
20	SD NEGERI 2 KOROWOU	50,250,000.00
21	SD NEGERI 1 BETELEME	241,040,000.00
22	SD NEGERI LEMBOROMA	96,820,000.00
23	SD NEGERI KOROWALELO	31,890,000.00
24	SD NEGERI LEMBOBARU	34,780,000.00
25	SD NEGERI 2 BETELEME	137,240,000.00
26	SD NEGERI KUMPI	70,500,000.00
27	SD NEGERI 1 KOROWOU	110,920,000.00
28	SD NEGERI UNDORO	45,120,000.00
29	SD NEGERI WARA'A	32,900,000.00
30	SD NEGERI WAWOPADA	85,540,000.00
31	SMP NEGERI 1 LEMBO	420,330,000.00
32	SMP NEGERI 2 LEMBO	111,360,000.00
33	SMP NEGERI 3 LEMBO	143,840,000.00
34	SMP NEGERI 4 LEMBO	102,080,000.00
	KECAMATAN MORI UTARA	
35	SDN LEMBONTONARA	137,170,000.00
36	SDN BENCUE	27,260,000.00
37	SDN TAMONJENGI	30,080,000.00
38	SDN 2 PELERU	44,180,000.00
39	SDN ERA	76,132,000.00
40	SDN TIWA'A	47,000,000.00

Lampiran ll

No	Nama Sekolah	Jumlah Pendapatan
41	SDN MAYUMBA	58,280,000.00
42	SDN 1 TALIWAN	100,380,000.00
43	SDN 1 PELERU	118,440,000.00
44	SDN 2 TALIWAN	88,338,500.00
45	SMP NEGERI 1 MORI UTARA	131,080,000.00
46	SMP NEGERI 2 MORI UTARA	127,382,400.00
47	SMP NEGERI 3 MORI UTARA	56,750,000.00
48	SMP NEGERI 4 MORI UTARA	143,800,000.00
	KECAMATAN MORI ATAS	
49	SDN LANUMOR	72,689,000.00
50	SDN MALEI	31,960,000.00
51	SDN KOROMONTO	44,180,000.00
52	SDN TOMUI KARYA	61,100,000.00
53	SDN LEE	60,160,000.00
54	SDN 2 KOLAKA	97,760,000.00
55	SDN 1 TOMATA	81,780,000.00
56	SDN 1 KOLAKA	42,300,000.00
57	SDN 2 TOMATA	75,200,000.00
58	SDN SAEMBA WALATI	55,460,000.00
59	SDN TAENDE	84,600,000.00
60	SDN PEONEA	91,180,000.00
61	SDN ENSA	31,489,000.00
62	SDN SAEMBA	68,620,000.00
63	SDN KASINGOLI	61,100,000.00
64	SDN LONDI	138,180,000.00
65	SMP NEGERI 1 MORI ATAS	254,386,000.00
66	SMP NEGERI 2 MORI ATAS	163,180,000.00
67	SMP NEGERI 3 MORI ATAS	114,840,000.00
68	SMP NEGERI 4 MORI ATAS	68,440,000.00
69	SMP NEGERI 5 MORI ATAS	40,600,000.00
	KECAMATAN LEMBO RAYA	
70	SD NEGERI PONTANGOA	119,380,000.00
71	SD NEGERI POONA	86,480,000.00
72	SD NEGERI PETUMBEA	75,068,000.00
73	SD NEGERI PARAWI	68,620,000.00
74	SD NEGERI MANDULA	79,900,000.00
75	SD NEGERI LEMBOBELALA	34,640,000.00
76	SD NEGERI DOLUPO KARYA	134,420,000.00
77	SD NEGERI BINTAGOR MUKTI	54,508,000.00
78	SD NEGERI JAMOR JAYA	108,100,000.00
79	SD SMP SATU ATAP NEGERI LEMBO	12,760,000.00
80	SMP NEGERI 1 LEMBO RAYA	205,320,000.00
81	SMP NEGERI 2 LEMBO RAYA	169,360,000.00
82	SMP NEGERI 4 LEMBO RAYA	64,960,000.00

Lampiran ll

No	Nama Sekolah	Jumlah Pendapatan
	KECAMATAN PETASIA	
83	SD NEGERI 1 KOLONODALE	121,095,000.00
84	SD NEGERI 2 KOLONODALE	316,100,000.00
85	SD NEGERI 3 KOLONODALE	102,460,000.00
86	SD NEGERI 4 KOLONODALE	98,540,000.00
87	SD NEGERI 5 KOLONODALE	180,405,000.00
88	SD NEGERI GANDA - GANDA	189,880,000.00
89	SD INPRES KOYA	72,380,000.00
90	SDN GILILANA	71,991,500.00
91	SD NEGERI TANAUGE	56,400,000.00
92	SD NEGERI KOROLOLAMA	101,520,000.00
93	SD NEGERI KOROMATANTU	90,240,000.00
94	SD NEGERI LAMBOLO	61,100,000.00
96	SMP NEGERI 1 PETASIA	564,920,000.00
97	SMP NEGERI 2 PETASIA	112,422,344.00
98	SMP NEGERI 3 PETASIA	69,600,000.00
	KECAMATAN BUNGKU UTARA	
99	SDN 2 BATURUBE	60,160,000.00
100	SDN SALUBIRO	55,859,600.00
101	SDN UERURU	56,400,000.00
102	SDN 3 BATURUBE	66,740,000.00
103	SDN LEMO	61,100,000.00
104	SDN TINGKULUI	96,820,000.00
105	SDN MATUBE	59,220,000.00
106	SDN POSANGKE	66,740,000.00
107	SDN TOKONANAKA	56,400,000.00
108	SDN TIRONGAN ATAS	54,520,000.00
109	SDN 1 BATURUBE	37,600,000.00
110	SDN SILITI	81,780,000.00
111	SDN TOKALA ATAS	93,060,000.00
112	SDN POKEANG	68,620,000.00
113	SDN LEMOWALIA	56,400,000.00
114	SDN LOSONG	91,180,000.00
115	SDN TAMBAROBONE	105,280,000.00
116	SDN KALOMBANG	41,360,000.00
117	SDN BOBA	60,131,000.00
118	SDN MOKOTO	28,200,000.00
119	SDN UEMASI	32,900,000.00
120	SDN TIRONGAN BAWAH	56,400,000.00
121	SDN KARAWASA	-
122	SMP NEGERI 1 BUNGKU UTARA	161,240,000.00
123	SMP NEGERI 2 BUNGKU UTARA	167,040,000.00
124	SMP NEGERI 3 BUNGKU UTARA	69,600,000.00
125	SMP NEGERI 4 BUNGKU UTARA SATU ATAP	69,600,000.00

Lampiran ll

No	Nama Sekolah	Jumlah Pendapatan
126	SMP NEGERI 5 BUNGKU UTARA	73,080,000.00
127	SMP NEGERI 6 BUNGKU UTARA	73,080,000.00
128	SMP NEGERI 7 BUNGKU UTARA	74,240,000.00
	KECAMATAN PETASIA BARAT	
129	SDN MOLEONO	36,660,000.00
130	SDN 2 MOLEONO	17,860,000.00
131	SDN 1 ULULAA/ KORONGKAMA	56,400,000.00
132	SD INPRES TIU	62,961,200.00
133	SDN MONDOWE	65,800,000.00
134	SDN ULU LAA	56,400,000.00
135	SDN TOGO MULYA	80,840,000.00
136	SDN TADAKU	15,980,000.00
137	SDN ONEPUTE	78,960,000.00
138	SDN TONTOWEA	75,200,000.00
140	SMP NEGERI 1 PETASIA BARAT	99,633,000.00
141	SMP NEGERI 2 PETASIA BARAT	54,520,000.00
139	SMP NEGERI 3 PETASIA BARAT	80,040,000.00
	KECAMATAN SOYO JAYA	
142	SD INPRES LEMBAH SUMARA	83,610,000.00
143	SD INPRES SUMARA JAYA	43,380,000.00
144	SD INPRES TANDOYONDO	68,620,000.00
145	SD NEGERI BAU	87,420,000.00
146	SD NEGERI MALINO	47,940,000.00
147	SD NEGERI MALINO JAYA	129,720,000.00
148	SD NEGERI PANCA MAKMUR	197,400,000.00
149	SD NEGERI TAMAINUSI	56,400,000.00
150	SD NEGERI TAMBAYOLI	21,995,000.00
151	SD NEGERI TOWI	55,836,000.00
152	SD NEGERI UEBANGKE	73,320,000.00
153	SMP NEGERI 1 SOYO JAYA	139,190,000.00
154	SMP NEGERI 2 SOYO JAYA	120,480,000.00
	KECAMATAN MAMOSOLATO	
155	SD NEGERI 1 TANASUMPU	143,820,000.00
156	SD NEGERI 1 TANANAGAYA	106,220,000.00
157	SD NEGERI 2 TANASUMPU	99,640,000.00
158	SD NEGERI ANDOLIA	122,184,000.00
159	SD NEGERI DASAR	56,336,000.00
160	SD NEGERI GIRI MULYA	34,780,000.00
161	SD NEGERI KAMUNJANG	56,400,000.00
162	SD NEGERI KOLO ATAS	57,340,000.00
163	SD NEGERI KOLO BAWAH	122,190,000.00
164	SD NEGERI MOMO	99,640,000.00
165	SD NEGERI PANDAUKE	31,010,000.00
166	SD NEGERI PARAMBA	76,140,000.00

Lampiran ll

No	Nama Sekolah	Jumlah Pendapatan
167	SD NEGERI SEA	56,400,000.00
168	SD NEGERI TAMBALE	37,600,000.00
169	SD NEGERI UEMALINGKU	41,360,000.00
170	SD NEGERI UEPAKATU	56,400,000.00
171	SD NEGERI WINANGABINO	61,100,000.00
172	SMP NEGERI 1 MAMOSOLATO	279,560,000.00
173	SMP NEGERI 2 MAMOSOLATO	67,280,000.00
174	SMP NEGERI 3 MAMOSOLATO	61,480,000.00
175	SMP NEGERI 4 MAMOSOLATO	31,320,000.00
176	SMP NEGERI 5 MAMOSOLATO	69,600,000.00
	Total	**16,789,684,944.00**



LAMPIRAN III :

D A F T A R R I N C I A N D A N A D E S A

REALISASI PENYALURAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran lll

No.	PENYALURAN KE DESA	PAGU	PENYALURAN		TOTAL PENYALURAN	SISA	%
			TAHAP I	TAHAP II			
			JUMLAH	JUMLAH			
1	Baturube	1,097,210,000.00	504,044,000.00	593,166,000.00	1,097,210,000.00	0	100.00%
	Penyaluran ke-1		308,564,000.00	462,846,000.00			
	Penyaluran ke-2		195,480,000.00	130,320,000.00			
2	Bau	860,494,000.00	399,040,600.00	461,453,400.00	860,494,000.00	0	100.00%
	Penyaluran ke-1		234,511,600.00	109,686,000.00			
	Penyaluran ke-2		164,529,000.00	351,767,400.00			
3	Beteleme	857,198,000.00	514,318,800.00	342,879,200.00	857,198,000.00	0	100.00%
	Penyaluran ke-1		217,271,400.00	144,847,600.00			
	Penyaluran ke-2		297,047,400.00	198,031,600.00			
4	Bimor Jaya	778,408,000.00	367,641,200.00	410,766,800.00	778,408,000.00	0	100.00%
	Penyaluran ke-1		168,834,000.00	112,556,000.00			
	Penyaluran ke-2		198,807,200.00	298,210,800.00			
5	Bintangor Mukti	835,453,000.00	395,481,200.00	439,971,800.00	835,453,000.00	0	100.00%
	Penyaluran ke-1		183,900,000.00	317,371,800.00			
	Penyaluran ke-2		211,581,200.00	122,600,000.00			
6	Boba	767,622,000.00	361,159,800.00	406,462,200.00	767,622,000.00	0	100.00%
	Penyaluran ke-1		162,333,000.00	108,222,000.00			
	Penyaluran ke-2		198,826,800.00	298,240,200.00			
7	Bungintimbe	1,270,962,000.00	621,169,800.00	649,792,200.00	1,270,962,000.00	0	100.00%
	Penyaluran ke-1		282,814,800.00	424,222,200.00			
	Penyaluran ke-2		338,355,000.00	225,570,000.00			
8	Bunta	1,267,258,000.00	527,583,000.00	739,675,000.00	1,267,258,000.00	0	100.00%
	Penyaluran ke-1		-	147,338,000.00			
	Penyaluran ke-2		306,576,000.00	132,473,000.00			
	Penyaluran ke-3		221,007,000.00	459,864,000.00			
9	Dolupo Karya	1,025,636,000.00	486,444,400.00	539,191,600.00	1,025,636,000.00	0	100.00%
	Penyaluran ke-1		257,874,400.00	386,811,600.00			
	Penyaluran ke-2		228,570,000.00	152,380,000.00			
10	Ensa	790,286,000.00	394,673,600.00	395,612,400.00	790,286,000.00	0	100.00%
	Penyaluran ke-1		158,996,000.00	238,494,000.00			
	Penyaluran ke-2		235,677,600.00	157,118,400.00			
11	Era	1,080,474,000.00	532,012,600.00	548,461,400.00	1,080,474,000.00	0	100.00%
	Penyaluran ke-1		232,543,600.00	199,646,000.00			
	Penyaluran ke-2		299,469,000.00	348,815,400.00			
12	Ganda-Ganda	1,341,331,000.00	664,157,400.00	677,173,600.00	1,341,331,000.00	0	100.00%
	Penyaluran ke-1		382,875,000.00	255,250,000.00			
	Penyaluran ke-2		281,282,400.00	421,923,600.00			
13	Gililana	867,083,000.00	430,477,600.00	436,605,400.00	867,083,000.00	0	100.00%
	Penyaluran ke-1		250,933,200.00	269,316,600.00			
	Penyaluran ke-2		179,544,400.00	167,288,800.00			
14	Girimulya	633,014,000.00	318,968,200.00	314,045,800.00	633,014,000.00	0	100.00%
	Penyaluran ke-1		197,287,800.00	131,525,200.00			
	Penyaluran ke-2		121,680,400.00	182,520,600.00			
15	Gontara	723,310,000.00	345,864,000.00	377,446,000.00	723,310,000.00	0	100.00%
	Penyaluran ke-1		169,620,000.00	113,080,000.00			
	Penyaluran ke-2		176,244,000.00	264,366,000.00			
16	Jamor Jaya	864,204,000.00	329,720,400.00	534,483,600.00	864,204,000.00	0	100.00%
	Penyaluran ke-1		218,636,400.00	327,954,600.00			
	Penyaluran ke-2		-	132,473,000.00			
	Penyaluran ke-3		111,084,000.00	74,056,000.00			
17	Kalombang	811,106,000.00	403,490,800.00	407,615,200.00	811,106,000.00	0	100.00%
	Penyaluran ke-1		166,345,600.00	249,518,400.00			
	Penyaluran ke-2		237,145,200.00	158,096,800.00			
18	Kasingoli	851,298,000.00	413,841,600.00	437,456,400.00	851,298,000.00	0	100.00%
	Penyaluran ke-1		219,967,200.00	146,644,800.00			
	Penyaluran ke-2		193,874,400.00	290,811,600.00			
19	Keuno	867,213,000.00	378,088,000.00	489,125,000.00	867,213,000.00	0	100.00%
	Penyaluran ke-1		252,576,000.00	188,268,000.00			
	Penyaluran ke-2		125,512,000.00	132,473,000.00			
	Penyaluran ke-3		-	168,384,000.00			

Lampiran lll

No.	PENYALURAN KE DESA	PAGU	PENYALURAN		TOTAL PENYALURAN	SISA	%
			TAHAP I	TAHAP II			
			JUMLAH	JUMLAH			
20	Kolaka	734,035,000.00	379,628,400.00	354,406,600.00	734,035,000.00	0	100.00%
	Penyaluran ke-1		258,043,200.00	172,028,800.00			
	Penyaluran ke-2		121,585,200.00	182,377,800.00			
21	Kolo Atas	1,013,147,000.00	513,350,600.00	499,796,400.00	1,013,147,000.00	0	100.00%
	Penyaluran ke-1		189,075,200.00	283,612,800.00			
	Penyaluran ke-2		324,275,400.00	216,183,600.00			
22	Kolo Bawah	820,573,000.00	415,298,400.00	405,274,600.00	820,573,000.00	0	100.00%
	Penyaluran ke-1		154,090,800.00	231,136,200.00			
	Penyaluran ke-2		261,207,600.00	174,138,400.00			
23	Korobonde	1,158,931,000.00	503,945,400.00	654,985,600.00	1,158,931,000.00	0	100.00%
	Penyaluran ke-1		280,086,600.00	335,788,200.00			
	Penyaluran ke-2		223,858,800.00	132,473,000.00			
	Penyaluran ke-3		-	186,724,400.00			
24	Korololaki	1,052,427,000.00	465,410,600.00	587,016,400.00	1,052,427,000.00	0	100.00%
	Penyaluran ke-1		133,319,400.00	88,879,600.00			
	Penyaluran ke-2		332,091,200.00	498,136,800.00			
25	Korololama	1,109,153,000.00	480,880,400.00	628,272,600.00	1,109,153,000.00	0	100.00%
	Penyaluran ke-1		210,255,200.00	315,382,800.00			
	Penyaluran ke-2		-	132,473,000.00			
	Penyaluran ke-3		270,625,200.00	180,416,800.00			
26	Koromatantu	1,123,119,000.00	516,312,200.00	606,806,800.00	1,123,119,000.00	0	100.00%
	Penyaluran ke-1		315,118,400.00	472,677,600.00			
	Penyaluran ke-2		201,193,800.00	134,129,200.00			
27	Korompeeli	940,680,000.00	387,833,600.00	552,846,400.00	940,680,000.00	0	100.00%
	Penyaluran ke-1		193,652,400.00	129,101,600.00			
	Penyaluran ke-2		-	132,473,000.00			
	Penyaluran ke-3		194,181,200.00	291,271,800.00			
28	Korowalelo	825,330,000.00	388,387,200.00	436,942,800.00	825,330,000.00	0	100.00%
	Penyaluran ke-1		213,621,600.00	116,510,400.00			
	Penyaluran ke-2		174,765,600.00	320,432,400.00			
29	Korowou	1,047,374,000.00	523,949,600.00	523,424,400.00	1,047,374,000.00	0	100.00%
	Penyaluran ke-1		315,000,000.00	210,000,000.00			
	Penyaluran ke-2		208,949,600.00	313,424,400.00			
30	Koya	881,701,000.00	433,076,400.00	448,624,600.00	881,701,000.00	0	100.00%
	Penyaluran ke-1		191,888,400.00	287,832,600.00			
	Penyaluran ke-2		241,188,000.00	160,792,000.00			
31	Kumpi	844,095,000.00	327,273,800.00	516,821,200.00	844,095,000.00	0	100.00%
	Penyaluran ke-1		-	85,250,000.00			
	Penyaluran ke-2		199,398,800.00	132,473,000.00			
	Penyaluran ke-3		127,875,000.00	299,098,200.00			
32	Lanumor	790,747,000.00	387,228,000.00	403,519,000.00	790,747,000.00	0	100.00%
	Penyaluran ke-1		212,787,600.00	141,858,400.00			
	Penyaluran ke-2		174,440,400.00	261,660,600.00			
33	Lee	726,653,000.00	338,061,200.00	388,591,800.00	726,653,000.00	0	100.00%
	Penyaluran ke-1		142,200,000.00	94,800,000.00			
	Penyaluran ke-2		195,861,200.00	293,791,800.00			
34	Lembah Sumara	900,603,000.00	369,038,200.00	531,564,800.00	900,603,000.00		100.00%
	Penyaluran ke-1		185,358,600.00	123,572,400.00			
	Penyaluran ke-2		183,679,600.00	132,473,000.00			
	Penyaluran ke-3		-	275,519,400.00			
35	Lembobaru	753,914,000.00	320,304,400.00	433,609,600.00	753,914,000.00	0	100.00%
	Penyaluran ke-1		-	143,456,000.00			
	Penyaluran ke-2		105,120,400.00	132,473,000.00			
	Penyaluran ke-3		215,184,000.00	157,680,600.00			
36	Lembobelala	960,277,000.00	436,459,400.00	523,817,600.00	960,277,000.00	0	100.00%
	Penyaluran ke-1		279,413,600.00	419,120,400.00			
	Penyaluran ke-2		157,045,800.00	104,697,200.00			
37	Lembontonara	1,315,060,000.00	789,036,000.00	526,024,000.00	1,315,060,000.00	0	100.00%
	Penyaluran ke-1		303,563,400.00	202,375,600.00			
	Penyaluran ke-2		485,472,600.00	323,648,400.00			

Lampiran lll

No.	PENYALURAN KE DESA	PAGU	PENYALURAN		TOTAL PENYALURAN	SISA	%
			TAHAP I	TAHAP II			
			JUMLAH	JUMLAH			
38	Lemboroma	950,249,000.00	444,196,000.00	506,053,000.00	950,249,000.00	0	100.00%
	Penyaluran ke-1		192,289,200.00	128,192,800.00			
	Penyaluran ke-2		251,906,800.00	377,860,200.00			
39	Lemo	803,728,000.00	377,775,200.00	425,952,800.00	803,728,000.00	0	100.00%
	Penyaluran ke-1		168,852,000.00	112,568,000.00			
	Penyaluran ke-2		208,923,200.00	313,384,800.00			
40	Lemowalia	1,103,245,000.00	469,226,800.00	634,018,200.00	1,103,245,000.00	0	100.00%
	Penyaluran ke-1		242,754,000.00	339,709,200.00			
	Penyaluran ke-2		226,472,800.00	132,473,000.00			
	Penyaluran ke-3		-	161,836,000.00			
41	Lijo	800,490,000.00	426,568,000.00	373,922,000.00	800,490,000.00	0	100.00%
	Penyaluran ke-1		319,116,000.00	212,744,000.00			
	Penyaluran ke-2		107,452,000.00	161,178,000.00			
42	Londi	867,619,000.00	438,458,400.00	429,160,600.00	867,619,000.00	0	100.00%
	Penyaluran ke-1		274,232,400.00	182,821,600.00			
	Penyaluran ke-2		164,226,000.00	246,339,000.00			
43	Malino	991,526,000.00	483,322,800.00	508,203,200.00	991,526,000.00	0	100.00%
	Penyaluran ke-1		260,137,200.00	334,778,400.00			
	Penyaluran ke-2		223,185,600.00	173,424,800.00			
44	Malino Jaya	766,780,000.00	377,216,000.00	389,564,000.00	766,780,000.00	0	100.00%
	Penyaluran ke-1		165,704,000.00	248,556,000.00			
	Penyaluran ke-2		211,512,000.00	141,008,000.00			
45	Mandula	758,651,000.00	394,754,800.00	363,896,200.00	758,651,000.00	0	100.00%
	Penyaluran ke-1		273,883,200.00	182,588,800.00			
	Penyaluran ke-2		120,871,600.00	181,307,400.00			
46	Maralee	758,646,000.00	373,498,400.00	385,147,600.00	758,646,000.00	0	100.00%
	Penyaluran ke-1		210,120,000.00	140,080,000.00			
	Penyaluran ke-2		163,378,400.00	245,067,600.00			
47	Matube	816,862,000.00	400,841,400.00	416,020,600.00	816,862,000.00	0	100.00%
	Penyaluran ke-1		222,289,800.00	148,193,200.00			
	Penyaluran ke-2		178,551,600.00	267,827,400.00			
48	Mayumba	832,986,000.00	325,345,200.00	507,640,800.00	832,986,000.00	0	100.00%
	Penyaluran ke-1		189,925,200.00	284,887,800.00			
	Penyaluran ke-2		-	132,473,000.00			
	Penyaluran ke-3		135,420,000.00	90,280,000.00			
49	Menyo'e	900,342,000.00	465,424,800.00	434,917,200.00	900,342,000.00	0	100.00%
	Penyaluran ke-1		315,864,000.00	210,576,000.00			
	Penyaluran ke-2		149,560,800.00	224,341,200.00			
50	Mohoni	1,080,598,000.00	515,931,000.00	564,667,000.00	1,080,598,000.00	0	100.00%
	Penyaluran ke-1		264,855,600.00	397,283,400.00			
	Penyaluran ke-2		251,075,400.00	167,383,600.00			
51	Moleono	880,736,000.00	409,644,000.00	471,092,000.00	880,736,000.00	0	100.00%
	Penyaluran ke-1		237,595,200.00	356,392,800.00			
	Penyaluran ke-2		172,048,800.00	114,699,200.00			
52	Molino	1,218,941,000.00	504,091,200.00	714,849,800.00	1,218,941,000.00	0	100.00%
	Penyaluran ke-1		-	139,008,000.00			
	Penyaluran ke-2		295,579,200.00	132,473,000.00			
	Penyaluran ke-3		208,512,000.00	443,368,800.00			
53	Molores	913,550,000.00	446,057,000.00	467,493,000.00	913,550,000.00	0	100.00%
	Penyaluran ke-1		204,146,000.00	306,219,000.00			
	Penyaluran ke-2		241,911,000.00	161,274,000.00			
54	Momo	913,488,000.00	484,024,800.00	429,463,200.00	913,488,000.00	0	100.00%
	Penyaluran ke-1		355,888,800.00	237,259,200.00			
	Penyaluran ke-2		128,136,000.00	192,204,000.00			
55	Mondowe	766,270,000.00	391,562,000.00	374,708,000.00	766,270,000.00	0	100.00%
	Penyaluran ke-1		136,400,000.00	204,600,000.00			
	Penyaluran ke-2		255,162,000.00	170,108,000.00			
56	Mora	646,310,000.00	303,746,000.00	342,564,000.00	646,310,000.00	0	100.00%
	Penyaluran ke-1		135,666,000.00	90,444,000.00			
	Penyaluran ke-2		168,080,000.00	252,120,000.00			

Lampiran lll

No.	PENYALURAN KE DESA	PAGU	PENYALURAN		TOTAL PENYALURAN	SISA	%
			TAHAP I	TAHAP II			
			JUMLAH	JUMLAH			
57	Onepute	830,456,000.00	397,400,600.00	433,055,400.00	830,456,000.00	0	100.00%
	Penyaluran ke-1		195,654,600.00	130,436,400.00			
	Penyaluran ke-2		201,746,000.00	302,619,000.00			
58	Opo	985,783,000.00	473,595,000.00	512,188,000.00	985,783,000.00	0	100.00%
	Penyaluran ke-1		237,845,400.00	353,624,400.00			
	Penyaluran ke-2		235,749,600.00	158,563,600.00			
59	Pa'awaru	711,635,000.00	334,247,800.00	377,387,200.00	711,635,000.00	0	100.00%
	Penyaluran ke-1		185,466,400.00	278,199,600.00			
	Penyaluran ke-2		148,781,400.00	99,187,600.00			
60	Pambarea	697,324,000.00	418,394,400.00	278,929,600.00	697,324,000.00	0	100.00%
	Penyaluran ke-1		188,462,400.00	125,641,600.00			
	Penyaluran ke-2		229,932,000.00	153,288,000.00			
61	Panca Makmur	930,732,000.00	480,613,000.00	450,119,000.00	930,732,000.00	0	100.00%
	Penyaluran ke-1		324,960,600.00	216,640,400.00			
	Penyaluran ke-2		155,652,400.00	233,478,600.00			
62	Pandauke	948,938,000.00	475,043,600.00	473,894,400.00	948,938,000.00	0	100.00%
	Penyaluran ke-1		188,638,400.00	282,957,600.00			
	Penyaluran ke-2		286,405,200.00	190,936,800.00			
63	Parangisi	875,242,000.00	423,579,800.00	451,662,200.00	875,242,000.00	0	100.00%
	Penyaluran ke-1		203,130,800.00	304,696,200.00			
	Penyaluran ke-2		220,449,000.00	146,966,000.00			
64	Peboa	724,319,000.00	361,030,000.00	363,289,000.00	724,319,000.00	0	100.00%
	Penyaluran ke-1		213,907,200.00	142,604,800.00			
	Penyaluran ke-2		147,122,800.00	220,684,200.00			
65	Peleru	996,656,000.00	509,437,200.00	487,218,800.00	996,656,000.00	0	100.00%
	Penyaluran ke-1		177,112,800.00	265,669,200.00			
	Penyaluran ke-2		332,324,400.00	221,549,600.00			
66	Peonea	1,073,606,000.00	447,665,800.00	625,940,200.00	1,073,606,000.00	0	100.00%
	Penyaluran ke-1		234,028,000.00	351,042,000.00			
	Penyaluran ke-2		-	132,473,000.00			
	Penyaluran ke-3		213,637,800.00	142,425,200.00			
67	Petumbea	696,830,000.00	356,024,000.00	340,806,000.00	696,830,000.00	0	100.00%
	Penyaluran ke-1		124,148,000.00	154,584,000.00			
	Penyaluran ke-2		231,876,000.00	186,222,000.00			
68	Po'ona	694,303,000.00	366,705,600.00	327,597,400.00	694,303,000.00	0	100.00%
	Penyaluran ke-1		266,953,200.00	177,968,800.00			
	Penyaluran ke-2		99,752,400.00	149,628,600.00			
69	Pokeang	773,720,000.00	408,044,000.00	365,676,000.00	773,720,000.00	0	100.00%
	Penyaluran ke-1		295,668,000.00	197,112,000.00			
	Penyaluran ke-2		112,376,000.00	168,564,000.00			
70	Pontangoa	756,368,000.00	395,392,600.00	360,975,400.00	756,368,000.00	0	100.00%
	Penyaluran ke-1		116,856,400.00	175,284,600.00			
	Penyaluran ke-2		278,536,200.00	185,690,800.00			
71	Posangke	1,415,063,000.00	635,867,800.00	779,195,200.00	1,415,063,000.00	0	100.00%
	Penyaluran ke-1		-	245,663,600.00			
	Penyaluran ke-2		267,372,400.00	132,473,000.00			
	Penyaluran ke-3		368,495,400.00	401,058,600.00			
72	Ronta	760,476,000.00	394,231,600.00	366,244,400.00	760,476,000.00	0	100.00%
	Penyaluran ke-1		124,108,000.00	186,162,000.00			
	Penyaluran ke-2		270,123,600.00	180,082,400.00			
73	Saemba	902,352,000.00	428,578,800.00	473,773,200.00	902,352,000.00	0	100.00%
	Penyaluran ke-1		225,664,800.00	338,497,200.00			
	Penyaluran ke-2		202,914,000.00	135,276,000.00			
74	Saemba Walati	738,789,000.00	377,656,200.00	361,132,800.00	738,789,000.00	0	100.00%
	Penyaluran ke-1		246,421,800.00	196,851,600.00			
	Penyaluran ke-2		131,234,400.00	164,281,200.00			
75	Salubiro	1,568,024,000.00	729,689,600.00	838,334,400.00	1,568,024,000.00	0	100.00%
	Penyaluran ke-1		307,440,000.00	204,960,000.00			
	Penyaluran ke-2		422,249,600.00	633,374,400.00			
76	Sampalowo	943,861,000.00	379,911,600.00	563,949,400.00	943,861,000.00	0	100.00%
	Penyaluran ke-1		213,842,400.00	320,763,600.00			
	Penyaluran ke-2		-	132,473,000.00			
	Penyaluran ke-3		166,069,200.00	110,712,800.00			

Lampiran lll

No.	PENYALURAN KE DESA	PAGU	PENYALURAN		TOTAL PENYALURAN	SISA	%
			TAHAP I	TAHAP II			
			JUMLAH	JUMLAH			
77	Sea	1,036,915,000.00	518,976,800.00	517,938,200.00	1,036,915,000.00	0	100.00%
	Penyaluran ke-1		312,632,400.00	208,421,600.00			
	Penyaluran ke-2		206,344,400.00	309,516,600.00			
78	Siliti	878,578,000.00	345,446,200.00	533,131,800.00	878,578,000.00	0	100.00%
	Penyaluran ke-1		141,012,600.00	306,650,400.00			
	Penyaluran ke-2		204,433,600.00	132,473,000.00			
	Penyaluran ke-3		-	94,008,400.00			
79	Sumara Jaya	662,612,000.00	331,080,800.00	331,531,200.00	662,612,000.00	0	100.00%
	Penyaluran ke-1		198,108,000.00	199,459,200.00			
	Penyaluran ke-2		132,972,800.00	132,072,000.00			
80	Tabarano	675,244,000.00	309,349,600.00	365,894,400.00	675,244,000.00	0	100.00%
	Penyaluran ke-1		191,593,600.00	78,504,000.00			
	Penyaluran ke-2		117,756,000.00	287,390,400.00			
81	Tadaku Jaya	646,399,000.00	322,421,200.00	323,977,800.00	646,399,000.00	0	100.00%
	Penyaluran ke-1		130,836,400.00	196,254,600.00			
	Penyaluran ke-2		191,584,800.00	127,723,200.00			
82	Taende	1,035,134,000.00	498,493,600.00	536,640,400.00	1,035,134,000.00	0	100.00%
	Penyaluran ke-1		253,320,000.00	168,880,000.00			
	Penyaluran ke-2		245,173,600.00	367,760,400.00			
83	Tamainusi	1,012,093,000.00	486,477,200.00	525,615,800.00	1,012,093,000.00	0	100.00%
	Penyaluran ke-1		244,920,000.00	163,280,000.00			
	Penyaluran ke-2		241,557,200.00	362,335,800.00			
84	Tambale	691,243,000.00	377,564,400.00	313,678,600.00	691,243,000.00	0	100.00%
	Penyaluran ke-1		74,362,800.00	111,544,200.00			
	Penyaluran ke-2		303,201,600.00	202,134,400.00			
85	Tambarobone	952,966,000.00	389,075,200.00	563,890,800.00	952,966,000.00	0	100.00%
	Penyaluran ke-1		182,634,000.00	309,661,800.00			
	Penyaluran ke-2		206,441,200.00	132,473,000.00			
	Penyaluran ke-3		-	121,756,000.00			
86	Tambayoli	961,785,000.00	449,328,000.00	512,457,000.00	961,785,000.00	0	100.00%
	Penyaluran ke-1		193,842,000.00	383,229,000.00			
	Penyaluran ke-2		255,486,000.00	129,228,000.00			
87	Tamonjengi	839,090,000.00	419,956,400.00	419,133,600.00	839,090,000.00	0	100.00%
	Penyaluran ke-1		252,961,200.00	168,640,800.00			
	Penyaluran ke-2		166,995,200.00	250,492,800.00			
88	Tanakuraya	956,658,000.00	501,920,200.00	454,737,800.00	956,658,000.00	0	100.00%
	Penyaluran ke-1		144,149,200.00	238,514,000.00			
	Penyaluran ke-2		357,771,000.00	216,223,800.00			
89	Tananagaya	745,815,000.00	396,079,000.00	349,736,000.00	745,815,000.00	0	100.00%
	Penyaluran ke-1		293,259,000.00	195,506,000.00			
	Penyaluran ke-2		102,820,000.00	154,230,000.00			
90	Tanasumpu	1,029,666,000.00	566,077,800.00	463,588,200.00	1,029,666,000.00	0	100.00%
	Penyaluran ke-1		462,634,200.00	308,422,800.00			
	Penyaluran ke-2		103,443,600.00	155,165,400.00			
91	Tanauge	767,674,000.00	349,660,600.00	418,013,400.00	767,674,000.00	0	100.00%
	Penyaluran ke-1		221,887,600.00	85,182,000.00			
	Penyaluran ke-2		127,773,000.00	332,831,400.00			
92	Tandoyondo	831,707,000.00	403,752,800.00	427,954,200.00	831,707,000.00	0	100.00%
	Penyaluran ke-1		190,542,800.00	285,814,200.00			
	Penyaluran ke-2		213,210,000.00	142,140,000.00			
93	Taronggo	1,264,151,000.00	546,364,800.00	717,786,200.00	1,264,151,000.00	0	100.00%
	Penyaluran ke-1		281,080,800.00	397,926,000.00			
	Penyaluran ke-2		265,284,000.00	132,473,000.00			
	Penyaluran ke-3		-	187,387,200.00			
94	Tingkeao	734,094,000.00	336,362,600.00	397,731,400.00	734,094,000.00	0	100.00%
	Penyaluran ke-1		208,187,600.00	312,281,400.00			
	Penyaluran ke-2		128,175,000.00	85,450,000.00			
95	Tinompo	1,242,904,000.00	545,707,800.00	697,196,200.00	1,242,904,000.00	0	100.00%
	Penyaluran ke-1		304,606,200.00	203,070,800.00			
	Penyaluran ke-2		-	132,473,000.00			
	Penyaluran ke-3		241,101,600.00	361,652,400.00			

Lampiran lll

No.	PENYALURAN KE DESA	PAGU	PENYALURAN		TOTAL PENYALURAN	SISA	%
			TAHAP I	TAHAP II			
			JUMLAH	JUMLAH			
96	Tirongan Atas	1,045,957,000.00	451,236,800.00	594,720,200.00	1,045,957,000.00	0	100.00%
	Penyaluran ke-1		-	290,560,800.00			
	Penyaluran ke-2		257,529,600.00	132,473,000.00			
	Penyaluran ke-3		193,707,200.00	171,686,400.00			
97	Tirongan Bawah	855,066,000.00	346,001,600.00	509,064,400.00	855,066,000.00	0	100.00%
	Penyaluran ke-1		175,108,400.00	262,662,600.00			
	Penyaluran ke-2		-	132,473,000.00			
	Penyaluran ke-3		170,893,200.00	113,928,800.00			
98	Tiu	891,314,000.00	456,500,600.00	434,813,400.00	891,314,000.00	0	100.00%
	Penyaluran ke-1		299,925,000.00	199,950,000.00			
	Penyaluran ke-2		156,575,600.00	234,863,400.00			
99	Tiwa'a	793,647,000.00	343,677,000.00	449,970,000.00	793,647,000.00	0	100.00%
	Penyaluran ke-1		106,054,800.00	158,414,800.00			
	Penyaluran ke-2		-	132,473,000.00			
	Penyaluran ke-3		237,622,200.00	159,082,200.00			
100	Toddopoli	802,557,000.00	411,684,800.00	390,872,200.00	802,557,000.00	0	100.00%
	Penyaluran ke-1		139,698,800.00	209,548,200.00			
	Penyaluran ke-2		271,986,000.00	181,324,000.00			
101	Togo Mulyo	862,186,000.00	420,431,400.00	441,754,600.00	862,186,000.00	0	100.00%
	Penyaluran ke-1		193,760,400.00	151,114,000.00			
	Penyaluran ke-2		226,671,000.00	290,640,600.00			
102	Tokala Atas	985,391,000.00	458,876,400.00	526,514,600.00	985,391,000.00	0	100.00%
	Penyaluran ke-1		194,160,000.00	129,440,000.00			
	Penyaluran ke-2		264,716,400.00	397,074,600.00			
103	Tokonanaka	723,069,000.00	346,011,600.00	377,057,400.00	723,069,000.00	0	100.00%
	Penyaluran ke-1		175,659,600.00	113,568,000.00			
	Penyaluran ke-2		170,352,000.00	263,489,400.00			
104	Tomata	1,053,416,000.00	632,049,600.00	421,366,400.00	1,053,416,000.00	0	100.00%
	Penyaluran ke-1		349,200,600.00	232,800,400.00			
	Penyaluran ke-2		282,849,000.00	188,566,000.00			
105	Tompira	988,606,000.00	476,031,800.00	512,574,200.00	988,606,000.00	0	100.00%
	Penyaluran ke-1		234,263,600.00	351,395,400.00			
	Penyaluran ke-2		241,768,200.00	161,178,800.00			
106	Tomui Karya	759,838,000.00	369,078,200.00	390,759,800.00	759,838,000.00	0	100.00%
	Penyaluran ke-1		173,649,200.00	260,473,800.00			
	Penyaluran ke-2		195,429,000.00	130,286,000.00			
107	Tontowea	791,089,000.00	356,621,600.00	434,467,400.00	791,089,000.00	0	100.00%
	Penyaluran ke-1		120,558,000.00	80,372,000.00			
	Penyaluran ke-2		236,063,600.00	354,095,400.00			
108	Towara	888,592,000.00	437,410,000.00	451,182,000.00	888,592,000.00	0	100.00%
	Penyaluran ke-1		245,919,600.00	163,946,400.00			
	Penyaluran ke-2		191,490,400.00	287,235,600.00			
109	Towara Pantai	690,440,000.00	319,470,000.00	370,970,000.00	690,440,000.00	0	100.00%
	Penyaluran ke-1		129,882,000.00	86,588,000.00			
	Penyaluran ke-2		189,588,000.00	284,382,000.00			
110	Uemasi	889,374,000.00	443,221,400.00	446,152,600.00	889,374,000.00	0	100.00%
	Penyaluran ke-1		262,415,400.00	271,209,000.00			
	Penyaluran ke-2		180,806,000.00	174,943,600.00			
111	Uempanapa	761,863,000.00	378,505,200.00	383,357,800.00	761,863,000.00	0	100.00%
	Penyaluran ke-1		157,225,200.00	235,837,800.00			
	Penyaluran ke-2		221,280,000.00	147,520,000.00			
112	Uepakatu	844,321,000.00	427,698,400.00	416,622,600.00	844,321,000.00	0	100.00%
	Penyaluran ke-1		269,910,000.00	236,682,600.00			
	Penyaluran ke-2		157,788,400.00	179,940,000.00			
113	Ueruru	659,050,000.00	304,474,000.00	354,576,000.00	659,050,000.00	0	100.00%
	Penyaluran ke-1		122,562,000.00	81,708,000.00			
	Penyaluran ke-2		181,912,000.00	272,868,000.00			
114	Uewajo	931,210,000.00	372,988,000.00	558,222,000.00	931,210,000.00	0	100.00%
	Penyaluran ke-1		-	106,986,400.00			
	Penyaluran ke-2		212,508,400.00	132,473,000.00			
	Penyaluran ke-3		160,479,600.00	318,762,600.00			

Lampiran lll

No.	PENYALURAN KE DESA	PAGU	PENYALURAN		TOTAL PENYALURAN	SISA	%
			TAHAP I	TAHAP II			
			JUMLAH	JUMLAH			
115	Ulu Laa	907,550,000.00	374,497,600.00	533,052,400.00	907,550,000.00	0	100.00%
	Penyaluran ke-1		193,400,400.00	128,933,600.00			
	Penyaluran ke-2		-	132,473,000.00			
	Penyaluran ke-3		181,097,200.00	271,645,800.00			
116	Uluanso	657,485,000.00	324,632,600.00	332,852,400.00	657,485,000.00	0	100.00%
	Penyaluran ke-1		184,915,800.00	123,277,200.00			
	Penyaluran ke-2		139,716,800.00	209,575,200.00			
117	Ungkea	884,443,000.00	351,534,400.00	532,908,600.00	884,443,000.00	0	100.00%
	Penyaluran ke-1		-	101,492,800.00			
	Penyaluran ke-2		199,295,200.00	132,473,000.00			
	Penyaluran ke-3		152,239,200.00	298,942,800.00			
118	Waraa	695,957,000.00	340,978,800.00	354,978,200.00	695,957,000.00	0	100.00%
	Penyaluran ke-1		153,190,800.00	229,786,200.00			
	Penyaluran ke-2		187,788,000.00	125,192,000.00			
119	Wawondula	762,000,000.00	360,860,000.00	401,140,000.00	762,000,000.00	0	100.00%
	Penyaluran ke-1		168,180,000.00	289,020,000.00			
	Penyaluran ke-2		192,680,000.00	112,120,000.00			
120	Wawopada	948,446,000.00	446,274,600.00	502,171,400.00	948,446,000.00	0	100.00%
	Penyaluran ke-1		245,586,000.00	368,379,000.00			
	Penyaluran ke-2		200,688,600.00	133,792,400.00			
121	Winangobino	1,379,607,000.00	676,627,400.00	702,979,600.00	1,379,607,000.00	0	100.00%
	Penyaluran ke-1		374,353,800.00	249,569,200.00			
	Penyaluran ke-2		302,273,600.00	453,410,400.00			
122	Woomparigi	781,587,000.00	388,555,400.00	393,031,600.00	781,587,000.00	0	100.00%
	Penyaluran ke-1		227,761,800.00	241,190,400.00			
	Penyaluran ke-2		160,793,600.00	151,841,200.00			
JUMLAH TOTAL		**109,581,662,000.00**	**58,751,820,640.00**	**24,289,020,640.00**	**109,581,662,000.00**	**0**	**100%**



LAMPIRAN IV :

DAFTAR TRANSFER DANA BAGI HASIL (D B H)

PAJAK PROPINSI

Realisasi Transfer Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Provinsi Sulawesi Tengah
Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara

Lampiran IV

No.	Jenis Pajak	Alokasi DBH Pajak TA 2024 (Rp)	Realisasi DBH Pajak			Keterangan
			Tanggal Penerimaan	Transfer DBH (Rp)	Sisa (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	7,458,688,676.00	31/5/2024	1,540,172,550.00	5,918,516,126.00	
			6/8/2024	1,629,126,587.00	4,289,389,539.00	
			7/11/2024	1,812,434,757.00	(1,812,434,757.00)	
			31/12/2024	359,611,706.00	(2,172,046,463.00)	
	JUMLAH	**7,458,688,676.00**		**5,341,345,600.00**	**2,117,343,076.00**	**Kurang Salur**
2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermoto	8,748,923,061.00	31/5/2024	1,947,203,142.00	6,801,719,919.00	
	(BBN-KB)		6/8/2024	2,101,833,002.00	4,699,886,917.00	
			7/11/2024	2,224,653,565.00	(2,224,653,565.00)	
			31/12/2024	427,005,768.00	(2,651,659,333.00)	
	JUMLAH	**8,748,923,061.00**		**6,700,695,477.00**	**2,048,227,584.00**	**Kurang Salur**
3.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	26,484,578,667.00	31/5/2024	4,182,774,854.00	22,301,803,813.00	
			6/8/2024	6,365,993,658.00	15,935,810,155.00	
			7/11/2024	7,850,526,555.00	8,085,283,600.00	
			31/12/2024	1,407,500,871.00	6,677,782,729.00	
	JUMLAH	**26,484,578,667.00**		**19,806,795,938.00**	**6,677,782,729.00**	**Kurang Salur**
4	Pajak Air Permukaan (PAP)	3,697,120,546.00	31/5/2024	1,076,141,128.00	2,620,979,418.00	
			6/8/2024	821,608,973.00	1,799,370,445.00	
			7/11/2024	792,327,546.00	(792,327,546.00)	
			31/12/2024	294,941,438.00	(1,087,268,984.00)	
	JUMLAH	**3,697,120,546.00**		**2,985,019,085.00**	**712,101,461.00**	**Kurang Salur**
5	Pajak Rokok	8,742,793,414.00	31/5/2024	3,427,197,857.00	5,315,595,557.00	
			5/8/2024	1,815,426,916.00	3,500,168,641.00	
			7/11/2024	2,093,857,989.00	1,406,310,652.00	
			27/12/2024	1,406,310,652.00	-	
	JUMLAH	**8,742,793,414.00**		**8,742,793,414.00**	**-**	**Kurang Salur**
	JUMLAH TOTAL	**55,132,104,364.00**		**43,576,649,514.00**	**11,555,454,850.00**	**Total Kurang Salur**



LAMPIRAN V (A – J) :

DAFTAR RINCIAN KLASIFIKASI BELANJA DAERAH

RINCIAN BELANJA DAERAH TAHUN 2024

Kode Rekening : 5.1.01

Nama Rekening : BELANJA PEGAWAI **Lampiran V.a**

NO	U R A I A N	A N G G A R A N	R E A L I S A S I	%
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	4,824,259,089.00	4,607,996,945.00	95.5
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH	2,317,824,285.00	2,129,443,620.00	91.9
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3,113,744,148.00	2,968,336,325.00	95.3
4	BADAN PENDAPATAN DAERAH	7,708,085,811.00	7,037,212,447.00	91.3
5	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	42,089,030,127.00	27,931,955,650.00	66.4
6	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	4,153,703,379.00	3,970,306,570.00	95.6
7	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	22,800,000.00	19,000,000.00	83.3
8	BAGIAN HUKUM	22,800,000.00	19,000,000.00	83.3
9	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	28,800,000.00	24,000,000.00	83.3
10	BAGIAN ORGANISASI	22,800,000.00	22,800,000.00	100.0
11	BAGIAN PEMERINTAHAN	22,800,000.00	22,800,000.00	100.0
12	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	861,500,000.00	724,500,000.00	84.1
13	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	22,800,000.00	19,000,000.00	83.3
14	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	22,800,000.00	19,000,000.00	83.3
15	BAGIAN UMUM	13,644,745,295.00	11,368,994,943.00	83.3
16	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH	3,901,301,795.00	3,626,613,288.00	93.0
17	DINAS KESEHATAN DAERAH	105,528,435,843.00	104,638,345,627.00	99.2
18	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH	3,633,770,944.00	3,420,599,903.00	94.1
19	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH	3,339,621,839.00	3,098,043,312.00	92.8
20	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	3,615,211,380.00	3,482,399,197.00	96.3
21	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH	3,984,061,672.00	3,792,187,640.00	95.2
22	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH	7,464,275,481.00	7,174,597,574.00	96.1
23	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAERAH	2,914,194,293.00	2,635,220,728.00	90.4

Kode Rekening : 5.1.01

Nama Rekening : BELANJA PEGAWAI **Lampiran V.a**

NO	U R A I A N	A N G G A R A N	R E A L I S A S I	%
24	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH	5,264,660,362.00	5,128,344,971.00	97.4
25	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	204,432,239,771.00	173,547,629,844.00	84.9
26	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH	5,194,319,561.00	4,940,932,842.00	95.1
27	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH	3,700,612,579.00	3,516,628,425.00	95.0
28	DINAS PERIKANAN DAERAH	4,256,003,084.00	3,913,892,705.00	92.0
29	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH	2,268,111,658.00	2,016,810,615.00	88.9
30	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DAERAH	17,712,454,003.00	17,559,344,944.00	99.1
31	DINAS SOSIAL DAERAH	2,947,685,798.00	2,783,439,651.00	94.4
32	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	3,199,305,677.00	3,083,742,478.00	96.4
33	INSPEKTORAT DAERAH	5,807,132,111.00	5,544,361,691.00	95.5
34	KECAMATAN BUNGKU UTARA	4,066,425,178.00	3,884,235,245.00	95.5
35	KECAMATAN LEMBO	2,831,517,182.00	2,663,146,459.00	94.1
36	KECAMATAN LEMBO RAYA	2,080,202,276.00	1,994,278,066.00	95.9
37	KECAMATAN MAMOSALATO	2,358,548,938.00	2,154,073,747.00	91.3
38	KECAMATAN MORI ATAS	2,976,685,787.00	2,818,056,393.00	94.7
39	KECAMATAN MORI UTARA	2,730,768,211.00	2,308,715,806.00	84.5
40	KECAMATAN PETASIA	4,711,553,205.00	4,592,100,429.00	97.5
41	KECAMATAN PETASIA BARAT	2,313,272,016.00	2,152,758,072.00	93.1
42	KECAMATAN PETASIA TIMUR	2,519,249,930.00	2,358,171,090.00	93.6
43	KECAMATAN SOYO JAYA	1,971,706,899.00	1,734,236,648.00	88.0
44	PUSKESMAS ANUTOLUWU	385,543,725.00	347,656,793.00	90.2
45	PUSKESMAS BATURUBE	663,353,736.00	547,063,816.00	82.5
46	PUSKESMAS BETELEME	661,164,460.00	591,299,000.00	89.4
47	PUSKESMAS KOLONODALE	672,620,718.00	661,661,632.00	98.4
48	PUSKESMAS LEE	123,197,455.00	123,197,455.00	100.0
49	PUSKESMAS MAYUMBA	334,339,429.00	293,000,000.00	87.6
50	PUSKESMAS MOLINO	746,988,433.00	689,967,718.00	92.4
51	PUSKESMAS PANCAMAKMUR	287,482,535.00	256,147,110.00	89.1
52	PUSKESMAS PANDAUKE	434,456,023.00	391,626,144.00	90.1
53	PUSKESMAS PETUMBEA	408,915,329.00	383,403,877.00	93.8
54	PUSKESMAS POTOWE INDO LIJO	77,834,667.00	76,037,735.00	97.7
55	PUSKESMAS TAMBAYOLI	151,849,124.00	138,024,008.00	90.9
56	PUSKESMAS TOMATA	496,010,632.00	477,734,901.00	96.3
57	PUSKESMAS WONGKO NDAYA	78,450,000.00	68,035,624.00	86.7
58	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOLONODALE	25,089,430,181.00	29,440,111,682.00	117.3

Kode Rekening : 5.1.01

Nama Rekening : BELANJA PEGAWAI **Lampiran V.a**

NO	U R A I A N	A N G G A R A N	R E A L I S A S I	%
59	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN DAERAH	5,304,313,939.00	5,077,118,234.00	95.7
60	SEKRETARIAT DAERAH	-	2,169,488,399.00	0.0
61	SEKRETARIAT DPRD	14,325,979,521.00	14,067,452,749.00	98.2
	TOTAL	**546,843,749,514.00**	**497,246,280,767.00**	**90.9302**

RINCIAN BELANJA DAERAH TAHUN 2024

Kode Rekening : 5.1.02

Nama Rekening : BELANJA BARANG DAN JASA **Lampiran V.b**

NO	U R A I A N	A N G G A R A N	R E A L I S A S I	%
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	5,645,519,920.00	5,410,950,538.00	95.85
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH	3,790,933,114.00	3,577,547,186.00	94.37
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	6,890,454,799.00	6,634,305,109.00	96.28
4	BADAN PENDAPATAN DAERAH	4,098,064,133.00	4,038,715,801.00	98.55
5	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	12,017,931,707.00	8,925,615,216.00	74.27
6	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5,477,186,364.00	5,304,597,315.00	96.85
7	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	1,007,999,950.00	866,292,428.00	85.94
8	BAGIAN HUKUM	1,228,358,050.00	988,894,292.00	80.51
9	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	7,542,437,060.00	6,773,084,235.00	89.80
10	BAGIAN ORGANISASI	1,280,615,000.00	1,125,137,833.00	87.86
11	BAGIAN PEMERINTAHAN	2,531,784,950.00	1,289,722,976.00	50.94
12	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	2,158,705,000.00	1,906,259,299.00	88.31
13	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	1,159,327,450.00	853,242,907.00	73.60
14	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	2,127,761,050.00	1,804,136,368.00	84.79
15	BAGIAN UMUM	23,233,479,876.00	20,380,668,689.00	87.72
16	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH	2,232,540,001.00	2,206,655,005.00	98.84
17	DINAS KESEHATAN DAERAH	59,543,560,551.00	57,300,479,483.00	96.23
18	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH	5,307,702,500.00	4,840,001,500.00	91.19
19	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH	5,126,799,608.00	5,007,454,136.00	97.67
20	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	5,042,700,947.00	4,901,370,767.00	97.20
21	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH	6,709,563,465.00	6,145,907,371.00	91.60
22	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH	40,273,598,107.00	38,455,888,879.00	95.49
23	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAERAH	10,008,670,029.00	9,686,129,455.00	96.78
24	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH	2,580,687,641.00	2,432,172,958.00	94.25
25	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	53,199,985,846.00	46,194,961,024.00	86.83

Kode Rekening : 5.1.02

Nama Rekening : BELANJA BARANG DAN JASA **Lampiran V.b**

NO	U R A I A N	A N G G A R A N	R E A L I S A S I	%
26	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH	8,947,433,320.00	8,490,893,990.00	94.90
27	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH	3,984,116,706.00	3,782,049,475.00	94.93
28	DINAS PERIKANAN DAERAH	9,668,595,186.00	9,586,646,069.00	99.15
29	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH	2,524,753,782.00	2,399,258,805.00	95.03
30	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DAERAH	33,864,931,666.00	31,547,682,242.89	93.16
31	DINAS SOSIAL DAERAH	4,489,751,818.00	3,957,917,071.00	88.15
32	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	3,979,839,695.00	3,869,445,299.00	97.23
33	INSPEKTORAT DAERAH	8,544,517,488.00	7,524,378,085.00	88.06
34	KECAMATAN BUNGKU UTARA	601,699,900.00	601,612,507.00	99.99
35	KECAMATAN LEMBO	777,933,650.00	774,445,539.00	99.55
36	KECAMATAN LEMBO RAYA	532,725,245.00	522,645,834.00	98.11
37	KECAMATAN MAMOSALATO	558,893,750.00	556,890,304.00	99.64
38	KECAMATAN MORI ATAS	403,599,838.00	403,467,815.00	99.97
39	KECAMATAN MORI UTARA	391,796,950.00	391,780,950.00	100.00
40	KECAMATAN PETASIA	2,756,871,460.00	2,720,247,238.00	98.67
41	KECAMATAN PETASIA BARAT	445,091,224.00	420,579,086.00	94.49
42	KECAMATAN PETASIA TIMUR	643,799,955.00	643,350,695.00	99.93
43	KECAMATAN SOYO JAYA	445,707,850.00	444,567,406.00	99.74
44	PUSKESMAS ANUTOLUWU	311,966,700.00	301,458,071.00	96.63
45	PUSKESMAS BATURUBE	1,209,587,300.00	1,156,662,763.00	95.62
46	PUSKESMAS BETELEME	864,195,634.00	840,321,122.00	97.24
47	PUSKESMAS KOLONODALE	1,097,602,576.00	1,001,094,700.00	91.21
48	PUSKESMAS LEE	276,569,877.00	271,486,558.00	98.16
49	PUSKESMAS MAYUMBA	571,860,418.00	534,961,147.00	93.55
50	PUSKESMAS MOLINO	515,348,590.00	465,517,864.00	90.33
51	PUSKESMAS PANCAMAKMUR	467,826,590.00	439,221,011.00	93.89
52	PUSKESMAS PANDAUKE	629,398,200.00	608,143,831.00	96.62
53	PUSKESMAS PETUMBEA	475,281,368.00	456,029,124.00	95.95
54	PUSKESMAS POTOWE INDO LIJO	285,424,150.00	276,288,390.00	96.80
55	PUSKESMAS TAMBAYOLI	235,422,623.00	232,959,284.00	98.95
56	PUSKESMAS TOMATA	876,048,404.00	846,001,857.00	96.57
57	PUSKESMAS WONGKO NDAYA	353,153,533.00	346,783,064.00	98.20
58	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOLONODALE	53,764,056,554.00	49,631,457,405.60	92.31
59	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN DAERAH	10,462,968,648.00	10,400,472,100.00	99.40
60	SEKRETARIAT DAERAH	0.00	2,149,163,061.00	0.00
61	SEKRETARIAT DPRD	25,654,879,140.00	23,311,722,462.00	90.87
	TOTAL	**451,830,016,906.00**	**418,957,792,995.49**	**92.72**

RINCIAN BELANJA DAERAH TAHUN 2024

Kode Rekening : 5.1.03

Nama Rekening : BELANJA BUNGA **Lampiran V.c**

NO	U R A I A N	A N G G A R A N	R E A L I S A S I	%
1	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	8,841,204,660.00	8,622,865,171.00	97.53

RINCIAN BELANJA DAERAH TAHUN 2024

Kode Rekening : 5.1.05
Nama Rekening : BELANJA HIBAH **Lampiran Vd**

NO	U R A I A N	A N G G A R A N	R E A L I S A S I	%
1	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH	45,247,026,663.00	44,847,026,662.99	**99.1**
2	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	7,428,184,965.00	7,427,031,945.00	**100.0**
3	DINAS KESEHATAN DAERAH	700,000,000.00	700,000,000.00	**100.0**
4	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	15,000,000.00	0	**-**
5	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH	2,195,840,500.00	1,925,000,000.00	**87.7**
6	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAERAH	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	**100.0**
7	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	2,389,997,954.00	2,383,775,000.00	**99.7**
8	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH	400,000,000.00	400,000,000.00	**100.0**
	TOTAL	**59,376,050,082.00**	**58,682,833,607.99**	**98.83**

RINCIAN BELANJA DAERAH TAHUN 2024

Kode Rekening : 5.1.06
Nama Rekening : BELANJA BANTUAN SOSIAL **Lampiran V.e**

NO	U R A I A N	A N G G A R A N	R E A L I S A S I	%
1	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	28,521,924,055.00	28,481,937,055.00	99.86

RINCIAN BELANJA DAERAH TAHUN 2024

Kode Rekening : 5.2.01

Nama Rekening : BELANJA MODAL TANAH **Lampiran V.f**

NO	U R A I A N	A N G G A R A N	R E A L I S A S I	%
1	BAGIAN PEMERINTAHAN	5,570,407,150.00	1,048,200,000.00	18.82
2	SEKRETARIAT DAERAH	0	915,060,000.00	0.00
	TOTAL	**5,570,407,150.00**	**1,963,260,000.00**	**35.24**

RINCIAN BELANJA DAERAH TAHUN 2024

Kode Rekening : 5.2.02

Nama Rekening : BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN **Lampiran V.g**

NO	U R A I A N	A N G G A R A N	R E A L I S A S I	%
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	15,000,000.00	0	0.00
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH	202,000,000.00	201,820,000.00	99.91
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	534,494,650.00	533,937,688.00	99.90
4	BADAN PENDAPATAN DAERAH	283,500,000.00	283,316,700.00	99.94
5	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	4,697,956,650.00	3,371,690,000.00	71.77
6	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	126,506,644.00	116,500,000.00	92.09
7	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	49,200,000.00	49,170,000.00	99.94
8	BAGIAN HUKUM	126,841,950.00	126,760,000.00	99.94
9	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	36,400,000.00	36,363,000.00	99.90
10	BAGIAN ORGANISASI	34,585,000.00	34,500,000.00	99.75
11	BAGIAN PEMERINTAHAN	178,800,000.00	178,650,000.00	99.92
12	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	1,209,250,000.00	1,191,707,550.00	98.55
13	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	169,670,000.00	153,790,000.00	90.64
14	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	42,308,750.00	42,308,750.00	100.00
15	BAGIAN UMUM	768,385,000.00	758,374,000.00	98.70
16	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH	2,244,950,000.00	543,250,000.00	24.20
17	DINAS KESEHATAN DAERAH	9,610,116,751.00	9,393,998,800.00	97.75
18	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH	205,737,000.00	141,370,000.00	68.71
19	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH	88,360,000.00	85,360,000.00	96.60
20	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	973,000,000.00	972,690,100.00	99.97
21	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH	499,635,541.00	441,240,000.00	88.31
22	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH	590,410,900.00	588,165,000.00	99.62
23	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAERAH	289,400,000.00	289,054,000.00	99.88
24	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH	953,203,000.00	830,813,500.00	87.16
25	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	12,449,405,995.00	10,918,377,824.00	87.70

Kode Rekening : 5.2.02

Nama Rekening : BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN **Lampiran V.g**

NO	U R A I A N	A N G G A R A N	R E A L I S A S I	%
26	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH	900,000,000.00	819,274,600.00	91.03
27	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH	28,324,326.00	27,900,000.00	98.50
28	DINAS PERIKANAN DAERAH	153,211,000.00	152,896,000.00	99.79
29	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH	785,871,600.00	785,756,000.00	99.99
30	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DAERAH	399,481,575.00	386,272,770.00	96.69
31	DINAS SOSIAL DAERAH	48,800,000.00	48,400,000.00	99.18
32	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	543,400,000.00	457,660,000.00	84.22
33	INSPEKTORAT DAERAH	1,759,762,500.00	1,562,676,000.00	88.80
34	KECAMATAN BUNGKU UTARA	153,300,000.00	153,220,000.00	99.95
35	KECAMATAN LEMBO	55,556,250.00	55,556,250.00	100.00
36	KECAMATAN LEMBO RAYA	56,306,250.00	56,306,250.00	100.00
37	KECAMATAN MAMOSALATO	32,906,250.00	32,906,250.00	100.00
38	KECAMATAN MORI ATAS	21,000,000.00	21,000,000.00	100.00
39	KECAMATAN PETASIA	264,226,250.00	264,023,732.00	99.92
40	KECAMATAN PETASIA BARAT	7,906,250.00	7,906,250.00	100.00
41	KECAMATAN PETASIA TIMUR	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00
42	KECAMATAN SOYO JAYA	29,292,150.00	29,292,150.00	100.00
43	PUSKESMAS ANUTOLUWU	109,868,700.00	64,592,100.00	58.79
44	PUSKESMAS BATURUBE	187,300,000.00	162,300,000.00	86.65
45	PUSKESMAS BETELEME	208,725,000.00	207,550,000.00	99.44
46	PUSKESMAS KOLONODALE	71,682,850.00	71,682,850.00	100.00
47	PUSKESMAS LEE	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00
48	PUSKESMAS MAYUMBA	85,250,000.00	79,110,750.00	92.80
49	PUSKESMAS MOLINO	212,142,500.00	189,692,500.00	89.42
50	PUSKESMAS PANCAMAKMUR	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00
51	PUSKESMAS PANDAUKE	25,000,000.00	3,360,000.00	13.44
52	PUSKESMAS PETUMBEA	127,198,000.00	127,198,000.00	100.00
53	PUSKESMAS POTOWE INDO LIJO	7,906,250.00	7,906,000.00	100.00
54	PUSKESMAS TAMBAYOLI	29,427,500.00	17,427,500.00	59.22
55	PUSKESMAS TOMATA	25,024,500.00	33,677,500.00	134.58
56	PUSKESMAS WONGKO NDAYA	24,387,000.00	24,380,000.00	99.97
57	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOLONODALE	35,823,981,721.00	35,710,592,691.00	99.68
58	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN DAERAH	457,951,200.00	457,911,000.00	99.99
59	SEKRETARIAT DPRD	3,010,800,000.00	2,869,415,000.00	95.30
	TOTAL	**82,070,107,453.00**	**76,216,049,055.00**	**92.87**

RINCIAN BELANJA DAERAH TAHUN 2024

Kode Rekening : 5.2.03
Nama Rekening : BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN **Lampiran V.h**

NO	U R A I A N	A N G G A R A N	R E A L I S A S I	%
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	198,320,000.00	198,248,800.00	99.96
2	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1,964,537,046.00	1,964,537,000.00	100.00
3	BADAN PENDAPATAN DAERAH	198,500,000.00	197,742,528.00	99.62
4	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	197,796,000.00	197,579,000.00	99.89
5	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	199,000,000.00	198,835,000.00	99.92
6	BAGIAN ORGANISASI	100,000,000.00	99,778,000.00	99.78
7	BAGIAN PEMERINTAHAN	165,000,000.00	0	0.00
8	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	75,000,000.00	74,890,073.00	99.85
9	DINAS KESEHATAN DAERAH	8,466,187,577.00	8,364,809,708.00	98.80
10	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH	1,104,337,579.00	1,103,890,000.00	99.96
11	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH	706,000,000.00	525,068,500.00	74.37
12	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH	28,253,098,856.00	22,771,226,289.00	80.60
13	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH	9,594,821,550.00	9,582,518,064.18	99.87
14	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	20,050,174,950.00	20,043,737,965.00	99.97
15	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH	3,801,241,299.00	3,424,550,000.00	90.09
16	DINAS PERIKANAN DAERAH	164,415,000.00	157,228,000.00	95.63
17	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH	10,100,000,000.00	8,150,722,500.00	80.70
18	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DAERAH	349,516,108.00	348,808,000.00	99.80
19	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	425,000,000.00	274,500,000.00	64.59
20	INSPEKTORAT DAERAH	298,560,000.00	298,500,000.00	99.98
21	KECAMATAN BUNGKU UTARA	150,000,000.00	149,825,000.00	99.88
22	KECAMATAN MORI ATAS	150,000,000.00	149,827,000.00	99.88
23	KECAMATAN PETASIA	287,080,000.00	281,490,250.00	98.05
24	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOLONODALE	9,059,083,723.00	9,041,081,147.00	99.80
25	SEKRETARIAT DPRD	785,000,000.00	783,537,000.00	99.81
	TOTAL	**96,842,669,688.00**	**88,382,929,824.18**	91.26

RINCIAN BELANJA DAERAH TAHUN 2024

Kode Rekening : 5.2.04

Nama Rekening : BELANJA MODAL JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI **Lampiran V.i**

NO	U R A I A N	A N G G A R A N	R E A L I S A S I	%
1	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH	200,000,000.00	199,850,000.00	99.93
2	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	9,580,000,000.00	8,415,981,566.00	87.85
3	DINAS KESEHATAN DAERAH	2,326,000,000.00	2,325,994,460.00	100.00
4	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH	200,000,000.00	199,850,000.00	99.93
5	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH	190,000,000.00	189,603,000.00	99.79
6	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH	130,375,526,174.00	118,481,438,088.00	90.88
7	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH	5,670,000,000.00	5,642,764,360.00	99.52
8	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH	1,201,620,224.00	1,201,600,000.00	100.00
9	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	2,634,000,000.00	2,629,499,000.00	99.83
10	KECAMATAN PETASIA	978,055,971.00	972,608,000.00	99.44
11	KECAMATAN PETASIA TIMUR	298,000,000.00	295,311,000.00	99.10
12	SEKRETARIAT DPRD	475,000,000.00	473,865,000.00	99.76
	TOTAL	**154,128,202,371.31**	**141,028,364,474.00**	**91.50**

RINCIAN BELANJA DAERAH TAHUN 2024

Kode Rekening : 5.2.05

Nama Rekening : BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA **Lampiran V.J**

NO	U R A I A N	A N G G A R A N	R E A L I S A S I	%
1	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH	255,000,000.00	254,614,700.00	99.849



LAMPIRAN VI :

DAFTAR BELANJA BARANG DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT

BELANJA BARANG YANG DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT/PIHAK KETIGA TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran VI

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH				
BELANJA PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL / DISERAHKAN - KEPADA MASYARAKAT				
No	**Tanggal / Nomor SP2D**		**URAIAN**	**JUMLAH**
1	03/12/2024	72.12/11.0/000047/JUR-BLJ/SP2D-LS/1.01.2.22.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran 100% Atas Belanja Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) dan Alat Pembelajaran Sesuai SP Nomor: 821/029/KONT/PPK/DISDIKBUD/IX/2024 Tanggal 02 September 2024, Oleh PT. INTERNASIONAL KREASI NUSANTARA, Dokumen terlampir.(DAU)	1,343,112,000.00
2	03/12/2024	72.12/11.0/000047/JUR-BLJ/SP2D-LS/1.01.2.22.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran 100% Atas Belanja Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) dan Alat Pembelajaran Sesuai SP Nomor: 821/029/KONT/PPK/DISDIKBUD/IX/2024 Tanggal 02 September 2024, Oleh PT. INTERNASIONAL KREASI NUSANTARA, Dokumen terlampir.(DAU)	125,000,000.00
3	05/12/2024	72.12/11.0/000101/JUR-BLJ/SP2D-LS/1.01.2.22.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran 100% Atas Belanja Pengadaan Kesenian Reog Ponorogo Desa Tanakuraya Kec. Bungku Utara Sesuai SPK Nomor: 31/SPK/PL/PPK/DISDIKBUD/X/2024 Tanggal 30 Oktober 2024, Oleh CV. JOURNEY ADVENTURE INDONESIA, Dokumen terlampir.(dau)	159,840,000.00
4	23/12/2024	72.12/11.0/000124/JUR-BLJ/SP2D-LS/1.01.2.22.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran 100% Atas Belanja Bantuan Kelompok Sanggar Tari Wiraseni Kencana Desa Panca Makmur Sesuai SP Nomor: 851/38/SP/PPK/DISDIKBUD/X/2024 Tanggal 17 Oktober 2024, Oleh CV. AGROWANA RATU KARYA, Dokumen terlampir. (DAU)	50,000,000.00
5	23/12/2024	72.12/11.0/000130/JUR-BLJ/SP2D-LS/1.01.2.22.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran 100% Atas Belanja Bantuan Mobiler TK Bintangor Mukti Sesuai SP Nomor: 851/37/SP/PPK/DISDIKBUD/X/2024 Tanggal 17 Oktober 2024, Oleh CV. AGROWANA RATU KARYA, Dokumen terlampir. (DAU)	19,019,000.00
6	30/12/2024	72.12/11.0/000012/JUR-BLJ/SP2D-LS/1.01.2.22.0.00.01.0000/01/2025	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pembangunan Ruang Guru MAD Alkhairat Koya Kec. Petasia Sesuai SPK Nomor: 34/SPK/PL/PPK/DISDIKBUD/XI/2024 Tanggal 05 November 2024, Oleh CV. DONGKA NAGA, Dokumen terlampir.(DAU)	139,895,000.00
7	30/12/2024	72.12/11.0/000060/JUR-BLJ/SP2D-LS/1.01.2.22.0.00.01.0000/01/2025	Pembayaran 100% Atas Belanja Pengadaan Mobiler Sekolah Madrasah Tersebar Sesuai SPK Nomor: 821/040/KONT/PPK/DISDIKBUD/XI/2024 Tanggal 13 November 2024, Oleh PT. INTERNASIONAL KREASI NUSANTARA, Dokumen terlampir.(DAU)	249,600,000.00
8	31/12/2024	72.12/11.0/000015/JUR-BLJ/SP2D-LS/1.01.2.22.0.00.01.0000/01/2025	Pembayaran 100% Atas Belanja Bahan Bangunan : Pembangunan Rumah Adat Padoe Lembaga Adat Desa Tabarano dan Wawondula Sesuai SP Nomor: 851/36.1/SP/PPK/DISDIKBUD/X/2024 Tanggal 11 Oktober 2024, Oleh CV. AGROWANA RATU KARYA, Dokumen terlampir.(DAU)	50,000,000.00
9	31/12/2024	72.12/11.0/000016/JUR-BLJ/SP2D-LS/1.01.2.22.0.00.01.0000/01/2025	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Paving Blok MAD Alkhaerat Malino Jaya Kec. Soyo Jaya Sesuai SPK Nomor: 36/SPK/PL/PPK/DISDIKBUD/XI/2024 Tanggal 05 November 2024, Oleh CV. HANAN BERJAYA, Dokumen terlampir. (DAU)	92,792,000.00
10	31/12/2024	72.12/11.0/000029/JUR-BLJ/SP2D-LS/1.01.2.22.0.00.01.0000/01/2025	Pembayaran 100% Atas Belanja Pengadaan Alat Peraga Permainan Luar Ruangan PAUD Sesuai SPK Nomor: 42/SPK/PL/PPK/DISDIKBUD/XII/2024 Tanggal 13 Desember 2024, Oleh CV. AGROWANA RATU KARYA, Dokumen terlampir. (DAU)	124,875,000.00
			Jumlah	**2,354,133,000.00**

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH				
BELANJA PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL / DISERAHKAN - LAINNYA				
No	**Tanggal/Nomor SP2D**		**URAIAN**	**JUMLAH**
1	26/04/2024	72.12/11.0/034822/JUR-BLJ/SP2D-LS/1.01.2.22.0.00.01.0000/06/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pembangunan Pagar Desa TK Desa Momo Sesuai SPK Nomor: 65/SPK/PL/PPK/DISDIKBUD/XII/2023 Tanggal 14 Desember 2023 , Oleh CV.SIOMBO PRATAMA, (Silpa 2023) Dokumen terlampir	49,908,000.00
2	26/04/2024	72.12/11.0/034823/JUR-BLJ/SP2D-LS/1.01.2.22.0.00.01.0000/06/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Sekolah Minggu Desa Moleono Sesuai SPK Nomor: 60/SPK/PL/PPK/DISDIKBUD/XII/2023 Tanggal 1 Desember 2023 , Oleh CV. BAIM PRATAMA, (Silpa 2023) Dokumen terlampir.(DAU)	92,840,000.00
3	14/08/2024	72.12/11.0/000073/JUR-BLJ/SP2D-LS/1.01.2.22.0.00.01.0000/08/2024	Pembayaran 100% dari PIHAK PERTAMA Atas Pekerjaan Pembuatan Pagar TK Alkhairat Kolonodale Sesuai SPK Nomor: 13/SPK/PL/PPK/DISDIKBUD/VII/2024 Tanggal 04 Juli 2024, Oleh CV. WINDA WULANDARI, Dokumen terlampir.(DAU)	74,914,000.00
4	25/09/2024	72.12/11.0/000011/JUR-BLJ/SP2D-LS/1.01.2.22.0.00.01.0000/10/2024	Pembayaran Uang Muka 50% Atas Pekerjaan Pembangunan RKB SD GKST Kolonodale Sesuai SPK Nomor: 26/SPK/PL/PPK/DISDIKBUD/IX/2024 Tanggal 12 September 2024, Oleh CV. GEOVANI KARYA PERDANA, Dokumen terlampir. (DAU)	99,863,500.00
5	27/09/2024	72.12/11.0/000006/JUR-BLJ/SP2D-LS/1.01.2.22.0.00.01.0000/10/2024	Pembayaran 100% Perencanaan Pembangunan Tanggul SD Al-Khairat Kolonodale Sesuai SPK Nomor: 22.a/SPK/PL/PPK/DISDIKBUD/IX/2024 Tanggal 02 September 2024, Oleh CV. GRAFIK CONSULTANT Dokumen terlampir.(DAU)	6,000,000.00
6	28/10/2024	72.12/11.0/000045/JUR-BLJ/SP2D-LS/1.01.2.22.0.00.01.0000/11/2024	Pembayaran Uang Muka 50% Atas Pekerjaan Pembangunan Tanggul SD Al-Khairaat kolonodale Sesuai SPK Nomor: 27/SPK/PL/PPK/DISDIKBUD/X/2024 Tanggal 17 Oktober 2024, Oleh CV. MITRA LIBRA, Dokumen terlampir..(DAU)	69,674,000.00
7	09/12/2024	72.12/11.0/000028/JUR-BLJ/SP2D-LS/1.01.2.22.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran 50%(100%) Atas Pekerjaan Pembangunan RKB SD GKST Kolonodale Sesuai SPK Nomor: 26/SPK/PL/PPK/DISDIKBUD/IX/2024 Tanggal 12 September 2024, Oleh CV. GEOVANI KARYA PERDANA, Dokumen terlampir.	99,863,500.00
8	27/12/2024	72.12/11.0/000009/JUR-BLJ/SP2D-LS/1.01.2.22.0.00.01.0000/01/2025	Pembayaran 100% dari PIHAK PERTAMA Atas Pekerjaan Rehab Kamar Mandi PAUD KB Tiaka Permai Desa Momo Sesuai SPK Nomor: 41/SPK/PL/PPK/DISDIKBUD/XI/2024 Tanggal 15 November 2024, Oleh CV. SEKAWAN KONSTRUKSI, Dokumen terlampir. (DAU)	20,990,000.00
9	30/12/2024	72.12/11.0/000062/JUR-BLJ/SP2D-LS/1.01.2.22.0.00.01.0000/01/2025	Pembayaran 100% atas Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Tanggul SD Al-Khairat Kolonodale Sesuai SPK Nomor: 25.a/SPK/PL/PPK/DISDIKBUD/X/2024 Tanggal 17 Oktober 2024, Oleh CV. DIGITASI CONSULTANT Dokumen terlampir. (DAU)	4,500,000.00
10	31/12/2024	72.12/11.0/000019/JUR-BLJ/SP2D-LS/1.01.2.22.0.00.01.0000/01/2025	Pembayaran 50%(100%) Atas Pekerjaan Pembangunan Tanggul SD Al-Khairaat kolonodale Sesuai SPK Nomor: 27/SPK/PL/PPK/DISDIKBUD/X/2024 Tanggal 17 Oktober 2024, Oleh CV. MITRA LIBRA, Dokumen terlampir.(DAU)	69,674,000.00
11	31/12/2024	72.12/11.0/000022/JUR-BLJ/SP2D-LS/1.01.2.22.0.00.01.0000/01/2025	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pembangunan RKB SD Islam Terpadu Permata Islam 4 Sesuai SPK Nomor: 33/SPK/PL/PPK/DISDIKBUD/XI/2024 Tanggal 05 November 2024, Oleh CV. STAR WORK MANDIRI, Dokumen terlampir.(dau)	185,697,000.00
			Jumlah	**773,924,000.00**
DINAS PERIKANAN DAERAH				
BELANJA PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL / DISERAHKAN - KEPADA MASYARAKAT				
1	04/04/2024	72.12/11.0/017990/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/04/2024	Belanja Benih Ikan Ikan Lele, Pakan Ikan Desa Tinompo (Klp Mororako) (DID)	24,066,400.00
2	04/04/2024	72.12/11.0/017991/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/04/2024	Pembayaran Belanja Benih Ikan Lele, Pakan Desa Korololaki, Kec. Petasia (Klp. Berkah)(DID)	23,186,400.00

3	04/04/2024	72.12/11.0/017992/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/04/2024	Benih Ikan Lele dan Pakan Ikan Desa Petumbea Kelompok Maruna	58,390,000.00
4	05/04/2024	72.12/11.0/017985/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/04/2024	Belanja Benih Ikan Nila, Pakan Pondok Jalur Dua Kec. Petasia	38,300,000.00
5	05/04/2024	72.12/11.0/017986/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/04/2024	Belanja Benih Ikan Lele, Pakan Desa Maralee Kelompok Jaya Makmur Perikanan (PAD)	41,402,000.00
6	05/04/2024	72.12/11.0/017987/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/04/2024	Belanja Benih Ikan Nila, Pakan Ikan Kelurahan Bahontula Kecamatan Petasia (Klp Nila Merah) (PAD)	23,186,400.00
7	05/04/2024	72.12/11.0/017988/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/04/2024	Benih Ikan Lele dan Pakan Desa Jamor Jaya Kelompok Pinolli (DID)	58,450,000.00
8	17/04/2024	72.12/11.0/021774/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/04/2024	Pembayaran Belanja Benih Ikan Lele, Pakan Ikan Desa Sampalowo Kelompok Lasampi Sumber Dana : Insentif Fiskal (DID)	41,490,000.00
9	17/04/2024	72.12/11.0/021775/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/04/2024	Belanja Benih Ikan Lele, Pakan Ikan Desa Maralee (Klp. Tawar Jaya) Sumber Dana : PAD	23,186,400.00
10	18/04/2024	72.12/11.0/034864/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/06/2024	Pembayaran Belanja Benih Ikan Lele, Pakan Ikan Desa Tiu (Klp Montulungi) (PAD)	23,186,400.00
11	18/04/2024	72.12/11.0/034866/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/06/2024	pembayaran Belanja Benih Ikan Lele, Pakan Pondok Pesantren Lambolo (DID)	35,650,000.00
12	18/04/2024	72.12/11.0/034868/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/06/2024	Pembayaran Belanja Benih Ikan Lele, Pakan Ikan Desa Lembontonara, Kecamatan Mori Utara (Kelompok Banyu Emas) (PAD)	23,186,400.00
13	03/05/2024	72.12/11.0/034858/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/06/2024	Katinting 9 PK Desa Tokonanaka Kelompok Nelayan Harapan Baru (PAD)	133,399,000.00
14	03/05/2024	72.12/11.0/034859/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/06/2024	Perahu Kelompok Bersama Desa Tokala Atas (PAD)	79,800,000.00
15	07/05/2024	72.12/11.0/034853/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/06/2024	Pengadaan Katinting 13 PK dan Perahu Fiber Desa Tirongan Bawah Kelompok Usaha Mandiri (PAD)	114,368,000.00
16	07/05/2024	72.12/11.0/034854/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/06/2024	Pembayaran Pengadaan Katinting 10 HP Desa Baturube Kelompok Nelayan Endo Kami (PAD)	184,900,000.00
17	07/05/2024	72.12/11.0/034855/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/06/2024	Pembayaran pengadaan Katinting 13 PK Desa Kolobawa Kelompok Lumba Laut (PAD)	109,490,000.00
18	07/05/2024	72.12/11.0/034856/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/06/2024	Pembayaran pengadaan Katinting 13 PK Desa Gililana (Kl. Batu Hias) (PAD)	158,080,000.00
19	20/05/2024	72.12/11.0/034845/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/06/2024	Pembayaran 100 % (Seratus Persen) Pada PT. HEMDEV MULTI KARYA atas Pekerjaan Bantuan Perahu Mesin Kelompok Nelayan Berkah Lokasi Desa Ungkea, Kecamatan Petasia Timur (DID)	97,236,000.00

20	20/05/2024	72.12/11.0/034846/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/06/2024	Pembayaran 100 % (Seratus Persen) Pada CV. GELORA SUKSES atas Pekerjaan Pengadaan Perahu Fiber Desa Keuno Lokasi Desa Keuno Kecamatan Petasia Timur (DID)	51,941,000.00
21	20/05/2024	72.12/11.0/034847/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/06/2024	Pembayaran 100 % (Seratus Persen) Pada CV. GELORA SUKSES atas Pekerjaan Pengadaan Perahu Fiber Desa Ungkea Lokasi Desa Ungkea Kecamatan Petasia Timur (DID)	51,941,000.00
22	20/05/2024	72.12/11.0/034848/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/06/2024	Pembayaran 100 % (Seratus Persen) Pada CV. AFRA AMANAH atas Pekerjaan Alat Tangkap Ikan Desa Gililana Lokasi Desa Gililana Kecamatan Petasia (PAD)	49,883,000.00
23	22/05/2024	72.12/11.0/039932/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/06/2024	Pembayaran 100 % (Seratus Persen) Pada CV. ASHIDIQ SURYANI SUKSES atas Pekerjaan Katinting 9 PK Kelompok Tinumbu Jaya Desa Ganda-Ganda Lokasi Desa Ganda-Ganda, Kec. Petasia (DID)	100,099,000.00
24	22/05/2024	72.12/11.0/039933/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/06/2024	Pembayaran 100 % (Seratus Persen) Pada CV. IRVAN HAMDI atas Pekerjaan Katinting 5,5 PK Dusun Lambolo Lokasi Desa Ganda-Ganda Dusun Lambolo, Kec. Petasia (PAD)	96,320,000.00
25	30/05/2024	72.12/11.0/051049/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/07/2024	Pembayaran 100 % (Seratus Persen) Pada CV. TADULAKO MANDIRI atas Pekerjaan Katinting 9 PK Kel. Bahontula, Kec. Petasia (Klp. Teluk Tomori) Lokasi Kel. Bahontula, Kec. Petasia (PAD)	111,222,000.00
26	28/06/2024	72.12/11.0/051042/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/07/2024	Pembayaran 100 % (Seratus Persen) Pada CV. GLOBAL INTI SARANA atas Pekerjaan Katinting 5,5 PK Desa Tandayondo Lokasi Desa Tandayondo, Kecamatan Soyojaya (PAD)	96,248,000.00
27	01/07/2024	72.12/11.0/055018/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/07/2024	Pembayaran 100 % (Seratus Persen) Pada CV. TUAMA PERKASA atas Pekerjaan Alat Tangkap Ikan Desa Tiu Lokasi Desa Tiu, Kecamatan Petasia Barat (DID)	29,970,000.00
28	02/07/2024	72.12/11.0/055010/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/07/2024	Pembayaran 100 % (Seratus Persen) Pada CV. ASHIDIQ SURYANI SUKSES atas Pekerjaan Katinting 13 PK, Katinting 9 PK Kelompok Nelayan Tonaka Jaya Desa Korololaki Lokasi Desa Korololaki, Kecamatan Petasia (DID)	35,491,500.00
29	02/07/2024	72.12/11.0/055011/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/07/2024	Pembayaran 100 % (Seratus Persen) Pada CV. WAHANA CIPTA atas Pekerjaan Katinting 13 PK Desa Gililana Lokasi Desa Gililana, Kec. Petasia (PAD)	97,298,000.00
30	02/07/2024	72.12/11.0/055015/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/07/2024	Pembayaran 100 % (Seratus Persen) Pada CV. WAHANA CIPTA atas Pekerjaan Katinting 5,5 PK Desa Moleono Lokasi Desa Moleono, Kec. Petasia Barat (PAD)	74,100,000.00
31	02/07/2024	72.12/11.0/055017/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/07/2024	Pembayaran 100 % (Seratus Persen) Pada CV. ASHIDIQ SURYANI SUKSES atas Pekerjaan Katinting 13 PK Kelompok Nelayan Annas Desa Koya Lokasi Desa Koya, Kec. Petasia (DID)	109,340,000.00
32	03/07/2024	72.12/11.0/055007/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/07/2024	Pembayaran 100 % (Seratus Persen) Pada CV. QIANZI atas Pekerjaan Katinting 13 PK Desa Ganda-Ganda Lokasi Desa Ganda-Ganda, Kec. Petasia (PAD)	72,927,000.00
33	10/07/2024	72.12/11.0/000017/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/08/2024	Pembayaran 100 % (Seratus Persen) Pada CV. MITRA LIBRA atas Pekerjaan Benih Kerapu, Pakan Ikan Air Laut Desa Ganda-ganda Kelompok Cahaya Kerapu Lokasi Desa Ganda-ganda Kecamatan Petasia (DID)	99,750,000.00
34	10/07/2024	72.12/11.0/000018/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/08/2024	Pembayaran 100 % (Seratus Persen) Pada CV. REDATU atas Pekerjaan Benih Ikan Lele, Kolam Bundar, dan Pakan Desa Koromatantu, Muara Sejahtera Lokasi Desa Koromatantu Kecamatan Petasia (DID)	22,962,000.00
35	10/07/2024	72.12/11.0/000018/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/08/2024	Pembayaran 100 % (Seratus Persen) Pada CV. REDATU atas Pekerjaan Benih Ikan Lele, Kolam Bundar, dan Pakan Desa Koromatantu, Muara Sejahtera Lokasi Desa Koromatantu Kecamatan Petasia (DID)	26,318,000.00
36	16/07/2024	72.12/11.0/000012/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/08/2024	Pembayaran 100 % (Seratus Persen) Pada CV. BAIM PRATAMA atas Pekerjaan Pengadaan Perahu Fiber Kelompok Rino Rando Ds. Onepute Lokasi Desa Onepute (DID)	199,647,000.00

37	16/07/2024	72.12/11.0/000013/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/08/2024	Pembayaran 100 % (Seratus Persen) Pada CV. CELLO PUTRA MENTARI atas Pekerjaan Pengadaan Sero Desa Tandayondo Lokasi Desa Tandayondo Kecamatan Soyojaya (PAD)	99,854,000.00
38	16/07/2024	72.12/11.0/000014/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/08/2024	Pembayaran 100 % (Seratus Persen) Pada CV. BINA KARYA MANDIRI atas Pekerjaan Katinting 13 PK Desa Ungkea Lokasi Desa Ungkea, Kecamatan Petasia Timur (DID)	97,342,000.00
39	18/07/2024	72.12/11.0/000008/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/08/2024	Pembayaran 100 % (Seratus Persen) Pada CV. BUANA POWER atas Pekerjaan Katinting 13 PK Desa Towara Lokasi Desa Towara, Kecamatan Petasia Timur (PAD)	97,236,000.00
40	18/07/2024	72.12/11.0/000009/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/08/2024	Pembayaran 100 % (Seratus Persen) Pada CV. CAHAYA ANUGRAH MANDIRI atas Pekerjaan Pengadaan Alat Tangkap Ikan Desa Gililana (Klp. Gililana Bersaudara) Lokasi Desa Gililana Kecamatan Petasia (PAD)	20,000,000.00
41	18/07/2024	72.12/11.0/000010/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/08/2024	Pembayaran 100 % (Seratus Persen) Pada CV. TADULAKO MANDIRI atas Pekerjaan Pengadaan Benih Ikan Lele, Pakan Desa Koromatantu Maju Bersama Lokasi Desa Koromatantu, Kecamatan Petasia (DID)	29,050,000.00
42	18/07/2024	72.12/11.0/000011/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/08/2024	Pembayaran 100 % (Seratus Persen) Pada CV. TADULAKO MANDIRI atas Pekerjaan Pengadaan Benih Ikan Lele, Pakan Desa Keuno Petasia Timur Lokasi Desa Keuno Kecamatan Petasia Timur (DID)	19,280,000.00
43	31/07/2024	72.12/11.0/000007/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/08/2024	Pembayaran 100 % (Seratus Persen) Pada CV. MITRA LIBRA atas Pekerjaan Pengadaan Freezer Desa Ganda-Ganda Kelompok Mina Berkah Lokasi Desa Ganda-Ganda Kecamatan Petasia (DBH PUSAT)	24,500,000.00
44	01/08/2024	72.12/11.0/000006/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/08/2024	Pembayaran 100 % (Seratus Persen) Pada CV. QIANZI atas Pekerjaan Pengadaan Alat Tangkap Ikan Desa Koromatantu, Moleono, Onepute, Sampalowo Lokasi Desa Koromatantu, Moleono, Onepute, Sampalowo Kecamatan Petasia dan Petasia Barat (PAD)	39,690,000.00
45	02/08/2024	72.12/11.0/000005/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/08/2024	Pembayaran 100 % (Seratus Persen) Pada CV. SYABAN atas Pekerjaan Pengadaan Katinting 13 PK Kelompok Teluk Matube Desa Matube, Bungku Utara Lokasi Desa Matube Kecamatan Bungku Utara (PAD)	97,333,000.00
46	19/08/2024	72.12/11.0/000001/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/09/2024	Pembayaran 100 % (Seratus Persen) Pada CV. GLO CAHAYA ABADI atas Pengadaan Mesin Pencetak Pelet Ds. Malino Jaya, Kelompok Kali Mas Lokasi Desa Malino Jaya, Kecamatan Soyojaya (DID)	119,769,000.00
47	10/09/2024	72.12/11.0/000003/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/09/2024	Pembayaran 100 % (Seratus Persen) Pada CV. CYNAGIZ BAROKAH MANDIRI atas Pengadaan Benur Udang Petasia Timur Lokasi Kecamatan Petasia Timur (DID)	119,800,000.00
48	12/09/2024	72.12/11.0/000002/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/09/2024	Pembayaran 100 % (Seratus Persen) Pada CV. REDATU atas Pengadaan Benih Kerapu, Pakan Air Laut Kampung Bugis Lokasi Kelurahan Kolonodale Kecamatan Petasia (DID)	117,750,000.00
49	30/09/2024	72.12/11.0/000001/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/10/2024	Pembayaran 100 % (Seratus Persen) Pada CV. MITRA LIBRA atas Pekerjaan Pengadaan Katinting 13 PK, Perahu Fiber Kampung Bugis (Nelayan Mandiri) Lokasi Kelurahan Kolonodale Kecamatan Petasia (PAD)	91,494,506.00
50	30/09/2024	72.12/11.0/000001/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/10/2024	Pembayaran 100 % (Seratus Persen) Pada CV. MITRA LIBRA atas Pekerjaan Pengadaan Katinting 13 PK, Perahu Fiber Kampung Bugis (Nelayan Mandiri) Lokasi Kelurahan Kolonodale Kecamatan Petasia (PAD)	85,292,494.00
51	03/10/2024	72.12/11.0/000004/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/10/2024	Pembayaran 100 % (Seratus Persen) Pada CV. BERKAH MENARA WIRASENA atas Pekerjaan Pengadaan Sero dan Perahu Kantinting Kelompok Tau Taaranobae, Bungku Utara Lokasi Desa Tokonanaka Kecamatan Bungku Utara (DID)	74,760,000.00
52	25/10/2024	72.12/11.0/000002/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/11/2024	Pembayaran 100 % (Seratus Persen) Pada CV. ANUGERAH PERDANA atas Pengadaan Motor SRD (Sarana Rantai Dingin) Lokasi Kecamatan Bungku Utara (DBH PROVINSI)	491,400,000.00

53	31/10/2024	72.12/11.0/000016/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/11/2024	Pembayaran 100 % (Seratus Persen) Pada CV. TANJUNG DIDIRI TOENG atas Pengadaan Sapras Rantai Dingin Lokasi Kecamatan Bungku Utara (DID)	67,222,000.00
54	04/11/2024	72.12/11.0/000011/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/11/2024	Pembayaran 100 % (Seratus Persen) Pada CV. CAHAYA ANUGRAH MANDIRI atas Pengadaan Ikan Kakap Putih dan Kerapu Desa Ganda-Ganda Lokasi Desa Ganda-Ganda Kecamatan Petasia (DBH PUSAT)	99,661,000.00
55	04/11/2024	72.12/11.0/000012/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/11/2024	Pembayaran 100 % (Seratus Persen) Pada CV. MOIKO atas Pengadaan Alkon Lokasi Desa Tiu Kecamatan Petasia Barat (DBH PUSAT)	10,480,000.00
56	04/11/2024	72.12/11.0/000013/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/11/2024	Pembayaran 100 % (Seratus Persen) Pada CV. GLO CAHAYA ABADI atas Pengadaan Perahu Kelompok Nelayan Purende Jaya Desa Molino Petasia Timur Lokasi Desa Molino Kecamatan Petasia Timur (DBH PUSAT)	77,878,000.00
57	05/11/2024	72.12/11.0/000008/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/11/2024	Pembayaran 100 % (Seratus Persen) Pada CV. MITRA LIBRA atas Pengadaan Benih Kerapu, Pakan Ikan Air Laut Kelompok Usaha Bersama Kelurahan Kolonodale Lokasi Kelurahan Kolonodale Kecamatan Petasia (DBH PUSAT)	99,750,000.00
58	05/11/2024	72.12/11.0/000007/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/11/2024	Pembayaran 100 % (Seratus Persen) Pada CV. CELLO PUTRA MENTARI atas Pengadaan Benih Ikan Nila, Pakan Mekar Desa Malino Jaya Kec. Soyojaya Lokasi Desa Malino Jaya Kecamatan Soyojaya (DBH PUSAT)	32,140,000.00
59	05/11/2024	72.12/11.0/000009/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/11/2024	Pembayaran 100 % (Seratus Persen) Pada CV. CELLO PUTRA MENTARI atas Pengadaan Benih Ikan Lele, Pakan Kelompok Sejahtera Kelurahan Bahontula Kec. Petasia Lokasi Kelurahan Bahontula Kecamatan Petasia (DBH PUSAT)	49,820,000.00
60	06/11/2024	72.12/11.0/000009/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran 100 % (Seratus Persen) Pada CV. GEOVANI KARYA PERDANA atas Pengadaan Benih Ikan Lele, Pakan Kelompok Deano Montama Lokasi Kelurahan Bahoue Kecamatan Petasia (DBH PUSAT)	58,400,000.00
61	19/11/2024	72.12/11.0/000001/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran 100 % (Seratus Persen) Pada CV. CYNAGIZ BAROKAH MANDIRI atas Pengadaan Benih Ikan Lele , Pakan Mandiri Sejahtera Desa Pamberea Kec. Mori Atas Lokasi Desa Pamberea Kec. Mori Atas (DBH PUSAT)	49,820,000.00
62	19/11/2024	72.12/11.0/000003/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran 100 % (Seratus Persen) Pada CV. BUANA POWER atas Pengadaan Benih Ikan , Pakan Kelompok Usaha Bersama Desa Kasingoli Lokasi Desa Kasingoli Kecamatan Mori Atas (DBH PUSAT)	49,820,000.00
63	19/11/2024	72.12/11.0/000002/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran 100 % (Seratus Persen) Pada CV. MOIKO atas Pengadaan Benih Ikan Lele , Pakan Ikan, Pakan Kelompok Usaha Bersama Desa Mondowe Lokasi Desa Mondowe Kecamatan Petasia Barat (DBH PUSAT)	47,779,600.00
64	19/11/2024	72.12/11.0/000004/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran 100 % (Seratus Persen) Pada CV. GEOVANI KARYA PERDANA atas Pengadaan Benih Ikan Lele , Kolam Bundar, Pakan Kelurahan Bahontula Lokasi Kelurahan Bahontula Petasia (DBH PUSAT)	42,850,000.00
65	20/11/2024	72.12/11.0/000020/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran 50% (Lima Puluh Persen) Pada CV. KARYA FAJRIL atas Pekerjaan Pembuatan Tanggul Peletakan Kolam Pemancingan Siniwu Desa Lanumor Lokasi Desa Lanumor Kecamatan Mori Atas (DBH PUSAT)	46,377,500.00
66	20/11/2024	72.12/11.0/000021/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran 100 % (Seratus Persen) Pada CV. GELORA SUKSES atas Pengadaan Katinting 9 PK Desa Ganda-Ganda Lokasi Desa Ganda-Ganda Kecamatan Petasia (DBH PUSAT)	66,766,000.00
67	20/11/2024	72.12/11.0/000022/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran 100 % (Seratus Persen) Pada CV. GELORA SUKSES atas Pengadaan Katinting 13 PK Kelompok Nunuki Bahari Desa Gililana Lokasi Desa Gililana Kecamatan Petasia (DBH PUSAT)	85,174,000.00
68	05/12/2024	72.12/11.0/000016/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran 100 % (Seratus Persen) Pada CV. SIPURENNU ABADI atas Pekerjaan Pengadaan Benur kelompok Tani Mutiara Laut Petasia Timur Lokasi Desa Ungkea Kecamatan Petasia Timur (DBH PUSAT)	199,583,000.00

69	09/12/2024	72.12/11.0/000010/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran 100 % (Seratus Persen) Pada CV. PUNCAK SONGI atas Pekerjaan Pengadaan Alat Tangkap Ikan Desa Gililana Kelompok Nelayan Cahaya Pelangi Lokasi Desa Gililanan Kecamatan Petasia (DBH PUSAT)	99,611,000.00
70	09/12/2024	72.12/11.0/000011/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran 100 % (Seratus Persen) Pada CV. TABANGO BERKARYA atas Pekerjaan Pengadaan Katinting 13 PK Kelompok Nelayan Lingkar Tambang Lokasi Desa Gililana Kecamatan Petasia (DBH PUSAT)	97,328,000.00
71	09/12/2024	72.12/11.0/000014/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran 100 % (Seratus Persen) Pada CV. SIPURENNU ABADI atas Pekerjaan Pengadaan Katinting 13 PK Kelompok Nelayan Kampung Bugis Lokasi Kelurahan Kolonodale Kecamatan Petasia (DBH PUSAT)	145,827,000.00
72	09/12/2024	72.12/11.0/000015/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran 100 % (Seratus Persen) Pada CV. BAIM PRATAMA atas Pekerjaan Pengadaan Perahu Fiber Kelompok Nelayan Pebangka'a Desa Sampalowo Lokasi Desa Sampalowo Kecamatan Petasia Barat (DBH PUSAT)	199,758,000.00
73	12/12/2024	72.12/11.0/000026/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran 100 % (Seratus Persen) pada CV. REDATU atas Pekerjaan Pengadaan Katinting 13 PK Klp. Batu Hias Desa Gililana Lokasi Desa Gililana Kecamatan Petasia (DBH PUSAT)	24,354,000.00
74	12/12/2024	72.12/11.0/000027/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran 100 % (Seratus Persen) pada CV. BUANA POWER atas Pekerjaan Benih Ikan Lele, Pakan Ikan Lele Sejahtera Desa Era Kecamatan Mori Utara Lokasi Desa Era Kecamatan Mori Utara (DBH PUSAT)	47,779,600.00
75	12/12/2024	72.12/11.0/000029/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran 100 % (Seratus Persen) pada CV. BUANA POWER atas Pekerjaan Benih Ikan Lele, Pakan Ikan Kelompok Jaya Mandiri Desa Jamor Jaya Lokasi Desa Jamor Jaya Kecamatan Lembo Raya (DBH PUSAT)	47,779,600.00
76	16/12/2024	72.12/11.0/000025/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran 100 % (Seratus Persen) pada CV. REDATU atas Pekerjaan Pengadaan Katinting 13 PK Kmp Bugis Klp. Mapadeceng Lokasi Kelurahan Kolonodale Kecamatan Petasia (DBH PUSAT)	145,854,000.00
77	16/12/2024	72.12/11.0/000037/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran 100 % (Seratus Persen) pada CV. MOIKO atas Pekerjaan Benih Ikan Lele, Pakan Ikan, Pakan Kecamatan Lembo Kelompok Lemo lemo Desa Uluanso Lokasi Desa Uluanso Kecamatan Lembo (DBH PUSAT)	47,779,600.00
78	16/12/2024	72.12/11.0/000036/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran 100 % (Seratus Persen) pada CV. CYNAGIZ BAROKAH MANDIRI atas Pekerjaan Benih Ikan Lele, Pakan Ikan Kelompok Kolam Mandiri Desa Dolupo Karya Lokasi Desa Dolupo Karya Kecamatan Lembo Raya (DBH PUSAT)	47,779,600.00
79	16/12/2024	72.12/11.0/000038/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran 100 % (Seratus Persen) pada CV. QIANZI atas Pengadaan Mesin dan Perahu Desa Tiu Lokasi Desa Tiu Petasia Barat (DBH PUSAT)	44,550,000.00
80	17/12/2024	72.12/11.0/000035/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran 100 % (Seratus Persen) pada CV. BAIM PRATAMA atas Pekerjaan Pengadaan Perahu Fiber Kelompok Nelayan Jaya Bersama Desa Tadaku Jaya Lokasi Desa Tadaku Jaya Kecamatan Petasia Barat (DBH PUSAT)	199,681,000.00
81	19/12/2024	72.12/11.0/000032/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran 100 % (Seratus Persen) Pada CV. WAHANA CIPTA atas Pekerjaan Katinting 13 PK Desa Koya Lokasi Desa Koya Kecamatan Petasia (DBH PUSAT)	97,253,000.00
82	19/12/2024	72.12/11.0/000034/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran 100 % (Seratus Persen) Pada CV. PUNCAK SONGI atas Pekerjaan Bantuan Pengadaan Pupuk Ikan Pada Kelompok Tani Tambak Maju Bersama Desa Ungkea Kec. Petasia Timur Lokasi Desa Ungkea Kecamatan Petasia Timur (DBH PUSAT)	99,762,000.00
83	19/12/2024	72.12/11.0/000033/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran 100 % (Seratus Persen) Pada CV. GLO CAHAYA ABADI atas Pekerjaan Belanja Benih Ikan Nila Kelompok Sehati Lokasi Desa Poona Kecamatan Lembo Raya (DBH PUSAT)	33,000,000.00
84	27/12/2024	72.12/11.0/000007/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/01/2025	Pembayaran 50% (100%) Pada CV. KARYA FAJRIL atas Pekerjaan Pembuatan Tanggul Peletakan Kolam Pemancingan Siniwu Desa Lanumor Lokasi Desa Lanumor Kecamatan Mori Atas (DBH PUSAT)	46,377,500.00

85	30/12/2024	72.12/11.0/000003/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/01/2025	Pembayaran 100%(Seratus Persen) Pada CV. CHELSI PERDANA atas Pekerjaan Pengadaan Katinting 13 PK Desa Matube (Klp. Nelayan Malajang) Lokasi Desa Matube Kecamatan Bungku Utara (DBH PUSAT)	85,120,000.00
86	30/12/2024	72.12/11.0/000006/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/01/2025	Pembayaran 100%(Seratus Persen) Pada CV. CHELSI PERDANA atas Pekerjaan Pengadaan Alat Tangkap Desa Bungintimbe (Klp. Muara Berkah) Lokasi Desa Bungintimbe Kecamatan Petasia Timur (DBH PUSAT)	99,816,000.00
87	30/12/2024	72.12/11.0/000013/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/01/2025	Pembayaran 100 % (Seratus Persen) Pada CV. CIVIL GIGATAMA CONSULTANT atas Pekerjaan Perencanaan Pembuatan Tanggul Pelatakan Kolam Pemancingan Siniwu Desa Lanumor Lokasi Desa Lanumor Kecamatan Mori Atas (DBH PUSAT)	3,950,000.00
88	30/12/2024	72.12/11.0/000014/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/01/2025	Pembayaran 100 % (Seratus Persen) Pada CV. CIVIL GIGATAMA CONSULTANT atas Pekerjaan Pengawasan Pembuatan Tanggul Pelatakan Kolam Pemancingan Siniwu Desa Lanumor Lokasi Desa Lanumor Kecamatan Mori Atas (DBH PUSAT)	2,980,000.00
			Jumlah	**6,940,822,900.00**

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

BELANJA PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL / DISERAHKAN - KEPADA MASYARAKAT

No	Tanggal/Nomor SP2D		URAIAN	JUMLAH
1	18/10/2024	72.12/11.0/000042/JUR-BLJ/SP2D-LS/1.03.1.04.0.00.01.0000/11/2024	Pembayaran Tahap I (50%) Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Tokonanaka Kec. Bungku Utara Kab. Morowali Utara (DAU), yang dibebankan pada Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	90,000,000.00
2	21/10/2024	72.12/11.0/000029/JUR-BLJ/SP2D-LS/1.03.1.04.0.00.01.0000/11/2024	Pembayaran Tahap I (50%) Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Sumara Jaya Kecamatan Soyo Jaya (DAU), yang dibebankan pada Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	90,000,000.00
3	21/10/2024	72.12/11.0/000031/JUR-BLJ/SP2D-LS/1.03.1.04.0.00.01.0000/11/2024	Pembayaran Tahap I (50%) Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Beteleme Kec. Lembo Kab. Morowali Utara (DAU), yang dibebankan pada Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh (DAU)	20,000,000.00
4	21/10/2024	72.12/11.0/000033/JUR-BLJ/SP2D-LS/1.03.1.04.0.00.01.0000/11/2024	Pembayaran Tahap I (50%) Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Kolaka Kec. Mori Atas Kab. Morowali Utara (DAU), yang dibebankan pada Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	10,000,000.00
5	21/10/2024	72.12/11.0/000032/JUR-BLJ/SP2D-LS/1.03.1.04.0.00.01.0000/11/2024	Pembayaran Tahap I (50%) Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Tinompo, Kec. Lembo Kab. Morowali Utara (DAU)	10,000,000.00
6	21/10/2024	72.12/11.0/000035/JUR-BLJ/SP2D-LS/1.03.1.04.0.00.01.0000/11/2024	Pembayaran Tahap I (50%) Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Bintangor Mukti, Kec. Lembo Raya Kab. Morowali Utara (DAU), yang dibebankan pada Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	20,000,000.00
7	05/11/2024	72.12/11.0/000056/JUR-BLJ/SP2D-LS/1.03.1.04.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran Tahap I (50%) Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Posangke Kec. Bungku Utara Kab. Morowali Utara, yang dibebankan pada Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah Kabupaten/Kota (PAD)	100,000,000.00
8	05/11/2024	72.12/11.0/000055/JUR-BLJ/SP2D-LS/1.03.1.04.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran Tahap I (50%) Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Boba Kec. Bungku Utara Kab. Morowali Utara, yang dibebankan pada Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah Kabupaten/Kota(PAD)	90,000,000.00
9	06/11/2024	72.12/11.0/000048/JUR-BLJ/SP2D-LS/1.03.1.04.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran Tahap I (50%) Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Siliti Kec. Bungku Utara Kab. Morowali Utara, yang dibebankan pada Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah Kabupaten/Kota (PAD)	100,000,000.00
10	06/11/2024	72.12/11.0/000049/JUR-BLJ/SP2D-LS/1.03.1.04.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran Tahap I (50%) Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Tandayondo Kec. Soyo Jaya Kab. Morowali Utara (PAD)	90,000,000.00

11	06/11/2024	72.12/11.0/000053/JUR-BLJ/SP2D-LS/1.03.1.04.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran Tahap I (50%) Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Pokeang Kec. Bungku Utara Kab. Morowali Utara, yang dibebankan pada Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah Kabupaten/Kota (PAD)	90,000,000.00
12	09/12/2024	72.12/11.0/000065/JUR-BLJ/SP2D-LS/1.03.1.04.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran Tahap I (50%) Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Saemba Walati Kec. Mori atas Kab. Morowai Utara, yang dibebankan pada Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota (PAD)	90,000,000.00
13	09/12/2024	72.12/11.0/000071/JUR-BLJ/SP2D-LS/1.03.1.04.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran Tahap II (100%) Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Tandayondo Kec. Soyo Jaya Kab. Morowali Utara, yang dibebankan pada Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota (PAD)	90,000,000.00
14	09/12/2024	72.12/11.0/000169/JUR-BLJ/SP2D-LS/1.03.1.04.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran Tahap II (100%) Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Sumara Jaya, yang dibebankan pada Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota (PAD)	90,000,000.00
15	20/12/2024	72.12/11.0/000179/JUR-BLJ/SP2D-LS/1.03.1.04.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran (100%) Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Siliti Kec. Bungku Utara Kab. Morowali Uatara, yang dibebankan pada Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah Kabupaten/Kota.(PAD)	120,000,000.00
16	20/12/2024	72.12/11.0/000179/JUR-BLJ/SP2D-LS/1.03.1.04.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran (100%) Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Siliti Kec. Bungku Utara Kab. Morowali Uatara, yang dibebankan pada Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah Kabupaten/Kota.(PAD)	80,000,000.00
17	20/12/2024	72.12/11.0/000181/JUR-BLJ/SP2D-LS/1.03.1.04.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran Tahap II (100%) Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Siliti Kec. Bungku Utara Kab. Morowali Utara, yang dibebankan pada Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota (PAD)	100,000,000.00
18	20/12/2024	72.12/11.0/000183/JUR-BLJ/SP2D-LS/1.03.1.04.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran Tahap II (100%) Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Pokeang Kec. Bungku Utara Kab. Morowali Utara, yang dibebankan pada Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota.(PAD)	90,000,000.00
19	20/12/2024	72.12/11.0/000190/JUR-BLJ/SP2D-LS/1.03.1.04.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran Tahap II (100%) Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Posangke Kec. Bungku Utara Kab. Morowali Utara, yang dibebankan pada Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota.(PAD)	100,000,000.00
20	20/12/2024	72.12/11.0/000191/JUR-BLJ/SP2D-LS/1.03.1.04.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran Tahap II (100%) Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Boba Kec. Bungku Utara Kab. Morowali Utara, yang dibebankan pada Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota.(PAD)	90,000,000.00
21	20/12/2024	72.12/11.0/000192/JUR-BLJ/SP2D-LS/1.03.1.04.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran Tahap II (100%) Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Manyoe Kec. Mamosalato Kab. Morowali Utara, yang dibebankan pada Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota (PAD)	35,000,000.00
22	23/12/2024	72.12/11.0/000238/JUR-BLJ/SP2D-LS/1.03.1.04.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran Tahap II (100%) Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Beteleme pada Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh (PAD)	20,000,000.00
23	24/12/2024	72.12/11.0/000001/JUR-BLJ/SP2D-LS/1.03.1.04.0.00.01.0000/01/2025	Pembayaran Tahap II (100%) Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Kolaka Kec. Mori Atas Kab. Morowali Utara, yang dibebankan pada Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota (PAD)	10,000,000.00
24	24/12/2024	72.12/11.0/000003/JUR-BLJ/SP2D-LS/1.03.1.04.0.00.01.0000/01/2025	Pembayaran Tahap II (100%) Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Bintangor Mukti Kec. Lembo Raya Kab. Morowali Utara, yang dibebankan pada Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota (PAD)	20,000,000.00
25	24/12/2024	72.12/11.0/000005/JUR-BLJ/SP2D-LS/1.03.1.04.0.00.01.0000/01/2025	Pembayaran Tahap II (100%) Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Tinompo Kec. Lembo Kab. Morowali Utara, yang dibebankan pada Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota (PAD)	10,000,000.00

26	24/12/2024	72.12/11.0/000009/JUR-BLJ/SP2D-LS/1.03.1.04.0.00.01.0000/01/2025	Pembayaran Tahap II (100%) Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Saemba Walati Kec. Mori Atas Kab. Morowali Utara, yang dibebankan pada Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota (PAD)	40,000,000.00
27	24/12/2024	72.12/11.0/000017/JUR-BLJ/SP2D-LS/1.03.1.04.0.00.01.0000/01/2025	Pembayaran Tahap II (100%) Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Tompira Kec. Petasia Timur Kab. Morowali Utara, yang dibebankan pada Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota (PAD)	40,000,000.00
28	24/12/2024	72.12/11.0/000018/JUR-BLJ/SP2D-LS/1.03.1.04.0.00.01.0000/01/2025	Pembayaran Tahap II (100%) Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Tokonanaka Kec. Bungku Utara Kab. Morowali Utara, yang dibebankan pada Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota (PAD)	90,000,000.00
29	24/12/2024	72.12/11.0/000020/JUR-BLJ/SP2D-LS/1.03.1.04.0.00.01.0000/01/2025	Pembayaran Tahap II (100%) Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Bahontula Kec. Petasia Kab. Morowali Utara, yang dibebankan pada Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota (PAD)	20,000,000.00
30	24/12/2024	72.12/11.0/000019/JUR-BLJ/SP2D-LS/1.03.1.04.0.00.01.0000/01/2025	Pembayaran Tahap II (100%) Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Desa Saemba Walati Kec. Mori Atas Kab. Morowali Utara, yang dibebankan pada Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota (PAD)	90,000,000.00
			Jumlah	**1,935,000,000.00**

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

BELANJA PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL / DISERAHKAN - LAINNYA

No	Tanggal/Nomor SP2D		URAIAN	JUMLAH
1	12/06/2024	72.12/11.0/051105/JUR-BLJ/SP2D-LS/1.03.1.04.0.00.01.0000/07/2024	Pembayaran Uang Muka 30% atas Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Kantor POLRES Morowali Utara Kec. Lembo (DBH PUSAT)	227,144,700.00
2	04/09/2024	72.12/11.0/000088/JUR-BLJ/SP2D-LS/1.03.1.04.0.00.01.0000/09/2024	Pembayaran Uang Muka 30% atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Olahraga Polres Morowali Utara, Bagi CV. BULAN KARYA (DBH PUSAT)	345,490,258.00
3	12/09/2024	72.12/11.0/000063/JUR-BLJ/SP2D-LS/1.03.1.04.0.00.01.0000/09/2024	Pembayaran Uang Muka 30% atas Pekerjaan Pembangunan Pagar POLRES Morowali Utara, Bagi CV. HARRY KARYA PRATAMA (DBH PUSAT)	119,100,000.00
4	26/09/2024	72.12/11.0/000046/JUR-BLJ/SP2D-LS/1.03.1.04.0.00.01.0000/10/2024	Pembayaran MC.01,02,03 30,20% (60,20%) atas Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Kantor POLRES Morowali Utara Kec. Lembo, Bagi CV. PUNCAK SONGI (DAU)	296,287,550.00
5	06/11/2024	72.12/11.0/000051/JUR-BLJ/SP2D-LS/1.03.1.04.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran MC. 01,02 31,36% (61,36%) atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Olahraga Polres Morowali Utara, Bagi CV. BULAN KARYA (DBH PUSAT)	391,977,492.00
6	06/11/2024	72.12/11.0/000051/JUR-BLJ/SP2D-LS/1.03.1.04.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran MC. 01,02 31,36% (61,36%) atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Olahraga Polres Morowali Utara, Bagi CV. BULAN KARYA (DBH PUSAT)	102,672,427.00
7	13/11/2024	72.12/11.0/000019/JUR-BLJ/SP2D-LS/1.03.1.04.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran Uang Muka 30% atas Pekerjaan Pembangunan Rujab Kepala Kejaksaan Negeri Cab. Kolonodale, Bagi CV. BAIM PRATAMA (DBH PUSAT)	205,778,662.00
8	19/11/2024	72.12/11.0/000148/JUR-BLJ/SP2D-LS/1.03.1.04.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran 95% dan Retensi 5% (100%) atas Pekerjaan Renovasi Perumahan dan Kantor Koramil 1311-06/BU, Bagi CV. REZKI DZAHRA MANDIRI (PAD)	99,889,000.00
9	20/12/2024	72.12/11.0/000193/JUR-BLJ/SP2D-LS/1.03.1.04.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran 95% dan Retensi 5% (100%) atas Pekerjaan Penimbunan halaman kantor Kementerian Agama Kabupaten Morowali, Bagi CV. MUHRIZAL (DBH PUSAT)	99,673,000.00

10	20/12/2024	72.12/11.0/000193/JUR-BLJ/SP2D-LS/1.03.1.04.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran 95% dan Retensi 5% (100%) atas Pekerjaan Penimbunan halaman kantor Kementerian Agama Kabupaten Morowali, Bagi CV. MUHRIZAL (DBH PUSAT)	111,000.00
11	24/12/2024	72.12/11.0/000016/JUR-BLJ/SP2D-LS/1.03.1.04.0.00.01.0000/01/2025	Pembayaran MC. 04,05,06 34,80% (95%) dan Retensi 5% (100%) atas Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Kantor POLRES Morowali Utara Kec. Lembo, Bagi CV. PUNCAK SONGI (DAU)	233,716,750.00
12	30/12/2024	72.12/11.0/000170/JUR-BLJ/SP2D-LS/1.03.1.04.0.00.01.0000/01/2025	Pembayaran 65% dan Retensi 5% (100%) atas Pekerjaan Pembangunan Pagar POLRES Morowali Utara, Bagi CV. HARRY KARYA PRATAMA (DBH PUSAT)	277,900,000.00
13	31/12/2024	72.12/11.0/000044/JUR-BLJ/SP2D-LS/1.03.1.04.0.00.01.0000/01/2025	Pembayaran MC. 01,02 (23,72%) dengan Persentase Kemajuan Fisik Pekerjaan (53,72%) atas Pekerjaan Pembangunan Pembangunan Rujab Kepala Kejaksaan Negeri Cab. Kolonodale, Bagi CV. BAIM PRATAMA.(DAU)	239,512,644.00
14	31/12/2024	72.12/11.0/000048/JUR-BLJ/SP2D-LS/1.03.1.04.0.00.01.0000/01/2025	Pembayaran 95% dan Retensi 5% (100%) atas Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Kantor dan Rujab Kejari Kab. Morowali Utara, Bagi CV. KARYA PERMATA AGUNG (DBH PUSAT)	69,800,000.00
15	31/12/2024	72.12/11.0/000130/JUR-BLJ/SP2D-LS/1.03.1.04.0.00.01.0000/01/2025	Pembayaran 95% dan Retensi 5% (100%) atas Pekerjaan Rehab Ruangan Reskrim POLRES Kab. Morowali Utara, Bagi CV. BULAN KARYA (DBH PUSAT)	79,800,000.00
16	31/12/2024	72.12/11.0/000133/JUR-BLJ/SP2D-LS/1.03.1.04.0.00.01.0000/01/2025	Pembayaran 95% dan Retensi 5% (100%) atas Pekerjaan Pembangunn Gedung Parkir Polsek Petasia , Bagi CV. MULHY PRATAMA (DBH PUSAT)	99,752,000.00
17	31/12/2024	72.12/11.0/000137/JUR-BLJ/SP2D-LS/1.03.1.04.0.00.01.0000/01/2025	Pembayaran 34% dan Retensi 5% (100%) atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Olahraga Polres Morowali Utara, Bagi CV. BULAN KARYA (DBH PUSAT)	311,494,017.00
			Jumlah	**3,200,099,500.00**

DINAS SOSIAL

BELANJA PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL / DISERAHKAN - KEPADA MASYARAKAT

No	Tanggal/Nomor SP2D		URAIAN	JUMLAH
1	09/07/2024	72.12/11.0/000014/JUR-BLJ/SP2D-LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/08/2024	Permintaan pembayaran 100% Pengadaan Belanja barang Diserahkan kepada Masyarakat Oleh Cv REZKY JAYA MANDIRI (DBH PUSAT)	5,064,400.00
2	10/07/2024	72.12/11.0/000013/JUR-BLJ/SP2D-LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/08/2024	Permintaan pembayaran 100% Pengadaan Barang Diserahkan Kepada Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Oleh CV REZKY JAYA MANDIRI (DBH PUSAT)	7,296,000.00
3	07/08/2024	72.12/11.0/000005/JUR-BLJ/SP2D-LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/08/2024	Permintaan Pembayaran 100% Pengadaan bantuan ASMAS Peralatan Olahan Roti Kelompok Bersatu Desa Tirongan Atas Oleh CV AMALGAMASI PERSADA (DID)	27,900,000.00
4	07/08/2024	72.12/11.0/000006/JUR-BLJ/SP2D-LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/08/2024	Permintaan Pembayaran 100% Pengadaan bantuan ASMAS Peralatan Olahan Roti Kelompok Sehati Desa Tanakuraya Oleh AMALGAMASI PERSADA (DID)	27,900,000.00
5	13/08/2024	72.12/11.0/000002/JUR-BLJ/SP2D-LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/08/2024	Permintaan Pembayaran 100% Pengadaan Bantuan ASMAS Peralatan Olahan Roti Kelompok Al-Zikra Desa Posangke Oleh CV AMALGAMASI PERSADA (DID)	27,910,000.00
6	13/08/2024	72.12/11.0/000003/JUR-BLJ/SP2D-LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/08/2024	Permintaan Pembayaran 100% Pengadaan Bantuan ASMAS Peralatan Olahan Roti Kelompok Melati Desa Tokala Atas Oleh CV AMALGAMASI PERSADA (DID)	27,900,000.00
7	30/08/2024	72.12/11.0/000009/JUR-BLJ/SP2D-LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/09/2024	Permintaan Pembayaran Pengadaan Kaos Harian Pada Dinas Sosial Daerah Oleh CV AMALGAMASI PERSADA (PAD)	5,760,000.00

8	30/08/2024	72.12/11.0/000010/JUR-BLJ/SP2D-LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/09/2024	Permintaan Pembayaran 100% Pengadaan Kaos Harian Pada Dinas Sosial daerah Oleh Cv AMALGAMASI PERSADA (PAD)	3,456,000.00
9	19/09/2024	72.12/11.0/000003/JUR-BLJ/SP2D-LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/09/2024	Permintaan pembayaran 100% pengadaan Kursi Roda dan Alat bantu Dengar oleh Cv BINA MANDIRI (DAU)	26,000,000.00
10	19/09/2024	72.12/11.0/000004/JUR-BLJ/SP2D-LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/09/2024	Permintaan pembayaran 100% pengadaan kaki palsu Oleh CV BINA MANDIRI (DAU)	41,400,000.00
11	20/09/2024	72.12/11.0/000002/JUR-BLJ/SP2D-LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/09/2024	Permintaan pembayaran 100% Pengadaan bantuan ASMAS Alat salon Starbox Desa Tinompo Oleh Cv AMALGAMASI PERSADA (DID)	23,250,000.00
12	07/11/2024	72.12/11.0/000003/JUR-BLJ/SP2D-LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/12/2024	Permintaan Pembayaran 100% Bantuan Lansia Oleh Cv MOIKO Pada Dinas Sosial Daerah T.A 2024 (DID)	2,800,000.00
13	19/12/2024	72.12/11.0/000015/JUR-BLJ/SP2D-LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/12/2024	Permintaan pembayaran 100% Pengadaan Bantuan Stunting Oleh CV SYABAN Pada Dinas Sosial Daerah.(PAD)	8,632,000.00
14	24/12/2024	72.12/11.0/000002/JUR-BLJ/SP2D-LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/01/2025	Permintaan Pembayaran 100% Belanja Pengadaan Bantuan Asmas Alat Perlengkapan Meubel kelompok Tri Putri Oleh CV BAIM PRATAMA (DBH PUSAT)	30,000,000.00
15	27/12/2024	72.12/11.0/000006/JUR-BLJ/SP2D-LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/01/2025	Permintaan Pembayaran 100% Pengadaan Barang Diserahkan Kepada Masyarakat (Pakaian Olahraga) Oleh CV NADYA PRIMA GEMILANG (PAD)	38,000,000.00
16	27/12/2024	72.12/11.0/000007/JUR-BLJ/SP2D-LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/01/2025	Permintaan Pembayaran 100% Pengadaan Bantuan Kelompok Beragam Kue UEP Oleh CV AMALGAMASI PERSADA (PAD)	18,980,000.00
17	27/12/2024	72.12/11.0/000008/JUR-BLJ/SP2D-LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/01/2025	Permintaan Pembayaran 100% Pengadaan Bantuan Kelompok Alat pertukangan UEP Oleh Cv AMALGAMASI PERSADA (PAD)	8,440,000.00
18	30/12/2024	72.12/11.0/000033/JUR-BLJ/SP2D-LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/01/2025	Permintaan Pembayaran 100 % atas Pekerjaan Pengadaan Bantuan ASMAS Bangunan Korban KebakaranOleh CV EIKO KREASI MANDIRI (PAD)	89,796,000.00
19	30/12/2024	72.12/11.0/000034/JUR-BLJ/SP2D-LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/01/2025	Permintaan Pembayaran 100% pengadaan Alat saraba Instan (IKM) Mia Mori Desa Tomata Oleh CV REDATU (PAD)	41,850,000.00
20	31/12/2024	72.12/11.0/000030/JUR-BLJ/SP2D-LS/1.06.0.00.0.00.01.0000/01/2025	Permintaan Pembayaran 100 % atas Pekerjaan Pengadaan Bantuan Tenda Terowongan Kelompok Petuluwa Jaya Desa Sampalowo Oleh CV PUTRA BINTANG PRATAMA (PAD)	92,123,000.00
			Jumlah	**554,457,400.00**

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

BELANJA PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL / DISERAHKAN - KEPADA MASYARAKAT

No	Tanggal/Nomor SP2D		URAIAN	JUMLAH
1	27/09/2024	72.12/11.0/000005/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.07.3.32.0.00.01.0000/10/2024	Pembayaran Uang Muka 50% Pekerjaan Rehab Lapangan Desa Tanasumpu Sesuai Dengan No Kontrak 10.1/Spk-Pl/Ppk/Disnakertrans/Mu/Ix/2024 Sesuai Terlampir (Dbh Pusat)	74,935,000.00
2	23/12/2024	72.12/11.0/000039/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.07.3.32.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran 100% Pekerjaan Rehab Lapangan Desa Tanasumpu Sesuai Dengan No. Kontrak :10.1/Spk/Pl/Ppk/Disnakertrans/Mu/Ix/2024 Sesuai Terlampir	74,935,000.00
			Jumlah	**149,870,000.00**

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
BELANJA PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL / DISERAHKAN - KEPADA MASYARAKAT				
No	**19/10/2023**		**URAIAN**	**JUMLAH**
1	18/10/2024	72.12/11.0/000004/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.08.2.14.0.00.01.0000/11/2024	Pembayaran 100% Kepada CV. SMART CONSULTING INDONESIA Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain (Belanja Pengadaan BKB KI) TA 2024 (DAK Non Fisik)	298,080,000.00
2	20/12/2024	72.12/11.0/000027/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.08.2.14.0.00.01.0000/12/2024	Permintaan Pembayaran Belanja Kegiatan Advokasi Program Bangga Kencana Oleh Pokja Advokasi Kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (PAD)	2,520,000.00
			Jumlah	**300,600,000.00**
DINAS PERHUBUNGAN				
BELANJA PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL / DISERAHKAN - KEPADA MASYARAKAT				
No	**Tanggal/Nomor SP2D**		**URAIAN**	**JUMLAH**
1	12/09/2024	72.12/11.0/000006/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.15.0.00.0.00.01.0000/09/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pengadaan Meteran Listrik Kec. Bungku Utara dan Kec. Mamosalato.(DBH PUSAT)	99,988,800.00
2	12/09/2024	72.12/11.0/000007/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.15.0.00.0.00.01.0000/09/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pengadaan Meteran Listrik Dusun Mokoto Desa Opo Kec. Bungku Utara.(DBH PUSAT)	99,977,600.00
3	12/09/2024	72.12/11.0/000007/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.15.0.00.0.00.01.0000/09/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pengadaan Meteran Listrik Dusun Mokoto Desa Opo Kec. Bungku Utara.(DBH PUSAT)	11,200.00
			Jumlah	**199,977,600.00**
DINAS KOPERASI,USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH				
BELANJA PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL / DISERAHKAN - KEPADA MASYARAKAT				
No	**Tanggal/Nomor SP2D**		**URAIAN**	**JUMLAH**
1	31/05/2024	72.12/11.0/055244/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.17.3.31.3.30.01.0000/07/2024	Permintaan Pembayaran 100% Subsidi Pasar Murah (DID)	402,370,000.00
2	19/09/2024	72.12/11.0/000001/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.17.3.31.3.30.01.0000/09/2024	Permintaan Pembayaran Seratus Persen (100%) Belanja Kegiatan Pasar Murah BerSubsidi Tahun 2024 Pada Dinas KUmperindag (DID)	5,000.00
3	19/09/2024	72.12/11.0/000001/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.17.3.31.3.30.01.0000/09/2024	Permintaan Pembayaran Seratus Persen (100%) Belanja Kegiatan Pasar Murah BerSubsidi Tahun 2024 Pada Dinas KUmperindag (DID)	783,125,000.00
4	08/11/2024	72.12/11.0/000010/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.17.3.31.3.30.01.0000/12/2024	Permintaan Pembayaran Seratus Persen (100 %) Belanja Kegiatan Pasar Murah Bersubsidi Tahun 2024 pada Dinas Kumperindag (DBH PUSAT)	783,130,000.00
5	17/12/2024	72.12/11.0/000030/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.17.3.31.3.30.01.0000/12/2024	Permintaan Pembayaran seratus Persen(100%) Belanja Kegiatan Pasar Murah Bersubsidi Tahun 2024 pada Dinas Kumperindag (DBH PUSAT)	402,370,000.00
			Jumlah	**2,371,000,000.00**
DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA				
BELANJA PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL / DISERAHKAN - KEPADA MASYARAKAT				
No	**Tanggal/Nomor SP2D**		**URAIAN**	**JUMLAH**

1	01/07/2024	72.12/11.0/054444/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.26.2.19.0.00.01.0000/07/2024	Pembayaran 50% atas Pembuatan Lapangan Bola Volly Desa Tabarano Sesuai SPK No : 05/SPK-PL/DISPARPORA/VI/2024 (PAD)	49,938,500.00
2	01/07/2024	72.12/11.0/054445/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.26.2.19.0.00.01.0000/07/2024	Pembayaran 50% atas Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Sepak Bola Desa Siliti Sesuai SPK No : 02/SPK-PL/DISPARPORA/VI/2024 (PAD)	99,889,000.00
3	17/07/2024	72.12/11.0/000011/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.26.2.19.0.00.01.0000/08/2024	Pembayaran 50% atas Pekerjaan Penimbunan Lapangan Sepak Bola Desa Malino Jaya Kec. Soyo Jaya Sesuai SPK No : 09/SPK-PL/DISPARPORA/VII/2024 (PAD)	96,889,000.00
4	08/08/2024	72.12/11.0/000006/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.26.2.19.0.00.01.0000/08/2024	Pembayaran 50% atas Pekerjaan Pembenahan / Penataan Tribun Lapangan Sepak Bola Desa Panca Makmur Kec.Soyo Jaya, Kab.Morowali Utara. Sesuai SPK No : 10/SPK-PL/DISPARPORA/VII/2024.(PAD)	84,791,750.00
5	10/09/2024	72.12/11.0/000010/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.26.2.19.0.00.01.0000/09/2024	Pembayaran 50% (100%) atas Pembuatan Lapangan Bola Volly Desa Tabarano Sesuai SPK No : 05/SPK-PL/DISPARPORA/VI/2024.(PAD)	49,938,500.00
6	27/09/2024	72.12/11.0/000002/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.26.2.19.0.00.01.0000/10/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pembuatan Lapangan Bola Volly Kecamatan Mori Atas Sesuai SPK No:04/SPK-PL/DISPARPORA/VI/2024 (PAD)	49,944,000.00
7	11/10/2024	72.12/11.0/000009/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.26.2.19.0.00.01.0000/11/2024	Pembayaran 50% (100%) atas Pekerjaan Pembangunan Tribun Lapangan Sepak Bola Desa Siliti Sesuai SPK No : 02/SPK-PL/DISPARPORA/VI/2024 (PAD)	99,889,000.00
8	14/10/2024	72.12/11.0/000005/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.26.2.19.0.00.01.0000/11/2024	Pembayaran 100% atas Pembangunan Gedung Tribun dan Pembenahan Lapangan Sepak Bola Desa Boba, Kec.Bungku Utara Atas Sesuai SPK No :03/SPK-PL/DISPARPORA/VI/2024 (PAD)	145,333,000.00
9	25/10/2024	72.12/11.0/000004/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.26.2.19.0.00.01.0000/11/2024	Pembayaran 50% (100%) atas Pekerjaan Penimbunan Lapangan Sepak Bola Desa Malino Jaya Kec. Soyo Jaya Sesuai SPK No : 09/SPK-PL/DISPARPORA/VII/2024 (PAD)	77,211,750.00
10	25/10/2024	72.12/11.0/000004/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.26.2.19.0.00.01.0000/11/2024	Pembayaran 50% (100%) atas Pekerjaan Penimbunan Lapangan Sepak Bola Desa Malino Jaya Kec. Soyo Jaya Sesuai SPK No : 09/SPK-PL/DISPARPORA/VII/2024 (PAD)	19,677,250.00
11	31/10/2024	72.12/11.0/000010/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.26.2.19.0.00.01.0000/11/2024	Pembayaran Belanja Pengadaan Sound System Kesenian Gamelan Desa Korobonde Kec Lembo Sesuai SPK No : 556/94/SP/DISPARPORA/IX/2024 (PAD)	50,000,000.00
12	11/12/2024	72.12/11.0/000034/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.26.2.19.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran 100% atas Pekerjaan Rehabilitasi Daya Tarik Wisata Pulau Bajo/Bukit Teletabis dan Wisata Jompi, Sesuai SPK No: 028/12/CV-RA/SPK-PL/DISPARPORA/XI/2024 (PAD)	99,789,000.00
13	18/12/2024	72.12/11.0/000043/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.26.2.19.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran 50%(100%) atas pekerjaan Pembenahan /penataan Tribun lapangan Sepak bola Desa Panca Makmur Kec. Soyo Jaya Kab. Morowali Utara Sesuai SPK No: 10/SPK-PL/DISPARPORA/VII/2024 (PAD)	84,791,750.00
14	27/12/2024	72.12/11.0/000009/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.26.2.19.0.00.01.0000/01/2025	Bantuan Pengembangan Ekonomi Kreatif Kelompok UMKM Tia Hairs and Beauty Salon Desa Tinompo,Sesuai SPK No : 556/220/SPK-PL/DISPARPORA/XII/2024 (DBH PUSAT)	23,980,000.00
15	27/12/2024	72.12/11.0/000011/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.26.2.19.0.00.01.0000/01/2025	Pembayaran Permohonan Bantuan Perlengkapan Penari Tradisional Bali Desa Panca Makmur Kec.Soyojaya,Sesuai SPK No:556/178/SPK-PL/DISPARPORA/X/2024 (DBH PUSAT)	29,750,000.00
16	27/12/2024	72.12/11.0/000010/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.26.2.19.0.00.01.0000/01/2025	Pembayaran Pengadaan Bantuan Pengembangan Ekonomi Kreatif Kelompok UMKM Amanah Digital Printing Desa Tinompo, Sesuai SPK No: 556/154/SPK-PL/DISPARPORA/X/2024 (DBH PUSAT)	27,750,000.00
17	27/12/2024	72.12/11.0/000013/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.26.2.19.0.00.01.0000/01/2025	Pembayaran Pengadaan Bantuan Pengembangan Ekonomi Kreatif Kelompok Pemuda Digital Utama Beteleme, Sesuai SPK No:556/150/SPK-PL/DISPARPORA/X/2024 (DBH PUSAT)	47,765,000.00
18	27/12/2024	72.12/11.0/000012/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.26.2.19.0.00.01.0000/01/2025	Pembayaran Bantuan Pengembangan Ekonomi Kreatif Kelompok Srikandi Mandiri Desa Beteleme,Sesuai SPK No: 556/241/SPK-Pl/DISPARPORA/XII/2024.(DBH PUSAT)	20,000,000.00
19	27/12/2024	72.12/11.0/000014/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.26.2.19.0.00.01.0000/01/2025	Pembayaran Bantuan Pengembangan Ekonomi Kreatif Kelompok Kuliner Perempuan Mandiri Desa Beteleme,Sesuai SPK NO: 556/237/SPK-PL/DISPARPORA/XII/2024.(DBH PUSAT)	23,938,000.00
20	27/12/2024	72.12/11.0/000015/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.26.2.19.0.00.01.0000/01/2025	Pembayaran Bantuan Pengembangan Ekonomi Kreatif Kelompok UMKM Teofani Tailor Desa Tinompo,Sesuai SPK No:556/224/SPK-PL/DISPARPORA/XII/2024 (DBH PUSAT)	23,950,000.00

21	27/12/2024	72.12/11.0/000016/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.26.2.19.0.00.01.0000/01/2025	Pembayaran Pengadaan Pakaian Penari Joget Seni Budaya Tradisional Bali, Sesuai SPK No:556/216/SPK-PL/DISPARPORA/XII/2024.(DBH PUSAT)	29,850,000.00
22	30/12/2024	72.12/11.0/000041/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.26.2.19.0.00.01.0000/01/2025	Pembayaran Belanja Pengadaan Baju Seragam ORMAS Sahabat Thekoshi Bahontula, Sesuai SPK No:556/284/SP/DISPARPORA/XII/2024B (PAD)	23,400,000.00
23	30/12/2024	72.12/11.0/000042/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.26.2.19.0.00.01.0000/01/2025	Pembayaran Pengadaan Alat Musik Pemuda Sahabat Thekoshi Bahontula, Sesuai SPK No: 556/280/SP/DISPARPORA/XII/2024 (PAD)	23,816,000.00
24	31/12/2024	72.12/11.0/000017/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.26.2.19.0.00.01.0000/01/2025	Pembayaran Bantuan Pengembangan Ekonomi Kreatif Kelompok UMKM Kuliner Sumber Berkat Desa Tinompo Sesuai SPK No: 556/256/SPK-PL/DISPARPORA/XII/2024 (DBH PUSAT)	37,850,000.00
25	31/12/2024	72.12/11.0/000020/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.26.2.19.0.00.01.0000/01/2025	Pembayaran Bantuan Pengembangan Ekonomi Kreatif Kelompok UMKM Kuliner Kartini Mandiri Desa Wawopada,Sesuai SPK NO : 556/260/SPK-PL/DISPARPORA/XII/2024 (DBH PUSAT)	23,850,000.00
26	31/12/2024	72.12/11.0/000019/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.26.2.19.0.00.01.0000/01/2025	Pembayaran Pembangunan Lapangan Futsal Desa Koromatantu, Sesuai SPK No : 05/SPK-PL/DISPARPORA/XII/2024 (PAD)	149,704,000.00
27	31/12/2024	72.12/11.0/000023/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.26.2.19.0.00.01.0000/01/2025	Pembayaran Bantuan Pengembangan Ekonomi Kreatif Kelompok Kuliner Perempuan Mandiri Desa Beteleme,Sesuai SPK No: 556/252/SPK-PL/DISPARPORA/XII/2024 (DBH PUSAT)	37,800,000.00
28	31/12/2024	72.12/11.0/000026/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.26.2.19.0.00.01.0000/01/2025	Pembayaran Rehabilitasi Lapangan Sepak Bola Desa Mandula,Sesuai SPK No: 07/SPK-PL/DISPARPORA/XII/2024 (PAD)	159,829,000.00
29	31/12/2024	72.12/11.0/000028/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.26.2.19.0.00.01.0000/01/2025	Pembayaran Bantuan Pengembangan Ekonomi Kreatif Kelompok Cahaya Baru Desa Beteleme, Sesuai SPK Nomor: 556/14/CV-SWM/SPK-PL/DISPARPORA/XII/2024.(DBH PUSAT)	99,550,000.00
30	31/12/2024	72.12/11.0/000030/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.26.2.19.0.00.01.0000/01/2025	Pembayaran Bantuan Pengadaan Sound System Kelompok Karang Taruna Desa Dolupo Karya, Sesuai SPK No : 06/SPK/PL-PB/DISPARPORA/XII/2024 (PAD)	93,677,300.00
31	31/12/2024	72.12/11.0/000032/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.26.2.19.0.00.01.0000/01/2025	Pembayaran Pengadaan Alat Tukang Desa Tiu Kecamatan Petasia Barat Sesuai SPK No: 556/248/SPK-PL/DISPARPORA/XII/2024 (DBH PUSAT)	49,875,000.00
32	31/12/2024	72.12/11.0/000038/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.26.2.19.0.00.01.0000/01/2025	Pembayaran 100% atas Pekerjaan Pembangunan Tribun Ronta Sesuai SPK No : 06/SPK-PL/DISPARPORA/XII/2024 (PAD)	189,777,000.00
33	31/12/2024	72.12/11.0/000037/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.26.2.19.0.00.01.0000/01/2025	Pembayaran Belanja Bantuan Alat Marching Band Bahana Mahardika SMAN 1 Lembo, Sesuai SPK No : 556/264/SP/DISPARPORA/ X /2024 (PAD)	39,845,000.00
			Jumlah	**2,164,038,800.00**

DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

BELANJA PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL / DISERAHKAN - LAINNYA

No	Tanggal/Nomor SP2D		URAIAN	JUMLAH
1	08/07/2024	72.12/11.0/000013/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.26.2.19.0.00.01.0000/08/2024	Pembayaran 50% atas Pekerjaan Pemasangan Paving Block DTW Pantai Ungkea Sesuai SPK No : 06/SPK-PL/DISPARPORA/VI/2024 (PAD)	99,399,000.00
2	08/07/2024	72.12/11.0/000014/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.26.2.19.0.00.01.0000/08/2024	Pembayaran 50% atas Pekerjaan Pembangunan Tanggul DTW Pantai Ungkea Sesuai SPK No : 07/SPK-PL/DISPARPORA/VI/2024 (PAD)	99,804,500.00
3	07/08/2024	72.12/11.0/000007/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.26.2.19.0.00.01.0000/08/2024	Pembayaran 50% atas Pekerjaan Pengembangan Wisata Hutan Mangrove Desa Koya Kec. Petasia Sesuai SPK No : 08/SPK-PL/DISPARPORA/VII/2024 (PAD)	90,023,500.00
4	11/10/2024	72.12/11.0/000007/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.26.2.19.0.00.01.0000/11/2024	Pembayaran 50% (100%) atas Pekerjaan Pembangunan Tanggul DTW Pantai Ungkea Sesuai SPK No : 07/SPK-PL/DISPARPORA/VI/2024 (PAD)	89,355,823.00

5	11/10/2024	72.12/11.0/000007/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.26.2.19.0.00.01.0000/11/2024	Pembayaran 50% (100%) atas Pekerjaan Pembangunan Tanggul DTW Pantai Ungkea Sesuai SPK No : 07/SPK-PL/DISPARPORA/VI/2024 (PAD)	10,448,677.00
6	14/10/2024	72.12/11.0/000006/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.26.2.19.0.00.01.0000/11/2024	Pembayaran 50% (100%) atas Pekerjaan Pemasangan Paving Block DTW Pantai Ungkea Sesuai SPK No : 06/SPK-PL/DISPARPORA/VI/2024 (PAD)	99,399,000.00
7	31/12/2024	72.12/11.0/000029/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.26.2.19.0.00.01.0000/01/2025	Pembayaran 50% (100%) atas Pekerjaan Pengembangan Wisata Hutan Mangrove Desa Koya Kec.Petasia Sesuai SPK No : 08 /SPK-PL/DISPARPORA/VII/2024(PAD)	90,023,500.00
			Jumlah	**578,454,000.00**

DINAS PERTANIAN

BELANJA PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL / DISERAHKAN - KEPADA MASYARAKAT

No	Tanggal/Nomor SP2D		URAIAN	JUMLAH
1	04/04/2024	72.12/11.0/018006/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/04/2024	Pembayaran Uang Muka 50% Atas Pekerjaan Pembuatan Saluran Drainase Desa Bunta	83,772,000.00
2	04/04/2024	72.12/11.0/018007/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/04/2024	Pembayaran Uang Muka 50% Atas Pekerjaan Pembuatan Paving Blok Halaman Kantor BPP Kec. Bungku Utara	99,570,000.00
3	05/04/2024	72.12/11.0/018003/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/04/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pengadaan Ternak Kambing Desa Pokeang Kecamatan Bungku Utara	44,370,000.00
4	05/04/2024	72.12/11.0/018004/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/04/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pengadaan Ternak Kambing Desa Opo Kecamatan Bungku Utara	29,565,000.00
5	05/04/2024	72.12/11.0/018005/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/04/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pengadaan Ternak Kambing Desa Tanakuraya Kecamatan Bungku Utara	44,370,000.00
6	17/04/2024	72.12/11.0/021778/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/04/2024	Pembayaran Uang Muka 50% Atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Produksi sepanjang 2 KM Desa Tokala Atas (DBH PUSAT)	71,784,500.00
7	22/04/2024	72.12/11.0/021777/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/04/2024	Pembayaran Uang Muka 50% Atas Pekerjaan Pembentukan Jalan Usaha Tani Fumbera Desa Boba Kec. Bungku Utara (DBH PUSAT)	99,810,000.00
8	23/04/2024	72.12/11.0/021776/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/04/2024	Pembayaran Uang Muka 50% Atas Pekerjaan Pembuatan JUT Uekamboba Desa Momo (DBH PUSAT)	49,873,500.00
9	23/04/2024	72.12/11.0/034906/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/06/2024	Pembayaran Uang Muka 50% Atas Pekerjaan Peningkatan JUT Desa Uemasi, (DBH PUSAT)	63,582,500.00
10	23/04/2024	72.12/11.0/034908/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/06/2024	Pembayaran Uang Muka 50% Atas Pekerjaan Pembentukan JUT Uepakavu Desa Momo (DBH PUSAT)	49,845,000.00
11	24/04/2024	72.12/11.0/034907/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/06/2024	Pembayaran Uang Muka 50% Atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Produksi Kelompok Tani Kayayo Makmur Desa Momo Kec. Mamosalato (DBH PUSAT)	99,765,000.00
12	25/04/2024	72.12/11.0/034905/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/06/2024	Pembayaran Uang Muka 50% Atas Pekerjaan Pembuatan pintu air persawahan kalengko desa uluanso kec lembo.(DBH PUSAT)	37,439,000.00

13	26/04/2024	72.12/11.0/034904/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/06/2024	Pembayaran Uang Muka 50% Atas Pekerjaan Rehab saluran irigasi persawahan kalengko desa uluanso kec lembo . (DBH PUSAT)	74,893,000.00
14	30/04/2024	72.12/11.0/034903/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/06/2024	Pembayaran Uang Muka 50% Atas Pekerjaan Pembangunan Embung pertanian Dusun I Desa Tananagaya (PAD)	74,823,000.00
15	02/05/2024	72.12/11.0/034897/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/06/2024	Pembayaran Uang Muka 50% Atas Pekerjaan Pembangunan jalan usaha tani kelompok putra galuh wana bakti desa tanasumpu .(DID)	49,794,000.00
16	02/05/2024	72.12/11.0/034898/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/06/2024	Pembayaran Uang Muka 50% Atas Pekerjaan Pembangunan jalan usaha tani desa bau.(DBH PUSAT)	49,830,000.00
17	02/05/2024	72.12/11.0/034899/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/06/2024	Pembayaran Uang Muka 50% Atas Pekerjaan Pembentukan JUT Bukit Harapan Molino Jaya.(DBH PUSAT)	49,818,500.00
18	02/05/2024	72.12/11.0/034900/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/06/2024	Pembayaran Uang Muka 50% Atas Pekerjaan Pembuatan jalan usaha tani desa tambale.(DID)	49,812,500.00
19	02/05/2024	72.12/11.0/034901/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/06/2024	Pembayaran Uang Muka 50% Atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Usaha Tani Korobomba Bawah Dusun II Desa Lembobaru Kec. Lembo.(DID)	49,809,500.00
20	02/05/2024	72.12/11.0/034902/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/06/2024	Pembayaran Uang Muka 50% Atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Tani Desa Tiu. (DID)	49,858,000.00
21	03/05/2024	72.12/11.0/034896/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/06/2024	Pembayaran Uang Muka 50% Atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Tani Desa Pa'awaru Dusun I .(DID)	49,863,000.00
22	14/05/2024	72.12/11.0/034892/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/06/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Bantuan Ternak Kambing Etawa Kelompok Sido Mukti Desa Pontangoa Kecamatan Lemboraya.(DBH PUSAT)	63,525,000.00
23	15/05/2024	72.12/11.0/034888/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/06/2024	Pembayaran Uang Muka 50% Atas Pekerjaan Pembangunan Embung pertanian Desa Waraa (PAD)	49,988,000.00
24	15/05/2024	72.12/11.0/034889/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/06/2024	Pembayaran Uang Muka 50% Atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Produksi Tani Dusun II (Pansoi) Desa Kalombang Kec. Bungku Utara (DID)	62,452,000.00
25	15/05/2024	72.12/11.0/034890/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/06/2024	Pembayaran Uang Muka 50% Atas Pekerjaan Pembuatan Jalan Usaha Tani Kel. Tani Desa Tirongan Atas, Kec. Bungku Utara (DID)	49,824,500.00
26	15/05/2024	72.12/11.0/034891/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/06/2024	Pembayaran Uang Muka 50% Atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Tani Desa Mora (DID)	99,835,000.00
27	16/05/2024	72.12/11.0/034885/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/06/2024	Pembayaran Uang Muka 50% Atas Pekerjaan Pembuatan Saluran Irigasi sekunder Klota p3k Sumberjaya Desa Tabarobone (PAD)	74,588,000.00
28	16/05/2024	72.12/11.0/034886/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/06/2024	Pembayaran Uang Muka 50% Atas Pekerjaan Jalan tani desa mohoni (DID)	37,379,000.00
29	17/05/2024	72.12/11.0/034883/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/06/2024	Pembayaran Uang Muka 50% Atas Pekerjaan Pembuatan jalan usaha tani kelompok tani putra maros dusun 5 desa panca makmur(DID)	49,828,500.00

30	17/05/2024	72.12/11.0/055286/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/07/2024	Pembayaran Uang Muka 50% Atas Pekerjaan Pembentukan jalan usaha tani kelompok tani harapan tani desa panca makmur (DID)	49,949,500.00
31	21/05/2024	72.12/11.0/034882/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/06/2024	Pembayaran Uang Muka 50% Atas Pekerjaan Penghamparan jalan tani wana bakti desa tanasumpu (DID)	49,827,000.00
32	22/05/2024	72.12/11.0/039945/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/06/2024	Pembayaran Uang Muka 50% Atas Pekerjaan Pembentukan JUT Desa Lemo Walia (DID)	49,832,500.00
33	22/05/2024	72.12/11.0/039946/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/06/2024	Pembayaran Uang Muka 50% Atas Pekerjaan Penimbunan Jalan Kantong Produksi Dusun Korowasu Desa Kolaka Kec. Mori Atas (DID)	49,829,000.00
34	22/05/2024	72.12/11.0/039947/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/06/2024	Pembayaran Uang Muka 50% Atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Tani Desa Tanakuraya Dusun II (DID)	49,820,000.00
35	22/05/2024	72.12/11.0/039948/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/06/2024	Pembayaran Uang Muka 50% Atas Pekerjaan Peningkatan JUT Dusun 2 Desa Tanakuraya Kec. Bungku Utara (DID)	74,813,500.00
36	29/05/2024	72.12/11.0/039935/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/06/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pengadaan Pupuk Desa Molores (PAD)	49,284,000.00
37	29/05/2024	72.12/11.0/039936/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/06/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pengadaan Pupuk dan Racun Kelompok Tani Rajawali Desa Tamainusi (PAD)	22,496,000.00
38	29/05/2024	72.12/11.0/039937/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/06/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pengadaan herbisida desa girimulya (PAD)	49,601,000.00
39	29/05/2024	72.12/11.0/039938/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/06/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pengadaan herbisida desa tananagaya (PAD)	49,601,000.00
40	29/05/2024	72.12/11.0/039939/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/06/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pengadaan herbisida desa opo (PAD)	49,637,500.00
41	29/05/2024	72.12/11.0/039940/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/06/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pengadaan herbisida desa boba (PAD)	49,637,500.00
42	29/05/2024	72.12/11.0/039941/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/06/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pengadaan herbisida desa kolo bawah (PAD)	49,637,500.00
43	29/05/2024	72.12/11.0/039942/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/06/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pengadaan herbisida desa tirongan bawah (PAD)	49,637,500.00
44	29/05/2024	72.12/11.0/039943/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/06/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pengadaan herbisida desa lemba sumara (PAD)	9,843,000.00
45	30/05/2024	72.12/11.0/051243/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/07/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pengadaan Herbis Desa Kalombang (PAD)	49,637,500.00
46	30/05/2024	72.12/11.0/051244/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/07/2024	Pembayaran Uang Muka 50% Atas Pekerjaan Pembuatan JUT Desa Todopuli/Uebangke (DBH PUSAT)	49,865,000.00

47	30/05/2024	72.12/11.0/051245/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/07/2024	Pembayaran Uang Muka 50% Atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Tani Desa Ungkea Dusun IV (DBH PUSAT)	99,769,500.00
48	30/05/2024	72.12/11.0/051246/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/07/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pengadaan Pupuk dan Racun Kelompok Tani Rajawali Desa Tamainusi (PAD)	26,961,000.00
49	30/05/2024	72.12/11.0/051247/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/07/2024	Pembayaran Uang Muka 50% Atas Pekerjaan Peningkatan JUT Desa Ulu La (DBH PUSAT)	49,860,000.00
50	31/05/2024	72.12/11.0/051242/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/07/2024	Pembayaran Uang Muka 50% Atas Pekerjaan Peningkatan JUT Kelompok Bimor Indah Desa Bimor Jaya Kec. Petasia Timur (DBH PUSAT)	49,833,000.00
51	04/06/2024	72.12/11.0/051236/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/07/2024	Pembayaran Uang Muka 50% Atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Tani Dusun 1 Desa Moleono (DBH PUSAT)	49,843,000.00
52	04/06/2024	72.12/11.0/051239/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/07/2024	Pembayaran Uang Muka 50% Atas Pekerjaan Pembangunan Jalan dan Jembatan JUT Desa Taende (DIDI)	44,860,000.00
53	04/06/2024	72.12/11.0/051241/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/07/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pembukaan JUT Kelompok Wana Bakti Desa Lemo (DID)	99,699,000.00
54	07/06/2024	72.12/11.0/051233/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/07/2024	Pembayaran Uang Muka 50% Atas Pekerjaan Pembuatan jalan usaha tani telombe desa tiu (DBH PUSAT)	49,815,000.00
55	07/06/2024	72.12/11.0/051234/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/07/2024	Pembayaran Uang Muka 50% Atas Pekerjaan Lanjutan Pembuatan Jalan Tani Kel. Tani Putra Kalolu Desa Malino Kec. Soyojaya (DBH PUSAT)	62,332,500.00
56	07/06/2024	72.12/11.0/051234/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/07/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Bantuan pengadaan combine kelompok mekar jaya, wana sari, kelompok sri rahayu desa tanasumpu (PAD)	476,000,000.00
57	07/06/2024	72.12/11.0/051235/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/07/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pengadaan alat panen padi (combine harvester) kelompok sinar lewua desa peleru (PAD)	476,000,000.00
58	11/06/2024	72.12/11.0/051228/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/07/2024	Pembayaran Uang Muka 50% Atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Korowalelo (DID)	49,895,000.00
59	11/06/2024	72.12/11.0/051231/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/07/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pengadaan Ternak Sapi Kelompok Ternak Ikhtiat Desa Mandiri Desa Tabarobone .(DBH PUSAT)	99,800,000.00
60	11/06/2024	72.12/11.0/051232/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/07/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pengadaan Ternak Sapi Kelompok Ternak Desa Jaya Desa Tabarobone .(DBH PUSAT)	149,700,000.00
61	13/06/2024	72.12/11.0/051223/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/07/2024	Pembayaran Uang Muka 50% Atas Pekerjaan Pelaburan jalan usaha tani desa tanasumpu.(DBH PUSAT)	44,882,500.00
62	13/06/2024	72.12/11.0/051225/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/07/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Bantuan Ternak Sapi Desa Koromatantu .(DBH PUSAT)	89,775,000.00
63	14/06/2024	72.12/11.0/051224/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/07/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pengadaan jonder kelompok tani jaya putra desa lemba sumara kec. Soyojaya.(PAD)	404,100,000.00

64	20/06/2024	72.12/11.0/051218/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/07/2024	Pembayaran Uang Muka 50% Atas Pekerjaan Pembuatan jalan usaha tani desa saemba (DBH PUSAT)	49,844,500.00
65	20/06/2024	72.12/11.0/051219/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/07/2024	Pembayaran Uang Muka 50% Atas Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Tani Desa Maralee Dusun III (DBH PUSAT)	49,937,500.00
66	21/06/2024	72.12/11.0/051217/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/07/2024	Pembayaran Tahap I Sebesar 40% Atas Pekerjaan Bantuan Bibit Ayam Petelur beserta Kandang dan Pakannya Kelompok Amor Sejahtera Desa Wara'a (PAD)	39,840,000.00
67	26/06/2024	72.12/11.0/051216/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/07/2024	Pembayaran Uang Muka 50% Atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Usaha Tani Tongko Desa Pambarea (DBH PUSAT)	49,822,500.00
68	27/06/2024	72.12/11.0/051214/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/07/2024	Pembayaran 50% (100%) Atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Produksi Kelompok Tani Kayayo Makmur Desa Momo Kec. Mamosalato.(DBH PUSAT)	99,765,000.00
69	27/06/2024	72.12/11.0/051215/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/07/2024	Pembayaran 50% (100%) Atas Pekerjaan Pembentukan JUT Uepakavu Desa Momo.(DBH PUSAT)	49,845,000.00
70	27/06/2024	72.12/11.0/051216/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/07/2024	Pembayaran 50% (100%) Atas Pekerjaan Pembuatan JUT Uekamboba Desa Momo .(DBH PUSAT)	49,873,500.00
71	28/06/2024	72.12/11.0/051205/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/07/2024	Pembayaran Uang Muka 50% Atas Pekerjaan Lanjutan jalan usaha tani jalur dua desa korolama .(DBH PUSAT)	49,850,000.00
72	08/07/2024	72.12/11.0/000037/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/08/2024	Pembayaran 50% (100%) Atas Pekerjaan Pembuatan Jalan Usaha Tani Kel. Tani Desa Tirongan Atas, Kec. Bungku Utara (DID)	49,824,500.00
73	08/07/2024	72.12/11.0/000036/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/08/2024	Pembayaran 50% (100%) Atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Produksi Tani Dusun II (Pansoi) Desa Kalombang Kec. Bungku Utara (DID)	62,452,000.00
74	16/07/2024	72.12/11.0/000029/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/08/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Bantuan Ternak Sapi Kelompok Tani Maruna Laro Desa Lanumor Kecamatan Mori Atas (DBH PUSAT)	103,765,000.00
75	16/07/2024	72.12/11.0/000030/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/08/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Bantuan Ternak Sapi Kelompok Poktan Anggolo Jaya Desa Peonea Kecamatan Mori Atas (DBH PUSAT)	103,720,000.00
76	16/07/2024	72.12/11.0/000031/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/08/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Bantuan Ternak Sapi Kelompok Bhineka Tunggal Ika Desa Malino Jaya Kecamatan Soyojaya (DBH PUSAT)	127,700,000.00
77	19/07/2024	72.12/11.0/000019/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/08/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pengadaan handsprayer desa lembah sumara (PAD)	68,250,000.00
78	19/07/2024	72.12/11.0/000020/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/08/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Bantuan alat pertanian handsprayer kelompok tadaku bersaudara desa tadaku jaya (PAD)	24,950,000.00
79	19/07/2024	72.12/11.0/000021/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/08/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Bantuan hand sprayer kelompok tani mandiri dan kelompok tani sinar buli desa poona (PAD)	29,940,000.00
80	19/07/2024	72.12/11.0/000022/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/08/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pengadaan tengki semprot kelompok maju mandiri desa siliti (PAD)	49,900,000.00

81	19/07/2024	72.12/11.0/000023/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/08/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pengadaan handsprayer kelompok UPJA karya sejahtera desa lembah sumara (PAD)	68,250,000.00
82	19/07/2024	72.12/11.0/000024/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/08/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Bantuan Handsprayer Kelompok Tani Melati Desa Wawopada (PAD)	14,970,000.00
83	19/07/2024	72.12/11.0/000026/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/08/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pengadaan tengki semprot pertanian desa peleru (PAD)	49,900,000.00
84	19/07/2024	72.12/11.0/000025/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/08/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Bantuan Hand Sprayer Klp Rino Rambe Desa Lembobelala (PAD)	24,950,000.00
85	30/07/2024	72.12/11.0/000018/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/08/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Bantuan Ternak Sapi Kelompok Ternak Sapi Tau Taa Sumara Desa Tambayoli (DBH PUSAT)	99,750,000.00
86	30/07/2024	72.12/11.0/000017/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/08/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Bantuan Ternak Sapi Kelompok Sejahtera Bersama Desa Malino Jaya Kecamatan Soyojaya (DBH PUSAT)	113,800,000.00
87	31/07/2024	72.12/11.0/000015/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/08/2024	Pembayaran 50% (100%) Atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Tani Desa Pa'awaru Dusun I (DID)	49,863,000.00
88	31/07/2024	72.12/11.0/000016/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/08/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Tani Dusun 3 (Sanjaya) Desa Tirongan Atas Kec. Bungku Utara (DID)	99,677,000.00
89	07/08/2024	72.12/11.0/000007/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/08/2024	Pembayaran Uang Muka 50% Atas Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Lahan Usaha (LU1) Desa Sumara Jaya (PAD)	49,864,153.00
90	07/08/2024	72.12/11.0/000008/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/08/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Tani Desa Lemo (DBH PUSAT)	99,660,000.00
91	07/08/2024	72.12/11.0/000009/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/08/2024	Pembayaran Uang Muka 50% Atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Tani Bau Dusun 2 Leboni (DBH PUSAT)	49,858,000.00
92	09/08/2024	72.12/11.0/000005/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/08/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pembuatan jalan usaha tani tamonjengi poktan misakada (INSENTIF FISKAL)	99,767,000.00
93	12/08/2024	72.12/11.0/000003/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/08/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Bantuan Ternak Sapi Kelompok Harapan Jaya Desa Korobonde Kecamatan Lembo .(DBH PUSAT)	99,850,000.00
94	15/08/2024	72.12/11.0/000001/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/08/2024	Pembayaran 50% (100%) Atas Pekerjaan Pembangunan Jalan dan Jembatan JUT Desa Taende (INSENTIF FISKAL)	44,860,000.00
95	21/08/2024	72.12/11.0/000006/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/09/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pengadaan Ternak Sapi Kelompok Ternak Putra Mandiri 2 Desa Korobonde Kecamatan Lembo (DBH PUSAT)	99,780,000.00
96	21/08/2024	72.12/11.0/000005/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/09/2024	Pembayaran Uang Muka 50% Atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Tani Pa'angkole dan Jembatan Sungai Korolarea Desa Beteleme (INSENTIF FISIKAL)	62,368,000.00
97	27/08/2024	72.12/11.0/000002/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/09/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Produksi Matakalengko Desa Uluanso (DBH PUSAT)	99,729,000.00

98	28/08/2024	72.12/11.0/000001/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/09/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pengadaan Ternak Sapi Kelompok Rumput Gajah Desa Pontangoa Kecamatan Lemboraya (DBH PUSAT)	99,800,000.00
99	02/09/2024	72.12/11.0/000034/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/09/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pengadaan handtractor kelompok puncak kane desa tiwaa (PAD)	33,925,700.00
100	02/09/2024	72.12/11.0/000035/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/09/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Bantuan Handtraktor Kelompok Tani Cerdas dan Kelompok Tani Tambaaro Atas Desa Taende (PAD)	67,751,400.00
101	02/09/2024	72.12/11.0/000036/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/09/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Bantuan handtraktor desa lee .(PAD)	33,925,700.00
102	02/09/2024	72.12/11.0/000037/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/09/2024	Pembayaran 50% (100%) Atas Pekerjaan Pembangunan Embung pertanian Dusun I Desa Tananagaya (PAD)	74,823,000.00
103	02/09/2024	72.12/11.0/000038/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/09/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Bantuan handtraktor desa mayumba .(PAD)	33,925,700.00
104	02/09/2024	72.12/11.0/000039/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/09/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pengadaan Hand Traktor Desa Pandauke dan Desa Momo (PAD)	67,751,400.00
105	02/09/2024	72.12/11.0/000040/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/09/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Bantuan Handtraktor Kelompok Tani Maperambe Desa Kasingoli (PAD)	34,825,700.00
106	02/09/2024	72.12/11.0/000041/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/09/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pembohonan handtractor kelompok tani tunas baru desa mora .(PAD)	33,925,700.00
107	04/09/2024	72.12/11.0/000030/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/09/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Bangunan Gilingan Padi Kelompok Tani Sinar Lewua Desa Peleru (PAD)	99,726,000.00
108	05/09/2024	72.12/11.0/000028/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/09/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pengadaan Sapi Kelompok Ternak Makmur Desa Tirongan Bawah Kec. Bungku Utara (DBH PUSAT)	99,900,000.00
109	05/09/2024	72.12/11.0/000029/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/09/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pengadaan Ternak Sapi Kelompok Ternak Ikhtiat Desa Sejahterah Desa Tanakuraya (DBH PUSAT)	151,685,000.00
110	09/09/2024	72.12/11.0/000026/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/09/2024	Pembayaran 50% (100%) Atas Pekerjaan Peningkatan JUT Desa Ulu La (DBH PUSAT)	49,860,000.00
111	09/09/2024	72.12/11.0/000027/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/09/2024	Pembayaran 50% (100%) Atas Pekerjaan Jalan tani desa mohoni (DID)	37,379,000.00
112	10/09/2024	72.12/11.0/000022/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/09/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pengadaan Bibit Sawit Kel. Tani Alkhairaat Koya Kec. Petasia (DID)	99,782,200.00
113	10/09/2024	72.12/11.0/000023/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/09/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pengadaan Bibit Sawit Kel. Tani Sumber Rejeki Desa Girimulya Kec. Mamosalato (DID)	124,662,000.00
114	10/09/2024	72.12/11.0/000024/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/09/2024	Pembayaran 50% (100%) Atas Pekerjaan Pembangunan jalan usaha tani desa bau (DBH PUSAT)	49,830,000.00

115	10/09/2024	72.12/11.0/000025/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/09/2024	Pembayaran 50% (100%) Atas Pekerjaan Pembentukan JUT Bukit Harapan Molino Jaya (DBH PUSAT)	49,818,500.00
116	11/09/2024	72.12/11.0/000017/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/09/2024	Pembayaran 50% (100%) Atas Pekerjaan Lanjutan Pembuatan Jalan Tani Kel. Tani Putra Kalolu Desa Malino Kec. Soyojaya (DBH PUSAT)	62,332,500.00
117	11/09/2024	72.12/11.0/000018/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/09/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pengadaan hand traktor Kelompok Meambo Desa Peonea (PAD)	30,000,000.00
118	11/09/2024	72.12/11.0/000021/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/09/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Bantuan Handtrkator Kelompok Tani Marompi Desa Wawopada (PAD)	33,925,700.00
119	12/09/2024	72.12/11.0/000016/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/09/2024	Pembayaran 50% (100%) Atas Pekerjaan Pembuatan JUT Desa Todopuli/Uebangke (DID)	49,865,000.00
120	17/09/2024	72.12/11.0/000014/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/09/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Beteleme (DID)	99,760,000.00
121	17/09/2024	72.12/11.0/000015/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/09/2024	Pembayaran 50% (100%) Atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Korowalelo (DID)	49,895,000.00
122	18/09/2024	72.12/11.0/000012/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/09/2024	Pembayaran 50% (100%) Atas Pekerjaan Pembangunan Embung pertanian Desa Waraa .(DBH PUSAT)	49,988,000.00
123	18/09/2024	72.12/11.0/000013/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/09/2024	Pembayaran 50% (100%) Atas Pekerjaan Pembuatan jalan usaha tani telombe desa tiu.(DBH PUSAT)	49,815,000.00
124	19/09/2024	72.12/11.0/000011/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/09/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pengadaan Ternak Sapi Kelompok Ternak Towara Pantai Bersaudara Desa Towara Pantai Kecamatan Petasia Timur (DBH PUSAT)	49,950,000.00
125	20/09/2024	72.12/11.0/000008/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/09/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Bantuan Ternak Sapi Desa Mondowe (DBH PUSAT)	27,335,000.00
126	20/09/2024	72.12/11.0/000008/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/09/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Bantuan Ternak Sapi Desa Mondowe (DBH PUSAT)	62,485,000.00
127	20/09/2024	72.12/11.0/000009/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/09/2024	Pembayaran 50% (100%) Atas Pekerjaan Lanjutan jalan usaha tani jalur dua desa korolama (DBH PUSAT)	49,850,000.00
128	20/09/2024	72.12/11.0/000010/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/09/2024	Pembayaran 50% (100%) Atas Pekerjaan Pembentukan Jalan Usaha Tani Fumbera Desa Boba Kec. Bungku Utara (DBH PUSAT)	78,613,766.00
129	20/09/2024	72.12/11.0/000010/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/09/2024	Pembayaran 50% (100%) Atas Pekerjaan Pembentukan Jalan Usaha Tani Fumbera Desa Boba Kec. Bungku Utara (DBH PUSAT)	21,196,234.00
130	27/09/2024	72.12/11.0/000010/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/10/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Bantuan Pompa AIr (Alkon) Untuk Kelompok Tani Sumber Rejeki, Kelompok Tani Sidomuncul, dan Kelompok Tani Gunung Montong) Desa Panca Makmur (PAD)	29,624,800.00
131	27/09/2024	72.12/11.0/000010/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/10/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Bantuan Pompa AIr (Alkon) Untuk Kelompok Tani Sumber Rejeki, Kelompok Tani Sidomuncul, dan Kelompok Tani Gunung Montong) Desa Panca Makmur (PAD)	45,225,200.00

132	27/09/2024	72.12/11.0/000011/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/10/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Bantuan Hand Tractor Kelompok Tani Desa Tiwa'a (PAD)	34,825,700.00
133	27/09/2024	72.12/11.0/000012/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/10/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Bantuan Handtraktor Kelompok Tambaaro Tengah Desa Taende (PAD)	34,825,700.00

134	27/09/2024	72.12/11.0/000013/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/10/2024	Pembayaran 50% (100%) Atas Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Lahan Usaha (LU1) Desa Sumara Jaya (PAD)	49,864,153.00
135	30/09/2024	72.12/11.0/000002/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/10/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pengadaan Alat Pertanian Kelompok Sumber Makmur Desa Pawaru (PAD)	16,290,000.00
136	30/09/2024	72.12/11.0/000001/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/10/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Bantuan alat pertanian mesin paras kelompok moleono.(PAD)	23,530,000.00
137	30/09/2024	72.12/11.0/000003/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/10/2024	Pembayaran 50% (100%) Atas Pekerjaan Pembentukan jalan usaha tani kelompok tani harapan tani desa panca makmur (DID)	49,949,500.00
138	30/09/2024	72.12/11.0/000004/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/10/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pengadaan Sensor Kecil Desa Manyoe Kec. Mamosalato (PAD)	19,000,000.00
139	30/09/2024	72.12/11.0/000005/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/10/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pengadaan mesin paras kec. lembo, lembo raya, mori atas, mori utara (PAD)	23,530,000.00
140	30/09/2024	72.12/11.0/000006/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/10/2024	Pembayaran 50% (100%) Atas Pekerjaan Pembuatan jalan usaha tani kelompok tani putra maros dusun 5 desa panca makmur (DID)	49,828,500.00
141	30/09/2024	72.12/11.0/000007/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/10/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pengadaan mesin chainsaw kec. Petasia (PAD)	19,000,000.00
142	30/09/2024	72.12/11.0/000009/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/10/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pengadaan Alat Pertanian Kelompok Sumber Makmur Desa Pawaru (PAD)	17,100,000.00
143	30/09/2024	72.12/11.0/000008/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/10/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pengadaan mesin pemotong rumput 25 buah (PAD)	47,060,000.00
144	11/10/2024	72.12/11.0/000020/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/11/2024	Pembayaran 50% (100%) Atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Tani Desa Ungkea Dusun IV (DBH PUSAT)	99,769,500.00
145	14/10/2024	72.12/11.0/000018/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/11/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pengadaan Alat Pertanian Kelompok Sumber Makmur Desa Pawaru (PAD)	9,980,000.00
146	16/10/2024	72.12/11.0/000016/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/11/2024	Pembayaran 50% (100%) Atas Pekerjaan Pembuatan Saluran Drainase Desa Bunta (DBH PUSAT)	83,772,000.00
147	17/10/2024	72.12/11.0/000014/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/11/2024	Pembayaran Tahap II Sebesar 60% (100%) Atas Pekerjaan Bantuan Bibit Ayam Petelur beserta Kandang dan Pakannya Kelompok Amor Sejahtera Desa Wara'a (PAD)	59,760,000.00
148	17/10/2024	72.12/11.0/000015/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/11/2024	Pembayaran 50% (100%) Atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Usaha Tani Korobomba Bawah Dusun II Desa Lembobaru Kec. Lembo (INSENTIF FISKAL)	49,809,500.00
149	18/10/2024	72.12/11.0/000013/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/11/2024	Pembayaran 50% (100%) Atas Pekerjaan Peningkatan JUT Kelompok Bimor Indah Desa Bimor Jaya Kec. Petasia Timur (DBH PUSAT)	49,833,000.00

150	22/10/2024	72.12/11.0/000010/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/11/2024	Pembayaran 50% (100%) Atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Tani Desa Tanakuraya Dusun II (DID)	49,820,000.00
151	22/10/2024	72.12/11.0/000009/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/11/2024	Pembayaran 50% (100%) Atas Pekerjaan Peningkatan JUT Dusun 2 Desa Tanakuraya Kec. Bungku Utara (DID)	74,813,500.00
152	22/10/2024	72.12/11.0/000011/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/11/2024	Pembayaran 50% (100%) Atas Pekerjaan Pembangunan jalan usaha tani kelompok putra galuh wana bakti desa tanasumpu (DID)	49,794,000.00
153	22/10/2024	72.12/11.0/000012/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/11/2024	Pembayaran 50% (100%) Atas Pekerjaan Peningkatan JUT Desa Uemasi (DBH PUSAT)	63,582,500.00
154	25/10/2024	72.12/11.0/000007/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/11/2024	Pembayaran 50% (100%) Atas Pekerjaan Pembuatan jalan usaha tani desa saemba (DID)	49,844,500.00
155	28/10/2024	72.12/11.0/000004/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/11/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pengadaan Bibit Durian Montong Kane Kelompok Tani Mandiri, Desa Wawopada, Kec.Lembo (PAD)	49,403,000.00
156	28/10/2024	72.12/11.0/000003/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/11/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pengadaan Bibit Durian Montong Desa Uemasi, Kec.Bungku Utara (PAD)	49,403,000.00
157	28/10/2024	72.12/11.0/000005/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/11/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pengadaan Bibit Durian Montong Desa Panca Makmur Kec. Soyo Jaya (PAD)	23,479,150.00
158	28/10/2024	72.12/11.0/000005/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/11/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pengadaan Bibit Durian Montong Desa Panca Makmur Kec. Soyo Jaya (PAD)	45,672,350.00
159	28/10/2024	72.12/11.0/000006/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/11/2024	Pembayaran 50% (100%) Atas Pekerjaan Penimbunan Jalan Kantong Produksi Dusun Korowasu Desa Kolaka Kec. Mori Atas .(DID)	49,829,000.00
160	29/10/2024	72.12/11.0/000001/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/11/2024	Pembayaran 50% (100%) Atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Tani Dusun 1 Desa Moleono (DBH PUSAT)	49,843,000.00
161	29/10/2024	72.12/11.0/000002/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/11/2024	Pembayaran 50% (100%) Atas Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Tani Desa Maralee Dusun III (DBH PUSAT)	49,937,500.00
162	31/10/2024	72.12/11.0/000032/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/11/2024	Pembayaran 50% (100%) Atas Pekerjaan Pembentukan JUT Desa Lemo Walia (DBH PUSAT)	49,832,500.00
163	05/11/2024	72.12/11.0/000027/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/11/2024	Pembayaran 50% (100%) Atas Pekerjaan Pembuatan jalan usaha tani desa tambale (DID)	49,812,500.00
164	11/11/2024	72.12/11.0/000007/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran Sebesar 35% (100%) Atas Pekerjaan Pembentukan Jalan Usaha Tani Sumber Jaya Desa Malino Jaya Kec. Soyojaya (PAD)	69,859,300.00
165	11/11/2024	72.12/11.0/000008/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran Sebesar 25% (100%) Atas Pekerjaan Pembentukan Jalan Usaha Tani Desa Malino Jaya Kecamatan Soyojaya (PAD)	49,888,750.00
166	11/11/2024	72.12/11.0/000009/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran Sebesar 20% (100%) Atas Pekerjaan Pembentukan Jalan Usaha Tani Kelompok Abadi dan SuksesDesa Bau Kec. Soyojaya (PAD)	39,921,600.00

167	11/11/2024	72.12/11.0/000010/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran Sebesar 30% (100%) Atas Pekerjaan Pembentukan Jalan Usaha Tani Desa Panca Makmur Kec.Soyojaya (PAD)	59,864,700.00
168	11/11/2024	72.12/11.0/000011/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran Sebesar 35% (100%) Atas Pekerjaan Pembentukan Jalan Usaha Tani Beringin Jaya Desa MalinoJaya Kec. Soyojaya (PAD)	69,854,400.00
169	12/11/2024	72.12/11.0/000005/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran Sebesar 50% (100%) Atas Pekerjaan Pembentukan Jalan Usaha Tani Montong 2 Desa Panca Makmur Kec. Soyojaya (PAD)	99,778,500.00
170	18/11/2024	72.12/11.0/000004/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran 50% (100%) Atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Tani Pa'angkole dan Jembatan Sungai Korolarea Desa Beteleme (DID)	62,368,000.00
171	20/11/2024	72.12/11.0/000039/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pengadaan Sapi Desa Mondowe .(DBH PUSAT)	99,690,000.00
172	20/11/2024	72.12/11.0/000040/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pengadaan Ternak Sapi Desa Molino Kecamatan Petasia Timur .(DBH PUSAT)	99,670,000.00
173	26/11/2024	72.12/11.0/000034/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran 50% (100%) Atas Pekerjaan Pembuatan Saluran Irigasi sekunder Klota p3k Sumberjaya Desa Tabarobone (PAD)	74,588,000.00
174	03/12/2024	72.12/11.0/000028/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran TAHAP I Sebesar 70% Atas Pekerjaan Lanjutan Pembuatan Hydroponik Pertanian (Pembuatan Green House) (PAD)	137,896,500.00
175	03/12/2024	72.12/11.0/000029/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran 50% (100%) Atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Tani Desa Mora (INSENTIF FISKAL)	99,835,000.00
176	03/12/2024	72.12/11.0/000031/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran 50% (100%) Atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Produksi sepanjang 2 KM Desa Tokala Atas (DBH PUSAT)	71,784,500.00
177	04/12/2024	72.12/11.0/000026/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran 50% (100%) Atas Pekerjaan Penghamparan jalan tani wana bakti desa tanasumpu (DID)	49,827,000.00
178	04/12/2024	72.12/11.0/000027/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran 50% (100%) Atas Pekerjaan Rehab saluran irigasi persawahan kalengko desa uluanso kec lembo (PAD)	74,893,000.00
179	05/12/2024	72.12/11.0/000025/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran 50% (100%) Atas Pekerjaan Pembuatan pintu air persawahan kalengko desa uluanso kec lembo (PAD)	37,439,000.00
180	09/12/2024	72.12/11.0/000013/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pengadaan Combine Desa Taende Kec. Mori Atas (PAD)	460,000,000.00
181	09/12/2024	72.12/11.0/000015/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Jalan usaha tani sumber berkah tamainusi .(PAD)	99,760,000.00
182	09/12/2024	72.12/11.0/000017/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pengadaan Ternak Sapi Kelompok Kali Pasti Desa Koromatantu .(PAD)	99,850,000.00
183	09/12/2024	72.12/11.0/000018/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pengadaan Ternak Sapi Kelompok Ternak Siloam Desa Mora Kec. Lembo .(PAD)	119,820,000.00

184	09/12/2024	72.12/11.0/000019/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pengadaan alat panen padi (combine harvester) Kel.Korontowu cipta tani desa peleru (PAD)	460,000,000.00
185	09/12/2024	72.12/11.0/000021/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Bantuan Ternak Sapi Kelompok Sahabat Mandiri Desa Beteleme Kec. Lembo .(PAD)	99,700,000.00
186	09/12/2024	72.12/11.0/000020/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Bantuan Pengadaan Sapi pada Kelompok Embung Sejahtera Kelurahan Bahoue, Kolonodale .(PAD)	159,680,000.00
187	09/12/2024	72.12/11.0/000022/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pengadaan Ternak Sapi Kelompok Ternak Bersama Desa Beteleme Kec. Lembo .(PAD)	119,808,000.00
188	09/12/2024	72.12/11.0/000053/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pengadaan Combine Desa Tomata Kec. Mori Atas (PAD)	460,000,000.00
189	09/12/2024	72.12/11.0/000055/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pembuatan Jalan Usaha Tani Poktan Bendungan Jaya Desa Pandauke (PAD)	149,618,000.00
190	10/12/2024	72.12/11.0/000048/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pengadaan Sapi Desa Koromatantu Kelompok Tani Ternak Sapi Kec. Petasia (PAD)	99,900,000.00
191	10/12/2024	72.12/11.0/000050/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pengadaan Ternak Sapi Kelompok Ternak Sukses Bersama Desa Lemboroma Kec. Lembo (PAD)	99,750,000.00
192	10/12/2024	72.12/11.0/000049/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Bantuan Ternak Sapi Kelompok Tani Usaha Bersama Desa Taende Kec. Mori Atas (PAD)	113,750,000.00
193	16/12/2024	72.12/11.0/000099/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Bantuan Ternak Sapi Kelompok Tuama Mandiri Desa Mandula Kec. Lembo Raya (PAD)	99,850,000.00
194	17/12/2024	72.12/11.0/000097/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pembentukan Jalan Usaha Tani Paawaru (PAD)	199,520,000.00
195	18/12/2024	72.12/11.0/000043/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pembentukan badan jalan tani kantong produksi desa bau kec. Soyo jaya (PAD)	149,578,000.00
196	18/12/2024	72.12/11.0/000092/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Jalan usaha tani wawopada .(PAD)	99,798,000.00
197	18/12/2024	72.12/11.0/000091/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Jalan usaha tani bau .(PAD)	99,678,000.00
198	18/12/2024	72.12/11.0/000093/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Kantong Produksi Desa Tingkeao, Mora, Uluanso .(PAD)	99,685,000.00
199	18/12/2024	72.12/11.0/000094/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pengadaan Bibit Sawit Kelompok Tani Amertha Widya Desa Dolupo (PAD)	59,818,800.00
200	18/12/2024	72.12/11.0/000095/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pengadaan Motor Kaisar Kelompok Tani Watumesono Desa Peleru (PAD)	49,700,000.00

201	18/12/2024	72.12/11.0/000096/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Penimbunan Jalan Tani Kalengko Onepute Desa Uluanso .(PAD)	99,725,000.00
202	19/12/2024	72.12/11.0/000077/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pengadaan Bibit Durian Montong untuk Kelompok Tani Mamberambe Desa Taende (PAD)	59,531,250.00
203	19/12/2024	72.12/11.0/000079/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Bantuan Bibit Durian Montong Desa Onepute (PAD)	19,812,000.00
204	19/12/2024	72.12/11.0/000078/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pembuatan Jalan Usaha Tani Desa Boba Kecamatan Mamosalato (PAD)	99,686,000.00
205	19/12/2024	72.12/11.0/000081/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pengadaan Bibit Sawit Kelompok Tani Portal Utama Desa Wawondula (PAD)	94,850,000.00
206	19/12/2024	72.12/11.0/000080/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran 50% (100%) Atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Tani Bau Dusun 2 Leboni (DID)	49,858,000.00
207	19/12/2024	72.12/11.0/000083/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Bantuan Bibit Unggul Durian Kelompok Tani Berkat Jaya Desa Moleono (PAD)	89,281,000.00
208	19/12/2024	72.12/11.0/000085/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Bantuan Bibit Durian Musangking Kelompok Tani Takule Star, Kel.Bahontula, Kec.Petasia (PAD)	18,952,500.00
209	19/12/2024	72.12/11.0/000088/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pembangunan JUT wingkela Desa Mondowe Kec. Petasia Barat (PAD)	199,500,000.00
210	19/12/2024	72.12/11.0/000087/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Bantuan Bibit Durian Musangking Kelompok Tani Pongku, Desa Tontowea (PAD)	9,376,500.00
211	20/12/2024	72.12/11.0/000067/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Kelompok Tani Desa Baturube (PAD)	49,838,500.00
212	20/12/2024	72.12/11.0/000070/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pengadaan Bibit Sawit tersebar di Kec. Mamosalato .(PAD)	12,103,800.00
213	20/12/2024	72.12/11.0/000070/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pengadaan Bibit Sawit tersebar di Kec. Mamosalato .(PAD)	57,669,000.00
214	20/12/2024	72.12/11.0/000071/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Kelompok Tani Pammase Desa Kolo Bawah (PAD)	49,864,800.00
215	20/12/2024	72.12/11.0/000073/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Bantuan Bibit Durian Montong Kane Desa Togo (PAD)	48,736,250.00
216	20/12/2024	72.12/11.0/000075/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pengadaan Bibit Sawit Tersebar di Kec. Bungku Utara.(PAD)	46,781,800.00
217	20/12/2024	72.12/11.0/000076/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran 50% (100%) Atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Tani Desa Tiu .(DID)	49,858,000.00

218	23/12/2024	72.12/11.0/000056/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pengadaan Traktor Rotary Quick Kronus Desa Malino Jaya (PAD)	45,494,000.00
219	23/12/2024	72.12/11.0/000058/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pengadaan Hands Traktor Desa Gontara (PAD)	34,820,000.00
220	23/12/2024	72.12/11.0/000057/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pengadaan Hand Traktor Desa Togo Mulya (PAD)	34,820,000.00
221	23/12/2024	72.12/11.0/000060/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pengadaan Handtractor Kelompok Lumpur Pekolo Atas Desa Taliwan (PAD)	34,820,000.00
222	23/12/2024	72.12/11.0/000059/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pengadaan Handtraktor Kelompok Tani Sempoya Makmur Desa Panca Makmur (PAD)	34,820,000.00
223	23/12/2024	72.12/11.0/000061/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran 100% Atas Pembayaran Pengadaan handtractor Kelompok Sri Rahayu Desa Tanasumpu (PAD)	34,820,000.00
224	23/12/2024	72.12/11.0/000062/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Bantuan Handtraktor Desa Mayumba (PAD)	34,820,000.00
225	23/12/2024	72.12/11.0/000063/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Bantuan Hand Traktor Desa Dolupo Karya (PAD)	34,820,000.00
226	23/12/2024	72.12/11.0/000064/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pengadaan Handtractor Kelompok Sumber Makmur Desa Pandauke (PAD)	34,820,000.00
227	23/12/2024	72.12/11.0/000065/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pengadaan Handtractor Kelompok Tani Portal Utama Wawondula Taliwan (PAD)	34,820,000.00
228	23/12/2024	72.12/11.0/000066/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pengadaan Mesin Paras Desa Winangabino (PAD)	9,050,000.00
229	23/12/2024	72.12/11.0/000127/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pembentukan JUT Poktan Gemilang Desa Malino Kec. Soyojaya. (PAD)	99,668,000.00
230	23/12/2024	72.12/11.0/000126/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Peningkatan jalan usaha tani desa lembo baru .(DBH PUSAT)	49,800,000.00
231	23/12/2024	72.12/11.0/000128/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pengadaan Mesin Cansow untuk Kelompok Tani Melempa Meronga Desa Lanumor Kec. Mori Atas.(PAD)	47,500,000.00
232	23/12/2024	72.12/11.0/000130/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pembuatan Saluran Irigasi Sinar Lewua Desa Peleru (PAD)	1,442,174.00
233	23/12/2024	72.12/11.0/000130/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pembuatan Saluran Irigasi Sinar Lewua Desa Peleru (PAD)	72,432,826.00

234	23/12/2024	72.12/11.0/000132/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pengadaan Handtractor Kelompok Wana Sari Desa Tanasumpu (PAD)	34,820,000.00
235	24/12/2024	72.12/11.0/000100/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pengadaan Herbisida Desa Pancamakmur Poktan Durian Sejahtera 2 (PAD)	67,320,000.00
236	24/12/2024	72.12/11.0/000102/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pengadaan bantuan mesin perontok jagung desa lembobelala (PAD)	18,750,000.00
237	24/12/2024	72.12/11.0/000101/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pengadaan Hijauan Pakan Desa Ronta Kecamatan Lemboraya (PAD)	39,944,600.00
238	24/12/2024	72.12/11.0/000103/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pengadaan Hand Sprayer Klp Tani Giat Bersama Desa Beteleme (PAD)	17,964,000.00
239	24/12/2024	72.12/11.0/000104/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pengadaan Hand Sprayer Desa Ulula Dusun Korongkama (PAD)	24,950,000.00
240	24/12/2024	72.12/11.0/000105/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pengadaan Hand Sprayer Electrik (PAD)	48,230,000.00
241	24/12/2024	72.12/11.0/000110/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pengadaan Herbisida Desa Pancamakmur Poktan Durian Sejahtera 1 (PAD)	70,584,000.00
242	24/12/2024	72.12/11.0/000111/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pengadaan Tangki Semprot Kel Satria Tani Desa Peleru (PAD)	44,910,000.00
243	24/12/2024	72.12/11.0/000113/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pengadaan Hands Prayer untuk Kelompok Tani Maju Bersama (PAD)	19,960,000.00
244	24/12/2024	72.12/11.0/000118/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/12/2024	Pembayaran 50% (100%) Atas Pekerjaan Pelaburan jalan usaha tani desa tanasumpu (DID)	44,882,500.00
245	24/12/2024	72.12/11.0/000001/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/01/2025	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Rehabilitasi Saluran Pembungan dan Pembuatan Pintu Air Desa Mora (PAD)	99,697,000.00
246	24/12/2024	72.12/11.0/000003/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/01/2025	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Bantuan Pengadaan Sapi pada Kelompok Bado Sejahtera Desa Bungintimbe Kecamatan Petasia Timur(PAD)	159,760,000.00
247	24/12/2024	72.12/11.0/000005/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/01/2025	Pembayaran TAHAP II Sebesar 30% (100%) Atas Pekerjaan Lanjuatan Pembuatan Hydroponik Pertanian (Pembuatan Green House) (PAD)	59,098,500.00
248	24/12/2024	72.12/11.0/000004/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/01/2025	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pengadaan Ternak Sapi Kelompok Ternak Karya Bersama Desa Dolupo Karya Kec. Lembo Raya (PAD)	99,800,000.00
249	24/12/2024	72.12/11.0/000006/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/01/2025	Pembayaran 50% (100%) Atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Usaha Tani Tongko Desa Pambarea (DAU)	49,822,500.00

250	24/12/2024	72.12/11.0/000007/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/01/2025	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Jalan usaha tani soyo jaya kelompok SCS (PAD)	99,760,000.00
251	24/12/2024	72.12/11.0/000009/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/01/2025	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pengadaan Bibit Padi Kelompok UPJA Karya Usaha Desa Lembah Sumara (PAD)	99,253,800.00
252	27/12/2024	72.12/11.0/000012/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/01/2025	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pengadaan gilingan padi kelompok tani jaya bersama desa taende (PAD)	99,560,000.00
253	27/12/2024	72.12/11.0/000014/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/01/2025	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pengadaan gilingan padi kelompok mekar jaya desa tanasumpu	99,660,000.00
254	27/12/2024	72.12/11.0/000015/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/01/2025	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pembuatan JUT Desa Tanauge .(PAD)	109,719,000.00
255	27/12/2024	72.12/11.0/000017/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/01/2025	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Penimbunan JUT Poktan Uevine Desa Momo (PAD)	199,485,000.00
256	27/12/2024	72.12/11.0/000018/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/01/2025	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pengadaan Handtractor Roda 4 (Jhonder dan Alat Paras) Kelompok Tani Korontuwu Cipta Tani Desa Peleru (PAD)	449,500,000.00
257	27/12/2024	72.12/11.0/000019/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/01/2025	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkaran Benih Jagung Kelompok Tani Mitra Molioa Desa Taende (PAD)	78,490,000.00
258	27/12/2024	72.12/11.0/000020/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/01/2025	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pengadaan Herbisida/Racun Rumput Desa Pa'awaru (PAD)	49,470,000.00
259	27/12/2024	72.12/11.0/000022/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/01/2025	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pembukaan Jalan Usaha tani Poktan Uekavau Maju Desa Momo (PAD)	149,596,000.00
260	27/12/2024	72.12/11.0/000024/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/01/2025	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pengadaan Jonder Desa Tomata (PAD)	402,200,000.00
261	27/12/2024	72.12/11.0/000026/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/01/2025	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pembuatan Jalan Usaha Tani Poktan Gunung Asih Desa Tansumpu .(PAD)	149,606,000.00
262	27/12/2024	72.12/11.0/000025/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/01/2025	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Bantuan Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian Kelompok Tani Intan Panjila Desa Malino Jaya (PAD)	56,932,000.00
263	27/12/2024	72.12/11.0/000028/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/01/2025	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pengadaan Herbisida Desa Pancamakmur Poktan Gunung Montong 1 (PAD)	75,378,000.00
264	27/12/2024	72.12/11.0/000027/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/01/2025	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Bantuan pengadaan perontok jagung kelompok tani harapan baru kasingou desa taende (PAD)	12,950,000.00
265	27/12/2024	72.12/11.0/000031/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/01/2025	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Usaha Tani di Masapi Buta Desa Tontowea (PAD)	99,727,000.00

266	27/12/2024	72.12/11.0/000032/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/01/2025	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pengadaan Herbisida/Racun Rumput Poktan Koronsisio Desa Beteleme (PAD)	49,470,000.00
267	27/12/2024	72.12/11.0/000033/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/01/2025	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pembentukan jalan tani dusun sanjaya desa tirongan atas kecamatan bungku utara (PAD)	149,585,000.00
268	27/12/2024	72.12/11.0/000034/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/01/2025	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pengadaan Herbisida Desa Pancamakmur Poktan Gunung Montong 2 (PAD)	43,248,000.00
269	27/12/2024	72.12/11.0/000036/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/01/2025	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pengadaan Cultivator Desa Tinompo (PAD)	28,466,000.00
270	27/12/2024	72.12/11.0/000035/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/01/2025	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Land Clearing di Bongi Kelompok Tani Matea Ramba Desa Tontowea kec. Petasia Barat (PAD)	149,566,000.00
271	27/12/2024	72.12/11.0/000038/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/01/2025	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Bantuan Alat Pertanian Cultivator Desa Taende (PAD)	71,165,000.00
272	30/12/2024	72.12/11.0/000055/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/01/2025	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pengadaan Bibit Cokelat Sambung Pucuk Kelompok Tani Betana Desa Wawopada (PAD)	19,934,550.00
273	30/12/2024	72.12/11.0/000054/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/01/2025	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pengadaan Bibit Kecambah Sawit Persekutuan Pemuda Klasis Beteleme (PAD)	19,950,000.00
274	30/12/2024	72.12/11.0/000056/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/01/2025	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Kelompok Tunas Harapan Jaya Desa Tamainusi .(PAD)	49,815,450.00
275	30/12/2024	72.12/11.0/000057/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/01/2025	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk Desa Malino Jaya .(PAD)	49,815,450.00
276	30/12/2024	72.12/11.0/000079/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/01/2025	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pengadaan Ternak Sapi Kelompok Ternak Tunas Baru Desa Pontangoa Kec. Lembo Raya.(PAD)	99,840,000.00
277	30/12/2024	72.12/11.0/000080/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/01/2025	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pengadaan Bibit Kakao Sambung Pucuk kelompok Tani Maju Bersama Desa Taende Kec. Mori Atas (PAD)	29,880,900.00
278	30/12/2024	72.12/11.0/000082/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/01/2025	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pembuatan JUT Desa Korolama .(PAD)	69,746,000.00
279	30/12/2024	72.12/11.0/000083/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/01/2025	Pembayaran Sebesar 100% Atas Pekerjaan Lanjutan Bantuan Ternak Ayam Petelur Kelompok Ternak Amor Sejahterah Desa Wara'a Kec. Lembo (PAD)	100,000,000.00
280	30/12/2024	72.12/11.0/000084/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/01/2025	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pembuatan jembatan tani pomakata taliwan .(PAD)	99,737,000.00
281	30/12/2024	72.12/11.0/000086/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/01/2025	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pengadaan Ternak Sapi Kelompok Ternak Jaya Bersama Desa Petumbea Kec. Lembo Raya .(PAD)	99,750,000.00

282	30/12/2024	72.12/11.0/000090/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/01/2025	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pengadaan Ternak Sapi Desa Koromatantu Kec. Petasia .(PAD)	149,850,000.00
283	30/12/2024	72.12/11.0/000093/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/01/2025	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Usaha Tani Koromoito Beteleme .(PAD)	149,667,000.00
284	30/12/2024	72.12/11.0/000095/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/01/2025	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pembuatan Jalan Usaha Tani Poktan Sukarela Desa Tanakuraya (PAD)	199,568,000.00
285	30/12/2024	72.12/11.0/000094/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/01/2025	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pembuatan Jalan Usaha Tani Mansombu Desa Ronta (PAD)	149,627,000.00
286	30/12/2024	72.12/11.0/000096/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/01/2025	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pengadaan Bibit Kakao Kelompok Tani Trans Mandiri Desa Dolupo Karya (PAD)	49,815,450.00
287	30/12/2024	72.12/11.0/000097/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/01/2025	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Land Clearing di Desa Tiu Kec. Petasia Barat .(PAD)	99,696,000.00
288	31/12/2024	72.12/11.0/000042/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/01/2025	Pembayaran Termin Pertama Sebesar 20% Atas Pekerjaan Pembuatan jalan tani dusun II desa ungkea .(PAD)	19,933,200.00
289	31/12/2024	72.12/11.0/000041/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/01/2025	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pembuatan jalan kantong produksi pakanangi desa peleru (PAD)	199,489,000.00
290	31/12/2024	72.12/11.0/000045/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/01/2025	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Land clearing dan pembentukan saluran kelompok tani toddo pulie desa lembah sumara kec. soyo jaya (PAD)	199,620,000.00
291	31/12/2024	72.12/11.0/000046/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/01/2025	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Jalan usaha tani era woteusambuku (PAD)	99,675,000.00
292	31/12/2024	72.12/11.0/000047/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/01/2025	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pengadaan Belanga Nilam Kel, Sinar Katovi Desa Tokala Atas Kec.Bungku Utara (PAD)	74,817,000.00
293	31/12/2024	72.12/11.0/000048/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/01/2025	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pembuatan Jalan Kantong Produksi Mboale Desa Peleru (PAD)	119,659,000.00
294	31/12/2024	72.12/11.0/000049/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/01/2025	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pembuatan Jalan Tani Kelompok Sawit Harapan Desa Pandauke Kec. Mamosalato (PAD)	99,696,000.00
295	31/12/2024	72.12/11.0/000051/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/01/2025	Pembayaran Biaya Pembelian Bibit Jagung .(PAD)	29,970,000.00
296	31/12/2024	72.12/11.0/000053/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/01/2025	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pembangunan Jaln Usaha Tani Sakurio Desa Taende .(PAD)	99,558,000.00
297	31/12/2024	72.12/11.0/000061/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/01/2025	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pengadaaan Bibit Sawit Kelompok Tani Cendana Wangi Desa Momo Kec. Mamosalato (PAD)	39,900,000.00
298	31/12/2024	72.12/11.0/000060/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/01/2025	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pembentukan Jalan Kantong Produksi Perkebunan Desa Tana Sumpu (PAD)	149,546,000.00

299	31/12/2024	72.12/11.0/000063/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/01/2025	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Kelompok Tani Sumber Makmur II Desa Giri Mulya Kec. Mamosalato (PAD)	39,900,000.00
300	31/12/2024	72.12/11.0/000064/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/01/2025	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit Kelompok Tani Sumber Makmur III Desa Giri Mulya Kec. Mamosalato (PAD)	39,900,000.00
301	31/12/2024	72.12/11.0/000065/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/01/2025	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pembentukan Jalan Usaha Tani Desa Baturube ,(PAD)	149,568,000.00
302	31/12/2024	72.12/11.0/000066/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/01/2025	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pembuatan Saluran Tersier Desa Lembah Sumara (PAD)	99,669,000.00
303	31/12/2024	72.12/11.0/000068/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/01/2025	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Jalan Tani Kelompok Tani Sawit Berkarya Desa Tokala Atas Kec. Bungku Utara (PAD)	99,725,000.00
304	31/12/2024	72.12/11.0/000070/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/01/2025	Pembayaran 50% (100%) Atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Usaha Tani Belala Desa Taende (Hutang 2023)	49,870,000.00
305	31/12/2024	72.12/11.0/000071/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/01/2025	Pembayaran 40% (100%) Atas Pekerjaan Pembuatan JUT Kelompok Mukti sari Desa Tanasumpu (Hutang 2023)	39,892,000.00
306	31/12/2024	72.12/11.0/000072/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/01/2025	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pengadaaan Bibit Sawit Kelompok Tani Sawit Berkarya Desa Tokala Atas Kec. Bungku Utara (PAD)	39,900,000.00
307	31/12/2024	72.12/11.0/000074/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/01/2025	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pengadaan Bibit Sawit Kelompok Tani Sumber Makmur I Desa Girimulya Kec. Mamosalato (PAD)	39,900,000.00
308	31/12/2024	72.12/11.0/000073/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/01/2025	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pengadaan Bibit Sawit Kelompok Tani Harapan Desa Pandauke Kec. Mamosalato (PAD)	39,900,000.00
309	31/12/2024	72.12/11.0/000076/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/01/2025	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Usaha Tani Kelompok Petani Makmur Desa Pandauke, Kec. Mamosalato (PAD)	99,677,000.00
310	31/12/2024	72.12/11.0/000077/JUR-BLJ/SP2D-LS/3.27.2.09.0.00.01.0000/01/2025	Pembayaran 100% Atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Usaha tani Poktan Lembah Uday Desa Tanasumpu(PAD)	119,695,000.00
			Jumlah	**23,987,915,756.00**
KECAMATAN PETASIA				
BELANJA PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL / DISERAHKAN - KEPADA MASYARAKAT				
No	**Tanggal/Nomor SP2D**		**URAIAN**	**JUMLAH**
1	04/04/2024	72.12/11.0/018089/JUR-BLJ/SP2D-LS/7.01.0.00.0.00.01.0000/04/2024	Permintaan LS atas Belanja Barang Kelengkapan Alat Rumah tangga Jabatan Polsek Petasia Tahun Anggaran 2024	75,000,000.00
2	26/04/2024	72.12/11.0/034975/JUR-BLJ/SP2D-LS/7.01.0.00.0.00.01.0000/06/2024	Permintaan (LS) atas Pembayaran Pengadaan Sound System Kelurahan Bahontula Tahun Anggaran 2024 (DAU)	50,000,000.00
3	28/10/2024	72.12/11.0/000003/JUR-BLJ/SP2D-LS/7.01.0.00.0.00.01.0000/11/2024	Permintaan (LS) atas Pembayaran Pengadaan Sound System Kelompok Alormel Kelurahan Bahontula Tahun Anggaran 2024 (PAD)	49,861,160.00

4	29/10/2024	72.12/11.0/000002/JUR-BLJ/SP2D-LS/7.01.0.00.0.00.01.0000/11/2024	Permintaan (LS) atas Pembayaran Belanja Barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat berupa Pengadaan Mesin Paras Dorong dan Mesin Paras Gantung Tahun Anggaran 2024.(DBH PROV)	19,750,408.00
5	30/10/2024	72.12/11.0/000024/JUR-BLJ/SP2D-LS/7.01.0.00.0.00.01.0000/11/2024	Permintaan (LS) atas Pembayaran Bantuan Penanganan Stunting Kelurahan Bahontula Tahun Anggaran 2024 (IF KES)	5,000,000.00
6	06/11/2024	72.12/11.0/000005/JUR-BLJ/SP2D-LS/7.01.0.00.0.00.01.0000/12/2024	Permintaan (LS) atas Pembayaran Uang Muka 50% Lanjutan Rehab Rujab Polsek Petasia Tahun Anggaran 2024 (DBH PUSAT)	74,771,500.00
7	03/12/2024	72.12/11.0/000007/JUR-BLJ/SP2D-LS/7.01.0.00.0.00.01.0000/12/2024	Permintaan (LS) atas Belanja Pengadaan Genset Desa Kororolaki Tahun Anggaran 2024.(PAD)	49,824,130.00
8	10/12/2024	72.12/11.0/000016/JUR-BLJ/SP2D-LS/7.01.0.00.0.00.01.0000/12/2024	Permintaan (LS) atas Pembayaran Bantuan Penanganan Stunting Kelurahan Kolonodale dan Kelurahan Bahoue Tahun Anggaran 2024 (DAU SG)	10,000,000.00
9	23/12/2024	72.12/11.0/000021/JUR-BLJ/SP2D-LS/7.01.0.00.0.00.01.0000/12/2024	Permintaan (LS) atas Pembayaran 100% Lanjutan Rehab Rujab Polsek Petasia Tahun Anggaran 2024 (DBH PUSAT)	74,771,500.00
			Jumlah	**408,978,698.00**

KECAMATAN PETASIA

BELANJA PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL / DISERAHKAN - LAINNYA

No	Tanggal/Nomor SP2D		URAIAN	JUMLAH
1	07/05/2024	72.12/11.0/034972/JUR-BLJ/SP2D-LS/7.01.0.00.0.00.01.0000/06/2024	Permintaan (LS) atas Pembangunan Pagar Depan Gedung Negara (Rujab Polsek Petasia) Tahun Anggaran 2024 (PAD)	124,455,000.00
			Jumlah	**124,455,000.00**

BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

BELANJA PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL / DISERAHKAN - KEPADA MASYARAKAT

No	Tanggal/Nomor SP2D		URAIAN	JUMLAH
1	29/05/2024	72.12/11.0/039892/JUR-BLJ/SP2D-LS/4.01.0.00.0.00.01.0004/06/2024	Permintaan Pembayaran Belanja Alat Kaligrafi Kegiatan Pelatihan Dan Lomba Mtq Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat (DAU)	60,000,000.00
2	15/11/2024	72.12/11.0/000004/JUR-BLJ/SP2D-LS/4.01.0.00.0.00.01.0004/12/2024	Permintaan Pembayaran Uang Muka 50% Pekerjaan Pembangunan Tribun STQH Di Kecamatan Mamosalato Tahun 2024 Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat (PAD)	99,920,000.00
3	24/12/2024	72.12/11.0/000002/JUR-BLJ/SP2D-LS/4.01.0.00.0.00.01.0004/01/2025	Permintaan Pembayaran Pembangunan Lampu Tower Lapangan Tanasumpu Keg. STQH Kec. Lembo Tahun 2024, Bagian Kesejahteraan Rakyat (PAD)	184,840,000.00
4	30/12/2024	72.12/11.0/000038/JUR-BLJ/SP2D-LS/4.01.0.00.0.00.01.0004/01/2025	Permintaan Pembayaran 50%(100%) Pekerjaan Pembangunan Tribun STQH Tahun 2024 Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat.(PAD)	99,920,000.00
			Jumlah	**444,680,000.00**

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH				
BELANJA PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL / DISERAHKAN - KEPADA MASYARAKAT				
No	**Tanggal/Nomor SP2D**		**URAIAN**	**JUMLAH**
1	11/06/2024	72.12/11.0/050982/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.11.0.00.0.00.01.0000/07/2024	Pembayaran Pada CV BERKAH MENARA WIRASENA Atas Jasa Belanja Pengadaan Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat, Pada Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kab. Morowali Utara (DBH PROV)	25,500,000.00
2	13/06/2024	72.12/11.0/050979/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.11.0.00.0.00.01.0000/07/2024	Pembayaran Angsuran Uang Muka 50% Pada CV BAIM PRATAMA Atas Jasa Belanja Pengadaan Perahu Sampah Kec. Petasia, Pada Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kab. Morowali Utara TA. 2024.(DBH PUSAT)	49,937,500.00
3	24/10/2024	72.12/11.0/000002/JUR-BLJ/SP2D-LS/2.11.0.00.0.00.01.0000/11/2024	Pembayaran 100% Pada CV BAIM PRATAMA Atas Jasa Belanja Pengadaan Perahu Sampah Kec. Petasia, Pada Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kab. Morowalli Utara TA.2024 (DBH PROV)	49,937,500.00
			Jumlah	**125,375,000.00**
KECAMATAN PETASIA TIMUR				
BELANJA PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL / DISERAHKAN - KEPADA MASYARAKAT				
No	**Tanggal/Nomor SP2D**		**URAIAN**	**JUMLAH**
1	17/05/2024	72.12/11.0/034985/JUR-BLJ/SP2D-LS/7.01.0.00.0.00.03.0000/06/2024	Pembayaran (100%) Belanja Bantuan Pengadaan Kursi dan Tenda Kelompok Muda Berkarya Tompira Tahun 2024 Kec.Petasia Timur (DAU)	153,550,740.00
			Jumlah	**153,550,740.00**
KECAMATAN LEMBO				
BELANJA PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL / DISERAHKAN - KEPADA MASYARAKAT				
No	**Tanggal/Nomor SP2D**		**URAIAN**	**JUMLAH**
1	12/06/2024	72.12/11.0/054570/JUR-BLJ/SP2D-LS/7.01.0.00.0.00.07.0000/07/2024	Belanja Bantuan Kursi Plastik Desa Beteleme Tahun Anggaran 2024 (DBH PUSAT)	74,700,000.00
			Jumlah	**74,700,000.00**
KECAMATAN LEMBO RAYA				
BELANJA PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL / DISERAHKAN - KEPADA MASYARAKAT				
No	**Tanggal/Nomor SP2D**		**URAIAN**	**JUMLAH**
1	13/06/2024	72.12/11.0/054614/JUR-BLJ/SP2D-LS/7.01.0.00.0.00.08.0000/07/2024	Pembayaran Bantuan Tenda Jadi Kelompok Tambunga Jaya Desa Petumbea Tahun 2024.(DBH PUSAT)	99,844,000.00
			Jumlah	**99,844,000.00**
BELANJA PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL / DISERAHKAN - KEPADA MASYARAKAT				
			Jumlah Total	**42,264,943,894.00**
BELANJA PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL / DISERAHKAN - LAINNYA				
			Jumlah Total	**4,676,932,500.00**
			Jumlah Total (I) dan (II)	**46,941,876,394.00**



LAMPIRAN VII :

DAFTAR BELANJA BARANG DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (B O S)

Lampiran VII

NO	NAMA SEKOLAH	BELANJA DANA BOS REGULER			BELANJA BARANG DAN JASA DANA BOS KINERJA	JUMLAH
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	JUMLAH		
KECAMATAN PETASIA TIMUR						
1	SD NEGERI 1 BUNTA	68,000,000.00	103,400,000.00	171,400,000.00	-	171,400,000.00
2	SD NEGERI MOLINO	45,600,000.00	196,637,000.00	242,237,000.00	-	242,237,000.00
3	SD NEGERI BIMOR JAYA	13,300,000.00	41,589,000.00	54,889,000.00	-	54,889,000.00
4	SD NEGERI MOLORES	34,500,000.00	32,968,000.00	67,468,000.00	-	67,468,000.00
5	SD NEGERI 2 BUNTA	66,000,000.00	118,360,000.00	184,360,000.00	-	184,360,000.00
6	SD NEGERI BUNGINTIMBE	56,400,000.00	146,070,000.00	202,470,000.00	-	202,470,000.00
7	SD NEGERI PEBOOA	10,000,000.00	46,567,500.00	56,567,500.00	-	56,567,500.00
8	SD NEGERI TOMPIRA	36,400,000.00	109,110,000.00	145,510,000.00	-	145,510,000.00
9	SD NEGERI TOWARA	18,400,000.00	81,817,400.00	100,217,400.00	-	100,217,400.00
10	SD NEGERI UNGKEA	21,000,000.00	50,227,000.00	71,227,000.00	-	71,227,000.00
11	SD NEGERI KEUNO	18,000,000.00	41,348,000.00	59,348,000.00	-	59,348,000.00
12	SD NEGERI MOHONI	36,000,000.00	49,481,600.00	85,481,600.00	-	85,481,600.00
13	SMP NEGERI 1 PETASIA TIMUR	19,260,000.00	280,899,600.00	300,159,600.00	-	300,159,600.00
14	SMP NEGERI 2 PETASIA TIMUR SATU ATAP	16,700,000.00	99,013,400.00	115,713,400.00	-	115,713,400.00
15	SMP NEGERI 3 PETASIA TIMUR	49,500,000.00	133,829,500.00	183,329,500.00	-	183,329,500.00
16	SMP NEGERI 4 PETASIA TIMUR SATU ATAP	-	31,080,000.00	31,080,000.00	-	31,080,000.00
KECAMATAN LEMBO						
17	SD NEGERI TINOMPO	36,500,000.00	66,340,000.00	102,840,000.00	-	102,840,000.00
18	SD NEGERI TINGKEAO	-	39,060,000.00	39,060,000.00	-	39,060,000.00
19	SD NEGERI KOROBONDE	22,800,000.00	78,586,000.00	101,386,000.00	45,000,000.00	146,386,000.00
20	SD NEGERI 2 KOROWOU	12,000,000.00	32,200,000.00	44,200,000.00	-	44,200,000.00
21	SD NEGERI 1 BETELEME	48,000,000.00	176,040,000.00	224,040,000.00	-	224,040,000.00
22	SD NEGERI LEMBOROMA	9,000,000.00	60,387,500.00	69,387,500.00	-	69,387,500.00
23	SD NEGERI KOROWALELO	6,000,000.00	22,610,000.00	28,610,000.00	-	28,610,000.00
24	SD NEGERI LEMBOBARU	10,800,000.00	10,002,000.00	20,802,000.00	-	20,802,000.00
25	SD NEGERI 2 BETELEME	27,500,000.00	92,140,000.00	119,640,000.00	-	119,640,000.00
26	SD NEGERI KUMPI	3,750,000.00	61,445,000.00	65,195,000.00	-	65,195,000.00
27	SD NEGERI 1 KOROWOU	21,600,000.00	45,471,000.00	67,071,000.00	-	67,071,000.00
28	SD NEGERI UNDORO	9,000,000.00	21,945,000.00	30,945,000.00	-	30,945,000.00
29	SD NEGERI WARA'A	-	32,900,000.00	32,900,000.00	-	32,900,000.00
30	SD NEGERI WAWOPADA	18,000,000.00	51,506,000.00	69,506,000.00	-	69,506,000.00
31	SMP NEGERI 1 LEMBO	102,000,000.00	251,046,400.00	353,046,400.00	-	353,046,400.00
32	SMP NEGERI 2 LEMBO	22,800,000.00	72,438,800.00	95,238,800.00	-	95,238,800.00
33	SMP NEGERI 3 LEMBO	30,000,000.00	108,590,000.00	138,590,000.00	-	138,590,000.00
34	SMP NEGERI 4 LEMBO	21,600,000.00	63,130,000.00	84,730,000.00	35,000,000.00	119,730,000.00

Lampiran VII

NO	NAMA SEKOLAH	BELANJA DANA BOS REGULER			BELANJA BARANG DAN JASA DANA BOS KINERJA	JUMLAH
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	JUMLAH		
KECAMATAN MORI UTARA						
35	SDN LEMBONTONARA	13,500,000.00	96,393,600.00	109,893,600.00	-	109,893,600.00
36	SDN BENCUE	8,400,000.00	18,860,000.00	27,260,000.00	45,000,000.00	72,260,000.00
37	SDN TAMUNJENGI	14,046,251.00	24,822,000.00	38,868,251.00	-	38,868,251.00
38	SDN 2 PELERU	14,400,000.00	29,780,000.00	44,180,000.00	-	44,180,000.00
39	SDN ERA	7,000,000.00	42,590,000.00	49,590,000.00	-	49,590,000.00
40	SDN TIWA'A	12,000,000.00	25,350,000.00	37,350,000.00	-	37,350,000.00
41	SDN MAYUMBA	-	35,463,000.00	35,463,000.00	-	35,463,000.00
42	SDN 1 TALIWAN	27,000,000.00	44,920,000.00	71,920,000.00	-	71,920,000.00
43	SDN 1 PELERU	14,400,000.00	78,420,000.00	92,820,000.00	-	92,820,000.00
44	SDN 2 TALIWAN	19,800,000.00	47,564,000.00	67,364,000.00	-	67,364,000.00
45	SMP NEGERI 1 MORI UTARA	41,200,000.00	77,745,000.00	118,945,000.00	-	118,945,000.00
46	SMP NEGERI 2 MORI UTARA	-	107,930,000.00	107,930,000.00	-	107,930,000.00
47	SMP NEGERI 3 MORI UTARA	2,255,000.00	42,113,000.00	44,368,000.00	-	44,368,000.00
48	SMP NEGERI 4 MORI UTARA	-	93,480,000.00	93,480,000.00	-	93,480,000.00
KECAMATAN MORI ATAS						
49	SDN LANUMOR	20,400,000.00	35,840,000.00	56,240,000.00	-	56,240,000.00
50	SDN MALEI	-	20,960,000.00	20,960,000.00	22,500,000.00	43,460,000.00
51	SDN KOROMONTO	-	36,731,800.00	36,731,800.00	25,000,000.00	61,731,800.00
52	SDN TOMUI KARYA	24,000,000.00	34,095,000.00	58,095,000.00	-	58,095,000.00
53	SDN LEE	20,200,000.00	32,460,000.00	52,660,000.00	-	52,660,000.00
54	SDN 2 KOLAKA	12,000,000.00	38,242,000.00	50,242,000.00	25,000,000.00	75,242,000.00
55	SDN 1 TOMATA	12,000,000.00	54,080,000.00	66,080,000.00	-	66,080,000.00
56	SDN 1 KOLAKA	12,000,000.00	20,237,000.00	32,237,000.00	-	32,237,000.00
57	SDN 2 TOMATA	31,000,000.00	44,200,000.00	75,200,000.00	-	75,200,000.00
58	SDN SAEMBA WALATI	16,800,000.00	33,680,000.00	50,480,000.00	-	50,480,000.00
59	SDN TAENDE	18,000,000.00	52,810,000.00	70,810,000.00	-	70,810,000.00
60	SDN PEONEA	3,000,000.00	52,350,000.00	55,350,000.00	22,500,000.00	77,850,000.00
61	SDN ENSA	10,500,000.00	23,340,000.00	33,840,000.00	-	33,840,000.00
62	SDN SAEMBA	27,750,000.00	34,870,000.00	62,620,000.00	22,500,000.00	85,120,000.00
63	SDN KASINGOLI	-	45,100,000.00	45,100,000.00	-	45,100,000.00
64	SDN LONDI	50,200,000.00	64,980,000.00	115,180,000.00	-	115,180,000.00
65	SMP NEGERI 1 MORI ATAS	-	128,714,120.00	128,714,120.00	35,000,000.00	163,714,120.00
66	SMP NEGERI 2 MORI ATAS	36,600,000.00	91,853,600.00	128,453,600.00	-	128,453,600.00
67	SMP NEGERI 3 MORI ATAS	18,000,000.00	63,365,000.00	81,365,000.00	-	81,365,000.00
68	SMP NEGERI 4 MORI ATAS	-	51,465,000.00	51,465,000.00	-	51,465,000.00
69	SMP NEGERI 5 MORI ATAS	9,600,000.00	27,700,000.00	37,300,000.00	25,000,000.00	62,300,000.00
KECAMATAN LEMBO RAYA						
70	SD NEGERI PONTANGOA	21,600,000.00	81,662,500.00	103,262,500.00	22,500,000.00	125,762,500.00
71	SD NEGERI POONA	25,200,000.00	60,280,000.00	85,480,000.00	-	85,480,000.00
72	SD NEGERI PETUMBEA	15,000,000.00	54,700,000.00	69,700,000.00	22,500,000.00	92,200,000.00

Lampiran VII

NO	NAMA SEKOLAH	BELANJA DANA BOS REGULER			BELANJA BARANG DAN JASA DANA BOS KINERJA	JUMLAH
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	JUMLAH		
73	SD NEGERI PARAWI	-	55,643,100.00	55,643,100.00	-	55,643,100.00
74	SD NEGERI MANDULA	7,200,000.00	48,200,000.00	55,400,000.00	-	55,400,000.00
75	SD NEGERI LEMBOBELALA	6,000,000.00	20,280,000.00	26,280,000.00	22,500,000.00	48,780,000.00
76	SD NEGERI DOLUPO KARYA	33,600,000.00	82,410,000.00	116,010,000.00	-	116,010,000.00
77	SD NEGERI BINTAGOR MUKTI	-	29,775,200.00	29,775,200.00	-	29,775,200.00
78	SD NEGERI JAMOR JAYA	15,000,000.00	75,872,800.00	90,872,800.00	-	90,872,800.00
79	SD SMP SATU ATAP NEGERI LEMBO	4,800,000.00	7,960,000.00	12,760,000.00	35,000,000.00	47,760,000.00
80	SMP NEGERI 1 LEMBO RAYA	40,800,000.00	122,122,700.00	162,922,700.00	-	162,922,700.00
81	SMP NEGERI 2 LEMBO RAYA	42,000,000.00	105,388,000.00	147,388,000.00	-	147,388,000.00
82	SMP NEGERI 4 LEMBO RAYA	17,592,000.00	40,213,500.00	57,805,500.00	-	57,805,500.00
KECAMATAN PETASIA						
83	SD NEGERI 1 KOLONODALE	26,400,000.00	48,960,000.00	75,360,000.00	-	75,360,000.00
84	SD NEGERI 2 KOLONODALE	50,250,000.00	234,160,100.00	284,410,100.00	-	284,410,100.00
85	SD NEGERI 3 KOLONODALE	21,600,000.00	61,282,000.00	82,882,000.00	-	82,882,000.00
86	SD NEGERI 4 KOLONODALE	29,600,000.00	51,400,000.00	81,000,000.00	-	81,000,000.00
87	SD NEGERI 5 KOLONODALE	45,000,000.00	84,044,600.00	129,044,600.00	-	129,044,600.00
88	SD NEGERI GANDA - GANDA	26,700,000.00	124,725,800.00	151,425,800.00	-	151,425,800.00
89	SD INPRES KOYA	31,200,000.00	39,293,000.00	70,493,000.00	-	70,493,000.00
90	SDN GILILANA	12,600,000.00	59,460,000.00	72,060,000.00	-	72,060,000.00
91	SD NEGERI TANAUGE	-	34,077,400.00	34,077,400.00	-	34,077,400.00
92	SD NEGERI KOROLOLAMA	24,000,000.00	36,147,700.00	60,147,700.00	-	60,147,700.00
93	SD NEGERI KOROMATANTU	21,000,000.00	42,530,800.00	63,530,800.00	-	63,530,800.00
94	SD NEGERI LAMBOLO	-	35,000,000.00	35,000,000.00	-	35,000,000.00
95	SMP NEGERI 1 PETASIA	98,600,000.00	283,250,650.00	381,850,650.00	-	381,850,650.00
96	SMP NEGERI 2 PETASIA	18,000,000.00	84,575,970.00	102,575,970.00	-	102,575,970.00
97	SMP NEGERI 3 PETASIA	-	55,100,000.00	55,100,000.00	-	55,100,000.00
KECAMATAN BUNGKU UTARA						
98	SDN 2 BATURUBE	3,000,000.00	53,238,100.00	56,238,100.00	-	56,238,100.00
99	SDN SALUBIRO	-	41,854,000.00	41,854,000.00	-	41,854,000.00
100	SDN UERURU	21,000,000.00	26,250,000.00	47,250,000.00	-	47,250,000.00
101	SDN 3 BATURUBE	21,600,000.00	38,470,000.00	60,070,000.00	-	60,070,000.00
102	SDN LEMO	6,900,000.00	43,873,300.00	50,773,300.00	-	50,773,300.00
103	SDN TINGKULUI	10,800,000.00	64,687,000.00	75,487,000.00	-	75,487,000.00
104	SDN MATUBE	-	49,632,700.00	49,632,700.00	-	49,632,700.00
105	SDN POSANGKE	12,000,000.00	35,840,000.00	47,840,000.00	-	47,840,000.00
106	SDN TOKONANAKA	-	47,650,000.00	47,650,000.00	-	47,650,000.00
107	SDN TIRONGAN ATAS	13,200,000.00	37,303,000.00	50,503,000.00	-	50,503,000.00
108	SDN 1 BATURUBE	-	25,525,000.00	25,525,000.00	-	25,525,000.00
109	SDN SILITI	10,500,000.00	51,945,000.00	62,445,000.00	-	62,445,000.00
110	SDN TOKALA ATAS	27,000,000.00	45,628,000.00	72,628,000.00	-	72,628,000.00
111	SDN POKEANG	9,600,000.00	41,620,000.00	51,220,000.00	-	51,220,000.00

Lampiran VII

NO	NAMA SEKOLAH	BELANJA DANA BOS REGULER			BELANJA BARANG DAN JASA DANA BOS KINERJA	JUMLAH
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	JUMLAH		
112	SDN LEMOWALIA	-	33,945,400.00	33,945,400.00	-	33,945,400.00
113	SDN LOSONG	-	60,280,000.00	60,280,000.00	-	60,280,000.00
114	SDN TAMBAROBONE	28,800,000.00	38,130,000.00	66,930,000.00	22,500,000.00	89,430,000.00
115	SDN KALOMBANG	-	32,947,000.00	32,947,000.00	-	32,947,000.00
116	SDN BOBA	6,000,000.00	40,807,150.00	46,807,150.00	-	46,807,150.00
117	SDN MOKOTO	6,000,000.00	14,570,000.00	20,570,000.00	-	20,570,000.00
118	SDN UEMASI	-	17,565,000.00	17,565,000.00	22,500,000.00	40,065,000.00
119	SDN TIRONGAN BAWAH	12,000,000.00	27,364,000.00	39,364,000.00	-	39,364,000.00
120	SDN KARAWASA	-	-		-	
121	SMP NEGERI 1 BUNGKU UTARA	18,000,000.00	113,215,000.00	131,215,000.00	69,989,719.00	201,204,719.00
122	SMP NEGERI 2 BUNGKU UTARA	30,000,000.00	94,604,000.00	124,604,000.00	-	124,604,000.00
123	SMP NEGERI 3 BUNGKU UTARA	-	59,050,200.00	59,050,200.00	-	59,050,200.00
124	SMP NEGERI 4 BUNGKU UTARA SATU ATAP	9,000,000.00	44,810,000.00	53,810,000.00	-	53,810,000.00
125	SMP NEGERI 5 BUNGKU UTARA	24,000,000.00	36,290,000.00	60,290,000.00	-	60,290,000.00
126	SMP NEGERI 6 BUNGKU UTARA	-	47,226,000.00	47,226,000.00	-	47,226,000.00
127	SMP NEGERI 7 BUNGKU UTARA	12,000,000.00	53,320,000.00	65,320,000.00	-	65,320,000.00
KECAMATAN PETASIA BARAT						
128	SDN MOLEONO	6,000,000.00	29,660,000.00	35,660,000.00	-	35,660,000.00
129	SDN 2 MOLEONO	6,000,000.00	10,643,000.00	16,643,000.00	-	16,643,000.00
130	SDN 1 ULULAA/ KORONGKAMA	8,400,000.00	40,000,000.00	48,400,000.00	-	48,400,000.00
131	SD INPRES TIU	27,000,000.00	23,620,000.00	50,620,000.00	-	50,620,000.00
132	SDN MONDOWE	-	53,800,000.00	53,800,000.00	-	53,800,000.00
133	SDN ULU LAA	6,000,000.00	35,232,000.00	41,232,000.00	22,500,000.00	63,732,000.00
134	SDN TOGO MULYA	9,600,000.00	61,590,000.00	71,190,000.00	-	71,190,000.00
135	SDN TADAKU	-	15,980,000.00	15,980,000.00	22,500,000.00	38,480,000.00
136	SDN ONEPUTE	-	63,580,000.00	63,580,000.00	-	63,580,000.00
137	SDN TONTOWEA	37,200,000.00	31,000,000.00	68,200,000.00	-	68,200,000.00
138	SMP NEGERI 3 PETASIA BARAT	15,000,000.00	84,760,000.00	99,760,000.00	-	99,760,000.00
139	SMP NEGERI 1 PETASIA BARAT	7,200,000.00	39,060,000.00	46,260,000.00	-	46,260,000.00
140	SMP NEGERI 2 PETASIA BARAT	12,000,000.00	56,370,000.00	68,370,000.00	-	68,370,000.00
KECAMATAN SOYO JAYA						
141	SD INPRES LEMBAH SUMARA	16,800,000.00	42,489,000.00	59,289,000.00	-	59,289,000.00
142	SD INPRES SUMARA JAYA	5,800,000.00	24,963,000.00	30,763,000.00	-	30,763,000.00
143	SD INPRES TANDOYONDO	10,800,000.00	46,370,000.00	57,170,000.00	-	57,170,000.00
144	SD NEGERI BAU	-	62,670,000.00	62,670,000.00	22,500,000.00	85,170,000.00
145	SD NEGERI MALINO	-	39,790,000.00	39,790,000.00	-	39,790,000.00
146	SD NEGERI MALINO JAYA	27,600,000.00	58,520,000.00	86,120,000.00	22,500,000.00	108,620,000.00
147	SD NEGERI PANCA MAKMUR	-	159,779,845.00	159,779,845.00	22,500,000.00	182,279,845.00
148	SD NEGERI TAMAINUSI	3,500,000.00	39,700,000.00	43,200,000.00	-	43,200,000.00
149	SD NEGERI TAMBAYOLI	3,300,000.00	17,655,000.00	20,955,000.00	-	20,955,000.00
150	SD NEGERI TOWI	-	54,076,000.00	54,076,000.00	-	54,076,000.00

Lampiran VII

NO	NAMA SEKOLAH	BELANJA DANA BOS REGULER			BELANJA BARANG DAN JASA DANA BOS KINERJA	JUMLAH
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	JUMLAH		
151	SD NEGERI UEBANGKE	36,000,000.00	19,700,000.00	55,700,000.00	-	55,700,000.00
152	SMP NEGERI 1 SOYO JAYA	32,400,000.00	64,437,500.00	96,837,500.00	35,000,000.00	131,837,500.00
153	SMP NEGERI 2 SOYO JAYA	28,800,000.00	59,040,000.00	87,840,000.00	-	87,840,000.00
KECAMATAN MAMOSOLATO						
154	SD NEGERI 1 TANASUMPU	21,600,000.00	103,320,000.00	124,920,000.00	-	124,920,000.00
155	SD NEGERI 1 TANAYAGAYA	-	95,664,000.00	95,664,000.00	-	95,664,000.00
156	SD NEGERI 2 TANASUMPU	14,400,000.00	51,350,000.00	65,750,000.00	45,000,000.00	110,750,000.00
157	SD NEGERI ANDOLIA	16,500,000.00	62,847,400.00	79,347,400.00	-	79,347,400.00
158	SD NEGERI DASAR	-	46,975,000.00	46,975,000.00	-	46,975,000.00
159	SD NEGERI GIRI MULYA	-	30,385,000.00	30,385,000.00	-	30,385,000.00
160	SD NEGERI KAMUNJANG	5,000,000.00	29,500,000.00	34,500,000.00	-	34,500,000.00
161	SD NEGERI KOLO ATAS	10,800,000.00	38,533,880.00	49,333,880.00	-	49,333,880.00
162	SD NEGERI KOLO BAWAH	18,000,000.00	86,224,100.00	104,224,100.00	22,500,000.00	126,724,100.00
163	SD NEGERI MOMO	10,800,000.00	63,765,000.00	74,565,000.00	-	74,565,000.00
164	SD NEGERI PANDAUKE	-	25,910,000.00	25,910,000.00	-	25,910,000.00
165	SD NEGERI PARAMBA	-	49,140,000.00	49,140,000.00	22,500,000.00	71,640,000.00
166	SD NEGERI SEA	-	40,240,000.00	40,240,000.00	-	40,240,000.00
167	SD NEGERI TAMBALE	18,000,000.00	16,900,000.00	34,900,000.00	-	34,900,000.00
168	SD NEGERI UEMALINGKU	3,500,000.00	33,980,000.00	37,480,000.00	22,500,000.00	59,980,000.00
169	SD NEGERI UEPAKATU	2,100,000.00	34,755,000.00	36,855,000.00	22,500,000.00	59,355,000.00
170	SD NEGERI WINANGABINO	-	36,064,000.00	36,064,000.00	-	36,064,000.00
171	SMP NEGERI 1 MAMOSOLATO	13,600,000.00	211,212,053.00	224,812,053.00	-	224,812,053.00
172	SMP NEGERI 2 MAMOSOLATO	21,600,000.00	39,020,000.00	60,620,000.00	-	60,620,000.00
173	SMP NEGERI 3 MAMOSOLATO	-	47,885,000.00	47,885,000.00	-	47,885,000.00
174	SMP NEGERI 4 MAMOSOLATO	-	31,320,000.00	31,320,000.00	61,136,000.00	92,456,000.00
175	SMP NEGERI 5 MAMOSOLATO	-	51,719,000.00	51,719,000.00	30,512,000.00	82,231,000.00
JUMLAH		**2,776,903,251.00**	**10,438,090,268.00**	**13,214,993,519.00**	**894,137,719.00**	**14,109,131,238.00**



LAMPIRAN VIII :

DAFTAR BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA

RINCIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

ADD **Lampiran VIII**

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	ANGGARAN	REALISASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA (ADD)			BPJS	TOTAL		%
				Tahap I	Tahap II	Tahap III		ADD THP (I+II+III)	ADD + BPJS	
1	PETASIA	GANDA-GANDA	799,706,426	319,882,570	319,882,570	154,191,281	5,750,004.00	793,956,421.20	799,706,425.20	100%
2		GILILANA	756,596,600	302,638,640	302,638,640	146,859,381	4,459,939.00	752,136,661.00	756,596,600.00	100%
3		KOROLOLAKI	759,323,146	303,729,258	303,729,258	146,999,241	4,865,388.00	754,457,757.20	759,323,145.20	100%
4		KOROLOLAMA	768,597,183	307,438,873	307,438,873	148,411,741	5,307,696.00	763,289,486.60	768,597,182.60	100%
5		KOROMATANTU	763,297,986	305,319,194	305,319,194	147,351,901	5,307,696.00	757,990,289.20	763,297,985.20	100%
6		KOYA	760,487,553	304,195,021	304,195,021	147,232,123	4,865,388.00	755,622,164.60	760,487,552.60	100%
7		TANAUGE	761,074,427	304,429,771	304,429,771	148,234,113	3,980,772.00	757,093,655.40	761,074,427.40	100%
8	PETASIA BARAT	MARALEE	736,015,586	294,406,234	294,406,234	143,074,909	4,128,208.00	731,887,377.60	736,015,585.60	100%
9		MOLEONO	748,247,091	299,298,836	299,298,836	144,341,722	5,307,696.00	742,939,394.20	748,247,090.20	100%
10		MONDOWE	750,066,224	300,026,490	300,026,490	145,147,857	4,865,388.00	745,200,836.40	750,066,224.40	100%
11		ONEPUTE	750,761,135	300,304,454	300,304,454	144,402,223	5,750,004.00	745,011,131.00	750,761,135.00	100%
12		SAMPALOWO	738,081,927	295,232,771	295,232,771	142,824,715	4,791,670.00	733,290,257.20	738,081,927.20	100%
13		TADAKU JAYA	730,983,732	292,393,493	292,393,493	141,773,666	4,423,080.00	726,560,652.40	730,983,732.40	100%
14		TIU	763,974,644	305,589,858	305,589,858	147,044,925	5,750,004.00	758,224,640.40	763,974,644.40	100%
15		TOGO MULYO	756,944,059	302,777,624	302,777,624	146,449,706	4,939,106.00	752,004,953.80	756,944,059.80	100%
16		TONTOWEA	758,988,483	303,595,393	303,595,393	147,006,027	4,791,670.00	754,196,812.60	758,988,482.60	100%
17		ULU LAA	738,643,527	295,457,411	295,457,411	142,421,009	5,307,696.00	733,335,831.20	738,643,527.20	100%
18	PETASIA TIMUR	BIMOR JAYA	754,987,114	301,994,846	301,994,846	146,132,035	4,865,388.00	750,121,726.80	754,987,114.80	100%
19		BUNGINTIMBE	910,045,451	364,018,180	364,018,180	176,259,086	5,750,004.00	904,295,446.20	910,045,450.20	100%
20		BUNTA	1,121,712,209	448,684,884	448,684,884	219,034,746	5,307,696.00	1,116,404,513.80	1,121,712,209.80	100%
21		KEUNO	735,137,361	294,054,944	294,054,944	142,604,392	4,423,080.00	730,714,280.20	735,137,360.20	100%
22		MOHONI	758,756,476	303,502,590	303,502,590	146,001,291	5,750,004.00	753,006,471.20	758,756,475.20	100%
23		MOLINO	767,987,424	307,194,970	307,194,970	148,289,789	5,307,696.00	762,679,728.80	767,987,424.80	100%
24		MOLORES	755,024,914	302,009,966	302,009,966	146,139,595	4,865,388.00	750,159,526.40	755,024,914.40	100%
25		PEBOA	739,870,140	295,948,056	295,948,056	142,813,768	5,160,260.00	734,709,880.00	739,870,140.00	100%
26		TOMPIRA	853,695,932	341,478,373	341,478,373	164,989,182	5,750,004.00	847,945,928.20	853,695,932.20	100%
27		TOWARA	778,648,760	311,459,504	311,459,504	150,864,364	4,865,388.00	773,783,372.00	778,648,760.00	100%
28		TOWARA PANTAI	726,429,565	290,571,826	290,571,826	140,862,833	4,423,080.00	722,006,485.00	726,429,565.00	100%
29		UNGKEA	758,834,316	303,533,726	303,533,726	146,459,167	5,307,696.00	753,526,619.20	758,834,315.20	100%

ADD **Lampiran VIII**

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	ANGGARAN	REALISASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA (ADD)			BPJS	TOTAL		%
				Tahap I	Tahap II	Tahap III		ADD THP (I+II+III)	ADD + BPJS	
30	LEMBO RAYA	BINTANGOR MUKTI	740,324,988	296,129,995	296,129,955	143,789,354	4,275,644.00	736,049,303.60	740,324,947.60	100%
31		DOLUPO KARYA	780,774,100	312,309,640	312,309,640	151,584,304	4,570,516.00	776,203,584.00	780,774,100.00	100%
32		JAMOR JAYA	754,061,854	301,624,742	301,624,742	145,946,983	4,865,388.00	749,196,466.40	754,061,854.40	100%
33		LEMBOBELALA	728,641,238	291,456,495	291,456,495	141,305,168	4,423,080.00	724,218,157.80	728,641,237.80	100%
34		MANDULA	745,452,148	298,180,859	298,180,859	144,667,350	4,423,080.00	741,029,067.60	745,452,147.60	100%
35		PA'AWARU	738,412,307	295,364,923	295,364,923	143,259,381	4,423,080.00	733,989,227.40	738,412,307.40	100%
36		PETUMBEA	734,928,883	293,971,553	293,971,553	143,889,621	3,096,156.00	731,832,726.60	734,928,882.60	100%
37		PONTANGOA	738,313,352	295,325,341	295,325,341	143,239,590	4,423,080.00	733,890,272.40	738,313,352.40	100%
38		PO'ONA	726,900,903	290,760,361	290,760,361	141,767,999	3,612,182.00	723,288,720.60	726,900,902.60	100%
39		RONTA	736,364,837	294,545,935	294,545,935	143,587,067	3,685,900.00	732,678,937.40	736,364,837.40	100%
40	LEMBO	BETELEME	799,483,766	319,793,506	319,793,506	155,068,224	4,828,529.00	794,655,236.20	799,483,765.20	100%
41		KOROBONDE	743,211,366	297,284,546	297,284,546	143,334,577	5,307,696.00	737,903,669.20	743,211,365.20	100%
42		KOROMPEELI	734,076,173	293,630,469	293,630,469	142,392,155	4,423,080.00	729,653,092.60	734,076,172.60	100%
43		KOROWALELO	744,669,814	297,867,926	297,867,926	144,953,191	3,980,772.00	740,689,042.80	744,669,814.80	100%
44		KOROWOU	811,006,435	324,402,574	324,402,574	157,778,207	4,423,080.00	806,583,355.00	811,006,435.00	100%
45		KUMPI	724,426,604	289,770,642	289,770,642	140,462,241	4,423,080.00	720,003,524.40	724,426,604.40	100%
46		LEMBOBARU	728,005,525	291,202,210	291,202,210	141,178,025	4,423,080.00	723,582,445.00	728,005,525.00	100%
47		LEMBOROMA	739,032,009	295,612,804	295,612,804	143,825,630	3,980,772.00	735,051,237.40	739,032,009.40	100%
48		MORA	721,510,579	288,604,232	288,604,232	139,879,036	4,423,080.00	717,087,499.40	721,510,579.40	100%
49		TINGKEAO	735,025,537	294,010,215	294,010,215	142,582,027	4,423,080.00	730,602,457.40	735,025,537.40	100%
50		TINOMPO	762,962,915	305,185,166	305,185,166	147,727,195	4,865,388.00	758,097,527.00	762,962,915.00	100%
51		ULUANSO	723,829,509	289,531,804	289,531,804	140,342,822	4,423,080.00	719,406,429.80	723,829,509.80	100%
52		WARAA	733,949,438	293,579,775	293,579,775	142,551,103	4,238,785.00	729,710,652.60	733,949,437.60	100%
53		WAWOPADA	738,497,086	295,398,834	295,398,834	143,276,337	4,423,080.00	734,074,005.20	738,497,085.20	100%
54	MORI ATAS	ENSA	738,741,855	295,496,742	295,496,742	142,882,983	4,865,388.00	733,876,467.00	738,741,855.00	100%
55		GONTARA	724,788,425	289,915,370	289,915,370	140,534,605	4,423,080.00	720,365,345.00	724,788,425.00	100%
56		KASINGOLI	739,281,165	295,712,466	295,712,466	143,433,153	4,423,080.00	734,858,085.00	739,281,165.00	100%
57		KOLAKA	732,901,214	293,160,486	293,160,486	142,157,163	4,423,080.00	728,478,134.80	732,901,214.80	100%
58		LANUMOR	744,021,023	297,608,409	297,608,409	144,381,125	4,423,080.00	739,597,942.80	744,021,022.80	100%
59		LEE	727,928,167	291,171,267	291,171,267	141,604,861	3,980,772.00	723,947,395.40	727,928,167.40	100%
60		LONDI	754,459,982	301,783,993	301,783,993	146,911,224	3,980,772.00	750,479,210.20	754,459,982.20	100%
61		PAMBAREA	734,882,984	293,953,194	293,953,194	142,774,671	4,201,926.00	730,681,058.80	734,882,984.80	100%
62		PEONEA	770,105,910	308,042,364	308,042,364	148,271,178	5,750,004.00	764,355,906.00	770,105,910.00	100%
63		SAEMBA	753,109,367	301,243,747	301,243,747	146,383,088	4,238,785.00	748,870,582.40	753,109,367.40	100%
64		SAEMBA WALATI	725,307,401	290,122,960	290,122,960	140,675,259	4,386,221.00	720,921,179.60	725,307,400.60	100%
65		TAENDE	768,758,778	307,503,511	307,503,511	149,328,676	4,423,080.00	764,335,697.60	768,758,777.60	100%
66		TOMATA	740,534,289	296,213,716	296,213,716	144,126,086	3,980,772.00	736,553,517.40	740,534,289.40	100%
67		TOMUI KARYA	730,424,546	292,169,818	292,169,818	141,661,829	4,423,080.00	726,001,465.20	730,424,545.20	100%

ADD

Lampiran VIII

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	ANGGARAN	REALISASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA (ADD)			BPJS	TOTAL		%
				Tahap I	Tahap II	Tahap III		ADD THP (I+II+III)	ADD + BPJS	
68	MORI UTARA	ERA	765,060,102	306,024,041	306,024,041	148,588,940	4,423,080.00	760,637,022.20	765,060,102.20	100%
69		LEMBONTONARA	776,549,239	310,619,696	310,619,696	150,297,024	5,012,824.00	771,536,415.80	776,549,239.80	100%
70		MAYUMBA	741,198,367	296,479,347	296,479,347	144,258,901	3,980,772.00	737,217,595.40	741,198,367.40	100%
71		PELERU	772,034,997	308,813,999	308,813,999	148,656,995	5,750,004.00	766,284,993.40	772,034,997.40	100%
72		TABARANO	729,537,178	291,814,871	291,814,871	141,484,356	4,423,080.00	725,114,097.80	729,537,177.80	100%
73		TAMONJENGI	743,576,176	297,430,470	297,430,470	144,292,155	4,423,080.00	739,153,095.20	743,576,175.20	100%
74		TIWA'A	726,306,401	290,522,560	290,522,560	140,653,905	4,607,375.00	721,699,025.20	726,306,400.20	100%
75		WAWONDULA	759,994,874	303,997,950	303,997,950	148,018,203	3,980,772.00	756,014,102.80	759,994,874.80	100%
76	SOYO JAYA	BAU	755,509,938	302,203,975	302,203,975	146,236,600	4,865,388.00	750,644,549.60	755,509,937.60	100%
77		LEMBAH SUMARA	741,401,033	296,560,413	296,560,413	143,857,127	4,423,080.00	736,977,952.60	741,401,032.60	100%
78		MALINO	734,364,778	293,745,911	293,745,911	142,449,876	4,423,080.00	729,941,697.60	734,364,777.60	100%
79		MALINO JAYA	748,995,176	299,598,070	299,598,070	145,375,955	4,423,080.00	744,572,095.60	748,995,175.60	100%
80		PANCA MAKMUR	764,512,770	305,805,108	305,805,108	146,968,255	5,934,299.00	758,578,471.00	764,512,770.00	100%
81		SUMARA JAYA	729,173,292	291,669,317	291,669,317	140,969,270	4,865,388.00	724,307,904.40	729,173,292.40	100%
82		TAMAINUSI	765,654,085	306,261,634	306,261,634	148,707,737	4,423,080.00	761,231,005.00	765,654,085.00	100%
83		TAMBAYOLI	762,520,352	305,008,141	305,008,141	148,007,272	4,496,798.00	758,023,554.40	762,520,352.40	100%
84		TANDOYONDO	742,492,330	296,996,932	296,996,932	144,075,386	4,423,080.00	738,069,250.00	742,492,330.00	100%
85		TODDOPOLI UEBANGKE	734,276,624	293,710,650	293,710,650	141,547,629	5,307,696.00	728,968,928.40	734,276,624.40	100%
86	BUNGKU UTARA	BATURUBE	754,632,978	301,853,191	301,853,191	145,213,451	5,713,145.00	748,919,832.60	754,632,977.60	100%
87		BOBA	740,451,244	296,180,498	296,180,498	143,667,169	4,423,080.00	736,028,164.80	740,451,244.80	100%
88		KALOMBANG	746,009,623	298,403,849	298,403,849	144,778,845	4,423,080.00	741,586,542.60	746,009,622.60	100%
89		LEMO	742,833,759	297,133,504	297,133,504	142,816,748	5,750,004.00	737,083,755.40	742,833,759.40	100%
90		LEMOWALIA	758,460,967	303,384,387	303,384,387	148,190,588	3,501,605.00	754,959,362.40	758,460,967.40	100%
91		MATUBE	749,697,406	299,878,962	299,878,962	146,401,017	3,538,464.00	746,158,941.20	749,697,405.20	100%
92		OPO	762,185,922	304,874,369	304,874,369	147,571,796	4,865,388.00	757,320,534.40	762,185,922.40	100%
93		POKEANG	750,273,236	300,109,294	300,109,294	144,304,643	5,750,004.00	744,523,231.20	750,273,235.20	100%
94		POSANGKE	784,507,779	313,803,112	313,803,112	152,036,168	4,865,388.00	779,642,391.80	784,507,779.80	100%
95		SALUBIRO	832,758,784	333,103,514	333,103,514	159,990,855	6,560,902.00	826,197,882.80	832,758,784.80	100%
96		SILITI	751,409,956	300,563,982	300,563,982	145,416,603	4,865,388.00	746,544,567.20	751,409,955.20	100%
97		TAMBAROBONE	744,121,015	297,648,406	297,648,406	143,516,507	5,307,696.00	738,813,319.00	744,121,015.00	100%
98		TANAKURAYA	747,233,311	298,893,324	298,893,324	145,023,582	4,423,080.00	742,810,230.20	747,233,310.20	100%
99		TARONGGO	780,715,506	312,286,202	312,286,202	150,393,097	5,750,004.00	774,965,501.20	780,715,505.20	100%
100		TIRONGAN ATAS	762,065,349	304,826,140	304,826,140	147,105,374	5,307,696.00	756,757,653.80	762,065,349.80	100%
101		TIRONGAN BAWAH	740,572,001	296,228,800	296,228,800	143,249,012	4,865,388.00	735,706,612.20	740,572,000.20	100%

ADD **Lampiran VIII**

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	ANGGARAN	REALISASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA (ADD)			BPJS	TOTAL		%
				Tahap I	Tahap II	Tahap III		ADD THP (I+II+III)	ADD + BPJS	
102	BUNGKU UTARA	TOKALA ATAS	776,302,650	310,521,060	310,521,060	150,395,142	4,865,388.00	771,437,262.00	776,302,650.00	100%
103		TOKONANAKA	746,906,931	298,762,772	298,762,772	144,073,690	5,307,696.00	741,599,234.20	746,906,930.20	100%
104		UEMASI	752,388,651	300,955,460	300,955,460	146,054,650	4,423,080.00	747,965,570.20	752,388,650.20	100%
105		UEMPANAPA	750,309,066	300,123,626	300,123,626	144,754,117	5,307,696.00	745,001,369.20	750,309,065.20	100%
106		UERURU	727,125,360	290,850,144	290,850,144	141,001,992	4,423,080.00	722,702,280.00	727,125,360.00	100%
107		UEWAJO	761,242,548	304,497,019	304,497,019	147,383,122	4,865,388.00	756,377,159.60	761,242,547.60	100%
108		WOOMPARIGI	740,004,800	296,001,920	296,001,920	142,693,264	5,307,696.00	734,697,104.00	740,004,800.00	100%
109	MAMOSALATO	GIRIMULYA	734,186,050	293,674,420	293,674,420	142,856,438	3,980,772.00	730,205,278.00	734,186,050.00	100%
110		KOLO ATAS	758,630,630	303,452,252	303,452,252	146,565,866	5,160,260.00	753,470,370.00	758,630,630.00	100%
111		KOLO BAWAH	769,914,108	307,965,643	307,965,643	149,744,037	4,238,785.00	765,675,322.60	769,914,107.60	100%
112		LIJO	746,093,449	298,437,380	298,437,380	144,795,610	4,423,080.00	741,670,369.80	746,093,449.80	100%
113		MENYO'E	792,930,179	317,172,072	317,172,072	153,315,199	5,270,837.00	787,659,342.80	792,930,179.80	100%
114		MOMO	752,157,240	300,862,896	300,862,896	145,123,752	5,307,696.00	746,849,544.00	752,157,240.00	100%
115		PANDAUKE	781,643,830	312,657,532	312,657,532	151,758,250	4,570,516.00	777,073,314.00	781,643,830.00	100%
116		PARANGISI	751,216,789	300,486,715	300,486,715	145,820,278	4,423,080.00	746,793,707.80	751,216,787.80	100%
117		SEA	779,222,498	311,688,999	311,688,999	151,421,420	4,423,080.00	774,799,417.60	779,222,497.60	100%
118		TAMBALE	738,841,410	295,536,564	295,536,564	143,160,907	4,607,375.00	734,234,035.00	738,841,410.00	100%
119		TANANAGAYA	747,216,704	298,886,682	298,886,682	144,577,953	4,865,388.00	742,351,316.80	747,216,704.80	100%
120		TANASUMPU	769,883,413	307,953,365	307,953,365	148,226,679	5,750,004.00	764,133,408.60	769,883,412.60	100%
121		UEPAKATU	755,021,887	302,008,755	302,008,755	147,207,900	3,796,477.00	751,225,410.40	755,021,887.40	100%
122		WINANGOBINO	783,236,296	313,294,518	313,294,518	152,224,179	4,423,080.00	778,813,215.20	783,236,295.20	100%
		Jumlah	**92,307,586,900.00**	**36,923,034,759.00**	**36,923,034,715.80**	**17,885,005,761.00**	**576,511,619.00**	**91,731,075,235.80**	**92,307,586,854.80**	**99%**



LAMPIRAN IX :

D A F T A R R E K O N B A N K

REKONSILIASI BANK DAN BKU TAHUN 2024

Lampiran IX

BANK			BUKU KAS UMUM (BKU)		
SALDO Tanggal	- BPD CAPEM MOROWALI **(4010103206826)**	46,704,312,910.60	SALDO Tanggal	- Penerimaan	1,456,831,347,882.05
31 Desember 2024	- BRI UNIT WITAMORI (GIRO) ***363401000096302***	129,403,064.80	31 Desember 2024	- Pengeluaran	1,399,438,026,474.06
	- BNI (***7775552029***)	8,491,705,288.00		***Jumlah***	***57,393,321,407.99***
	- BNI (IMTA) ***7770770108***	9,607,618,308.00			
	-BPD CSR	317,334,883.00			
	Jumlah	***65,250,374,454.40***			
Tambah :			**Tambah :**		
Kelebihan Transfer Pembayaran PFK		299,686,254.00			
09654/SP2D/3-25.0-00.0-00.1.0.0/XII/2022		1,571,000.00			
03081/SP2D/5-02.0-00.0-00.1.1.0/VII/2023		20,000.00			
72.12/04.0/000145/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/8/2024, 02/07/2024		2,062,286,085.00			
72.12/04.0/000134/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/7/2024, 11/06/2024		6,139,950,282.00			
72.12/04.0/000146/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/8/2024, 26/06/2024		46,841,649.00			
72.12/04.0/000136/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/7/2024, 26/06/2024		15,165,300.00			
72.12/04.0/000135/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/7/2024, 11/06/2024		1,971,090,000.00			
Koreksi Atas Kelebihan Settlement QRIS Statis Pajak BPHTB2, 20/09/2024		4,552,085.00			
Koreksi Atas Kelebihan Settlement QRIS Statis Pajak Reklame, 20/09/2024		391,500.00			
	Jumlah	***10,541,554,155.00***		***Jumlah***	
Kurang :			**Kurang :**		
Kurang Bayar Perjadin, 7198/SP2D-LS/LEMBO/BPKD/2018		80,000.00			
Pajak Administrasi Bank BRI Unit Tomata Poso Bulan Desember 2018		24,249.00			
			Kor3 - Koreksi rekonsiliasi kasda atas kelebihan catat pendapatan pajak reklame sebesar Rp4.552.085,00 dan pajak BPHTB sebesar Rp391.500,00		
Jurnal Koreksi Uang Pengembalian Kerugian Daerah di RK BNI Yang di Blokir AI		8,163,169,616.00			4,943,585.00
Kurang Bayar GU		0.41			
72.12/04.0/000027/LS/3.26.2.19.0.00.01.0000/M/5/2024, 21/05/2024		20.00			
72.12/04.0/000145/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/8/2024, 03/07/2024		2,062,286,085.00			
72.12/04.0/000134/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/7/2024, 03/07/2024		6,139,950,282.00			
72.12/04.0/000146/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/8/2024, 03/07/2024		46,841,649.00			
72.12/04.0/000136/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/7/2024, 03/07/2024		15,165,300.00			
72.12/04.0/000135/LS/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/7/2024, 03/07/2024		1,971,090,000.00			
Kor3 - Koreksi rekonsiliasi kasda atas kelebihan catat pendapatan pajak reklame sebesar Rp4.552.085,00 dan pajak BPHTB sebesar Rp391.500,00		4,943,585.00			
	Jumlah	***18,403,550,786.41***		***Jumlah***	***4,943,585.00***
	Sisa :	***57,388,377,822.99***		**Sisa :**	***57,388,377,822.99***
	Selisih :	***(0.00)***			



LAMPIRAN X :

DAFTAR KAS BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (B O S)

RINCIAN KAS DI BENDAHARA BOS
TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran X

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO AKHIR DANA BOS REGULER	SALDO AKHIR DANA BOS AFIRMASI	SALDO AKHIR DANA BOS KINERJA	SALDO AKHIR DANA BOS DAERAH	JUMLAH SALDO KAS DI BENDAHARA BOS
	KECAMATAN PETASIA TIMUR (I)					
1	SD NEGERI 1 BUNTA	282,200.00	-	-	-	282,200.00
2	SD NEGERI MOLINO	207,909.00	-	-	-	207,909.00
3	SD NEGERI BIMOR JAYA	3,599,502.00	-	-	-	3,599,502.00
4	SD NEGERI MOLORES	9,000.00	-	-	-	9,000.00
5	SD NEGERI 2 BUNTA	18,386.00	-	-	-	18,386.00
6	SD NEGERI BUNGINTIMBE	79,800.02	-	-	-	79,800.02
7	SD NEGERI PEBOOA	8,459.00	-	-	-	8,459.00
8	SD NEGERI TOMPIRA	-	-	-	-	-
9	SD NEGERI TOWARA	5,250.00	-	-	-	5,250.00
10	SD NEGERI UNGKEA	27,530.00	-	-	-	27,530.00
11	SD NEGERI KEUNO	10,000.00	-	-	-	10,000.00
12	SD NEGERI MOHONI	9,889,384.00	-	-	-	9,889,384.00
13	SMP NEGERI 1 PETASIA TIMUR	10,578.00	-	-	-	10,578.00
14	SMP NEGERI 2 PETASIA TIMUR SATU AT	92,000.00	-	-	-	92,000.00
15	SMP NEGERI 3 PETASIA TIMUR	-	-	-	-	-
16	SMP NEGERI 4 PETASIA TIMUR SATU AT	-	-	-	-	-
	KECAMATAN LEMBO (I)					
17	SD NEGERI TINOMPO	50,000.00	-	-	-	50,000.00
18	SD NEGERI TINGKEAO	10,000.00	-	-	-	10,000.00
19	SD NEGERI KOROBONDE	350,787.00	-	-	-	350,787.00
20	SD NEGERI 2 KOROWOU	29,240,788.00	-	-	-	29,240,788.00
21	SD NEGERI 1 BETELEME	15,098,021.00	178,000.00	-	-	15,276,021.00
22	SD NEGERI LEMBOROMA	4,060,000.00	42,000.00	-	-	4,102,000.00
23	SD NEGERI KOROWALELO	442.00	-	-	-	442.00
24	SD NEGERI LEMBOBARU	48,000.00	-	-	-	48,000.00
25	SD NEGERI 2 BETELEME	1,612,220.00	-	-	-	1,612,220.00
26	SD NEGERI KUMPI	100,000.00	-	-	-	100,000.00
27	SD NEGERI 1 KOROWOU	3,196,429.00	-	-	-	3,196,429.00
28	SD NEGERI UNDORO	9,375,000.00	-	-	-	9,375,000.00
29	SD NEGERI WARA'A	1,931,318.00	-	-	-	1,931,318.00
30	SD NEGERI WAWOPADA	120,000.00	-	-	-	120,000.00
31	SMP NEGERI 1 LEMBO	3,121,217.57	30,000.00	-	-	3,151,217.57
32	SMP NEGERI 2 LEMBO	71.00	-	-	-	71.00
33	SMP NEGERI 3 LEMBO	(1,795,000.00)	-	-	-	- 1,795,000.00
34	SMP NEGERI 4 LEMBO	7,500,000.00	-	-	-	7,500,000.00
	KECAMATAN MORI UTARA (D)					
35	SDN LEMBONTONARA	1,227,000.00	-	-	-	1,227,000.00
36	SDN BENCUE	5,000.00	-	-	-	5,000.00
37	SDN TAMUNJENGI	-	-	-	-	-
38	SDN 2 PELERU	-	-	-	-	-
39	SDN ERA	762,000.00	-	-	-	762,000.00
40	SDN TIWA'A	2,173,457.90	-	-	-	2,173,457.90
41	SDN MAYUMBA	-	-	-	-	-
42	SDN 1 TALIWAN	776,082.00	-	-	-	776,082.00
43	SDN 1 PELERU	6,000.00	-	-	-	6,000.00
44	SDN 2 TALIWAN	500.00	-	-	-	500.00
45	SMP NEGERI 1 MORI UTARA	11,207,287.00	-	-	-	11,207,287.00
46	SMP NEGERI 2 MORI UTARA	63,100.00	-	-	-	63,100.00
47	SMP NEGERI 3 MORI UTARA	98,000.00	-	-	-	98,000.00
48	SMP NEGERI 4 MORI UTARA	7,672,555.00	-	-	-	7,672,555.00
	KECAMATAN MORI ATAS (D)					
49	SDN LANUMOR	890,102.00	-	-	-	890,102.00
50	SDN MALEI	56,000.00	-	-	-	56,000.00
51	SDN KOROMONTO	1,520,000.00	-	-	-	1,520,000.00
52	SDN TOMUI KARYA	1,390,000.00	-	-	-	1,390,000.00
53	SDN LEE	95,506.00	1,249,900.00	-	-	1,345,406.00
54	SDN 2 KOLAKA	976,000.00	-	-	-	976,000.00
55	SDN 1 TOMATA	1,056,000.00	-	-	-	1,056,000.00
56	SDN 1 KOLAKA	-	-	-	-	-
57	SDN 2 TOMATA	269,661.00	-	-	-	269,661.00
58	SDN SAEMBA WALATI	1,600,000.00	-	-	-	1,600,000.00
59	SDN TAENDE	185,000.00	-	-	-	185,000.00

Lampiran X

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO AKHIR DANA BOS REGULER	SALDO AKHIR DANA BOS AFIRMASI	SALDO AKHIR DANA BOS KINERJA	SALDO AKHIR DANA BOS DAERAH	JUMLAH SALDO KAS DI BENDAHARA BOS
60	SDN PEONEA	(18,544.00)	-	-	-	- 18,544.00
61	SDN ENSA	196,200.00	-	-	-	196,200.00
62	SDN SAEMBA	49,450.00	-	-	-	49,450.00
63	SDN KASINGOLI	258,343.00	9,500.00	-	-	267,843.00
64	SDN LONDI	5,575,400.00	-	-	-	5,575,400.00
65	SMP NEGERI 1 MORI ATAS	20,000.00	-	-	-	20,000.00
66	SMP NEGERI 2 MORI ATAS	18,694,000.00	-	-	-	18,694,000.00
67	SMP NEGERI 3 MORI ATAS	6,500,000.00	-	-	-	6,500,000.00
68	SMP NEGERI 4 MORI ATAS	324,900.00	-	-	-	324,900.00
69	SMP NEGERI 5 MORI ATAS	600,000.00	-	-	-	600,000.00
	KECAMATAN LEMBO RAYA (F)					
70	SD NEGERI PONTANGOA	100.00	-	-	-	100.00
71	SD NEGERI POONA	2,206,000.00	935,500.00	-	-	3,141,500.00
72	SD NEGERI PETUMBEA	1,582,624.00	-	-	-	1,582,624.00
73	SD NEGERI PARAWI	-	-	-	-	-
74	SD NEGERI MANDULA	1,032,308.00	30,000.00	-	-	1,062,308.00
75	SD NEGERI LEMBOBELALA	40,000.00	-	-	-	40,000.00
76	SD NEGERI DOLUPO KARYA	40,000.00	-	-	-	40,000.00
77	SD NEGERI BINTAGOR MUKTI	20,000.00	-	-	-	20,000.00
78	SD NEGERI JAMOR JAYA	54,878.00	-	-	-	54,878.00
79	SD SMP SATU ATAP NEGERI LEMBO	-	-	-	-	-
80	SMP NEGERI 1 LEMBO RAYA	51,947.00	-	-	-	51,947.00
81	SMP NEGERI 2 LEMBO RAYA	49,000.00	-	-	-	49,000.00
82	SMP NEGERI 4 LEMBO RAYA	1,800,000.00	700,000.00	35,000,000.00	-	37,500,000.00
	KECAMATAN PETASIA (F)					
83	SD NEGERI 1 KOLONODALE	164,700.00	-	-	-	164,700.00
84	SD NEGERI 2 KOLONODALE	100,000.00	-	-	-	100,000.00
85	SD NEGERI 3 KOLONODALE	33,463.00	-	-	-	33,463.00
86	SD NEGERI 4 KOLONODALE	10,925,000.00	-	-	-	10,925,000.00
87	SD NEGERI 5 KOLONODALE	77,952.00	-	-	-	77,952.00
88	SD NEGERI GANDA - GANDA	7,124,000.00	-	-	-	7,124,000.00
89	SD INPRES KOYA	-	-	-	-	-
90	SDN GILILANA	7,404,346.00	-	-	-	7,404,346.00
91	SD NEGERI TANAUGE	9,250.00	-	-	-	9,250.00
92	SD NEGERI KOROLOLAMA	447,000.00	-	-	-	447,000.00
93	SD NEGERI KOROMATANTU	-	-	-	-	-
94	SD NEGERI LAMBOLO	10,000.00	-	-	-	10,000.00
95	SMP NEGERI 1 PETASIA	14,481,700.00	-	-	-	14,481,700.00
96	SMP NEGERI 2 PETASIA	12,264,650.00	-	-	-	12,264,650.00
97	SMP NEGERI 3 PETASIA	-	-	-	-	-
	KECAMATAN BUNGKU UTARA (M)					
98	SDN 2 BATURUBE	856,900.00	-	-	-	856,900.00
99	SDN SALUBIRO	-	-	-	-	-
100	SDN UERURU	982,000.00	-	-	-	982,000.00
101	SDN 3 BATURUBE	28,000.00	-	-	-	28,000.00
102	SDN LEMO	4,667,229.00	-	-	-	4,667,229.00
103	SDN TINGKULUI	7,201,490.00	-	-	-	7,201,490.00
104	SDN MATUBE	25,618.00	-	-	-	25,618.00
105	SDN POSANGKE	10,000.00	-	-	-	10,000.00
106	SDN TOKONANAKA	80,000.00	-	-	-	80,000.00
107	SDN TIRONGAN ATAS	76.00	-	-	-	76.00
108	SDN 1 BATURUBE	320,000.00	-	-	-	320,000.00
109	SDN SILITI	3,105,000.00	-	-	-	3,105,000.00
110	SDN TOKALA ATAS	1,200,000.00	-	-	-	1,200,000.00
111	SDN POKEANG	860,000.00	-	-	-	860,000.00
112	SDN LEMOWALIA	2,653,124.00	-	-	-	2,653,124.00
113	SDN LOSONG	1,454,071.00	-	-	-	1,454,071.00
114	SDN TAMBAROBONE	-	-	-	-	-
115	SDN KALOMBANG	305,000.00	-	-	-	305,000.00
116	SDN BOBA	60,000.00	-	-	-	60,000.00
117	SDN MOKOTO	1,010,219.00	-	-	-	1,010,219.00
118	SDN UEMASI	-	-	-	-	-
119	SDN TIRONGAN BAWAH	2,962,000.00	-	-	-	2,962,000.00
120	SDN KARAWASA	3,248,000.00	-	-	-	3,248,000.00
121	SMP NEGERI 1 BUNGKU UTARA	21,609.00	-	10,281.00	-	31,890.00
122	SMP NEGERI 2 BUNGKU UTARA	121,950.81	-	-	-	121,950.81

Lampiran X

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO AKHIR DANA BOS REGULER	SALDO AKHIR DANA BOS AFIRMASI	SALDO AKHIR DANA BOS KINERJA	SALDO AKHIR DANA BOS DAERAH	JUMLAH SALDO KAS DI BENDAHARA BOS
123	SMP NEGERI 3 BUNGKU UTARA	-	-	-	-	-
124	SMP NEGERI 4 BUNGKU UTARA SATU A	772,449.00	-	-	-	772,449.00
125	SMP NEGERI 5 BUNGKU UTARA	-	-	-	-	-
126	SMP NEGERI 6 BUNGKU UTARA	440,000.00	-	-	-	440,000.00
127	SMP NEGERI 7 BUNGKU UTARA	-	-	-	-	-
	KECAMATAN PETASIA BARAT (M)					
128	SDN MOLEONO	-	-	-	-	-
129	SDN 2 MOLEONO	-	-	-	-	-
130	SDN 1 ULULAA/ KORONGKAMA	-	-	-	-	-
131	SD INPRES TIU	11,200.00	-	-	10,000.00	21,200.00
132	SDN MONDOWE	7,152.00	-	-	-	7,152.00
133	SDN ULU LAA	10,000.00	-	-	-	10,000.00
134	SDN TOGO MULYA	-	-	-	-	-
135	SDN TADAKU	20,934.00	-	-	-	20,934.00
136	SDN ONEPUTE	210,060.00	-	-	-	210,060.00
137	SDN TONTOWEA	10,000.00	-	-	-	10,000.00
138	SMP NEGERI 3 PETASIA BARAT	27,376.00	-	-	-	27,376.00
139	SMP NEGERI 1 PETASIA BARAT	3,740,055.00	-	-	-	3,740,055.00
140	SMP NEGERI 2 PETASIA BARAT	4,035,000.00	-	-	-	4,035,000.00
	KECAMATAN SOYO JAYA (S)					
141	SD INPRES LEMBAH SUMARA	76,796.00	-	-	-	76,796.00
142	SD INPRES SUMARA JAYA	3,288,000.00	-	-	-	3,288,000.00
143	SD INPRES TANDOYONDO	51,084.00	-	-	-	51,084.00
144	SD NEGERI BAU	9,084.00	-	-	-	9,084.00
145	SD NEGERI MALINO	8,897,616.00	325,000.00	-	-	9,222,616.00
146	SD NEGERI MALINO JAYA	10,000.00	-	-	-	10,000.00
147	SD NEGERI PANCA MAKMUR	-	-	-	-	-
148	SD NEGERI TAMAINUSI	26,987.00	-	-	-	26,987.00
149	SD NEGERI TAMBAYOLI	1,823,014.29	-	-	-	1,823,014.29
150	SD NEGERI TOWI	598,500.00	50,000.00	-	-	648,500.00
151	SD NEGERI UEBANGKE	9,183,754.00	-	-	-	9,183,754.00
152	SMP NEGERI 1 SOYO JAYA	13,000.00	-	-	-	13,000.00
153	SMP NEGERI 2 SOYO JAYA	98,000.00	-	-	-	98,000.00
	KECAMATAN MAMOSOLATO (S)					
154	SD NEGERI 1 TANASUMPU	76,000.00	-	-	-	76,000.00
155	SD NEGERI 1 TANAYAGAYA	216,000.00	-	-	-	216,000.00
156	SD NEGERI 2 TANASUMPU	46,000.00	-	-	-	46,000.00
157	SD NEGERI ANDOLIA	594,054.00	-	-	-	594,054.00
158	SD NEGERI DASAR	456,290.00	-	-	-	456,290.00
159	SD NEGERI GIRI MULYA	900,000.00	35,000.00	-	-	935,000.00
160	SD NEGERI KAMUNJANG	1,914,226.00	-	-	-	1,914,226.00
161	SD NEGERI KOLO ATAS	1,200,000.00	-	-	-	1,200,000.00
162	SD NEGERI KOLO BAWAH	310,000.00	-	-	-	310,000.00
163	SD NEGERI MOMO	1,100,000.00	-	-	-	1,100,000.00
164	SD NEGERI PANDAUKE	470,000.00	-	-	-	470,000.00
165	SD NEGERI PARAMBA	-	-	-	-	-
166	SD NEGERI SEA	366,000.00	-	-	-	366,000.00
167	SD NEGERI TAMBALE	172,000.00	-	-	-	172,000.00
168	SD NEGERI UEMALINGKU	390,000.00	-	-	-	390,000.00
169	SD NEGERI UEPAKATU	16,000.00	-	-	-	16,000.00
170	SD NEGERI WINANGABINO	17,361.00	-	-	-	17,361.00
171	SMP NEGERI 1 MAMOSOLATO	-	-	-	-	-
172	SMP NEGERI 2 MAMOSOLATO	-	14,538.00	-	-	14,538.00
173	SMP NEGERI 3 MAMOSOLATO	700,000.00	-	-	-	700,000.00
174	SMP NEGERI 4 MAMOSOLATO	-	-	8,864,000.00	-	8,864,000.00
175	SMP NEGERI 5 MAMOSOLATO	-	-	4,488,000.00	-	4,488,000.00
	JUMLAH	**285,883,488.59**	**3,599,438.00**	**48,362,281.00**	**10,000.00**	**337,855,207.59**



LAMPIRAN XI :

DAFTAR KAS JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

(J K N)

REKAPITULASI KAS JKN / FKTP TAHUN 2024

Lampiran XI

No	FKTP	Saldo JKN		Jasa Giro (Rp)	Total Kas FKTP (Rp)
		Rekening (Rp)	Tunai (Rp)		
1	PKM LEE	6,539,074.00	2,379,421.00	-	8,918,495.00
2	PKM TOMATA	474,326.00	2,663,735.00	105,684.00	3,243,745.00
3	PKM MAYUMBA	838,667.00	1,082,061.00	137,954.00	2,058,682.00
4	PKM BETELEME	193,859.00	-	236,986.00	430,845.00
5	PKM PETUMBEA	2,176,428.00	68,189.00	-	2,244,617.00
6	PKM MOLINO	1,438,919.00	-	335,793.00	1,774,712.00
7	PKM KOLONODALE	6,164,133.00	-	379,471.00	6,543,604.00
8	PKM ANUTOLUWU	66,026.00	-	176,291.00	242,317.00
9	PKM TAMBAYOLI	3,218,804.00	76,475.00	-	3,295,279.00
10	PKM PANCAMAKMUR	178,772.00	-	115,388.00	294,160.00
11	PKM BATURUBE	76.00	-	309,952.00	310,028.00
12	PKM PANDAUKE	-	-	224,856.00	224,856.00
13	PKM LIJO	3,449.00	422,614.00	-	426,063.00
14	PKM WONGKO NDAYA	11,694.00	87,276.00	-	98,970.00
	Total	**21,304,227.00**	**6,779,771.00**	**2,022,375.00**	**30,106,373.00**



LAMPIRAN XII :

D A F T A R P I U T A N G P A J A K

Daftar Piutang Pajak Reklame
Per 31 Desember 2024

Lampiran XII. A

No	Jenis Piutang	Saldo Awal 2024	Koreksi		Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 2024
			Tambah	Kurang			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	PIUTANG PAJAK REKLAME	***97,446,981.00***	***-***	***-***	***-***	***-***	***118,072,981.00***
1	PENAMBAHAN PIUTANG PAJAK REKLAME 2024	-	-	-	22,943,000.00	-	22,943,000.00
2	PENAMBAHAN PIUTANG PAJAK REKLAME 2023	36,641,000.00	-	-	-	2,317,000.00	34,324,000.00
3	PETASIA	7,969,434.00	-	-	-	-	7,969,434.00
4	PETASIA TIMUR	4,213,507.00	-	-	-	-	4,213,507.00
5	PETASIA BARAT	1,183,965.00	-	-	-	-	1,183,965.00
6	MORI ATAS	129,976.00	-	-	-	-	129,976.00
7	MORI UTARA	4,339,030.00	-	-	-	-	4,339,030.00
8	SOYO JAYA	6,882,735.00	-	-	-	-	6,882,735.00
9	MAMOSALATO	897,623.00	-	-	-	-	897,623.00
10	LEMBO	14,762,608.00	-	-	-	-	14,762,608.00
11	LEMBO RAYA	1,096,209.00	-	-	-	-	1,096,209.00
12	BUNGKU UTARA	19,330,894.00	-	-	-	-	19,330,894.00

PERHITUNGAN PPJ TERHUTANG PT. GNI (PLTU)

Masa Pajak

Lampiran XII.B1

Masa Pajak	Jumlah Kwh Pemakaian (kwh)	Harga Satuan per kwh (Rp)	TOTAL NJTL (DPP) (Rp)	TOTAL PAJAK TERHUTANG (Rp)
Jan-22	75,951,000.00	1,191.00	90,457,641,000.00	1,356,864,615.00
Feb-22	149,808,000.00	1,191.00	178,421,328,000.00	2,676,319,920.00
Mar-22	207,510,000.00	1,191.00	247,144,410,000.00	3,707,166,150.00
Apr-22	259,632,000.00	1,191.00	309,221,712,000.00	4,638,325,680.00
May-22	339,893,000.00	1,191.00	404,812,563,000.00	6,072,188,445.00
Jun-22	360,661,000.00	1,191.00	429,547,251,000.00	6,443,208,765.00
Jul-22	384,736,000.00	1,191.00	458,220,576,000.00	6,873,308,640.00
Aug-22	414,561,000.00	1,191.00	493,742,151,000.00	7,406,132,265.00
Sep-22	419,172,000.00	1,191.00	499,233,852,000.00	7,488,507,780.00
Oct-22	447,527,080.00	1,191.00	533,004,752,280.00	7,995,071,284.20
TOTAL	**3,059,451,080.00**		**3,643,806,236,280.00**	**54,657,093,544.20**
Pengurang:				
Pembayaran yang telah dilakukan TA 2023				10,813,563,731.00
Kompensasi Uji Coba				491,393,461.00
Jumlah Pengurang				**11,304,957,192.00**
Sisa Piutang				**43,352,136,352.20**

Lampiran XII.B2

NOMOR	TGL.PENDATAAN	NAMA WAJIB PAJAK	MASA PAJAK	JUMLAH PAJAK (Rp)	STATUS PEMBAYARAN
1	SPTPD/PPJ/27	PT. BUKIT MAKMUR ISTINDO NIKELTAMA	01-04-2023 s/d 30-04-2023	1,511.00	BELUM BAYAR
2	SPTPD/PPJ/28	PT. BUKIT MAKMUR ISTINDO NIKELTAMA	01-05-2023 s/d 31-05-2023	1,463.00	BELUM BAYAR
3	SPTPD/PPJ/29	PT. BUKIT MAKMUR ISTINDO NIKELTAMA	01-06-2023 s/d 30-06-2023	1,421.00	BELUM BAYAR
4	SPTPD/PPJ/30	PT. BUKIT MAKMUR ISTINDO NIKELTAMA	01-07-2023 s/d 31-07-2023	1,630.00	BELUM BAYAR
5	SPTPD/PPJ/31	PT. BUKIT MAKMUR ISTINDO NIKELTAMA	01-07-2023 s/d 31-07-2023	1,723.00	BELUM BAYAR
6	SPTPD/PPJ/32	PT. BUKIT MAKMUR ISTINDO NIKELTAMA	01-07-2023 s/d 31-07-2023	1,994.00	BELUM BAYAR
7	SPTPD/PPJ/33	PT. BUKIT MAKMUR ISTINDO NIKELTAMA	01-07-2023 s/d 31-07-2023	1,981.00	BELUM BAYAR
8	SPTPD/PPJ/5	PT. TIMURJAYA INDOMAKMUR	01-01-2024 s/d 31-07-2024	8,237,230.00	BELUM BAYAR
9	SPTPD/PPJ/68	PT. NADESICO NICKEL INDUSTRY	01-01-2023 s/d 31-12-2023	4,672,197,720.00	BELUM BAYAR
PIUTANG PAJAK PENERANGAN JALAN				**4,680,446,673.00**	
SISA PIUTANG				**43,352,136,352.20**	
JUMLAH PIUTANG PAJAK PENERANGAN JALAN THN 2024				**48,032,583,025.20**	

Daftar Piutang Galian C
Pajak Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan
Per 31 Desember 2024

Lampiran XII. C

No	Jenis Piutang	Saldo Awal 2024	Koreksi		Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 2024
			Tambah	Kurang			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	PIUTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM / GALIAN C	***18,890,009,322.60***	***-***	***-***	***1,300,231,607.00***	***11,709,960,733.00***	***8,480,280,196.60***
1	PT. GEMBA	6,528,660.00	-	-	-	-	6,528,660.00
2	CV. PETASIA INDAH	46,452.00	-	-	-	-	46,452.00
3	CV. SAKINA PUTRI	143,847.00	-	-	-	-	143,847.00
4	PT. BUMINATA AJI PERKASA	115,518,669.00	-	-	-	-	115,518,669.00
5	PT. SEI	17,984,477,920.00	-	-	-	11,709,960,733.00	6,274,517,187.00
6	PIUTANG GALIAN C 2022	484,907,508.60	-	-	-	-	484,907,508.60
7	PIUTANG GAL C 2023	298,386,266.00	-	-	-	-	298,386,266.00
8	PIUTANG GAL C 2024	-	-	-	1,300,231,607.00	-	1,300,231,607.00

DAFTAR PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)
PER 31 DESEMBER 2024

Lampiran XII.D

No	Jenis Piutang	Saldo Awal 2024	Koreksi		Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 2024
			Tambah	Kurang			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN	***15,825,199,257.70***	***-***	***-***	***6,099,150,999.00***	***906,808,585.00***	***21,017,541,671.70***
1	PETASIA	1,631,388,212.00	-	-	909,972,080.00	906,808,585.00	1,634,551,707.00
2	PETASIA TIMUR	8,086,886,356.00	-	-	3,521,439,296.00	-	11,608,325,652.00
3	PETASIA BARAT	833,099,725.00	-	-	297,979,863.00	-	1,131,079,588.00
4	MORI ATAS	1,084,598,666.00	-	-	320,024,368.00	-	1,404,623,034.00
5	MORI UTARA	290,231,194.00	-	-	17,572,851.00	-	307,804,045.00
6	SOYO JAYA	557,476,342.00	-	-	75,052,404.00	-	632,528,746.00
7	MAMOSALATO	428,735,998.00	-	-	18,984,092.00	-	447,720,090.00
8	LEMBO	1,408,906,015.70	-		799,484,829.00	-	2,208,390,844.70
9	LEMBO RAYA	1,098,340,775.00	-	-	120,959,258.00	-	1,219,300,033.00
10	BUNGKU UTARA	405,535,974.00	-	-	17,681,958.00	-	423,217,932.00

PIUTANG BPHTB TAHUN 2024

Lampiran XII.E

NO.	NOMOR DOKUMEN	TANGGAL BAYAR	JENIS TRANSAKSI	NAMA WAJIB PAJAK BPHTB	JUMLAH (RP)
75	2,023	06/02/2023	Pemberian Hak Baru Diluar Pelepasan Hak	NURTIKA	2,000,000.00
104	2,023	14/02/2023	Jual Beli	JUNIARSO/AHMAD, S.SN	25,440,000.00
156	2,023	16/03/2023	Jual Beli	JONI MURSALIM	3,000,000.00
403	2,023	11/08/2023	Pemberian Hak Baru Diluar Pelepasan Hak	MUJIO	2,000,000.00
492	2,023	27/09/2023	Jual Beli	ARIFIN HUNGGIALO	168,000.00
513	2,023	09/10/2023	Pemberian Hak Baru Sebagai Kelanjutan Pelepasan Hak	AMBO ANGKA	1,712,500.00
526	2,023	13/10/2023	Pemberian Hak Baru Diluar Pelepasan Hak	GERZOM TANDI	1,918,250.00
591	2023.00702	14/11/2023	Pemberian Hak Baru Diluar Pelepasan Hak	MUHAMMAD RUSYDI	69,500.00
656	2,023	06/12/2023	Pemberian Hak Baru Diluar Pelepasan Hak	MISRAYM LOKE	545,500.00
				JUMLAH TOTAL	**36,853,750.00**

LAMPIRAN XIII :

D A F T A R P I U T A N G R E T R I B U S I

PIUTANG RETRIBUSI PASAR
PER 31 DESEMBER 2024

Lampiran XIII

No Surat	Tanggal Surat	Peringatan Ke-	Nama	Tipe/Nomor	Alamat	Tahun	Bulan	Jumlah	Keterangan		
510 / 101/ Diskumperindag / VI/ 2023	6/30/2023	1	Mutiara Raisa	Gedung C / C16	Pasar Kolonodale	20.22	Oktober	-	Sudah Bayar		Masih Menjual
						2022	November	-	Sudah Bayar		
						2022	Desember	150,000	Tunggakan		
						2023	Januari	150,000	Tunggakan		
						2023	Februari	300,000	Tunggakan		
						2023	Maret	300,000	Tunggakan		
						2023	April	300,000	Tunggakan		
						2023	Mei	300,000	Tunggakan		
						2023	Juni	300,000	Tunggakan		
						2023	Juli	300,000	Tunggakan		
						2023	Agustus	300,000	Tunggakan		
510 / 084/ Diskumperindag / VI/ 2023	6/19/2023	2	Purwati Usman	Gedung B / B.66	Pasar kolonodale	2023	Februari	250,000	Tunggakan		Tutup Kios Dari Bulan Februari
						2023	Maret	250,000	Tunggakan		Belum Kembalikan Surat Pinjam Pakai Kios
						2023	April	250,000	Tunggakan		
						2023	Mei	250,000	Tunggakan		
						2023	Juni	250,000	Tunggakan		
						2023	Juli	250,000	Tunggakan		
						2023	Agustus	250,000	Tunggakan		
510 / 099/ Diskumperindag / VI/ 2023	6/19/2023	3	Ir. Agustina Mustari	Gedung B / B.69	Pasar kolonodale	2022	Oktober	-	Sudah Bayar		Tutup Kios Dari Bulan Februari dan
						2022	November	-	Sudah Bayar		Belum Kembalikan Surat Pinjam Pakai Kios
						2022	Desember	-	Sudah Bayar		
						2023	Januari	-	Sudah Bayar		
						2023	Februari	250,000	Tunggakan		
						2023	Maret	250,000	Tunggakan		
						2023	April	250,000	Tunggakan		
						2023	Mei	250,000	Tunggakan		
						2023	Juni	250,000	Tunggakan		
						2023	Juli	250,000	Tunggakan		
						2023	Agustus	250,000	Tunggakan		
510 / 091/ Diskumperindag / VI/ 2023	6/19/2023	4	Faisal Arfa	Gedung B / B.30	Pasar kolonodale	2023	Januari	-	Sudah Bayar		Masih Menjual
						2023	Februari	-	Sudah Bayar		
						2023	Maret	-	Sudah Bayar		
						2023	April	250,000	Tunggakan		
						2023	Mei	250,000	Tunggakan		
						2023	Juni	250,000	Tunggakan		

Lampiran XIII

No Surat	Tanggal Surat	Peringatan Ke-	Nama	Tipe/Nomor	Alamat	Tahun	Bulan	Jumlah	Keterangan		
						2023	Juli	250,000	Tunggakan		
						2023	Agustus	250,000	Tunggakan		
510 / 082/ Diskumperindag / VI/ 2023	6/19/2023	5	Hj. Sarimba	Gedung C / C.3	Pasar kolonodale	2023	Februari	300,000	Tunggakan	Mau Bayar Senin 29/04/24	Masih Menjual
						2023	Maret	300,000	Tunggakan	Mau Bayar Senin 29/04/24	Menyicil
						2023	April	300,000	Tunggakan	Mau Bayar Senin 29/04/24	
						2023	Mei	300,000	Tunggakan	Mau Bayar Senin 29/04/24	
						2023	Juni	300,000	Tunggakan	Mau Bayar Senin 29/04/24	
						2023	Juli	300,000	Tunggakan	Mau Bayar Senin 29/04/24	
						2023	Agustus	300,000	Tunggakan	Mau Bayar Senin 29/04/24	
510 / 081/ Diskumperindag / VI/ 2023	6/19/2023	6	H. Syamsudin	Gedung C / C.9	Pasar kolonodale	2023	Februari	300,000	Tunggakan		Masih Menjual
						2023	Maret	300,000	Tunggakan		
						2023	April	300,000	Tunggakan		
						2023	Mei	300,000	Tunggakan		
						2023	Juni	300,000	Tunggakan		
						2023	Juli	300,000	Tunggakan		
						2023	Agustus	300,000	Tunggakan		
510 / 075/ Diskumperindag / VI/ 2023	6/19/2023	7	Ukkas H. Dg. Matteru	Gedung C / C.20	Pasar kolonodale	2023	Februari	-	Sudah Bayar		Masih Menjual
						2023	Maret	-	Sudah Bayar		Menyicil
						2023	April	-	Sudah Bayar		
						2023	Mei	-	Sudah Bayar		
						2023	Juni	300,000	Tunggakan		
						2023	Juli	300,000	Tunggakan		
						2023	Agustus	300,000	Tunggakan		
510 / 087/ Diskumperindag / VI/ 2023	6/19/2023	8	Ulfa Al Hadad	Gedung C / C.29	Pasar kolonodale	2023	Februari	250,000	Tunggakan		Masih Menjual
						2023	Maret	250,000	Tunggakan		
						2023	April	250,000	Tunggakan		
						2023	Mei	250,000	Tunggakan		
						2023	Juni	250,000	Tunggakan		
						2023	Juli	250,000	Tunggakan		
						2023	Agustus	250,000	Tunggakan		

Lampiran XIII

No Surat	Tanggal Surat	Peringatan Ke-	Nama	Tipe/Nomor	Alamat	Tahun	Bulan	Jumlah	Keterangan		
510 / 097/ Diskumperindag / VI/ 2023	6/19/2023	9	H. Sangkala	Gedung C / C.27	Pasar kolonodale	2022	November	-	Sudah Bayar		Masih Menjual
						2022	Desember	-	Sudah Bayar		
						2023	Januari	-	Sudah Bayar		
						2023	Februari	300,000	Tunggakan		
						2023	Maret	300,000	Tunggakan		
						2023	April	300,000	Tunggakan		
						2023	Mei	300,000	Tunggakan		
						2023	Juni	300,000	Tunggakan		
						2023	Juli	300,000	Tunggakan		
						2023	Agustus	300,000	Tunggakan		
510 / 096/ Diskumperindag / VI/ 2023	6/19/2023	10	Salmia	Gedung C / C.26	Pasar kolonodale	2022	November	150,000	Tunggakan		Masih Menjual
						2022	Desember	150,000	Tunggakan		
						2023	Januari	150,000	Tunggakan		
						2023	Februari	300,000	Tunggakan		
						2023	Maret	300,000	Tunggakan		
						2023	April	300,000	Tunggakan		
						2023	Mei	300,000	Tunggakan		
						2023	Juni	300,000	Tunggakan		
						2023	Juli	300,000	Tunggakan		
						2023	Agustus	300,000	Tunggakan		
510 / 093/ Diskumperindag / VI/ 2023	6/19/2023	11	Moh. Takbir Rotul Ihram	Gedung C / C.43	Pasar kolonodale	2022	Desember	150,000	Tunggakan		Masih Menjual
						2023	Januari	150,000	Tunggakan		
						2023	Februari	300,000	Tunggakan		
						2023	Maret	300,000	Tunggakan		
						2023	April	300,000	Tunggakan		
						2023	Mei	300,000	Tunggakan		
						2023	Juni	300,000	Tunggakan		
						2023	Juli	300,000	Tunggakan		
						2023	Agustus	300,000	Tunggakan		
510 / 086/ Diskumperindag / VI/ 2023	6/19/2023	12	Salwatia HS	Gedung C / C.40	Pasar kolonodale	2023	Februari	-	Sudah Bayar		Masih Menjual
						2023	Maret	-	Sudah Bayar		
						2023	April	300,000	Tunggakan		
						2023	Mei	300,000	Tunggakan		
						2023	Juni	300,000	Tunggakan		
						2023	Juli	300,000	Tunggakan		
						2023	Agustus	300,000	Tunggakan		
510 / 085/ Diskumperindag / VI/ 2023	6/19/2023	13	Alimuddin	Gedung C / C.39	Pasar kolonodale	2023	Februari	-	Sudah Bayar		Masih Menjual
						2023	Maret	-	Sudah Bayar		
						2023	April	300,000	Tunggakan		
						2023	Mei	300,000	Tunggakan		
						2023	Juni	300,000	Tunggakan		

Lampiran XIII

No Surat	Tanggal Surat	Peringatan Ke-	Nama	Tipe/Nomor	Alamat	Tahun	Bulan	Jumlah	Keterangan		
						2023	Juli	300,000	Tunggakan		
						2023	Agustus	300,000	Tunggakan		
510 / 074/ Diskumperindag / VI/ 2023	6/19/2023	14	Yenni Yunus	Gedung C / C.30	Pasar kolonodale	2022	Desember	150,000	Tunggakan		Masih Menjual
						2023	Januari	150,000	Tunggakan		
						2023	Februari	300,000	Tunggakan		
						2023	Maret	300,000	Tunggakan		
						2023	April	300,000	Tunggakan		
						2023	Mei	300,000	Tunggakan		
						2023	Juni	300,000	Tunggakan		
						2023	Juli	300,000	Tunggakan		
						2023	Agustus	300,000	Tunggakan		
510 / 078/ Diskumperindag / VI/ 2023	6/19/2023	15	Anugrah	Gedung C / C.44	Pasar kolonodale	2023	Februari	-	Sudah Bayar		Masih Menjual
						2023	Maret	-	Sudah Bayar		
						2023	April	300,000	Tunggakan		
						2023	Mei	300,000	Tunggakan		
						2023	Juni	300,000	Tunggakan		
						2023	Juli	300,000	Tunggakan		
						2023	Agustus	300,000	Tunggakan		
510 / 088/ Diskumperindag / VI/ 2023	6/19/2023	16	Samsir	Gedung C / C.45	Pasar kolonodale	2023	Februari	-	Sudah Bayar		Masih Menjual
						2023	Maret	-	Sudah Bayar		
						2023	April	300,000	Tunggakan		
						2023	Mei	300,000	Tunggakan		
						2023	Juni	300,000	Tunggakan		
						2023	Juli	300,000	Tunggakan		
						2023	Agustus	300,000	Tunggakan		
510 / 094/ Diskumperindag / VI/ 2023	6/19/2023	17	Nuraeni Beddu	Gedung C / C.6	Pasar kolonodale	2022	September	-	Sudah Bayar		Masih Menjual
						2022	Oktober	-	Sudah Bayar		Menyicil
						2022	November	-	Sudah Bayar		
						2022	Desember	-	Sudah Bayar		
						2023	Januari	150,000	Tunggakan		
						2023	Februari	300,000	Tunggakan		
						2023	Maret	300,000	Tunggakan		
						2023	April	300,000	Tunggakan		
						2023	Mei	300,000	Tunggakan		
						2023	Juni	300,000	Tunggakan		
						2023	Juli	300,000	Tunggakan		
						2023	Agustus	300,000	Tunggakan		
510 / 100/ Diskumperindag / VI/ 2023	6/19/2023	18	Abdul Haris Ismail	Gedung B / B.74	Pasar kolonodale	2022	November	125,000	Tunggakan		Dikembalikan

Lampiran XIII

No Surat	Tanggal Surat	Peringatan Ke-	Nama	Tipe/Nomor	Alamat	Tahun	Bulan	Jumlah	Keterangan		
						2022	Desember	125,000	Tunggakan		Dari Bulan November sudah tidak Buka Kios
						2023	Januari	125,000	Tunggakan		
						2023	Februari	250,000	Tunggakan		
						2023	Maret	250,000	Tunggakan		
						2023	April	250,000	Tunggakan		
510 / 80/ Diskumperindag / VI/ 2023	6/19/2023	19	Hasmawati	Gedung B / B.64	Pasar kolonodale	2022	Oktober	-	Sudah Bayar		Masih Menjual
						2022	November	-	Sudah Bayar		Mencicil
						2022	Desember	-	Sudah Bayar		
						2023	Januari	-	Sudah Bayar		
						2023	Februari	-	Sudah Bayar		
						2023	Maret	300,000	Tunggakan		
						2023	April	300,000	Tunggakan		
						2023	Mei	300,000	Tunggakan		
						2023	Juni	300,000	Tunggakan		
						2023	Juli	300,000	Tunggakan		
						2023	Agustus	300,000	Tunggakan		
510 / 079/ Diskumperindag / VI/ 2023	6/19/2023	17	Muh. Arsyad Borahima	Gedung B / B.81	Pasar kolonodale	2022	September	-	Sudah Bayar		Masih Menjual
						2022	Oktober	-	Sudah Bayar		Mencicil
						2022	November	-	Sudah Bayar		
						2022	Desember	-	Sudah Bayar		
						2023	Januari	-	Sudah Bayar		
						2023	Februari	-	Sudah Bayar		
						2023	Maret	250,000	Tunggakan		
						2023	April	250,000	Tunggakan		
						2023	Mei	250,000	Tunggakan		
						2023	Juni	250,000	Tunggakan		
						2023	Juli	250,000	Tunggakan		
						2023	Agustus	250,000	Tunggakan		
							Total	**36,125,000**			



LAMPIRAN XIV :

DAFTAR PIUTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN – TUNTUTAN GANTI RUGI (TP – TGR)

Saldo Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Per 31 Desember 2024

Lampiran XIV

NO	SKTJM		TOTAL TPTGR	MASA ANGSURAN	SALDO PIUTANG 2017	SETORAN PIUTANG DI 2021	PIUTANG s.d 2021 BELUM DITERIMA	SALDO PIUTANG PER 31 DESEMBER 2024	PIUTANG RESCHEDULE	ASET LAINNYA
	NOMOR/ TGL	NAMA								
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7			
TAHUN 2011										
1	Berita Acara Nomor : 341/MP TP-TGR/BA/XII/2011 ,Periode angsuran Maret 12 s.d Feb 14 (24 bln)	Suvinain Lapoto, SH	8,997,875.00	24 bulan	8,997,875.00	-	8,997,875.00	8,997,875.00		
		Linmer J Werokila	8,997,875.00	24 bulan	8,997,875.00		8,997,875.00	8,997,875.00		
			17,995,750.00		**17,995,750.00**		**17,995,750.00**	**17,995,750.00**		
2	Berdasarkan Berita Acara Nomor : 342/MP TP-TGR/BA/XII/2011 Periode angsuran Maret 12 s.d Feb 14 (24 bln).	Suvinain Lapoto, SH	13,764,003.13	24 bulan	13,764,003.13	-	13,764,003.13	13,764,003.13		
		Linmer J Werokila	16,164,003.13	24 bulan	16,164,003.13		16,164,003.13	16,164,003.13		
		Hernintje Ompoeo	15,491,003.13	24 bulan	15,491,003.13		15,491,003.13	15,491,003.13		
			45,419,009.39		**45,419,009.39**	**-**	**45,419,009.39**	**45,419,009.39**		
S U B J U M L A H I			**63,414,759.39**	**-**	**63,414,759.39**	**-**	**63,414,759.39**	**63,414,759.39**		
TAHUN 2012										
3	/SKTJM/MP TP-TGR/VII/2012,Periode angsuran Oktober 12 s.d Mei 13 (8 bln)	Moh.Saleh Hamid, S.Sos	2,398,800.00	8 bulan	2,398,800.00	-	2,398,800.00	2,398,800.00		
4	117/SKTJM/MP TP-TGR/III/2012 Periode angsuran April 12 s.d Maret 13 (12 bln)	Nurhayati M.Sia	816,500.00	12 bulan	816,500.00	-	816,500.00	816,500.00		
5	/SKTJM/MP TP-TGR/I/2012 Periode angsuran Februari 12 s.d September 12 (8 bln)	Novrianto N, SE	1,525,000.00	8 bulan	1,525,000.00	-	1,525,000.00	1,525,000.00		
S U B J U M L A H II			**4,740,300.00**		**6,515,300.00**	**-**	**4,740,300.00**	**4,740,300.00**		
J U M L A H I + II			**68,155,059.39**	**-**	**69,930,059.39**	**-**	**68,155,059.39**	**68,155,059.39**		



LAMPIRAN XV :

D A F T A R P E N Y I S I H A N P I U T A N G

PENYISIHAN PIUTANG TAHUN 2024

Lampiran XV

No	Jenis Piutang	Nilai Piutang Berdasarkan Umur Piutang								Jumlah 2024	
		≤ 12 bulan		12 s.d. 24 bulan		24 s.d. 36 bulan		>36 bulan		Piutang 2024	Penyisihan 2024
		Piutang	0.5%	Piutang	10%	Piutang	50%	Piutang	100%		
		18,977,780,456.00	94,888,902.28	57,696,937,055.48	5,769,693,705.55	7,060,952,450.60	3,530,476,225.30	5,621,633,949.39	5,621,633,949.39	89,357,303,911.47	15,016,692,782.52
1	PIUTANG PAJAK DAERAH	7,422,325,606.00	37,111,628.03	57,653,697,502.90	5,765,369,750.29	7,060,952,450.60	3,530,476,225.30	5,548,356,065.00	5,548,356,065.00	77,685,331,624.50	14,881,313,668.62
		Masa Pajak <2024		Masa Pajak 2022-2023		Masa Pajak 2021		Masa Pajak >2021			
a	*PIUTANG PAJAK HOTEL*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b	*PIUTANG PAJAK RESTORAN*	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	Piutang Pajak Restoran	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c	*PIUTANG PAJAK REKLAME*	**22,943,000.00**	**114,715.00**	**95,129,981.00**	**9,512,998.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**118,072,981.00**	**9,627,713.10**
	PETASIA	0.00	0.00	7,969,434.00	796,943.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7,969,434.00	796,943.40
	PETASIA TIMUR	0.00	0.00	4,213,507.00	421,350.70	0.00	0.00	0.00	0.00	4,213,507.00	421,350.70
	PETASIA BARAT	0.00	0.00	1,183,965.00	118,396.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,183,965.00	118,396.50
	MORI ATAS	0.00	0.00	129,976.00	12,997.60	0.00	0.00	0.00	0.00	129,976.00	12,997.60
	MORI UTARA	0.00	0.00	4,339,030.00	433,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,339,030.00	433,903.00
	SOYO JAYA	0.00	0.00	6,882,735.00	688,273.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6,882,735.00	688,273.50
	MAMOSALATO	0.00	0.00	897,623.00	89,762.30	0.00	0.00	0.00	0.00	897,623.00	89,762.30
	LEMBO	0.00	0.00	14,762,608.00	1,476,260.80	0.00	0.00	0.00	0.00	14,762,608.00	1,476,260.80
	LEMBO RAYA	0.00	0.00	1,096,209.00	109,620.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,096,209.00	109,620.90
	BUNGKU UTARA	0.00	0.00	19,330,894.00	1,933,089.40	0.00	0.00	0.00	0.00	19,330,894.00	1,933,089.40
	PIUTANG PAJAK REKLAME 2023	0.00	0.00	34,324,000.00	3,432,400.00	0.00	0.00		0.00	34,324,000.00	3,432,400.00
	PIUTANG PAJAK REKLAME 2024	22,943,000.00	114,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	22,943,000.00	114,715.00
d	*PIUTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM / GALIAN C*	**1,300,231,607.00**	**6,501,158.04**	**298,386,266.00**	**29,838,626.60**	**6,759,424,695.60**	**3,379,712,347.80**	**122,237,628.00**	**122,237,628.00**	**8,480,280,196.60**	**3,538,289,760.44**
	PT. GEMBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,528,660.00	6,528,660.00	6,528,660.00	6,528,660.00
	CV. PETASIA INDAH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,452.00	46,452.00	46,452.00	46,452.00
	CV. SAKINA PUTRI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,847.00	143,847.00	143,847.00	143,847.00
	PT. BUMINATA AJI PERKASA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,518,669.00	115,518,669.00	115,518,669.00	115,518,669.00
	PT. AFID LINTAS JAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PT. SEI	0.00	0.00	0.00	0.00	6,274,517,187.00	3,137,258,593.50	0.00	0.00	6,274,517,187.00	3,137,258,593.50
	PIUTANG GALIAN C TAHUN 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	484,907,508.60	242,453,754.30	0.00	0.00	484,907,508.60	242,453,754.30
	PIUTANG GALIAN C TAHUN 2023	0.00	0.00	298,386,266.00	29,838,626.60	0.00	0.00	0.00	0.00	298,386,266.00	29,838,626.60
	PIUTANG GALIAN C TAHUN 2024	1,300,231,607.00	6,501,158.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,231,607.00	6,501,158.04
e	*PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN*	**6,099,150,999.00**	**30,495,755.00**	**9,190,744,480.70**	**919,074,448.07**	**301,527,755.00**	**150,763,877.50**	**5,426,118,437.00**	**5,426,118,437.00**	**21,017,541,671.70**	**6,526,452,517.57**
	PETASIA	909,972,080.00	4,549,860.40	377,633,459.00	37,763,345.90	25,708,529.00	12,854,264.50	343,036,390.00	343,036,390.00	1,656,350,458.00	398,203,860.80
	PETASIA TIMUR	3,521,439,296.00	17,607,196.48	7,053,654,641.00	705,365,464.10	137,054,755.00	68,527,377.50	896,176,960.00	896,176,960.00	11,608,325,652.00	1,687,676,998.08
	PETASIA BARAT	297,979,863.00	1,489,899.32	357,418,183.00	35,741,818.30	11,937,531.00	5,968,765.50	463,744,011.00	463,744,011.00	1,131,079,588.00	506,944,494.12
	MORI ATAS	320,024,368.00	1,600,121.84	233,517,397.00	23,351,739.70	31,659,667.00	15,829,833.50	819,421,602.00	819,421,602.00	1,404,623,034.00	860,203,297.04
	MORI UTARA	17,572,851.00	87,864.26	7,789,653.00	778,965.30	1,661,544.00	830,772.00	280,779,997.00	280,779,997.00	307,804,045.00	282,477,598.56
	SOYO JAYA	75,052,404.00	375,262.02	25,780,087.00	2,578,008.70	9,822,729.00	4,911,364.50	521,873,230.00	521,873,230.00	632,528,450.00	529,737,865.22
	MAMOSALATO	18,984,092.00	94,920.46	7,152,904.00	715,290.40	7,130,279.00	3,565,139.50	414,452,761.00	414,452,761.00	447,720,036.00	418,828,111.36

Lampiran XV

No	Jenis Piutang	Nilai Piutang Berdasarkan Umur Piutang								Jumlah 2024	
		≤ 12 bulan		12 s.d. 24 bulan		24 s.d. 36 bulan		>36 bulan		Piutang 2024	Penyisihan 2024
		Piutang	0.5%	Piutang	10%	Piutang	50%	Piutang	100%		
	LEMBO	799,484,829.00	3,997,424.15	951,460,118.70	95,146,011.87	37,981,511.00	18,990,755.50	419,464,344.00	419,464,344.00	2,208,390,802.70	537,598,535.52
	LEMBO RAYA	120,959,258.00	604,796.29	161,202,768.00	16,120,276.80	22,203,797.00	11,101,898.50	893,135,513.00	893,135,513.00	1,197,501,336.00	920,962,484.59
	BUNGKU UTARA	17,681,958.00	88,409.79	15,135,270.00	1,513,527.00	16,367,413.00	8,183,706.50	374,033,629.00	374,033,629.00	423,218,270.00	383,819,272.29
f	***PIUTANG BPHTB***	**0.00**	**0.00**	**36,853,750.00**	**3,685,375.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**36,853,750.00**	**3,685,375.00**
	Piutang BPHTB 2023	0.00	0.00	36,853,750.00	3,685,375.00		0.00		0.00	36,853,750.00	3,685,375.00
		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
g	***PIUTANG Pajak Penerangan Jalan (PPJ)***	**0.00**	**0.00**	**48,032,583,025.20**	**4,803,258,302.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**48,032,583,025.20**	**4,803,258,302.52**
	PIUTANG Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	0.00	0.00	48,032,583,025.20	4,803,258,302.52		0.00		0.00	48,032,583,025.20	4,803,258,302.52
		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
2	**PIUTANG RETRIBUSI**	**-**	**-**	**36,125,000.00**	**3,612,500.00**	**-**	**-**	**5,122,825.00**	**5,122,825.00**	**41,247,825.00**	**8,735,325.00**
a	**PIUTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
b	**PIUTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**	**0.00**	**0.00**	**36,125,000.00**	**3,612,500.00**	**0.00**	**0.00**	**5,122,825.00**	**5,122,825.00**	**41,247,825.00**	**8,735,325.00**
	PETAK APBD 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	630,000.00	630,000.00	630,000.00
	PETAK APBN 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792,000.00	792,000.00	792,000.00	792,000.00
	PETAK DARURAT 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,813,425.00	2,813,425.00	2,813,425.00	2,813,425.00
	PETAK INPRES 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	887,400.00	887,400.00	887,400.00	887,400.00
	RETRIBUSI PELAYANAN PASAR 2023	0.00	0.00	36,125,000.00	3,612,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,125,000.00	3,612,500.00
c	**PIUTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	PIUTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	**PIUTANG DANA BAGI HASIL**	**11,555,454,850.00**	**57,777,274.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,555,454,850.00**	**57,777,274.25**
a	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	2,117,343,076.00	10,586,715.38		0.00		0.00		0.00	2,117,343,076.00	10,586,715.38
b	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	2,048,227,584.00	10,241,137.92		0.00		0.00		0.00	2,048,227,584.00	10,241,137.92
c	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	6,677,782,729.00	33,388,913.65		0.00		0.00		0.00	6,677,782,729.00	33,388,913.65
d	Pajak Air Permukaan (PAP)	712,101,461.00	3,560,507.31		0.00		0.00		0.00	712,101,461.00	3,560,507.31
4	**PIUTANG LAINNYA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**68,155,059.39**	**68,155,059.39**	**68,155,059.39**	**68,155,059.39**
a	**TP - TGR 2011**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,414,759.39	63,414,759.39	63,414,759.39	63,414,759.39
	Suvinain Lapoto, SH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,997,875.00	8,997,875.00	8,997,875.00	8,997,875.00
	Linmer J Werokila	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,997,875.00	8,997,875.00	8,997,875.00	8,997,875.00
	Suvinain Lapoto, SH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,764,003.13	13,764,003.13	13,764,003.13	13,764,003.13
	Linmer J Werokila	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,164,003.13	16,164,003.13	16,164,003.13	16,164,003.13
	Hernintje Ompoeo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,491,003.13	15,491,003.13	15,491,003.13	15,491,003.13
b	**TP - TGR 2012**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,740,300.00	4,740,300.00	4,740,300.00	4,740,300.00
	Moh.Saleh Hamid, S.Sos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,398,800.00	2,398,800.00	2,398,800.00	2,398,800.00
	Nurhayati M.Sia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816,500.00	816,500.00	816,500.00	816,500.00
	Novrianto N, SE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525,000.00	1,525,000.00	1,525,000.00	1,525,000.00
5	**PIUTANG TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA**	**0.00**	**0.00**	**5,171,010.00**	**517,101.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,171,010.00**	**517,101.00**
	Piutang Bantuan Keuangan	0.00	0.00	5,171,010.00	517,101.00		0.00		0.00	5,171,010.00	517,101.00
6	**Piutang Transfer Remunerasi Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)**	**0.00**	**0.00**	**1,943,542.58**	**194,354.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,943,542.58**	**194,354.26**
	Piutang Transfer Remunerasi Dana Transfer Treasury D	0.00	0.00	1,943,542.58	194,354.26		0.00		0.00	1,943,542.58	194,354.26



LAMPIRAN XVI :

D A F T A R R I N C I A N P E R S E D I A A N

DAFTAR NILAI PERSEDIAAN SKPD MOROWALI UTARA

PER 31 DESEMBER 2024

Lampiran XVI

NO	NAMA SKPD	Saldo Awal	OBAT	BHP	ALKON	CETAK	ATK	TABUNG GAS	PERALATAN KEBERSIHAN	BAHAN KOMPUTER	ALAT DAPUR	BBM	BAHAN LAINNYA	JUMLAH	BERITA ACARA OPNAME BARANG
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*16*	*17*
1	Dinas Pendidikan Daerah	-													
2	Dinas Kesehatan Daerah	6,539,298,811.19	2,018,449,652.00	3,027,006,406.00										5,045,456,058.00	
3	- Puskesmas Kolonodale	203,338,055.55	83,098,300.00	89,511,866.00										172,610,166.00	
4	- Puskesmas Molino	195,291,903.44	176,686,539.00	68,017,776.00										244,704,315.00	
5	- Puskesmas Anutoluwu	148,324,380.47	95,556,162.00	25,255,291.00										120,811,453.00	
6	- Puskesmas Pandauke	149,811,089.32	82,757,871.00	34,708,356.00										117,466,227.00	
7	- Puskesmas Lijo	188,230,433.20	102,805,507.00	76,813,370.00										179,618,877.00	
8	- Puskesmas Beteleme	118,375,430.16	65,071,673.00	37,100,562.00										102,172,235.00	
9	- Puskesmas Petumbea	132,776,002.00	98,398,310.00	50,451,268.00										148,849,578.00	
10	- Puskesmas Tomata	173,024,823.86	128,147,170.00	70,685,939.00										198,833,109.00	
11	- Puskesmas Lee	156,959,837.00	73,603,025.00	65,694,598.00										139,297,623.00	
12	- Puskesmas Maymba	99,830,741.45	69,833,659.00	64,037,332.00										133,870,991.00	
13	- Puskesmas Tambayoli	114,181,318.79	32,823,946.00	6,475,607.00										39,299,553.00	
14	- Puskesmas Panca Makmur	202,620,958.47	138,747,416.00	56,358,786.00										195,106,202.00	
15	- Puskesmas Baturube	292,994,919.56	175,675,172.00	50,933,756.00										226,608,928.00	
16	- Puskesmas Wongkondaya	144,994,680.66	75,684,954.00	31,165,345.00										106,850,299.00	
15	- Rumah Sakit Pratama	80,538,258.21	42,230,801.00	58,613,453.00										100,844,254.00	
16	RSUD Kolonodale	1,249,701,798.00	2,118,001.00	788,885,243.00							-			791,003,244.00	
15	Pekerjaan Umum dan Permukiman Daerah													-	
16	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran													-	
15	Dinas Sosial													-	
16	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi													-	
15	Dinas KB dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	219,315,688.00			241,981,382.00									241,981,382.00	
16	Dinas Lingkunpgan Hidup Daerah													-	
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	204,354,578.00				10,610,000.00				166,894,000.00				177,504,000.00	
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa													-	
15	Dinas Perhubungan Daerah													-	
16	Dinas Komunikasi Dan Informatika													-	
15	Dinas Koperasi Dan Perdagangan daerah													-	
16	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu													-	
15	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan													-	
16	Dinas Perikanan Daerah													-	
15	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga													-	
16	Dinas Pertanian dan Pangan Daerah													-	
15	Bagian Umum dan Perlengkapan													-	
16	Bagian Administrasi Pembangunan dan SDA													-	
15	Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah													-	

NO	NAMA SKPD	Saldo Awal	OBAT	BHP	ALKON	CETAK	ATK	TABUNG GAS	PERALATAN KEBERSIHAN	BAHAN KOMPUTER	ALAT DAPUR	BBM	BAHAN LAINNYA	JUMLAH	BERITA ACARA OPNAME BARANG
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*16*	*17*
16	Bagian Adm Kesra dan Kemasyrakatan													-	
15	Bagian Hukum													-	
16	Bagian Organisasi													-	
15	Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa													-	
16	Bagian Humas Dan Protokol Daerah													-	
15	Bagian Perekonomian													-	
16	Sekretariat DPRD													-	
15	Kecamatan Petasia													-	
16	Kecamatan Petasia Timur													-	
15	Kecamatan Petasia Barat													-	
16	Kecamatan Bungku Utara													-	
15	Kecamatan Soyo Jaya													-	
16	Kecamatan Mamosalato													-	
15	Kecamatan Lembo													-	
16	Kecamatan Lembo Raya													-	
15	Kecamatan Mori Atas													-	
16	Kecamatan Mori Utara													-	
15	Badan Kesatuan bangsa dan Politik Daerah													-	
16	Badan Penanggulangan Bencana Daerah											21,000,000.00	12,517,200.00	33,517,200.00	
15	Inspektorat Daerah													-	
16	Bappeda													-	
15	BPKD													-	
16	Badan Pendapatan Daerah	94,926,000.00				246,986,500.00								246,986,500.00	
15	Badan Kepegawaian Dan SDA														
	TOTAL	**10,708,889,707.33**												**8,763,392,194.00**	



LAMPIRAN XVI1 (A - F) :

D A F T A R M U T A S I A S E T T E T A P

DAFTAR MUTASI ASET TETAP TANAH

Lampiran XVII a

NO	NAMA SKPD	TANAH									
		Saldo Aset Tetap Per 1 Jan 2024	MUTASI TAMBAH					MUTASI KURANG			Saldo Aset Tetap 31 Des 2024
			Belanja Modal 2024	Kapitalisasi Aset	Mutasi Antar SKPD	REKLAS ANTAR KIB	Total Mutasi Tambah	Diserahkan Kepada Masyarakat / Pakai Habis	Mutasi Antar SKPD	Total Mutasi Kurang	
		3.00	4A		4F		5	6E	6F	7	8
1	Sekretariat DPRD	1,791,622,344.00					-			-	1,791,622,344.00
2	Bagian Umum	1,487,120,000.00	-		-		-	-			1,487,120,000.00
3	Bagian Administrasi Pembangunan	-					-			-	-
4	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	88,995,000.00					-				88,995,000.00
5	Bagian Hukum	-					-			-	-
6	Bagian Organisasi	-	-		-		-	-	-	-	-
7	Bagian Pemerintahan Umum	12,384,714,800.00	1,963,260,000.00	44,799,000.00			2,008,059,000.00			-	14,392,773,800.00
8	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	-	-		-		-	-	-	-	-
9	Bagian Humas dan Protokol	-	-		-		-	-	-	-	-
10	Bagian Administrasi Perekonomian	-	-		-		-	-	-	-	-
11	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	25,947,180,370.00			-	2,909,693,877.00	2,909,693,877.00			-	28,856,874,247.00
12	Dinas Perhubungan	5,324,179,000.00					-				5,324,179,000.00
13	Dinas Kesehatan Daerah	2,183,774,230.00	-					-	-	-	2,183,774,230.00
14	RSUD Kolonadale	19,772,092,383.00					-			-	19,772,092,383.00
15	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8,409,427,465.00					-				8,409,427,465.00
16	Dinas Pemberdayaan Masyarkat dan Desa	64,960,000.00					-			-	64,960,000.00
17	Dinas Sosial	11,000,000.00					-			-	11,000,000.00
18	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3,644,501,145.00								-	3,644,501,145.00
19	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	244,420,000.00					-			-	244,420,000.00
20	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	42,464,500.00					-			-	42,464,500.00
21	Dinas Pertanian dan Pangan Daerah	2,026,374,850.00					-			-	2,026,374,850.00
22	Dinas Perikanan Daerah	200,000,000.00					-			-	200,000,000.00
23	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-					-			-	-
24	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	7,317,128,000.00					-			-	7,317,128,000.00
25	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	5,349,448,964.00					-				5,349,448,964.00
26	Badan Pendapatan Daerah	-					-			-	-
27	Inspektorat Daerah	-					-			-	-
28	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	80,040,000.00								-	80,040,000.00
29	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	-					-			-	-

Lampiran XVII a

NO	NAMA SKPD	TANAH									
		Saldo Aset Tetap Per 1 Jan 2024	MUTASI TAMBAH					MUTASI KURANG			Saldo Aset Tetap 31 Des 2024
			Belanja Modal 2024	Kapitalisasi Aset	Mutasi Antar SKPD	REKLAS ANTAR KIB	Total Mutasi Tambah	Diserahkan Kepada Masyarakat / Pakai Habis	Mutasi Antar SKPD	Total Mutasi Kurang	
		3.00	4A		4F		5	6E	6F	7	8
30	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	1,292,300,000.00					-			-	1,292,300,000.00
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	-					-			-	-
32	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	-					-			-	-
33	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	342,800,000.00					-			-	342,800,000.00
34	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	294,050,000.00					-			-	294,050,000.00
35	Dinas Komunikasi dan Informatika	-					-			-	-
36	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	-					-			-	-
37	Kecamatan Petasia	-					-			-	-
38	Kecamatan Petasia Timur	137,160,000.00					-			-	137,160,000.00
39	Kecamatan Petasia Barat	426,655,000.00					-			-	426,655,000.00
40	Kecamatan Lembo	-					-			-	-
41	Kecamatan Lembo Raya	84,694,000.00					-			-	84,694,000.00
42	Kecamatan Mori Atas	24,000,000.00					-			-	24,000,000.00
43	Kecamatan Mori Utara	149,700,000.00					-			-	149,700,000.00
44	Kecamatan Soyo Jaya	374,877,500.00					-			-	374,877,500.00
45	Kecamatan Bungku Utara	50,000,000.00					-			-	50,000,000.00
46	Kecamatan Mamosolato	325,129,000.00					-			-	325,129,000.00
	JUMLAH	**99,870,808,551.00**	**1,963,260,000.00**		**-**		**4,917,752,877.00**	**-**	**-**	**-**	**104,788,561,428.00**

DAFTAR MUTASI ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN

Lampiran XV.b

NO	NAMA SKPD	PERALATAN DAN MESIN														
			MUTASI TAMBAH							MUTASI KURANG						
		Saldo Aset Tetap Per 1 Jan 2024	Belanja Modal 2024	Kapitalisasi Aset	HIBAH	Reklas Belanja Modal	Mutasi Antar OPD	Koreksi Nilai	Total Mutasi Tambah	Penghapusan/ Pengakuan Aset Th. 2024	Reklas Belanja Modal / Aset Lainnya	Mutasi Antar OPD	Diserahkan Kepada Masyarakat / Pakai Habis	Ekstrakompatabel 2024	Total Mutasi Kurang	Saldo Aset Tetap 2024
1	2	3	4A	4C	4D	4E		4G	5	6A	6C		6E	6G	7	8
1	Sekretariat DPRD	19,064,202,557.00	2,869,415,000.00						2,869,415,000.00	2,980,244,000.00					2,980,244,000.00	18,953,373,557.00
2	Bagian Umum	35,601,393,335.74	758,574,000.00	12,500,000.00			772,100,000.00		1,542,974,000.00	2,868,754,500.00				6,600,000.00	2,875,354,500.00	34,269,012,835.74
3	Bagian Administrasi Pembangunan	958,629,090.00	49,170,000.00						49,170,000.00						-	1,007,799,090.00
4	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	1,120,786,000.00	36,363,000.00						36,363,000.00						-	1,157,149,000.00
5	Bagian Hukum	566,102,579.00	126,760,000.00						126,760,000.00						-	692,862,579.00
6	Bagian Organisasi	440,665,120.00	34,500,000.00			99,778,000.00			134,278,000.00						-	574,941,120.00
7	Bagian Pemerintahan Umum	2,181,718,925.00	178,650,000.00						178,650,000.00						-	2,360,368,925.00
8	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	1,844,056,195.00	1,191,707,350.00	153,183,152.00					1,344,890,702.00						-	3,188,946,897.00
9	Bagian Humas dan Protokol	1,739,286,151.00	42,908,750.00						42,908,750.00					6,300,000.00	6,300,000.00	1,775,294,901.00
10	Bagian Administrasi Perekonomian	300,206,000.00	153,790,000.00						153,790,000.00						-	453,996,000.00
11	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	11,165,406,409.00	588,165,000.00						588,165,000.00	828,300,000.00					828,300,000.00	10,925,271,409.00
12	Dinas Perhubungan	10,695,142,571.00	27,900,000.00						27,900,000.00			1,669,327,000.00			1,669,327,000.00	9,053,715,571.00
13	Dinas Kesehatan Daerah	115,705,118,318.00	10,412,876,000.00	1,057,430,000.00					11,450,306,000.00	1,586,700,000.00			4,370,000.00	83,795,300.00	1,674,865,300.00	125,480,559,018.00
14	RSUD Kolonodale	76,320,372,238.00	35,710,592,691.00						35,710,592,691.00		12,260,000.00			37,569,000.00	49,829,000.00	111,981,135,929.00
15	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	68,320,303,558.19	10,918,377,824.00	740,320,000.00		521,435,000.00			12,180,132,824.00	644,350,000.00	1,030,884,400.00		220,867,640.00	86,677,500.00	1,982,779,540.00	78,717,656,842.19
16	Dinas Pemberdayaan Masyarkat dan Desa	1,356,495,800.00	289,054,000.00						289,054,000.00						-	1,645,549,800.00
17	Dinas Sosial	1,638,686,143.00	48,400,000.00						48,400,000.00						-	1,687,086,143.00
18	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2,979,543,834.00	457,660,000.00						457,660,000.00		124,455,000.00				124,455,000.00	3,312,748,834.00
19	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5,601,257,925.00	543,250,000.00						543,250,000.00	274,200,000.00					274,200,000.00	5,870,307,925.00
20	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7,720,943,848.00	819,274,600.00				750,410,000.00		1,569,684,600.00	225,000,000.00				7,200,000.00	232,200,000.00	9,058,428,448.00
21	Dinas Pertanian dan Pangan Daerah	6,324,277,175.00	386,272,770.00						386,272,770.00				4,841,020.00	14,161,000.00	19,002,020.00	6,891,547,925.00
22	Dinas Perikanan Daerah	2,379,197,101.00	152,896,000.00						152,896,000.00	285,000,000.00					285,000,000.00	2,247,093,101.00
23	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2,762,187,339.80	830,813,500.00						830,813,500.00						-	3,593,000,839.80
24	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	2,807,755,698.00	85,360,000.00						85,360,000.00	241,100,000.00					241,100,000.00	2,652,015,698.00
25	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	9,274,881,895.00	3,371,690,000.00	750,410,000.00					4,122,100,000.00	735,800,000.00		1,522,510,000.00			2,258,310,000.00	11,138,671,895.00
26	Badan Pendapatan Daerah	2,950,173,299.00	283,316,700.00						283,316,700.00						-	3,233,489,999.00
27	Inspektorat Daerah	3,301,057,671.00	1,562,676,000.00						1,562,676,000.00						-	4,863,713,671.00
28	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	3,943,258,250.00	116,500,000.00						116,500,000.00						-	4,059,758,250.00
29	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	8,074,066,428.20	972,690,100.00	99,875,000.00					1,072,565,100.00			99,875,000.00			99,875,000.00	9,046,756,528.20
30	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	1,758,734,792.00	441,240,000.00	56,800,000.00					498,040,000.00	241,100,000.00					241,100,000.00	2,015,674,792.00
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	1,430,574,269.00	201,820,000.00						201,820,000.00	173,100,000.00					173,100,000.00	1,459,294,269.00
32	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	7,155,578,734.00	457,911,000.00		36,395,000.00				494,306,000.00						-	7,649,884,734.00
33	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2,475,015,175.00	533,937,688.00	387,840,518.00			1,669,327,000.00		2,591,105,206.00					6,285,813.00	6,285,813.00	5,059,856,568.00
34	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	3,965,259,536.00							-						-	3,965,259,536.00
35	Dinas Komunikasi dan Informatika	6,392,408,306.16	141,370,000.00	21,800,000.00					163,170,000.00	274,200,000.00					274,200,000.00	6,481,378,306.16
36	Dinas Perpustakaan dan Keasipan Daerah	1,538,000,051.90	785,756,000.00						785,756,000.00						-	2,323,756,051.90
37	Kecamatan Petasia	2,302,107,968.00	264,023,732.00				99,875,000.00		363,898,732.00						-	2,666,002,700.00
38	Kecamatan Petasia Timur	1,168,119,275.00	15,000,000.00						15,000,000.00						-	1,183,119,275.00
39	Kecamatan Petasia Barat	841,257,149.00	7,906,250.00						7,906,250.00						-	849,143,399.00

NO	NAMA SKPD	PERALATAN DAN MESIN														
			MUTASI TAMBAH							MUTASI KURANG						
		Saldo Aset Tetap Per 1 Jan 2024	Belanja Modal 2024	Kapitalisasi Aset	HIBAH	Reklas Belanja Modal	Mutasi Antar OPD	Koreksi Nilai	Total Mutasi Tambah	Penghapusan / Pengakuan Aset Th. 2024	Reklas Belanja Modal / Aset Lainnya	Mutasi Antar OPD	Diserahkan Kepada Masyarakat / Fokal Habis	Ekstrakompatabel 2024	Total Mutasi Kurang	Saldo Aset Tetap 2024
1	2	3	4A	4C	4D	4E		4G	5	6A	6C		6E	6G	7	8
40	Kecamatan Lembo	1,095,134,294.00	55,556,250.00						55,556,250.00						-	1,150,690,544.00
41	Kecamatan Lembo Raya	825,517,968.00	56,306,250.00						56,306,250.00						-	881,824,218.00
42	Kecamatan Mori Atas	1,167,814,672.00	21,000,000.00						21,000,000.00	204,150,000.00					204,150,000.00	984,664,672.00
43	Kecamatan Mori Utara	755,412,553.00							-						-	755,412,553.00
44	Kecamatan Soyo Jaya	1,167,148,275.00	29,292,150.00						29,292,150.00						-	1,196,440,425.00
45	Kecamatan Bungku Utara	1,148,720,360.00	153,220,000.00						153,220,000.00						-	1,301,940,360.00
46	Kecamatan Mamosolato	1,012,855,620.00	32,906,250.00						32,906,250.00						-	1,045,761,870.00
		443,916,794,251.99	**76,216,049,055.00**	**3,260,150,670.00**	**36,395,000.00**	**621,213,000.00**		-	**80,133,815,725.00**	**11,501,998,500.00**	**1,167,599,400.00**		**230,079,660.00**	**240,386,613.00**	**13,208,263,173.00**	**510,842,336,803.99**

DAFTAR MUTASI ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN

Lampiran XVII.C

GEDUNG DAN BANGUNAN																	
NO	NAMA SKPD	Saldo Aset Tetap Per 1 Jan 2024	MUTASI TAMBAH						MUTASI KURANG								Saldo Aset Tetap 2024
			Belanja Modal 2024	Retensi	Kapitalisasi Aset	Reklas Belanja Modal	Mutasi Antar SKPD	Total Mutasi Tambah	Penghapusan Aset	Reklas Belanja Modal	KDP	Koreksi Pencatatan BM	Diserahkan Kepada Masyarakat / Pakai Habis	Mutasi Antar SKPD	Ekstrakompatabel 2024	Total Mutasi Kurang	
1	2	3	4A	4B	4C	4E	4F	5		6C		6D	6E	6F	6G	7	8
1	Sekretariat DPRD	20,331,950,583.00	783,537,000.00					783,537,000.00								-	21,115,487,583.00
2	Bagian Umum	58,302,137,952.00					4,783,076,323.00	4,783,076,323.00								-	63,085,214,275.00
3	Bagian Administrasi Pembangunan	-						-								-	-
4	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	10,163,915,010.00	198,835,000.00		199,850,000.00	49,966,000.00		448,651,000.00								-	10,612,566,010.00
5	Bagian Hukum	-						-								-	-
6	Bagian Organisasi	-	99,778,000.00					99,778,000.00		99,778,000.00						99,778,000.00	-
7	Bagian Pemerintahan Umum	31,965,681,119.00					375,366,000.00	375,366,000.00								-	32,341,047,119.00
8	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	-	74,890,073.00					74,890,073.00						74,890,073.00		74,890,073.00	-
9	Bagian Humas dan Protokol	-						-								-	-
10	Bagian Administrasi Perekonomian	-						-								-	-
11	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	26,763,228,698.67	23,045,147,056.51	839,712,587.00	5,566,431,591.00	9,471,510,081.49		38,922,801,316.00		7,372,787,677.00	1,507,976,096.00		796,505,000.00	5,815,880,250.00		15,497,971,954.00	50,188,058,060.67
12	Dinas Perhubungan	16,395,373,082.00	3,424,550,000.00					3,424,550,000.00		1,901,923,000.00	424,079,000.00					2,325,002,000.00	17,494,921,082.00
13	Dinas Kesehatan Daerah	207,308,595,976.00	8,364,809,708.00		1,593,112,473.00	2,560,850,209.00		12,518,772,390.00			2,589,404,896.00					2,589,404,896.00	217,237,963,470.00
14	RSUD Kolonadale	75,753,933,707.00	10,327,939,589.32		4,729,978,803.00	30,839,316,203.95		45,897,234,596.27	635,225,250.00	346,590,000.00						981,815,250.00	120,669,353,053.27
15	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	265,093,851,609.10	20,043,737,965.00		7,498,698,411.00		300,692,000.00	27,843,128,376.00		596,362,000.00			1,446,151,602.00			2,042,513,602.00	290,894,466,383.10
16	Dinas Pemberdayaan Masyarkat dan Desa	275,600,000.00						-								-	275,600,000.00
17	Dinas Sosial	286,945,000.00						-								-	286,945,000.00
18	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1,635,376,000.00	274,500,000.00					274,500,000.00		149,790,000.00						149,790,000.00	1,760,086,000.00
19	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2,649,065,400.00						-								-	2,649,065,400.00
20	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4,784,698,699.00			613,245,000.00			613,245,000.00								-	5,397,943,699.00
21	Dinas Pertanian dan Pangan Daerah	11,700,914,454.00	348,808,000.00					348,808,000.00					99,668,000.00			99,668,000.00	11,950,054,454.00
22	Dinas Perikanan Daerah	992,458,000.00	157,228,000.00					157,228,000.00		157,228,000.00						157,228,000.00	992,458,000.00
23	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	85,970,000.00	9,582,518,064.18					9,582,518,064.18			9,582,518,064.18					9,582,518,064.18	85,970,000.00
24	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	54,377,364,402.00	1,103,890,000.00		71,949,000.00	199,850,000.00		1,375,689,000.00								-	55,753,053,402.00
25	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	1,710,762,000.00	197,579,000.00					197,579,000.00								-	1,908,341,000.00
26	Badan Pendapatan Daerah	628,363,820.00	197,742,528.00					197,742,528.00								-	826,106,348.00
27	Inspektorat Daerah	798,178,808.00	298,500,000.00					298,500,000.00								-	1,096,678,808.00
28	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	861,817,000.00						-								-	861,817,000.00
29	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	1,527,413,942.00						-								-	1,527,413,942.00
30	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	10,725,546,350.83	525,068,500.00		428,881,000.00			953,949,500.00								-	11,679,495,850.83
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	550,761,500.00						-								-	550,761,500.00
32	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	198,900,000.00						-								-	198,900,000.00
33	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	1,964,537,000.00			49,280,000.00		2,013,817,000.00								-	2,013,817,000.00
34	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	2,449,459,100.00	198,248,800.00					198,248,800.00								-	2,647,707,900.00
35	Dinas Komunikasi dan Informatika	57,723,000.00						-								-	57,723,000.00
36	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	1,011,289,800.00	8,150,722,500.00					8,150,722,500.00			8,150,722,500.00					8,150,722,500.00	1,011,289,800.00
37	Kecamatan Petasia	2,476,284,762.00	281,490,250.00			49,425,000.00		330,915,250.00								-	2,807,200,012.00
38	Kecamatan Petasia Timur	488,900,000.00						-								-	488,900,000.00
39	Kecamatan Petasia Barat	-					189,706,000.00	189,706,000.00								-	189,706,000.00
40	Kecamatan Lembo	779,848,560.00						-								-	779,848,560.00
41	Kecamatan Lembo Raya	1,378,494,950.00						-								-	1,378,494,950.00
42	Kecamatan Mori Atas	888,259,000.00	149,827,000.00					149,827,000.00								-	1,038,086,000.00
43	Kecamatan Mori Utara	15,000,000.00						-								-	15,000,000.00
44	Kecamatan Soyo Jaya	713,680,000.00					149,982,000.00	149,982,000.00								-	863,662,000.00
45	Kecamatan Bungku Utara	722,179,300.00	149,825,000.00					149,825,000.00								-	872,004,300.00
46	Kecamatan Mamosolato	951,470,000.00						-								-	951,470,000.00
		817,801,391,584.60	**89,943,709,034.01**	**839,712,587.00**	**20,702,146,278.00**	**43,220,197,494.44**	**5,798,822,323.00**	**160,504,587,716.45**		**10,623,458,677.00**		**-**	**2,342,324,602.00**	**5,890,770,323.00**	**-**	**41,751,302,339.18**	**936,554,676,961.87**

DAFTAR MUTASI ASET TETAP JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Lampiran XV.d

NO	NAMA SKPD	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN																
		Saldo Aset Tetap Per 1 Jan 2024	MUTASI TAMBAH							MUTASI KURANG								Saldo Aset Tetap 2024
			Belanja Modal 2024	Kapitalisasi Aset	Reklas Belanja Modal	Mutasi Antar SKPD	Utang Belanja Modal	KDP	Total Mutasi Tambah	Retensi / Pengakuan Aset Th. 2023	Reklas Belanja Modal	KDP	Diserahkan Kepada Masyarakat / Pakai Habis	Mutasi Antar SKPD	Ekstrakompatabel 2024	Total Mutasi Kurang	
1	2	3	4A	4C		4E		4G	5	6A	6C		6E	6F	6G	7	8
1	Sekretariat DPRD	2,156,002,382.00	473,865,000.00						2,629,867,382.00							-	2,629,867,382.00
2	Bagian Umum	35,873,975,192.00							35,873,975,192.00							-	35,873,975,192.00
3	Bagian Administrasi Pembangunan	1,294,176,500.00							1,294,176,500.00							-	1,294,176,500.00
4	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	486,210,000.00							486,210,000.00							-	486,210,000.00
5	Bagian Hukum	-							-							-	-
6	Bagian Organisasi	-							-							-	-
7	Bagian Pemerintahan Umum	740,961,686.00							740,961,686.00							-	740,961,686.00
8	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	-							-							-	-
9	Bagian Humas dan Protokol	-							-							-	-
10	Bagian Administrasi Perekonomian	-							-							-	-
11	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1,397,443,818,000.76	119,387,879,863.04	9,822,264,415.00	11,525,774,319.50	298,388,000.00			1,538,478,124,598.30	33,846,316.60	514,599,000.00	19,938,330,059.00	399,646,000.00	338,642,000.00		21,225,063,375.60	1,517,253,061,222.70
12	Dinas Perhubungan	29,825,694,674.00	5,642,764,360.00	999,732,000.00	1,900,923,000.00				38,369,114,034.00							-	38,369,114,034.00
13	Dinas Kesehatan Daerah	16,932,973,164.00	2,325,994,460.00	50,890,000.00					19,309,857,624.00		149,994,460.00					149,994,460.00	19,159,863,164.00
14	RSUD Kolonadale	12,250,829,357.00		99,750,327.00	346,590,000.00				12,697,169,684.00							-	12,697,169,684.00
15	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3,347,609,259.46		98,686,598.00	88,777,000.00				3,535,072,857.46							-	3,535,072,857.46
16	Dinas Pemberdayaan Masyarkat dan Desa	-							-							-	-
17	Dinas Sosial	468,726,000.00							468,726,000.00							-	468,726,000.00
18	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	19,004,893,681.54	2,629,499,000.00		149,790,000.00				21,784,182,681.54				1,002,539,000.00			1,002,539,000.00	20,781,643,681.54
19	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	293,539,000.00							293,539,000.00							-	293,539,000.00
20	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	44,980,000.00				39,839,000.00			84,819,000.00							-	84,819,000.00
21	Dinas Pertanian dan Pangan Daerah	2,746,323,950.00							2,746,323,950.00							-	2,746,323,950.00
22	Dinas Perikanan Daerah	2,079,246,330.00			157,228,000.00				2,236,474,330.00							-	2,236,474,330.00
23	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-							-							-	-
24	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	1,095,510,000.00	199,850,000.00						1,295,360,000.00		199,850,000.00					199,850,000.00	1,095,510,000.00
25	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	47,970,000.00							47,970,000.00							-	47,970,000.00
26	Badan Pendapatan Daerah	-							-							-	-
27	Inspektorat Daerah	25,000,000.00							25,000,000.00							-	25,000,000.00
28	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-							-							-	-
29	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	1,103,338,000.00							1,103,338,000.00							-	1,103,338,000.00
30	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	2,858,589,539.00	189,603,000.00	212,671,000.00					3,260,863,539.00							-	3,260,863,539.00
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	246,615,000.00	199,850,000.00						446,465,000.00							-	446,465,000.00
32	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	-							-							-	-
33	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	33,990,010,795.00	8,415,981,566.00				72,699,100.00		42,478,691,461.00	400,000,000.00		2,938,050,666.00				3,338,050,666.00	39,140,640,795.00
34	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	452,598,401.00							452,598,401.00							-	452,598,401.00
35	Dinas Komunikasi dan Informatika	86,138,000.00							86,138,000.00							-	86,138,000.00
36	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	20,037,380.00	1,201,600,000.00	83,932,650.00				99,901,000.00	1,405,471,030.00							-	1,405,471,030.00
37	Kecamatan Petasia	3,927,005,243.00	972,608,000.00			199,026,000.00			5,098,639,243.00		49,425,000.00			298,388,000.00		347,813,000.00	4,750,826,243.00
38	Kecamatan Petasia Timur	449,814,000.00	295,311,000.00			191,725,000.00			936,850,000.00							-	936,850,000.00
39	Kecamatan Petasia Barat	-							-							-	-
40	Kecamatan Lembo	43,500,000.00							43,500,000.00							-	43,500,000.00
41	Kecamatan Lembo Raya	439,072,000.00							439,072,000.00							-	439,072,000.00
42	Kecamatan Mori Atas	11,400,000.00							11,400,000.00							-	11,400,000.00
43	Kecamatan Mori Utara	-							-							-	-
44	Kecamatan Soyo Jaya	11,503,460.00							11,503,460.00							-	11,503,460.00
45	Kecamatan Bungku Utara	-							-							-	-
46	Kecamatan Mamosolato	-							-							-	-
		1,569,798,060,994.76	**141,934,806,249.04**	**11,367,926,990.00**	**14,169,082,319.50**	**728,978,000.00**		**99,901,000.00**	**1,738,171,454,653.30**	**433,846,316.60**	**913,868,460.00**		**1,402,185,000.00**	**637,030,000.00**	**-**	**26,263,310,501.60**	**1,711,908,144,151.70**

DAFTAR MUTASI ASET TETAP LAINNYA

Lampiran XV.IIe

NO	NAMA SKPD	ASET TETAP LAINNYA									
		Saldo Aset Tetap Per 1 Jan 2024	MUTASI TAMBAH				MUTASI KURANG				Saldo Aset Tetap 2024
			Belanja Modal 2024	Kapitalisasi Aset	Reklas Belanja Modal	Total Mutasi Tambah	Reklas Belanja Modal	Koreksi Pencatatan BM	Ekstrakompatabel 2024	Total Mutasi Kurang	
1	2	3	4A	4C	4E	5	6C	6D	6G	7	8
1	Sekretariat DPRD	37,800,000.00				-				-	37,800,000.00
2	Bagian Umum	645,478,000.00	-			-		-	-	-	645,478,000.00
3	Bagian Administrasi Pembangunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	239,600,000.00				-				-	239,600,000.00
5	Bagian Hukum	17,665,705.00				-				-	17,665,705.00
6	Bagian Organisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Bagian Pemerintahan Umum	196,800,000.00				-				-	196,800,000.00
8	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Bagian Humas dan Protokol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Bagian Administrasi Perekonomian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Dinas Perhubungan	44,940,000.00				-				-	44,940,000.00
13	Dinas Kesehatan Daerah	-	-	-	-	-				-	-
14	RSUD Kolonadale	7,500,000.00				-				-	7,500,000.00
15	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	11,988,856,641.00			1,008,534,400.00	1,008,534,400.00				-	12,997,391,041.00
16	Dinas Pemberdayaan Masyarkat dan Desa	9,900,000.00				-				-	9,900,000.00
17	Dinas Sosial	-				-				-	-
18	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	99,945,000.00				-				-	99,945,000.00
19	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-				-				-	-
20	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-				-				-	-
21	Dinas Pertanian dan Pangan Daerah	124,060,000.00				-				-	124,060,000.00
22	Dinas Perikanan Daerah	-				-				-	-
23	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	99,500,000.00				-				-	99,500,000.00
24	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	-				-				-	-
25	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	276,000.00				-				-	276,000.00
26	Badan Pendapatan Daerah	-				-				-	-
27	Inspektorat Daerah	-				-				-	-

NO	NAMA SKPD	ASET TETAP LAINNYA									
		Saldo Aset Tetap Per 1 Jan 2024	MUTASI TAMBAH				MUTASI KURANG				Saldo Aset Tetap 2024
			Belanja Modal 2024	Kapitalisasi Aset	Reklas Belanja Modal	Total Mutasi Tambah	Reklas Belanja Modal	Koreksi Pencatatan BM	Ekstrakompatabel 2024	Total Mutasi Kurang	
1	2	3	4A	4C	4E	5	6C	6D	6G	7	8
28	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-				-				-	-
29	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	-				-				-	-
30	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	-				-				-	-
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	-				-				-	-
32	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	-				-				-	-
33	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	508,789,000.00				-				-	508,789,000.00
34	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	-				-				-	-
35	Dinas Komunikasi dan Informatika	-				-				-	-
36	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	206,753,700.00	254,614,700.00			254,614,700.00	54,914,700			54,914,700.00	406,453,700.00
37	Kecamatan Petasia	-				-				-	-
38	Kecamatan Petasia Timur	-				-				-	-
39	Kecamatan Petasia Barat	-				-				-	-
40	Kecamatan Lembo	-				-				-	-
41	Kecamatan Lembo Raya	-				-				-	-
42	Kecamatan Mori Atas	-				-				-	-
43	Kecamatan Mori Utara	-				-					-
44	Kecamatan Soyo Jaya	-				-				-	-
45	Kecamatan Bungku Utara	-				-				-	-
46	Kecamatan Mamosolato	-				-				-	-
	TOTAL	**14,227,864,046.00**	**254,614,700.00**	**-**	**1,008,534,400.00**	**1,263,149,100.00**	**54,914,700.00**	**-**	**-**	**54,914,700.00**	**15,436,098,446.00**

DAFTAR MUTASI ASET TETAP
(KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN)

Lampiran XVII. f

NO	NAMA SKPD	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN (KDP)								
		Saldo Aset Tetap Per 1 Jan 2024	MUTASI TAMBAH			MUTASI KURANG				Saldo Aset Tetap 2024
			Kapitalisasi Aset	Reklas Belanja Modal	Total Mutasi Tambah	Reklas Belanja Modal	KDP	Pengakuan Utang Tahun 2023	Total Mutasi Kurang	
1	2	3	4C	4E	5	6G	6H		7	8
1	Sekretariat DPRD	10,499,169,237.20			-				-	10,499,169,237.20
2	Bagian Umum	24,462,130.00			-	-			-	24,462,130.00
3	Bagian Administrasi Pembangunan	-	-	-	-	-	-		-	-
4	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	49,966,000.00			-	49,966,000.00	-		49,966,000.00	-
5	Bagian Hukum	-			-	-	-		-	-
6	Bagian Organisasi	-			-	-	-		-	-
7	Bagian Pemerintahan Umum	1,133,107,600.00			-	-	-		-	1,133,107,600.00
8	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	-			-	-	-		-	-
9	Bagian Humas dan Protokol	-			-	-	-		-	-
10	Bagian Administrasi Perekonomian	-			-	-	-		-	-
11	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	29,472,240,978.71	4,036,550,020	21,446,306,155	25,482,856,175.00	15,829,259,900.99		156,995,453.26	15,986,255,354.25	38,968,841,799.46
12	Dinas Perhubungan	854,965,000.00		424,079,000.00	424,079,000.00	-			-	1,279,044,000.00
13	Dinas Kesehatan Daerah	7,754,625,599.00	202,613,850	2,589,404,896	2,792,018,746.00	2,410,855,749.00			2,410,855,749.00	8,135,788,596.00
14	RSUD Kolonadale	30,856,936,203.95			-	30,827,056,203.95			30,827,056,203.95	29,880,000.00
15	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	304,992,000.00			-				-	304,992,000.00
16	Dinas Pemberdayaan Masyarkat dan Desa	-			-				-	-
17	Dinas Sosial	-			-				-	-
18	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	44,846,700.00			-				-	44,846,700.00
19	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-			-				-	-
20	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-			-				-	-
21	Dinas Pertanian dan Pangan Daerah	-			-				-	-
22	Dinas Perikanan Daerah	67,580,000.00			-				-	67,580,000.00
23	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	394,324,000.00		9,582,518,064	9,582,518,064.18				-	9,976,842,064.18
24	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	-			-				-	-
25	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	-			-				-	-
26	Badan Pendapatan Daerah	-			-				-	-
27	Inspektorat Daerah	-			-				-	-
28	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-			-				-	-
29	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	-			-				-	-
30	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	340,723,400.00			-				-	340,723,400.00
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	-			-				-	-
32	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	-			-				-	-
33	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	149,130,000.00		2,938,050,666	2,938,050,666.00	49,280,000.00			49,280,000.00	3,037,900,666.00
34	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	-			-				-	-
35	Dinas Komunikasi dan Informatika	-			-				-	-
36	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	99,901,000.00	813803000	8150722500	8,964,525,500.00		99,901,000.00		99,901,000.00	8,964,525,500.00
37	Kecamatan Petasia	-			-				-	-
38	Kecamatan Petasia Timur	-			-				-	-
39	Kecamatan Petasia Barat	-			-				-	-
40	Kecamatan Lembo	-			-				-	-
41	Kecamatan Lembo Raya	-			-				-	-
42	Kecamatan Mori Atas	-			-				-	-
43	Kecamatan Mori Utara	-			-				-	-
44	Kecamatan Soyo Jaya	-			-				-	-
45	Kecamatan Bungku Utara	-			-				-	-
46	Kecamatan Mamosolato	-			-				-	-
		82,046,969,848.86	**5,052,966,870.00**	**45,131,081,281.18**	**50,184,048,151.18**	**49,166,417,853.94**	**99,901,000.00**		**49,423,314,307.20**	**82,807,703,692.84**

LAMPIRAN XVlll :

DAFTAR RINCIAN KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN (KDP)

DAFTAR RINCIAN KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
PER 31 DESEMBER 2024

Lampiran XVIII

NO.	URAIAN	KONTRAK			NILAI SP2D	PERENCANAAN & PENGAWASAN	TOTAL REALISASI	MUTASI TAHUN 2024		KDP PER 31 DESEMBER 2024	SISA KONTRAK	BAST		KET
		NOMOR KONTRAK	TANGGAL	NILAI KONTRAK				BERTAMBAH	BERKURANG			TANGGAL	NO. BAST	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 + 7	10	11	12	13	14	15	16
A	**SEKRETARIAT DPRD**													
1	Pembangunan Kantor DPRD Tahap I	641/01/KONT/PPK.PSPA/SET-DPRD/VII/2016	15/07/2016	7,847,412,550.00	7,847,412,550.00	273,438,000.00	8,120,850,550.00			8,120,850,550.00				
2	Pembangunan Kantor DPRD Kab. Morowali Utara Tahap I (PEMBAYARAN MC 8 PEMBANGUNAN DPRD TAHAP 1 2017)	02/ADD-II/KONT/PPK.PSPA/SET-DPRD/XII/2017	15/07/2017	1,157,240,584.00	1,157,240,584.00		1,157,240,584.00			1,157,240,584.00				
4	Perencanaan Pembangunan Pagar Kantor DPRD	556/09/CV-R.E.C/SPK-PL/SET-DPRD/XI/2022	29-Nov-22	99,750,000.00	99,750,000.00		99,750,000.00			99,750,000.00				
5	Pekerjaan Rehab Kantor DPRD Lama	556/01/Kont/PPK/SET-DPRD/MU/IX/2023	27-Sep-23	1,819,172,000.00	1,001,636,103.20	119,692,000.00	1,121,328,103.20			1,121,328,103.20				
B	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**									-				
1	Perencanaan Pembangunan Mushollah Pelabuhan Ferry dikab. Morowali Utara	02.a/SPK/PL-TP/DISPUHUB/JAS/VII/2014	21/07/2014	19,965,000.00	19,965,000.00		19,965,000.00			19,965,000.00				
2	Perencanaan Pembangunan Rumah Jabatan Ketua DPRD	02/SPK-PERC/PL/DPUPD/III/2014	20 MARET 2014	37,499,000.00	37,499,000.00		37,499,000.00			37,499,000.00				
3	Perencanaan Pembangunan Rumah Jabatan Wakil Ketua DPRD	01/SPK-PERC/PL/DPUPD/III/2014	20 MARET 2014	36,000,000.00	36,000,000.00		36,000,000.00			36,000,000.00				
4	Perencanaan Jalan Korolama - Tompita (1 Paket)	622/05.a/Kont-Konsul/PPK-Pemb.II/DPUPD/VII/2014	26 Juni 2014	95,480,000.00	95,480,000.00		95,480,000.00			95,480,000.00				
5	Perencanaan Jembatan Poros Taliwan-Era dan Tiwa'a - Era Kec. Mori Utara	622/27.a/Kont-Konsul/PPK-Pemb.II/DPUPD/VIII/2014	06 AGUSTUS 2014	345,125,000.00	345,125,000.00		345,125,000.00			345,125,000.00				
6	Perencanaan Jembatan Sampalowo - Onepute	622/30.a/Kont-Konsul/PPK-Pemb.II/DPUPD/VIII/2014	15-Aug-14	194,617,000.00	194,617,000.00		194,617,000.00			194,617,000.00				
7	Perencanaan Jalan SP3 Desa Kolo Bawah	912/002/KONT/BK/E-LELANG/KONSLT-PRC/DPUPRD/VI/2018	08 JUNI 2018	116,875,000.00	116,875,000.00		116,875,000.00			116,875,000.00				
8	PEKERJAAN UKL/UPL PEMBANGUNAN JALAN AKSES PERKANTORAN DESA KOROLAMA	912/08.a/SPK/PL/Konsult-PRC/DPUPRD/III/2018	12 MARET 2018	49,800,000.00	49,800,000.00		49,800,000.00			49,800,000.00				
9	PERENCANAAN PEMBANGUNAN JALAN AKSES PERKANTORAN DESA KOROLAMA	912/004/KONT/BK/E-Lelang/Konslt-PRC/DPUPRD/VI/2018	07 JUNI 2018	146,135,000.00	146,135,000.00		146,135,000.00			146,135,000.00				
10	PERENCANAAN JEMBATAN RUAS JALAN LEMO-LEMOWALIA	912/03/SPK/PL/Konsult-PRC/DPUPRD/APBD-P/XI/2018	19-Nov-18	99,800,000.00	99,800,000.00		99,800,000.00			99,800,000.00				
11	PERENCANAAN JEMBATAN UEBANGKE DESA PANCA MAKMUR KEC. SOYO JAYA	02/SPK-DAU/PL-PRC.JBT/DPUPRD-BM/MU/XI/2018	21 DES 2018	79,780,000.00	79,780,000.00		79,780,000.00			79,780,000.00				
12	PERENCANAAN SUPLESI PERPIPAAN D.I TALIWAN	912/04/SPK/Konsult-PRC/DPUPRD/III/2018	12 MARET 2018	49,900,000.00	49,900,000.00		49,900,000.00			49,900,000.00				
13	PERENCANAAN BOX CALVER DESA BUNTA-BUNGINI KEC. PETASIA BARAT	912/01/SPK/PL/Konsult-PRC/DPUPRD/III/2018	12 MARET 2018	49,900,000.00	49,900,000.00		49,900,000.00			49,900,000.00				
14	PERENCANAAN JEMBATAN GANTUNG DALAM DESA TINGKEA'O KEC. LEMBO	912/07/SPK/PL/Konsult-PRC/DPUPRD/III/2018	12 MARET 2018	49,900,000.00	49,900,000.00		49,900,000.00			49,900,000.00				
15	PERENCANAAN AIR BERSIH BUNTA	912/12/SPK/PL/Konsult-PRC/DPUPRD/VII/2018	12 JULI 2018	99,850,000.00	99,850,000.00		99,850,000.00			99,850,000.00				
16	PERENCANAAN JALAN KOMPLEKS PERKANTORAN DESA TOMPIRA	912/01/SPK/PL/Konslt-PRC/APBD-P/DPUPRD/XI/2018	TGL. 19 NOV 2018	49,850,000.00	49,850,000.00		49,850,000.00			49,850,000.00				
17	Atas Pekerjaan Pembentukan Badan Jalan Kampung Bugis -Jalur II	622/04/SPK/PL/BM-DPUPRPKPD/VII/2019	26 JULI 2019	94,399,600.00	94,399,600.00		94,399,600.00		94,399,600.00	-				
18	Pekerjaan Pembangunan Jalan Produksi Pomakata Desa Tabarano	622/16/SPK/PL/BM-DPUPRPKPD/VIII/2019	30 JULI 2019	94,358,750.00	94,358,750.00		94,358,750.00			94,358,750.00				

Lampiran XVIII

NO.	URAIAN	KONTRAK			NILAI SP2D	PERENCANAAN & PENGAWASAN	TOTAL REALISASI	MUTASI TAHUN 2024		KDP PER 31 DESEMBER 2024	SISA KONTRAK	BAST		KET
		NOMOR KONTRAK	TANGGAL	NILAI KONTRAK				BERTAMBAH	BERKURANG			TANGGAL	NO. BAST	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 + 7	10	11	12	13	14	15	16
19	Pekerjaan Perencanaan Air Bersih Ibu Kota Kec. Petasia Timur Desa Bungintimbe T.A 2019			99,700,000.00	99,700,000.00		99,700,000.00			99,700,000.00				
20	Pemeliharaan Jalan Beteleme-Ronta	04/Kont/PmJ/BM/DPUPRPKPD/VIII/2020	31-Aug-20	508,065,450.00	508,065,450.00		508,065,450.00			508,065,450.00				
21	Pekerjaan Perencanaan Gedung SMP Negeri I Petasia dan Perencana UKL-UPL Gedung SMP N 1 Petasia TA. 2020	01/KONT-PR/DAU.CK/DPUPRD/VI/2020		200,915,000.00	200,915,000.00		200,915,000.00		200,915,000.00	-				
22	Feasibility Study Perencanaan Islamic Center	02/KONT-DAU/PPK-CK/DPUPRPKPD/V/2021	3-May-21	194,700,000.00	194,700,000.00		194,700,000.00		194,700,000.00	-				
23	Pekerjaan Peningkatan Jalan SP3 Jalan Provinsi-Lembobelala (DAK Penugasan)	03/Kont/PSJ/BM/DPUPRPKPD/IV/2021	1-Apr-21	6,580,000,000.00	4,505,156,400.00	201,355,000.00	4,706,511,400.00			4,706,511,400.00				
24	Pekerjaan Pembangunan Jaringan irigasi D.I Peilia (DAK)	02/KONT/DPUPRPKPD/SDA-DAK/MU/VI/2021	7-Jun-21	3,709,200,364.00	2,632,441,699.40	74,844,000.00	2,707,285,699.40			2,707,285,699.40				
25	Pekerjaan Perbaikan Jalan Lingkungan Penghubung Antara Dusun Desa Salobiru	34/SPK/PL/CK/DPUPRPKPD/MU/IX/2021	14-Sep-21		124,481,800.00		124,481,800.00			124,481,800.00				
26	Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Beteleme-Ronta	622/15/SPK/PL-BM/DPUPRPKPD/XII/2021	1-Dec-21		197,562,900.00		197,562,900.00			197,562,900.00				
27	Pekerjaan Perencanaan Jalan Tontowea- Era	622/05/SPK/KNSLTN/PL-BM/DPUPRPKPD/XII/2021	14-Dec-21	99,907,500.00	99,907,500.00		99,907,500.00			99,907,500.00				
28	Pekerjaan Perencanaan Jalan Kabupaten (Sp3 Provinsi-Taronggo, Woomparigi-Tambarobone, Tanakuraya-Lemo, Tiu-Tontowea, Sp3 Provinsi-Jamor Jaya)	620/04/Kont/Konst/DPUPRPKPD-BM/IX/2021	6-Sep-21	291,984,000.00	291,984,000.00		291,984,000.00			291,984,000.00				
29	Pekerjaan Perencanaan Jembatan Kuse (Review Desain)	620/05/Kont/Konst/DPUPRPKPD-BM/IX/2021	6-Sep-21	288,438,700.00	288,438,700.00		288,438,700.00			288,438,700.00				
30	Perencanaa Terknis Jembatan Masara (Jembatan Masuk Desa Masara)	622/04/SPK/KNSLTN/PL-BM/DPUPRPKPD/XII/2021	14-Dec-21	99,607,200.00	99,607,200.00		99,607,200.00			99,607,200.00				
31	Pekerjaan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jembatan Gantung Kuse (Tiang Gawang Jembatan Gantung)	622/14/SPK/PL-BM/DPUPRPKPD/VII/2021	31-Aug-21	119,470,000.00	119,470,000.00		119,470,000.00			119,470,000.00				
32	Perencanaan Untuk Kegiatan (DAK) (Irigasi Matube)	05/KONT/DPUPRPKPD/SDA-DAK/MU/VIII/2021	18-Dec-21	99,797,500.00	99,797,500.00		99,797,500.00			99,797,500.00				
33	Pekerjaan Perencanaan Air Bersih Desa Kolo Atas	01/SPK/PL/PPK-CK/DPUPRPKPD/MU/XII/2021	7-Dec-21	99,824,000.00	99,824,000.00		99,824,000.00			99,824,000.00				
34	PERENCANAAN REHABILITASI JALAN DALAM KOTA KOLONODALE	622/01.a/SPK/KNSLTN/PL/APBDP/DPUPRPKPD/XII/2022	2-Dec-22	99,777,000.00	99,777,000.00		99,777,000.00			99,777,000.00				
35	REVIUW PERENCANAAN PEMBANGUNAN JALAN TOMPIRA - KOROLOLAMA	622/05.a/SPK/KNSLTN/PL/APBD.P/DPUPRPKPD/XII/2022	2-Dec-22	97,513,000.00	97,513,000.00		97,513,000.00			97,513,000.00				
36	PERENCANAAN PENINGKATAN JALAN KECAMATAN MAMOSALATO	622/16/SPK/KNSLTN/PL-BM/DPUPRPKPD/V/2022	18-Apr-22	99,322,000.00	99,322,000.00		99,322,000.00			99,322,000.00				
37	PERENCANAAN PENINGKATAN JALAN KEC. PETASIA, KEC. PETASIA TIMUR, DAN KEC. PETASIA BARAT	622/17/SPK/KNSLTN/PL-BM/DPUPRPKPD/V/2022	18-Apr-22	99,456,000.00	99,456,000.00		99,456,000.00			99,456,000.00				

Lampiran XVIII

NO.	URAIAN	KONTRAK			NILAI SP2D	PERENCANAAN & PENGAWASAN	TOTAL REALISASI	MUTASI TAHUN 2024		KDP PER 31 DESEMBER 2024	SISA KONTRAK	BAST		KET
		NOMOR KONTRAK	TANGGAL	NILAI KONTRAK				BERTAMBAH	BERKURANG			TANGGAL	NO. BAST	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 + 7	10	11	12	13	14	15	16
38	PERENCANAAN PENINGKATAN JALAN KEC. LEMBO, LEMBO RAYA, MORI ATAS, DAN MORI UTARA	622/18/SPK/KNSLTN/PL-BM/DPUPRPKPD/V/2022	18-Apr-22	99,678,000.00	99,678,000.00		99,678,000.00			99,678,000.00				
39	PERENCANAAN PENINGKATAN JALAN KEC. BUNGKU UTARA	622/19/SPK/KNSLTN/PL-BM/DPUPRPKPD/V/2022	18-Apr-22	99,345,000.00	99,345,000.00		99,345,000.00			99,345,000.00				
40	PERENCANAAN PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN	01/SPK/PL-P/PR/PPK02-CK/DPUPRPKPD/MU/XII/2022	20-Dec-22	99,992,000.00	99,992,000.00		99,992,000.00			99,992,000.00				
41	PERENCANAAN JALAN LINGKUNGAN KECAMATAN BUNGKU UTARA - MAMOSALATO	02/SPK/PL-P/PP02/CK/DPUPRPKPD/MU/XII/2022	5-Dec-22	99,533,000.00	99,533,000.00		99,533,000.00			99,533,000.00				
42	PERENCANAAN PENINGKATAN JALAN DESA SILITI	622/15/SPK/KNSLTN/PL-BM/DPUPRPKPD/V/2022	18-Apr-22	99,955,278.00	99,955,278.00		99,955,278.00		99,955,278.00	-				
43	PERENCANAAN PENYEDIKAN TANAH, SKEMA JARINGAN DAN SALURAN SEKUNDER D.I KAYUPUTIH DESA TANANAGAYA KEC. MAMOSALATO	610/08/SPK/APBD.P/PL-KONT-PER/DPUPRPKPD-SDA/MU/XII	3-Dec-22	99,995,000.00	99,995,000.00		99,995,000.00			99,995,000.00				
44	PERENCANAAN REHABILITASI JARINGAN IRIGASI D.I DESA TANANAGAYA	610/09/SPK/APBD.P/PL-KONT-PER/DPUPRPKPD-SDA/MU/XII	3-Dec-22	99,918,000.00	99,918,000.00		99,918,000.00			99,918,000.00				
45	PERENCANAAN REHABILITASI BENDUNG D.I GONTARA	610/11/SPK/APBD.P/PL-CONS-PER/DPUPRPKPD-SDA/MU/XII	7-Dec-22	99,696,000.00	99,696,000.00		99,696,000.00		99,696,000.00	-				
46	PERENCANAAN DRAINASE DALAM KOTA KOLONODALE	622/002.a/SPK/KNSLTN/PL/APBD.P/DPUPRPKPD/XII/2022	2-Dec-22	99,800,000.00	99,800,000.00		99,800,000.00			99,800,000.00				
47	PERENCANAAN ISLAMIC CENTER MASTER PLAN / DED	640/20/KONT/TENDER/CK/DPUPRPKPD/MU/XI/2022	10-Nov-22	319,052,000.00	319,052,000.00		319,052,000.00		319,052,000.00	-				
48	Pembangunan Gedung dan Fasilitas ISLAMIC CENTER	04/Kont/Kontrak-DAU/PPK-CK/DPUPRPKPD/MU/VII/2023	28-Jul-23	9,993,068,260.91	7,999,251,281.49	242,992,800.00	8,242,244,081.49		8,242,244,081.49	-				
49	Pembangunan Bronjong pemecah Arus Sungai Desa Beteleme	610/09/SPK/APBD.P/PL/DPUPRPKPD-SDA/MU/XII/2023	12-Jun-23	124,680,000.00	59,896,000.00		59,896,000.00		59,896,000.00	-				
50	Peningkatan Jalan Ling. III Jalur Dua Kelurahan Bahontula Kec. Petasia	19/SPK/PL-P/PPK01-CK/DPUPRPKPD/MU/XI/2023	30-Nov-23	149,809,000.00	74,904,500.00		74,904,500.00		74,904,500.00	-				
51	Pembangunan Jalan Lingkar Pantai-Yos Sudarso	620/01/Kont/BM/APBD/DPUPRPKPD/VIII/2023	8-Feb-23	1,457,265,000.00	755,737,629.00	39,951,000.00	795,688,629.00		795,688,629.00	-				
52	Pelebaran Jalan Lingkar Lapangan Morokoa Kec. Petasia	620/03/Kont/BM/APBD/DPUPRPKPD/VIII/2023	30-Aug-23	838,896,600.00	671,620,617.90	39,867,000.00	711,487,617.90		711,487,617.90	-				
53	Pelebaran Jalan SP3 Jalan Provinsi (Depot Pertamina) - Tanggul Pantai Kolonodale	620/04/Kont/BM/APBD/DPUPRPKPD/VIII/2023	30-Aug-23	945,544,300.00	197,817,323.00	39,757,000.00	237,574,323.00		237,574,323.00	-				

Lampiran XVIII

NO.	URAIAN	KONTRAK			NILAI SP2D	PERENCANAAN & PENGAWASAN	TOTAL REALISASI	MUTASI TAHUN 2024		KDP PER 31 DESEMBER 2024	SISA KONTRAK	BAST		KET
		NOMOR KONTRAK	TANGGAL	NILAI KONTRAK				BERTAMBAH	BERKURANG			TANGGAL	NO. BAST	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 + 7	10	11	12	13	14	15	16
54	PEMBANGUNAN DRAINASE DAN TROTOAR RUAS JALAN YOS SUDARSO, JENDRAL SUDIRMAN, DR. SAHARDJO, JALAN TENGAH (DEPAN RUJAB KETUA DPRD) DAN JALAN KUDA LAUT	620/05/KONT/BM/APBD /DPUPRPKPD/IX/2023	9-Apr-23	5,973,983,700.00	3,285,691,035.00	99,669,120.00	3,385,360,155.00		3,385,360,155.00	-				
55	PEMBANGUNAN JEMBATAN MALIKAWI	620/05/KONT/BM/DPUP RPKPD/IX/2023	9-Apr-23	635,493,000.00	588,593,616.60	99,500,000.00	688,093,616.60		688,093,616.60	-				
56	Pembangunan Jembatan Pu'awu Desa Wawopada Tahap I	620/11/Kont/PSJ-DAU/BM/DPUPRPKPD/VIII/2023	23-Aug-23	641,840,251.00	537,669,578.32		537,669,578.32			537,669,578.32				
57	Pembuatan Jembatan Gantung Betania Desa Wawopada	622/03/SPK/PL-BM/DPUPRPKPD/XII/2023	12-Apr-23	99,764,000.00	49,882,000.00		49,882,000.00		49,882,000.00	-				
58	Pembuatan Jembatan Gantung Desa Gontara	622/22/SPK/PL-BM/DPUPRPKPD/VII/2023	7-Mar-23	185,800,000.00	185,800,000.00		185,800,000.00			185,800,000.00				
59	Pembangunan Jembatan Gantung Desa Lemo Tahap I	622/22/SPK/PL-BM/DPUPRPKPD/XII/2023	12-Jan-23	91,932,000.00	91,932,000.00		91,932,000.00			91,932,000.00				
60	Pembuatan Tambangan Penyebrangan Desa Mayumba	622/28/SPK/PL-BM/DPUPRPKPD/VII/2023	18-Jul-23	92,823,000.00	46,411,500.00		46,411,500.00		46,411,500.00	-				
61	Pembangunan Jembatan Dalam Desa Tomata	622/32/SPK/PL-BM/DPUPRPKPD/XII/2023	12-Jul-23	119,825,000.00	59,912,500.00		59,912,500.00		59,912,500.00	-				
62	Perencanaan Rekonstruksi Tugu Rujab, Depan Pasar dan Koramil	04/SPK/PL/PR/PPK01-CK/DPUPRPKPD/MU/VII/2023	7-Apr-23	39,778,000.00	39,778,000.00		39,778,000.00			39,778,000.00				
63	Perencanaan Penanggulangan Longsoran Sungai La'a (Kawasan Desa Sampalowo, Moleono, Onepute	610/01/SPK/APBD-P/KONSULTAN-PERC/DPUPRPKPD-SDA/MU/	24-Nov-23	89,260,000.00	89,260,000.00		89,260,000.00			89,260,000.00				
64	Perencanaan Rehab Bendung D.I Wara'a	610/01/SPK/KNSLTN/DPUPRPKPD-SDA/MU/VI/2023	6-Dec-23	99,800,000.00	99,800,000.00		99,800,000.00		99,800,000.00	-				
65	Reviu Perencanaan Jembatan Parangisi	620/01/Kont/Konsult-APBD/BM/DPUPRPKPD/IX/2023	25-Sep-23	198,040,650.00	198,040,650.00		198,040,650.00			198,040,650.00				
66	Perencanaan Teknis Jembatan Wata Desa Lemowalia	620/02/Kont/Konsult-APBD/BM/DPUPRPKPD/IX/2023	25-Sep-23	248,800,950.00	248,800,950.00		248,800,950.00			248,800,950.00				
67	Perencanaan Jl. SP3 Jl. Negara-Beteleme Tua	622/10.a/SPK/KNSLTN/PL/APBD/DPUPRPKPD/VI/2023	6-Sep-23	99,900,000.00	99,900,000.00		99,900,000.00			99,900,000.00				
68	Peningkatan Jalan dan Drainase Belakang Rujab Ketua DPRD, Bagi PT. TIMUR PUTRA CELEBES	620/02/Kont/BM/APBD/DPUPRPKPD/XI/2023	30-Aug-23	567,000,000.00	369,287,100.00		369,287,100.00		369,287,100.00	-				
69	Pembangunan Jembatan Gantung Dusun Pandiri Desa Peonea Kec. Mori Atas.(DAU)	610/03.a/SPK/APBD/PL/DPUPRPKPD-SDA/MU/V/2024	28 MEI 2024	149,589,000.00	149,589,000.00		149,589,000.00	149,589,000.00		149,589,000.00				
70	Pembangunan Jembatan Kawuyu Dusun 2 Desa Uemasi Kec. Bungku Utara, Bagi CV. TEKNIK MEMBANGUN MANDIRI	622/19/SPK/PL-BM/DPUPRPKPD/VI/2024	'07-06-2024	194,704,000.00	194,704,000.00		194,704,000.00	194,704,000.00		194,704,000.00				
71	Pembangunan Jembatan Dusun III Desa Bimor Jaya Kec. Petasia Timur, Bagi CV. PUTRA MANDIRI	622/113/SPK/PL-BM/DPUPRPKPD/V/2024	'28-05-2024	194,823,000.00	169,897,050.00		169,897,050.00	169,897,050.00		169,897,050.00	24,925,950.00			

Lampiran XVIII

NO.	URAIAN	KONTRAK			NILAI SP2D	PERENCANAAN & PENGAWASAN	TOTAL REALISASI	MUTASI TAHUN 2024		KDP PER 31 DESEMBER 2024	SISA KONTRAK	BAST		KET
		NOMOR KONTRAK	TANGGAL	NILAI KONTRAK				BERTAMBAH	BERKURANG			TANGGAL	NO. BAST	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 + 7	10	11	12	13	14	15	16
72	Pembuatan Jembatan Desa Soyo Jaya, Bagi CV. STAR WORK MANDIRI	622/38/SPK/PL-BM/DPUPRPKPD/VI/2024	'26-06-2024	194,830,000.00	194,830,000.00		194,830,000.00	194,830,000.00		194,830,000.00	-			
73	Pembangunan Jembatan Dusun II Petambata Desa Tingkeao Kec. Lembo, Bagi CV. PUTRA BINTANG PRATAMA	622/41/SPK/PL-BM/DPUPRPKPD/VI/2024	26-06-2024	194,874,000.00	194,874,000.00		194,874,000.00	194,874,000.00		194,874,000.00	-			
74	Peningkatan Jalan Lingkar Gereja Pasar Desa Maralee Kec. Petasia Barat, Bagi CV. GEOVANI KARYA PERDANA	622/41/SPK/PL-BM/DPUPRPKPD/VI/2024	15-09-2024	199,567,000.00	99,783,500.00		99,783,500.00	99,783,500.00		99,783,500.00	99,783,500.00			
75	Pembangunan Jembatan Gantung Pu'untaipa Sungai Tambalako Tahap I Kec. Lembo, Bagi CV. PUTRA BINTANG PRATAMA	622/35/SPK/KNSL/PL-BM/DPUPRPKPD/X/2024	30-10-2024	199,576,000.00	199,576,000.00	49,889,000.00	249,465,000.00	249,465,000.00		249,465,000.00	-			
76	Jembatan Gantung Togo Desa Tingkeao Kec. Lembo, Bagi CV. BAYU DITA NUGRAHA	622/11/SPK/PL-BM/DPUPRPKPD/XI/2024	20-Nov-24	199,808,000.00	199,808,000.00		199,808,000.00	199,808,000.00		199,808,000.00	-			
77	Pekerjaan Rabat Beton Jalan Langkuala Desa Wawopada, Bagi CV. GEOVANI KARYA PERDANA	10/SPK/PL-P/PPK2-PER/DPUPRPKPD/MU/XII/2024	05-12-2024	146,861,000.00	117,723,000.00		117,723,000.00	117,723,000.00		117,723,000.00	29,138,000.00			
78	Pembangunan Jembatan Dusun I Desa Petumbea Kec. Lembo Raya, Bagi CV. EDEMOR RADHIKA AGRAPANA	620/23/Kont/PSJ-DAU/BM/DPUPRPKPD/VII/2024	01-07-2024	408,504,932.00	408,504,932.00		408,504,932.00	408,504,932.00		408,504,932.00	-			
79	Pembangunan Jalan Produksi Peternakan Desa Mandula Kec. Lembo Raya, Bagi CV. SYABAN	620/34/Kont/PSJ-DAU/BM/DPUPRPKPD/IX/2024	17-09-2024	442,300,057.00	342,111,517.00		342,111,517.00	342,111,517.00		342,111,517.00	100,188,540.00			

Lampiran XVIII

NO.	URAIAN	KONTRAK			NILAI SP2D	PERENCANAAN & PENGAWASAN	TOTAL REALISASI	MUTASI TAHUN 2024		KDP PER 31 DESEMBER 2024	SISA KONTRAK	BAST		KET
		NOMOR KONTRAK	TANGGAL	NILAI KONTRAK				BERTAMBAH	BERKURANG			TANGGAL	NO. BAST	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 + 7	10	11	12	13	14	15	16
80	Peningkatan Jalan Produksi Mandula Kec. Lembo Raya, Bagi CV. PUNCAK SONGI	620/41/Kont/PSJ-DAU/BM/DPUPRPKPD/IX/2024	30-Sep-24	403,805,032.00	403,805,032.00		403,805,032.00	403,805,032.00		403,805,032.00	-			
81	Pembangunan Jembatan Puawu Tahap II Desa Wawopada Kec. Lembo, Bagi CV. PUTRA BINTANG PRATAMA	620/06/Kont/PSJ-DAU/BM/DPUPRPKPD/IV/2024	19-04-2024	645,610,000.00	645,610,000.00		645,610,000.00	645,610,000.00		645,610,000.00	-			
82	Pembangunan Jembatan Pu'awu Desa Wawopada Tahap 1 Kecamatan Lembo	620/11/Kont/PSJ-DAU/BM/DPUPRPKPD/VIII/2023	23-Aug-23		261,166,126.00		261,166,126.00	261,166,126.00	156,995,453.26	104,170,672.74				
83	Pembangunan Jembatan Koronjaya Dusun 1 RT. 01 Desa Peleru Kec. Mori Utara, CV. SOFINDO PRIMA KONSTRUKSI	620/26/Kont/PSJ-DAU/BM/DPUPRPKPD/VIII/2024	29-08-2024	927,345,473.00	278,203,642.00		278,203,642.00	278,203,642.00		278,203,642.00	649,141,831.00			
84	Peningkatan Jalan SP3 Jln Provinsi - Taronggo Kec. Bungku Utara, Bagi CV. TEGUH MANDIRI	620/28/Kont/PSJ-DAU/BM/DPUPRPKPD/IX/2024	09-09-2024	1,566,083,700.00	810,221,310.00	39,960,000.00	850,181,310.00	850,181,310.00		850,181,310.00	755,862,390.00			
85	Peningkatan Jalan Baturube - Uewajo Kec. Bungku Utara, Bagi CV. TEKNIK MEMBANGUN MANDIRI	620/37/Kont/PSJ-DAU/BM/DPUPRPKPD/IX/2024	19-09-2024	1,951,843,400.00	1,059,150,220.00	49,950,000.00	1,109,100,220.00	1,109,100,220.00		1,109,100,220.00	892,693,180.00			
86	Pembangunan Jembatan Dusun I dan Dusun II Desa Lembobelala Kec. Lembo Raya, Bagi CV. LAMBARA SENTOSA ABADI	620/42/KONT/PSJ-DAU/BM/DPUPRPKPD/IX/2024	19-09-2024	4,115,748,700.00	1,851,259,880.00	99,930,000.00	1,951,189,880.00	1,951,189,880.00		1,951,189,880.00	2,264,488,820.00			
87	Peningkatan Jalan Wo'omparigi - Tambarobone Kec. Bungku Utara, Bagi CV. TEGUH MANDIRI	620/27/Kont/PSJ-DAU/BM/DPUPRPKPD/IX/2024	09-09-2024	2,116,401,600.00	1,737,858,980.00	54,957,000.00	1,792,815,980.00	1,792,815,980.00		1,792,815,980.00	378,542,620.00			
88	Pembangunan Jalan Uempanapa - Lemowalia (TMMD) yang berlokasi di Kec. Bungku Utara	620/11/SPK/PL/BM/DPUPRPKPD/IX/2024	26-Sep-24		1,400,000,000.00	70,000,000.00	1,470,000,000.00	1,470,000,000.00		1,470,000,000.00				
89	Lanjutan Air Bersih Dalam Kota Kolonodale, Bagi PT. TIMUR JAYA KONSTRUKSI	532/05/Kont/PPK/CK/DPUPRPKPD/MU/VIII/2024	16-08-2024	11,236,537,930.62	8,848,773,620.00	293,006,700.00	9,141,780,320.00	9,141,780,320.00		9,141,780,320.00	2,387,764,310.62			
90	Pembuatam Jembatan Dusun 3 Tananagaya Kec.Mamosalato, Bagi CV. RIZKY ABADI	622/14/SPK/PL-BM/DPUPRPKPD/XII/2024	10 DESEMBER 2024	99,885,000.00	76,112,100.00		76,112,100.00	76,112,100.00		76,112,100.00	23,772,900.00			
91	Pembangunan Jembatan Kayu Era Kec. Mori Utara, Bagi CV. BAYU DITA NUGRAHA	622/07/SPK/APBD-BM/DPUPRPKPD/XI/2024	15-Nov-25	124,000,000.00	119,911,150.00		119,911,150.00	119,911,150.00		119,911,150.00	4,088,850.00			
92	Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jembatan Gantung Desa Lemo Dusun Kondo Kec. Bungku Utara, Bagi CV. CHELSI PERDANA	622/12/SPK/PL-BM/DPUPRPKPD/XI/2024	20-Nov-25	174,857,000.00	174,857,000.00		174,857,000.00	174,857,000.00		174,857,000.00	-			
93	Pembangunan Rujab Camat Bungku Utara	16/SPK/PL/PPK-CK/DPUPRPKPD/MU/VI/2024	28-Jun-24	149,737,000.00	149,737,000.00		149,737,000.00	149,737,000.00		149,737,000.00	-			
94	Pembangunan Kantor Camat Kec. Mamosalato, Bagi CV. GEOVANI KARYA PERDANA	532/08/Kont/PPK/CK/DPUPRPKPD/MU/IX/2024	25-Sep-24		1,358,239,096.00	99,678,000.00	1,457,917,096.00	1,457,917,096.00		1,457,917,096.00				
95	Perencanaan Kawasan Permukiman Kec. Lembo 5 Desa	01/SPK/PL-PR/PPK-PER/DPUPRPKPD/MU/X/2024	1-Oct-24	79,809,000.00	79,809,000.00		79,809,000.00	79,809,000.00		79,809,000.00				

Lampiran XVIII

NO.	URAIAN	KONTRAK			NILAI SP2D	PERENCANAAN & PENGAWASAN	TOTAL REALISASI	MUTASI TAHUN 2024		KDP PER 31 DESEMBER 2024	SISA KONTRAK	BAST		KET
		NOMOR KONTRAK	TANGGAL	NILAI KONTRAK				BERTAMBAH	BERKURANG			TANGGAL	NO. BAST	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 + 7	10	11	12	13	14	15	16
96	Perencanaan Kawasan Permukiman Kec. Petasia Barat (5 Desa), Bagi CV. GEOMETRIC KONSULTAN TEKNIK	02/SPK/PL/PPK-PER/DPUPRPKPD/MU/X/2024	29-Oct-24	79,809,000.00	79,809,000.00		79,809,000.00	79,809,000.00		79,809,000.00				
97	Perencanaan Jalan Lingkungan Desa Momo	'02/SPK/PL/PR/PPK-PER/DPUPRPKPD/MU/IV/2024	1-Oct-24	99,678,000.00	99,678,000.00		99,678,000.00	99,678,000.00		99,678,000.00				
98	Perencanaan Rehabilitasi Air Bersih Baturube, Bagi CV. CIVIL GIGATAMA CONSULTANT	02/SPK/PL-GR/PR/PPK-CK/DPUPRPKPD/MU/VIII/2024	1-Oct-24	99,855,000.00	99,855,000.00		99,855,000.00	99,855,000.00		99,855,000.00				
99	Perencanaan Pembangunan Tugu Pemilu Bermartabat Desa Manyoe, Bagi CV. MALEO ART	03/SPK/PL-PG/PR/PPK-CK/DPUPRPKPD/MU/IX/2024	24-Sep-24	24,996,000.00	24,996,000.00		24,996,000.00	24,996,000.00		24,996,000.00				
100	Perencanaan Pagar Dan Halaman SD Neg 1 Desa Tirongan Bawah Kec. Bungku Utara, Bagi CV. ALL DESIGN CONSULTAN	01/SPK/PL-P/PR/PPK-CK/DPUPRPKPD/MU/XI/2024	15-Nov-24	29,970,000.00	29,970,000.00		29,970,000.00	29,970,000.00		29,970,000.00				
101	Perencanaan TPST Kab. Morowali Utara, Bagi CV. GEOMETRIC KONSULTAN TEKNIK	530/04/Kont/PR/PPK/CK/DPUPRPKPD/MU/X/2024	11 OKTOBER 2024	393,994,500.00	393,994,500.00		393,994,500.00	393,994,500.00		393,994,500.00				
102	Perencanaan Interior Kantor Bupati, Bagi CV. TRITEK KONSULTAN	03/SPK/PL/PR/PPK-CK/DPUPRPKPD/MU/VIII/2024	1-Aug-24	99,778,000.00	99,778,000.00		99,778,000.00	99,778,000.00		99,778,000.00				
103	DED Air Baku (Intake dan Jaringan Transmisi) Sungai Masara, Bagi CV. TRI JAYA	530/02/Kont/PR/PPK/CK/DPUPRPKPD/MU/X/2024	9 OKTOBER 2024	957,097,500.00	957,097,500.00		957,097,500.00	957,097,500.00		957,097,500.00				
104	Perencanaan Kantor Gabungan Dinas 4 Lantai, Bagi PT ARETAS WICAKSANA KONSULTAN	530/01/Kont/PR/PPK/CK/DPUPRPKPD/MU/VIII/2024	'29-08-2024	1,209,480,420.00	1,209,480,420.00		1,209,480,420.00	1,209,480,420.00		1,209,480,420.00				
105	Perencanaan Jalan Lingkungan Desa Tirongan Bawah Kec Bungku Utara, Bagi CV. GRAFIKA REKA CIPTA KONSULTAN	02/SPK/PL-P/PR/PPK2-PER/DPUPRPKPD/MU/XII/2024	2 DESEMBER 2024	24,963,900.00	24,963,900.00		24,963,900.00	24,963,900.00		24,963,900.00				
106	Perencanaan Jalan Lingkungan Desa Kalombang Kec. Bungku Utara, Bagi CV. GRAFIKA REKA CIPTA KONSULTAN	01/SPK/PL-P/PR/PPK2-PER/DPUPRPKPD/MU/XII/2024	2 DESEMBER 2024	29,970,500.00	29,970,500.00		29,970,500.00	29,970,500.00		29,970,500.00				
107	Perencanaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Taliwan	610/17/SPK/APBDP/PL/DPUPRPKPD-SDA/XII/2024	13 DESEMBER 2024	69,913,000.00	69,913,000.00		69,913,000.00	69,913,000.00		69,913,000.00				
108	Perencanaan Kawasan Pemukiman Kec. Petasia Timur (5 Desa), Bagi CV. LIMA DIMENSI			79,864,500.00	79,864,500.00		79,864,500.00	79,864,500.00		79,864,500.00				
C	**DINAS KESEHATAN DAERAH**													
1	PENGADAAN PUSLING PERAIRAN ANUTOLUWU T.A 2019	440/033/SPK/DINKES/VII/2019	31-Jul-19	59,895,000.00	59,895,000.00		59,895,000.00			59,895,000.00				
2	PEMBANGUNAN GEDUNG PUSKESMAS MAYUMBA	01/Kont/PembPus/Dinkes/VII/2018	5-Jul-18	2,832,578,000.00	2,832,578,000.00		2,832,578,000.00			2,832,578,000.00				
3	PEMBANGUNAN GEDUNG PUSKESMAS ANUTOLUWU		31-Dec-19	2,410,855,749.00	2,410,855,749.00		2,410,855,749.00		2,410,855,749.00	-				
4	PEMBANGUNAN GEDUNG PUSKESMAS PETUMBEA		31-Dec-19	2,202,925,000.00	2,202,925,000.00	101,293,050.00	2,202,925,000.00	1,385,696,626.00		3,588,621,626.00				

Lampiran XVIII

NO.	URAIAN	KONTRAK			NILAI SP2D	PERENCANAAN & PENGAWASAN	TOTAL REALISASI	MUTASI TAHUN 2024		KDP PER 31 DESEMBER 2024	SISA KONTRAK	BAST		KET
		NOMOR KONTRAK	TANGGAL	NILAI KONTRAK				BERTAMBAH	BERKURANG			TANGGAL	NO. BAST	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 + 7	10	11	12	13	14	15	16
5	PEMBANGUNAN POSKESDES WINANGABINO KECAMATAN MAMOSALATO TAHUN 2016	049/SPK-PPK/DINKES-KBD/VII/2016	19 JULI 2016	101,504,100.00	101,504,100.00		101,504,100.00			101,504,100.00				
6	PERENCANAAN PEMBANGUNAN POSKESDES WINANGABINO	440/09/PPK-SPK/DINKES-KB/III/2016	11/3/2016	17,495,000.00	17,495,000.00		17,495,000.00			17,495,000.00				
7	Perencanaan Pembangunan Pagar PKM Kolonodale	440/01.a/SPK/PLJS/PPK.2/DINKES/XI/2020	9-Nov-20	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00			30,000,000.00				
8	BELANJA PERENCANAAN PRASARANA RUANGAN RAWAT INAP DAN LAUNDRY RS PRATAMA	440/015/PPK/DINKES/XII/2023	1-Dec-23	99,372,750.00	99,372,750.00		99,372,750.00			99,372,750.00				
9	LANJUTAN PEMBANGUNAN PUSKESMAS PANCAMAKMUR	440/008/PPK/PKM/DINKES/2024			1,305,001,320.00	101,320,800.00	1,406,322,120.00	1,406,322,120.00		1,406,322,120.00				
D	**RSUD KOLONODALE**													
1	Perencanaan Pembangunan Gedung Ponek	445/062.a/SPK/PL/Konslt-PRC/RSUD Kodal/III/2014	20 Maret 2014	29,880,000.00	29,880,000.00		29,880,000.00			29,880,000.00				
2	Pembangunan Gedung VIP/VVIP	445/13/PPK.01/RSUD. K. DALE/XII/2022	12/13/2022	36,921,448,126.00	5,538,217,219.00	1,603,776,000.00	7,141,993,219.00		12,289,630,111.04	-				
3	Pembangunan Gedung VIP/VVIP (PEN)	445/02/PPK-VVIP/RSUD K.Dale/X/2023	10/20/2023	31,367,192,598.20	17,722,322,092.91	815,104,000.00	18,537,426,092.91		18,537,426,092.91	-				
E	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**													
1	PEKERJAAN USB SLA/SEDERAJAT PETASIA BARAT	425/63.a/SPK-PM/Disdikbudpora/DAU/2016	16-Aug-16	456,400,000.00	136,920,000.00		136,920,000.00			136,920,000.00				
2	PERENCANAAN MASTER PLAN SDN 1 KOLONODALE	04/SP-KONT/DISDIKBUD/DAU/VIII/2019/	5-Aug-19	148,472,000.00	148,472,000.00		148,472,000.00			148,472,000.00				
3	Pembangunan Kantor SDN Tomui Karya	37/SPK/PPK-1/PL/DISDIKBUD/XI/2020	11/Nov/2020.	149,735,000.00	44,920,500.00		44,920,500.00			-				
4	RKB SDN PEBOA (REHAB 4 RUANG)	821/100/Kont-TD/DISDIKBUD/DAK/VIII/2021	8/16/2021	449,730,551.00	82,419,165.00		82,419,165.00			-				
5	Rehabilitasi Ruang Kelas Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Perabotnya SD Inpres Koya 3 (Tiga) Ruang	821/95/Kont-TD/DAK/DISDIKBUD/VII/2021	26-Jul-21	328,793,710.00	94,438,113.00		94,438,113.00			-				
6	Pembangunan Ruang Kelas SDN 1 Kolonodale	25/SP/TEND./PPK/DISDIKBUD/IX/2021	30-Sep-21	1,121,880,000.00	560,940,000.00	39,974,000.00	600,914,000.00			-				
7	Pembangunan Rumah Guru SDN Menyoe	13/SPK/PL/PPK-2/DISDIKBUD/VIII/2021	6-Aug-21	149,725,000.00	74,862,500.00		74,862,500.00			-				
8	Pembangunan Rumah Guru Kelas Jauh SD Padalempe	15/SPK/PL/PPK-2/DISDIKBUD/VIII/2021	8/6/2021	199,663,000.00	99,831,500.00		99,831,500.00			-				
9	PENGADAAN PERABOT SDN PEBOA	821/100/Kont-TD/DISDIKBUD/DAK/VIII/2021	8/16/2021	52,500,000.00	52,500,000.00		52,500,000.00			15,400,000.00				

Lampiran XVIII

NO.	URAIAN	KONTRAK			NILAI SP2D	PERENCANAAN & PENGAWASAN	TOTAL REALISASI	MUTASI TAHUN 2024		KDP PER 31 DESEMBER 2024	SISA KONTRAK	BAST		KET
		NOMOR KONTRAK	TANGGAL	NILAI KONTRAK				BERTAMBAH	BERKURANG			TANGGAL	NO. BAST	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 + 7	10	11	12	13	14	15	16
10	PENGADAAN PERABOT SDN KOYA	821/95/Kont-TD/DAK/DISDIKBUD/VII/2021	26-Jul-21	4,200,000.00	4,200,000.00		4,200,000.00			4,200,000.00				
11	Pekerjaan Pembangunan Pagar SDN 2 KOLONODALE	19/SPK/PL/PPK/DISDIKBUD/XI/2022	30-Nov-22	92,835,000.00	55,701,000.00	7,000,000.00	62,701,000.00			-				
F	**BAG. ADM. PEMERINTAHAN UMUM**									-				
1	Perencanaan Gedung Serba Guna Kecamatan Mori Atas, Lembo,Soyo Jaya,Petasia,Petasia Barat,Mamosalato,dan Bungku Utara	30.c/SPK/PL/Konslt-Prc/ADPEM-OTDA/X/2017	10/10/2017	49,700,000.00	49,700,000.00		49,700,000.00			49,700,000.00				
2	Perencanaan Gedung Kantor Kecamatan Petasia Lembo, Mori Atas Mamosalato,dan Soyo Jaya	30.a/SPK/PL/Konslt-PRC/ADPEM-OTDA/X/2017	10/10/2017	49,800,000.00	49,800,000.00		49,800,000.00			49,800,000.00				
3	Pembangunan Asrama Mahasiswa Kab. Morowali Utara Di Palu	012/KONT/PT.KSO/ADPEM-OTDA/MU/VI/2018	26 JUNI 2018	4,230,088,000.00	846,017,600.00	146,470,000.00	992,487,600.00			992,487,600.00				
4	Perencanaan Pembangunan Rumah Jabatan Camat Petasia, Camat Lembo dan Rujab Camat Mori Atas T.A 2019	1.20/005-SPK/Perencanaan/Adpem-Otda/V/2019	31/05/2019	41,120,000.00	41,120,000.00		41,120,000.00			41,120,000.00				
G	**DINAS PERHUBUNGAN, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**													
1	PEKERJAAN FASIBILLITY STUDY PELABUHAN PETI KEMAS KAB. MOROWALI UTARA T.A 2017	01/SP/DPPKPD/APBDP-PERHUB/X/2017	26/10/2017	835,065,000.00	835,065,000.00		835,065,000.00			835,065,000.00				
2	PERENCANAAN PEMBANGUNAN RUMAH DINAS PELABUHAN KOLO BAWAH KEC. MAMOSALATO KAB. MOROWALI UTARA T.A 2017	05.A/KONSL-PPK/SPK/PL.PERHUB/DPPKPD/III/2017	23/03/2017	19,900,000.00	19,900,000.00		19,900,000.00			19,900,000.00				
3	PEMBANGUNAN RUMAH SINGGAH/TRANSIT PENUMPANG PELABUHAN PENYEBERANGAN SILITI	550/046/KNT/PL-APBDP-BP/DISHUB-MU/XI/2024	19-Nov-24	199,981,000.00	58,806,000.00		58,806,000.00	58,806,000.00		58,806,000.00	141,175,000.00			
4	PEMBANGUNAN MUSHOLLAH PELABUHAN PENYEBRANGAN KOLONODALE	550/042/KNT/PL-APBDP-BP/DISHUB-MU/XI/2024	19-Nov-24	199,953,000.00	102,473,000.00		102,473,000.00	102,473,000.00		102,473,000.00	97,480,000.00			
5	PEMBANGUNAN MUSHOLLAH PELABUHAN PENYEBRANGAN SILITI	550/043/KNT/PL-APBDP-BP/DISHUB-MU/XI/2024	19-Nov-24	199,969,000.00	141,420,000.00		141,420,000.00	141,420,000.00		141,420,000.00	58,549,000.00			
6	PEMBUATAN TOILET UMUM PELABUHAN PENYEBERANGAN KOLONODALE	550/049/KNT/PL-APBDP-BP/DISHUB-MU/XII/2024	17-Dec-24	199,947,000.00	121,380,000.00		121,380,000.00	121,380,000.00		121,380,000.00	78,567,000.00			
H	**DINAS PERIKANAN DAERAH**													
1	Perencanaan Rehab PPI Kolonodale Lokasi Kelurahan Bahoue Kecamatan Petasia	01/SPK/PL-CSPR/DPPKD/III/2015	19/03/2015	17,950,000.00	17,950,000.00		17,950,000.00			17,950,000.00				
2	Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Desain Ice Flake Lokasi Desa Bungintimbe, Kec. Petasia Timur, Kab. Morowali Utara	26/SPK-DPPA/PPK/DIPERIKDA-SEK/XI/ 2017	6/11/2017	49,630,000.00	49,630,000.00		49,630,000.00			49,630,000.00				
I	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**													
1	Perencanaan Pembangunan Gudang Peralatan dan Logistik	360/17/SPK/PL/Konslt-PRC/BPBD/XI/2017	6/11/2017	49,280,000.00	49,280,000.00		49,280,000.00		49,280,000.00	-				

Lampiran XVIII

NO.	URAIAN	KONTRAK			NILAI SP2D	PERENCANAAN & PENGAWASAN	TOTAL REALISASI	MUTASI TAHUN 2024		KDP PER 31 DESEMBER 2024	SISA KONTRAK	BAST		KET
		NOMOR KONTRAK	TANGGAL	NILAI KONTRAK				BERTAMBAH	BERKURANG			TANGGAL	NO. BAST	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 + 7	10	11	12	13	14	15	16
2	PERENCANAAN PASCA BENCANA TERSEBAR DI 10 KECAMATAN	360/26/SPK/PL/KONSULT-PRC/BPBD/XI/2018	9-Nov-18	99,850,000.00	99,850,000.00		99,850,000.00			99,850,000.00				
3	Peninggian Badan Jalan Desa Togo Mulya	01.a/KONT/PPK-BPBD/MU/X/2024	9-Oct-24	3,917,400,000.00	2,938,050,666.00		2,938,050,666.00	2,938,050,666.00		2,938,050,666.00				
J	**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**													
1	PEMBANGUNAN RIOL DI DESA LEMOWALIA KEC. BUNGKU UTARA	13/SPK-PL/PPK-PL/DNKT/IV/2018	12-Apr-18	44,846,700.00	44,846,700.00		44,846,700.00			44,846,700.00				
K	**DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA**									-				
1	PEKERJAAN PEMBOKARAN BATU LOKASI WISATA PASANGGRAHAN KM3	556/01-DST/SPK-DAK/DISPARPORA/VIII/2020	24-Aug-20	149,990,000.00	89,994,000.00		89,994,000.00			89,994,000.00				
2	PEMBANGUNAN PANGGUNG KESENIAN WISATA PASANGGRAHAN KM3	556/08-DST/SPK-DAK/DISPARPORA/VIII/2020	28-Aug-20	199,990,000.00	71,763,900.00		71,763,900.00			71,763,900.00				
3	PEMBANGUNAN PLAZA PUSAT JAJANAN/ KULINER WISATA PASANGGARAHAN KM3	556/10-DST/SPK-DAK/DISPARPORA/VIII/2020	31-Aug-20	103,000,000.00	36,964,600.00		36,964,600.00			36,964,600.00				
4	Pekerjaan Pembangunan Ruang Ganti/Toilet Wisata Pasanggrahan KM 3	556/07-DST/SPK-DAK/DISPARPORA/VIII/2020	31-Aug-20	155,660,000.00	55,856,700.00		55,856,700.00			55,856,700.00				
5	PEMBONGKARAN BATU JALAN MASUK LOKASI WISATA PASANGRRAHAN KM3	556/02-DST/SPK-DAK/DISPARPORA/VIII/2020	27-Aug-20	122,800,000.00	86,144,200.00		86,144,200.00			86,144,200.00				
L	**BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN**									-				
1	Pemasangan Lampu Jalan Desa Saemba, Kec. Mori Atas	540/18-LIS/SPK/DPDE/IV/2015	04 Juni 2015	24,462,130.00	24,462,130.00		24,462,130.00			24,462,130.00				
M	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH**									-				
1	Perencanaan Pembangunan MPP	01/Kont/Konsult-PR/PPK/DPMPTSP/MU/IX/2023	9/27/2023	394,324,000.00	394,324,000.00		394,324,000.00			394,324,000.00				
2	Pembangunan Gedung MALL Pelayanan Publik	800/01/Kont/PPK/DPMPTSPD/MU/VII/2024	7/5/2024	9,287,696,514.18	9,287,696,514.18	294,821,550.00	9,582,518,064.18	9,582,518,064.18		9,582,518,064.18				
N	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH**									-				
1	PERENCANAAN TANGGUL DAN PEMATANGAN LAHAN GEDUNG LAYANAN PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH KEC. PETASIA	11/SPK/PL-P/PR/PPK/DISPUSARDA/MU/XII/2023	12/13/2023	99,901,000.00	99,901,000.00		99,901,000.00		99,901,000.00	-				
2	PEMBANGUNAN KANTOR LAYANAN PERPUSTAKAAN DAERAH (KANTOR PERPUSTAKAAN) FISIK 8.051.062.500 LAND CLEARING 99.660.000	04.1/KONT-DAK/PPK/DISPUSARDA/MU/VII/2024	7/2/2024	9,909,000,000.00	8,051,062,500.00	913,463,000.00	8,964,525,500.00	8,964,525,500.00		8,964,525,500.00				
O	**BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**									-				
1	PERENCANAAN TEMPAT AIR WUDHU DAN TOILET (MCK) MASJID/MUSHOLLAH NURUL QOLBI KANTOR BUPATI	01/SPK/PL-P/PL/PPK/KESRA/MU/XI/2023	2/11/2023	49,966,000.00	49,966,000.00		49,966,000.00		49,966,000.00	-				
								50,184,048,151.18	**49,423,314,307.20**	**82,807,703,692.84**				

LAMPIRAN XlX :

DAFTAR RINCIAN ASET LAIN – LAIN RUSAK BERAT

DAFTAR ASET LAIN-LAIN PER 31 DESEMBER 2024

Lampiran XIX

Nama Bidang Barang	Aset Lainnya Per 31 Des 2024							Aset Lainnya Per 31 Des 2024
	Aset Kondisi Rusak Berat/ Hilang/Lainnya				Aset dimanfaatkan Pihak Lain			
	Aset Kondisi Per 31 Des 2023	Bertambah	Berkurang	Aset Kondisi Per 31 Des 2024	Saldo Awal	Bertambah/ Berkurang	Aset Dimanfaatkan Per 31 Des 2024	
TANAH	3,165,009,000.00	-	-	3,165,009,000.00	-	-	-	3,165,009,000.00
PERALATAN DAN MESIN	-	-	-	-	-	-	-	-
a. Alat-Alat Besar	12,000,000.00	-	-	12,000,000.00	-	-	-	12,000,000.00
b. Alat-alat Angkutan	241,675,000.00		-	241,675,000.00	-	-	-	241,675,000.00
c. Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	6,600,000.00	-	-	6,600,000.00	-	-	-	6,600,000.00
d. Alat-alat Pertanian/Peternakan	133,878,000.00	-	-	133,878,000.00	-	-	-	133,878,000.00
e. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	2,969,272,170.00	-	-	2,969,272,170.00	-	-	-	2,969,272,170.00
f. Alat-alat Studio dan Komunikasi	296,773,550.00		-	296,773,550.00	-	-	-	296,773,550.00
g. Alat-alat Kedokteran	2,800,460,098.00		-	2,800,460,098.00	-	-	-	2,800,460,098.00
h. Alat-alat Laboratorium	3,892,694,617.00		-	3,892,694,617.00	-	-	-	3,892,694,617.00
i. Alat-alat Keamanan	-	-	-	-	-	-	-	-
j. Komputer	389,873,410.00	8,500,000.00	-	398,373,410.00	-	-	-	398,373,410.00
k. Peralatan Olahraga	14,707,000.00	-	-	14,707,000.00				14,707,000.00
GEDUNG DAN BANGUNAN	-	-	-	-	-	-	-	-
a. Bangunan Gedung	73,258,620,769.26	3,058,283,000.00	-	76,316,903,769.26	-	-	-	76,316,903,769.26
b. Bangunan Monumen	-	-	-	-	-	-	-	-
JALAN JARINGAN DAN IRIGASI	-	-	-	-	-	-	-	-
a. Jalan dan Jembatan	2,903,002,364.00	-	-	2,903,002,364.00	-	-	-	2,903,002,364.00
b. Bangunan Air/Irigasi	338,409,000.00	-	-	338,409,000.00	-	-	-	338,409,000.00
c. Instalasi	11,982,486.00	-	-	11,982,486.00	-	-	-	11,982,486.00
d. Jaringan	273,619,000.00	-	-	273,619,000.00	-	-	-	273,619,000.00
ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-	-
a. Buku Perpustakaan	849,470,368.00	-	-	849,470,368.00	-	-	-	849,470,368.00
b. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	279,850,000.00	-	-	279,850,000.00	-	-	-	279,850,000.00
c. Hewan Ternak dan Tumbuhan	-	-	-	-	-	-	-	-
d. Aset Renovasi	1,787,732,000.00	-	-	1,787,732,000.00	-	-	-	1,787,732,000.00
KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	-	-	-	-	-	-	-	-
ASET TAK BERWUJUD	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L	**93,625,628,832.26**	**3,066,783,000.00**	**-**	**96,692,411,832.26**	**-**	**-**	**-**	**96,692,411,832.26**



LAMPIRAN XX :

DAFTAR AKUMULASI AMORTISASI ATAS ASET TIDAK BERWUJUD (ATB)

DAFTAR AKUMULASI AMORTISASI ATAS ASET TIDAK BERWUJUD (ATB)

TAHUN 2024

Lampiran XX

NO.	KODE BARANG	NAMA PEKERJAAN	NILAI PEROLEHAN	TAHUN PEROLEHAN	MASA MANFAAT	Akumulasi Amortisasi Per 31 Des 2023	NILAI BUKU PER 31 DES 2023	BEBAN AMORTISASI 2024	SISA MASA MANFAAT PER 2024	Akumulasi Amortisasi Per 31 Des 2024	NILAI BUKU PER 31 DES 2024
1	2	5	7	8	9	11	12	10	11	12	13
1	7.24.1.1.1	INSTALASI DAN KONFIGURASI SERVER	24,400,000.00	2015	5	24,400,000.00	-	-	0	24,400,000.00	-
2	7.24.1.1.1	MODUL SIM PERIZINAN TERPADU	113,600,000.00	2015	5	113,600,000.00	-	-	0	113,600,000.00	-
3	7.24.1.1.1	SOFTWARE	84,500,000.00	2015	5	84,500,000.00	-	-	0	84,500,000.00	-
4	7.24.1.1.1	SISTEM INFORMASI MANAGMEN TERPADU DAERAH	59,000,000.00	2016	5	59,000,000.00	-	-	0	59,000,000.00	-
5	7.24.1.1.1	SISTEM INFORMASI MANAGMEN PERENCANAAN BASIS WEBSITE DPPKAD	63,500,000.00	2016	5	63,500,000.00	-	-	0	63,500,000.00	-
6	7.24.1.1.1	SISTEM SERVER WIN 2008 SERVER	14,701,500.00	2016	5	14,701,500.00	-	-	0	14,701,500.00	-
7	7.24.1.1.1	OS CLIENT WIN 7 PROFESSIONAL 32 BIT	6,094,000.00	2016	5	6,094,000.00	-	-	0	6,094,000.00	-
8	7.24.1.1.1	SISTEM MANAGMEN TERPADU BAG. UMUM & WEBSITE BAG. UMUM	47,000,000.00	2016	5	47,000,000.00	-	-	0	47,000,000.00	-
9	7.24.1.1.1	SOFTWARE SISTEM INFORMASI	29,900,000.00	2016	5	29,900,000.00	-	-	0	29,900,000.00	-
10	7.24.1.1.1	PERANGKAT LUNAK SISTEM OPERASI (APLIKASI E-BUDGETING)	198,275,000.00	2017	5	198,275,000.00	-	-	0	198,275,000.00	-
11	7.24.1.1.1	PERANGKAT LUNAK SISTEM OPERASI(APLIKASI E-DEV. PLAN)	178,640,000.00	2017	5	178,640,000.00	-	-	0	178,640,000.00	-
12	7.24.1.1.1	PERANGKAT LUNAK SISTEM OPERASI(APLIKASI E-MUSRENBANG)	198,165,000.00	2017	5	198,165,000.00	-	-	0	198,165,000.00	-
13	7.24.1.1.1	SISTEM INFORMASI TERPADU	35,000,000.00	2017	5	35,000,000.00	-	-	0	35,000,000.00	-
14	7.24.1.1.1	SISTEM INFORMASI TERPADU	46,990,000.00	2017	5	46,990,000.00	-	-	0	46,990,000.00	-
15	7.24.1.1.1	SISTEM INFORMASI TERPADU CCTV	46,990,000.00	2017	5	46,990,000.00	-	-	0	46,990,000.00	-
16	7.24.1.1.1	SISTEM INFORMASI TERPADU	46,000,000.00	2017	5	46,000,000.00	-	-	0	46,000,000.00	-
17	7.24.1.1.1	SISTEM INFORMASI TERPADU	46,990,000.00	2017	5	46,990,000.00	-	-	0	46,990,000.00	-

Lampiran XX

NO.	KODE BARANG	NAMA PEKERJAAN	NILAI PEROLEHAN	TAHUN PEROLEHAN	MASA MANFAAT	Akumulasi Amortisasi Per 31 Des 2023	NILAI BUKU PER 31 DES 2023	BEBAN AMORTISASI 2024	SISA MASA MANFAAT PER 2024	Akumulasi Amortisasi Per 31 Des 2024	NILAI BUKU PER 31 DES 2024
18	7.24.1.1.1	SISTEM INFORMASI TERPADU	46,990,000.00	2017	5	46,990,000.00	-	-	0	46,990,000.00	-
19	7.24.1.1.1	SISTEM INFORMASI TERPADU	70,555,450.00	2017	5	70,555,450.00	-	-	0	70,555,450.00	-

Lampiran XX

NO.	KODE BARANG	NAMA PEKERJAAN	NILAI PEROLEHAN	TAHUN PEROLEHAN	MASA MANFAAT	Akumulasi Amortisasi Per 31 Des 2023	NILAI BUKU PER 31 DES 2023	BEBAN AMORTISASI 2024	SISA MASA MANFAAT PER 2024	Akumulasi Amortisasi Per 31 Des 2024	NILAI BUKU PER 31 DES 2024
20	7.24.1.1.1	CD RPP	1,700,000.00	2017	5	1,700,000.00	-	-	0	1,700,000.00	-
21	7.24.1.1.1	KASET PERANGKAT PEMBELAJARAN PENGETAHUAN UMUM KUR 2013 (KLS I-IV)	1,980,000.00	2017	5	1,980,000.00	-		0	1,980,000.00	-
22	7.24.1.1.1	KASET PERANGKAT PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM KUR 2013 (KLS I-IV) 7	1,980,000.00	2017	5	1,980,000.00	-	-	0	1,980,000.00	-
23	7.24.1.1.1	PENGADAAN APLIKASI MASTER PLAN UNTUK BAGIAN PERENCANAAN DAN PROGRAM	6,000,000.00	2017	5	6,000,000.00	-		0	6,000,000.00	-
24	7.24.1.1.2	CV. MOIKO, PENGADAAN ALAT BANTU KEAMANAN CCTV (SISTEM INFORMASI)	35,000,000.00	2018	5	35,000,000.00	-		0	35,000,000.00	-
25	7.24.1.1.3	PENGADAAN APLIKASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN SERTA PERANGKATNYA	150,700,000.00	2018	5	150,700,000.00	-		0	150,700,000.00	-
26	7.24.1.1.4	PENGADAAN APLIKASI PENGELOLAAN OBAT	59,015,000.00	2018	5	59,015,000.00	-		0	59,015,000.00	-
27	7.24.1.1.3	PT. PRIMA MITRA UTAMA ATAS APLIKASI SIM BPHTB	139,920,000.00	2020	5	111,936,000.00	27,984,000	27,984,000	0	139,920,000.00	-
28	1.5.3.1.1.5.1	APLIKASI E-SIG PBB (PT. PRIMA MITRA UTAMA)	141,223,500.00	2022	5	56,489,400.00	84,734,100	28,244,700	2	84,734,100.00	56,489,400.00
29	7.24.1.1.3	APLIKASI E-SIMPADA (PT. PRIMA MITRA UTAMA)	141,223,500.00	2022	5	56,489,400.00	84,734,100	28,244,700	2	84,734,100.00	56,489,400.00

Lampiran XX

NO.	KODE BARANG	NAMA PEKERJAAN	NILAI PEROLEHAN	TAHUN PEROLEHAN	MASA MANFAAT	Akumulasi Amortisasi Per 31 Des 2023	NILAI BUKU PER 31 DES 2023	BEBAN AMORTISASI 2024	SISA MASA MANFAAT PER 2024	Akumulasi Amortisasi Per 31 Des 2024	NILAI BUKU PER 31 DES 2024
30	7.24.1.1.3	CD PEMBELAJARAN	2,500,000.00	2020	5	2,000,000.00	500,000	500,000	0	2,500,000.00	-
31	1.5.3.1.1.5.1	Platform/Framework Aplikasi DNA SIMRS	360,800,000.00	2021	5	216,480,000.00	144,320,000	72,160,000	1	288,640,000.00	72,160,000.00
32	1.5.3.1.1.5.1	Aplikasi Mobile Android/IOS	76,780,000.00	2021	5	46,068,000.00	30,712,000	15,356,000	1	61,424,000.00	15,356,000.00
33	1.5.3.1.1.5.1	SISTEM INFORMASI DAERAH RAWAN BENCANA	49,990,000.00	2022	5	19,996,000.00	29,994,000	9,998,000	2	29,994,000.00	19,996,000.00
34	5.3.1.1.5.1	SISTEM INFORMASI PELAPORAN DAN VERIFIKASI PERTANGGUNGJAWABAN APBD KABUPATEN MOROWALI UTARA (SIAPKASI)	24,950,000.00	2023	5	415,833.33	24,534,166.67	415,833.33	3	831,666.66	24,118,333.34
35	5.3.1.1.5.1	APLIKASI SISTEM PENANGANAN LAPORAN DAN PENGADUAN MASYARAKAT	50,000,000.00	2023	5	833,333.33	49,166,666.67	833,333.33	3	1,666,666.66	48,333,333.34
36	5.3.1.1.5.1	APLIKASI SISTEM PERSURATAN (E-OFFICE)INSPEKTORAT	50,000,000.00	2023	5	833,333.33	49,166,666.67	833,333.33	3	1,666,666.66	48,333,333.34
37	5.3.1.1.5.1	APLIKASI SITAMU (SISTEM TENAGA KERJA MOROWALI UTARA)	124,455,000.00	2024	5			2,074,250.00	4	2,074,250.00	122,380,750.00
38	5.3.1.1.5.1	APLIKASI TEREKAM DAN BENTUK MIKRO LAINNYA	54,914,700.00	2024	5			915,245.00	4	915,245.00	53,999,455.00
			2,830,422,650.00			**2,125,207,249.99**	**525,845,700.01**	**187,559,394.99**		**2,312,766,644.98**	**517,656,005.02**



LAMPIRAN XXI :

DAFTAR AKUMULASI PENYUSUTAN

ASET LAINNYA

AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA

Lampiran XXI

NO	KODE ASET	NAMA ASET	NILAI PEROLEHAN	PENYUSUTAN 1-Jan-2024	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-DEC-2024	NILAI BUKU
					SEMESTER I	SEMESTER II		
			90,469,119,832.26	10,492,196,949.28	5,398,512.00	3,191,965.00	10,500,787,426.28	79,968,332,405.98
1	1.3.2.1.3.4.2	ELECTRIC GENERATING SET	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00
2	1.3.2.10.1.1.2	KOMPUTER JARINGAN	43,625,000.00	43,625,000.00	0.00	0.00	43,625,000.00	0.00
3	1.3.2.10.1.2.2	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	313,100,000.00	217,525,003.00	0.00	0.00	217,525,003.00	95,574,997.00
4	1.3.2.10.2.3.3	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	36,070,000.00	16,131,667.00	0.00	425,000.00	16,556,667.00	19,513,333.00
5	1.3.2.10.2.2.16	PERALATAN MINI KOMPUTER	5,578,410.00	4,515,910.00	0.00	0.00	4,515,910.00	1,062,500.00
6	1.3.2.19.1.2.2	PERALATAN PERMAINAN	13,607,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,607,000.00
7	1.3.2.19.1.6.5	PERALATAN OLAH RAGA LAINNYA	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
8	1.3.2.2.1.4.1	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA	221,675,000.00	213,509,523.00	5,398,512.00	2,766,965.00	221,675,000.00	0.00
9	1.3.2.2.3.1.6	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR UNTUK BARANG	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00
10	1.3.2.3.1.3.4	ELECTRIC GENERATING SET	500,000.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
11	1.3.2.3.1.9.17	PERKAKAS PABRIK ES	6,100,000.00	3,050,000.00	0.00	0.00	3,050,000.00	3,050,000.00
12	1.3.2.4.1.4.5	ALAT PENYIMPAN HASIL PERCOBAAN PERTANIAN	13,800,000.00	13,800,000.00	0.00	0.00	13,800,000.00	0.00
13	1.3.2.4.1.5.15	ALAT LABORATORIUM PERTANIAN	119,478,000.00	119,478,000.00	0.00	0.00	119,478,000.00	0.00
14	1.3.2.4.1.8.29	ALAT PRODUKSI PERIKANAN	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
15	1.3.2.5.1.1.2	MESIN KETIK	12,648,000.00	12,648,000.00	0.00	0.00	12,648,000.00	0.00
16	1.3.2.5.1.4.28	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	144,963,550.00	142,644,382.00	0.00	0.00	142,644,382.00	2,319,168.00
17	1.3.2.5.1.5.88	Alat Kantor Lainnya	195,760,600.00	194,115,600.00	0.00	0.00	194,115,600.00	1,645,000.00
18	1.3.2.5.2.1.50	Meubeleur lainnya	2,400,552,794.94	2,150,289,843.28	0.00	0.00	2,150,289,843.28	250,262,951.66
19	1.3.2.5.2.2.1	Jam Mekanis	397,015.00	397,015.00	0.00	0.00	397,015.00	0.00
20	1.3.2.5.2.3.7	Alat Pembersih lainnya	20,845,554.00	20,845,554.00	0.00	0.00	20,845,554.00	0.00
21	1.3.2.5.2.4.6	ALAT PENDINGIN	32,695,250.00	32,695,250.00	0.00	0.00	32,695,250.00	0.00
22	1.3.2.5.2.5.8	ALAT DAPUR	5,771,000.00	5,771,000.00	0.00	0.00	5,771,000.00	0.00
23	1.3.2.5.2.6.77	ALAT DAPUR	89,039,100.00	86,989,100.00	0.00	0.00	86,989,100.00	2,050,000.00
24	1.3.2.5.3.1.4	MEJA KERJA PEJABAT	25,652,803.00	25,652,802.00	0.00	0.00	25,652,802.00	1.00
25	1.3.2.5.3.3.4	KURSI KERJA PEJABAT	6,789,853.06	6,789,853.00	0.00	0.00	6,789,853.00	0.06
26	1.3.2.5.3.6.6	KURSI TAMU DI RUANGAN PEJABAT	23,156,650.00	23,156,650.00	0.00	0.00	23,156,650.00	0.00
27	1.3.2.5.3.7.7	LEMARI DAN ARSIP PEJABAT	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	0.00	11,000,000.00	0.00
28	1.3.2.6.1.1.36	PERALATAN STUDIO AUDIO	242,882,090.00	239,882,090.00	0.00	0.00	239,882,090.00	3,000,000.00
29	1.3.2.6.1.2.38	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM	32,136,070.00	23,986,070.00	0.00	0.00	23,986,070.00	8,150,000.00

Lampiran XXI

NO	KODE ASET	NAMA ASET	NILAI PEROLEHAN	PENYUSUTAN 1-Jan-2024	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-DEC-2024	NILAI BUKU
					SEMESTER I	SEMESTER II		
30	1.3.2.6.2.1.6	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE	21,755,390.00	21,755,390.00	0.00	0.00	21,755,390.00	0.00
31	1.3.2.7.1.1.5	ALAT KEDOKTERAN UMUM	1,904,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,904,200,000.00
32	1.3.2.7.1.11.9	ALAT KEDOKTERAN POLIKLINIK	8,886,000.00	8,886,000.00	0.00	0.00	8,886,000.00	0.00
33	1.3.2.7.1.12.31	ALAT KESEHATAN REHABILITASI MEDIS	172,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,500,000.00
34	1.3.2.7.1.13.5	ALAT KEDOKTERAN NEUROLOGI (SYARAF)	354,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,000,000.00
35	1.3.2.7.1.18.29	Monographie Device	41,369,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,369,998.00
36	1.3.2.7.1.19.70	ALAT KEDOKTERAN NUKLIR	73,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000,000.00
37	1.3.2.7.1.2.135	ALAT KEDOKTERAN GIGI	90,000,000.00	90,000,000.00	0.00	0.00	90,000,000.00	0.00
38	1.3.2.7.1.21.22	ALAT KEDOKTERAN GAWAT DARURAT	150,654,100.00	122,354,100.00	0.00	0.00	122,354,100.00	28,300,000.00
39	1.3.2.7.1.5.13	ALAT KESEHATAN KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN	5,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850,000.00
40	1.3.2.8.1.11.3	ALAT LABORATORIUM UMUM	597,150,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	594,150,000.00
41	1.3.2.8.1.12.42	ALAT LABORATORIUM MICROBIOLOGI	58,150,000.00	8,150,000.00	0.00	0.00	8,150,000.00	50,000,000.00
42	1.3.2.8.1.13.122	ALAT LABORATORIUM KIMIA	29,937,000.00	19,022,469.00	0.00	0.00	19,022,469.00	10,914,531.00
43	1.3.2.8.1.14.22	ALAT LABORATORIUM PATOLOGI	86,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,500,000.00
44	1.3.2.8.1.17.15	ALAT LABORATORIUM FILM	6,000,000.00	3,750,000.00	0.00	0.00	3,750,000.00	2,250,000.00
45	1.3.2.8.1.18.43	ALAT LABORATORIUM MAKANAN	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00
46	1.3.2.8.1.20.18	ALAT LABORATORIUM FISIKA	29,922,000.00	19,012,938.00	0.00	0.00	19,012,938.00	10,909,062.00
47	1.3.2.8.1.41.62	ALAT LABORATORIUM PERTANIAN	10,450,000.00	10,450,000.00	0.00	0.00	10,450,000.00	0.00
48	1.3.2.8.1.48.14	ALAT LABORATORIUM BIOLOGI	29,916,000.00	19,009,125.00	0.00	0.00	19,009,125.00	10,906,875.00
49	1.3.2.8.2.3.59	GENERAL LABORATORY TOOL	238,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,200,000.00
50	1.3.2.8.3.1.2	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : BAHASA INDONESIA	14,943,000.00	13,285,800.00	0.00	0.00	13,285,800.00	1,657,200.00
51	1.3.2.8.3.10.17	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : KESENIAN	98,656,000.00	62,470,565.00	0.00	0.00	62,470,565.00	36,185,435.00
52	1.3.2.8.3.11.4	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : OLAH RAGA	109,456,500.00	61,465,675.00	0.00	0.00	61,465,675.00	47,990,825.00
53	1.3.2.8.3.14.5	ALAT PERAGA KEJURUAN	1,929,213,129.00	641,857,188.00	0.00	0.00	641,857,188.00	1,287,355,941.00
54	1.3.2.8.3.2.50	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : MATEMATIKA	228,329,988.00	148,904,717.00	0.00	0.00	148,904,717.00	79,425,271.00
55	1.3.2.8.3.3.33	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA DASAR	96,363,000.00	63,692,800.00	0.00	0.00	63,692,800.00	32,670,200.00
56	1.3.2.8.3.4.49	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA LANJUTAN	22,750,000.00	5,304,166.00	0.00	0.00	5,304,166.00	17,445,834.00

Lampiran XXI

NO	KODE ASET	NAMA ASET	NILAI PEROLEHAN	PENYUSUTAN 1-Jan-2024	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-DEC-2024	NILAI BUKU
					SEMESTER I	SEMESTER II		
57	1.3.2.8.3.6.39	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA ATAS	7,920,000.00	7,920,000.00	0.00	0.00	7,920,000.00	0.00
58	1.3.2.8.3.7.2	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPS	44,841,000.00	29,114,400.00	0.00	0.00	29,114,400.00	15,726,600.00
59	1.3.2.8.3.9.4	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : KETERAMPILAN	4,347,000.00	4,347,000.00	0.00	0.00	4,347,000.00	0.00
60	1.3.2.8.4.2.1	MODULAR COUNTING AND SCIENTIFIC ELECTRONIC	249,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,000,000.00
61	1.3.3.1.1.1.2	BANGUNAN GEDUNG KANTOR	1,811,525,399.00	1,100,638,067.00	0.00	0.00	1,100,638,067.00	710,887,332.00
62	1.3.3.1.1.10.5	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN	67,060,399,915.25	3,208,664,278.00	0.00	0.00	3,208,664,278.00	63,851,735,637.25
63	1.3.3.1.1.12.1	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	272,097,000.00	50,791,440.00	0.00	0.00	50,791,440.00	221,305,560.00
64	1.3.3.1.1.13.1	BANGUNAN GEDUNG UNTUK POS JAGA	74,747,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,747,000.00
65	1.3.3.1.1.16.1	BANGUNAN GEDUNG PERPUSTAKAAN	101,154,480.00	10,115,448.00	0.00	0.00	10,115,448.00	91,039,032.00
66	1.3.3.1.1.18.2	BANGUNAN GEDUNG TERMINAL/PELABUHAN/BANDARA	371,683,750.01	39,039,424.00	0.00	0.00	39,039,424.00	332,644,326.01
67	1.3.3.1.1.2.14	BANGUNAN GUDANG	25,000,000.00	5,083,333.00	0.00	0.00	5,083,333.00	19,916,667.00
68	1.3.3.1.1.30.5	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA	149,945,000.00	11,245,875.00	0.00	0.00	11,245,875.00	138,699,125.00
69	1.3.3.1.1.34.1	BANGUNAN PABRIK	49,927,000.00	8,321,167.00	0.00	0.00	8,321,167.00	41,605,833.00
70	1.3.3.1.1.37.1	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA	2,619,122,625.00	142,306,698.00	0.00	0.00	142,306,698.00	2,476,815,927.00
71	1.3.3.1.1.5.4	BANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM	127,522,000.00	20,616,057.00	0.00	0.00	20,616,057.00	106,905,943.00
72	1.3.3.1.1.6.19	BANGUNAN KESEHATAN	445,848,600.00	176,100,600.00	0.00	0.00	176,100,600.00	269,748,000.00
73	1.3.3.1.1.9.1	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PERTEMUAN	149,648,000.00	1,247,067.00	0.00	0.00	1,247,067.00	148,400,933.00
74	1.3.4.1.1.3.1	JALAN KABUPATEN	1,204,814,850.00	712,276,850.00	0.00	0.00	712,276,850.00	492,538,000.00
75	1.3.4.1.1.5.2	JALAN DESA	1,653,316,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,653,316,000.00
76	1.3.4.1.2.9.8	JEMBATAN PADA JALAN KHUSUS	44,871,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,871,514.00
77	1.3.4.2.3.1.1	BANGUNAN WADUK PENGEMBANGAN RAWA	288,559,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,559,000.00
78	1.3.4.2.6.6.1	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU LAINNYA	49,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,850,000.00
79	1.3.4.3.1.5.5	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU LAINNYA	6,992,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,992,486.00
80	1.3.4.3.6.1.4	INSTALASI GARDU LISTRIK INDUK	4,990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,990,000.00
81	1.3.4.4.1.1.4	JARINGAN PEMBAWA	273,619,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,619,000.00

Lampiran XXI

NO	KODE ASET	NAMA ASET	NILAI PEROLEHAN	PENYUSUTAN 1-Jan-2024	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-DEC-2024	NILAI BUKU
					SEMESTER I	SEMESTER II		
82	1.3.5.1.1.1.6	BUKU UMUM	762,325,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	762,325,268.00
83	1.3.5.1.1.3.5	BUKU AGAMA	5,439,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,439,820.00
84	1.3.5.1.1.4.5	BUKU ILMU SOSIAL	14,618,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,618,580.00
85	1.3.5.1.1.5.4	BUKU ILMU BAHASA	7,930,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,930,800.00
86	1.3.5.1.1.6.3	BUKU MATEMATIKA DAN PENGETAHUAN ALAM	24,340,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,340,500.00
87	1.3.5.1.1.7.5	BUKU ILMU PENGETAHUAN PRAKTIS	4,617,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,617,340.00
88	1.3.5.1.1.8.9	BUKU ARSITEKTUR, KESENIAN, OLAH RAGA	8,820,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,820,320.00
89	1.3.5.1.1.9.3	BUKU GEOGRAFI, BIOGRAFI, SEJARAH	5,537,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,537,740.00
90	1.3.5.1.3.1.2	BAHAN KARTOGRAFI	15,840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,840,000.00
91	1.3.5.2.1.1.3	ALAT MUSIK	279,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,850,000.00
92	1.3.5.7.1.1.7	ASET TETAP DALAM RENOVASI	1,787,732,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,787,732,000.00



LAMPIRAN XXII :

D A F T A R R I N C I A N U T A N G B E L A N J A

DAFTAR UTANG TAHUN ANGGARAN 2024

Lampiran XXII

NO	UTANG	SALDO UTANG 2023	KOREKSI UTANG 2023/PENGHAPUSAN	NILAI UTANG 2023 SEHARUSNYA	REALISASI UTANG DI 2024	UTANG YG BLM DITERIMA PER 31 DES 2024	UTANG 2024	SALDO UTANG 2024
1	2	3	4	5	6	7 = 5- 6	8	9 = 7 + 8
	UTANG BELANJA							
I	**DINKES**							
1	Rehab Ringan Pustu Tambarobone Tahun 2015 CV. Bayu Persada Abadi	1,498,000.00	-	1,498,000.00	-	1,498,000.00	-	1,498,000.00
2	Rehab Ringan Poskesdes Taende Tahun 2015 CV. Widya Karya	1,499,500.00	-	1,499,500.00	-	1,499,500.00	-	1,499,500.00
3	Pembangunan Rumah Dokter/Dokter Gigi Panca Makmur CV.Alwan Sari	14,657,950.00	-	14,657,950.00	-	14,657,950.00	-	14,657,950.00
4	Pembangunan Unit Gawat darurat Puskesmas Molino tahun 2015 CV. Serayu Indah	9,999,000.00	-	9,999,000.00	-	9,999,000.00	-	9,999,000.00
5	Rehab Ringan Pustu Sumara Jaya CV. Adsal	1,499,500.00	-	1,499,500.00	-	1,499,500.00	-	1,499,500.00
6	Rehab Ringan Poskesdes Togo Mulya Tahun 2015 CV. Istana Laut	1,498,500.00	-	1,498,500.00	-	1,498,500.00	-	1,498,500.00
7	Sisa Pembayaran retensi 5% Pembuatan Pagar Poskesdes Tabarano CV.PUTRA LABUA PERKASA	7,022,200.00	-	7,022,200.00	-	7,022,200.00	-	7,022,200.00
8	Sisa Pembayaran retensi 5% Rumah Medis PKM Anontoluwu CV.YAYAT MANDIRI PRATAMA	8,895,200.00	-	8,895,200.00	-	8,895,200.00	-	8,895,200.00
9	Penyesuaian atas Pengakuan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Instalasi Air Muka Tanah serta Aset Tetap Tanah Bangunan Pengairan (100%) pada Retensi 5% CV.SATRIA JAYA	3,510,850.00	-	3,510,850.00	-	3,510,850.00	-	3,510,850.00
10	PEMBAYARAN 100% CV. POTAL REKAYASA ATAS PEKERJAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PUSKESMAS MAMPU PONED BATURUBE	114,600.00		114,600.00	-	114,600.00		114,600.00
	SUB JUMLAH 1	**50,195,300.00**	**-**	**50,195,300.00**	**-**	**50,195,300.00**	**-**	**50,195,300.00**
II	**DINAS PERTANIAN**							
1	Pembuatan Saluran Air Kolam, Lokasi BBI Desa Korowalelo Kec. Lembo CV. Mutiara 81	1,996,000.00	-	1,996,000.00	-	1,996,000.00	-	1,996,000.00
2	Pembuatan Embung (Bak Penampung Air) Lokasi Desa Korompeli Kecamatan, Lembo CV. Mulhy Pratama	2,097,000.00	-	2,097,000.00	-	2,097,000.00	-	2,097,000.00
3	Rehabilitasi Lantai Kantor BP3K Lokasi Desa Pambarea Kecamatan, Mori Atas CV. Danda Utama	1,147,300.00	-	1,147,300.00	-	1,147,300.00	-	1,147,300.00
4	Rumah Jaga Balai Benih desa Togomulya Retensi 5% CV.ANI KARYA	3,597,500.00	-	3,597,500.00	-	3,597,500.00	-	3,597,500.00
	SUB JUMLAH II	**8,837,800.00**	**-**	**8,837,800.00**	**-**	**8,837,800.00**	**-**	**8,837,800.00**
III	**KESRA**							
1	Pekerjaan Timbunan Jalan Pasar Desa Mohoni Retensi 5% CV.GUNUG BROMO	4,590,000.00	-	4,590,000.00	-	4,590,000.00	-	4,590,000.00
2	Tunjangan Fusngsional ASN	-	-	-	-	-	21,300,000.00	21,300,000.00
	SUB JUMLAH III	**4,590,000.00**	**-**	**4,590,000.00**	**-**	**4,590,000.00**	**21,300,000.00**	**25,890,000.00**
IV	**PERPUSTAKAAN**							

Lampiran XXII

NO	UTANG	SALDO UTANG 2023	KOREKSI UTANG 2023/PENGHAPUSAN	NILAI UTANG 2023 SEHARUSNYA	REALISASI UTANG DI 2024	UTANG YG BLM DITERIMA PER 31 DES 2024	UTANG 2024	SALDO UTANG 2024
1	2	3	4	5	6	7 = 5- 6	8	9 = 7 + 8
1	(Kor15 - Koreksi SP2D yang masih ada pada rekening koran Bendahara Pengeluaran yang belum dibayarkan sebesar: 2. Dinas Perpustakaan - Rp600,00 - Gaji Pokok PNS 3. Dinas Perpustakaan - Rp56.580,00 - Jasa Lembur)	57,180.00	-	57,180.00	57,180.00	-	-	-
2	Tunjangan Fusngsional ASN	-	-	-	-	-	13,400,000.00	13,400,000.00
	SUB JUMLAH IV	**57,180.00**	**-**	**57,180.00**	**57,180.00**	**-**	**13,400,000.00**	**13,400,000.00**
V	**PUSKESMAS TOMATA**							
1	(Kor15 - Koreksi SP2D yang masih ada pada rekening koran Bendahara Pengeluaran yang belum dibayarkan sebesar: 1. Puskesmas Tomata - Rp39.000.000,00 - Honorarium Tenaga Administrasi)	39,000,000.00	-	39,000,000.00	39,000,000.00	-		-
	SUB JUMLAH V	**39,000,000.00**	**-**	**39,000,000.00**	**39,000,000.00**	**-**	**-**	**-**
VI	**INSPEKTORAT**							
1	(Kor15 - Koreksi SP2D yang masih ada pada rekening koran Bendahara Pengeluaran yang belum dibayarkan sebesar: 4. Inspektorat Daerah - Rp6.745,00 - Honor tim pelaksana kegiatan)	6,745.00	-	6,745.00	-	6,745.00		6,745.00
	SUB JUMLAH VI	**6,745.00**	**-**	**6,745.00**	**-**	**6,745.00**	**-**	**6,745.00**
VII	**SEKRETARIAT DPRD**							
1	(Kor45 - Koreksi atas utang belanja modal sebesar Rp2.381.375.017,87 atas 6 pembayaran paket pekerjaan konstruksi yang memiliki progres fisik diatas nilai pembayaran Sekretariat DPRD - Pembangunan Gedung - Rp1.091.503,20)	1,091,503.20	-	1,091,503.20	-	1,091,503.20		1,091,503.20
2	Tunjangan Fusngsional PPPK	-	-	-	-	-	20,540,000.00	20,540,000.00
	SUB JUMLAH VII	**1,091,503.20**	**-**	**1,091,503.20**	**-**	**1,091,503.20**	**20,540,000.00**	**21,631,503.20**
VIII	**DPUPRD**							
1	* (Kor45 - Koreksi atas utang belanja modal sebesar Rp2.381.375.017,87 atas 6 pembayaran paket pekerjaan konstruksi yang memiliki progres fisik diatas nilai pembayaran Dinas PU - Pembangunan Jembatan pada Jalan Kabupaten - Rp172.370.669,86). * (Kor45 - Koreksi atas utang belanja modal sebesar Rp2.381.375.017,87 atas 6 pembayaran paket pekerjaan konstruksi yang memiliki progres fisik diatas nilai pembayaran Dinas PU - Jalan Kabupaten - Rp18.471.100,00) *(Kor64 - Koreksi atas utang belanja jasa pengawasan pembangunan sebesar Rp99.500.000,00 (Dinas PU)	286,341,769.86	-	286,341,769.86	286,341,769.86	-		-
2	Pembangunan Tanggul Pengaman dan Riol Kel.Bahoue CV.REZKI DZAHRA MANDIRI	4,822,931.00		4,822,931.00	4,822,931.00	-		-
3	Pembangunan Gedung Islmaic Center Fisik 100% CV. RIWALI						839,712,587.00	839,712,587.00
4	Tunjangan Fusngsional PPPK						14,200,000.00	14,200,000.00
	SUB JUMLAH VIII	**291,164,700.86**	**-**	**291,164,700.86**	**291,164,700.86**	**-**	**853,912,587.00**	**853,912,587.00**
IX	**BPKAD**							
1	Propinsi	8,000,000.00	-	8,000,000.00	-	8,000,000.00		8,000,000.00
2	Tunjangan Fusngsional PPPK	-	-	-	-	-	45,950,000.00	45,950,000.00

Lampiran XXII

NO	UTANG	SALDO UTANG 2023	KOREKSI UTANG 2023/PENGHAPUSAN	NILAI UTANG 2023 SEHARUSNYA	REALISASI UTANG DI 2024	UTANG YG BLM DITERIMA PER 31 DES 2024	UTANG 2024	SALDO UTANG 2024
1	2	3	4	5	6	7 = 5- 6	8	9 = 7 + 8
	SUB JUMLAH IX	**8,000,000.00**	**-**	**8,000,000.00**	**-**	**8,000,000.00**	**45,950,000.00**	**53,950,000.00**
X	**BPBD**							
1	Pembangunan Tanggul Pengaman sungai CV.BUMI MORITO	400,000,000.00	-	400,000,000.00	400,000,000.00	-	-	-
2	Pembangunan Tanggul Pengaman sungai/saluran Lingkugan I Bahontula Fisik 100% CV.RUD MANDIRI PRATAMA	-		-	-	-	72,699,100.00	72,699,100.00
	SUB JUMLAH X	**400,000,000.00**	**-**	**400,000,000.00**	**400,000,000.00**	**-**	**72,699,100.00**	**72,699,100.00**
XI	**PARIWIASATA**							
1	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau dan Fasilitas Bermain serta olahraga CV.OASIS KARYA	40,656,036.00	-	40,656,036.00	-	40,656,036.00	-	40,656,036.00
	SUB JUMLAH XI	**40,656,036.00**	**-**	**40,656,036.00**	**-**	**40,656,036.00**	**-**	**40,656,036.00**
XII	**BAGIAN UMUM**							
1	Pembangunan Toliet/WC	25,950,000.00	-	25,950,000.00	25,950,000.00	-	-	-
2	Tunjangan Fusngsional PPPK	-	-	-	-	-	21,300,000.00	21,300,000.00
	SUB JUMLAH XII	**25,950,000.00**	**-**	**25,950,000.00**	**25,950,000.00**	**-**	**21,300,000.00**	**21,300,000.00**
XIII	**BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**							
1	Tunjangan Fusngsional PPPK		-	-	-		1,800,000.00	1,800,000.00
	SUB JUMLAH XIII	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,800,000.00**	**1,800,000.00**
XIV	**BKD**							
1	Tunjangan Fusngsional PPPK		-	-	-		17,750,000.00	17,750,000.00
	SUB JUMLAH XIV	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**17,750,000.00**	**17,750,000.00**
XV	**PENDAPATAN**							
1	Tunjangan Fusngsional PPPK		-	-	-		5,400,000.00	5,400,000.00
	SUB JUMLAH XV	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5,400,000.00**	**5,400,000.00**
XVI	**BAPPEDA**							
1	Tunjangan Fusngsional PPPK		-	-	-		21,300,000.00	21,300,000.00
	SUB JUMLAH XVI	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**21,300,000.00**	**21,300,000.00**
XVII	**BAGIAN BARANG DAN JASA**							
1	Tunjangan Fusngsional PPPK		-	-	-		21,560,000.00	21,560,000.00
	SUB JUMLAH XVII	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**21,560,000.00**	**21,560,000.00**
XVIII	**KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							
1	Tunjangan Fusngsional PPPK		-	-	-		10,500,000.00	10,500,000.00
	SUB JUMLAH XVIII	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10,500,000.00**	**10,500,000.00**
XIX	**KOPERASI**							
1	Tunjangan Fusngsional PPPK		-	-	-		10,650,000.00	10,650,000.00
	SUB JUMLAH XIX	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10,650,000.00**	**10,650,000.00**

Lampiran XXII

NO	UTANG	SALDO UTANG 2023	KOREKSI UTANG 2023/PENGHAPUSAN	NILAI UTANG 2023 SEHARUSNYA	REALISASI UTANG DI 2024	UTANG YG BLM DITERIMA PER 31 DES 2024	UTANG 2024	SALDO UTANG 2024
1	2	3	4	5	6	7 = 5- 6	8	9 = 7 + 8
XX	**DLHD**							
1	Tunjangan Fusngsional PPPK		-	-	-		17,750,000.00	17,750,000.00
	SUB JUMLAH XX	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**17,750,000.00**	**17,750,000.00**
XXI	**PTSP**							
1	Tunjangan Fusngsional PPPK		-	-	-		3,550,000.00	3,550,000.00
	SUB JUMLAH XXI	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3,550,000.00**	**3,550,000.00**
XXII	**DISHUB**							
1	Tunjangan Fusngsional PPPK		-	-	-		8,900,000.00	8,900,000.00
	SUB JUMLAH XXII	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8,900,000.00**	**8,900,000.00**
XXIII	**PERIKANAN**							
1	Tunjangan Fusngsional PPPK		-	-	-		15,950,000.00	15,950,000.00
	SUB JUMLAH XXIII	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15,950,000.00**	**15,950,000.00**
XXIV	**PERTANIAN**							
1	Tunjangan Fusngsional PPPK		-	-	-		36,700,000.00	36,700,000.00
							36,700,000.00	**36,700,000.00**
XXV	**POL PP**							
1	Tunjangan Fusngsional PPPK		-	-	-		27,600,000.00	27,600,000.00
	SUB JUMLAH XXV	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**27,600,000.00**	**27,600,000.00**
	JUMLAH TOTAL	**843,599,265.06**	**-**	**843,599,265.06**	**730,221,880.86**	**113,377,384.20**	**1,055,401,687.00**	**1,361,889,071.20**



LAMPIRAN XXIII :

DAFTAR RINCIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

DAFTAR AKUMULASI AMORTISASI ATAS ASET TIDAK BERWUJUD (ATB)

TAHUN 2024

Lampiran XX

NO.	KODE BARANG	NAMA PEKERJAAN	NILAI PEROLEHAN	TAHUN PEROLEHAN	MASA MANFAAT	Akumulasi Amortisasi Per 31 Des 2023	NILAI BUKU PER 31 DES 2023	BEBAN AMORTISASI 2024	SISA MASA MANFAAT PER 2024	Akumulasi Amortisasi Per 31 Des 2024	NILAI BUKU PER 31 DES 2024
1	2	5	7	8	9	11	12	10	11	12	13
1	7.24.1.1.1	INSTALASI DAN KONFIGURASI SERVER	24,400,000.00	2015	5	24,400,000.00	-	-	0	24,400,000.00	-
2	7.24.1.1.1	MODUL SIM PERIZINAN TERPADU	113,600,000.00	2015	5	113,600,000.00	-	-	0	113,600,000.00	-
3	7.24.1.1.1	SOFTWARE	84,500,000.00	2015	5	84,500,000.00	-	-	0	84,500,000.00	-
4	7.24.1.1.1	SISTEM INFORMASI MANAGMEN TERPADU DAERAH	59,000,000.00	2016	5	59,000,000.00	-	-	0	59,000,000.00	-
5	7.24.1.1.1	SISTEM INFORMASI MANAGMEN PERENCANAAN BASIS WEBSITE DPPKAD	63,500,000.00	2016	5	63,500,000.00	-	-	0	63,500,000.00	-
6	7.24.1.1.1	SISTEM SERVER WIN 2008 SERVER	14,701,500.00	2016	5	14,701,500.00	-	-	0	14,701,500.00	-
7	7.24.1.1.1	OS CLIENT WIN 7 PROFESSIONAL 32 BIT	6,094,000.00	2016	5	6,094,000.00	-	-	0	6,094,000.00	-
8	7.24.1.1.1	SISTEM MANAGMEN TERPADU BAG. UMUM & WEBSITE BAG. UMUM	47,000,000.00	2016	5	47,000,000.00	-	-	0	47,000,000.00	-
9	7.24.1.1.1	SOFTWARE SISTEM INFORMASI	29,900,000.00	2016	5	29,900,000.00	-	-	0	29,900,000.00	-
10	7.24.1.1.1	PERANGKAT LUNAK SISTEM OPERASI (APLIKASI E-BUDGETING)	198,275,000.00	2017	5	198,275,000.00	-	-	0	198,275,000.00	-
11	7.24.1.1.1	PERANGKAT LUNAK SISTEM OPERASI(APLIKASI E-DEV. PLAN)	178,640,000.00	2017	5	178,640,000.00	-	-	0	178,640,000.00	-
12	7.24.1.1.1	PERANGKAT LUNAK SISTEM OPERASI(APLIKASI E-MUSRENBANG)	198,165,000.00	2017	5	198,165,000.00	-	-	0	198,165,000.00	-
13	7.24.1.1.1	SISTEM INFORMASI TERPADU	35,000,000.00	2017	5	35,000,000.00	-	-	0	35,000,000.00	-
14	7.24.1.1.1	SISTEM INFORMASI TERPADU	46,990,000.00	2017	5	46,990,000.00	-	-	0	46,990,000.00	-

Lampiran XX

NO.	KODE BARANG	NAMA PEKERJAAN	NILAI PEROLEHAN	TAHUN PEROLEHAN	MASA MANFAAT	Akumulasi Amortisasi Per 31 Des 2023	NILAI BUKU PER 31 DES 2023	BEBAN AMORTISASI 2024	SISA MASA MANFAAT PER 2024	Akumulasi Amortisasi Per 31 Des 2024	NILAI BUKU PER 31 DES 2024
15	7.24.1.1.1	SISTEM INFORMASI TERPADU CCTV	46,990,000.00	2017	5	46,990,000.00	-	-	0	46,990,000.00	-
16	7.24.1.1.1	SISTEM INFORMASI TERPADU	46,000,000.00	2017	5	46,000,000.00	-	-	0	46,000,000.00	-
17	7.24.1.1.1	SISTEM INFORMASI TERPADU	46,990,000.00	2017	5	46,990,000.00	-	-	0	46,990,000.00	-
18	7.24.1.1.1	SISTEM INFORMASI TERPADU	46,990,000.00	2017	5	46,990,000.00	-	-	0	46,990,000.00	-
19	7.24.1.1.1	SISTEM INFORMASI TERPADU	70,555,450.00	2017	5	70,555,450.00	-	-	0	70,555,450.00	-

Lampiran XX

NO.	KODE BARANG	NAMA PEKERJAAN	NILAI PEROLEHAN	TAHUN PEROLEHAN	MASA MANFAAT	Akumulasi Amortisasi Per 31 Des 2023	NILAI BUKU PER 31 DES 2023	BEBAN AMORTISASI 2024	SISA MASA MANFAAT PER 2024	Akumulasi Amortisasi Per 31 Des 2024	NILAI BUKU PER 31 DES 2024
20	7.24.1.1.1	CD RPP	1,700,000.00	2017	5	1,700,000.00	-	-	0	1,700,000.00	-
21	7.24.1.1.1	KASET PERANGKAT PEMBELAJARAN PENGETAHUAN UMUM KUR 2013 (KLS I-IV)	1,980,000.00	2017	5	1,980,000.00	-		0	1,980,000.00	-
22	7.24.1.1.1	KASET PERANGKAT PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM KUR 2013 (KLS I-IV) 7	1,980,000.00	2017	5	1,980,000.00	-	-	0	1,980,000.00	-
23	7.24.1.1.1	PENGADAAN APLIKASI MASTER PLAN UNTUK BAGIAN PERENCANAAN DAN PROGRAM	6,000,000.00	2017	5	6,000,000.00	-		0	6,000,000.00	-
24	7.24.1.1.2	CV. MOIKO, PENGADAAN ALAT BANTU KEAMANAN CCTV (SISTEM INFORMASI)	35,000,000.00	2018	5	35,000,000.00	-		0	35,000,000.00	-
25	7.24.1.1.3	PENGADAAN APLIKASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN SERTA PERANGKATNYA	150,700,000.00	2018	5	150,700,000.00	-		0	150,700,000.00	-
26	7.24.1.1.4	PENGADAAN APLIKASI PENGELOLAAN OBAT	59,015,000.00	2018	5	59,015,000.00	-		0	59,015,000.00	-
27	7.24.1.1.3	PT. PRIMA MITRA UTAMA ATAS APLIKASI SIM BPHTB	139,920,000.00	2020	5	111,936,000.00	27,984,000	27,984,000	0	139,920,000.00	-
28	1.5.3.1.1.5.1	APLIKASI E-SIG PBB (PT. PRIMA MITRA UTAMA)	141,223,500.00	2022	5	56,489,400.00	84,734,100	28,244,700	2	84,734,100.00	56,489,400.00

Lampiran XX

NO.	KODE BARANG	NAMA PEKERJAAN	NILAI PEROLEHAN	TAHUN PEROLEHAN	MASA MANFAAT	Akumulasi Amortisasi Per 31 Des 2023	NILAI BUKU PER 31 DES 2023	BEBAN AMORTISASI 2024	SISA MASA MANFAAT PER 2024	Akumulasi Amortisasi Per 31 Des 2024	NILAI BUKU PER 31 DES 2024
29	7.24.1.1.3	APLIKASI E-SIMPADA (PT. PRIMA MITRA UTAMA)	141,223,500.00	2022	5	56,489,400.00	84,734,100	28,244,700	2	84,734,100.00	56,489,400.00
30	7.24.1.1.3	CD PEMBELAJARAN	2,500,000.00	2020	5	2,000,000.00	500,000	500,000	0	2,500,000.00	-
31	1.5.3.1.1.5.1	Platform/Framework Aplikasi DNA SIMRS	360,800,000.00	2021	5	216,480,000.00	144,320,000	72,160,000	1	288,640,000.00	72,160,000.00
32	1.5.3.1.1.5.1	Aplikasi Mobile Android/IOS	76,780,000.00	2021	5	46,068,000.00	30,712,000	15,356,000	1	61,424,000.00	15,356,000.00
33	1.5.3.1.1.5.1	SISTEM INFORMASI DAERAH RAWAN BENCANA	49,990,000.00	2022	5	19,996,000.00	29,994,000	9,998,000	2	29,994,000.00	19,996,000.00
34	5.3.1.1.5.1	SISTEM INFORMASI PELAPORAN DAN VERIFIKASI PERTANGGUNGJAWABAN APBD KABUPATEN MOROWALI UTARA (SIAPKASI)	24,950,000.00	2023	5	415,833.33	24,534,166.67	415,833.33	3	831,666.66	24,118,333.34
35	5.3.1.1.5.1	APLIKASI SISTEM PENANGANAN LAPORAN DAN PENGADUAN MASYARAKAT	50,000,000.00	2023	5	833,333.33	49,166,666.67	833,333.33	3	1,666,666.66	48,333,333.34
36	5.3.1.1.5.1	APLIKASI SISTEM PERSURATAN (E-OFFICE)INSPEKTORAT	50,000,000.00	2023	5	833,333.33	49,166,666.67	833,333.33	3	1,666,666.66	48,333,333.34
37	5.3.1.1.5.1	APLIKASI SITAMU (SISTEM TENAGA KERJA MOROWALI UTARA)	124,455,000.00	2024	5			2,074,250.00	4	2,074,250.00	122,380,750.00
38	5.3.1.1.5.1	APLIKASI TEREKAM DAN BENTUK MIKRO LAINNYA	54,914,700.00	2024	5			915,245.00	4	915,245.00	53,999,455.00
			2,830,422,650.00			**2,125,207,249.99**	**525,845,700.01**	**187,559,394.99**		**2,312,766,644.98**	**517,656,005.02**

LAMPIRAN XXIV :

DAFTAR PENGGUNAAN DANA PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL (PEN)

RINCIAN PENGGUNAAN DANA P E N TAHUN 2024

Lampiran XXIV

No.	Tanggal SP2D	Jenis SP2D	Uraian	Jumlah
1	**2**	**3**	4	5
1	23-Jan-24	72.12/04.0/000001/Pembiayaan/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/2/2024	Pembayaran Kewajiban Pokok Pinjaman Dalam Rangka Mendukung Program PEN Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Periode Bulan Januari 2024	**4,069,700,491.00**
2	22-Feb-24	72.12/04.0/000002/Pembiayaan/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/2/2024	Pembayaran Kewajiban Pokok Pinjaman Dalam Rangka Mendukung Program PEN Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Periode Bulan Februari 2024	**4,069,700,491.00**
3	19-Mar-24	72.12/04.0/000003/Pembiayaan/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/3/2024	Pembayaran Kewajiban Pokok Pinjaman Dalam Rangka Mendukung Program PEN Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Periode Bulan Maret 2024	**4,069,700,491.00**
4	22-Apr-24	72.12/04.0/000004/Pembiayaan/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/4/2024	Pembayaran Kewajiban Pokok Pinjaman Dalam Rangka Mendukung Program PEN Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Periode Bulan April 2024	**4,069,700,491.00**
5	20-May-24	72.12/04.0/000005/Pembiayaan/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/5/2024	Pembayaran Kewajiban Pokok Pinjaman Dalam Rangka Mendukung Program PEN Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Periode Bulan Mei 2024	**4,069,700,491.00**
6	20-Jun-24	72.12/04.0/000006/Pembiayaan/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/6/2024	Pembayaran Kewajiban Pokok Pinjaman Dalam Rangka Mendukung Program PEN Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Periode Bulan Juni 2024	**4,069,700,491.00**
7	19-Jul-24	72.12/04.0/000007/Pembiayaan/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/7/2024	Pembayaran Kewajiban Pokok Pinjaman Dalam Rangka Mendukung Program PEN Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Periode Bulan Juli 2024	**4,069,700,491.00**
8	19-Aug-24	72.12/04.0/000008/Pembiayaan/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/8/2024	Pembayaran Kewajiban Pokok Pinjaman Dalam Rangka Mendukung Program PEN Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Periode Bulan Agustus 2024	**4,069,700,491.00**
9	19-Sep-24	72.12/04.0/000009/Pembiayaan/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/9/2024	Pembayaran Kewajiban Pokok Pinjaman Dalam Rangka Mendukung Program PEN Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Periode Bulan September 2024	**4,069,700,491.00**
10	21-Oct-24	72.12/04.0/000010/Pembiayaan/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/10/2024	Pembayaran Kewajiban Pokok Pinjaman Dalam Rangka Mendukung Program PEN Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Periode Bulan Oktober 2024	**4,069,700,491.00**
11	22-Nov-24	72.12/04.0/000011/Pembiayaan/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/11/2024	Permintaan Pembayaran Kewajiban Pokok Pinjaman Dalam Rangka Mendukung Program PEN Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Periode Bulan November 2024	**4,069,700,491.00**
12	20-Dec-24	72.12/04.0/000012/Pembiayaan/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/12/2024	Pembayaran Kewajiban Pokok Pinjaman Dalam Rangka Mendukung Program PEN Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Periode Bulan Desember 2024	**4,069,700,491.00**
			Jumlah	**48,836,405,892.00**



LAMPIRAN XXV :

DAFTAR RINCIAN DANA BANTUAN

OPERASIONAL SEKOLAH - DAERAH (B O S D A)

REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA DANA BOS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA SEKOLAH / KECAMATAN	TAHAP 1			TAHAP II			TOTAL		
		PENDAPATAN	PENARIKAN	BELANJA	PENDAPATAN	PENARIKAN	BELANJA	PENDAPATAN	PENARIKAN	BELANJA
I	**KEC.BUNGKU UTARA**	**209,220,000.00**	**209,220,000.00**	**209,220,000.00**	**209,220,000.00**	**209,220,000.00**	**209,220,000.00**	**418,440,000.00**	**418,440,000.00**	**418,440,000.00**
1	SD NEGERI 1 BATURUBE	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	10,800,000.00	10,800,000.00	10,800,000.00
2	SD NEGERI 2 BATURUBE	5,760,000.00	5,760,000.00	5,760,000.00	5,760,000.00	5,760,000.00	5,760,000.00	11,520,000.00	11,520,000.00	11,520,000.00
3	SD NEGERI 3 BATURUBE	6,390,000.00	6,390,000.00	6,390,000.00	6,390,000.00	6,390,000.00	6,390,000.00	12,780,000.00	12,780,000.00	12,780,000.00
4	SD NEGERI BOBA	5,760,000.00	5,760,000.00	5,760,000.00	5,760,000.00	5,760,000.00	5,760,000.00	11,520,000.00	11,520,000.00	11,520,000.00
5	SD NEGERI KALOMBANG	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	10,800,000.00	10,800,000.00	10,800,000.00
6	SD NEGERI LEMO	7,800,000.00	7,800,000.00	7,800,000.00	7,800,000.00	7,800,000.00	7,800,000.00	15,600,000.00	15,600,000.00	15,600,000.00
7	SD NEGERI LEMOWALIA	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	14,400,000.00	14,400,000.00	14,400,000.00
8	SD NEGERI LOSONG	8,730,000.00	8,730,000.00	8,730,000.00	8,730,000.00	8,730,000.00	8,730,000.00	17,460,000.00	17,460,000.00	17,460,000.00
9	SD NEGERI MATUBE	7,560,000.00	7,560,000.00	7,560,000.00	7,560,000.00	7,560,000.00	7,560,000.00	15,120,000.00	15,120,000.00	15,120,000.00
10	SD NEGERI MOKOTO	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	10,800,000.00	10,800,000.00	10,800,000.00
11	SD NEGERI POKEANG	6,570,000.00	6,570,000.00	6,570,000.00	6,570,000.00	6,570,000.00	6,570,000.00	13,140,000.00	13,140,000.00	13,140,000.00
12	SD NEGERI POSANGKE	6,390,000.00	6,390,000.00	6,390,000.00	6,390,000.00	6,390,000.00	6,390,000.00	12,780,000.00	12,780,000.00	12,780,000.00
13	SD NEGERI SALUBIRO	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	14,400,000.00	14,400,000.00	14,400,000.00
14	SD NEGERI SILITI	7,830,000.00	7,830,000.00	7,830,000.00	7,830,000.00	7,830,000.00	7,830,000.00	15,660,000.00	15,660,000.00	15,660,000.00
15	SD NEGERI TAMBAROBONE	10,080,000.00	10,080,000.00	10,080,000.00	10,080,000.00	10,080,000.00	10,080,000.00	20,160,000.00	20,160,000.00	20,160,000.00
16	SD NEGERI TINGKULUI	9,270,000.00	9,270,000.00	9,270,000.00	9,270,000.00	9,270,000.00	9,270,000.00	18,540,000.00	18,540,000.00	18,540,000.00
17	SD NEGERI TIRONGAN ATAS	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	10,800,000.00	10,800,000.00	10,800,000.00
18	SD NEGERI TIRONGAN BAWAH	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	10,800,000.00	10,800,000.00	10,800,000.00
19	SD NEGERI TOKALA ATAS	8,910,000.00	8,910,000.00	8,910,000.00	8,910,000.00	8,910,000.00	8,910,000.00	17,820,000.00	17,820,000.00	17,820,000.00
20	SD NEGERI TOKONANAKA	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	14,400,000.00	14,400,000.00	14,400,000.00
21	SD NEGERI UEMASI	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	10,800,000.00	10,800,000.00	10,800,000.00
22	SD NEGERI UERURU	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	14,400,000.00	14,400,000.00	14,400,000.00
23	SMP NEGERI 1 BUNGKU UTARA	12,510,000.00	12,510,000.00	12,510,000.00	12,510,000.00	12,510,000.00	12,510,000.00	25,020,000.00	25,020,000.00	25,020,000.00
24	SMP NEGERI 2 BUNGKU UTARA	12,960,000.00	12,960,000.00	12,960,000.00	12,960,000.00	12,960,000.00	12,960,000.00	25,920,000.00	25,920,000.00	25,920,000.00
25	SMP NEGERI 3 SATU ATAP BUNGKU UTARA	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	14,400,000.00	14,400,000.00	14,400,000.00
26	SMP NEGERI 4 BUNGKU UTARA SATU ATAP	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	14,400,000.00	14,400,000.00	14,400,000.00
27	SMP NEGERI 7 BUNGKU UTARA	5,760,000.00	5,760,000.00	5,760,000.00	5,760,000.00	5,760,000.00	5,760,000.00	11,520,000.00	11,520,000.00	11,520,000.00
28	SMPN 5 BUNGKU UTARA SATU ATAP	5,670,000.00	5,670,000.00	5,670,000.00	5,670,000.00	5,670,000.00	5,670,000.00	11,340,000.00	11,340,000.00	11,340,000.00
29	SMPN 6 BUNGKU UTARA SATU ATAP	5,670,000.00	5,670,000.00	5,670,000.00	5,670,000.00	5,670,000.00	5,670,000.00	11,340,000.00	11,340,000.00	11,340,000.00
II	**KEC.MAMOSALATO**	**181,170,000.00**	**181,170,000.00**	**178,370,000.00**	**181,170,000.00**	**178,370,000.00**	**178,370,000.00**	**362,340,000.00**	**359,540,000.00**	**356,740,000.00**
30	SD NEGERI 1 TANANAGAYA	10,170,000.00	10,170,000.00	10,170,000.00	10,170,000.00	10,170,000.00	10,170,000.00	20,340,000.00	20,340,000.00	20,340,000.00
31	SD NEGERI 1 TANASUMPU	13,770,000.00	13,770,000.00	13,770,000.00	13,770,000.00	13,770,000.00	13,770,000.00	27,540,000.00	27,540,000.00	27,540,000.00
32	SD NEGERI 2 TANASUMPU	9,540,000.00	9,540,000.00	9,540,000.00	9,540,000.00	9,540,000.00	9,540,000.00	19,080,000.00	19,080,000.00	19,080,000.00
33	SD NEGERI ANDOLIA	11,700,000.00	11,700,000.00	11,700,000.00	11,700,000.00	11,700,000.00	11,700,000.00	23,400,000.00	23,400,000.00	23,400,000.00
34	SD NEGERI DASAR	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	10,800,000.00	10,800,000.00	10,800,000.00
35	SD NEGERI GIRI MULYA	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	10,800,000.00	10,800,000.00	10,800,000.00
36	SD NEGERI KAMUNJANG	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	14,400,000.00	14,400,000.00	14,400,000.00
37	SD NEGERI KOLO ATAS	5,490,000.00	5,490,000.00	5,490,000.00	5,490,000.00	5,490,000.00	5,490,000.00	10,980,000.00	10,980,000.00	10,980,000.00
38	SD NEGERI KOLO BAWAH	11,700,000.00	11,700,000.00	8,900,000.00	11,700,000.00	8,900,000.00	8,900,000.00	23,400,000.00	20,600,000.00	17,800,000.00
39	SD NEGERI MOMO	9,540,000.00	9,540,000.00	9,540,000.00	9,540,000.00	9,540,000.00	9,540,000.00	19,080,000.00	19,080,000.00	19,080,000.00

NO	NAMA SEKOLAH / KECAMATAN	TAHAP 1			TAHAP 1I			TOTAL		
		PENDAPATAN	PENARIKAN	BELANJA	PENDAPATAN	PENARIKAN	BELANJA	PENDAPATAN	PENARIKAN	BELANJA
40	SD NEGERI PANDAUKE	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	10,800,000.00	10,800,000.00	10,800,000.00
41	SD NEGERI PARAMBA	9,720,000.00	9,720,000.00	9,720,000.00	9,720,000.00	9,720,000.00	9,720,000.00	19,440,000.00	19,440,000.00	19,440,000.00
42	SD NEGERI SEA	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	14,400,000.00	14,400,000.00	14,400,000.00
43	SD NEGERI TAMBALE	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	10,800,000.00	10,800,000.00	10,800,000.00
44	SD NEGERI UEMALINGKU	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	10,800,000.00	10,800,000.00	10,800,000.00
45	SD NEGERI UEPAKATU	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	14,400,000.00	14,400,000.00	14,400,000.00
46	SD NEGERI WINANGABINO	5,850,000.00	5,850,000.00	5,850,000.00	5,850,000.00	5,850,000.00	5,850,000.00	11,700,000.00	11,700,000.00	11,700,000.00
47	SMP NEGERI 1 MAMOSALATO	21,690,000.00	21,690,000.00	21,690,000.00	21,690,000.00	21,690,000.00	21,690,000.00	43,380,000.00	43,380,000.00	43,380,000.00
48	SMP NEGERI 2 MAMOSALATO	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	10,800,000.00	10,800,000.00	10,800,000.00
49	SMP NEGERI 3 MAMOSALATO SATU ATAP	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	10,800,000.00	10,800,000.00	10,800,000.00
50	SMPN 4 MAMOSALATO SATU ATAP	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	10,800,000.00	10,800,000.00	10,800,000.00
51	SMPN 5 MAMOSALATO	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	14,400,000.00	14,400,000.00	14,400,000.00
1II	**KEC.SOYO JAYA**	**112,050,000.00**	**112,050,000.00**	**112,050,000.00**	**112,050,000.00**	**112,050,000.00**	**112,026,000.00**	**224,100,000.00**	**224,100,000.00**	**224,076,000.00**
52	SD INPRES LEMBAH SUMARA	8,010,000.00	8,010,000.00	8,010,000.00	8,010,000.00	8,010,000.00	8,010,000.00	16,020,000.00	16,020,000.00	16,020,000.00
53	SD INPRES SUMARA JAYA	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	10,800,000.00	10,800,000.00	10,800,000.00
54	SD INPRES TANDOYONDO	6,570,000.00	6,570,000.00	6,570,000.00	6,570,000.00	6,570,000.00	6,570,000.00	13,140,000.00	13,140,000.00	13,140,000.00
55	SD NEGERI BAU	8,370,000.00	8,370,000.00	8,370,000.00	8,370,000.00	8,370,000.00	8,370,000.00	16,740,000.00	16,740,000.00	16,740,000.00
56	SD NEGERI MALINO	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,376,000.00	10,800,000.00	10,800,000.00	10,776,000.00
57	SD NEGERI MALINO JAYA	12,420,000.00	12,420,000.00	12,420,000.00	12,420,000.00	12,420,000.00	12,420,000.00	24,840,000.00	24,840,000.00	24,840,000.00
58	SD NEGERI PANCA MAKMUR	18,900,000.00	18,900,000.00	18,900,000.00	18,900,000.00	18,900,000.00	18,900,000.00	37,800,000.00	37,800,000.00	37,800,000.00
59	SD NEGERI TAMAINUSI	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	14,400,000.00	14,400,000.00	14,400,000.00
60	SD NEGERI TAMBAYOLI	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	10,800,000.00	10,800,000.00	10,800,000.00
61	SD NEGERI TOWI	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	14,400,000.00	14,400,000.00	14,400,000.00
62	SD NEGERI UEBANGKE	7,020,000.00	7,020,000.00	7,020,000.00	7,020,000.00	7,020,000.00	7,020,000.00	14,040,000.00	14,040,000.00	14,040,000.00
63	SMP NEGERI 1 SOYO JAYA	10,800,000.00	10,800,000.00	10,800,000.00	10,800,000.00	10,800,000.00	10,800,000.00	21,600,000.00	21,600,000.00	21,600,000.00
64	SMP NEGERI 2 SOYO JAYA	9,360,000.00	9,360,000.00	9,360,000.00	9,360,000.00	9,360,000.00	9,360,000.00	18,720,000.00	18,720,000.00	18,720,000.00
1V	**KEC.PETASIA**	**208,140,000.00**	**208,140,000.00**	**208,130,000.00**	**208,140,000.00**	**208,130,000.00**	**205,562,500.00**	**416,280,000.00**	**416,270,000.00**	**413,692,500.00**
65	SD INPRES 5 KOLONODALE	17,280,000.00	17,280,000.00	17,280,000.00	17,280,000.00	17,280,000.00	17,280,000.00	34,560,000.00	34,560,000.00	34,560,000.00
66	SD NEGERI GANDA - GANDA	18,180,000.00	18,180,000.00	18,180,000.00	18,180,000.00	18,180,000.00	18,180,000.00	36,360,000.00	36,360,000.00	36,360,000.00
67	SD INPRES KOYA	9,240,000.00	9,240,000.00	9,240,000.00	9,240,000.00	9,240,000.00	9,240,000.00	18,480,000.00	18,480,000.00	18,480,000.00
68	SD NEGERI 1 KOLONODALE	11,610,000.00	11,610,000.00	11,610,000.00	11,610,000.00	11,610,000.00	11,610,000.00	23,220,000.00	23,220,000.00	23,220,000.00
69	SD NEGERI 2 KOLONODALE	32,850,000.00	32,850,000.00	32,850,000.00	32,850,000.00	32,850,000.00	32,850,000.00	65,700,000.00	65,700,000.00	65,700,000.00
70	SD NEGERI 3 KOLONODALE	9,810,000.00	9,810,000.00	9,810,000.00	9,810,000.00	9,810,000.00	9,810,000.00	19,620,000.00	19,620,000.00	19,620,000.00
71	SD NEGERI 4 KOLONODALE	9,540,000.00	9,540,000.00	9,530,000.00	9,540,000.00	9,530,000.00	9,530,000.00	19,080,000.00	19,070,000.00	19,060,000.00
72	SD NEGERI GILILANA	8,280,000.00	8,280,000.00	8,280,000.00	8,280,000.00	8,280,000.00	8,280,000.00	16,560,000.00	16,560,000.00	16,560,000.00
73	SD NEGERI KOROLOLAMA	9,720,000.00	9,720,000.00	9,720,000.00	9,720,000.00	9,720,000.00	9,720,000.00	19,440,000.00	19,440,000.00	19,440,000.00
74	SD NEGERI KOROMATANTU	8,640,000.00	8,640,000.00	8,640,000.00	8,640,000.00	8,640,000.00	8,640,000.00	17,280,000.00	17,280,000.00	17,280,000.00
75	SD NEGERI LAMBOLO	5,850,000.00	5,850,000.00	5,850,000.00	5,850,000.00	5,850,000.00	5,850,000.00	11,700,000.00	11,700,000.00	11,700,000.00
76	SD NEGERI TANAUGE	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	14,400,000.00	14,400,000.00	14,400,000.00
77	SMP NEGERI 1 PETASIA	43,830,000.00	43,830,000.00	43,830,000.00	43,830,000.00	43,830,000.00	41,262,500.00	87,660,000.00	87,660,000.00	85,092,500.00
78	SMP NEGERI 2 PETASIA	8,910,000.00	8,910,000.00	8,910,000.00	8,910,000.00	8,910,000.00	8,910,000.00	17,820,000.00	17,820,000.00	17,820,000.00
79	SMPN 3 PETASIA SATU ATAP	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	14,400,000.00	14,400,000.00	14,400,000.00

NO	NAMA SEKOLAH / KECAMATAN	TAHAP 1			TAHAP II			TOTAL		
		PENDAPATAN	PENARIKAN	BELANJA	PENDAPATAN	PENARIKAN	BELANJA	PENDAPATAN	PENARIKAN	BELANJA
V	**KEC.PETASIA BARAT**	**84,870,000.00**	**84,870,000.00**	**84,870,000.00**	**84,870,000.00**	**84,870,000.00**	**84,870,000.00**	**169,740,000.00**	**169,740,000.00**	**169,740,000.00**
80	SD INPRES TIU	6,120,000.00	6,120,000.00	6,120,000.00	6,120,000.00	6,120,000.00	6,120,000.00	12,240,000.00	12,240,000.00	12,240,000.00
81	SD NEGERI 1 ULU LAA	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	14,400,000.00	14,400,000.00	14,400,000.00
82	SD NEGERI 2 MOLEONO	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	10,800,000.00	10,800,000.00	10,800,000.00
83	SDN MOLEONO	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	10,800,000.00	10,800,000.00	10,800,000.00
84	SD NEGERI MONDOWE	6,300,000.00	6,300,000.00	6,300,000.00	6,300,000.00	6,300,000.00	6,300,000.00	12,600,000.00	12,600,000.00	12,600,000.00
85	SD NEGERI ONE PUTE	7,560,000.00	7,560,000.00	7,560,000.00	7,560,000.00	7,560,000.00	7,560,000.00	15,120,000.00	15,120,000.00	15,120,000.00
86	SDN TADAKU	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	10,800,000.00	10,800,000.00	10,800,000.00
87	SD NEGERI TOGO MULYA	7,740,000.00	7,740,000.00	7,740,000.00	7,740,000.00	7,740,000.00	7,740,000.00	15,480,000.00	15,480,000.00	15,480,000.00
88	SD NEGERI TONTOWEA	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	14,400,000.00	14,400,000.00	14,400,000.00
89	SD NEGERI ULULAA	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	14,400,000.00	14,400,000.00	14,400,000.00
90	SMP NEGERI 1 PETASIA BARAT	7,740,000.00	7,740,000.00	7,740,000.00	7,740,000.00	7,740,000.00	7,740,000.00	15,480,000.00	15,480,000.00	15,480,000.00
91	SMP NEGERI 2 PETASIA BARAT SATU ATAP	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	10,800,000.00	10,800,000.00	10,800,000.00
92	SMP NEGERI 3 PETASIA BARAT SATU ATAP	6,210,000.00	6,210,000.00	6,210,000.00	6,210,000.00	6,210,000.00	6,210,000.00	12,420,000.00	12,420,000.00	12,420,000.00
VI	**KEC.PETASIA TIMUR**	**244,350,000.00**	**244,350,000.00**	**244,350,000.00**	**244,350,000.00**	**244,350,000.00**	**244,350,000.00**	**488,700,000.00**	**488,700,000.00**	**488,700,000.00**
93	SD NEGERI 1 BUNTA	20,880,000.00	20,880,000.00	20,880,000.00	20,880,000.00	20,880,000.00	20,880,000.00	41,760,000.00	41,760,000.00	41,760,000.00
94	SD NEGERI 2 BUNTA	23,310,000.00	23,310,000.00	23,310,000.00	23,310,000.00	23,310,000.00	23,310,000.00	46,620,000.00	46,620,000.00	46,620,000.00
95	SD NEGERI BIMOR JAYA	8,280,000.00	8,280,000.00	8,280,000.00	8,280,000.00	8,280,000.00	8,280,000.00	16,560,000.00	16,560,000.00	16,560,000.00
96	SD NEGERI BUNGINTIMBE	25,470,000.00	25,470,000.00	25,470,000.00	25,470,000.00	25,470,000.00	25,470,000.00	50,940,000.00	50,940,000.00	50,940,000.00
97	SD NEGERI KEUNO	5,490,000.00	5,490,000.00	5,490,000.00	5,490,000.00	5,490,000.00	5,490,000.00	10,980,000.00	10,980,000.00	10,980,000.00
98	SD NEGERI MOHONI	11,790,000.00	11,790,000.00	11,790,000.00	11,790,000.00	11,790,000.00	11,790,000.00	23,580,000.00	23,580,000.00	23,580,000.00
99	SD NEGERI MOLINO	25,020,000.00	25,020,000.00	25,020,000.00	25,020,000.00	25,020,000.00	25,020,000.00	50,040,000.00	50,040,000.00	50,040,000.00
100	SD NEGERI MOLORES	10,260,000.00	10,260,000.00	10,260,000.00	10,260,000.00	10,260,000.00	10,260,000.00	20,520,000.00	20,520,000.00	20,520,000.00
101	SD NEGERI PEBOOA	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00
102	SD NEGERI TOMPIRA	18,450,000.00	18,450,000.00	18,450,000.00	18,450,000.00	18,450,000.00	18,450,000.00	36,900,000.00	36,900,000.00	36,900,000.00
103	SD NEGERI TOWARA	13,500,000.00	13,500,000.00	13,500,000.00	13,500,000.00	13,500,000.00	13,500,000.00	27,000,000.00	27,000,000.00	27,000,000.00
104	SD NEGERI UNGKEA	9,540,000.00	9,540,000.00	9,540,000.00	9,540,000.00	9,540,000.00	9,540,000.00	19,080,000.00	19,080,000.00	19,080,000.00
105	SMP NEGERI 1 PETASIA TIMUR	28,620,000.00	28,620,000.00	28,620,000.00	28,620,000.00	28,620,000.00	28,620,000.00	57,240,000.00	57,240,000.00	57,240,000.00
106	SMP NEGERI 2 PETASIA TIMUR SATU ATAP	12,510,000.00	12,510,000.00	12,510,000.00	12,510,000.00	12,510,000.00	12,510,000.00	25,020,000.00	25,020,000.00	25,020,000.00
107	SMP NEGERI 3 PETASIA TIMUR	16,830,000.00	16,830,000.00	16,830,000.00	16,830,000.00	16,830,000.00	16,830,000.00	33,660,000.00	33,660,000.00	33,660,000.00
108	SMP NEGERI 4 PETASIA TIMUR SATU ATAP	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	10,800,000.00	10,800,000.00	10,800,000.00
VII	**KEC.LEMBO**	**207,720,000.00**	**207,720,000.00**	**207,700,000.00**	**207,720,000.00**	**207,700,000.00**	**207,699,500.00**	**415,440,000.00**	**415,420,000.00**	**415,399,500.00**
109	SD NEGERI 1 BETELEME	23,940,000.00	23,940,000.00	23,940,000.00	23,940,000.00	23,940,000.00	23,940,000.00	47,880,000.00	47,880,000.00	47,880,000.00
110	SD NEGERI 1 KOROWOU	10,620,000.00	10,620,000.00	10,620,000.00	10,620,000.00	10,620,000.00	10,620,000.00	21,240,000.00	21,240,000.00	21,240,000.00
111	SD NEGERI 2 BETELEME	13,140,000.00	13,140,000.00	13,140,000.00	13,140,000.00	13,140,000.00	13,140,000.00	26,280,000.00	26,280,000.00	26,280,000.00
112	SD NEGERI 2 KOROWOU	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	10,800,000.00	10,800,000.00	10,800,000.00
113	SD NEGERI KOROBONDE	11,340,000.00	11,340,000.00	11,340,000.00	11,340,000.00	11,340,000.00	11,340,000.00	22,680,000.00	22,680,000.00	22,680,000.00
114	SD NEGERI KOROWALELO	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	10,800,000.00	10,800,000.00	10,800,000.00
115	SD NEGERI KUMPI	6,750,000.00	6,750,000.00	6,750,000.00	6,750,000.00	6,750,000.00	6,750,000.00	13,500,000.00	13,500,000.00	13,500,000.00
116	SD NEGERI LEMBOBARU	5,400,000.00	5,400,000.00	5,380,000.00	5,400,000.00	5,380,000.00	5,380,000.00	10,800,000.00	10,780,000.00	10,760,000.00
117	SD NEGERI LEMBOROMA	9,270,000.00	9,270,000.00	9,270,000.00	9,270,000.00	9,270,000.00	9,270,000.00	18,540,000.00	18,540,000.00	18,540,000.00
118	SD NEGERI PARAWI	6,570,000.00	6,570,000.00	6,570,000.00	6,570,000.00	6,570,000.00	6,570,000.00	13,140,000.00	13,140,000.00	13,140,000.00

NO	NAMA SEKOLAH / KECAMATAN	TAHAP 1			TAHAP 1I			TOTAL		
		PENDAPATAN	PENARIKAN	BELANJA	PENDAPATAN	PENARIKAN	BELANJA	PENDAPATAN	PENARIKAN	BELANJA
119	SD NEGERI PONTANGOA	11,430,000.00	11,430,000.00	11,430,000.00	11,430,000.00	11,430,000.00	11,430,000.00	22,860,000.00	22,860,000.00	22,860,000.00
120	SD NEGERI TINGKEAO	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	10,800,000.00	10,800,000.00	10,800,000.00
121	SD NEGERI TINOMPO	13,590,000.00	13,590,000.00	13,590,000.00	13,590,000.00	13,590,000.00	13,590,000.00	27,180,000.00	27,180,000.00	27,180,000.00
122	SD NEGERI UNDORO	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	10,800,000.00	10,800,000.00	10,800,000.00
123	SD NEGERI WARA'A	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,399,500.00	10,800,000.00	10,800,000.00	10,799,500.00
124	SD NEGERI WAWOPADA	8,190,000.00	8,190,000.00	8,190,000.00	8,190,000.00	8,190,000.00	8,190,000.00	16,380,000.00	16,380,000.00	16,380,000.00
125	SMP NEGERI 1 LEMBO	32,760,000.00	32,760,000.00	32,760,000.00	32,760,000.00	32,760,000.00	32,760,000.00	65,520,000.00	65,520,000.00	65,520,000.00
126	SMP NEGERI 3 LEMBO	11,160,000.00	11,160,000.00	11,160,000.00	11,160,000.00	11,160,000.00	11,160,000.00	22,320,000.00	22,320,000.00	22,320,000.00
127	SMP NEGERI 4 LEMBO	7,920,000.00	7,920,000.00	7,920,000.00	7,920,000.00	7,920,000.00	7,920,000.00	15,840,000.00	15,840,000.00	15,840,000.00
128	SMP NEGERI 2 LEMBO	8,640,000.00	8,640,000.00	8,640,000.00	8,640,000.00	8,640,000.00	8,640,000.00	17,280,000.00	17,280,000.00	17,280,000.00
VIII	**KEC.LEMBO RAYA**	**97,020,000.00**	**97,020,000.00**	**97,010,000.00**	**97,020,000.00**	**97,010,000.00**	**97,010,000.00**	**194,040,000.00**	**194,030,000.00**	**194,020,000.00**
129	SD NEGERI BINTANGOR MUKTI	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	10,800,000.00	10,800,000.00	10,800,000.00
130	SD NEGERI DOLUPO KARYA	12,870,000.00	12,870,000.00	12,870,000.00	12,870,000.00	12,870,000.00	12,870,000.00	25,740,000.00	25,740,000.00	25,740,000.00
131	SD NEGERI JAMOR JAYA	10,350,000.00	10,350,000.00	10,350,000.00	10,350,000.00	10,350,000.00	10,350,000.00	20,700,000.00	20,700,000.00	20,700,000.00
132	SD NEGERI LEMBOBELALA	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	10,800,000.00	10,800,000.00	10,800,000.00
133	SD NEGERI PETUMBEA	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	14,400,000.00	14,400,000.00	14,400,000.00
134	SD NEGERI POONA	8,280,000.00	8,280,000.00	8,280,000.00	8,280,000.00	8,280,000.00	8,280,000.00	16,560,000.00	16,560,000.00	16,560,000.00
135	SD SMP SATU ATAP NEGERI	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	10,800,000.00	10,800,000.00	10,800,000.00
136	SEKOLAH DASAR NEGERI MANDULA	7,650,000.00	7,650,000.00	7,640,000.00	7,650,000.00	7,640,000.00	7,640,000.00	15,300,000.00	15,290,000.00	15,280,000.00
137	SMP NEGERI 1 LEMBO RAYA	15,930,000.00	15,930,000.00	15,930,000.00	15,930,000.00	15,930,000.00	15,930,000.00	31,860,000.00	31,860,000.00	31,860,000.00
138	SMP NEGERI 2 LEMBO RAYA	13,140,000.00	13,140,000.00	13,140,000.00	13,140,000.00	13,140,000.00	13,140,000.00	26,280,000.00	26,280,000.00	26,280,000.00
139	SMP NEGERI 4 LEMBO RAYA	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	10,800,000.00	10,800,000.00	10,800,000.00
IX	**KEC.MORI ATAS**	**165,330,000.00**	**165,330,000.00**	**165,330,000.00**	**165,330,000.00**	**165,330,000.00**	**165,130,000.00**	**330,660,000.00**	**330,660,000.00**	**330,460,000.00**
140	SD NEGERI 1 KOLAKA	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	10,800,000.00	10,800,000.00	10,800,000.00
141	SD NEGERI 1 TOMATA	7,830,000.00	7,830,000.00	7,830,000.00	7,830,000.00	7,830,000.00	7,830,000.00	15,660,000.00	15,660,000.00	15,660,000.00
142	SD NEGERI 2 KOLAKA	9,360,000.00	9,360,000.00	9,360,000.00	9,360,000.00	9,360,000.00	9,360,000.00	18,720,000.00	18,720,000.00	18,720,000.00
143	SD NEGERI 2 TOMATA	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	14,400,000.00	14,400,000.00	14,400,000.00
144	SDN ENSA	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	10,800,000.00	10,800,000.00	10,800,000.00
145	SD NEGERI KASINGOLI	5,850,000.00	5,850,000.00	5,850,000.00	5,850,000.00	5,850,000.00	5,850,000.00	11,700,000.00	11,700,000.00	11,700,000.00
146	SDN KOROMONTO	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	10,800,000.00	10,800,000.00	10,800,000.00
147	SD NEGERI LANUMOR SMP NEGERI SATAP MORI ATAS	7,020,000.00	7,020,000.00	7,020,000.00	7,020,000.00	7,020,000.00	7,020,000.00	14,040,000.00	14,040,000.00	14,040,000.00
148	SD NEGERI LEE	5,760,000.00	5,760,000.00	5,760,000.00	5,760,000.00	5,760,000.00	5,760,000.00	11,520,000.00	11,520,000.00	11,520,000.00
149	SD NEGERI LONDI	13,230,000.00	13,230,000.00	13,230,000.00	13,230,000.00	13,230,000.00	13,230,000.00	26,460,000.00	26,460,000.00	26,460,000.00
150	SD NEGERI MALEI	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	10,800,000.00	10,800,000.00	10,800,000.00
151	SD NEGERI PEONEA	8,730,000.00	8,730,000.00	8,730,000.00	8,730,000.00	8,730,000.00	8,730,000.00	17,460,000.00	17,460,000.00	17,460,000.00
152	SD NEGERI SAEMBA	6,570,000.00	6,570,000.00	6,570,000.00	6,570,000.00	6,570,000.00	6,570,000.00	13,140,000.00	13,140,000.00	13,140,000.00
153	SD NEGERI SAEMBA WALATI	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	10,800,000.00	10,800,000.00	10,800,000.00
154	SD NEGERI TAENDE	8,100,000.00	8,100,000.00	8,100,000.00	8,100,000.00	8,100,000.00	8,100,000.00	16,200,000.00	16,200,000.00	16,200,000.00
155	SDN TOMUI KARYA	5,850,000.00	5,850,000.00	5,850,000.00	5,850,000.00	5,850,000.00	5,850,000.00	11,700,000.00	11,700,000.00	11,700,000.00
156	SMP NEGERI 1 MORI ATAS	19,800,000.00	19,800,000.00	19,800,000.00	19,800,000.00	19,800,000.00	19,800,000.00	39,600,000.00	39,600,000.00	39,600,000.00
157	SMP NEGERI 2 MORI ATAS	13,320,000.00	13,320,000.00	13,320,000.00	13,320,000.00	13,320,000.00	13,120,000.00	26,640,000.00	26,640,000.00	26,440,000.00

NO	NAMA SEKOLAH / KECAMATAN	TAHAP 1			TAHAP II			TOTAL		
		PENDAPATAN	PENARIKAN	BELANJA	PENDAPATAN	PENARIKAN	BELANJA	PENDAPATAN	PENARIKAN	BELANJA
158	SMP NEGERI 3 MORI ATAS SATAP	8,910,000.00	8,910,000.00	8,910,000.00	8,910,000.00	8,910,000.00	8,910,000.00	17,820,000.00	17,820,000.00	17,820,000.00
159	SMP NEGERI 4 MORI ATAS SATU ATAP	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	10,800,000.00	10,800,000.00	10,800,000.00
160	SMPN 5 MORI ATAS SATU ATAP	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	10,800,000.00	10,800,000.00	10,800,000.00
X	**KEC.MORI UTARA**	**113,760,000.00**	**113,760,000.00**	**113,760,000.00**	**113,760,000.00**	**113,760,000.00**	**113,760,000.00**	**227,520,000.00**	**227,520,000.00**	**227,520,000.00**
161	SD NEGERI 1 PELERU	11,340,000.00	11,340,000.00	11,340,000.00	11,340,000.00	11,340,000.00	11,340,000.00	22,680,000.00	22,680,000.00	22,680,000.00
162	SD NEGERI 1 TALIWAN	9,630,000.00	9,630,000.00	9,630,000.00	9,630,000.00	9,630,000.00	9,630,000.00	19,260,000.00	19,260,000.00	19,260,000.00
163	SD NEGERI 2 PELERU	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	10,800,000.00	10,800,000.00	10,800,000.00
164	SD NEGERI 2 TALIWAN	8,460,000.00	8,460,000.00	8,460,000.00	8,460,000.00	8,460,000.00	8,460,000.00	16,920,000.00	16,920,000.00	16,920,000.00
165	SD NEGERI BENCUE	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	10,800,000.00	10,800,000.00	10,800,000.00
166	SD NEGERI ERA	7,290,000.00	7,290,000.00	7,290,000.00	7,290,000.00	7,290,000.00	7,290,000.00	14,580,000.00	14,580,000.00	14,580,000.00
167	SD NEGERI LEMBONTONARA	13,140,000.00	13,140,000.00	13,140,000.00	13,140,000.00	13,140,000.00	13,140,000.00	26,280,000.00	26,280,000.00	26,280,000.00
168	SD NEGERI MAYUMBA	5,580,000.00	5,580,000.00	5,580,000.00	5,580,000.00	5,580,000.00	5,580,000.00	11,160,000.00	11,160,000.00	11,160,000.00
169	SD NEGERI TAMONJENGI	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	10,800,000.00	10,800,000.00	10,800,000.00
170	SD NEGERI TIWAA	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	10,800,000.00	10,800,000.00	10,800,000.00
171	SMP NEGERI 1 MORI UTARA	10,170,000.00	10,170,000.00	10,170,000.00	10,170,000.00	10,170,000.00	10,170,000.00	20,340,000.00	20,340,000.00	20,340,000.00
172	SMP NEGERI 2 MORI UTARA	9,990,000.00	9,990,000.00	9,990,000.00	9,990,000.00	9,990,000.00	9,990,000.00	19,980,000.00	19,980,000.00	19,980,000.00
173	SMP NEGERI 3 MORI UTARA SATU ATAP	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	10,800,000.00	10,800,000.00	10,800,000.00
174	SMP NEGERI 4 MORI UTARA	11,160,000.00	11,160,000.00	11,160,000.00	11,160,000.00	11,160,000.00	11,160,000.00	22,320,000.00	22,320,000.00	22,320,000.00
	Jumlah	**1,623,630,000.00**	**1,623,630,000.00**	**1,620,790,000.00**	**1,623,630,000.00**	**1,620,790,000.00**	**1,617,998,000.00**	**3,247,260,000.00**	**3,244,420,000.00**	**3,238,788,000.00**



LAMPIRAN XXVI :

DAFTAR LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) - RSUD KOLONODALE

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOLONODALE

KABUPATEN MOROWALI UTARA

LAPORAN KEUANGAN

TAHUN ANGGARAN 2024

DAN

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

RSUD KOLONODALE KABUPATEN MOROWALI UTARA
LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024
DAN
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

RSUD KOLONODALE KABUPATEN MOROWALI UTARA
LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Daftar Isi

	Halaman
Pernyataan Direktur	
Laporan Auditor Independen	
Laporan Realisasi Anggaran	1
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	2
Neraca	3
Laporan Operasional	4
Laporan Perubahan Ekuitas	5
Laporan Arus Kas	6
Catatan atas Laporan Keuangan	7 sampai 23

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOLONODALE
Jl. dr. Azis Maralla No. 12 Kota Kolonodale – rsudkolonodale@gmail.com –
Kode Pos : 94971

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan RSUD Kolonodale Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2024 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, serta Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan, dan operasional secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kolonodale, 24 Maret 2025
Direktur,

METERAI TEMPEL
10000
66D28AMX120175518

dr. Sherly Pede, M.Kes
NIP. 19870221 201101 2 011

Kantor Akuntan Publik
Annas Cahyadi
Registered Public Accountant

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
00030/2.1034/AU.5/11/1162-2/1/III/2025

Kepada Yth.
Direktur
RSUD Kolonodale Kabupaten Morowali Utara

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah RSUD Kolonodale Kabupaten Morowali Utara ("BLUD"), yang terdiri dari neraca tanggal 31 Desember 2024, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan BLUD tanggal 31 Desember 2024, serta realisasi anggaran, kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap BLUD berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan BLUD dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi BLUD atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan BLUD.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal BLUD
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan BLUD untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan BLUD tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, kami juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundangundangan disajikan dalam Laporan Nomor AC.SPI-KPT.25.003 tanggal 24 Maret 2025, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Hormat Kami,
Kantor Akuntan Publik
Annas Cahyadi

Annas Cahyadi, M.Sc, Ak, CA, CPA
NRAP: AP.1162

00030

24 Maret 2025

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOLONODALE
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Tahun Anggaran 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Anggaran Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	%	Realisasi Tahun 2023
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah				
Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	41.879.712.851,00	54.721.960.864,00	131%	38.651.820.152,00
Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD	-	-	0%	-
Pendapatan Lain-lain BLUD	120.287.150,00	226.973.994,88	189%	21.875.000,00
Jumlah Pendapatan	42.000.000.001,00	54.948.934.858,88	131%	38.673.695.152,00
BELANJA				
Belanja Operasi				
Belanja Pegawai	24.984.270.181,00	29.349.151.682,00	117%	31.779.125.351,00
Belanja Barang dan Jasa	53.866.316.555,00	51.418.375.266,60	95%	54.357.520.693,00
Belanja Modal	44.885.965.444,00	44.751.673.838,00	100%	29.562.218.893,27
Jumlah Belanja	123.736.552.180,00	125.519.200.786,60	101%	115.698.864.937,27
Surplus/(Defisit)	(81.736.552.179,00)	(70.570.265.927,72)	0%	(77.025.169.785,27)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan				
Penggunaan SilPA Tahun Sebelumnya	-	-	0%	-
SISA KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN	**(81.736.552.179,00)**	**(70.570.265.927,72)**	0%	**(77.025.169.785,27)**

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOLONODALE
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
Tahun Anggaran 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	2024	2023
Saldo Anggaran Awal	7.978.793.170,00	
Pengurangan/Penambahan SAL	-	
Jumlah	7.978.793.170,00	-
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SIKPA)	(70.570.265.927,72)	(77.025.169.785,27)
Jumlah	(62.591.472.757,72)	(77.025.169.785,27)
Belanja dari Alokasi APBD	72.359.576.411,00	84.993.710.147,27
Koreksi Pembukuan :		
Pajak Bank Mandiri	(45.394.799,00)	725.000,00
Admin Bank mandiri	(325.000,00)	50.000,00
Kelebihan Pembayaran Pajak		(2.728.283,00)
Pajak Belum Disetor		12.206.091,00
Materai Bank Mandiri	(275.000,00)	
Pajak Qris	(127.934,04)	
Setoran Utang Pajak 2023	(12.206.091,00)	
Saldo Angaran Lebih Akhir	**9.709.774.829,24**	**7.978.793.170,00**

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

RSUD KOLONODALE KABUPATEN MOROWALI UTARA
NERACA
Per 31 Desember 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2024	2023
ASET			
Aset Lancar			
Kas di Badan Layanan Umum	6a	9.709.774.829	7.978.793.170
Piutang Usaha	6b	9.405.299.925	6.584.867.903
Persediaan	6c	2.464.708.607	1.854.582.577
Jumlah Aset Lancar		21.579.783.362	16.418.243.650
Aset Tetap	6d		
Harga Perolehan Aset Tetap		265.632.096.299	216.100.522.331
Akumulasi Aset Tetap		(85.312.613.553)	(72.804.205.268,00)
Nilai Buku Aset Tetap		180.319.482.746	143.296.317.063
Aset Lain-lain	6e		
Tagihan Jangka Panjang		-	-
Aset Lainnya		-	-
Aset Tak Berwujud		653.295.000	653.295.000
Akumluasi Amortisasi Aset Tak Berwujud		(350.064.000)	(262.548.000)
Jumlah Aset Lain-lain		303.231.000	390.747.000
TOTAL ASET TETAP		202.202.497.108	160.105.307.713
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
Kewajiban	6f		
Pendapatan Diterima Di Muka			
Utang Usaha		3.398.462.296	1.860.444.201
Utang Jasa Medis		4.738.730.850	3.267.292.872
Utang Pajak			12.206.091
Biaya yang Masih Harus Dibayar			
Jumlah Kewajiban		8.137.193.146	5.139.943.164
Ekuitas	6g	194.065.303.962	154.965.364.549
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS		202.202.497.108	160.105.307.713

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

RSUD KOLONODALE KABUPATEN MOROWALI UTARA
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2024	2023
PENDAPATAN			
Pendapatan	7a		
Pendapatan Jasa Layanan		56.867.726.053	39.779.406.149
Pendapatan Hibah		-	-
Pendapatan APBD		72.359.576.411	84.993.710.147
Lain-lain Pendapatan BLUD		226.973.995	-
Jumlah Pendapatan		129.454.276.459	124.773.116.296
Biaya			
Biaya Pelayanan	7b	58.446.705.615	39.169.146.245
Biaya Umum dan Administrasi	7c	31.897.885.259	58.024.245.280
Biaya Non Operasional		-	-
Jumlah Biaya		90.344.590.874	97.193.391.525
SURPLUS/DEFISIT OPERASIONAL		39.109.685.585	27.579.724.771

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

RSUD KOLONODALE KABUPATEN MOROWALI UTARA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	2024	2023
Ekuitas Awal	154.965.364.549	127.409.942.957
Koreksi Ekuitas	(9.746.173)	(24.303.179)
Surplus Dan Defisit Tahun Lalu	-	-
Surplus Dan Defisit Tahun Berjalan	39.109.685.585	27.579.724.771
Ekuitas Akhir	194.065.303.962	154.965.364.549

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOLONODALE
LAPORAN ARUS KAS
Tahun Anggaran 2024
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	2024	2023
ARUS KAS AKTIVITAS OPERASI		
Arus Kas Masuk		
Pendapatan Usaha Dari Jasa Layanan	54.721.960.864	38.651.820.152
Pendapatan Hibah	-	-
Pendapatan APBD/APBN	72.359.576.411	84.993.710.147
Pendapatan Usaha Lainnya	226.973.995	21.875.000
Penerimaan Pajak	-	-
Koreksi Kas Bendahara BLUD :		
Pajak Bank Mandiri	(45.394.799)	725.000
Admin Bank mandiri	(325.000)	50.000
Kelebihan Pembayaran Pajak	-	(2.728.283)
Pajak Belum Disetor	-	12.206.091
Materai Bank Mandiri	(275.000)	-
Pajak Qris	(127.934)	-
Setoran Utang Pajak 2023	(12.206.091)	-
Arus Kas Keluar		
Biaya Layanan	(29.349.151.682)	(31.779.125.351)
Biaya Umum dan Administrasi	(51.418.375.267)	(54.357.520.693)
Biaya Umum Lainnya	-	-
Arus Kas dari Akitivitas Operasi	46.482.655.497	37.541.012.063
ARUS KAS AKTIVITAS INVESTASI		
Arus Keluar		
Perolehan Aset Tetap	(44.751.673.838)	(29.562.218.893)
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(44.751.673.838)	(29.562.218.893)
PENAMBANAN/(PENGURANGAN) KAS	1.730.981.659	7.978.793.170
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE	7.978.793.170	-
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE	9.709.774.829	7.978.793.170

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

1 UMUM

Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale (selanjutnya disebut "RSUD") adalah salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara yang memiliki tugas pokok menyelenggarakan pelayanan di bidang kesehatan kepada masyarakat Kabupaten Morowali Utara.

Untuk meningkatkan kinerjanya, pola pengelolaan keuangan pada RSUD menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. PPK-BLUD pada RSUD ditetapkan dalam Keputusan Bupati Nomor : 188.45/KEP-B.MU/0054/II/2023 Tanggal 22 Februari 2023 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD Kolonodale Kabupaten Morowali Utara.

2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan ini disusun berdasarkan pertauran perundang-undangan seagai berikut:

a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara;
e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Penelolaan Keuangan Daerah;
i. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
g. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor : 118.45/KEP-B.MU/0054/II/2023 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara;

3. LAPORAN KEUANGAN BLUD

Laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, khususnya Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum. Laporan Keuangan Badan layanan Umum terdiri dari:

1) Neraca;
2) Laporan Operasional;
3) Laporan Perubahan Ekuitas;
4) Laporan Arus Kas;
5) Laporan Realisasi Anggaran;
6) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; dan
7) Catatan atas Laporan Keuangan

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

a Pendapatan

1) Pendapatan LRA

Pendapatan LRA diakui pada saat kas diterima pada Bendahara Penerimaan rumah sakit. Akuntansi pendapatan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat nettonya. Pendapatan rumah sakit berasal dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan penerimaan berasal dari Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan, Jasa Giro, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan Sewa, Pengolahan/Pembuangan Limbah, Jasa Layanan dan Penerimaan Lain-Lain.

2) Pendapatan LO

Pendapatan LO diakui pada saat rumah sakit telah melakukan jasa layanan kepada pasien ataupun pihak ketiga. Yang merupakan penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

b Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran rumah sakit yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan diakui dalam periode tahun anggaran berjalan pada saat kas dikeluarkan dan telah dipertanggungjawabkan oleh Bendahara pengeluaran.

Belanja modal tanah diakui sebesar biaya perolehan tanah yang mencakup harga pembelian biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Belanja modal diukur dengan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan. Apabila menggunakan mata uang asing akan dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada saat pengakuan belanja.

Belanja Modal peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Belanja modal gedung dan bangunan diakui sebesar harga perolehan gedung dan bangunan sampai siap untuk digunakan. Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi termasuk biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak.

Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan diakui sebesar seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

Biaya operasional yaitu pengeluaran anggaran untuk kegiatan seharí-hari yang memberi manfaat jangka pendek, antara lain belanja pegawai, belanja barang non investasi dan belanja operasional lainnya.

c Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset maupun persediaan atau timbulnya kewajiban.

d Asset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki sebagai akibat peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa yang akan datang diharapkan dapat diperoleh baik oleh rumah sakit maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya ekonomi yang diperluakn untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum.

Kebijakan akuntansi terkait aset antara lain:

1) Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan entitas. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas dan setara kas diakui pada saat memenuhi definisi kas dan/atau setara kas serta penguasaan dan/atau kepemilikan kas telah beralih kepada entitas.

Kas dan setara kas disajikan dalam neraca dan laporan arus kas.

2) Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada entitas yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value), yang selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

3) Persediaan

Persediaan adalah aset tersedia untuk dijual dalam kegiatan operasional, dalam proses produksi untuk penjualan tersebut, atau dalam bentuk perlengkapan yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional RSUD. Persediaan dikelompokkan dalam tiga kelompok sebagai berikut:

a) Persediaan bahan habis pakai;
b) Persediaan bahan/material; dan
c) Persediaan barang lainnya.

Persediaan disajikan sebesar biaya perolehan (termasuk biaya pengangkutan dan biaya lainnya yang secara langsung terkait dengan pembelian persediaan) apabila diperoleh dengan pembelian; harga pokok produksi apabila dengan memproduksi sendiri dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lain.

Persediaan dinilai dengan menggunakan harga pembelian terakhir berdasarkan hasil opname fisik per tanggal neraca.

4) Asset tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan:

1) Tanah;
2) Peralatan dan Mesin;
3) Gedung dan Bangunan;
4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
5) Aset Tetap Lainnya; dan
6) Konstruksi dalam Pengerjaan.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:

1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
3) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
4) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya termasuk biaya impor dan setiap biaya yang dapat didistribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh: biaya administrasi proyek, biaya persiapan tempat, biaya perencanaan, biaya pengiriman awal, biaya arsitek, biaya konstruksi dan biaya pengawasan pelaksanaan pekerjaan.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

c Asset Lainnya

Aset lainnya merupakan aset rumah sakit yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Termasuk di dalam aset lainnya adalah:

- Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
- Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
- Aset Tidak Berwujud;
- Aset Lain-lain.

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak /berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh debitur ke kas umum daerah/rumah sakit atau berdasarkan daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pihak yang bertanggungjawab ke kas umum daerah/rumah sakit.

Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

Aset tidak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan aset tak berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan di masa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir ke dalam entitas.

Aset tak berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat 5 tahun.

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

e Kewajiban

Karakterisitik kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah, dengan pemberi jasa lainnya atau kewajiban terhadap pelaksanaan peraturan pemerintah terkait dengan perpajakan.

Kewajiban dikelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul dan dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

f Ekuitas

Ekuitas dana lancar diakui pada akhir periode akuntansi dan dicatat berdasarkan jumlah pembiayaan yang terdiri dari sisa lebih perhitungan pembiayaan anggaran, cadangan piutang, cadangan persediaan dan dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka pendek yang di akui pada akhir periode.

Ekuitas dana investasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah yang ditanamkan dalam investasi jangka panjang, jumlah nilai aktiva tetap, nilai aset lainnya serta dana yang harus disiapkan untuk pembayaran utang jangka panjang.

Ekuitas dana cadangan diakui pada akhir periode akuntasi berdasarkan jumlah dana cadangan yang ditransfer dalam periode berjalan.

5. PENJELASAN POS - POS REALISASI ANGGARAN

a. Realisasi Penerimaan

Penerimaan RSUD Kolonodale Kabupaten Morowali Utara untuk tahun anggaran 2024 adalah Pedapatan Asli Daerah Kabupaten Morowali Utara yang berasal dari sumber sebagai berikut:

5. PENJELASAN POS - POS REALISASI ANGGARAN (Lanjutan)

	Anggaran	Realisasi	%
Jasa Layanan			
Jasa Layanan Pasien BPJS Kesehatan	35.911.631.203,00	44.930.326.591,00	125%
Jasa Layanan Pasien Jasa Raharja	253.218.372,00	465.627.791,00	184%
Jasa Layanan BPJS Ketenagakerjaan	985.175.265,00	1.741.683.700,00	177%
Jasa Layanan Pasien Ambulance	1.478.796.195,00	2.427.027.000,00	164%
Jasa Layanan Obat Kronis	727.168.110,00	874.869.762,00	120%
Jasa Layanan Pasien Umum	2.515.273.706,00	4.226.202.747,00	168%
Jasa Layanan TCM Laboratorium	8.450.000,00	56.223.273,00	665%
Jumlah	41.879.712.851,00	54.721.960.864,00	131%
Lain-lain Pendapatan BLUD			
Pendapatan Bunga Bank	120.287.150,00	226.973.994,88	189%
Jumlah	120.287.150,00	226.973.994,88	189%
Jumlah Penerimaan	42.000.000.001,00	54.948.934.858,88	131%

b Realisasi Belanja

Belanja RSUD Kolonodale Kabupaten Morowali Utara adalah pengeluaran yang digunakan untuk menanggung kebutuhan operasional rumah sakit maupun untuk pengadaan aset rumah sakit. Adapun realisasi belanja RSUD Kolonodale Kabupaten Morowali Utara untuk tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Operasi	78.850.586.736,00	80.767.526.948,60	102%
Belanja Modal	44.885.965.444,00	44.751.673.838,00	100%
Jumlah	123.736.552.180,00	125.519.200.786,60	101%

Adapun rincian belanja operasi maupun belanja modal adalah sebagai berikut:

1) Belanja Operasi

	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai			
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	24.984.270.181,00	29.349.151.682,00	117%
Jumlah Belanja Pegawai	24.984.270.181,00	29.349.151.682,00	117%
Belanja Barang dan Jasa	53.866.316.555,00	51.418.375.266,60	95%
Jumlah Belanja Barang dan Jasa	53.866.316.555,00	51.418.375.266,60	95%
Jumlah Belanja Operasi	78.850.586.736,00	80.767.526.948,60	102%

5. PENJELASAN POS - POS REALISASI ANGGARAN (Lanjutan)

2) Belanja Modal

	Anggaran	Realisasi	%
Peralatan dan Mesin			
Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	3.000.000,00	3.000.000,00	100%
Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	34.290.000,00	6.990.000,00	20%
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	504.795.900,00	497.496.800,00	99%
Belanja Modal Alat Pendingin	205.475.000,00	205.475.000,00	100%
Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	28.375.409.221,00	28.362.987.091,00	100%
Belanja Modal Personal Computer	544.910.000,00	544.825.000,00	100%
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	731.729.000,00	727.904.000,00	99%
Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	2.170.000,00	2.165.000,00	100%
Belanja Modal Mebel	1.799.714.500,00	1.798.654.000,00	100%
Belanja Modal Alat Dapur	5.402.800,00	5.402.800,00	100%
Belanja Modal Peralatan Permainan	11.944.000,00	11.944.000,00	100%
Belanja Modal Peralatan Jaringan	247.756.000,00	201.749.000,00	81%
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	15.000.000,00	-	0%
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	3.345.285.300,00	3.342.000.000,00	100%
Jumlah	35.826.881.721,00	35.710.592.691,00	100%
Gedung dan Bangunan			
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	8.939.083.723,00	8.921.181.147,00	100%
Belanja Modal Pagar	120.000.000,00	119.900.000,00	100%
Jumlah	9.059.083.723,00	9.041.081.147,00	100%
Jumlah Belanja Modal	44.885.965.444,00	44.751.673.838,00	100%

6. PENJELASAN POS - POS NERACA

a Kas di Badan Layanan Umum Daerah

Saldo kas di BLUD Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Bank BPD - Sulteng - 4010102309035	80.540.072,00	7.556.564.647,00
Bank Mandiri - 1510017493690	9.593.677.057,24	725.000,00
Kas Tunai Bendahara Penerimaan	25.035.000,00	-
Kas Tunai Bendahara Pengeluaran	10.522.700,00	421.503.523,00
Jumlah	9.709.774.829,24	7.978.793.170,00

6. PENJELASAN POS - POS NERACA (Lanjutan)

Saldo Kas di Bank Sulteng BPD pada tahun 2024 disajikan sebesar Rp80.540.072,-. Saldo tersebut Merupakan penerimaan dari pendapatan jasa pelayanan BPJS Obat Kronis, terlampir pada rekening koran per 31 Desember 2024, Kas di Bank Mandiri tahun 2024 disajikan sebesar Rp9.593.677.057,24,- Kas tunai di Bendahara Penerimaan BLUD per 31 Desember 2024 sebesar Rp25.035.000,- merupakan pendapatan usaha BLUD dari Kantin Sehat Gizi dan Kas Tunai di Bendahara Pengeluaran BLUD per 31 Desember 2024 sebesar Rp10.522.700 merupakan sisa dari belanja.

Saldo Kas di Bank Sulteng BPD pada tahun 2023 disajikan sebesar Rp7.556.654.647,-. Saldo tersebut Merupakan penerimaan dari pendapatan jasa pelayanan pasien BPJS, jasa pelayanan pasien Umum, jasa pelayanan pasien Jasa Raharja, Pasien Obat Kronis dan BPJS Ketenagakerjaan terlampir pada rekening koran per 31 Desember 2023, Kas di Bank Madiri tahun 2023 disajikan sebesar Rp725.000,- dan kas tunai di Bendahara BLUD per 31 Desember 2023 sebesar Rp421.503.523,- merupakan sisa dari belanja dan Penerimaan pasien umum BLUD tahun 2023.

b Piutang

Saldo piutang Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Piutang BPJS Kesehatan Ambulance November	-	104.868.000,00
Piutang BPJS Kesehatan Susulan Juli	237.850.200,00	-
Piutang BPJS Kesehatan Susulan Agustus	376.765.800,00	-
Piutang BPJS Kesehatan Susulan Rawat Jalan Oktober	-	1.189.300,00
Piutang BPJS Kesehatan Susulan Rawat Inap Oktober	-	125.914.700,00
Piutang BPJS Kesehatan Susulan September	197.238.900,00	25.203.400,00
Piutang BPJS Kesehatan Ambulance Desember	233.018.000,00	154.168.000,00
Piutang BPJS Kesehatan Reguler November	4.162.810.000,00	3.098.003.700,00
Piutang BPJS Kesehatan Reguler Desember	4.116.721.200,00	2.963.098.100,00
Piutang BPJS Kesehatan Obat Kronis Juli	128.158.639,00	68.347.819,00
Piutang BPJS Kesehatan Obat Kronis Agustus	-	77.164.672,00
Penyisihan Piutang	(47.262.814)	(33.089.788,00)
Jumlah	9.405.299.925	6.584.867.903,00

Pada tahun 2024, saldo piutang RSUD Kolonodale kepada BPJS Kesehatan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Piutang per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp9.405.299.925, lebih tinggi dari saldo piutang per 31 Desember 2023 yang sebesar Rp6.584.867.903. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan piutang reguler untuk bulan November dan Desember 2024 yang mencapai Rp8,2 miliar, yang merupakan tagihan atas layanan rutin rawat jalan dan rawat inap kepada BPJS Kesehatan. Selain itu, terdapat juga tambahan piutang dari pelayanan Ambulance Desember, Susulan Juli hingga September, serta piutang atas obat kronis Juli yang belum diterima pembayarannya hingga akhir tahun 2024.

b Piutang (Lanjutan)

Adanya kenaikan volume layanan kesehatan dan keterlambatan proses klaim BPJS Kesehatan turut mempengaruhi akumulasi saldo piutang di akhir tahun. Untuk mengantisipasi risiko piutang tak tertagih, RSUD Kolonodale telah membentuk penyisihan piutang tak tertagih sebesar Rp47.262.814 pada tahun 2024, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp33.089.788. Manajemen RSUD Kolonodale terus berupaya aktif dalam proses penagihan dan rekonsiliasi dengan BPJS Kesehatan guna memastikan penyelesaian piutang secara tepat waktu.

c Persediaan

Saldo persediaan Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Alat Listrik	8.735.518,00	1.534.425,00
Alat Tulis Kantor	2.426.454,00	2.236.047,00
Bahan Pembersih Loundry		2.682.416,00
Perabot Kantor "Jasa Kebersihan Kantor"	372.768,00	175.000,00
Bahan Cetak	16.667.982,00	2.441.072,00
Kertas dan Cover	-	-
Bahan Bakar dan Pelumas	-	-
Bahan Isi Tabung Gas	17.261.600,00	10.926.000,00
Oksigen	-	-
Alat Dapur	-	-
Bahan Gizi	19.890.177,00	36.968.890,00
Obat Gudang	1.317.599.342,00	500.839.814,00
BHP/ALKES Gudang	679.928.356,00	1.086.553.046,00
Obat Apotik	307.906.999,00	136.995.222,00
BHP/ALKES Apotek	93.919.411,00	73.230.645,00
Jumlah	2.464.708.607,00	1.854.582.577,00

Saldo persediaan per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp2.464.706.583,00, mengalami peningkatan dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 yang sebesar Rp1.854.580.554,00. Kenaikan ini mencerminkan adanya peningkatan kebutuhan operasional serta perencanaan pengadaan yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya.

Salah satu komponen yang mengalami kenaikan signifikan adalah persediaan pada akun "Obat Gudang" yang naik dari Rp500.839.814,00 di tahun 2023 menjadi Rp1.317.599.342,00 di tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan adanya peningkatan stok obat untuk kebutuhan pelayanan di tahun berikutnya. Selain itu, akun "Bahan Isi Tabung Gas" juga mengalami kenaikan dari Rp10.926.000,00 menjadi Rp17.261.600,00, yang mengindikasikan peningkatan kebutuhan gas untuk operasional.

c Persediaan (Lanjutan)

Di sisi lain, terdapat beberapa akun persediaan yang mengalami penurunan, seperti "Bahan Pembersih Laundry" yang pada tahun 2024 tidak memiliki saldo, padahal pada tahun 2023 tercatat sebesar Rp2.682.416,00. Penurunan ini dapat disebabkan oleh efisiensi penggunaan bahan pembersih atau pengalihan metode operasional. Selain itu, akun "BHP/ALKES Gudang" juga mengalami penurunan signifikan dari Rp1.086.553.046,00 menjadi Rp679.928.356,00, yang mencerminkan adanya pengurangan stok alat kesehatan di gudang.

Secara keseluruhan, perubahan dalam saldo persediaan ini mencerminkan upaya manajemen dalam mengatur kebutuhan logistik dan operasional secara lebih efektif dan efisien. Manajemen terus melakukan evaluasi terhadap kebutuhan riil dan optimalisasi pengelolaan persediaan agar tetap sesuai dengan kebutuhan pelayanan dan kegiatan operasional lainnya.

d Asset Tetap

	2024			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Harga Perolehan :				
Tanah	19.772.092.383,00			19.772.092.383,00
Peralatan dan mesin	76.320.372.238,00	35.660.763.691,00		111.981.135.929,00
Gedung dan Bangunan	75.605.933.707,00	45.538.384.596,00		121.144.318.303,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	12.250.829.357,00	446.340.327,00		12.697.169.684,00
Aset Tetap Lainnya	7.500.000,00			7.500.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	32.143.794.646,00		32.113.914.646,00	29.880.000,00
Jumlah Harga Perolehan	216.100.522.331,00	81.645.488.614,00	32.113.914.646,00	265.632.096.299,00
Jumlah Akumulasi Penyusutan	(72.804.205.268,00)		12.508.408.285,00	(85.312.613.553,00)
Nilai Buku Aset Tetap	143.296.317.063,00			180.319.482.746,00

	2023			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Harga Perolehan :				
Tanah	19.442.086.083,00	330.006.300,00		19.772.092.383,00
Peralatan dan mesin	72.881.389.077,00	3.438.983.161,00		76.320.372.238,00
Gedung dan Bangunan	75.513.896.264,00	92.037.443,00		75.605.933.707,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	11.779.129.357,00	471.700.000,00		12.250.829.357,00
Aset Tetap Lainnya	7.500.000,00	-		7.500.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	7.171.873.219,00	24.971.921.427,00		32.143.794.646,00
Jumlah Harga Perolehan	186.795.874.000,00	29.304.648.331,00		216.100.522.331,00
Jumlah Akumulasi Penyusutan	(62.836.647.601,00)	(9.967.557.667,00)		(72.804.205.268,00)
Nilai Buku Aset Tetap	123.959.226.399,00			143.296.317.063,00

Saldo aset tetap per 31 Desember 2024 mengalami peningkatan dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023. Pada akhir tahun 2024, nilai buku aset tetap tercatat sebesar Rp180.319.482.746,00, meningkat dari Rp143.296.317.063,00 pada tahun sebelumnya.

d Asset Tetap (Lanjutan)

Selain itu, terdapat juga aset dalam akun "Konstruksi Dalam Pengerjaan" yang mengalami penyelesaian pekerjaan dengan total pengurangan sebesar Rp32.113.914.646,00. Saldo akhir untuk "Konstruksi Dalam Pengerjaan" per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp29.890.000.000,00, yang menunjukkan bahwa sebagian besar proyek konstruksi telah diselesaikan dan direklasifikasi ke aset tetap terkait.

Dengan adanya penambahan aset baru dan penyelesaian proyek konstruksi, nilai aset tetap bruto (sebelum penyusutan) mengalami kenaikan dari Rp216.100.522.331,00 menjadi Rp265.632.096.930,00. Peningkatan ini mencerminkan upaya manajemen dalam memperkuat kapasitas dan infrastruktur guna mendukung kegiatan operasional di masa mendatang.

Dengan adanya penambahan aset baru dan penyelesaian proyek konstruksi, nilai aset tetap bruto (sebelum penyusutan) mengalami kenaikan dari Rp216.100.522.331,00 menjadi Rp265.632.096.930,00. Peningkatan ini mencerminkan upaya manajemen dalam memperkuat kapasitas dan infrastruktur guna mendukung kegiatan operasional di masa mendatang.

e. Asset Lainnya

Saldo aset lainnya Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Tagihan Jangka Panjang	-	-
Aset Lain-lain	-	-
Aset Tak Berwujud	653.295.000,00	653.295.000,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(350.064.000,00)	(262.548.000,00)
Jumlah	303.231.000,00	390.747.000,00

Saldo aset lainnya per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp303.231.000,00, mengalami penurunan dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 yang sebesar Rp390.747.000,00. Penurunan ini terutama disebabkan oleh peningkatan amortisasi atas aset tak berwujud selama tahun berjalan.

Aset lainnya yang dimiliki oleh BLUD RSUD sepenuhnya terdiri dari aset tak berwujud dengan nilai perolehan sebesar Rp653.295.000,00, yang nilainya tetap sama sejak tahun 2023. Tidak terdapat saldo untuk tagihan jangka panjang maupun aset lain-lain lainnya pada tahun 2024 dan 2023.

Selama tahun 2024, BLUD RSUD membebankan amortisasi sebesar Rp87.516.000,00 sehingga akumulasi amortisasi per 31 Desember 2024 menjadi Rp350.064.000,00, meningkat dari Rp262.548.000,00 pada akhir tahun 2023. Peningkatan amortisasi ini sesuai dengan kebijakan amortisasi yang diterapkan oleh BLUD RSUD untuk mengalokasikan biaya aset tak berwujud secara sistematis selama umur manfaatnya.

6. PENJELASAN POS - POS NERACA (Lanjutan)

f. Kewajiban

Saldo kewajiban Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Pendapatan Diterima Di Muka		
Utang Usaha	3.398.462.296,00	1.860.444.201,00
Utang Jasa Medis	4.738.730.850,00	3.267.292.872,00
Utang Pajak		12.206.091,00
Biaya yang Masih Harus Dibayar	-	-
Jumlah	8.137.193.146,00	5.139.943.164,00

Adapun rincian kewajiban Per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

	2024
Utang Usaha	
Oksigen	232.281.500,00
BMHP dan Reagen	1.420.461.696,00
Obat-obatan	1.669.643.099,00
Koran dan Iklan	6.500.000,00
BBM Rujukan	51.261.001,00
Internet	18.315.000,00
Jumlah	3.398.462.296,00
Utang Jasa Medis	
BPJS Kesehatan	4.726.281.370,00
Jasa Raharja	8.764.480,00
Perushaan	3.685.000,00
Jumlah	4.738.730.850,00

Per 31 Desember 2024, total kewajiban BLUD RSUD tercatat sebesar Rp8.137.193.146,00, mengalami kenaikan dibandingkan dengan saldo kewajiban pada 31 Desember 2023 yang sebesar Rp5.139.943.164,00. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan utang usaha dan utang jasa medis selama tahun berjalan.

Utang usaha pada akhir tahun 2024 tercatat sebesar Rp3.398.462.296,00, mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp1.860.444.201,00. Kenaikan utang usaha ini terutama berasal dari kewajiban atas pembelian oksigen sebesar Rp232.281.500,00, pembelian BMHP dan reagen sebesar Rp1.420.461.696,00, serta pembelian obat-obatan sebesar Rp1.669.643.099,00. Selain itu, terdapat pula utang terkait kebutuhan operasional lainnya seperti koran dan iklan, BBM rujukan, serta biaya langganan internet.

Selain utang usaha, BLUD RSUD juga memiliki utang jasa medis sebesar Rp4.738.730.850,00, meningkat dari Rp3.267.292.872,00 pada tahun sebelumnya. Kewajiban ini terutama berasal dari utang kepada BPJS Kesehatan sebesar Rp4.726.281.370,00, Jasa Raharja sebesar Rp8.764.480,00, serta kewajiban kepada perusahaan lainnya sebesar Rp3.685.000,00.

f. Kewajiban (Lanjutan)

Selama tahun 2024, BLUD RSUD tidak memiliki saldo kewajiban atas pendapatan diterima di muka, utang pajak, maupun biaya yang masih harus dibayar, berbeda dengan tahun 2023 yang mencatat utang pajak sebesar Rp12.206.091,00. Secara keseluruhan, peningkatan kewajiban ini mencerminkan peningkatan volume layanan dan aktivitas operasional BLUD RSUD, yang berdampak pada peningkatan kewajiban kepada pihak ketiga, khususnya dalam penyediaan jasa dan pengadaan barang.

g. Ekuitas

Saldo ekuitas Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Ekuitas Awal	154.965.364.549,00	127.409.942.957,00
Surplus dan Defisit Tahun Lalu		-
Koreksi Ekuitas	(9.746.173,00)	(24.303.179,00)
Surplus dan Defisit Tahun Berjalan	39.109.685.585,00	27.579.724.771,00
Jumlah	194.065.303.961,00	154.965.364.549,00

Pada awal tahun 2024, ekuitas dibuka dengan saldo sebesar Rp154.965.364.549,00. Selama tahun 2024, BLUD RSUD mencatat koreksi ekuitas sebesar Rp9.746.173,00 yang merupakan penyesuaian atas ekuitas sebelumnya. Selain itu, BLUD RSUD berhasil mencatatkan surplus tahun berjalan sebesar Rp39.109.685.585,00 yang berkontribusi besar terhadap peningkatan ekuitas di tahun ini.

Sebagai perbandingan, pada tahun 2023 BLUD RSUD juga mencatat surplus tahun berjalan sebesar Rp27.579.724.771,00, meskipun terdapat koreksi ekuitas sebesar Rp24.303.179,00. Kenaikan ekuitas ini mencerminkan kinerja keuangan yang positif serta efisiensi pengelolaan sumber daya selama tahun 2024.

Sebagai perbandingan, pada tahun 2023 BLUD RSUD juga mencatat surplus tahun berjalan sebesar Rp27.579.724.771,00, meskipun terdapat koreksi ekuitas sebesar Rp24.303.179,00. Kenaikan ekuitas ini mencerminkan kinerja keuangan yang positif serta efisiensi pengelolaan sumber daya selama tahun 2024.

Dengan demikian, saldo ekuitas BLUD RSUD mengalami pertumbuhan yang sehat, yang menunjukkan kemampuan entitas dalam menghasilkan surplus dan meningkatkan posisi keuangannya secara berkelanjutan.

7. PENJELASAN POS - POS LAPORAN OPERASIONAL

a. Pendapatan

Pendapatan tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Pendapatan Jasa Layanan	56.867.726.053	39.779.406.149
Pendapatan APBD	72.359.576.411	84.993.710.147
Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah	226.973.995	-
Jumlah	129.454.276.459	124.773.116.296

Rincian atas masing-masing jenis pendapatan tersebut adalah sebagai berikut:

Pendapatan Jasa Layanan

	2024	2023
Pendapatan Pasien Umum	3.927.429.653,00	2.243.962.005,00
Pendapatan Pasien Umum - Obat	281.205.352,00	216.477.702,00
Pendapatan Pasien - Obat Kronis	548.552.691,00	571.940.256,00
Pendapatan Pasien - Ambulance	2.401.011.900,00	1.355.924.500,00
Pendapatan Pasien BPJS	46.850.960.991,00	34.178.090.162,00
Pendapatan Pasien Covid 19	553.839.000,00	-
Pendapatan Pasien Jasa Raharja	483.156.751,00	379.623.114,00
Pendapatan Pasien Ketenagakerjaan	1.741.683.700,00	811.513.410,00
Pendapatan Pasien Perusahaan	24.937.742,00	-
Pendapatan Pasien TCM Lab	24.150.000,00	21.875.000,00
Pendapatan Kantin Sehat Gizi	25.035.000,00	-
Pendapatan Lebih Transfer Pasien Umum	5.663.245,00	-
Pendapatan Reward Akuisisi Koprasi Mandiri	100.000,00	-
Pendapatan Qris	28,00	-
Jumlah	56.867.726.053,00	39.779.406.149,00

Pendapatan APBD

	2024	2023
APBD - Operasional	29.864.946.073,00	57.560.986.622,00
APBD - Investasi	42.494.630.338,00	27.432.723.525,27
Jumlah	72.359.576.411,00	84.993.710.147,27

Lain-lain Pendapatan BLUD

	2024	2023
Pendapatan Bungan Bank	226.973.995	-
Jumlah	226.973.995	-

a. Pendapatan (Lanjutan)

Pendapatan BLUD RSUD untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Total pendapatan yang diperoleh pada tahun 2024 adalah sebesar Rp129.454.276.459,00, meningkat dari Rp124.773.116.296,00 pada tahun 2023. Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan signifikan pada Pendapatan Jasa Layanan serta adanya pendapatan baru pada pos Lain-lain Pendapatan BLUD yang sebelumnya tidak tercatat.

Pendapatan utama BLUD RSUD berasal dari Pendapatan Jasa Layanan yang mencatatkan kenaikan sebesar Rp17.088.319.904,00 atau sekitar 43% dibandingkan dengan tahun 2023. Pada tahun 2024, Pendapatan Jasa Layanan tercatat sebesar Rp56.867.726.053,00, naik dari Rp39.779.406.149,00 di tahun sebelumnya. Kontribusi terbesar pada Pendapatan Jasa Layanan berasal dari pasien BPJS yang mencapai Rp46.850.960.991,00, meningkat dibandingkan Rp34.178.090.162,00 di tahun 2023. Hal ini mencerminkan meningkatnya volume layanan yang diberikan kepada pasien BPJS sepanjang tahun 2024.

Selain pasien BPJS, pendapatan dari pasien umum juga mengalami peningkatan. Pendapatan pasien umum pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp3.927.429.653,00, meningkat dibandingkan Rp2.243.962.005,00 di tahun sebelumnya. Pendapatan dari pasien umum – obat tercatat sebesar Rp281.205.352,00, mengalami kenaikan dari Rp216.477.702,00 di tahun 2023. Pendapatan dari pasien dengan kondisi kronis juga menunjukkan tren positif meskipun sedikit menurun dari Rp571.240.956,00 pada 2023 menjadi Rp548.552.691,00 pada 2024.

Selain pasien BPJS, pendapatan dari pasien umum juga mengalami peningkatan. Pendapatan pasien umum pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp3.927.429.653,00, meningkat dibandingkan Rp2.243.962.005,00 di tahun sebelumnya. Pendapatan dari pasien umum – obat tercatat sebesar Rp281.205.352,00, mengalami kenaikan dari Rp216.477.702,00 di tahun 2023. Pendapatan dari pasien dengan kondisi kronis juga menunjukkan tren positif meskipun sedikit menurun dari Rp571.240.956,00 pada 2023 menjadi Rp548.552.691,00 pada 2024.

Selain pasien BPJS, pendapatan dari pasien umum juga mengalami peningkatan. Pendapatan pasien umum pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp3.927.429.653,00, meningkat dibandingkan Rp2.243.962.005,00 di tahun sebelumnya. Pendapatan dari pasien umum – obat tercatat sebesar Rp281.205.352,00, mengalami kenaikan dari Rp216.477.702,00 di tahun 2023. Pendapatan dari pasien dengan kondisi kronis juga menunjukkan tren positif meskipun sedikit menurun dari Rp571.240.956,00 pada 2023 menjadi Rp548.552.691,00 pada 2024.

Terdapat pula pendapatan dari pasien ambulance sebesar Rp2.401.011.900,00, yang menunjukkan kenaikan dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp1.355.924.500,00. Selain itu, pendapatan dari pasien Jasa Raharja dan pasien ketenagakerjaan juga mengalami peningkatan. Pendapatan dari Jasa Raharja naik menjadi Rp483.156.751,00, sedangkan pendapatan dari pasien ketenagakerjaan tercatat sebesar Rp1.741.683.700,00, lebih tinggi dibandingkan Rp811.513.410,00 pada tahun sebelumnya.

Pendapatan dari segmen lainnya seperti pasien Covid-19, pasien perusahaan, pasien TCM Lab, kantin sehat gizi, dan lainnya, turut memberikan kontribusi terhadap kenaikan total pendapatan jasa layanan. Bahkan pada tahun 2024 terdapat beberapa pendapatan baru seperti Pendapatan Qris sebesar Rp28,00 dan pendapatan dari reward akuisisi koperasi mandiri sebesar Rp100.000,00.

a. Pendapatan (Lanjutan)

Pendapatan dari APBD tahun 2024 tercatat sebesar Rp72.359.576.411,00, menurun dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp84.993.710.147,00. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya pendapatan APBD - Operasional yang pada tahun 2023 mencapai Rp57.560.986.622,00 menjadi Rp29.864.946.073,00 pada tahun 2024. Namun demikian, terjadi peningkatan pada APBD - Investasi yang naik dari Rp27.432.723.525,00 pada tahun 2023 menjadi Rp42.494.630.338,00 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran fokus anggaran dari belanja operasional ke investasi.

Selain pendapatan dari jasa layanan dan APBD, BLUD RSUD juga mencatatkan Lain-lain Pendapatan BLUD sebesar Rp226.973.995,00 yang berasal dari pendapatan bunga bank. Pada tahun 2023, pos ini tidak memiliki saldo, sehingga menjadi sumber pendapatan baru yang ikut meningkatkan total pendapatan di tahun berjalan.

Secara keseluruhan, peningkatan pendapatan BLUD RSUD pada tahun 2024 menunjukkan tren positif yang didukung oleh meningkatnya jumlah layanan kepada pasien, khususnya dari pasien BPJS serta optimalisasi sumber pendapatan lain. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa BLUD RSUD mampu meningkatkan efisiensi operasional dan diversifikasi pendapatan di tengah dinamika layanan kesehatan.

b. Biaya Pelayanan

Beban pelayanan adalah biaya yang dikeluarkan oleh BLUD untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kepada pasien. Adapun biaya pelayanan selama tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Honorarium Pengelola Keuangan	67.800.000	75.600.000
Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	23.160.000	8.160.000
Obat-obatan	8.532.681.839	6.709.660.820
Pakaian Dinas Harian (PDH)	16.193.960	36.029.500
Honorarium Narasumber/Pembawa acara dan Panitia	-	34.000.000
Biaya Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN	30.778.903.686	19.623.163.940
Jasa Tenaga Kesehatan	14.024.277.765	8.511.987.592
Jasa Tenaga Administrasi	1.356.133.665	1.280.888.400
Jasa Tenaga Keamanan	271.492.200	207.000.000
Jasa Tenaga Ahli	1.396.536.000	1.529.904.893
Jasa Tenaga Kebersihan	1.863.668.500	1.077.751.100
Jasa Tenaga Operator Komputer	78.000.000	75.000.000
Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	37.858.000	-
Jumlah	58.446.705.615	39.169.146.245

Beban pelayanan merupakan biaya yang dikeluarkan oleh BLUD RSUD untuk mendukung aktivitas pelayanan kepada pasien. Selama tahun 2024, total beban pelayanan tercatat sebesar Rp58.446.705.615, mengalami peningkatan signifikan dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp39.169.146.245.

b. Biaya Pelayanan (Lanjutan)

Peningkatan terbesar berasal dari akun "Biaya Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN" yang pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp30.778.903.686, naik dari Rp19.623.163.940 di tahun 2023. Kenaikan ini menunjukkan adanya peningkatan pembayaran jasa pelayanan kesehatan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) selama tahun berjalan.

Selain itu, beban obat-obatan juga mengalami peningkatan dari Rp6.709.660.820 di tahun 2023 menjadi Rp8.532.681.839 di tahun 2024, yang disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan obat-obatan untuk mendukung pelayanan kesehatan kepada pasien. Beban pakaian dinas harian (PDH) mengalami penurunan dari Rp36.029.500 menjadi Rp16.193.960.

Pada pos jasa tenaga kesehatan, terjadi peningkatan dari Rp8.511.987.592 pada tahun 2023 menjadi Rp14.024.277.765 pada tahun 2024, yang mencerminkan peningkatan volume kerja atau kebutuhan tenaga medis tambahan untuk memenuhi tuntutan layanan yang lebih tinggi. Begitu pula dengan jasa tenaga keamanan dan jasa tenaga kebersihan yang turut mengalami kenaikan masing-masing menjadi Rp271.492.200 dan Rp1.863.668.500 di tahun 2024.

Di sisi lain, beberapa akun seperti honorarium narasumber/pembawa acara dan panitia pada tahun 2024 tercatat nihil, dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencatatkan sebesar Rp34.000.000. Honorarium pengelola keuangan dan honorarium pengadaan barang/jasa juga mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan, peningkatan beban pelayanan selama tahun 2024 disebabkan oleh kebutuhan yang lebih besar dalam mendukung pelayanan medis dan non-medis kepada pasien, yang mencerminkan peningkatan aktivitas pelayanan BLUD RSUD selama tahun tersebut.

c. Biaya Umum dan Admisnitrasi

Biaya umum dan administrasi adalah biaya yang dikeluarkan untuk keperluan administrasi dan operasional rumah sakit sehari-hari. Adapun biaya umum dan administrasi untuk tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Biaya Pegawai	-	31.807.349.351
Biaya Administrasi Kantor	963.469.696	684.129.553
Biaya Pemeliharaan	940.849.702	1.957.808.540
Biaya Barang dan Jasa	17.397.641.575	13.308.407.371
Biaya Penyisihan Piutang	-	-
Biaya Penyusutan dan Amortisasi	12.595.924.285	10.266.550.465
Jumlah	31.897.885.259	58.024.245.280

c. Biaya Umum dan Admisnitrasi (Lanjutan)

Biaya umum dan administrasi BLUD RSUD tahun 2024 tercatat sebesar Rp31.897.885.259,00, turun dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp58.024.245.280,00. Penurunan ini terutama karena tidak adanya pencatatan biaya pegawai di tahun 2024, sementara tahun sebelumnya tercatat Rp31.807.349.351,00. Biaya administrasi kantor dan barang/jasa mengalami kenaikan masing-masing menjadi Rp963.469.696,00 dan Rp17.397.641.575,00. Sementara biaya pemeliharaan turun menjadi Rp940.849.702,00. Biaya penyusutan dan amortisasi juga meningkat menjadi Rp12.595.924.285,00.

Rician masing-masing jenis biaya tersebut adalah sebagai berikut:

1) Biaya Pegawai

	2024	2023
Gaji Pokok PNS	-	13.160.090.063
Tunjangan Keluarga PNS	-	965.870.818
Tunjangan Jabatan PNS	-	140.560.000
Tunjangan Fungsional PNS	-	1.139.675.900
Tunjangan Fungsional Umum PNS	-	347.420.000
Tunjangan Beras PNS	-	725.286.300
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	-	15.607.894
Pembulatan Gaji PNS	-	270.868
Iuran Asuransi Kesehatan PNS	-	546.809.034
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS	-	11.029.646.568
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	-	3.512.474.011
Insentif Bagi ASN - Pelayanan Kesehatan	-	195.413.895
Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	-	28.224.000
Jumlah	-	31.807.349.351

2) Biaya Administrasi Kantor

	2024	2023
Biaya Alat Tulis Kantor	247.582.883	113.587.301
Biaya Bahan Cetak	603.035.068	509.451.439
Biaya Kertas dan Cover	104.201.745	57.590.813
Biaya Benda Pos	8.650.000	3.500.000
Jumlah	963.469.696	684.129.553

3) Biaya Pemeliharaan

	2024	2023
Biaya Pemeliharaan Alat Angkutan dinas Bermotor	515.214.690	314.818.249
Biaya Pemeliharaan Rumah tangga	-	78.540.000
Biaya Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	7.201.486	32.961.450
Biaya Pemeliharaan Alat Kesehatan	311.559.135	442.029.377

7. PENJELASAN POS - POS LAPORAN OPERASIONAL (Lanjutan)

	2024	2023
Biaya Pemeliharaan Alat Kantor Lainnya	46.824.681	174.911.522
Biaya Pemeliharaan Komputer	56.736.271	6.150.000
Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.313.439	908.397.942
Jumlah	940.849.702	1.957.808.540

4) Biaya Barang dan Jasa

	2024	2023
Biaya Bahan - Bahan Bangunan	-	3.154.800
Biaya bahan-bahan kimia	17.892.864	95.603.440
Biaya Bahan Bakar dan Pelumas	1.233.554.905	343.626.881
Biaya Bibit Tanaman	7.800.000	600.000
Biaya Isi Tabung Pemadam Kebakaran	-	10.020.000
Biaya Bahan isi Tabung Gas	1.242.973.400	1.173.377.600
Biaya Bahan Lainnya	3.919.032.447	4.795.853.781
Biaya Bahan Perabot Kantor	284.337.030	351.369.779
Biaya Bahan Perabot Listrik	108.879.337	129.036.580
Biaya Makan Minum Rapat	34.532.560	16.816.250
Biaya Makan Minum Jamuan Tamu	-	206.271.000
Biaya Makan Minum Pasien	1.976.793.126	1.787.493.744
Biaya Jasa Kalibrasi	147.513.980	68.434.620
Biaya Listrik	108.879.337	545.229.852
Biaya Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	50.900.000	27.860.000
Biaya Internet	12.921.004	167.660.000
Biaya Lembur	1.291.322.800	1.292.862.000
Biaya sewa kendaraan dinas bermotor perorangan	60.000.000	-
Biaya sewa kendaraan bermotor Angkutan barang	69.000.000	62.000.000
Biaya Sewa alat pembersih	-	34.200.000
Biaya Sewa Bangunan tempat tinggal lainnya	613.000.000	465.000.000
Biaya Konsultasi perencanaan	139.828.009	37.000.000
Biaya Jasa Pengawasan	677.304.540	842.959.000
Biaya Jasa Konsultasi berorientasi Layanan	149.850.000	-
Biaya Beasiswa Tugas belajar S2	100.000.000	100.000.000
Perjalanan Dinas Biasa	4.012.596.581	727.194.044
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.131.689.656	24.784.000
Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.040.000	-
Jumlah	17.397.641.575	13.308.407.371

7. PENJELASAN POS - POS LAPORAN OPERASIONAL (Lanjutan)

Pada tahun 2024, BLUD RSUD tidak mencatatkan biaya pegawai, disebabkan adanya perubahan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dialihkan ke Dinas kesehatan kabupaten Morowali utara. disedangkan pada tahun 2023 tercatat sebesar Rp31.807.349.351,00. Biaya pegawai tersebut pada tahun 2023 terdiri dari beberapa komponen utama, seperti gaji pokok PNS sebesar Rp13.160.090.063, tunjangan kinerja PNS sebesar Rp11.029.646.568, serta tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebesar Rp3.512.474.011. Selain itu, terdapat juga insentif bagi ASN dan iuran asuransi kesehatan PNS.

Biaya administrasi kantor pada tahun 2024 meningkat menjadi Rp963.469.696,00 dibandingkan Rp684.129.553,00 di tahun 2023. Kenaikan terjadi pada hampir seluruh komponen, seperti biaya alat tulis kantor yang naik menjadi Rp247.582.883, dan biaya bahan cetak yang meningkat menjadi Rp603.035.068. Biaya kertas dan cover serta biaya benda pos juga mengalami kenaikan di tahun 2024.

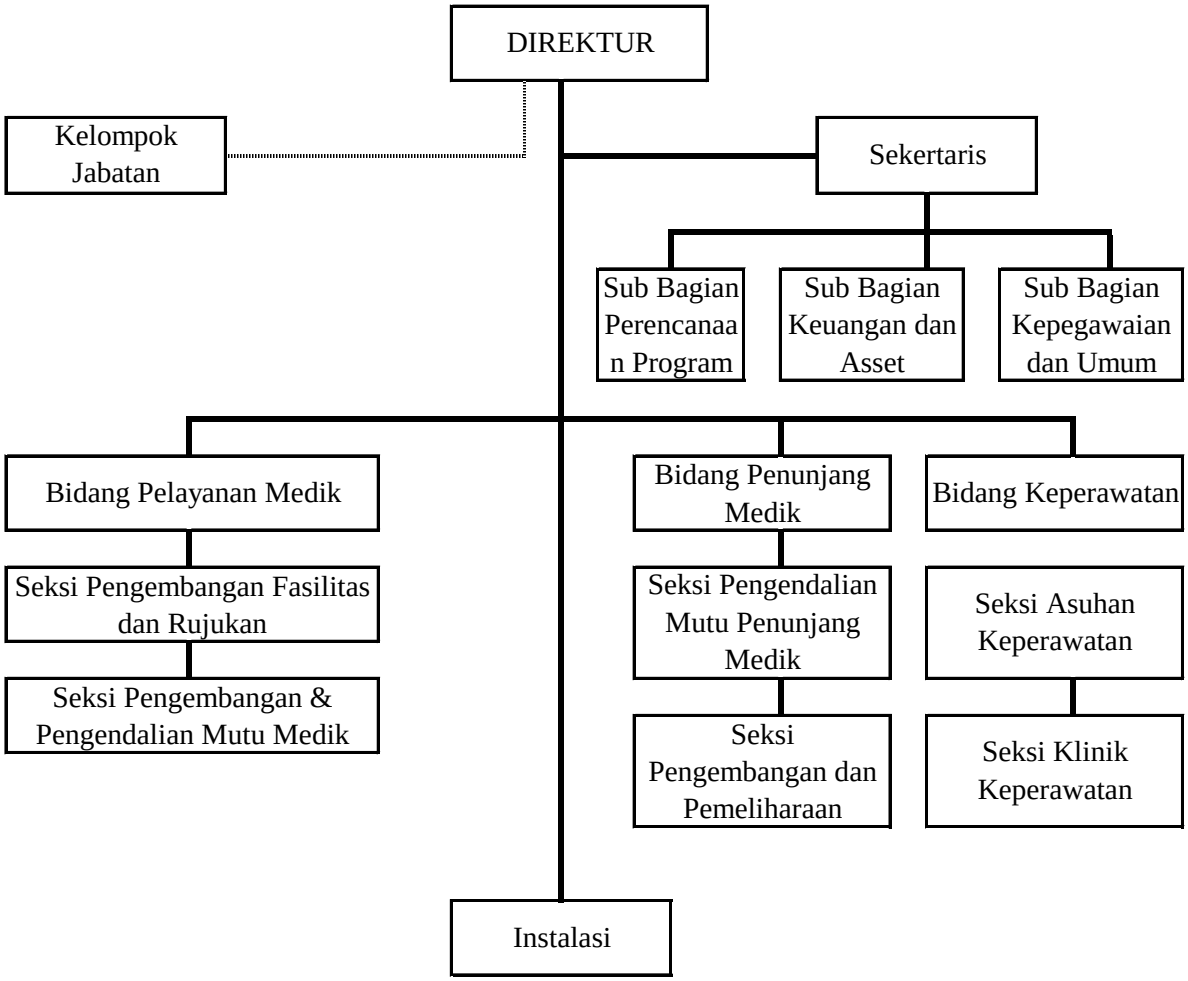
Biaya pemeliharaan pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp940.849.702,00, menurun dibandingkan Rp1.957.808.540,00 pada tahun 2023. Penurunan ini terutama disebabkan oleh tidak adanya biaya pemeliharaan rumah tangga dan turunnya biaya pemeliharaan alat kesehatan dari Rp442.029.377 menjadi Rp311.559.135. Namun demikian, terdapat kenaikan pada pemeliharaan alat angkutan dinas bermotor menjadi Rp515.214.690.

Biaya barang dan jasa pada tahun 2024 meningkat menjadi Rp17.397.641.575,00 dibandingkan Rp13.308.407.371,00 di tahun sebelumnya. Peningkatan signifikan terjadi pada biaya bahan bakar dan pelumas sebesar Rp1.233.554.905 dan biaya bahan isi tabung gas sebesar Rp1.242.973.400. Selain itu, biaya makan minum pasien juga naik menjadi Rp1.976.793.126. Terdapat juga kenaikan biaya untuk sewa kendaraan bermotor, jasa pengawasan, dan perjalanan dinas biasa yang menjadi Rp4.012.596.581 pada tahun 2024.

Secara keseluruhan, biaya administrasi kantor dan barang dan jasa menunjukkan tren kenaikan di tahun 2024, meskipun biaya pemeliharaan dan biaya pegawai menunjukkan penurunan atau tidak tercatat.

8. PENJELASAN DAN INFORMASI NON KEUANGAN

a. Struktur Organisasi



b. Visi dan Misi

Mengacu pada permasalahan Rumah Sakit dalam isu strategis yang perlu diselesaikan dalam jangka menengah dan berpijak pada perioritas pembangunan dalam rencana strategis rumah sakit dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Morowali Utara, RPJMD Propinsi Sulawesi Tengah, RPJMNas dan perioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam nawacita dan trisakti dimana didalam semua yang tertuang diatas pembangunan dibidang kesehatan salah satu perioritas, maka visi rumah sakit dalam rencana strategis adalah:

"Menjadi Rumah Sakit Umum Daerah dengan
Pelayanan Kesehatan yang Optimal, Profesional, dan terjangkau"

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Sehingga rumusan misi membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya yang harus dilakukan.

8. PENJELASAN DAN INFORMASI NON KEUANGAN (Lanjutan)

Sejalan dengan visi RSUD Kolonodale yang menunjukan sikap yang harus sejalan dengan program Bupati dan Wakil Bupati dalam RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026 sekaligus menegaskan upaya-upaya untuk mewujudkan pelayanan yang optimal, profesional dan terjangkau. Secara spesifik, misi adalah penetapan tujuan dan sasaran dari Renstra rumah sakit yang akan dilakukan dalam upaya mencapai visi yang telah ditetapkan.

Keempat misi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1) Memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai standar pelayanan
2) Meningkatkan sarana dan prasarana rumah sakit
3) Meningkatkan kualitas sumber daya dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas pokok/fungsi sesuai keahlian/profesi masing-masing
4) Melaksanakan pengelolaan administrasi dan keuangan rumah sakit yang transparan dan akuntabel.

9. PERSETUJUAN UNTUK MENERBITKAN LAPORAN KEUANGAN

Manajemen bertanggung jawab atas penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 yang diselesaikan pada tanggal 24 Maret 2025.



LAMPIRAN XXVIl :

DAFTAR LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH (LAKIP)



BUPATI MOROWALI UTARA
Dr. dr. DELIS JULKARSON HEHI, MARS

WAKIL BUPATI MOROWALI UTARA
H. DJIRA K, S.Pd., M.Pd

LAPORAN

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERITAH

KABUPATEN MOROWALI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2023

VISI DAN MISI

2021– 2026

VISI : **TERWUJUDNYA KABUPATEN MOROWALI UTARA YANG SEHAT, CERDAS, DAN SEJAHTERA.**

MISI :

1. Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik),afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata.
2. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah.
4. Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah.
5. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.

BUPATI MOROWALI UTARA

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis tahun anggaran 2023. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026.

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini berfungsi, antara lain sebagai alat penilaian kinerja, alat kendali, dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara. Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target karena penyusunan Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2023 ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pemberian pelayanan umum kepada masyarakat. Disamping itu, Laporan Kinerja ini juga dimaksudkan sebagai bahan evaluasi pencapaian kinerja terhadap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efesiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance*, dan *Clean Government*.

Akhir kata semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat untuk pertimbangan kebijakan selanjutnya.

Kolonodale, Maret 2024

BUPATI MOROWALI UTARA,

Dr. dr. DELIS JULKARSON HEHI, MARS

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
INSPEKTORAT DAERAH
(Kompleks Kantor Bupati)
Alamat : Jln. Bumi Nangka. Kolonodale Kode Pos – 94971

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja.

Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara.
Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, handal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini kehandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Kolonodale, Maret 2024

Inspektorat Daerah
Kabupaten Morowali utara
Inspektur,

ROMEL ERWIN TUNGKA, S.Pt
Pembina Tkt I IV/b
NIP. 19730724 200012 2 003

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja tahun 2023. Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2023 memiliki sebanyak 10 (sepuluh) Tujuan, 12 (dua belas) Indikator Tujuan dan 13 (tiga belas) Sasaran Strategis dan sebanyak 17 (tujuh belas) Indikator Sasaran.

Dari hasil pengukuran realisasi terhadap 17 (tujuh belas) target tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1) Target dengan capaian realiasi di atas 100% sebanyak 3 target;
2) Target dengan capaian realiasi tepat 100% sebanyak 1 target;
3) Target dengan capaian realiasi di bawah 100% sebanyak 11 target: dan
4) Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 2 target.

Rincian realisasi masing-masing target indikator kinerja pada masing-masing Sasaran Strategis yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tujuan 1
Meningkatnya Derajat Kesehatan

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja Sasaran	Tahun 2023		
			Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Mutu layanan Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	70,50	69,97	99,24

Tujuan 2
Meningkatkan Derajat Pendidikan Masyarakat

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja Sasaran	Tahun 2023		
			Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2.	Meningkatkan Jangkauan Layanan Pendidikan Dasar	Harapan Lama Sekolah	12,50	12,29	98,32
		Rata-Rata Lama Sekolah	9,00	8,94	99,33

Tujuan 3
Meningkatkan Peran Perempuan Dalam Pembangunan Menuju Keadilan dan Kesetaraan Gender

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja Sasaran	Tahun 2023		
			Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
3.	Meningkatnya Partisipasi Perempuan	Indeks Pembangunan Gender	97,50	96,53	99,00%

Tujuan 4
Meningkatkan Inovasi, Keterampilan dan Produktivitas Angkatan Kerja

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja Sasaran	Tahun 2023		
			Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
4.	Meningkatnya peluang lapangan kerja	Tingkat Pengganguran Terbuka (TPT)	4,7	2,23	47,44
5.	Meningkatnya kualitas Inovasi daerah	Indeks Inovasi daerah	35.00-60,00 poin (Inovativ)	35,18 poin (Inovativ)	100,51

Tujuan 5
Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Berdaya Saing

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja Sasaran	Tahun 2023		
			Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
6.	Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor strategis daerah	PDRB Perkapita	9.70%	10.45%	107,73%
7.	Meningkatnya kemudahan berinvestasi Rata-rata Pertumbuhan Nilai Investasi (PMA+PMDN)	Nilai Pertumbuhan Investasi (PMA + PMDN)	10.225.000.000.000	15.492.404.000.000	151,51%

Tujuan 6
Mewujudkan Pembangunan Desa yang Berkualitas

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja Sasaran	Tahun 2023		
			Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
8.	Meningkatnya kemandirian desa	Indeks Desa Membangun	≥ 0,7072 Maju	0,6958 (berkembang)	98,38

Tujuan 7
Memantapkan Pengelolaan Sumberdaya Alam Lingkungan Secara Berkelanjutan

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja Sasaran	Tahun 2023		
			Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
9.	Terjaganya fungsi dan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	81,06	77,31	95,37

Tujuan 8
Mewujudkan Kondisi yang Tertib, Aman, dan Demokratis

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja Sasaran	Tahun 2023		
			Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
10.	Meningkatnya keamanan dan ketertiban wilayah	Indeks Rasa Aman	2,679/B (aman)	N/A	N/A

Tujuan 9
Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja Sasaran	Tahun 2023		
			Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
11.	Meningkatnya kualitas Infrastuktur Daerah	Indeks Infrastruktur Daerah	0,475	0,282	59,36
12.	Meningkatnya Konektivitas Wilayah	Rasio Konektivitas Kabupaten	0,85	0,61	71,76

Tujuan 10
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja Sasaran	Tahun 2023		
			Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
13.	Terwujudnya pemerintahan yang efisien dan efektif	Predikat SAKIP	>70-80/BB	51,76/CC	64,7
		Indeks RB	>70-80/BB	53,35/CC	66,68
		Nilai LPPD	4.21-5.00	N/A	N/A
		Opini BPK	WTP	WTP*	100

DAFTAR ISI

1. VISI DAN MISI
2. KATA PENGANTAR i
3. PERNYATAAN TELAH DIREVIU ii
4. IKHTISAR EKSEKUTIF iii
5. DAFTAR ISI vi
6. DAFTAR TABEL viii
7. DAFTAR GAMBAR xiii

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Gambaran Umum Kabupaten Morowali Utara 2
1.2.1. Kondisi Geografi 2
1.2.2. Kondisi Demografi 6
1.2.3. Potensi Pengembangan Wilayah 10
1.2.4. Kawasan Rawan Bencana 15
1.2.5. Tinjauan Ekonomi Kabupaten Morowali Utara 15
1.3. Isu Strategis Dan Permasalahan Utama 23
1.4. Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara 29

BAB II PERENCANAAN KINERJA 33
2.1.Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Morowali Utara 33
2.1.1 Visi Dan Misi 33
2.2. Keselarasan Kinerja 44
2.3. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan 45
2.4. Indikator Kinerja Utama 49
2.5. Cascading Kinerja 56
2.4. Perjanjian Kinerja 60

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 62
3.1. Capaian dan Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Morowali Utara 62
3.1.1. Analisis Capaian Kinerja 65
3.1.2. Analisis Penyebab Keberhasilan Atau Kegagalan Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan 111
3.1.3. Analisis Atas Efesiensi Penggunaan Sumber Daya 123
3.1.4. Program Yang Menunjang Pencapaian Kinerja Tahun 2022 126

3.2. Akuntabilitas Keuangan 136
3.2.1. Pengelolaan Pendapatan Daerah..... 150
3.2.2. Pengelolaan Belanja Daerah..... 151
3.1.3. Kondisi Pembiayaan Daerah..... 152

BAB IV PENUTUP 154
4.1 Kesimpulan 154
4.2. Strategi Peningkatan Kinerja. 154

LAMPIRAN :

PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023.

DAFTAR TABEL

NOMOR TABEL	JUDUL	HALAMAN
Tabel 1	Luas Wilayah Kabupaten Morowali Utara Menurut Kecamatan, Tahun 2020	2
Tabel. 2	Banyaknya Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Morowali Utara, Tahun 2020	4
Tabel 3	Sebaran Sungai di Kabupaten Morowali Utara	5
Tabel. 4	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Morowali Utara Tahun 2010, 2018, 2019, dan 2020	6
Tabel 5	Perbandingan Jumlah Penduduk Kabupaten Morowali Utara Dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2016-2020	7
Tabel 6	Kepadatan Penduduk Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020	8
Tabel 7	Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020	9
Tabel 8	Penduduk Menurut Umur Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020	9
Tabel. 9	Luas Kawasan Pertanian Tanaman Pangan *Menurut Kecamatan di Kabupaten Morowali Utara*	11
Tabel. 10	Luas Kawasan Perkebunan Menurut Kecamatan di Kabupaten Morowali Utara	12
Tabel. 11	Luas Kawasan Pertambangan yang Dominan Menurut Kecamatan di Kabupaten Morowali Utara	13
Tabel. 12	Laju Pertumbuhan Riil Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha (persen), 2016–2020	16
Tabel. 13	Jumlah PDRB ADHB Kabupaten Morowali Utara Menurut Lapangan Usaha 2016-2020	18
Tabel. 14	Jumlah PDRB ADHK 2010 Kabupaten Morowali Utara Menurut Lapangan Usaha 2016-2020	19
Tabel. 15	Sinergi Visi RPJMN 2020-2024, RPJMD 2021-2026 Provinsi Sulawesi Tengah, RPJPD 2005-2025 dan RPJMD 2021-2026 Kabupaten Morowali Utara	35
Tabel. 16	Penjelasan Visi Kabupaten Morowali Utara 2021-2026	35
Tabel 17	Keterkaitan Visi dan Misi Kabupaten Morowali Utara 2021-2026	39
Tabel 18	Keterkaitan Misi RPJPD Kabupaten Morowali Utara Periode 2005-2025 dan RPJMD Kabupaten Morowali Utara Periode 2021-2026	40
Tabel. 19	Keterkaitan Misi Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2021-2026 dan Misi Kabupaten Morowali Utara Periode 2021-2026	41
Tabel 20	Keterkaitan Misi RPJMN Periode 2020-2024 dan Misi Kabupaten Morowali Utara Periode 2021-2026	42
Tabel 21	Tujuan dan Sasaran Makro Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026	46
Tabel: 22	Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kab. Morowali Utara Tahun 2022–2026	52
Tabel: 23	Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022	61
Tabel 24	Skala Nilai Peringkat Kinerja	62
Tabel 25	Pencapaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Morowali	63

	Utara Tahun 2023	
Tabel 26	Capaian Indikator Sasaran "Meningkatnya Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat " Tahun 2023	65
Tabel 27	Perbandingan Target Kinerja Dengan Realisasi Kinerja Angka Harapan Hidup Tahun 2023	66
Tabel. 28	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja Angka Harapan Hidup Tahun 2021 s.d 2023	66
Tabel. 29	Perbandingan Realisasi Kinerja Angka Harapan Hidup Tahun 2023 dengan Target Akhir Masa RPJMD Tahun 2021-2026	67
Tabel 30	Perbandingan Realisasi Kinerja Angka Harapan Hidup Tahun 2023 dengan Standar Nasional/Provinsi Tahun 2023	67
Tabel. 31	Capaian Indikator Kinerja Sasaran "Meningkatkan Jangkauan Layanan Pendidikan Dasar" Tahun 2023	68
Tabel. 32	Perbandingan Target Kinerja Dengan Realisasi Kinerja Harapan Lama Sekolah Tahun 2023	68
Tabel. 33	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja Harapan Lama Sekolah Tahun 2021 s.d 2023	69
Tabel. 34	Perbandingan Realisasi Kinerja Harapan Lama Sekolah Tahun 2023 dengan Target Akhir Masa RPJMD Tahun 2021-2026	69
Tabel. 35	Perbandingan Realisasi Kinerja Harapan Lama Sekolah Dengan Standar Nasional/Provinsi Tahun 2023	70
Tabel. 36	Perbandingan Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2023	71
Tabel. 37	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 2021 s.d 2023	71
Tabel. 38	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Akhir Masa RPJMD Tahun 2021-2026	72
Tabel. 39	Perbandingan Realisasi Kinerja Rata-Rata Lama Sekolah Dengan Standar Nasional/Provinsi Tahun 2023	72
Tabel. 40	Capaian Indikator Sasaran "Meningkatnya Partisipasi Perempuan" Tahun 2023	73
Tabel. 41	Perbandingan Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja Indeks Pembangunan Gender Tahun 2023	73
Tabel. 42	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Gender Tahun 2021 s.d 2023	74
Tabel. 43	Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Pembangunan Gender Tahun 2023 Dengan Target Akhir Masa RPJMD Tahun 2021-2026	74
Tabel. 44	Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Pembangunan Gender Dengan Standar Nasional/Provinsi Tahun 2023	75
Tabel. 45	Capaian Indikator Sasaran "Meningkatnya Peluang Lapangan Kerja" Tahun 2023	75
Tabel. 46	Perbandingan Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja Tingkat Pengganguran Terbuka (TPT) Tahun 2023	76
Tabel. 47	Perbandingan Realisasi Dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tingkat Pengganguran Terbuka (TPT) Tahun 2021 s.d 2023	77

Tabel. 48	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2023 dengan Target RPJMD Tahun 2021-2026	77
Tabel. 49	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2023 dengan Standar Nasional/Provinsi	78
Tabel. 50	Capaian Indikator Sasaran "Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah" Tahun 2023	78
Tabel. 51	Perbandingan Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja Indeks Inovasi Daerah Tahun 2023	79
Tabel. 52	Perbandingan Realisasi Dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021 s.d 2023	79
Tabel. 53	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Indeks Inovasi Daerah Tahun 2023 dengan Target RPJMD Tahun 2021-2026	80
Tabel. 54	Perbandingan Indeks Inovasi Daerah Tahun 2023 dengan Standar Nasional/Provinsi Tahun 2023	80
Tabel. 55	Capaian Indikator Sasaran "Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor" Tahun 2023	81
Tabel. 56	Perbandingan Target Indikator Kinerja dengan Realisasi Indikator Kinerja PDRB Perkapita Tahun 2023	82
Tabel. 57	Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja PDRB Perkapita Tahun 2021 s.d 2023	82
Tabel. 58	Perbandingan Realisasi Kinerja PDRB Perkapita Tahun 2023 denganTarget Akhir Masa RPJMD Tahun 2021-2026	83
Tabel. 59	Perbandingan PDRB Perkapita dengan Standar Nasional/Provinsi Tahun 2023	83
Tabel.60	Capaian Indikator Sasaran Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi Rata-rata Pertumbuhan Nilai Investasi (PMA+PMDN)." Tahun 2023	84
Tabel. 61	Perbandingan Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja *Nilai Pertumbuhan Investasi (PMA + PMDN)* Tahun 2023	84
Tabel. 62	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja *Nilai Pertumbuhan Investasi (PMA + PMDN)* Tahun 2021-2023	85
Tabel. 63	Perbandingan Realisasi Kinerja *Nilai Pertumbuhan Investasi (PMA + PMDN)* Tahun 2023 dengan Target Akhir Masa RPJMD Tahun 2021-2026	85
Tabel 64	Perbandingan *Nilai Pertumbuhan Investasi (PMA + PMDN)* Tahun 2023 dengan Standar Nasional/Provinsi	86
Tabel. 65	Capaian Indikator Sasaran "Meningkatnya Kemandirian Desa" Tahun 2023	86
Tabel. 66	Perbandingan Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja *Indikator Indeks Desa Membangun* Tahun 2023	87
Tabel. 67	Status Indek Desa Membangun Tahun 2023	88
Tabel. 68	Perbandingan Realisasi Indeks Desa Membangun Tahun 2021-2023	88
Tabel. 69	Realisasi Indikator Kinerja Satatus Indeks Desa Membangun Tahun 2021 s.d 2023	89
Tabel. 70	Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Desa Membangun Tahun 2023 dengan Target Akhir Masa	90

	RPJMD Tahun 2021-2026	
Tabel. 71	Perbandingan Realisasi Indeks Desa Membangun Tahun 2023 dengan Standar Nasional/Provinsi	90
Tabel. 72	Capaian Indikator Sasaran "Terjaganya Fungsi dan Kelestarian Sumberdaya Alam dan Lingkungan" Tahun 2023	91
Tabel. 73	Perbandingan Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2023	91
Tabel. 74	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja IKLH Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021 s.d 2023	92
Tabel. 75	Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2023 dengan Target Akhir Masa RPJMD Tahun 2021-2026	92
Tabel. 76	Perbandingan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2023 dengan Standar Nasional/Provinsi	93
Tabel. 77	Capaian Indikator Sasaran "Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Wilayah" Tahun 2023	93
Tabel. 78	Perbandingan Target Indikator Kinerja dengan Realisasi Kinerja Indeks Rasa Aman Tahun 2023	94
Tabel. 79	Jumlah Kasus Gangguan Trantibum serta Jumlah Kasus Pelanggaran Peraturan Daerah Tahun 2023	94
Tabel. 80	Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Rasa Aman Tahun 2021-2023	95
Tabel. 81	Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Rasa Aman Tahun 2023 dengan Target Akhir Masa RPJMD Tahun 2021-2026	95
Tabel. 82	Capaian Sasaran "Meningkatnya Kualitas Infrastuktur Daerah" Tahun 2023	95
Tabel. 83	Rincian Capaian Indeks Infrastruktur Kabupaten Tahun 2023	96
Tabel. 84	Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Indeks Infrastruktur Daerah Tahun 2023	97
Tabel. 85	Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Indeks Infrastruktur Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021 s/d 2023	98
Tabel. 86	Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Indeks Infrastruktur Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023 Dengan Target RPJMD 2021-2026	98
Tabel. 87	Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Indeks Infrastruktur Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023 Dengan Target Nasional/Provinsi	99
Tabel. 88	Capaian Indikator Sasaran "Meningkatnya Konektifitas Wilayah" Tahun 2023	99
Tabel: 89	Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Rasio Konektivitas Kabupaten Tahun 2023	100
Tabel. 90	Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Rasio Konektivitas Kabupaten Tahun 2021-2023	100
Tabel. 91	Realisasi Kinerja Rasio Konektivitas KabupatenTahun 2023 dengan Target Akhir Masa RPJMD Tahun 2021-2026	101

Tabel. 92	Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Rasio Konektivitas Kabupaten Tahun 2023 dengan Standar Nasional/Provinsi	101
Tabel. 93	Capaian Indikator Sasaran "Terwujudnya Pemerintahan yang Efisien dan Efektif" Tahun 2023	102
Tabel. 94	Perbandingan Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2023	103
Tabel. 95	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2021-2022	103
Tabel. 96	Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2023 dengan Target Akhir Masa RPJMD Tahun 2021-2026	104
Tabel. 97	Perbandingan Realisasi Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2023 dengan Standar Nasional/Provinsi	104
Tabel. 98	Perbandingan Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja Predikat SAKIP Tahun 2023	105
Tabel. 99	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja Predikat SAKIP Tahun 2021-2023	105
Tabel. 100	Perbandingan Realisasi Kinerja Predikat SAKIP Tahun 2022 dengan Target Akhir Masa RPJMD Tahun 2021-2026	106
Tabel. 101	Perbandingan Realisasi Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2023 dengan Standar Nasional/Provinsi	106
Tabel. 102	Perbandingan Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja Nilai LPPD Tahun 2023	107
Tabel. 103	Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Capaian Kinerja Nilai LPPD Tahun 2021-2023	107
Tabel. 104	Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai LPPD Tahun 2023 dengan Target Akhir Masa RPJMD Tahun 2021-2026	108
Tabel. 105	Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai LPPD Tahun 2023 dengan Standar Nasional/Provinsi Tahun	108
Tabel. 106	Perbandingan Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja Opini BPK Tahun 2023	109
Tabel. 107	Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Capaian Kinerja Opini BPK Tahun 2021-2023	109
Tabel. 108	Perbandingan Realisasi Kinerja Opini BPK Tahun 2023 dengan Target Akhir Masa RPJMD Tahun 2021-2026	109
Tabel. 109	Perbandingan Realisasi Kinerja Opini BPK Tahun 2023 dengan Standar Nasional/Provinsi Tahun 2022-2023	110
Tabel. 110	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Per Sasaran Pembangunan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2023	123
Tabel. 111	Program Yang Menunjang Pencapaian Kinerja Tahun 2023	126
Tabel. 112	Perencanaan dan Realisasi Anggaran Tahun 2023	137
Tabel. 113	Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 Per 31 Desember 2023	151
Tabel. 114	Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Per 31 Desember 2023	152
Tabel. 115	Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 Per 31 Desember 2023	153

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR GAMBAR	JUDUL	HALAMAN
Gambar 1	Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Morowali Utara	3
Gambar. 2	Persentase Penduduk Menurut Kecamatan Kabupaten Morowali Utara, 2020	7
Gambar 3	Piramida Penduduk Kabupaten Mórowali Utara Tahun 2020	10
Gambar. 4	*Peta Wilayah Rawan Bencana Kabupaten Morowali Utara*	15
Gambar. 5	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional 2016–2020	17
Gambar 6	Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Morowali Utara Dengan Kabupaten/Kota se-Sulteng Tahun 2020	17
Gambar 7	Tingkat Inflasi Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019	20
Gambar 8	Indeks Gini Kabupaten Mórowali Utara Tahun 2016-2020	21
Gambar 9	Gini Rasio Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020	21
Gambar 10	Indeks Gini Rasio Kabupaten Morowali Utara Kabupaten/Kota se-Sulteng Tahun 2018	21
Gambar 11	Capaian IPM Provinsi Sulawesi Tengah dan Kab/Kota Tahun 2015-2019	27
Gambar. 12	Keterkaiatan Isu-Isu startegis International, nasional, Sulawesi Tengah dan Kabupaten Morowali Utara	29
Gambar. 13	Tahapan dan Prioritas Pembagunan RPJPD Kabupaten Morowali Utara tahun 2005-2025	33
Gambar. 14	Tema Pembagunan RPJPD Kabupaten Morowali Utara tahun 2005-2025	34
Gambar 15	Visi, Misi dan Fokus Misi Pembangunan Kabupaten Morowali 2021-2026	37
Gambar 16	Kerangka pikir Visi-Misi Pembangunan Kabupaten Morowali 2021-2026	38
Gambar 17	Perkembangan PDRB Morowali Utara	81

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG.

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dan proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Bupati/Wali Kota menyusun Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Proses penyusunan Laporan Kinerja dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2023 merupakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara merupakan RPJMD Periode 2021-2026 dengan Visi Bupati terpilih adalah "***Terwujudnya Masyarakat Morowali Utara yang Sehat, Cerdas, Sejahtera***".

Untuk penyusunan LAKIP pemerintah daerah tahun 2023 mengacu pada RPJMD Periode 2021-2026 yang telah dilakukan revisi atau perbaikan RPJMD pada bab V halaman 18 s/d 49 tabel 5.4 berisi visi misi tujuan dan sasaran jangka menengah kabupaten morowali utara tahun 2021-2026 yaitu sebelum perbaikan sebanyak antara lain:

- misi bupati sebanyak : 5
- tujuan bupati sebanyak : 15
- sasaran strategis bupati sebanyak: 48
- indikator bupati sebanyak : 81

Setelah dilakukan perbaikan oleh tim sakip kabupaten dan 10 dinas klaster utama melalui bimtek sakip yang narasumber dari Kementerian PANRB pada tahun 2022 pada bulan agustus, maka tujuan, sasaran dan indikator tersebut berkurang karena banyak indikator level eselon II yang dijadikan IKU Bupati. Hasil perbaikan tersebut dituangkan dalam Perbup No. 29 tahun 2022 tentang IKU Pemerintah Daerah Tahun 2022-2026. dengan jumlah perubahan sebagai berikut:

- misi bupati sebanyak : 5
- tujuan bupati sebanyak : 10
- indikator tujuan bupati sebanyak: 12

- sasaran strategis bupati sebanyak: 13
- indikator kinerja sasaran strategis Bupati sebanyak: 19

Berdasarkan perubahan tujuan dan sasaran RPJMD tersebut berdampak pada perubahan IKU eselon II atau kepala Perangkat Daerah yang dijadikan rujukan dalam menyusun Renstra dengan mengemban visi dan misi pemerintah daerah yaitu ***"Terwujudnya Masyarakat Morowali Utara yang Sehat, Cerdas, Sejahtera"*.** Laporan kinerja ini merupakan laporan kinerja Pemerintah Daerah akhir RPJMD Periode 2021-2026.

1.2. GAMBARAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA

1.2.1. Kondisi Geografi

a. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Karakteristik wilayah berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013, tanggal 11 Mei 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah digambarkan sebagai berikut:

1) Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Morowali Utara, Luas wilayah Kabupaten Morowali Utara terdiri dari wilayah daratan seluas 10.004,28 Km² dan wilayah Lautan seluas 8.344,27 Km². Total luas wilayah Kabupaten Morowali Utara adalah 18.362,39 Km². Kabupaten Morowali Utara terbagi atas 10 Kecamatan, 122 Desa dan 3 Kelurahan. Wilayah kecamatan terluas di Kecamatan Bungku Utara seluas 2.406,79 Km² atau 24,06 persen dari total luas wilayah Kabupaten Morowali Utara, sedangkan wilayah Kecamatan terkecil adalah Kecamatan Petasia Barat dengan luas 480,30 Km² atau sebesar 4,80 persen dari luas keseluruhan wilayah Kabupaten Morowali Utara. Secara lebih jelas data luas wilayah setiap Kecamatan di Kabupaten Morowali Utara dapat dilihat pada Tabel.1 sebagai berikut.

Tabel. 1
Luas Wilayah Kabupaten Morowali Utara
Menurut Kecamatan, Tahun 2020

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (Km)	Persentase (Persen)	Tinggi (m)
1.	Mori Atas	Tomata	1.508,81	15,08	317
2.	Lembo	Beteleme	675,23	6,75	180
3.	Lembo Raya	Petumbea	657,61	6,57	287
4.	Petasia Timur	Bungintimbe	509,77	5,10	6
5.	Petasia	Kolonodale	646,34	6,46	5
6.	Petasia Barat	Tiu	480,30	4,80	10
7.	Mori Utara	Mayumba	1.048,93	10,48	326
8.	Soyo Jaya	Lembah Sumara	605,51	6,05	11
9.	Bungku Utara	Baturube	2.406,79	24,06	2
10.	Mamosalato	Tanasumpu	1.464,99	14,64	5
Morowali Utara			***10.004,28***	***100***	***1149***

Sumber: Kabupaten Morowali Utara Dalam Angka, Tahun 2021

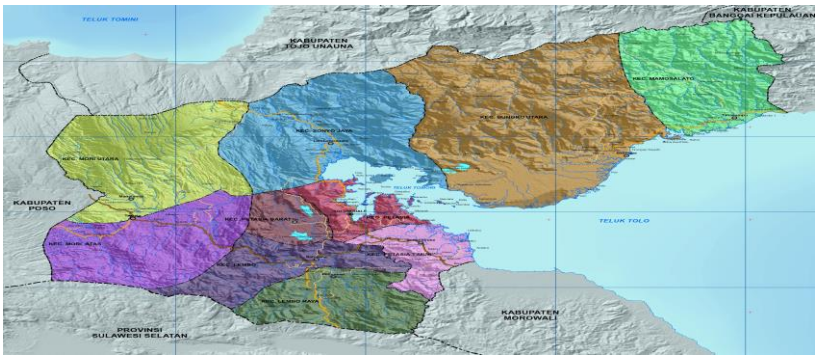
Kabupaten Morowali Utara merupakan salah satu dari 13 (tiga belas) Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah dan merupakan Kabupaten/Kota yang memiliki luas wilayah terbesar di Sulawesi Tengah dengan luas wilayah kurang lebih 10.004,28 Km2 atau sekitar 16,18 persen dari luas daratan Provinsi Sulawesi Tengah dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara	• Kabupaten Tojo Unauna
Sebelah Selatan	• Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Morowali
Sebelah Barat	• Kabupaten Poso
Sebelah Timur	• Kabupaten Banggai dan Teluk Tolo

2) Letak dan Kondisi Geografis

Kedudukan Kabupaten Morowali Utara sebagai salah satu daerah potensial di kawasan Timur dan Tenggara Teluk Tolo Provinsi Sulawesi Tengah memiliki arti penting dan bersifat strategis dipandang dari stabilitas ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah maka secara geografis Kabupaten Morowali Utara terletak pada koordinat antara 01031'12" Lintang Selatan 03046'48" Lintang Selatan serta 121002'24" Bujur Timur 123015'36" Bujur Timur. Posisi Kabupaten Morowali Utara dilihat dari permukaan bumi terletak di sekitar Teluk Tolo, Teluk Tomori sampai pada daerah pedalaman yang berbentuk lembah, perbukitan, dan pegunungan.

Gambar 1
Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Morowali Utara



Sumber: Profil Kab. Morowali Utara, data diolah kembali, tahun 2020

Saat dibentuk pertama kalinya, Kabupaten Morowali ber ibukota di Kolonodale (ibukota Morowali Utara sekarang). Ibu kota definitif Kabupaten Morowali sekarang, yakni di Bungku (Bungku Tengah), sesuai dengan undang-undang dan telah difungsikan sejak 2 Mei 2006. Sedangkan Kolonodale telah menjadi ibukota Kabupaten Morowali Utara. Kondisi geografis Kabupaten Morowali Utara dengan ibukota Kabupaten yang berkedudukan di Kolonodale berbatasan dengan laut (Perairan Teluk Tolo) sehingga dapat dicapai melalui laut, darat atau kombinasi keduanya sesuai dengan kondisi geografis wilayah lainnya.

b. Kondisi Topografi

Kondisi topografi merupakan elemen dasar dari suatu wilayah untuk mengetahui karakteristik fisik suatu daerah. Karakter fisik akan mempengaruhi pola dan jenis pembangunan yang akan diterapkan diwilayah tersebut. Kemiringan lereng dan ketinggian dari permukaan laut merupakan indikator untuk mengetahui kondisi topografi daerah tersebut. Berdasarkan elevasi, 60 persen wilayah Kabupaten Morowali Utara

berada pada ketinggian antara 0-100 meter dpl, sebesar 40 persen berada pada ketinggian antara 101-500 meter dpl (Tabel 1). Menurut tingkat kelerengan wilayah ini sebesar 52,30 persen memiliki kemiringan topografi lebih besar dari 40 persen (curam sangat curam), sebesar 11,70 persen memiliki kemiringan dibawah 2 persen (datar agak landai), sebesar 12,56 persen memiliki kemiringan antara 3 persen -15 persen dan 23,30 persen luas wilayah memiliki kemiringan antara 16 persen-40 persen (miring agak curam) dan danau seluas 0,14 persen. Akibat curah hujanya ngtinggi, struktur geologi yang dipengaruhi oleh dua sesar utama, serta topografi dengan dominasi kemiringan curam, maka wilayah ini memiliki pula kawasan-kawasan yang rawan bencana, khususnya bencana banjir, longsor maupun rawan gempa.

c. Kondisi Klimatologi

Iklim wilayah Kabupaten Morowali Utara dipengaruhi sirkulasi sistem global, munson, dan lokal. Secara Tahunan memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Bulan terbasah terjadi pada Juni (760,28 mm) dan bulan terkering (40,40 mm) terjadi pada Agustus. Berdasarkan klasifikasi ***Schmidt-Fergusson***, Wilayah Kabupaten Morowali Utara, tergolong iklim A atau sangat basah dengan suhu udara rata-rata bulanan berkisar antara (26,5°C) sampai (27,4°C).

Tabel. 2
Banyaknya Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Morowali Utara, Tahun 2020

Bulan	Tahun 2019	
	Hari Hujan (hh)	Curah Hujan (mm)
01. Januari	15	290,50
02. Pebruari	17	174,40
03. Maret	18	216,90
04. April	23	242,00
05. Mei	20	222,80
06. Juni	17	223,20
07. Juli	22	291,40
08. Agustus	13	125,00
09. September	19	249,10
10. Oktober	20	407,60
11. November	15	256,80
12. Desember	19	63,10

Sumber: Kabupaten Morowali Utara Dalam Angka, 2021

d. Kondisi Geologi

Wilayah Kabupaten Morowali Utara tersusun atas beberapa jenis batuan antara lain, batuan Mollase, batuan Kapur, batuan Skiss, batuan Basik, Ultra basik dan Sedimen. Dari sisi geomor fologi, wilayah ini tersusun atas beberapa bentuk lahan (landform), yaitu bentuk lahan Aluvial (A), Marine (M), Volkanik (V), Tektonik dan Struktural (T). Bentuk lahan aluvial terbentuk dari proses fluvial yang umumnya tersebar di dataran rendah dengan kemiringan antara 0-3 persen, dan banyak di jumpai di sekitar sungai-sungai besar. Bentuk lahan marine tersebar pada wilayah datar agak cekung disepanjang pantai. Bentuk lahan tektonik dan vulkanik tersebar pada relief yang bergelombang sampai bergunung.

e. Kondisi Hidrologi

Kabupaten Morowali Utara memiliki banyak sungai dan Kecamatan yang memiliki sungai adalah Kecamatan Mori Atas (7 sungai) Kecamatan Bungku Utara (15 sungai) dan Kecamatan Mamosalato (12 sungai). Sungai terpanjang adalah sungai Laa yang melintasi 5 (lima) Kecamatan, yaitu 1). Kecamatan Mori Atas, 2) Kecamatan Petasia Timur, 3) Kecamatan Petasia, 4) Kecamatan Petasia Barat, 5) Kecamatan Mori Utara. Sungai Bongka sebagai sungai terpanjang kedua melintasi Kecamatan Mamosalato. Sungai terpanjang ketiga melintasi Kecamatan Bungku Utara yaitu Sungai Tiworo. Sungai terpanjang keempat adalah Sungai Sumara yang melintasi Kecamatan Soyo Jaya. Data dan informasi mengenai nama-nama dan ukuran sungai di Kabupaten Morowali Utara terdapat pada tabel. 3 sebagai berikut.

Tabel. 3
Sebaran Sungai di Kabupaten Morowali Utara

No.	Kecamatan/Desa	Nama Sungai	Panjang Sungai (Km)
1.	Mamosalato	S. Pangkape	3,00
		S. Kaia	2,00
		S. Kapali	2,00
		S. Manandar	15,00
		S. Uekauru	15,00
		S. Uefayau	4,00
		S. Tamarando	6,00
		S. Tomba	5,00
		S. Uekawoa	5,00
		S. Uewine	15,00
		S. Mumungi	5,00
		S. Bongka	60,00
2.	Bungku Utara	S. Kafuyu	22,00
		S. Lamuru	8,00
		S. Paididi	5,10
		S. Bongka	38,00
		S. Solato	29,00
		S. Siombo	18,00
		S. Tirongan	43,00
		S. Morowangu	9,00
		S. Morowali	37,00
		S. Ula	47,00
		S. Tiworo	53,00
		S. Nua-Nua	21,00
		S. Tofu	19,00
		S. Uemanu	22,00
		S. Samara	23,00
3.	Petasia	S. Laa	117,00
4.	Petasia Barat	S. Laa	117,00
5.	Petasia Timur	S. Laa	117,00
6.	Lembo	S. Tambalako	…
7.	Lembo Raya	S. Tambalako	…
		S. Sokita	…
		S. Tambalako	105,00
8.	Mori Atas	S. Ensa	17,00
		S. Kadata	15,00
		S. Kolaka	25,00
		S. Kuse	27,00
		S. Laa	37,00
		S. Talolae	20,00
		S. Yaintu	23,00
		S. Koromboyo	....
		S. Towerio	....
9.	Mori Utara	Koro Njaya	22,00
		Koro Mayumba	24,00

		Koro Sampa	7,00
		S. Kuse	27,00
		Korontiwa	8,00
		S. Laa	37,00
		S. Korompalia	10,00
		S. Karuru	15,00
		Koro Era	20,00
		S. Yaintu	23,00
		Koro Dolo	15,00
10.	Soyo Jaya	S. Busanga	20,00
		S. Sumara	45,00

Sumber: Statistik Kabupaten Morowali Utara, Tahun 2020

1.2.2. Kondisi Demografi

a. Laju Pertumbuhan Dan Perebaran Penduduk

Berdasarkan data dari BPS Morowali Utara Dalam Angka Tahun 2022 diketahui jumlah penduduk Kabupaten Morowali Utara selama tahun 2020 mencapai sebanyak 120.789 jiwa, dengan rata-rata pertumbuhan penduduk pada tahun 2010-2020 sebesar 1,50 persen. Data tren pertumbuhan penduduk Kabupaten Morowali Utara tahun 2010-2021 tersaji pada tabel 4 berikut.

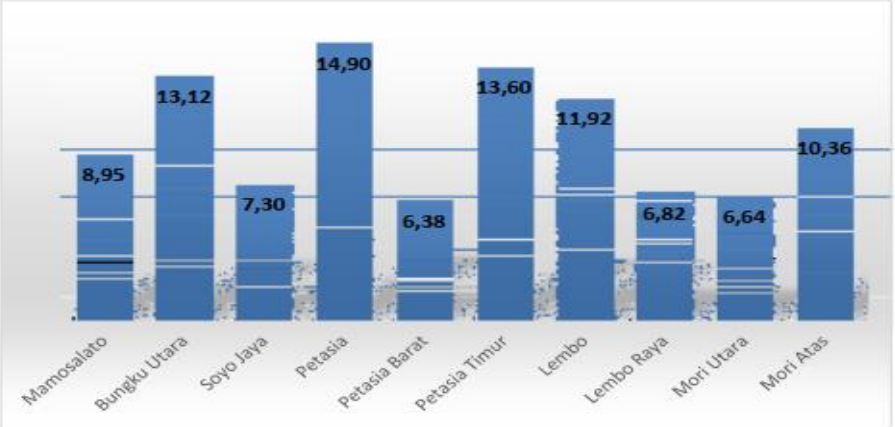
Tabel. 4
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk
Kecamatan di Kabupaten Morowali Utara
Tahun 2010, 2018, 2019, dan 2020

Kecamatan	Jumlah Penduduk				Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
	2010	2018	2019	2020	
Mamosalato	10,269	12,212	12,447	10,809	0,51
Bungku Utara	14,699	16,568	16,776	15,853	0,76
Soyo Jaya	7,884	10,385	10,720	8,821	1,13
Petasia	33,705	19,228	19,876	17,997	6,08
Petasia Barat	…	8,461	8,652	7,711	…
Petasia Timur	…	15,855	16,319	16,428	…
Lembo	20,300	15,152	15,435	14,396	3,38
Lembo Raya	…	8,237	8,315	8,241	…
Mori Utara	6,819	7,569	7,648	8,023	1,64
Mori Atas	10,418	11,957	12,135	12,510	1.85
Morowali Utara	**104,094**	**125,624**	**128,323**	**120,789**	**1,50**

Sumber: Kabupaten Morowali Utara Dalam Angka 2021

Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Petasia pada Tahun 2020 berjumlah 17,997 jiwa, Kecamatan Petasia Timur sebesar 16,428 jiwa, Kecamatan Bungku Utara sebanyak 15,853 jiwa dan Kecamatan Lembo sebanyak 14,396 jiwa, serta Kecamatan Mori Atas sebanyak 12,510 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk tertinggi di Kecamatan Mori Utara mencapai 4,9% dan terdapat laju pertumbuhan yang minus paling rendah yaitu Kecamatan Mamosalato mencapai 13,2%.

Gambar. 2
Persentase Penduduk Menurut Kecamatan
Kabupaten Morowali Utara, 2020



Sumber: Kabupaten Morowali Utara Dalam Angka 2021 (diolah kembali)

Kecamatan yang paling sedikit jumlah penduduknya yaitu di Mori Utara sebanyak 8,024 jiwa. Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan PetasiaTimur, Yaitu 32 orang per Km2 dengan luas wilayah hanya 509,77 km2 sedangkan sex ratio penduduk Kabupaten Morowali Utara Sebagian besar sudah di atas 100. Data mengenai persentase jumlah penduduk di Kabupaten Morowali Utara menurut Kecamatan terlihat pada Gambar 2 Selanjutnya jika dilihat dari wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, jumlah penduduk Sulawesi Tengah hingga Tahun 2020 sebesar 2.985,7 juta jiwa. Jumlah penduduk Kabupaten Morowali Utara pada Tahun 2020 berada urutan kesepuluh penduduk terbanyak di Provinsi Sulawesi Tengah. Penduduk terbanyak yakni Kabupaten Parigi Moutong, sedangkan kabupaten dengan jumlah penduduk yang terendah yakni Kabupaten Banggai Laut. Data perbandingan jumlah penduduk Kabupaten Morowali Utara dengan Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah terdapat pada Tabel 5 sebagai berikut;

Tabel. 5
Perbandingan Jumlah Penduduk Kabupaten Morowali Utara
Dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah,
Tahun 2016-2020

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Bangkep	116,01	116,81	117,63	118,40	120,14
Banggai	360,02	365,62	371,32	376,81	362,27
Morowali	115,20	117,33	119,29	121,30	161,73
Poso	240,81	245,99	251,18	256,39	244,88
Donggala	296,38	299,17	301,59	304,11	300,44
Toli-Toli	228,50	231,00	233,40	235,80	225,16
Buol	152,30	155,59	158,79	162,18	145,25
Parigi Moutong	465,88	474,34	482,79	490,92	440,02
Tojo Una-una	149,21	150,82	152,47	153,99	163.83
Sigi	232,17	234,59	237,01	239,42	257,59
Banggai Laut	70,89	72,30	73,69	75,00	257,59
Morowali Utara	**120,32**	**122,99**	**125,62**	**128,32**	**120,79**
Palu	374,02	379,78	385,61	391,38	373,22
Sulawesi Tengah	**2.921**	**2.966**	**3.010**	**3.054**	**2.985**

Sumber: Sulawesi Tengah Dalam Angka 2020 (diolah kembali)

b. Kepadatan Penduduk

Dilihat dari kepadatan penduduk, Kabupaten Morowali Utara tingkat kepadatan penduduknya pada Tahun 2020 sebesar 12,07 per km2. Untuk wilayah kecamatan dengan tingkat kepadatan tertinggi yakni kecamatan Petasia Timur, yakni sebesar 32,23 jiwa per km2. Sedangkan kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk terendah yakni kecamatan Bungku Utara sebesar 6,59 per km2. Data terkait secara lengkap dapat dilihat pada tabel 6 beriku ini.

Tabel. 6
Kepadatan Penduduk Kabupaten Morowali Utara
Tahun 2020

Kecamatan	Luas Wilayah (Km²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Rata-rata Kepadatan Per km²
Mori Atas	657,61	10,809	8.29
Lembo	1.508,81	15,853	21.32
Lembo Raya	675,23	8,821	12.53
Petasia Timur	1048,93	17,997	32.23
Petasia	646,34	7,711	27.84
Petasia Barat	605,51	16,428	16.05
Mori Utara	523,61	14,396	7.65
Soyo Jaya	465,29	8,241	14.57
Bungku Utara	2406,79	8,023	6,59
Mamosalato	1480	12,510	7.38
Morowali Utara	**10018,12**	**120,789**	**12.07**

Sumber: Kabupaten Morowali Utara Dalam Angka 2021 (diolah kembali)

c. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan di suatu daerah pada waktu tertentu, disebut "*sex rasio*" adalah merupakan Profil untuk mengetahui komposisi penduduk menurut jenis kelamin. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin sangat besar kaitannya dengan masalah fertilitas, dimana semakin besar porsi penduduk perempuan maka potensi fertilitas semakin tinggi. Sementara itu hubungannya dengan ketenaga kerjaan adalah TPAK sangat bervariasi antara penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan. Total jumlah penduduk dengan jenis kelamin laki-laki pada Tahun 2020 sebanyak 62.965 jiwa atau sebesar 52,12 persen, sedangkan perempuan sebanyak 57.824 jiwa atau sebesar 47,88 persen. Dengan kompoisi penduduk tersebut, sex rasio Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020 sebesar 108,98. Sex rasio penduduk menurut jenis kelamin penduduk Kabupaten Morowali Utara sebagian besar sudah di atas 100. Ini berarti bahwa jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Morowali Utara lebih banyak dari pada jumlah penduduk perempuan. Secara lengkap disajikan pada Tabel 7 sebagai berikut.

Tabel. 7
Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan
Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020

Kecamatan	Jenis Kelamin		Rasio Sex
	Laki-laki	Perempuan	
Mori Atas	6515	5995	108.7
Lembo	7504	6892	108.9
Lembo Raya	4272	3969	107.6
Petasia Timur	8750	7678	114.0
Petasia	9266	8731	106.1
Petasia Barat	4101	3610	113.6
Mori Utara	4175	3848	108.5
Soyo Jaya	4674	4147	112.7
Bungku Utara	8157	7696	106.0
Mamosalato	5551	5258	105.6
Morowali Utara	**62965**	**57824**	**108.9**

d. Komposisi Penduduk Menurut Umur

Komposisi penduduk dilihat dari aspek umur, diketahui bahwa 0-14 Tahun sebanyak 34.145 jiwa, usia >64 Tahun sebanyak 6.339 jiwa. Total penduduk usia tidak produktif sebanyak 40.484 Jiwa atau sebesar 33,52 persen. Selanjutnya penduduk usia 15-64 Tahun sebanyak 80.305 jiwa atau sebesar 66,48 persen. Untuk *dependency ratio* penduduk Kabupaten Morowali Utara Tahun 2019 sebesar 50,41. Ini berarti setiap 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung kurang lebih 50 orang penduduk yang belum/tidak produktif yang disajikan pada Tabel 8 berikutini.

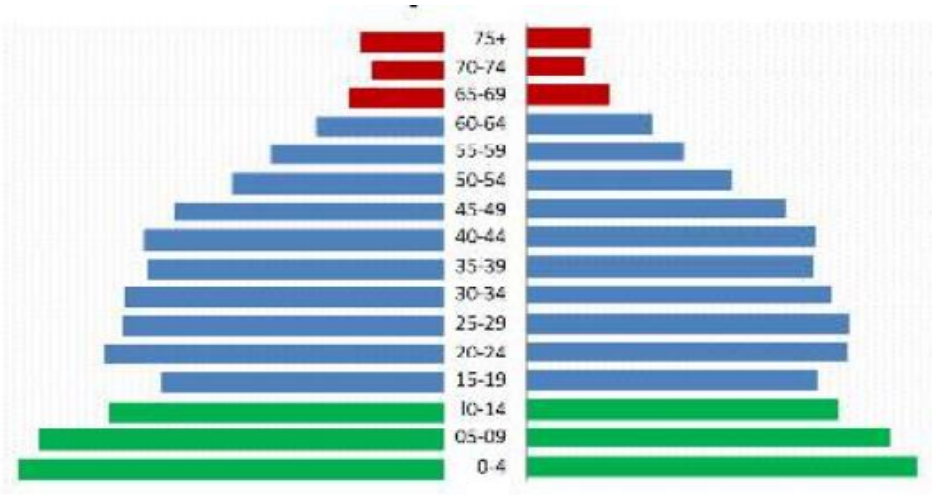
Tabel 8
Penduduk Menurut Umur Kabupaten Morowali Utara
Tahun 2020

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0-4	5935	5621	11556
05-09	5812	5708	11520
10-14	5789	5280	11069
15-19	5318	4852	10170
20-24	5206	4683	9889
25-29	5202	4816	10018
30-34	5261	4916	10177
35-39	4820	4264	9084
40-44	4467	4014	8481
45-49	3847	3439	7286
50-54	3325	2871	6196
55-59	2707	2435	5142
60-64	2071	1791	3862
65-69	1424	1355	2779
70-74	887	790	1677
75+	894	989	1883
Morowali Utara	**62965**	**57821**	**120786**

Sumber: Kabupaten Morowali Utara Dalam Angka 2020 (diolah kembali)

Selanjutnya komposisi penduduk Kabupaten Morowali Utara ditampilkan pada piramida kependudukan pada Gambar 3 berikut ini.

Gambar 3
Piramida Penduduk Kabupaten Mórowali Utara Tahun 2020



Sumber: Kabupaten Morowali Utara Dalam Angka 2020 (diolah kembali)

1.2.3. Potensi Pengembangan Wilayah

a. Pertanian

Potensi pengembangan pertanian untuk tanaman pangan di Kabupaten Morowali Utara seluas 32,458.88 ha, dan masih dapat diperluas dengan memanfaatkan kawasan hutan konversi seluas 19,035 ha. Pengembangan Potensi Pertanian dibagi atas dua bagian, yaitu: (1) Pertanian Tanaman Pangan Lahan Basah (TPLB); (2) Pertanian Tanaman Pangan Lahan Kering (TPLK).

- **Untuk Lahan Basah**; pengembangan kawasan pertanian diarahkan pada kawasan yang sesuai untuk penanaman tanaman lahan pangan lahan basah di mana pengairannya dapat diperoleh secara alamiah maupun secara teknis dan didukung sistem atau potensi pengembangan prasarana pengairan dengan mempertimbangkan faktor-faktor; Ketinggian kawasan di bawah 1000 m, kelerengan kawasan dibawah 3% dan kedalaman efektif lapisan tanah di atas 50 cm.
- **Untuk Lahan Kering**; lebih diarahkan pada pengembangan padi gogo, palawija dan hortikultura dengan mempertimbangkan faktor-faktor; Ketinggian kawasan di bawah 1000 m, kelerengan kawasan di bawah 8% dan kedalaman efektif lapisan tanah di atas 60 cm.

  Adapun luas kawasan pertanian untuk tanaman pangan di Kabupaten Morowali Utara dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 9
Luas Kawasan Pertanian Tanaman Pangan
Menurut Kecamatan di Kabupaten Morowali Utara

No.	Kecamatan	Luas (Ha)		
		Wilayah Kecamatan	Kawasan Pertanian Tanaman Pangan	Persentase (%)
1.	Bungku Utara	150.881	1.454,69	0,96
2.	Lembo	67.523	318,66	0,47
3.	Lembo Raya	65.761	2.421,69	3,68
4.	Mamosalato	52.361	6.682,96	12,76
5.	Mori Atas	64.634	701,58	1,09
6.	Mori Utara	48.030	550,40	1,15
7.	Petasia	104.893	887,27	0,85
8.	Petasia Barat	60.551	6.507,78	10,75
9.	Petasia Timur	240.679	12.568,04	5,22
10.	Soyo Jaya	146.499	365,81	0,25
Morowali Utara		**1.001.812**	**32.458,88**	**3,24**

Sumber: Kabupaten Morowali Utara Dalam Angka, diolah Tahun 2021

b. Perkebunan

Kawasan peruntukan perkebunan di Kabupaten Morowali Utara dengan luas sebesar 86,645.09 Ha. Komoditas utama perkebunan dan sebarannya terdiri atas:

- Kakao, terdapat di Kecamatan Mamosalato, Kecamatan Bungku Utara, Kecamatan Soyo Jaya, Kecamatan Petasia;
- Cengkeh, terdapat di Kecamatan Lembo, dan Kecamatan Bungku Utara;
- Kelapa, terdapat di Kecamatan Bungku Utara;
- Jambu mete, terdapat di Kecamatan Bungku Utara;
- Vanili, terdapat di Kecamatan Soyo Jaya;
- Sagu, terdapat di Kecamatan Petasia dan Kecamatan Soyo Jaya;
- Karet, terdapat di Kecamatan Lembo;
- Sawit, terdapat di Kecamatan Mori Atas, Kecamatan Mori Utara, Kecamatan Lembo, Kecamatan Lembo Raya, Kecamatan Petasia, Kecamatan Petasia Barat, Kecamatan Bungku Utara dan Kecamatan Mamosalato.

Uraian luas kawasan perkebunan beserta sebarannya di Kabupaten Morowali Utara dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 10
Luas Kawasan Perkebunan
Menurut Kecamatan di Kabupaten Morowali Utara

No.	Kecamatan	Luas (Ha)		Persentase (%)
		Wilayah Kecamatan	Kawasan Perkebunan	
1.	Mamosalato	148.000,00	923,8	0,62
2.	Bungku Utara	240.679,00	2.686,10	1,12
3.	Soyo Jaya	60.551,00	5.706,70	9,42
4.	Petasia	64.634,00	1.041	1,61
5.	Petasia Barat	46.529,00	1.682,50	3,62
6.	Petasia Timur	52.361,00	2.884	5,51
7.	Lembo	67.523,00	2.526	3,74
8.	Lembo Raya	65.761,00	3.837,50	5,84
9.	Mori Atas	104.893,00	4.932,40	4,70
10.	Mori Utara	150.881,00	2.496,50	1,65
Morowali Utara		**1.001.812**	**28.717,50**	**2,87**

Sumber: Kabupaten Morowali Utara dalam angka 2021

c. Peternakan

Kegiatan peternakan tidak mengalokasikan pada suatu kawasan tertentu, namun dapat saja dilakukan pada kawasan sekitar pertanian tanaman pangan, kawasan perkebunan dan atau pada sekitar kawasan hortikultura.

Adapun komoditas peternakan yang cukup dominan di Kabupaten Morowali Utara adalah seperti:

Ternak besar berupa:

- Sapi, terdapat di Kecamatan Mori Atas, Kecamatan Lembo, Kecamatan Petasia, Kecamatan Soyo Jaya, dan Kecamatan Bungku Utara;
- Kerbau terdapat di Kecamatan Petasia Barat dan Kecamatan Soyo Jaya;

Ternak sedang berupa:

- Babi, terdapat di Kecamatan Bungku Utara, Kecamatan Lembo dan Kecamatan Mori Atas;
- Kambing, terdapat di Kecamatan Lembo, Kecamatan Petasia, dan Kecamatan Bungku Utara;

Unggas berupa:

- Ayam kampung, terdapat di Kecamatan Mori atas, Kecamatan Lembo, Kecamatan Petasia, dan Kecamatan Bungku Utara;
- Itik, terdapat di Kecamatan Bungku Utara, Kecamatan Petasia, dan Kecamatan Lembo.

d. Perikanan

Kawasan peruntukan perikanan di Kabupaten Morowali Utara terdiri atas:

1) Perikanan Tangkap

Kawasan peruntukan perikanan tangkap di Kabupaten Morowali Utara tersebar pada perairan laut Kabupaten Morowali Utara.

2) Perikanan Budidaya

Kawasan peruntukan perikanan budidaya di Kabupaten Morowali Utara, terdiri atas:

- Kawasan budidaya laut terdapat di Kecamatan Bungku Utara.

- Kawasan budidaya Tambak, Kolam, Empang terdapat di Kecamatan Petasia Timur;
- Kawasan budidaya perikanan darat terdapat di Kecamatan Lembo; Kecamatan Lembo Raya; Kecamatan Mori Atas; Kecamatan Mori Utara; dan Kecamatan Bungku Utara.

3) Kawasan Minapolitan

Rencana Kawasan Minapolitan di Kabupaten Morowali Utara adalah Desa Bungintimbe Kecamatan Petasia Timur dan Kawasan Minapolitan Bahoue Kecamatan Petasia.

4) Kawasan Pengolahan Ikan dan Rumput Laut

Pengolahan hasil produksi perikanan di Kabupaten Morowali Utara direncanakan pada Kecamatan Petasia, Petasia Timur, Soyo Jaya, Bungku Utara, dan Mamosalato.

e. Pertambangan

Kabupaten Morowali Utara memiliki potensi sumberdaya bahan galian yang sangat variatif dan potensial untuk dikembangkan, potensi sumberdaya yang ada dapat dikelompokkan kedalam jenis bahan galian strategis (golongan A) yaitu; Minyak bumi dan gas, batubara dan nikel, bahan galian vital (bahan galian golongan B) yaitu; Chromit serta bahan galian non strategis dan vital yaitu; lempung, marmer, onyx dan kaolin, dengan sebaran wilayah pertambangan sebagai berikut:

1) Kawasan Pertambangan Strategis:
   a. Minyak Bumi dan Gas terdapat di wilayah Kecamatan Bungku Utara dengan luas area kurang lebih 47.500 Ha, Kecamatan Mamosalato, dan Perairan Teluk Tolo;
   b. Batubara terdapat di wilayah Kecamatan Mori Atas dengan luas area kurang lebih 300 Ha dan Kecamatan Bungku Utara;
   c. Nikel terdapat di wilayah Kecamatan Mamosalato, Kecamatan Bungku Utara, Kecamatan Petasia Timur, Kecamatan Petasia Barat, Kecamatan Lembo, Kecamatan Petasia dengan luas area sebesar 15.355 Ha dan Kecamatan Soyo Jaya dengan luas area 4.494 Ha;
2) Kawasan Pertambangan Vital (Golongan B):
   a. Chromit di wilayah Kecamatan Mamosalato, Kecamatan Bungku Utara, dan Kecamatan Soyo Jaya;
   b. Emas di wilayah Kecamatan Mamosalato dan Kecamatan Bungku Utara; dan
   c. Batu mulia di wilayah Kecamatan Mamosalato dan Bungku Utara.
3) Kawasan Pertambangan non Strategis dan Vital (Golongan C):
   a. Lempung terdapat di wilayah Kecamatan Petasia dan Mori Atas;
   b. Marmer terdapat di wilayah Kecamatan Lembo, Petasia dan Kecamatan Mori Atas;
   c. Onyx terdapat di wilayah Kecamatan Petasia, Petasia Timur, dan Lembo;
   d. Kaolin terdapat di wilayah Kecamatan Mori Atas.

Tabel. 11
Luas Kawasan Pertambangan yang Dominan
Menurut Kecamatan di Kabupaten Morowali Utara

Kecamatan	Jenis Pertambangan				
	Batubara	Marmer 1	Nikel 1	Nikel 3 C	Nikel 3b
Bungku Utara	-	-	-	-	15,442.30
Lembo	-	-	10,986.74	-	-
Lembo Raya	-	-	5,523.97	-	-
Mamosalato	-	-	-	-	13,866.78

Kecamatan	Jenis Pertambangan				
	Batubara	**Marmer 1**	**Nikel 1**	**Nikel 3 C**	**Nikel 3b**
Mori Atas	4,369.04	30.40	-	-	-
Mori Utara	5.04	2.06	-	-	-
Petasia	-	8,359.12	1,128.16	5,156.15	-
Petasia Barat	-	2,172.71	72.54	749.08	-
Petasia Timur	-	208.42	11,506.49	-	-
Soyo Jaya	-	-	-	-	-
Jumlah	**4,374.08**	**10,772.71**	**29,217.89**	**5,905.23**	**29,309.09**

Sumber: RTRW Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2036.

f. Industri

Kawasan peruntukan industri di Kabupaten Morowali Utara lebih diarahkan berlokasi mendekati sumber bahan baku (*raw material oriented*) yang terdiri atas:

1). Kawasan Peruntukan Industri Besar.
   a. Kawasan peruntukan industry besar berbasis bahan baku pertanian terdapat di Desa Bungintimbe Kecamatan Petasia Timur; Desa Beteleme Kecamatan Lembo; dan Desa Tomata Kecamatan Mori Atas.
   b. Kawasan peruntukan industri berbasis bahan baku perikanan dan hasil laut terdapat di Kecamatan Petasia Timur.
   c. Kawasan peruntukan industri besar berbasis bahan baku pertambangan terdapat di Kecamatan Petasia, Kecamatan Petasia Timur, dan Kecamatan Petasia Barat.
2). Kawasan Peruntukan Industri Rumah Tangga yang Tersebar di Seluruh Kecamatan.

g. Pariwisata

Kawasan yang peruntukan pariwisata di Kabupaten Morowali Utara terdiri atas:

1). Kawasan Peruntukan Pariwisata Budaya yaitu:
   a. Situs Rumah Raja Mori, Kecamatan Petasia Barat;
   b. Rumah Suku Wana di Kecamatan Bungku Utara.
   c. Makam Raja Mori Kecamatan Petasia.
   d. Kubur Keramat Desa Tokala terdapat di Kecamatan Bungku Utara.
2). Kawasan Peruntukan Pariwisata Alam yaitu:
   a. Taman wisata Laut Teluk Tomori terdapat di Kecamatan Petasia;
   b. Wisata Sungai/Arung Jeram, Permandian Air Panas, Permandian Panapa, Permandian Korowalelo di Kecamatan Lembo;
   c. Permandian Gontara di Kecamatan Mori Atas;
   d. Batu Payung di Kecamatan Petasia;
   e. Pasir putih Pantai Siliti, Air Terjun Warampadoa Kecamatan Bungku Utara;
3). Kawasan Peruntukan Pariwisata Cagar Alam yaitu:
   a. Cagar Alam Morowali Utara terdapat di Kecamatan Bungku Utara dan Kecamatan Soyo Jaya; dan
   b. Taman Buru Landasa Tomata terdapat di Kecamatan Mori Atas.
4). Kawasan yang Peruntukan Pariwisata Buatan (pertanian/agriwisata) yaitu:
   a. Wisata Agro Perkebunan Kelapa terdapat di Kecamatan Mori Atas.
   b. Makam Raja Mori terdapat di Kecamatan Petasia; dan
   c. Kubur Keramat Desa Tokala terdapat di Kecamatan Bungku Utara.

1.2.4. Kawasan Rawan Bencana

Wilayah Kabupaten Morowali Utara termasuk kategori wilayah rawan bencana antara lain:

1) Kawasan rawan tanah longsor di Kecamatan Petasia, Kecamatan Soyo Jaya, Kecamatan Bungku Utara dan Kecamatan Mamosalato.
2) Kawasan Rawan Gelombang Pasang Kriteria Kawasan rawan gelombang pasang/Tsunami adalah kawasan sekitar pantai yang rawan terhadap gelombang pasang dengan kecepatan antara 10 sampai 100 kilometer perjam yang timbul akibat angin kencang atau gravitasi bulan atau matahari. Kawasan rawan gelombang pasang di Kecamatan Soyo Jaya, Kecamatan Bungku Utara dan Kecamatan Mamosalato. Pantai berpotensi dan/atau pernah mengalami abrasi. Kawasan rawan abrasi di Kecamatan Bungku Utara.
3) Kawasan Rawan Banjir Kriteria Kawasan rawan banjir adalah; kawasan yang diidentifikasikan sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam banjir. Kawasan rawan banjir di Kabupaten Morowali Utara terdapat di Kecamatan Petasia, Kecamatan Soyo Jaya, dan Kecamatan Bungku Utara.
4) Kawasan Rawan Gempa Bumi Kawasan yang berpotensi dan/atau pernah mengalami gempa bumi dengan skala VII sampai dengan XII *Modified Mercally Intensity* (MMI). Kawasan rawan gempa bumi di Kabupaten Morowali Utara terdapat di Kecamatan Mori Atas. Sempadan dengan lebar paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) meter dari tepi jalur patahan aktif. Sedangkan Pantai dengan elevasi rendah dan/atau berpotensi atau pernah mengalami Tsunami.

Gambar. 4
Peta Wilayah Rawan Bencana Kabupaten Morowali Utara



Sumber: RTRW Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2036.

1.2.5. Tinjauan Ekonomi Kabupaten Morowali Utara

a. Pertumbuhan PDRB

Perekonomian Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan pertumbuhan tahun-tahun sebelum-nya. Hal ini diakibatkan kebijakan ekspor pertambangan melalui proses industri pengolahan smelter, dimana menunjukkan peningkatan ekspor tambang nikel Kabupaten Morowali Utara. Selain itu dengan semakin merebahnya Pandemi Covid 19 berdampak signifikan terhadap penurunan kinerja ekonomi daerah. Laju pertumbuhan PDRB Morowali Utara Tahun 2020 menurun cukup tajam mencapai 2,04 persen, sedangkan Tahun 2019 sebesar 10,91 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh kategori industry pengolahan sebesar 45,19 persen, jasa komunikasi dan informasi sebesar 8,96 persen, pertambangan dan penggalian 7,35 persen. Penurunan pertambangan dan penggalian terutama dari

penggalian nikel yang cukup besar diakibatkan berkurangnya permintaan ekspor luar negeri terhadap komoditas tambang nikel. Data laju pertumbuhan riil PDRB Kabupaten Morowali Utara Menurut Lapangan Usaha periode Tahun 2016-2020 terdapat pada Tabel 10 sebagai berikut.

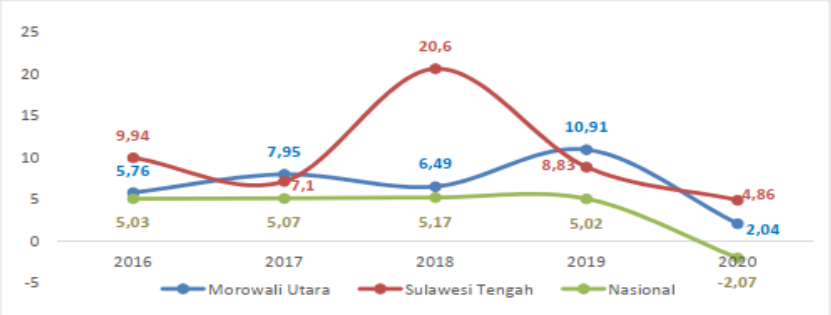
Tabel. 12
Laju Pertumbuhan Riil Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha (persen), 2016–2020

LAPANGAN USAHA	2016	2017	2018	2019	2020
A.Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.53	4.34	4.05	7.01	(1.84)
B. Pertambangan dan Penggalian	20.12	43.73	24.69	18.61	7.35
C.Industri Pengolahan	16.12	27.49	5.92	3.55	45.19
D.Pengadaan Listrik dan Gas	5.56	6.67	7.96	9.04	6.87
E.Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9.98	11.29	12.55	2.32	(6.93)
F.Konstruksi	0.02	(20.87)	(92.01)	979.60	(3.64)
G.Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.08	5.27	4.98	2.11	(6.40)
H.Transportasi dan Pergudangan	10.71	6.49	7.75	6.73	(33.70)
I.Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5.63	6.88	7.86	5.66	(16.15)
J.Informasi dan Komunikasi	7.50	10.59	9.92	6.81	8.96
K.Jasa Keuangan dan Asuransi	22.60	10.33	8.11	6.67	6.52
L.Real Estat	5.06	2.15	3.03	4.12	(2.54)
M,N.Jasa Perusahaan	9.47	9.55	10.82	6.51	(1.99)
O.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6.57	6.70	7.90	8.12	(0.41)
P.Jasa Pendidikan	6.78	6.91	4.74	4.88	(5.19)
Q.Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10.34	6.38	5.30	7.11	5.74
R,S,T,U.Jasa lainnya	9.44	9.56	10.79	3.12	(5.90)
Produk Domestik Regional Bruto	**5.76**	**7.95**	**6.49**	**10.91**	**2.04**

Sumber: Kabupaten Morowali Utara, BPS 2021

Peningkatan nilai tambah *(valueadded)* secara sektoral tersebut dari agregasi pertumbuhan subsektor-subsektor dalam sektor tersebut. Perkembangan masing-masing subsektor juga berasal dari komoditas unggulan subsektor tersebut. Misalnya, pertumbuhan Sektor Pertanian bersumber dari peningkatan produksi perikanan, padi dan hortikultura. Peningkatan salah satu sektor ekonomi juga memberikan daya dorong pergerakan ekonomi pada sektor yang lainnya (*multiplier effect*). Produk hasil industri terutama industri makanan menjadi pendorong pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan. Data laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali Utara periode Tahun 2016-2020 terdapat pada Gambar 3 sebagai berikut.

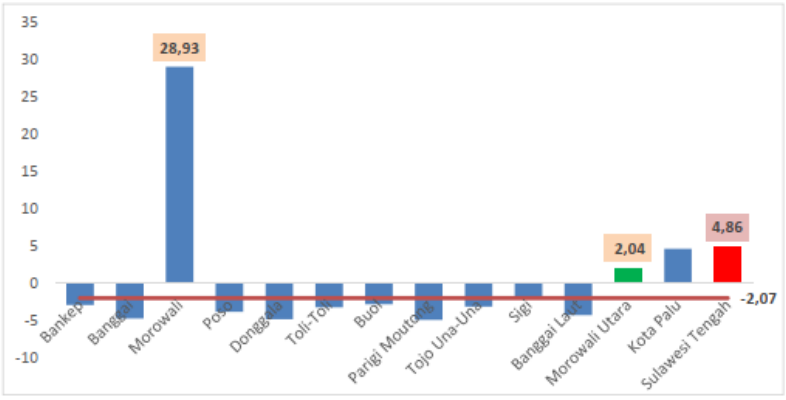
Gambar. 5
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional 2016–2020



Sumber: BPS, 2021 (Diolah Kembali)

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali Utara pada Tahun 2020 dibawah laju pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah dan diatas pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali Tahun 2020 sebesar 2,04 persen menurun dari tahun 2019 yang tumbuh 10,91 persen. Pertumbuhan ekonomi Morowali Utara lebih rendah dari pertumbuhan Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 4,86 persen, namun jauh berada diatas pertumbuhan nasional sebesar 2,07 persen. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali Utara periode Tahun 2020 mengalami penurunan, namun masih tumbuh positif dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Sulawesi Tengah, kecuali dengan Kabupaten Morowali yang tumbuh 28.93%. Pada Tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali Utara sebesar 10,91 persen berada pada posisi kedua setelah Kabupaten Morowali sebesar 14,51 persen, dan pertumbuhan ini berada diatas rata-rata provinsi sebesar 7,15 persen. Petumbuhan ekonomi Tahun 2019, dipercepat adanya investasi dan perbaikan kinerja ekspor luar negeri. Investasi tersebut adalah pembangunan proyek-proyek infrastruktur seperti perbaikan jalan dan pabrik smelter nikel. Ekspor luar negeri yang dimaksud utamanya ekspor kenegara China. Data laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah terdapat pada Gambar 4 sebagai berikut.

Gambar. 6
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Morowali Utara Dengan Kabupaten/Kota se-Sulteng Tahun 2020



Sumber: Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Angka, 2020 (Diolah Kembali)

b. PDRB per Kapita

Kemajuan perekonomian Kabupaten Morowali Utara dapat dilihat dari kinerja ekonomi makro daerah ini. Dimana, laju perkembangan pembangunan Kabupaten

Morowali Utara dapat dilihat dari peningkatan pertumbuhan ekonomi, PDRB dan PDRB Perkapita. PDRB merupakan suatu dasar pengukuran atas nilai tambah (*value added*) yang mampu diciptakan akibat timbulnya berbagai aktivitas ekonomi penduduk dalam suatu wilayah/regional dalam kurun waktu satu Tahun. PDRB dapat menggambarkan kemampuan perekonomian suatu daerah dalam mengelola sumberdaya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki. Gambaran perekonomian Kabupaten Morowali Utara ditinjau dari PDRB ADHB Tahun 2016 sebesar Rp.8.317.377 juta yang mengalami peningkatan cukup signifikan hingga Tahun 2020 menjadi sebesar Rp.11.203.762,00 juta. Data PDRB ADHB Kabupaten Morowali Utara periode Tahun 2016-2020 terdapat pada Tabel 11 sebagai berikut.

Tabel. 13
Jumlah PDRB ADHB Kabupaten Morowali Utara
Menurut Lapangan Usaha 2016-2020

LAPANGAN USAHA	2016	2017	2018	2019	2020
A.Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,926,632	3,140,097	3,294,253	3,589,213	3,514,655
B.Pertambangan dan Penggalian	1,628,270	2,426,973	3,349,266	4,284,692	3,667,845
C.Industri Pengolahan	97,574	137,969	152,035	166,174	280,834
D.Pengadaan Listrik dan Gas	853	967	1,108	1,241	1,262
E.Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,306	4,938	5,719	6,161	6,694
F.Konstruksi	2,260,986	1,869,649	1,576,967	1,798,184	1,824,664
G.Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	571,958	641,277	721,382	786,448	770,822
H.Transportasi dan Pergudangan	28,352	31,259	34,947	39,140	27,021
I.Penyediaan komodasi dan Makan Minum	20,103	21,812	23,907	26,776	24,117
J.Informasi dan Komunikasi	162,332	182,041	202,627	226,942	244,176
K.Jasa Keuangan dan Asuransi	34,716	40,155	45,777	51,271	54,411
L.Real Estat	150,249	160,163	172,438	193,131	186,307
M,N.Jasa Perusahaan	1,231	1,410	1,630	1,826	1,795
O.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	184,604	205,588	231,248	258,998	270,077
P.Jasa Pendidikan	124,492	137,357	151,068	163,491	155,291
Q.Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	68,863	75,640	81,915	91,744	101,754
R,S,T,U.Jasa lainnya	51,857	61,237	73,038	81,802	72,038
Produk Domestik Regional Bruto	*8,317,377*	*9,138,534*	*10,119,324*	*11,767,234*	*11,203,762*

Sumber: Kabupaten Morowali Utara, BPS 2021

Kabupaten Morowali Utara memiliki sumber daya alam mineral yang melimpah. Kondisi ini berdampak positif bagi perekonomian daerah, bahkan Sektor Pertambangan dan Penggalian menjadi salah satu sektor andalan. Berdasarkan PDRB ADHB Tahun 2016 didominasi 3 sektor yakni: Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar Rp.2.929.922 Juta; Sektor Konstruksi sebesar Rp.2.260.985,90 juta; Sektor Pertambangan dan Pengalihan Rp.1.658.274 juta, sementara itu kontribusi Sektor Industri masih rendah hanya sebesar Rp.97.573,70 juta. Pada Tahun 2020, ketiga sektor tersebut masih tetap dominan yakni Sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar

Rp.3.667.847; Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar RP.3.514.655, dan Sektor Konstruksi sebesar Rp.1.824.664. Sementara itu, PDRB ADHK 2010 sebesar Rp.6.247.646 juta tahun 2016 meningkat di Tahun 2017 menjadi sebesar Rp.6.709.481 juta dan Tahun 2020 mencapai sebesar Rp.8.072.844. Dalam periode Tahun 2016-2020 terdapat tiga sektor dominan dalam menggerakkan roda perekonomian Kabupaten Morowali Utara. Pada Tahun 2016, PDRB ADHK 2010 Sektor Pertanian sebesar Rp.2.154.314,10 juta; Sektor Konstruksi sebesar Rp1.527.787,70 juta; Sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar Rp.1.476.337,90 juta. Pada Tahun 2017, ketiga sektor tersebut masih menjadi sektor berkontribusi tinggi dalam PDRB ADHK 2010 Kabupaten Morowali Utara. Hingga Tahun 2020, Sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar Rp.3.298.171,00 juta; sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar Rp.2.452.785,00 juta; dan Sektor Konstruksi sebesar Rp 1.001.259,00 juta. Ketiga sektor tersebut dari Tahun ke Tahun mengalami peningkatan, meski beberapa Tahun terakhir terjadi pergeseran sektor dominan dalam membentuk PDRB ADH Konstan Kabupaten Morowali Utara. Seiring dengan mulai dikelolanya JOB Pertamina *Medco-Expan* Tomori di Kecamatan Mamosalato, dan juga meningkatnya ekspor nikel hasil produksi perusahaan pertambangan yang tersebar di Kecamatan Petasia, Kecamatan Petasia Timur, dan Kecamatan Petasia Barat. Data PDRB ADHK 2010 Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2020 terdapat pada Tabel 12 sebagai berikut.

Tabel. 14
Jumlah PDRB ADHK 2010 Kabupaten Morowali Utara
Menurut Lapangan Usaha 2016-2020

LAPANGAN USAHA	2016	2017	2018	2019	2020
A.Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,150,929	2,244,266	2,335,110	2,498,729	2,452,785
B.Pertambangan dan Penggalian	1,445,338	2,077,335	2,590,188	3,072,171	3,298,124
C.Industri Pengolahan	76,604	97,665	103,446	107,123	155,532
D.Pengadaan Listrik dan Gas	989	1,055	1,139	1,242	1,327
E.Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,136	3,490	3,928	4,019	3,741
F.Konstruksi	1,522,788	1,204,974	96,247	1,039,080	1,001,259
G.Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	393,551	414,272	434,899	444,071	415,666
H.Transportasi dan Pergudangan	21,155	22,527	24,273	25,906	17,175
I.Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	13,828	14,779	15,940	16,842	14,122
J.Informasi dan Komunikasi	143,198	158,367	174,083	185,941	202,607
K.Jasa Keuangan dan Asuransi	25,470	28,100	30,378	32,405	34,518
L.Real Estat	109,577	111,936	115,326	120,077	117,024
M,N.Jasa Perusahaan	911	998	1,106	1,178	1,155
O.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	129,971	138,674	149,631	161,781	161,118
P.Jasa Pendidikan	83,694	89,475	93,718	98,287	93,181
Q.Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	48,678	51,782	54,527	58,405	61,759
R,S,T,U.Jasa lainnya	35,444	38,834	43,026	44,368	41,753
Produk Domestik Regional Bruto	**6,205,261**	**6,698,529**	**7,133,186**	**7,911,624**	**8,072,844**

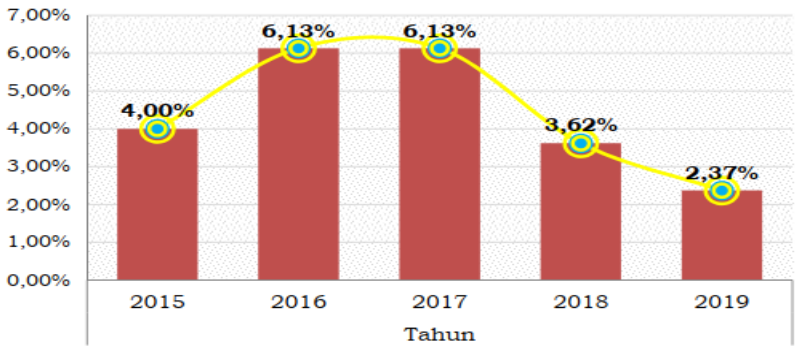
Sumber: Kabupaten Morowali Utara, BPS 2021

c. Inflasi

Pembangunan sektor ekonomi sangat tergantung pada kondisi fiskal dan moneter. Apabila keadaan tersebut tidak terkendali mengakibatkan tingginya inflasi, sehingga daya beli masyarakat terhadap barang menurun, atau sebagai indikasi bahwa nilai uang merosot. Laju inflasi didasarkan pada akumulasi perubahan IHK (Indeks Harga Konsumen) perbulan.

Ada banyak indikator yang dapat mengukur pembangunan, baik itu indikator ekonomi maupun indikator sosial. Salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan atau penurunan jumlah rumah tangga/masyarakat miskin adalah Inflasi. Naiknya inflasi menyebabkan harga-harga semakin meningkat dan membebanidayabeli masyarakat Kabupaten Morowali Utara. Data laju inflasi Kabupaten Morowali Utara periode Tahun 2015-2019 terdapat pada Gambar 5. Tingkat pengendalian inflasi di Kabupaten Morowali Utara dapat dikatakan berhasil. Hal ini terlihat dari keberhasilan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang mampu menekan angka inflasi dan tetap menjaga kemampuan daya beli masyarakat di Kabupaten Morowali Utara. Pada Tahun 2015 inflasi di Kabupaten Morowali Utara sebesar 4,00 persen; meningkat ahun 2017 menjadi 6,13 persen. Namun, periode Tahun 2018- 2019 inflasi menurun menjadi sebesar 2,37 persen.

Gambar. 7
Tingkat Inflasi Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2019



Sumber: BPS, 2020 (Diolah Kembali)

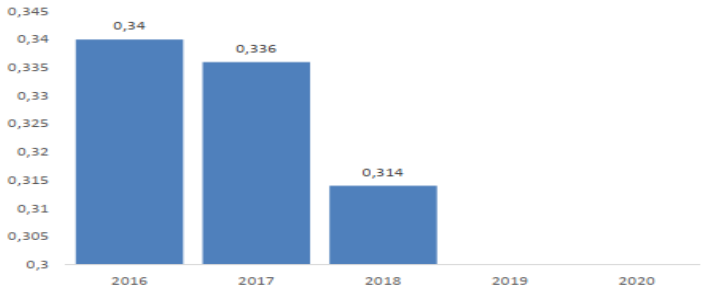
d. Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)

Indikator digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat adalah distribusi pendapatan yang diterima masyarakat, yang direpresentasikan melalui indikator indeks Gini atau koefisien Gini. Indeks gini berada di antara 0-1, bila nilai indeks gini bernilai 0, maka pemerataan distribusi pendapatan masyarakat sempurna,dan indeks gini bernilai 1, maka ketidak merataan distribusi pendapatan sempurna.

Kesenjangan distribusi pendapatan menurut Bank Dunia dikategorikan: a) **Tinggi**: bila 40 persen penduduk berpenghasilan terendah menerima kurang dari 12 persen bagian pendapatan; b) **Sedang**: bila 40 persen penduduk berpenghasilan terendah menerima 12-17 persen bagian pendapatan; c) **Rendah**: bila 40 persen penduduk berpenghasilan terendah menerima lebih dari 17persenbagian pendapatan.

Sementara itu untuk kriteria Indeks Gini, yakni jika rasio Gini = 0, berarti pembagian pendapatan merata sempuma, tetapi jika rasio Gini = 1, berarti pembagian pendapatan timpang total. Menurut kriteria H.T. Oshima; Ketimpangan "rendah" bila indeks Gini kurang dari 0,3; Ketimpangan "sedang" bila indeks Gini antara 0,3-0,4; dan Ketimpangan "tinggi" bila indeks Gini di atas 0,4.Data indeks Gini Kabupaten Morowali Utara periode Tahun 2016-2020 terdapat pada Gambar 6 sebagai berikut. Data rasio gini 2019 dan 2020 belum tersedia.

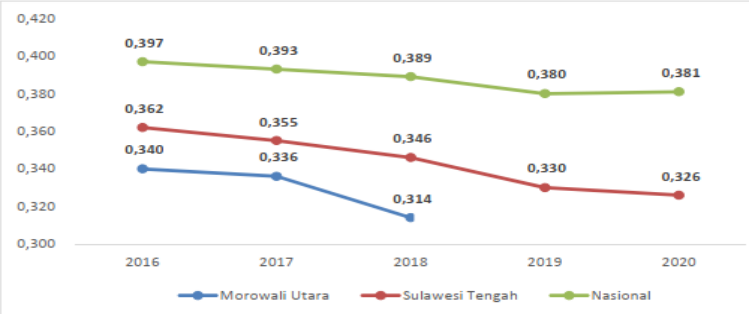
Gambar. 8
Indeks Gini Kabupaten Mórowali Utara Tahun 2016-2020



Sumber: Kabupaten Morowali Utara Dalam Angka 2020 (diolah kembali)

Kondisi indesk Gini Kabupaten Morowali Utara lebih baik, jika dibandingkan dengan kondisi rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah dengan indeks Gini sebesar 0,326; dan lebih baik dari rata-rata nasional sebesar 0,381, dan indeks gini Morowali Utara tergolong kedalam ketimpangan sedang, keadaan ini memberikan gambaran bahwa hasil pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Morowali Utara masih belum bisa dinikmati secara merata oleh penduduk. Perkembangan dan perbandingan indeks Gini Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, dan nasional periode Tahun 2016-2020 terdapat pada Gambar 9.

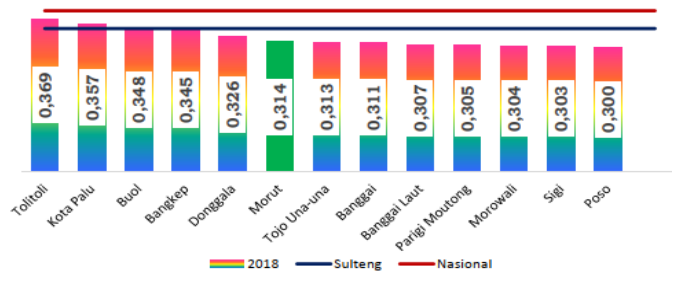
Gambar. 9
Gini Rasio Kabupaten Morowali Utara,
Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020



Sumber: BPS, 2020 (Diolah Kembali)

Selanjutnya, untuk perbandingan indeks Gini menurut Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah terdapat pada Gambar 8 sebagai berikut.

Gambar. 10
Indeks Gini Rasio Kabupaten Morowali Utara
Kabupaten/Kota se-Sulteng Tahun 2018



Sumber: BPS, 2020 (Diolah Kembali).

Indeks Gini tertinggi di Kabupaten Tolitoli sebesar 0,369. Sedangkan Kabupaten Morowali Utara urutan ke-enam serta daerah dengan indeks Gini terendah adalah Kabupaten Poso dan Kabupaten Sigi.

1.3. ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2021-2026

Hasil rumusan isu strategis Daerah diupayakan dapat menggambarkan dinamika lingkungan eksternal baik skala regional, nasional, maupun internasional yang berpotensi memberi dampak terhadap Daerah dalam kurun waktu jangka menengah maupun jangka panjang. Isu strategis daerah ini akan menjadi salah satu dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah mulai dari tujuan, sasaran, strategi, arah kebiijakan berikut program-program pembangunannya. Memperhatikan kebijakan pembangunan di daerah sekitar Kabupaten Morowali Utara serta isu-isu strategis intemasional, nasional serta regional dan aspek lainnya memperhatikan penelaan Isu-Isu strategis KLHS RPJMD 2021-2026, maka isu strategis pembangunan Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 yang mendapatkan perhatian serius dan fokus dari pemerintah daerah sebagai berikut:

1. Penanganan Penyebaran Dan Pemulihan Pasca Covid-19
2. Peningkatan Ekonomi Yang Inklufif Dan Pengentasan Kemiskinan
3. Era Industri 4.0 Dan Teknologi Digital
4. Kualitas dan Cakupan Infrastruktur Wilayah
5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Dan Berkualitas
6. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Dan Kompetensi ASN
7. Mitigasi Bencana Dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan
8. Pencapaian Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)

Isu-isu strategis tersebut di atas memberikan penajaman dan penguatan analisis dinamika lingkungan terhadap proses perencanaan yang memiliki karakteristik bersifat penting, mendasar, berjangka menengah, mendesak, bersifat kelembangaan/keorganisasian untuk menentukan tujuan di masa yang akan datang Beberapa isu strategis daerah sebagai modal dasar pencapaian tujuan RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Penanganan Penyebaran Pandemi Covid-19 dan Upaya Pemulihan Pasca Pendemi Covid-19

Kondisi saat ini, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dihadapkan pada dua masalah yang sesegera mungkin diatasi yakni menyelamatkan kesehatan meliputi pencegahan virus, *tracing, testing, treatment*, penemuan vaksin/obat. Kedua, memulihkan perekonomian melalui pembukaan ekonomi secara bertahap dalam kenormalan baru dan penciptaan lapangan kerja. Pemerintah menyiapkan beberapa skenario yakni membuat perekonomian secara terbatas, pemulihan ekonomi nasional (PEN) meliputi transformasi struktural, sektor riil, sektor keuangan, serta kebijakan pasca Covid-19 untuk mendorong perekonomian melalui daya Tarik investasi melalui undang-undang cipta lapangan kerja.

Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dapat menempuh langkah langkah mitigasi ekonomi. Mitigasi ekonomi sebagai tindakan yang ditempuh untuk mengurangi risiko atau dampak kerugian yang lebih, karena terjadinya peristiwa bersifat luar biasa yang tidak diinginkan. Elemen penting ekonomi, harus diberi jaminan untuk menghindari terjadinya kerugian yang lebih besar. Alokasi anggaran percepatan penanganan Covid-19 di Sulawesi Tengah maupun Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020 cukup besar. Alokasi

dari anggaran penanganan Covid-19 tersebut sebagian besar dimanfaatkan untuk penanganan dampak ekonomi, melakukan jaring pengamanan sosial, dan tentunya, alokasi anggaran yang terbesar untuk bidang kesehatan. Alokasi anggaran penanganan Covid-19 ini dioptimalkan untuk memulihkan kondisi kesehatan masyarakat sekaligus untuk memulihkan ekonomi sebagai dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 yang sudah menghambat, bahkan menghentikan aktivitas perekonomian, termasuk di Kabupaten Morowali Utara. Tahun 2020, stimulus fiskal juga di perekonomian Nasional dan Daerah melalui alokasi anggaran penanganan pandemi Covid-19 secara nasional sebesar Rp.695,2 triliun, atau sebesar 25,27 persen dari total belanja APBN Perubahan Tahun 2020. Anggaran tersebut dialokasikan untuk bidang kesehatan sebesar 12,59 persen, untuk perlindungan sosial sebesar 29,33 persen, sektoral Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Pemda) 15,27 persen, bantuan bagi UMKM sebesar 17,76 persen, digunakan untuk pembiayaan korporasi sebesar 7,70 persen, serta insentif 17,35 persen. Alokasi anggaran penanganan Covid-19 terbesar digunakanp untuk perlindungan sosial dalam bentuk jaring pengaman sosial bagi masyarakat. Hal ini sebagai upaya yang ditempuh pemerintah untuk menangani Covid-19 tersebut dengan langkah strategis, dengan mengkombinasikan pemulihan ekonomi dan kesehatan secara simultan atau paralel. Langkah strategis tersebut ditempuh dengan membuat kondisi ekonomi dan kesehatan dapat berjalan beriringan dengan melalui penerapan norma baru. Protokol kesehatan dengan menerapkan norma baru memberikan ruang aktivitas ekonomi lebih bebas bergerak danhubungan sosial tetap berlangsung, namun dengan melaksanakan tindakan disiplin dalam memakai masker, menjagajarak, dan menghindari kerumunan masal. Pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini, tentu saja akan memberikan dampak bagi kondisi kesehatan masyarakat dan aktivitas ekonomi baik secara nasional, Provinsi Sulawesi Tengah dan tentunya masyarakat Kabupaten Morowali Utara.

b. Peningkatan Ekonomi yang Inklusif dan Pengentasan Kemiskinan

Menjadikan pertumbuhan ekonomi berkualitas menjadi tantangan tersendiri bagi setiap daerah. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan berkualitas atau inklusif jika pertumbuhan ekonomi berkonstribusi menekan berkurangnya jumlah penduduk miskin dan terjadi pemerataan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi berkualitas juga tercermin dari aktivitas perekonomian yang mampu memberikan pemerataan pendapatan masyarakat, serta mendongkrak tumbuhnya lapangan kerja baru yang memiliki daya serap yang tinggi terhadap pertumbuhan tenagakerja. Fokus pada pertumbuhan ekonomi berkualitas penting karena secara berkorelasi positif terhadap upaya nyata penurunan angka kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan indikator kesejahteraan lainnya. Bagi Pemerintah Kabupaten Morowali Utara tata kelola pembangunan yang baik, sejatinya akan diukur dari pertumbuhan ekonomi berkualitas menjadi ultimate goal yang dikedepankan dalam berbagai program dan kegiatan pembangunan dalam rangka mencapai kesejahteraan rakyat yang berkeadilan sebagai perwujudan pemerintah hadir ditengah masyarakat. Kemiskinan merupakan masalah paling utama dalam pembangunan yang bersifat kompleks dan multi dimensional. Persoalan kemiskinan bukan hanya berdimensi ekonomi tetapi juga sosial, budaya, politik, bahkan jugai deologi. Secara umum kondisi kemiskinan masyarakat tersebut ditandai oleh kerentanan, ketidak berdayaan, keterisolasian, dan ketidak mampuan untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhannya. Kabupaten Morowali Utara masih memiliki isu strategis berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun penurunan angka kemiskinannya cenderung melambat. Padasisilain, Kabupaten

Morowali Utara merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki banyak potensi untuk dikembangkan untuk meningkatkan taraf kehidupan ekonomi masyarakat dan pemerintah daerah, dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Salah satu tantangan penurunan angka kemiskinan adalah masih banyaknya masyarakat miskin, atau golongan menengah kebawah, yang termasuk masyarakat miskin berbasis Komunitas Adat Terpencil(KAT). Hal ini terlihat dari periode tahun 2015-2019, penurunan persentase penduduk miskin yang sangat kecil yakni hanya sebesar 1,83 persen. Pada Tahun 2015, jumlah penduduk miskin diKabupaten Morowali Utara sebanyak 19.810 orang atau sebesar 16,91 persen. Setiap Tahun angka kemiskinan diKabupaten Morowali Utara, mengalami penurunan hingga pada tahun 2019 persentase penduduk miskin sebesar 15,08 persen atau sebanyak 19.250 jiwa. Faktor penyebab tingginya kemiskinan diKabupaten Morowali Utara adalah masalah kulturan/budaya. Sejalan dengan hal itu konsentrasi masalah sosial khususnya penanggulangan kemiskinan yang menjadi perhatian pemerintah saat ini adalah kawasan 3T (terpencil, tertinggal, dan terdepan). Untuk menyelesaikan masalah ini, pemerintah sudah melakukan sinergi antar sektor. Masalah Kemiskinan lebih cepat diatasi, apabila semua potensi daerah bersama-sama mengambil peran, selain pemerintah, juga dunia usaha harus digerakkan untuk percepatan penyelesaian kemiskinan khususnya di Kabupaten Morowali Utara.

c. Era Industri 4.0 dan Teknologi Digital

Saat ini merupakan era *"sharing & platform based"*. Kebangkitan era tersebut ditandai dengan: (1) data merupakan pelumas baru dalam kegiatan ekonomi dan, (2) model bisnis berbasis platform. Model bisnis platform based misalnya; (1) Perusahaan ,transportasi, tanpa kendaraan, (2) Penyedia "*breakingnews*" tanpa menyusun berita, (3) Penyedia *photo sharing* tanpa membuat foto, (4) Jasa komunikasi tanpa infrastruktur telekomunikasi, (5) Peritel bervaluasi tinggi tanpa memiliki inventory, (6) Penyedia akomodasi tanpa memiliki kamar, (7) Media popular tanpa membuat content, (8) Pertemuan, seminar, webinar, rapatvirtual dan pengelolan kantor dari jarak jauh, (9) pemberian pengajaran jarak jauh (PJJ)/kuliah daring menjadi model baru (PJJ/digitalisasi pendidikan). Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat dapat menembus batas-batas negara. Globalisasi yang terjadi saat ini salah satunya ditandai dengan kecepatan arus informasi dan ekonomi digital yang tidak dapat dilepaskan oleh pengaruh besar teknologi. Kemampuan teknologi dalam mengintegrasikan tradisi perdagangan, dapat mengubah bentuknya menjadi lebih sempurna, universal, dan spasial temporal (mampu menembus ruang dan waktu). Teknologi juga mampu menggerakkan arus informasi dan gagasan tanpa batas, sehingga yang diperlukan adalah kemampuan mentransformasikan teknologi informasi menjadi sebuah aktivitas positif, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya yang tetap sejalan dengan nilai-nilai luhur kepribadian bangsa Indonesia. Tantangan saat ini adalah untuk mengantisipasi dimulainya era industri 4.0 terutama pada industri pangan, makanan dan minuman dan lainnya, yang saat ini masih menjadi komoditas industri unggulan nasional, Sulawesi Tengah, maupun Kabupaten Morowali Utara. Selain itu, juga diperlukan Langkah-langkah mengkombinasikan industri 4.0 dengan penyerapan dan penciptaan lapangan kerja baru dan dapat dipasarkan secara luas melalui penjualan secara online. Pembatasan interaksi fisik antar manusia menyebabkan berbagai bentuk Layanan pemerintah berubah menjadi online*, Workfrom Home* (WFH) dan budaya rapat daring (*online*) menjadi sebuah kebiasaan baru di dalam menyelesaikan berbagai tugas pemerintahan. Transaksi ekonomi juga dilakukan secara jarak jauh atau daring dengan memanfaatkan teknologi digital. Tidaklah berlebihan kalau Pelayanan pemerintah dan

transaksi ekonomi yang berbasis teknologi digital ini berhasil mengurangi kecepatan laju penularan virus corona keseluruh umat manusia, termasuk di Kabupaten Morowali Utara. Pemberian pengajaran jarak jauh (PJJ) untuk layanan Pendidikan kedepan di Kabupaten Morowali Utara akan berjalan seiring dengan adaptasi pada teknologi Pendidikan saat ini.

d. Kualitas dan Cakupan Infrastruktur Wilayah

Kondisi wilayah geografis Kabupaten Morowali Utara yang luas dan tidak meratanya penyebaran penduduk terutama pada daerah–daerah wilayah perdesaan, daerah perdalaman, dan terpencil menjadi penyebab terjadinya kesenjangan pembangunan. Kesenjangan tersebut juga ditunjukkan dengan belum memadainya aksesibilitas dan jangkauan pelayanan terhadap sarana dan prasarana infrastruktur antar daerah kecamatan seperti jalan dan jembatan, transportasi, irigasi teknis dan non teknis, perumahan dan pemukinan, telekomunikasi serta kelistrikan. Infrastruktur yang baik adalah modal fisik bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi dan usaha produktif. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan tingkat kesejahteraan masyarakat tidak mungkin dicapai tanpa jaminan ketersediaan infrastruktur yang baik dan memadai. Dengan kata lain, Pertumbuhan ekonomi akan terhambat apabila ketersediaan infrastruktur daerah belum tersedia dengan baik. Kinerja Jaringan jalan berdasarkan kondisi dapat dikatagorikan dengan jalan kondisi baik, sedang, rusak dan rusak berat. Kinerja jaringan jalan berdasarkan kondisi dapat dikategorikan dengan jalan kondisi baik, sedang, rusak, dan rusak berat. Proporsi kondisi jalan baik di Kabupaten Morowali Utara mengalami peningkatan, dimana pada Tahun 2015 proporsi jalan kondisi baik sepanjang 409,88 Km atau 44,84 persen dari panjang jalan keseluruhan 921,39 Km, data menurun sangat signifikan Tahun 2016 menjadi sebesar 12,67 persen atau sepanjang 120,4 Km dari panjang jalan 950,30 Km. Hingga Tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi sebesar 25,44 persen. Perkembangan persentase jaringan irigasi di Kabupaten Morowali Utara befluktuatif. Hal ini ditunjukkan pada Tahun 2015 jaringan irigasi sebesar 38,29 persen, meningkat Tahun 2017 menjadi sebesr 48,77 persen, dan menurun pada periode Tahun 2018-2019 masing-masing menjadi sebesar 47,58 persen dan sebesar 47,09 persen. Kinerja Sistem Irigasi kewenangan Kabupaten masih belum optimal, di sisi lain daerah irigasi merupakan kewenangan Provinsi juga mengalami masalah. Kurang optimalnya kinerja sistem irigasi disebabkan antara lain oleh jaringan irigasi baik kewenangan Kabupaten maupun provinsi dan pusat banyak dalam kondisi rusak berat dan ringan sehingga kedepan perbaikan infrastruktur sangat di perlukan. Pembangunan sarana dan Prasarana perkantoran dan Pelayanan publik juga masih diperlukan di masa yang akan datang guna mengoptimalkan pelayanan pada masyarakat Kabupaten Morowali Utara baik di tingkat Kabupaten, kecamatan maupuan di desa.

e. Tatakelola Pemerintahan yang baik dan Berkualitas

Perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik melalui institusi Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Uatra yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Dimana, Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah subjek dan objek dari reformasi birokrasi itu sendiri. Oleh sebab itu, saat ini setiap perangkat daerah diwajibkan melakukan penilaian mandiri, atas prakarsa dan praktik reformasi birokrasi yang sudah, sedang, dan akan dilaksanakan. Langkah strategis ini diharapkan dapat menopang implementasi dari tatakelola pemerintahan yang baik, khususnya pada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dimasa mendatang. Pelimpahan wewenang dan penerapan Standar Pelayanan minimal (SPM) pada Perangkat Daerah yang terkait

pelayanan, sangat diharapkan agar penyelenggaraan pelayanan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, membuka peluang bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan investasi dan melakukan inovasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Untuk itu budaya transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan, menjadi isu utama di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Morowali Utara dalam periode Tahun 2021-2026. Pelayanan publik sebagai dampak perubahan orientasi layanan dari birokrasi daerah memerlukan:1)

Standardisasi pelayanan yang bertumpu pada pelibatan masyarakat di dalam proses dan penilaian kinerjanya. Masalahnya, akar persoalan menyatu dengan kapasitas administratif Perangkat Daerah itu sendiri; 2) rasionalisasi penataan organisasi sudah dilakukan, namun tetap diperlukan untuk pengembangannya kearah birokrasi yang dinamis, responsif, dan efisien. Adanya unsur dalam birokrasi yang tersusun dan bekerja dalam hubungannya yang fragmented dan mengedepankan ego sektoral; 3) mengintegrasikan administrasi pelayanan perizinan bagi dunia bisnis/pelaku swasta dalam bentuk kelembagaan Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 4) pengembangan penatalaksanaan diperlukan untuk mencapai target-target kerja administrasi dengan menghilangkan berbagai duplikasi dan inefisiensi prosedural. Sebagai langkah modernisasi yang mendorong hal tersebut; 5) aplikasi layanan online tak terelakkan untuk merespon tuntutan industri 4.0 dewasa ini. Disamping itu perubahan kewenangan dan organisasi pemerintah daerah akibat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah memerlukan berbagai penyesuaian termasuk penyusunan berbagai dokumen perencanaan dan penggangaran daerah.

f. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Kompetensi ASN

Kualitas Sumber daya Manusia merupakan salah satu modal pembangunan, maka kebijakan yang tepat untuk peningkatan kualitasnyapun sangat dibutuhkan. Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Pembangunan secara nasional menempatkan manusia sebagai titik sentral. Dalam konteks ini, pembangunan ditujukan untuk meningkatkan partisipasi rakyat dalam semua proses dan pelaksanaan pembangunan. Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah melakukan upaya meningatkan kualitas penduduk sebagai sumberdaya dari aspek fisik (kesehatan), aspek intelektual (pendidikan), dan aspek kesejahteraaan ekonomi(daya beli). IPM adalah indeks komposit diharapkan mampu mencerminkan kinerja pembangunan manusia, sehingga dapat dibandingkan antar wilayah atau bahkan antar waktu. Fungsi utama IPM adalah sebagai alat banding sejalan dengan fungsi Indeks Mutu Hidup (IMH), yaitu indeks komposit yang disusun dari tiga komponen: (1) kesehatan; (2) Pendidikan; dan (3) ekonomi. SDM berkualitas ditandai dengan semakin meningkatnya IPM. IPM Kabupaten Morowali Utara sangat ditentukan oleh capaian tiga dimensi dasar pembangunan manusia. Dilihat dari peningkatannya, ternyata indeks pembangunan manusia dari komponen angka harapan hidup, daya beli, pendidikan terjadi peningkatan, Peningkatan tertinggi dicapai indeks pendidikan, indeks kesehatan dan indeks daya beli. Dari indikator (indeks) tersebut menjelaskan telah

terjadi perbaikan besar-besaran pada aspek ekonomi dan kesehatan di Kabupaten Morowali Utara, perbaikan ini dalam jangka panjang berdampak pula pada peningkatan angka pendidikan dan kesehatan. Kondisi IPM kabupaten Morowali Utara 5 Tahun terakhir terus mengalami peningkatan, Tahun 2015 IPM Kabupaten Morowali Utara sebesar 66,00;Tahun 2016 menjadi sebesar 66,57; Tahun 2017 menjadi sebesar 67,35 dan hinggaTahun2019 sebesar 68,45.

Gambar. 11
Capaian IPM Provinsi Sulawesi Tengah dan Kab/Kota Tahun 2015-2019



Sumber: BPS, 2020

Pada akhir Tahun 2020, sejak munculnya pandemi COVID-19 di Indonesia dan Provinsi Sulawesi Tengah termasuk di Kabupaten Morowali Utara telah memberikan pengaruh yang cukup signifikan kepada seluruh aspek pembangunan, sehingga diperkirakan dampak dari COVID-19 tersebut akan mempengaruhi terhadap sasaran pembangunan kemungkinan terkoreksi, termasuk juga Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Aspek manajemen sumberdaya aparatur Kabupaten Morowali Utara juga tak tertinggal dari agenda perubahan yang mesti dielaborasi secara praktis dan aplikatif dalam bentuk pengembangan SDM aparatur yang mampu menjawab tantangan era disrupsi danindustri 4.0. Berangkat dari kesadaran bahwa masalah kepegawaian mesti diatasi jika memperbaiki dan mereformasi birokrasi dimana perbaikan kesejahteraan melalui perbaikan remunerasi untuk menunjang kinerjanya yang optimal. Pengembangan dan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen sumberdaya manajemen dalam lingkungan birokrasi mesti difasilitasi secara komprehensif, simultan, dan berkesinambungan melalui mekanisme yang tepat dan efisien.

g. Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan

Kondisi topografi merupakan elemen dasar dari suatu wilayah untuk mengetahui karakteristik fisik suatu daerah. Karakter fisik akan mempengaruhi pola dan jenis pembangunan yang akan diterapkan di wilayah tersebut. Kemiringan lereng dan ketinggian dari permukaan laut merupakan indikator untuk mengetahui kondisi topografi daerah tersebut. Kabupaten Morowali Utara memiliki curah hujan yang tinggi. Akibat curah hujan yang tinggi, struktur geologi yang dipengaruhi oleh dua sesar utama, serta topografi dengan dominasi kemiringan curam, maka wilayah ini memiliki pula kawasan-kawasan yang rawan bencana, khususnya bencana banjir, longsor maupun rawan gempa. Wilayah Kabupaten Morowali Utara termasuk kategori wilayah rawan bencana

antara lain:

1. Kawasan rawan tanah longsor di Kecamatan Petasia, Kecamatan Soyo Jaya, Kecamatan Bungku Utara dan Kecamatan Mamosalato.
2. Kawasan Rawan Gelombang Pasang, Kawasan rawan gelombang pasang rawan berada di Kecamatan Soyo Jaya, Kecamatan Bungku Utara dan Kecamatan Mamosalato. Pantai berpotensi dan/atau pernah mengalami abrasi. Kawasan rawan abrasi di Kecamatan Bungku Utara.

   Kawasan Rawan Banjir. Kriteria Kawasan rawan banjir adalah; kawasan yang diidentifikasikan sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam banjir. Kawasan rawan banjir di Kabupaten Morowali Utara terdapat di Kecamatan Petasia, Kecamatan Soyo Jaya, dan Kecamatan Bungku Utara.
3. Kawasan Rawan Gempa Bumi. Kawasan yang berpotensi dan/atau pernah mengalami gempa bumi dengan skala VII sampai dengan XII Modified Mercally Intensity (MMI). Kawasan rawan gempa bumi di Kabupaten Morowali Utara terdapat di Kecamatan Mori Atas. Sempadan dengan lebar paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) meter dari tepi jalur patahan aktif. Sedangkan Pantai dengan elevasi rendah dan/atau berpotensi atau pernah mengalami Tsunami. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup diperlukan dokumen Kajian Lingkungan Hidup terkait dokumen perencanaan. KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Di Kabupaten Morowali Utara pada Tahun 2019 telah diselenggarakan KLHS untuk Kebijakan Rencana dan Program Daerah. Namun, terdapat penurunan kualitas lingkungan (environmental degra-dation), di daerah Kabupaten Morowali Utara ditemukan pada daerah eks tambang yang tidak direklamasi, sehingga menimbulkan ancaman bahaya tanah longsor dan banjir (khususnya pada musim penghujan) daerah rawan bencana tersebut dapat di masukkan ke dalam daerah lahan kritis, maupun ditetapkan menjadi daerah rawan bencana.

h. Pelaksanaan dan Pencapaian Terget Sustainable Development Goals (SDG's).

SDGs merupakan sebuah dokumen yang akan menjadi sebuah acuan dalam kerangka pembangunan dan perundingan negaranegara di dunia. SDGs dicetuskan untuk meneruskan dan memantapkan keberlanjutan MDGs. Ada banyak tujuan dari konsep SDGs. Namun ada tiga tujuan utama. Pertama, SDGs diharapkan bisa mengakhiri segala bentuk kemiskinan di semua negara manapun. Kedua, SDGs bertujuan mengakhiri segala bentuk kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi dan mendorong pertanian secara berkelanjutan. Ketiga, target SDGs adalah menjamin adanya kehidupan yang sehat, serta mendorong kesejahteraan untuk semua orang di dunia pada semua usia.

Konsep Pembangunan yang berkelanjutan ini memiliki aspekaspek yang perlu diselesaikan secara bersama oleh dunia global antara lain: kehidupan yang sehat dan layak, keamanan dan ketahanan pangan, sumber air bersih, energi yang aman, ekosistem yang produktif dan sehat, kebijakan yang berpihak terhadap komunitas. Untuk mencapai tujuan SDGs tahun 2021 diperlukan koordinasi, kerjasama serta komitmen dari seluruh pemangku kepentingan terutama pemerintah dan masyarakat (nasional dan daerah) untuk bersama-sama memastikan kemajuan-kemajuan yang

telah dicapai telah dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia, Sulawesi Tengah, dan Kabupaten Morowali Utara pada khususnya. Metode dan cara pelaksanaan SDGs menuntut partisipasi warga. Salah satu cara memastikan tercapainya seluruh tujuan dan target SDGs ialah dengan melibatkan kelompok-kelompok masyarakat sipil. Pemerintah bertanggung jawab membentuk kelembagaan panitia bersama atau sekretariat bersama untuk pembangunan berkelanjutan di Tanah Air. Di Indonesia sendiri, pelaksanaan agenda SDGs dibangun berdasarkan pengalaman pemerintah melaksanakan agenda MDGs. Indonesia sangat serius dalam upaya mencapai indikator-indikator SDGs. Hal ini dimulai dengan diintegrasikannya 169 indikator SDGs ke dalam RPJM Nasional 2020-2040 dan tersusunnya Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan berkelanjutan (RAN-TPB). Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Morowali Utara, menjadikan pencapaian tujuan SDGs sebagai salah satu tantangan yang harus dijawab dengan kerja keras seluruh unsur pemerintah, legislatif dan masyarakat. Beberapa indikator yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah Kabupaten Morowali Utara guna mendukung Pencapaian RAD SDGs Provinsi Sulawesi Tengah antara lain terkait angka stunting yang masih tinggi dan memerlukan perhatian khusus. Oleh karena itu, pemerintah Morowali Utara siap mendukung Major Project Stunting dan mengikuti SE Mendagri No. 440/2701/SJ Ttg Program Bangga Kencana dan Program Percepatan Penurunan Stunting yang ditujukan kepada seluruh Gubernur dan Bupati se-Indonesia. Selain itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah merampungkan penyusun Rencana RAD-TPB dengan ditunjang oleh Kabupaten/Kota.

Gambar. 12
Keterkaiatan Isu-Isu startegis International, Nasional, Sulawesi Tengah dan Kabupaten Morowali Utara



1.4. ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Terdiri dari Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat DPRD,

Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah serta Kecamatan. Adapun susunannya sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah Kabupaten terdiri dari 3 (tiga) Asisten dan 9 (sembilan) Bagian. Berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 55 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 37 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara. Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara terdiri dari:

1) Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat, Membawahi 3 (tiga) bagian:
   - Bagian Pemerintahan;
   - Bagian Kesejahteraan Rakyat;
   - Bagian Hukum;
2) Asisten Administrasi Perekonomian Dan Pembangunan, Membawahi 3 (tiga) bagian:
   - Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam;
   - Bagian Administrasi Pembangunan;
   - Bagian Pengadaan Barang/Jasa;
3) Asisten Administrasi Umum. Asisten Administrasi Umum, membawahi 3 (tiga) bagian:
   - Bagian Umum
   - Bagian Organisasi
   - Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan;

2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 55 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 37 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara. Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu:

- Bagian Umum dan Perlengkapan
- Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan
- Bagian Keuangan

3. Inspektorat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 55 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 37 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara. Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara membawahi 3 (tiga) Inspektur Pembantu yaitu:

- Inspektur Pembantu Wilayah I
- Inspektur Pembantu Wilayah II
- Inspektur Pembantu Wilayah III
- Inspektur Pembantu Wilayah IV

4. Dinas—Dinas Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 39 Tahun 2018 tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Dinas Daerah. Dinas Daerah terdiri dari:

a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah;
b. Dinas Kesehatan Daerah;

c. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Daerah;
d. Dinas Perhubungan Daerah;
e. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
f. Dinas Sosial Daerah;
g. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah;
h. Dinas Pertanian Dan Pangan Daerah;
i. Dinas Lingkungan Hidup Daerah;
j. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Daerah;
k. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Daerah;
l. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah;
m. Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah;
n. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
o. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Daerah;
p. Dinas Perpustakaan Daerah;
q. Dinas Perikanan Daerah;
r. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Daerah;

5. Badan Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 40 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah. Dinas Daerah terdiri dari:

- Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah;
- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
- Badan Pendapatan Daerah;
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah;

6. Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 38 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Kecamatan. Kecamatan terdiri dari:Kecamatan di Kabupaten Morowali Utara, terdiri atas:

1. Kecamatan Petasia;
2. Kecamatan Lembo;
3. Kecamatan Mori Atas;
4. Kecamatan Bungku Utara;
5. Kecamatan Soyo Jaya;
6. Kecamatan Mamosalato;
7. Kecamatan Mori Utara;
8. Kecamatan Lembo Raya;
9. Kecamatan Petasia Timur;
10. Kecamatan Petasia Barat;

7. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Sistem Pengelolaan Air Minum, serta Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale, terdiri atas:

a. Puskesmas Pandauke (Kecamatan Mamosalato)
b. Puskesmas Potowe Indo (Kecamatan Mamoslato)
c. Puskesmas Baturube (Kecamatan Bungku Utara)
d. Puskesmas Wongko Ndaya (Kecamatan Bungku Utara)
e. Puskesmas Tambayoli (Kecamatan Soyo Jaya)
f. Puskesmas Panca Makmur (Kecamatan Soyo Jaya)
g. Puskesmas Kolonodale (Kecamatan Petasia)
h. Puskesmas Molino (Kecamatan Petasia Timur)
i. Puskesmas Anuntoluwu (Kecamatan Petasia Barat)
j. Puskesmas Peratoa Petumbea (Kecamatan Lembo Raya)
k. Puskesmas Beteleme (Kecamatan Lembo)
l. Puskesmas Tomata (Kecamatan Mori Atas)
m. Puskesmas Le’e (Kecamatan Mori Atas)
n. Pukesmas Mayumba (Kecamatan Mori Utara)
o. UPT SPAM
p. Rumah Sakit Umum Daerah

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. VISI DAN MISI PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang ada di Kabupaten Morowali Utara, agar lebih terarah dan berhasil guna serta berdaya saing, dengan mempertimbangkan potensi daerah, tantangan maupun ancaman di masa mendatang maka Pemerintah Kabupaten Morowali Utara bersama–sama dengan masyarakat telah menetapkan visi, misi, dan strategi dalam mencapai harapan yang ingin diwujudkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021–2026. ini menegaskan semangat, tekad yang kuat dan bulat, cita-cita dan harapan rakyat Morowali Utara dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang sehat, cerdas dan sejahtera sebagai dasar perumusan visi dan misi Morowali Utara 2021-2026. Hal ini juga menjelaskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, skenario pembangunan, dan prioritas daerah lima tahun kedepan sebagai acuan dalam perumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan. Adapun penjelasan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Morowali Utara sebagai berikut:

a. Visi

Perumusan visi Kabupaten Morowali Utara Periode 2021-2026 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Morowali Utara Periode 2005-2025, khususnya pada tahapan pembangunan jangka panjang. Tahapan pembangunan jangka panjang merupakan penjabaran dari misi dan sasaran pembangunan. Tahapan ini menunjukkan langkah langkah perlima tahunan yang hendak dilaksanakan oieh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam rangka mencapai "Kabupaten Morowali Utara yang Maju, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berkelanjutan". Tahapan dan prioritas yang ditetapkan merupakan cerminan dari tingkat urgensi penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pengaturan waktu dan penggangaran. Penekanan prioritas dalam setiap tahapan berdasarkan kebutuhan daerah, namun tetap harus berkesinambungan dari satu periode keperiode berikutnya dalam rangka mencapai sasaran pokok dan perwujudan isi pembangunan jangka panjang daerah. RPJMD Kabupaten Morowali Utara Periode 2021-2026 merupakan tahap terakhir dalam pentahapan pembangunan dalam RPJPD 2005-2025,dimana telah dijabarkan sesuai dengan periode masa jabatan kepala daerah, yaitu setiap 5 tahun. Terdapat 4 tahapan pembangunan yang harus disusun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagaimana disajikan dalam gambar 13 sebagai berikut.

Gambar. 13
Tahapan dan Prioritas Pembagunan
RPJPD Kabupaten Morowali Utara tahun 2005-2025



Agar memiliki arah dan fokus yang jelas, pembangunan jangka panjang di Kabupaten Morowali Utara maka dirumuskan tema pembangunan dimasing-masing tahapan pembangunan. Perumusan tema pembangunan sesuai prioritas dan arah kebijakan pembangunan disajikan dalam Gambar 14 sebagai berikut. Adapun Tema Pembangunan Lima Tahun Ke-4 (2021-2025) adalah "Mempertahankan Pelayanan Publik, Sumberdaya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing, Serta Memperkokoh Infrastruktur Strategis Daerah dan Membangun Struktur Ekonomi Daerah yang Kokoh" Tema tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Morowali Utara periode 2021-2026 yang kemudian disinergikan dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih tahun 2021-2026 yang memiliki tekad dan semangat yang sejalan dengan arahan pembangunan jangka panjang daerah.

Gambar. 14
Tema Pembagunan
RPJPD Kabupaten Morowali Utara tahun 2005-2025



Sejalan dengan semangat, tekad dan janji politik Bupati dan Wakil Bupati terpilih tahun 2021-2026, visi pembangunan Kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026 adalah

"TERWUJUDNYA KABUPATEN MOROWALI UTARA
YANG SEHAT, CERDAS, DAN SEJAHTERA"

Visi tersebut mempunyai makna bahwa Pemerintah Morowali Utara mempunyai tekad, semangat, kesungguhan dan komitmen untuk menjalankan mandat dan kewenangan dalam mendorong perubahan (transformasi) dan percepatan (akselerasi) pembangunan agar seluruh masyarakat Morowali Utara berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan biaya yang terjangkau karena tersedianya pelayanan kesehatan secara berjenjang ditiap desa dan kecamatan. Disamping itu perubahan juga didorong kearah tercapainya delapan Standar Nasional Pendidikan yang meliputi standar-standar kompetensi lulusan, isi, proses, pengelolaan, penilaian, sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, dan pembiayaan. Akhirnya, meningkatnya derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat Morowali Utara diharapkan mewujud dalam kemampuan masyarakat mengelola sumber daya alam setempat untuk menciptakan kesejahteraan yang lebih baik.

Tabel. 15
Sinergi Visi RPJMN 2020-2024, RPJMD 2021-2026 Provinsi Sulawesi Tengah, RPJPD 2005-2025 dan RPJMD 2021-2026 Kabupaten Morowali Utara

Visi RPJMN 2020-2024	RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026	RPJPD Kabupaten Morowali Utara 2005-2025	RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026
Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong	Gerak Cepat Menuju Suawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju	Terwujudnya Kabupaten Morowali Utara yang Maju, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berkelanjutan	Terwujudnya Kabupaten Morowali Utara yang Sehat, Cerdas, dan Sejahtera

Penjelasan rinci dari visi tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel. 16
Penjelasan Visi Kabupaten Morowali Utara 2021-2026

Pernyataan Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
Terwujudnya Kabupaten Morowali Utara yang Sehat, Cerdas, dan Sejahtera	Sehat	Suatu kondisi kehidupan masyarakat Morowali Utara yang ditandai oleh perbaikan derajat kesehatan masyarakat yang didukung oleh jaminan pelayanan kesehatan dengan biaya yang terjangkau dan tersedia secara berjenjang di desa dan kecamatan.
	Cerdas	Suatu kondisi kehidupan masyarakat Morowali Utara yang dicirikan oleh peningkatan derajat pendidikan masyarakat yang terwujud dalam penerapan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan. Kedelapan standar pendidikan tersebut meliputi: (1) Standar Kompetensi Lulusan yang berfokus pada prestasi lulusan peserta didik; (2) Standar Isi yang berfokus pada kualitas kurikulum sekolah; (3) Standar Proses yang berfokus pada Tindakan/aksi pengelolaan atau manajerial sekolah; (4) Standar Pengelolaan yang berfokus pada manajemen sekolah; (5) Standar Penilaian yang berfokus pada hasil yang dicapai peserta didik

		danpengelolapendidikan; (6) Standar Sarana dan Prasarana yang berfokus pada pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan; (7) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berfokus pada pemenuhan dan pemerataan ketersediaan guru, kepala sekolah, dan tenaga administrasi sekolah yang layak; dan (8) Standar Pembiayaan yang berfokus pada pemenuhan pembiayaan proses belajar mengajar. Serta didukung dengan pendidikan karakter.
	Sejahtera	Satu kondisi kehidupan masyarakat Kabupaten Morowali Utara yang ditandai oleh meningkatnya kemampuan masyarakat lokal dalam mengelola sumber daya alam setempat, perbaikan taraf hidup rakyat secara terus menerus; terpenuhinya hak-hak dasar rakyat terutama pangan dan gizi, pendidikan, kesehatan, air bersih, pendidikan, perumahan, dan pekerjaan; berkembangnya nilai-nilai agama, etika dan moral, serta nilai nilai keutamaan sosial budaya; terwujudnya kehidupan yang rukun, damai, nyaman, penuh toleransi, harmonis, dan bebas dari segala bentuk gangguan, konflik dan tindak kejahatan; serta terbangunnya kesetaraan, kemitraan, toleransi, gotong royong dan tanpa diskriminasi dalam pengelolaan sumber daya, pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

b. Misi

Untuk mendukung perwujudan visi pembangunan daerah tahun 2021-2026, maka misi pembangunan Kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

(1) Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan

biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata;

(2) Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing;

(3) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah;

(4) Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah;

(5) Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tatakelola pemerintahan yang baik.

Gambar .15
Visi, Misi dan Fokus Misi Pembangunan
Kabupaten Morowali 2021-2026



Penjabaran misi pembangunan Kabupaten Morowali Utara 2021-2026 adalah sebagai berikut:

(1) Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata. Misi ini dimaksudkan untuk:
   a. meningkatkan ketersediaan prasarana kesehatan secara merata disemua kecamatan.
   b. memastikan ketersediaan tenaga kesehatan secara merata di semua kecamatan.
   c. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar dengan biaya yang terjangkau.
   d. memenuhi standar pelayanan minimal dibidang kesehatan.

(2) Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Misi ini dimaksudkan untuk :
   a. menjamin ketersediaan prasarana dan sarana pendidikan dasar di semua desa.
   b. Mendorong peningkatan ketersediaan prasarana dan sarana pendidikan menengah dan vokasional di semua kecamatan.
   c. Meningkatkan standar kualitas dan kompetensi guru dan tenaga kependidikan lainnya.
   d. Meningkatkan tingkat partisipasi sekolah penduduk usia sekolah khususnya di tingkat pendidikan dasar dan menengah.

(3) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah. Misi ini dimaksudkan untuk:

a. Meningkatkan akses masyarakat lokal pada pengelolaan potensi sumber daya alam setempat khususnya di sektor perkebunan dan pertambangan.
b. Memberdayakan pelaku usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi khususnya dalam memanfaatkan teknologi informasi.
c. Meningkatkan kapasitas petani dan nelayan khususnya dalam mendapatkan sarana produksi, mengakses permodalan, memperluas akses pasar, dan jaminan perlindungan (asuransi) usaha pertanian/perikanan.

(4) Meningkatkan iklim dan ekosistem usaha yang kondusif dengan pelayanan investasi yang sederhana dan transparan. Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah. Misi ini dimaksudkan untuk:
a. meningkatkan ketersediaan prasarana jalan dan perhubungan yang handal.
b. meningkatkan pembangunan prasarana dasar untuk memperbaiki aksesibilitas desa-desa khususnya sentra produksi pertanian dan desa terisolir.
c. meningkatkan kehandalan prasarana transportasi wilayah.
d. meningkatkan integrasi antar moda transportasi wilayah darat, laut/air, dan udara khususnya dipusat-pusat kegiatan lokal.
e. meningkatkan penetrasi telekomunikasi dan digital.

(5) Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik. Misi ini dimaksudkan untuk :
a. meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah dan desa.
b. menata organisasi dan kelembagaan pemerintahan daerah yang sesuai dengan karakter dan potensi wilayah.
c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya pembangunan, baik APBD, dana desa, maupun sumber daya bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi.
d. meningkatkan kolaborasi dan jejaring mitra pembangunan (*pentahelix*): pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media masa.
e. meningkatkan kerjasama pembangunan antar daerah khususnya dengan daerah-daerah tetangga dalam pengelolaan sumber daya alam (Daerah Aliran Sungai) dan peningkatan daya saing wilayah secara umum.

Gambar. 16
Kerangka pikir Visi-Misi Pembangunan
Kabupaten Morowali 2021-2026



Keterkaitan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Morowali Utara Periode 2021-2026, disajikan pada Tabel 17, sebagai berikut:

Tabel 17
Keterkaitan Visi dan Misi Kabupaten Morowali Utara
2021-2026

Visi	Misi
Terwujudnya Kabupaten Morowali Utara yang Sehat, Cerdas, dan Sejahtera	1. Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata.
	2. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.
	3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah
	4. Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah
	5. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.

RPJMD Kabupaten Morowali Utara Periode 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah seyogyanya menjadi bagian dari pencapaian Misi yang menjadi penjabaran dari Visi RPJPD Kabupaten Morowali Utara Periode 2005-2025 yaitu "Kabupaten Morowali Utara yang Maju, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berkelanjutan", sehingga terjadi keselarasan misi antara perencanaan pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah yang tertuang dalam RPJMD dengan misi yang tertuang dalam RPJPD Periode 2005-2025.

Berikut ini adalah prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan dalam tahap ke-4 RPJPD atau lima tahun kedua pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Morowali Utara.

a. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan berkualitas;
b. Peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas, dan kompetensi sumber daya aparatur;
c. Peningkatan Infrastruktur;
d. Tertatanya Sarana dan Prasarana pelabuhan laut sebagai gerbang ekonomi maritim;
e. Peningkatan pelayanan publik yang berkualitas dan optimal;
f. Peningkatan daya saing dan peningkatan investasi daerah;
g. Pembangunan inklusif dan lingkungan berkelanjutan.

Sementara sasaran pokok RPJPD Kabupaten Morowali Utara Tahap 4 (2021-2025) adalah sebagai berikut :

a. Terwujudnya penyelenggaran pelayanan publik yang berkualitas;
b. Terbentuknya sistem organisasi dan tatakerja yang efektif dan efisien;

c. Terwujudnya pengelolaan pemerintahan dari kabupaten sampai desa yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien;
d. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia aparatur pemerintah;
e. Meningkat daya saing daerah;
f. Meningkatnya investasi daerah;
g. Pembangunan inklusif yang merata;
h. Terwujudnya demokrasi yang berkualitas dan supremasi hukum;
i. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah;
j. Meningkatnya kemampuan dan kemandirian pengelolaan keuangan daerah;
k. Tersedianya akses informasi dan komunikasi;
l. Pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, dan pembangunan sarana prasarana desa, serta pemberdayaan masyarakat desa;
m. Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja;
n. Terwujudnya kelestarian lingkungan dan alam;
o. Terwujudnya pemanfaatan ruang yang lestari dan bijaksana;
p. Terwujudnya masyarakat yang tanggap dan tangguh terhadap bencana.

Keterkaitan misi RPJPD Kabupaten Morowali Utara Periode 2005-2025 dengan RPJMD Kabupaten Morowali Utara Periode 2021-2026 disajikan pada Tabel 5.4, sebagai berikut:

Tabel 18
Keterkaitan Misi RPJPD Kabupaten Morowali Utara Periode 2005-2025 dan RPJMD Kabupaten Morowali Utara Periode 2021-2026

Misi RPJPD Kabupaten Morowali Utara Periode 2005-2025	**Misi RPJMD Kabupaten Morowali Utara Periode 2021-2026**
Misi 1:*Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa dan demokratis (good governance),*	Misi 5. *Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.*
Misi 2: *Mewujudkan pelayanan publik (publicservices) yang merata, terjangkau dan berkualitas*	Misi 5. *Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.*
Misi 3: *Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (human resources), produktivitas daerah (regional productivity) dan iklim investasi (investment climate)*	Misi 1. *Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata.* Misi 2. *Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.*
Misi 4: *Meningkatkan ketersediaan infrastruktur daerah yang baik dan memadai,*	Misi 4. *Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah*
Misi 5: *Mewujudkan ketahanan pangan masyarakat dan pengentasan kemiskinan*	Misi 3. *Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh*

	kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah
Misi 6: *Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam(natural resources) dan lingkungan yang berkelanjutan*	Misi 3. *Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah*

Sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (SPN) Pasal 5 ayat (2), maka dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Morowali Utara Periode 2021-2026, di samping berpedoman pada RPJP Daerah Kabupaten Morowali Utara Periode 2005-2025, maka perlu pula memperhatikan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026 dan RPJM Nasional 2020-2024, sehingga penjabaran program yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Morowali Utara menjadi bagian integral dari program provinsi dan nasional. Dengan demikian, maka misi yang diemban oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara yang tertuang dalam RPJMD harus memiliki keselarasan dengan misi yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024 sebagai arah dan kebijakan pembangunan yang selaras, sebagaimana disajikan pada Tabel 17 dan Tabel 18 sebagai berikut:

Tabel. 19
Keterkaitan Misi Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2021-2026
dan Misi Kabupaten Morowali Utara Periode 2021-2026

Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2021-2026	**Misi RPJMD Kabupaten Morowali Utara Periode 2021-2026**
Misi 1. *Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar.*	Misi 1. *Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata.* Misi 2. *Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.*
Misi 2. *Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai kemanusiaan dan HAM.*	Misi 5. *Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.*
Misi 3. *Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan*	Misi 3. *Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah*
Misi 4. *Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah.*	Misi 4. *Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan*

	wilayah
Misi 5*. Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan.*	Misi 4. *Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah*
Misi 6. *Menjaga harmonisasi manusia dan alam, antar sesama manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan.*	Misi 3. *Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah*
Misi 7. *Melakukan Sinergitas Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Bertetangga Sekawasan maupun di dalam Provinsi Sulawesi Tengah dan di luar Provinsi bertetangga.*	Misi 5. *Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.*
Misi 8*. Meningkatkan Pelayanan Publik bidang pendidikan dan kesehatan berbasis pada Teknologi Informasi yang integrasi dan dijalankan secara sistimatis dan digital.*	Misi 1. *Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata.* Misi 2. *Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.*
Misi 9. *Mendorong pembentukan daerah otonom baru (DOB) agar terjadi percepatan desentralisasi pelayanan dan peningkatan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah.*	Misi 5. *Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.*

Tabel. 20
Keterkaitan Misi RPJMN Periode 2020-2024 dan Misi Kabupaten Morowali Utara Periode 2021-2026

Misi RPJMN 2020-2024	**Misi RPJMD Kabupaten Morowali Utara Periode 2021-2026**
Misi 1. *Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia*	Misi 1. *Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata.* Misi 2. *Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.*
Misi 2. *Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing.*	Misi 3. *Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah*
Misi 3. *Pembangunan yang Merata*	Misi 4. *Meningkatkan ketersediaan*

dan Berkeadilan	*dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah*
Misi 4*. Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah.*	Misi 4. *Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah*
Misi 5*. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa*	Misi 2. *Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.*
Misi 6. *Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya*	Misi 5. *Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.*
Misi 7. *Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Ama pada Seluruh Warga.*	Misi 5. *Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.*
Misi 8*. Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya.*	Misi 5. *Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.*
Misi 9. *Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan*	Misi 5. *Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.*

Berdasarkan visi dan misi pembangunan Morowali Utara 2021-2026, maka keterkaitan antara agenda pembangunan nasional RPJMN 2020-2024, dan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dengan tujuan dan sasaran pembangunan dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut.

(1) Misi Kesatu: Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata mendukung terwujudnya Agenda Pembangunan Nasional ketiga dari RPJMN 2020-2024, serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ketiga, kelima, keenam, dan kesepuluh;
(2) Misi Kedua: Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing; akan mendukung terwujudnya Agenda Pembangunan Nasional ketiga dari RPJMN 2020-2024, serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang keempat, kelima, dan kesepuluh;
(3) Misi Ketiga: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah akan mendukung terwujudnya Agenda Pembangunan Nasional Nawacita kesatu dan kedua dari RPJMN 2020-2024, serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang kesatu, kedua, ketiga, kedelapan, kesembilan, dan kesepuluh;
(4) Misi Keempat: Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah akan mendukung terwujudnya Agenda Pembangunan Nasional kelima dari RPJMN 2020-2024, serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang keenam, kesepuluh, dan kesebelas;

(5) Misi Kelima: Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik akan mendukung terwujudnya Agenda Pembangunan Nasional keempat dan ketujuh dari RPJMN 2020-2024, serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang kesatu, ketiga, keempat, kesepuluh dan kesebelas;

2.2. KESELARASAN KINERJA

Untuk mewujudkan keselarasan kinerja RPJMD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 denga kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, maka disusun matriks keselarsan kinerja untuk menjamin bahwa terdapat keterkaitan pencpaian kinerja Perangkat Daerah dengan kinerja Kepala Daerah.

- Keselarasan Kinerja Misi-1

Misi I	Meningkatkan Aksesibilitas (keterjangkauan fisik), Afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan Mutu Pelayanan Kesehatan Secara Merata	
	Tujuan	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
	Sasaran 1	Meningkatnya mutu layanan kesehatan masyarakat

- Keselarasan Kinerja Misi-2

Misi II	Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing	
	Tujuan 1	Meningkatkan Derajat Pendidikan Masyarakat
	Sasaran 1	Meningkatkan Jangkauan Layanan Pendidikan Dasar
	Tujuan 2	Meningkatkan peran Perempuan dalam Pembangunan menuju keadilan dan kesetaraan Gender
	Sasaran 2	Meningkatnya partisipasi perempuan
	Tujuan 3	Meningkatkan inovasi, Keterampilan dan produktivitas angkatan Kerja
	Sasaran 3	Meningkatnya peluang lapangan kerja
	Sasaran 4	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah

- Keselaarasan Kinerja Misi-3

Misi III	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah	
	Tujuan 1	Mewujudkan ekonomi daerah yang berdaya saing
	Sasaran 1	Meningkatkan Jangkauan Layanan Pendidikan Dasar
	Sasaran 2	Meningkatnya kemudahan berinvestasi Rata-rata Pertumbuhan Nilai Investasi (PMA+PMDN)
	Tujuan 2	Mewujudkan pembangunan desa yang berkualitas
	Sasaran 3	Meningkatnya kemandirian desa
	Tujuan 3	Memantapkan pengelolaan sumberdaya alam

	lingkungan secara berkelanjutan	
	Sasaran 4	Terjaganya fungsi dan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan
Tujuan 4	Mewujudkan kondisi yang tertib, aman, dan demokratis	
	Sasaran 5	Meningkatnya keamanan dan ketertiban wilayah

- Keselaarasan Kinerja Misi-4

Misi IV	Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah	
	Tujuan 1	Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur daerah
	Sasaran 1	Meningkatnya kualitas Infrastuktur Daerah
	Sasaran 2	Meningkatnya Konektivitas Wilayah

- Keselaarasan Kinerja Misi-5

Misi V	Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggara an pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik	
	Tujuan 1	Meningkatkan kinerja pelayanan Publik
	Sasaran 1	Terwujudnya pemerintahan yang efisien dan efektif

2.3. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

a. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara 2021-2026, serta memperhatikan agenda pembangunan nasional RPJMN 2020-2024, RPJMD Sulawesi Tengah 2021-2026, dan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), maka tujuan dan sasaran pembangunan dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut.

1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Makro Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran makro daerah dilakukan dengan memperhitungkan skenario pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026 dan Kabupaten Morowali Utara 2021-2026 yang menekankan perubahan (transformasi) dan percepatan (akselerasi) pertumbuhan ekonomi secara berkualitas dengan fokus pada pengembangan rantai nilai ekonomi berbasis sumber daya lokal, penyiapan sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan; pembangunan infrastruktur strategis, pemerataan pembangunan antar wilayah; pengembangan kawasan ekonomi dan kawasan strategis; serta percepatan kemajuan daerah perdesaan.

Berdasarkan perkembangan kinerja pembangunan daerah Morowali Utara selama 2016-2020, pembangunan ekonomi daerah disusun dengan skenario optimis yang didukung dengan pembenahan sistem dan manajemen perencanaan, penganggaran, pengadaaan, pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi kebijakan dan program

pembangunan; pengembangan daya saing daerah, serta peningkatan kerjasama investasi.

Penyusunan skenario pembangunan ekonomi Kabupaten Morowali Utara 2021-2026 dilakukan dengan memperhitungkan asumsi dasar sebagai berikut:

(1) Laju pertumbuhan penduduk diperkirakan rata-rata sebesar 1,5 persen pada tahun 2021-2026;
(2) Laju pertumbuhan angkatan kerja diperkirakan rata-rata sebesar 1,5 persen pada tahun 2021-2026;
(3) Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan pulih dan meningkat dari minus 0,2 persen pada tahun 2020 menjadi 8,8 persen pada tahun 2026;
(4) Tingkat pengangguran terbuka akan menurun dari 5,2 persen pada tahun 2020 menjadi 4,3 persen pada tahun 2026;
(5) Tingkat kemiskinan akan menurun 14,1 persen pada tahun 2020 menjadi 8,5 persen pada tahun 2026;
(6) Nilai IPM akan meningkat dari 68,5 pada tahun 2019 menjadi 72,6 pada tahun 2026.
(7) Rasio Gini akan stabil di angka 0,30 pada tahun 2019 menjadi 0,30 pada tahun 2026.

Tabel. 21
Tujuan dan Sasaran Makro Daerah Kabupaten Morowali Utara
Tahun 2021-2026

Indikator	**Satuan**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
1. Jumlah penduduk	*000 jiwa*	*122,7*	*124,5*	*126,4*	*128,3*	*130,2*	*132,2*	*134,2*
2. Pertumbuhan Penduduk	*%*	*1,5*	*1,5*	*1,5*	*1,5*	*1,5*	*1,5*	*1,5*
3. Pertumbuhan Ekonomi	*%*	*-0,2*	*5,0*	*6,8*	*7,2*	*7,7*	*8,2*	*8,8*
4. Pertumbuhan PDRB perkapita	*%*	*-1,7*	*3,5*	*5,3*	*5,7*	*6,2*	*6,7*	*7,2*
5. Jumlah Angkatan Kerja	*jiwa*	*67436*	*68447*	*69474*	*70516*	*71574*	*72647*	*73737*
6. Pertumbuhan Angkatan	%	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
7. Jumlah Penduduk Bekerja	Jiwa	63959	65005	66139	67202	68353	69451	70566
8. Jumlah Pengangguran	jiwa	3507	3422	3335	3314	3221	3196	3171
9. Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,2	5,0	4,8	4,7	4,5	4,4	4,3
10. Jumlah penduduk Miskin	000 jiwa	18,38	14,94	14,41	13,47	12,63	11,90	11,41
11. Tingkat Kemiskinan	%	14,1	12,0	11,4	10,5	9,7	9,0	8,5
12. Indeks Pembangunan Manusia	indeks	68,5	69,0	69,7	70,4	71,1	71,8	72,6
13. Rasio Gini	indeks	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

2. Tujuan dan Sasaran Misi Pembangunan

Sesuai dengan Visi dan Misi yang ingin dicapai dalam pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Morowali Utara selama Periode 2021-2026, maka dirumuskan Tujuan dan Sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah yang telah direviu pada bulan Agustus Tahun 2022 oleh Tim SAKIP Kabupaten berdasarkan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan telah dituangkan dalan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 29 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2022-2026 sebagai berikut:

a. Tujuan

Misi 1 : Meningkatkan Aksesibilitas (Keterjangkauan Fisik), Afordabilitas (Keterjangkauan Biaya), Dan Mutu Pelayanan Kesehatan Secara Merata.

Tujuan 1 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dengan Indikator Kinerja sebagai berikut :

- Angka Harapan Hidup.

Misi 2 : Meningkatkan Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan Untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing.

Tujuan 1 : Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat, dengan Indikator Kinerja sebagai berikut:

- Indeks Pendidikan.

Tujuan 2 : Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunanpembangunan menuju keadilan dan kesetaraan gender, dengan Indikator Knerja sebagai berikut:

- ndeks Pembangunan Gender.

Tujuan 3 : Meningkatkan inovasi, keterampilan dan produktivitas angkatan kerja, dengan Indikator Kinerja, dengan Indikator Knerja sebagai berikut:

- Tingkat pengganguran terbuka.
- Indeks Inovasi Daerah.

Misi 3 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Yang Ditopang oleh Kapasitas Masyarakat Mengelola Potensi Wilayah.

Tujuan 1 : Mewujudkan ekonomi daerah yang berdaya saing, dengan Indikator Knerja sebagai berikut:

- PDRB.
- Laju Pertumbuhan Ekonomi.

Tujuan 2 : Mewujudkan pembangunan desa yang berkualitas, dengan Indikator Knerja sebagai berikut:

- Indeks Desa Membangun.

Tujuan 3 : Memantapkan pengelolaan sumberdaya alam lingkungan secara berkelanjutan, dengan Indikator Knerja sebagai berikut:

- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Tujuan 4 : Mewujudkan kondisi yang tertib, aman, dan demokratis, dengan Indikator Knerja sebagai berikut:

- Indeks Rasa Aman.

Misi 4 : Meningkatkan Ketersediaan dan Kehandalan Infrastruktur Wilayah Untuk Menunjang Konektivitas dan Pemerataan Wilayah

Tujuan 1 : Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur daerah, dengan indikator kinerja sebagai berikut:

- Indeks Infrastruktur Daerah.

Misi 5 : Meningkatkan Profesionalisme dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Tujuan 1 : Meningkatkan kinerja pelayanan publik, dengan Indikator Knerja sebagai berikut:

- Indeks Reformasi Birokrasi.

b. Sasaran

Misi 1 : Meningkatkan Aksesibilitas (Keterjangkauan Fisik), Afordabilitas (Keterjangkauan Biaya),dan Mutu Pelayanan Kesehatan Secara Merata.

Sasaran 1 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dengan Kinerja sebagai berikut :

- Angka Harapan Hidup.

Misi 2 : **Meningkatkan Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan Untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing.**

Sasaran 1 : Meningkatkan jangkauan layanan, Pendidikan dasar, dengan Indikator Kinerja sebagai berikut:

- Harapan Lama Sekolah (Tahun).
- Rata-rata Lama Sekolah (Tahun).

Sasaran 2 : Meningkatnya partisipasi perempuan, dengan Indikator sebagai berikut:

- Indeks Pembangunan Gender.

Sasaran 3 : Meningkatnya peluang lapangan kerja, dengan Indikator Knerja sebagai berikut:

- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas Inovasi daerah, dengan Indikator Knerja sebagai berikut:

- ndeks Inovasi Daerah;

Misi 3 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat yang Ditopang oleh Kapasitas Masyarakat Mengelola Potensi Wilayah.

Sasaran 1 : Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor strategis daerah, dengan Indikator Knerja sebagai berikut:

- PDRB Perkapita.

Sasaran 2 : Meningkatnya kemudahan berinvestasi Rata-rata Pertumbuhan Nilai Investasi (PMA+PMDN), dengan Indikator Knerja sebagai berikut:

- Nilai Pertumbuhan Investasi (PMA + PMDN).

Sasaran 3 : Meningkatnya kemandirian desa, dengan Indikator Knerja sebagai berikut:

- Indeks Desa Membangun.

Sasaran 4 : Terjaganya fungsi dan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan, dengan Indikator Knerja sebagai berikut:

- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Sasaran 5 : Meningkatnya keamanan dan ketertiban wilayah, dengan Indikator Knerja sebagai berikut:

- Indeks Rasa Aman.

Misi 4 : Meningkatkan Ketersediaan dan Kehandalan Infrastruktur Wilayah Untuk Menunjang Konektivitas dan Pemerataan Wilayah.

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas Infrastuktur Daerah, dengan Indikator Knerja sebagai berikut:

- Indeks Infrastruktur Daerah.

Sasaran 2 : Meningkatnya Konektivitas Wilayah, dengan Indikator Kinerja sebagai berikut:

- Rasio Konektivitas Kabupaten.

Misi 5 : Meningkatkan Profesionalisme dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

Sasaran 1 : Terwujudnya Pemerintahan yang Efesien dan Efektif, dengan Indikator Kinerja sebagai berikut:

a. Predikat SAKIP;
b. Indeks RB;
c. Nilai LPPD;
d. Opini BPK.

Selanjutnya misi dan tujuan pembangunan tersebut dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran pembangunan dengan indikator beserta target pencapaiannya dalam lima tahun ke depan sebagaimana dalam Tabel Indikator Kinerja Utama.

2.4. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Sehingga pengukuran keberhasilan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Utara dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah periode tahun 2021-2026 tercermin dari capaian indikator kinerja utama yang ditetapkan.

Untuk penyusunan LAKIP pemerintah daerah tahun 2023 mengacu pada RPJMD Periode 2021-2026 yang telah dilakukan revisi atau perbaikan RPJMD pada bab V halaman 18 s/d 49 tabel 5.4 berisi visi misi tujuan dan sasaran jangka menengah kabupaten morowali utara tahun 2021-2026 sebagaimana yang telah dijelaskan diatas yaitu sebelum perbaikan sebanyak antara lain:

- misi bupati sebanyak : 5
- tujuan bupati sebanyak : 15
- sasaran strategis bupati sebanyak: 48
- indikator bupati sebanyak : 81

Setelah dilakukan perbaikan oleh tim sakip kabupaten dan 10 dinas klaster utama melalui bimtek sakip yang narasumber dari Kementerian PANRB pada tahun 2022 pada bulan agustus, maka tujuan, sasaran dan indikator tersebut dikurangi karena banyak indikator level eselon II yang dijadikan IKU Bupati. Hasil perbaikan tersebut dituangkan dalam Perbup No. 29 tahun 2022 tentang IKU Pemerintah Daerah Tahun 2022-2026. dengan jumlah perubahan sebagai berikut:

- misi bupati sebanyak : 5
- tujuan bupati sebanyak : 10
- indikator tujuan bupati sebanyak: 12

- sasaran strategis bupati sebanyak: 13
- indikator kinerja sasaran strategis Bupati sebanyak: 19

Berdasarkan perubahan tujuan dan sasaran RPJMD tersebut berdampak pada perubahan IKU eselon II atau kepala Perangkat Daerah yang dijadikan rujukan dalam menyusun Renstra dengan mengemban visi dan misi pemerintah daerah yaitu ***"Terwujudnya Masyarakat Morowali Utara yang Sehat, Cerdas, Sejahtera"*.** Laporan kinerja ini merupakan laporan kinerja Pemerintah Daerah akhir RPJMD Periode 2021-2026.

Guna mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditetapkan, maka ditentukan Indikator Kinerja Utama dengan mengacu pada perubahan tujuan dan sasaran sebagaimana perubahan diatas sebagai sebuah indikator makro untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan di Kabupaten Morowali Utara. Dari 5 (lima) misi Bupati Morowali Utara terdapat 10 (sepuluh) tujuan dan 11 (sebelas) Indikator tujuan dengan 13 sasaran strategis dan 17 indikator kinerja sasaran yang telah dituangkan dalam **Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 29 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022-2026**. Untuk diketahui bahwa dalam penyusunan SAKIP/LAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2023 IKU Bupati Morowali Utara telah direvisi beberapa indikator tujuan dan indikator sasaran pada saat perbaikan SAKIP oleh Tim SAKIP Kabupaten Morwali Utara yang difasilitasi oleh BAPPEDA Provinsi Sulawesi Tengah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel: 22
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KAB. MOROWALI UTARA TAHUN 2022 – 2026

Misi 1 : Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata					
TUJUAN	**INDIKATOR TUJUAN**	**SASARAN STRATEGIS**	**INDIKATOR SASARAN STRATEGIS**	**KETERANGAN**	**PENANGGUNG JAWAB**
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Meningkatnya mutu layanan kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	Dinas Kesehatan Daerah
Misi 2 : Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing					
Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	Meningkatkan jangkauan layanan Pendidikan dasar	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah
			Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal secara rata-rata penduduk Morowali Utara yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah

Meningkatkan peran Perempuan dalam Pembangunan menuju keadilan dan kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Gender	Meningkatnya partisipasi perempuan	Indeks Pembangunan Gender	IPG=IPM perempuan/IPM laki-laki	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah.
Meningkatnya inovasi, Keterampilan dan produktivitas angkatan Kerja	Tingkat pengganguran terbuka	Meningkatnya peluang lapangan kerja	Tingkat pengganguran terbuka	Jumlah pengangguran terbuka usia angkatan kerja / Jumlah penduduk angkatan kerja x 100%	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Daerah
	Indeks Daya Saing Daerah	Meningkatnya kualitas Inovasi daerah	Indeks Inovasi daerah	i = 2 (2s x 1 + 2s x 2 + 2.5s x 3 + 3.5s x 4) Dimana: Sx1 = scor dimensi input Sx2 = scor dimensi proses Sx3 = scor dimensi output Sx4 = scor dimensi outcome	Bappelitbangda, dan Semua Perangkat Daerah
Misi 3 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah					
Mewujudkan ekonomi daerah yang berdaya saing	PDRB	Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor strategis daerah	PDRB Perkapita	Total PDRB Perkapita	Bappelitbangda
	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya kemudahan berinvestasi Rata-rata Pertumbuhan Nilai Investasi (PMA+PMDN)	Nilai Pertumbuhan Investasi (PMA + PMDN)	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
Mewujudkan pembangunan	Indeks Desa Membangun	Meningkatnya kemandirian desa	Indeks Desa Membangun	IDM =I/3(ISXIEXIL) Ket:	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

desa yang berkualitas				IS: Indeks Sosial IE: Indeks Ekonomi IL: Indeks Lingkungan	Daerah
Memantapkan pengelolaan sumberdaya alam lingkungan secara berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Terjaganya fungsi dan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	IKLH Kabupaten = (IKAX30%) + (IPUX30%) + (ITHX40%) IKLH: Indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten IKA: indeks kualitas air IPU: indeks kualitas udara ITH: indeks tutupan hutan	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
Mewujudkan kondisi yang tertib, aman, dan demokratis	Indeks Rasa Aman	Meningkatnya keamanan dan ketertiban wilayah	Indeks Rasa Aman	Survei indeks pembangunan masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah, Dan Kesbangpol Daerah
Misi 4: Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah					
Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur daerah	Indeks Infrastruktur Daerah	Meningkatnya kualitas Infrastuktur Daerah	Indeks Infrastruktur Daerah	[40% {50% (50% kualitas sarpras jalan & jembatan + 50% kualitas PJU)} + {40% (50% saluran pengairan + 50% drainase kondisi baik)} + (10% pemenuhan bangunan sesuai standar)] + [20% {50% pengurangan sampah +50% pengangkutan sampah }] + 30% level of service + [10% ({50% kampung tangguh bencana + 30% evakuasi korban bencana + 20% rehabilitasi	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah, Dinas Pertanian dan Pangan Daerah, Dinas Perhubungan Daerah, BPBD dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah.

				dan konstruksi} + {30% ketepatan waktu rekomendasi proteksi kebakaran + 30%edukasi proteksi kebakaran + 40% response time}) /2]	
		Meningkatnya Konektivitas Wilayah	Rasio Konektivitas Kabupaten	Rasio Konektivitas Kabupaten = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan) • IK1 (angkutan Jalan)= Jumlah trayek yang dilayani pada kabupaten x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten tersebut • IK2 (angkutan sungai, danau dan penyeberangan)= jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pada kabupaten tersebut x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah, Dan Dinas Perhubungan Daerah
Misi 5 : Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggara an pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik					
Meningkatkan kinerja pelayanan Publik	Indeks RB	Terwujudnya pemerintahan yang efisien dan efektif	Predikat SAKIP	Perhitungan Sesuai Hasil Survei dan Penilaian Kementerian PAN dan RB	Bagian Organisasi Sekretraiat Daerah, Inspektorat, Semua Perangkat Daerah
			Indeks RB	Perhitungan Sesuai Hasil Survei dan penilaian	Bagian Organisasi Sekretraiat Daerah,

				Kementerian PAN dan RB	Inspektorat, Semua Perangkat Daerah Delapan Area Perubahan
			Nilai LPPD	Perhitungan Sesuai Hasil Survei dan penilaian Kementerian PAN dan RB	Bagian Organisasi Sekretraiat Daerah, Inspektorat, Semua Perangkat Daerah
			Opini BPK	Opini BPK	BPKAD, Inspektorat Daerah, Semua Perangkat Daerah

2.5. CASCADING KINERJA

Dalam mewujudkan efektivitas dan efisiensi pencapaian kinerja pembangunan daerah, maka Kabupaten Morowali Utara menyusun Pohon Kinerja/Cascading Kinerja Daerah. Pohon Kinerja/Cascading tersebut tersusun dalam matriks keselarasan kinerja pembangunan daerah yang merupakan kinerja berjenjang dalam mencapai kinerja utama dengan memperhatikan aspek kausalitas/hubungan sebab akibat dan alignment/keselarasan. Dengan adanya cascading kinerja ini akan terwujud kinerja yang memadai dan sistematis dalam pencapaiannya.

Matriks Keselarasan Kinerja Pembangunan Daerah yang dituangkan dalam tiap misi Kabupaten Morowali Utara, adalah sebagai berikut :

Cascading Kinerja Misi 1 :

MISI 1
Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata

CASCADE KINERJA KESEHATAN

Tujuan	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat											
Indikator	Angka Harapan Hidup											
Sasaran	Meningkatnya Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat											
Indikator	Angka Harapan Hidup											
Sasaran PD	Meningkatnya Jangkauan Layanan Kesehatan											
Indikator	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Bersalin	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pelayanan Kesehatan Balita	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Pelayanan Kesehatan Orang Denag Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pelayanan Orang Dengan Risiko Terinveksi Virus Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus = H I V) .
	DINAS KESEHATAN DAERAH											

Pohon Kinerja/Cascading Kinerja Misi 2 :

MISI 2
Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing

CASCADE KINERJA PENDIDIKAN

Tujuan	Meningkatkan Derajat Pendidikan Masyarakat								
Indikator	Indeks Pendidikan								
Sasaran	Meningkatkan Jangkauan Layanan Pendidikan Dasar								
Indikator	Harapan Lama Sekolah (Tahun)								
	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)								
Sasaran PD	Meningkatkan Mutu Pendidikan Dasar		Meningkatnya Akses Pendidikan				Meningkatnya Kualitas Tenaga Pendidikan		Meningkanya Tingkat Pendidikan Masyarakat
Indikator	Angka Kelulusan SD/MI dan SMP/MTs	Angka Putus Sekolah	APK SD/MI	APK SMP/MTs	APM SD/MI	APM SMP/MTs	Presentase Guru yang Memiliki Sertifikasi	Presentase Guru Berkualifikasi S1	Presentase Peningkatan Masyarakat Usia Produktif yang Memiliki Gelar S1/S2
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH								

CASCADE KINERJA PEMBANGUNAN GENDER

Tujuan	Meningkatkan Peran Perempuan Dalam Pembangunan Menuju Keadilan dan Kesetaraan Gender					
Indikator	Indeks Pembangunan Gender					
Sasaran	Meningkatnya Partisipasi Perempuan					
Indikator	Indeks Pembangunan Gender					
Sasaran PD	Meningkatnya Partisipasi Perempuan					
Indikator	Proporsi Kasus Kekerasan Pada Anak dan Perempuan terhadap Jumlah Keluarga	Indeks Perlindungan Anak	Persentase ARG pada Belanja APBD	Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani Instansi terkait Kabupaten/Kota	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan, termaksut TTPO (Per 100.000 Penduduk Perempuan)	Pemakaian Persentase Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive
	DINAS P2KB					

CASCADE KINERJA INOVASI DAERAH DAN ANGKATAN KERJA

Tujuan	Meningkatnya Inovasi, Keterampilan dan Produktivitas Angkatan Kerja							
Indikator	Tingkat Pengganguran Terbuka (TPT)							
Sasaran	Meningkatnya Peluang Lapangan Kerja				Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah			
Indikator	Tingkat Pengganguran Terbuka (TPT)				Indeks Inovasi Daerah			
Sasaran PD	Meningkatnya Keterampilan, Kompetensi dan SDM Tenaga Kerja, Fresh Graduate dan Pengangguran Sesuai Potensi		Meningkatnya Penyelesaian Hubungan Industrial	Meningkatnya Pengembangan Infrastrukur Kawasan Transmigrasi	Meningkatnya Kualitas PerencanaanPembangunan Daerah		Meningkatnya Hasil Kelitbangan dan Inovasi Daerah yang Implementatif	
Indikator	Presentase Angkatan Kerja yang Memiliki Standar Kompetensi	Presentase Angkatan Kerja yang Ditempatkan	Jumlah Sengketa Hubungan Industrial Yang di Mediasi	Presentase Infrastruktur Kawasan Transmigrasi Yang Dikembangkan	Persentase Keselarasan Program Pembangunan Dalam RKPD Terhadap RPJMD	Persentase Renja Perangkat Daerah Berkualitas Baik	Indeks novasi Daerah	Persentase Hasil Kelitbangan yang Diimplementasikan
	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH				BAPPELITBANGDA			

Cascading Kinerja Misi 3 :

MISI 3
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah

CASCADE KINERJA EKONOMI

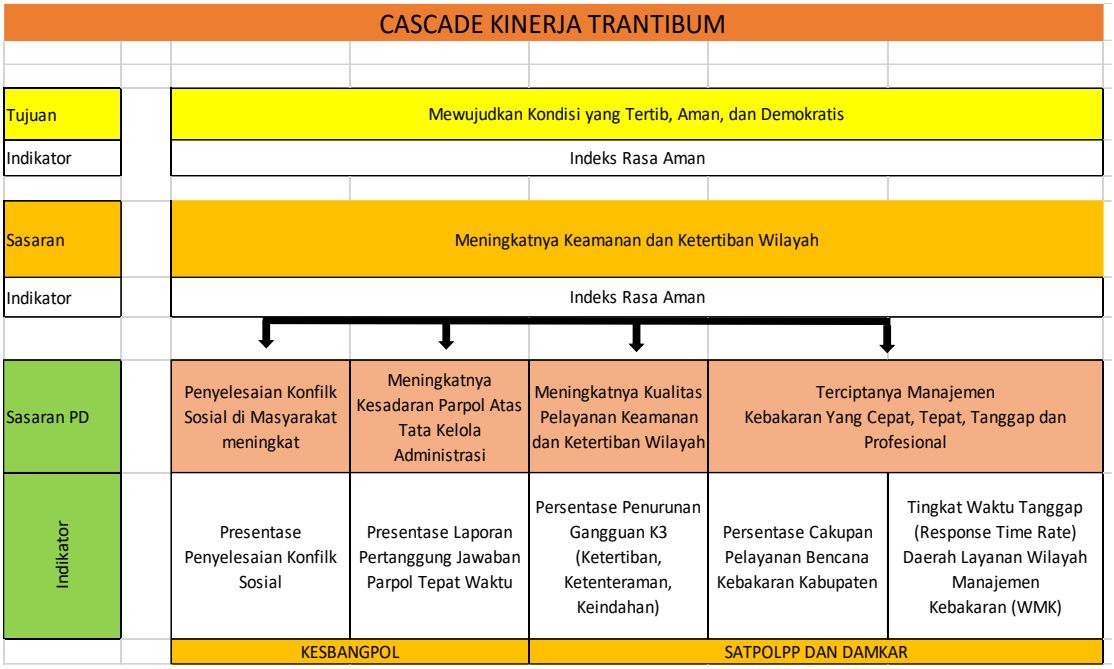
Tujuan	Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Berdaya Saing					
Indikator	PDRB					
	Laju Pertumbuhan Ekonomi					
Sasaran	Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Strategis Daerah				Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi Rata-rata Pertumbuhan Nilai Investasi (PMA+PMDN)	
Indikator	PDRB Perkapita				Nilai Pertumbuhan Investasi (PMA + PMDN)	
Sasaran PD	Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor industri Perdagangan	Meningkatnya Kunjungan Wisata	Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian	Meningkatnya Hasil Kelitbangan dan Inovasi Daerah yang Implementatif	Nilai Pertumbuhan Investasi (PMDN+PMA)	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Cepat,Mudah, Bermutu, adil dan Terjangkau
Indikator	Presentase Infrastruktur Kawasan Transmigrasi Yang Dikembangkan	Persentase Jumlah Wisatawan	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (tahun)	Persentase Hasil Kelitbangan yang Diimplementasikan	Nilai Investasi Swasta dan Masyarakat	Jumlah Izin yang dikeluarkan
	Dinas Koperasi	Dinas Pariwisata	Dinas Pertanian dan Pangan Daerah	BAPPELITBANGDA	DPMPTSP	

CASCADE KINERJA PEMBANGUNAN DESA

Tujuan	Mewujudkan Pembangunan Desa yang Berkualitas
Indikator	Indeks Desa Membangun
Sasaran	Meningkatnya Kemandirian Desa
Indikator	Indeks Desa Membangun
Sasaran PD	Meningkatnya Status Desa
Indikator	Jumlah Desa Tertinggal
	Jumlah Status Desa Maju
	Jumlah Status Desa Mandiri
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

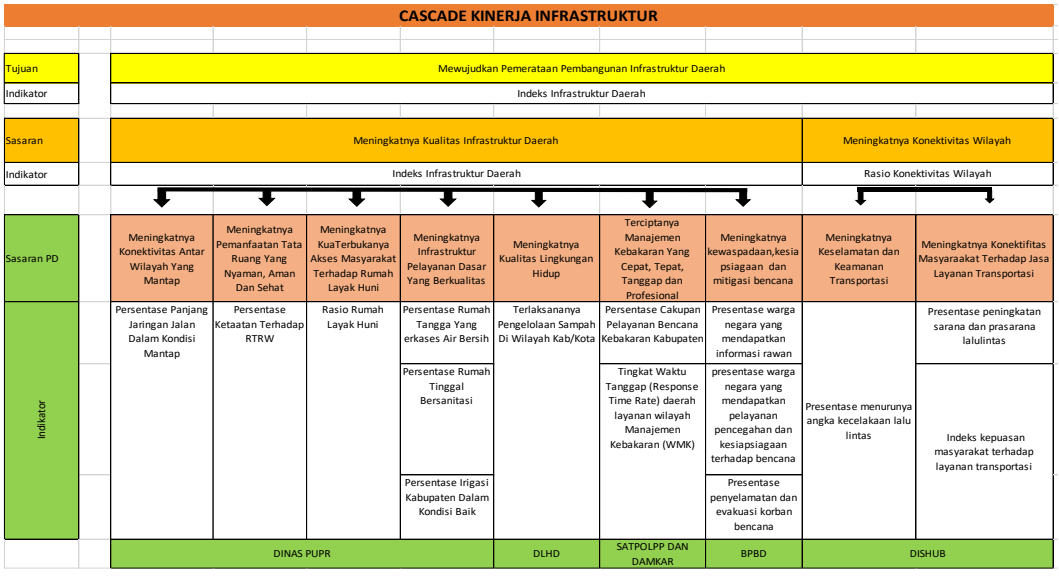
CASCADE KINERJA SUMBER DAYA ALAM

Tujuan	Memantapkan Pengelolaan Sumberdaya Alam Lingkungan Secara Berkelanjutan				
Indikator	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup				
Sasaran	Terjaganya Fungsi dan Kelestarian Sumberdaya Alam dan Lingkungan				
Indikator	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup				
Sasaran PD	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup				
Indikator	Indeks Kualitas Air	Indeks Kualitas Udara	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Terlaksananya Pengelolaan Sampah Di Wilayah Kab/Kota	Ketaatan Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUU LH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP				



Cascading Kinerja Misi 4 :

MISI 4
Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah



Cascading Kinerja Misi 5 :

MISI 5
Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik

CASCADE KINERJA AKUNTABILITAS

Tujuan	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik						
Indikator	Indeks Reformasi Birokrasi						
Sasaran	Terwujudnya Pemerintahan yang Efisien dan Efektif						
Indikator	Indeks Reformasi Birokrasi						
	Predikat SAKIP						
	Nilai LPPD						
	Opini BPK						
Sasaran PD	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Hasil Kelitbangan dan Inovasi Daerah yang Implementatif	Meningkatnya Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal Pemerintah	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang akuntabel	Meningkatnya Administrasi Tata Pemerintahan	Terwujudnya Pelaksanaan Sistim Informasi Pemerintahan Yang Transparan	Meningkatnya profesionalitas Aparatur Sipil Negara
Indikator	Persentase Keselarasan Program Pembangunan Dalam RKPD Terhadap RPJMD	Indeks Inovasi Daerah	Persentase Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Dengan Nilai B	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum	Nilai Evaluasi LPPD	Indeks SPBE	Indeks Profesionalitas ASN meningkat dibanding tahun sebelumnya
			Persentase Penurunan Temuan Hasil Pengawasan	Terlaksananya Pendataan Dan Pengamanan Aset Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Tata Pemerintahan	Kategori Ketrebukaan Informasi Publik	
	Persentase Renja Perangkat Daerah Berkualitas Baik	Persentase Hasil Kelitbangan yang Diimplementasikan	Kapabilitas APIP Level 3	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik			
			Persentase Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK Yang Ditindak lanjuti				
			Level Maturitas SPIP				
	BAPPELITBANGDA		INSPEKTORAT	BPKAD	SETDAKAB	DISKOMINFO	BKKPSDM

2.5.1. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berupa pernyataan komitmen serta janji dalam mencapai target kinerja tertentu. Dokumen ini merupakan suatu kesepakatan kinerja yang akan diwujudkan oleh pejabat penerima amanah dalam satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor: 29 tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Morowali Utara Tahun 2022-2026 sebanyak 10 (sepuluh) Tujuan, 12 (dua belas) Indikator Tujuan dan 13 (tiga belas) Sasaran Strategis dan sebanyak 17 (tujuh belas) Indikator Sasaran. Pada penyusunan SAKIP/LAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2023 telah dilakukan perbaikan indikator yang didampingi oleh Kementerian PANRB. Untuk diketahui dari hasil revisi atau perbaikan tersebut ditargetkan mampu mempercepat terwujudnya visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah, dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali utara tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel. 23
PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatnya mutu layanan kesehatan masyarakat	1. Angka harapan hidup	70,50
2.	Meningkatkan jangkauan layanan pendidikan dasar	2. Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,50
		3. Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	9,00
3.	Meningkatnya partisipasi perempuan	4. Indeks Pemberdayaan Gender	97,50%
4.	Meningkatnya peluang lapangan kerja	5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,7 %
5.	Meningkatnya kualitas Inovasi daerah	6. Indeks Inovasi Daerah	35,00-60,00 (Inovatif)
6.	Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor strategis daerah	7. PDRB Perkapita	9,70%
7.	Meningkatnya kemudahan berinvestasi Rata-rata Pertumbuhan Nilai Investasi (PMA + PMDN)	8. Nilai Pertumbuhan Investasi (PMA + PMDN)	10.225.000.000. 000
8.	Meningkatnya kemandirian desa	9. Indeks Desa Membangun	≥ 0,7072 Maju
9.	Terjaganya fungsi dan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan	10. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	81,06
10.	Meningkatnya keamanan dan ketertiban wilayah	11. Indeks Rasa Aman	2,679/B (aman)
11.	Meningkatnya kualitas Infrastuktur Daerah	12. Indeks Infrastruktur Daerah	0,475
12.	Meningkatnya konektivitas wilayah	13. Rasio Konektivitas kabupaten	0,85
13.	Terwujudnya pemerintahan yang efisien dan efektif	14. Predikat SAKIP	>70-80/BB (sangat baik)
		15. Indeks RB	>70-80/BB (sangat baik)
		16. Nilai LPPD	4.21-5.00 (Sangat Tinggi)
		17. Opini BPK	WTP

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN DAN PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

Pemerintah Kabupaten Morowali Utara telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 7 Tahun 2021 sehingga pelaksanaan tugas untuk mencapai tujuan dan sasaran tahun 2023 tetap memperhatikan Peraturan Daerah tersebut. Ukuran keberhasilan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2023 utamanya mengacu pada RPJMD periode Tahun 2021–2026 yang telah direviu/revisi oleh Tim SAKIP Kabupaten berdasarkan arahan dari Kementerian PAN RB pada tahun 2022 dan telah dituangkan dalan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 29 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2022-2026.

Pemerintah Kabupaten Morowali Utara telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja tahun 2023 yang telah disepakati. penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja. Untuk mempermudah interprestasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

Tabel. 24

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Tingkat Capaian	Kriteria Penilan Realisasi Kinerja
1	91≤	Sangat Baik
2	76≤90	Tinggi
3	66≤75	Sedang
4	51≤65	Rendah
5	≤50	Sangat Rendah

Kinerja Pemerintah Kabupaten Morowali Utara tahun 2023 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam PK Pemerintah Kabupaten Morowali Utara merupakan kinerja tahun ke-3 pada RPJMD periode tahun 2021–2026 yang telah direviu/revisi oleh Tim SAKIP Kabupaten. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel. 25
Pencapaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Morowali Utara
Tahun 2023

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)
Sasaran Strategis 1 **Meningkatnya Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat**				
1.	Angka Harapan Hidup	70,50	69,97	99,24
Sasaran Strategis 2 **Meningkatkan Jangkauan Layanan Pendidikan Dasar**				
1	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,50	12,29	98,32
2	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	9,00	8,94	99,33
Sasaran Strategis 3 **Meningkatnya Partisipasi Perempuan**				
1.	Indeks Pembangunan Gender	97,50	96,53	99,00%
Sasaran Strategis 4 **Meningkatnya Peluang Lapangan Kerja**				
1.	Tingkat Pengganguran Terbuka (TPT)	4,7	2,23	47,44
Sasaran Strategis 5 **Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah**				
1.	Indeks Inovasi daerah	35.00-60,00 poin (Inovativ)	35,18 poin (Inovativ)	100,51
Sasaran Strategis 6 **Meningkatnya Produktivitas Dan Nilai Tambah Sektor Strategis Daerah**				
1.	PDRB Perkapita	9.70%	10.45%	107,73%
Sasaran Strategis 7 **Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi Rata-Rata Pertumbuhan Nilai Investasi**				
1.	Meningkatnya kemudahan berinvestasi Rata-rata	10.225.000.000.000	15.492.404.000.000	151,51%
Sasaran Strategis 8 **Meningkatnya Kemandirian Desa**				

1.	Indeks Desa Membangun	≥ 0,7072 Maju	0,6958 (berkembang)	98,38
Sasaran Strategis 9 Terjaganya Fungsi Dan Kelestarian Sumberdaya Alam Dan Lingkungan				
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	81,06	77,31	95,37
Sasaran Strategis 10 Meningkatnya Keamanan Dan Ketertiban Wilayah				
1.	Indeks Rasa Aman	2,679/B (aman)	0	0
Sasaran Strategis 11 Meningkatnya Kualitas Infrastuktur Daerah				
1.	Indeks Infrastruktur Daerah	0,475	0,282	59,36
Sasaran Strategis 12 Meningkatnya Konektivitas Wilayah				
1.	Rasio Konektivitas Kabupaten	0,85	0,61	71,76
Sasaran Strategis 13 Terwujudnya Pemerintahan Yang Efisien Dan Efektif				
1.	Predikat SAKIP	>70-80/BB	51,76/CC	64,7
2.	Indeks RB	>70-80/BB	53,35/CC	66,68
3.	Nilai LPPD	4.21-5.00	N/A	N/A
4.	Opini BPK	WTP	WTP*	100

Keterangan:
** : Realisasi menggunakan realisasi 2022*

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat diketahui:
1) Target dengan capaian realiasi di atas 100% sebanyak 3 target;
2) Target dengan capaian realiasi tepat 100% sebanyak 1 target;
3) Target dengan capaian realiasi di bawah 100% sebanyak 11 target: dan
4) Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 2 target;

Selain itu, indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Rata-rata Nasional dan Provinsi sebagian menggunakan realisasi tahun 2022, karena hasil pengukuran realisasi tahun 2023 belum dirilis. Selanjutnya untuk diketahui bahwa pada laporan kinerja

tahun 2023 ini terdpat beberapa indikator kinerja yang diperbaiki targetnya karena pada laporan kinerja tahun 2022 terdapat kekeliruan cara penghitungan dan penentuan target, antara lain sebagai berikut:

1) Indikator Indeks Pembangunan Gender, targetnya terlalu rendah sampai akhir periode RPJMD sementara realisasi tahun 2022 sudah melebihi target.
2) Indikator PDRB Perkapita, pada indikator ini terdapat kekeliruan menentukan target dan pengambilan nilai realisasi, untuk target seharusnya menuangkan laju pertumbuhan PDRB ADHK (persen) dalam triliunan rupiah, sementara tahun lalu menuangkan realisasi dalam miyaran rupiah. Untuk laporan tahun ini telah direvisi.
3) Indikator Indeks Desa Membangun, pada indikator tahun 2021 dan 2022 hanya menampilkan jumlah status desa mandiri, maju, berkembang, tertinggal dan sangat tertinggal, sementara untuk laporan kinerja tahun 2023 disamping menampilkan jumlah status desa juga menuangkan capaian rata-rata IDM.
4) Indikator Indeks Infrastruktur Daerah, pada laporan tahun 2022 terdapat kekeliruan penghitungan target Indeks Infrastruktur Daerah sehingga akan kelihatan tahun targetnya lebih besar dengan tahun yang akan datang, akan tetapi pada laporan tahun 2023 dan sampai akhir RPJMD telah dilakukan revisi target.

3.1.1 Analisis Capaian Kinerja.

Sasaran Strategis 1
Meningkatnya Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat

Capaian indikator sasaran "Meningkatnya Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat" adalah sebagai berikut:

Tabel. 26
Capaian Indikator Sasaran
"Meningkatnya Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat"
Tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.1 Angka Harapan Hidup	70,50	69,97	99,24

1.1. Angka Harapan Hidup

Sasaran Meningkatnya Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat dengan 1 (satu) indikator kineja sasaran yaitu Angka Harapan Hidup. Bahwa Angka Harapan Hidup waktu lahir *(expectation of life at birth)* yang biasanya dilambangkan dengan simbol eo dan sering disingkat dengan AHH adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH dihitung dari hasil sensus dan survei kependudukan. Angka Harapan Hidup (AHH) dapat digunakan sebagai alat untuk

mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Pada tabel diatas menunjukkan Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2023 belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 69,97% dari target yang ditetapkan sebesar 70,50%.

Target dan Realisasi serta capaian Angka Harapan Hidup tahun 2023 untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel. 27
Perbandingan Target Kinerja Dengan Realisasi Kinerja
Angka Harapan Hidup Tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.1 Angka Harapan Hidup	70,50	69,97	99,24

Selanjutnya Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja Angka Harapan Hidup Tahun 2021 s.d 2023 Kabupaten Morowali Utara dalam 3 tahun terakhir yaitu tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel. 28
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja
Angka Harapan Hidup Tahun 2021 s.d 2023

Indikator	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1.1 Angka Harapan Hidup	69,71	69,23	69,97

Dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan 2023 Angka Harapan Hidup (AHH) penduduk Kabupaten Morowali Utara mengalami penurunan dan peningkatan. Pada tahun 2021 Angka Harapan Hidup (AHH) realisasi sebesar 69,71 sementara tahun 2022 realisasi sebesar 69,23 jika dibandingkan maka pada tahun 2022 mengalami penurun 0,48 poin, selanjutnya pada tahun 2023 realisasi sebesar 69,97 jika dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 0,26, selanjutnya jika dibandingkan dengan Untuk tahun 2022 maka mengalami peningkatan sebesar 0,74 poin dengan tahun 2023. Hal ini belum mencerminkan bahwa program-program kesehatan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara belum mencapai target, perbaikan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang telah dilaksanakan, berdampak pada tingkat kesehatan penduduk Kabupaten Morowali Utara ke arah yang lebih baik, tingginya Angka Harapan Hidup (AHH) mencerminkan tingkat kesehatan penduduk yang baik.

Selanjutnya capaian Angka Harapan Hidup tahun 2023 jika dibandingkan dengan target atau kondisi yang diharapkan pada akhir periode RPJMD nampak dalam tabel berikut :

Tabel. 29
Perbandingan Realisasi Kinerja Angka Harapan Hidup Tahun 2023 dengan Target Akhir Masa RPJMD Tahun 2021-2026

Indikator	Target Akhir RPJMD 2021-2026	Realisasi Tahun 2023	Capaian (%)
1.1 Angka Harapan Hidup	71.50	69,97	97,86

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa capaian Angka Harapan Hidup tahun 2023 masih di bawah target akhir RPJMD pada tahun 2026, sehingga masih perlu ditingkatkan melalui pelaksanaan program program Kesehatan.

Selanjutnya Indikator Kinerja Sasaran Angka Harapan Hidup Kabupaten Morowali Utara Keberhasilan capaian tersebut bila dibandingkan dengan capaian tingkat Nasional/Provinsi Sulawesi Tengah nampak sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel. 30
Perbandingan Realisasi Kinerja Angka Harapan Hidup Tahun 2023 dengan Standar Nasional/Provinsi Tahun 2023

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	
	Kab.Morowali Utara	Nasional/Provinsi Sulteng
1.1 Angka Harapan Hidup	69,97	69.17

Pada tabel diatas digambarkan bahwa dibanding dengan angka Provinsi Sulawesi Tengah, Angka Harapan Hidup (AHH) penduduk Kabupaten Morowali Utara lebih baik. Hal ini seiring dengan semakin baiknya kecukupan gizi dan budaya ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) bagi seluruh masyarakatnya. Ini menunjukkan adanya perbaikan pembangunan kualitas kesehatan dari sisi sistem dan pelayanan kesehatan di Kabupaten Morowali Utara. Masyarakat semakin menikmati pembangunan di bidang kesehatan dan meningkatkan derajat kesehatan itu merupakan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Morowali Utara periode 2021-2026 yaitu "Sehat, Cerdas dan Sejahtera".

Sasaran Strategis 2
Meningkatkan Jangkauan Layanan Pendidikan Dasar

Capaian indikator-indikator sasaran "Meningkatkan Jangkauan Layanan Pendidikan Dasar" adalah sebagai berikut:

Tabel. 31
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
"Meningkatkan Jangkauan Layanan Pendidikan Dasar"
Tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.1 Harapan Lama Sekolah	12,50	12,29	98,32
1.2 Rata-Rata Lama Sekolah	9,00	8,94	99,33

Sumber: BPS Morowali Utara Dalam Angka 2023 (diolah kembali)

1.1 Harapan Lama Sekolah.

Harapan Lama Sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah dalam tahun yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan Lama Sekolah juga dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Berikut merupakan capaian angka Harapan Lama Sekolah pada Kabupaten Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2023.

Sesuai data dari Badan Pusat Statistik "Morowali Utara Dalam Angka", menunjukkan bahwa nilai realisasi pada indikator Harapan Lama Sekolah tahun 2023 sebesar 12,29 dari target yang direncanakan sebesar 12,50 sehingga target belum sepenuhnya tercapai yaitu sebesar 98,32%. dengan realisasi Harapan Lama Sekolah sebesar 12,29 dapat diartikan bahwa peserta didik lulusan SD dan SMP sekarang di Kabupaten Morowali Utara punya potensi untuk bisa melanjutkan pada tingkat pendidikan SMA maupun Diploma I (DI). Target dan Realisasi serta capaian Harapan Lama Sekolah tahun 2023 untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel. 32
Perbandingan Target Kinerja Dengan Realisasi
Kinerja Harapan Lama Sekolah Tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.1 Harapan Lama Sekolah	12,50	12,29	98,32

Sumber: BPS Morowali Utara Dalam Angka 2023 (diolah kembali)

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 dan tahun 2022 tren capaian Angka Harapan Lama Sekolah pada tahun 2023 semakin meningkat, sebagaimana nampak pada tabel perbandingan realisasi kinerja dengan capaian kinerja Harapan Lama Sekolah tahun 2021 s.d 2023 sebagai berikut:

Tabel. 33
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja Harapan Lama Sekolah Tahun 2021 s.d 2023

Indikator	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1.1 Harapan Lama Sekolah	12,25	12,28	12,29

Meningkatnya Harapan Lama Sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Pada Kabupaten Morowali Utara Harapan Lama Sekolah (HLS) selalu mengalami peningkatan dari kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. pada tahun 2021 harapan lama sekolah realisasi sebesar 12,25 jika dibandingkan dengan tahun 2022 realisasi sebesar 12,28 mengalami peningkatan 0,03 poin, sedangkan pada tahun 2023 realisasi sebesar 12,29 mengalami peningkatan sebesar 0,04 jika dibandingkan dengan tahun 2021 dan sebesar 0,01 poin jika dibandingkan dengan tahun 2022. Harapan Lama Sekolah pada tahun 2023 hampir relative sama dengan tahun 2022.

Selanjutnya Perbandingan Capaian Harapan Lama Sekolah tahun 2023 dengan target atau kondisi yang diharapkan pada akhir periode RPJMD (tahun 2026) adalah sebagai berkut :

Tabel. 34
Perbandingan Realisasi Kinerja Harapan Lama Sekolah Tahun 2023 dengan Target Akhir Masa RPJMD Tahun 2021-2026

Indikator	Target Akhir RPJMD 2021-2026	Realisasi Tahun 2023	Capaian (%)
1.1 Harapan Lama Sekolah	12.80	12,29	96,01

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Morowali Utara periode Tahun 2021-2026 target akhir RPJMD tentang Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah sebesar 12.80 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 12.29 belum mencapai target RPJMD sehingga masih terdapat kekurangan 0,51 atau capaiannya 96.01%. Adapun upaya-upaya yang akan dilakukan agar Harapan Lama Sekolah dapat tercapai optimal, yaitu:

- Tetap memberikan sosialisasi kepada masyarakat secara umum dan secara khusus kepada pemangku kepentingan pendidikan termasuk kepada lembaga sekolah, madrasah dan lembaga-lembaga kursus yang menyelenggarakan

pendidikan (pendidikan informal) untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan.

- Tetap memberikan aksesibilitas yang seluas-luasnya tentang layanan pendidikan yang bermutu kepada masyarakat tentang pembiayaan sekolah gratis setingkat Wajar Dikdas 9 (sembilan) tahun.
- Dengan diberikannya Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) pada jenjang SD dan SMP.

Selanjutnya Harapan Lama Sekolah jika dibandingkan dengan provinsi Sulawesi Tengah maka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Morowali Utara tahun 2023 mencapai 12.28 (tahun) hampir relatif sama yaitu sebesar 12.29 (tahun) pada tahun 2023. Harapan Lama Sekolah Kabupaten Morowali Utara jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Sulawesi Tengah, Harapan Lama Sekolah Kabupaten Morowali Utara masih lebih rendah. Dimana Harapan Lama Sekolah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 mencapai 13.23 tahun dan relatif sama pada tahun 2023 sebesar 13.32 tahun, seperti yang ditampilkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 35
Perbandingan Realisasi Kinerja Harapan Lama Sekolah
Dengan Standar Nasional/Provinsi Tahun 2023

Indikator	Realisasi Tahun 2023	
	Kab.Morowali Utara	Nasional/Provinsi Sulteng
1.1 Harapan Lama Sekolah	12,29	13,33

1.2 Rata-Rata Lama Sekolah.

Rata–Rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh jenis pendidikan yang pernah dijalani. Sedangkan definisi Lama Sekolah adalah banyaknya tahun seorang menjalankan pendidikan formal hingga saat dilakukan survey, baik yang sedang dijalani saat ini (sedang bersekolah) atau pun pendidikan yang ditamatkan. Untuk mereka yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, dan tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak. Rata-rata lama sekolah menggambarkan tingkat pencapaian setiap penduduk dalam kegiatan bersekolah. Semakin tinggi angka lamanya bersekolah semakin tinggi jenjang pendidikan yang telah dicapai penduduk, sehingga indikator ini sangat penting karena dapat menunjukkan kualitas sumber daya manusia. Capaian Rata–Rata Lama Sekolah di Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja Rata-rata Lama Sekolah tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel. 36
Perbandingan Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja
Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.2 Rata-Rata Lama Sekolah	9,00	8,94	99,33

Sumber: BPS Kabupaten Morowali Utara 2023 (diolah kembali)

Rata–Rata Lama Sekolah tahun 2023 di kabupaten Morowali Utara tercapai 8.94 atau capaiannya sebesar 99,33% dari target yang ditentukan pada tahun 2023 sebesar 9,00. Dengan realisasi Rata–Rata Lama Sekolah, ini menunjukkan bahwa masyarakat di Kabupaten Morowali Utara rata-rata sudah dapat menyelesaikan pendidikan pada tingkat Wajar Pendidikan Dasar 9 tahun. Selain itu secara angka perhitungan ketercapaian rata-rata lama sekolah tersebut sudah mendekati Wajar Pendidikan Menengah 12 tahun.

Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator RLS ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi ditamatkan dan tingkat pendidikan sedang dijalankan. Standar UNDP (Badan PBB) adalah minimal 0 tahun dan maksimal 15 tahun. Kondisi angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Morowali Utara periode tahun 2021 s.d tahun 2023 meningkat setiap tahunnya.

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 dan tahun 2022 tren capaian Rata-rata Lama Sekolah pada tahun 2023 semakin meningkat, sebagaimana nampak pada tabel berikut:

Tabel. 37
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 2021 s.d 2023

Indikator	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1.2 Rata-Rata Lama Sekolah	8,72	8,75	8,94

Rata–rata lama sekolah di Kabupaten Morowali Utara jika dilihat pada tabel diatas bahwa pada tahun 2021 s.d tahun 2023 terus mengalami peningkatan. Pertumbuhan yang positif ini juga merupakan modal penting untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Morowali Utara. Artinya kualitas sumber daya manusia dari sisi pendidikan yang semakin membaik akan berdampak terhadap peningkatan daya saing sumber daya manusia sebagai pelaku utama pembangunan. Pada tahun 2021 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) realisasi sebesar 8,72 jika dibandingkan dengan tahun 2022 realisasi sebesar 8,75 mengalami peningkatan 0,03 poin, sedangkan pada tahun 2023 realisasi

sebesar 8,94 mengalami peningkatan sebesar 0,22 jika dibandingkan dengan tahun 2021 dan sebesar 0,19 poin jika dibandingkan dengan tahun 2022.

Selanjutnya perbandingan capaian Rata-rata Lama Sekolah tahun 2023 dengan target atau kondisi yang diharapkan pada akhir periode RPJMD (tahun 2026) adalah sebagai berkut:

Tabel. 38
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Akhir Masa RPJMD Tahun 2021-2026

Indikator	Target Akhir RPJMD 2021-2026	Realisasi	Capaian (%)
1.2 Rata-Rata Lama Sekolah	9.30	8.94	96,12

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Morowali Utara tahun 2021-2026 target Rata-rata Lama Sekolah pada akhir periode (tahun 2026) adalah sebesar 9.30, sedangkan realisasi tahun 2023 sebesar 8.94 atau capaiannya 96.01%, sehingga masih diperlukan upaya peningkatan minimal 0,33 poin dari target akhir RPJMD agar kondisi yang diharapkan pada akhir periode RPJMD tersebut dapat tercapai. Adapun upaya yang akan dilakukan agar Rata–Rata Lama Sekolah dapat tercapai optimal, yaitu selain intervensi melalui program bersama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga dengan diberikannya Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) pada jenjang Sekolah Dasar dan SMP.

Selanjutnya angka Rata-Rata Lama Sekolah jika dibandingkan dengan provinsi Sulawesi Tengah maka Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Morowali Utara tahun 2022 mencapai 8.75 dan meningkat menjadi 8.94 pada tahun 2023, Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Morowali Utara masih lebih rendah dari Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 mencapai 8.89 dan meningkat pada tahun 2023 sebesar 8.96, seperti yang ditampilkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 39
Perbandingan Realisasi Kinerja Rata-Rata Lama Sekolah Dengan Standar Nasional/Provinsi Tahun 2023

Indikator	Realisasi Tahun 2023	
	Kab.Morowali Utara	Nasional/Provinsi Sulteng
1.2 Rata-rata Lama Sekolah	8.94	8.96

Sasaran Strategis 3
Meningkatnya Partisipasi Perempuan

Capaian indikator sasaran "Meningkatnya Partisipasi Perempuan" adalah sebagai berikut:

Tabel. 40
Capaian Indikator Sasaran
"Meningkatnya Partisipasi Perempuan"
Tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.1 Indeks Pembangunan Gender	97,50**	96,53*	99,00%

Keterangan: * Realisasi merupakan realisasi tahun 2022
** Revisi Target
Sumber: BPS Prov. Sulawesi Tengah tahun 2020-2022

1.1 Indeks Pembangunan Gender

Gender Development Indeks (GDI) atau Indeks Pembangunan Jender (IPG) digunakan untuk mengetahui adanya ketimpangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki dengan memperhatikan disparitas jender. Komponen pendukung IPG sama dengan komponen pendukung IPM yaitu meliputi dimensi Kesehatan yang digambarkan dari Angka Harapan Hidup, Pengetahuan yang digambarkan dari Harapan Lama Sekolah dan Rata–rata Lama Sekolah serta Ekonomi yang digambarkan dengan Pengeluaran Perkapita. Perbedaannya adalah bahwa dalam penghitungan Indeks Pembangunan Gender (IPG) komponen pendukungnya disesuaikan dengan mengakomodasikan perbedaan pencapaian antara perempuan dan laki-laki dengan nilai minimum dan maksimum. Capaian Usia Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2023 dilakukan perbaikan target karena realisasi tahun 2022 telah melebihi target RPJMD. Untuk laporan kinerja tahun 2023 realisasi merupakan realisai tahun 2022 karena sampai disusunnya laporan kinerja belum dirilis dalam BPS Morowali Utara maupun BPS Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 41
Perbandingan Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja
Indeks Pembangunan Gender Tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.1 Indeks Pembangunan Gender	97,50	96,53	99,00%

Hasil pengukuran Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2023 belum tersedia sampai dengan Laporan Kinerja ini disusun, sehingga data yang disajikan Dalam Laporan Kinerja ini menggunakan realisasi tahun 2022, nilai hasil penghitungan komponen pendukung Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2022 yaitu sebesar 96,53% dan target IPG tahun 2023 sebesar 97,50% capaiannya sebesar 99,00%.

Selanjutnya perbandingan perkembangan IPG dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel. 42
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja
Indeks Pembangunan Gender Tahun 2021 s.d 2023

Indikator	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1.1 Indeks Pembangunan Gender	95,98	96,53	96,53*

Keterangan: * Realisasi merupakan realisasi tahun 2022
BPS Prov. Sulawesi Tengah tahun 2020-2022

Dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan 2023 Indeks Pembangunan Gender (IPG) penduduk Kabupaten Morowali Utara mengalami peningkatan. Pada tabel di atas dapat dilihat untuk tahun 2021 Indeks Pembangunan Gender realisasi sebesar 95,98 sementara penghitungan komponen pendukung Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2022 yaitu sebesar 96,53% dan untuk realisasi Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2023 Hasil pengukurannya belum tersedia sampai dengan Laporan Kinerja ini disusun, sehingga data yang disajikan dalam Laporan Kinerja ini adalah nilai hasil penghitungan Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2023 adalah sama dengan nilai tahun 2022 yaitu sebesar 96,53%, ini berarti bahwa nilai realisasi IPG tahun 2023 masih menuangkan data tahun sebelumnya.

Selanjutnya Capaian Indeks Pembangunan Gender tahun 2023 bila dibandingkan dengan target atau kondisi yang diharapkan pada akhir periode RPJMD nampak dalam tabel berikut :

Tabel. 43
Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Pembangunan Gender
Tahun 2023 Dengan Target Akhir Masa RPJMD Tahun 2021-2026

Indikator	Target Akhir RPJMD 2021-2026	Realisasi	Capaian (%)
1.1 Indeks Pembangunan Gender	98,55**	96,53*	97,95%

Keterangan: - * Realisasi merupakan realisasi tahun 2022
- ** Revisi Target RPJMD

Hasil pengukuran Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2023 belum tersedia sampai dengan Laporan Kinerja ini disusun, sehingga data yang disajikan dalam

Laporan Kinerja ini adalah nilai hasil penghitungan komponen pendukung Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2022 yaitu sebesar 96,53% dari target IPG akhir RPJMD sebesar 98,55% melebihi target akhir RPJMD sebesar 11,53 poin.

Selanjutnya Indeks Pembangunan Gender jika dibandingkan dengan provinsi Sulawesi Tengah maka Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Morowali Utara tahun 2022 mencapai 96,53% dan tahun 2023 realisasi relatif sama sebesar 96,53%. Selanjutnya jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Sulawesi Tengah Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Morowali Utara lebih tinggi. Dimana Indeks Pembangunan Gender Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 mencapai 92,24 dan Hasil pengukuran Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2023 belum tersedia sampai dengan Laporan Kinerja ini disusun, sehingga data yang disajikan dalam Laporan Kinerja ini adalah nilai hasil penghitungan komponen pendukung Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2023 realisasinya sama yaitu sebesar 92,24%, seperti yang disampilkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 44
Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Pembangunan Gender
Dengan Standar Nasional/Provinsi Tahun 2023

Indikator	Realisasi Tahun 2023	
	Kab.Morowali Utara	Nasional/Provinsi Sulteng
1.1 Indeks Pembangunan Gender	96,53*	92,24*

Keterangan: * Realisasi merupakan realisasi tahun 2022
BPS Prov. Sulawesi Tengah tahun 2023 (diolah kembali)

Sasaran Strategis 4
Meningkatnya Peluang Lapangan Kerja

Capaian indikator sasaran "Meningkatnya Peluang Lapangan Kerja" adalah sebagai berikut:

Tabel. 45
Capaian Indikator Sasaran
"Meningkatnya Peluang Lapangan Kerja" Tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.1 Tingkat Pengganguran Terbuka (TPT)	4,7	2,23	47,44

Sumber: BPS Prov. Sulawesi Tengah tahun 2023 (diolah kembali)

1.1 Tingkat Pengganguran Terbuka (TPT).

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan presentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Untuk mengukur tingkat ketersediaan kesempatan kerja oleh pemerintah kabupaten maka tingkat pengangguran terbuka merupakan salah satu ukurannya.

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Morowali Utara untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel. 46
Perbandingan Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja
Tingkat Pengganguran Terbuka (TPT) Tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.1 Tingkat Pengganguran Terbuka (TPT)	4,7	2,23	47,44

Sumber: BPS Prov. Sulawesi Tengah tahun 2023 (diolah kembali)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Morowali Utara tahun 2023 adalah sebesar 2,23% dengan Capaian Kinerja 47,44% dari target yang ditetapkan sebesar 4,7% pada tahun 2023, nilai TPT sedikit lebih rendah dari target yang ditentukan dalam Perjanjian Kinerja atau RPJMD. Tingginya persentase pengangguran terutama didominasi oleh sektor industri, turunnya pergerakan industri dan perdagangan, namun demikian diharapkan mulai tahun depan secara perlahan tapi pasti tingkat pengangguran akan berkurang seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang cukup baik dan dengan terbangunnya smelter nikel dikabupaten Morowali Utara akan mempengaruhi berkurangnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Berdasarkan data BPS Morowali Utara tahun 2023 jumlah angkatan kerja yang berumur 15 tahun ke atas sebanyak 64.840 orang dan jumlah pengangguran terbuka 1.443 orang, persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja 70,33%.

Selanjutnya jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, presentase TPT tahun 2023 lebih rendah jika dibandingkan tahun 2022 dan tahun 2021. Mengingat tingkat pengangguran terbuka tahun 2021 dan 2022 lebih tinggi dari tahun 2023 oleh karena itu berbagai program kegiatan dalam rangka menekan angka pengangguran terbuka di tahun 2023 ini telah dan akan terus dilakukan oleh Perangkat Daerah melalui kegiatan:

1. Pemerintah Daerah melalui Dinas Tenaga Kerja Menyelenggarakan Pelatihan Berbasis Kompetensi sehingga keluaran hasil pelatihan tersertifikasi dan mampu bersaing pada dunia kerja.
2. Menyelenggarakan Bursa Kerja, baik Bursa Kerja Terbuka maupun Bursa Kerja Khusus.
3. Menjalin hubungan industrial yang kondusif guna mengurangi angka perselisihan hubungan industrial yang berdampak pada PHK.

Tabel. 47
Perbandingan Realisasi Dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tingkat Pengganguran Terbuka (TPT) Tahun 2021 s.d 2023

Indikator	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1.1 Tingkat Pengganguran Terbuka (TPT)	2,98	2,25	2,23

Dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan 2023 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) penduduk Kabupaten Morowali Utara mengalami penurunan. Pada tabel di atas dapat dilihat untuk tahun 2021 realisasi sebesar 2,98 dan untuk tahun 2022 sebesar 2,25% dan selanjutnya presentase TPT tahun 2023 sebesar 2,23.

Selanjutnya jika dibandingkan dengan target RPJMD, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023 adalah 2,23 belum memenuhi target RPJMD yaitu 4,3% dengan demikain capaian TPT adalah sebesar 51,86%. Tingginya persentase pengangguran terutama didominasi oleh sektor industri sebagai dampak efisiensi di masa pandemi, turunnya pergerakan industri dan perdagangan, namun demikian diharapkan mulai tahun depan secara perlahan tapi pasti tingkat pengangguran akan berkurang seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang cukup baik dan adanya smelter nikel yang baru terbangun di Kabupaten Morowali Utara akan membantu mengurangi tingkat pengangguran. Adapun perbandingan target akhir RPJMD dengan realisasi TPT pada tahun 2023 dengan target RPJMD Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. 48
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2023 dengan Target RPJMD Tahun 2021-2026

Indikator	Target Akhir RPJMD 2021-2026	Realisasi 2023	Capaian (%)
1.1 Tingkat Pengganguran Terbuka (TPT)	4,3	2,23	51,86

Sumber: BPS Prov. Sulawesi Tengah tahun 2023

Untuk menekan angka dibawah target TPT di tahun 2026 sebagai akhir masa RPJMD Kabupaten Morowali Utara telah menyiapkan beberapa program prioritas dan upaya inovasi daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Perangkat Daerah terkait lainnya.

Selanjutnya Indikator Kinerja Sasaran Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Morowali Utara Keberhasilan capaian tersebut bila dibandingkan dengan capaian tingkat Nasional/Provinsi Sulawesi Tengah nampak sebagaimana dalam grafik berikut:

Tabel. 49
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2023
dengan Standar Nasional/Provinsi

Indikator	Realisasi Tahun 2023	
	Kab.Morowali Utara	Nasional/Provinsi Sulteng
1.1 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,23	2,95

Data Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional (TPT) atau provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2023 berada pada presentase 2,95, jika dibandingkan dengan TPT Kabupaten Morowali Utara tahun 2023 sebesar 2,23%, maka berada pada posisinya jauh dibawah TPT Nasional/Provinsi Sulawesi Tengah.

Sasaran Strategis 5
Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah

Capaian indikator sasaran"Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah" adalah sebagai berikut:

Tabel. 50
Capaian Indikator Sasaran
"Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah" Tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.1 Indeks Inovasi Daerah	35.00-60,00 poin (Inovativ)	35,18 poin (Inovativ)	100,51

Sumber: Surat Keputusan Mendagri No.400.10.11-6287 Tahun 2023

1.1 Indikator Sasaran Indeks Inovasi Daerah

Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan tujuan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

a. peningkatan Pelayanan Publik;
b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
c. peningkatan daya saing Daerah.

Inovasi Daerah dapat berbentuk:

a. Inovasi tatakelola Pemerintahan Daerah.

Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.

b. Inovasi Pelayanan Publik.

Inovasi Pelayanan Publik merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.

c. Inovasi Daerah lainnya.

Inovasi Daerah lainnya merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Realisasi Target Kinerja Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Morowali Utara berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 400.10.11-6287 tahun 2023 tentang Penerima Penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif (Inovativ Government Award) 2023, maka atas dasar Keputusan Mendagri tersebut Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 skor menurun dengan **skor Indeks 34,00** predikat Kurang Inovatif dan untuk Kabupaten Morowali Utara sokor indeks meningkat dengan **skor Indeks 35,18** predikat Inovatif yang sebelumnya pada tahun 2022 tidak dapat dinilai atau nilai 0 (nol). Angka Capaian Kinerja Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Morowali Utara meningkat di atas Provinsi Sulawesi Tengah, meskipun demikian masih perlu dioptimalkan inovasi dan kreasi inovasi tatakelola Pemerintahan Daerah, Inovasi Layanan Publik dan Inovasi Lainnya. Adapun realisasi Indeks inovasi daerah tahun 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel. 51
Perbandingan Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja
Indeks Inovasi Daerah Tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.1 Indeks Inovasi Daerah	35.00-60,00 poin (Inovativ)	35,18 poin (Inovativ)	100,51

Sumber: Surat Keputusan Mendagri No.400.10.11-6287 Tahun 2023

Selanjutnya perbandingan perkembangan Indek Inovasi Daerah dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel. 52
Perbandingan Realisasi Dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021 s.d 2023

Indikator	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1.1 Indeks Inovasi Daerah	10,76 (kurang inovatif)	0 (Nol) Tidak dapat dinilai	35,18 (Inovatif)

Pada tabel diatas realisasi tahun 2021 sebesar 10,76 (kurang inovatif) dan realisasi tahun 2022 sebesar 0 (nol) tidak dapat dinilai berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 400.10.11-6302 A tahun 2022 tentang Penerima Penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif (Inovativ Government Award) 2022, karena tidak melaporkan inovasi daerah pada tahun 2022, selanjutnya nilai realisasi tahun 2023 sebesar 35,18 (inovatif) dan meningkat lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2021.

Selanjutnya jika dibandingkan dengan target RPJMD, indeks Inovasi Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023 adalah 35,18 (Inovatif) belum mencapai target RPJMD yaitu 60,01-100 (sangat inovatif) dengan demikain capaian Inovasi Daerah adalah sebesar 58,62%. Adapun perbandingan target akhir RPJMD dengan realisasi Indeks Inovasi Daerah pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. 53
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran
Indeks Inovasi Daerah
Tahun 2023 dengan Target RPJMD Tahun 2021-2026

Indikator	Target Akhir RPJMD 2021-2026	Realisasi 2023	Capaian (%)
1.1 Indeks Inovasi Daerah	60,01-100 (sangat inovatif)	35,18 (inovatif)	58,62

Selanjutnya Indikator Kinerja Sasaran Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Morowali Utara Keberhasilan capaian tersebut bila dibandingkan dengan capaian tingkat Nasional/Provinsi Sulawesi Tengah nampak sebagaimana dalam grafik berikut:

Tabel. 54
Perbandingan Indeks Inovasi Daerah Tahun 2023 dengan
Standar Nasional/Provinsi Tahun 2023

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	
	Kab.Morowali Utara	Nasional/Provinsi Sulteng
1.1 Indeks Inovasi Daerah	35,18 (Inovatif)	34,00 (Kurang inovatif)

Sasaran Strategis 6
Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor

Capaian indikator sasaran"Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor" adalah sebagai berikut:

Tabel. 55
Capaian Indikator Sasaran
"Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor" Tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.1 PDRB Perkapita	9.70	10.45*	107,73%

Keterangan: *) Realisasi tahun 2022,
Sumber: Satatistik Daerah Morowali Utaran Tahun 2023

1.1 Indikator PDRB Perkapita.

PDRB sebagai ukuran produktivitas mencerminkan seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah dalam satu tahun. Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2022 memiliki besaran PDRB sebesar 11.767.234 juta rupiah. Angka ini meningkat jika dibandingkan tahun 2020 sebelumnya yang bernilai 10.099.324 juta rupiah. Peningkatan juga terjadi pada PDRB riil tahun 2022 yang mencapai 7.911.624juta rupiah meningkat dari tahun 2020 sebelumnya sebesar 7.163.186 juta rupiah.

Sementara PDRB perkapita yang mencerminkan tingkat produktivitas tiap penduduk juga meningkat mencapai angka Rp. 91.700.112 pada tahun 2022. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Morowali Utara terus meningkat hingga tahun 2022. Tercatat pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 sebesar 6,02% dan tahun 2020 sebesar 8,89%. Sedangkan, pada tahun 2021-2022, pertumbuhan ekonomi mencapai 10,45%.

Kategori Pertambangan dan Penggalian mendominasi penyusunan PDRB Kabupaten Morowali Utara, diikuti kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan serta kategori kontruksi di urutan ketiga. Ketiga kategori unggulan yang disebutkan di awal ini yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi penyumbang terbesar dalam PDRB Kabupaten Morowali Utara disamping sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepedamotor.

Realisasi Persentase Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Morowali Utara tahun 2023 terdapat pada gambar berikut:

Gambar. 17



Dari gambar berdasarkan sumber Statistik Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023 bahwa Realisasi PDRB perkapita adalah sebesar 10.45% dari target yang diharapkan adalah 9.70% dengan capaiannya yaitu sebesar 107,73%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel perbandingan target indikator kinerja dengan realisasi indikator kinerja tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel. 56
Perbandingan Target
Indikator Kinerja dengan Realisasi Indikator Kinerja
PDRB Perkapita Tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.1 PDRB Perkapita	9.70	10.45	107,73%

Selanjutnya realisasi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) perkapita tahun 2023 berdasarkan sumber Statistik Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023 menggunakan angka sementara dan sangat sementara sehingga untuk realisasi tahun 2023 masih menggunakan angka realisasi tahun 2022. Perbandingan realisasi perkembangan PDRB Morowali Utara tahun 2021 s.d 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 57
Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja
PDRB Perkapita Tahun 2021 s.d 2023

Indikator	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1.1 PDRB Perkapita	10,45%	10,45%	10.45%*

Keterangan: *) Realisasi tahun 2022,
Sumber: Satatistik Daerah Morowali Utaran Tahun 2023

pada tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi berdasarkan sumber Statistik Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023 menggunakan angka sementara dan sangat sementara sehingga untuk realisasi tahun 2021 s.d 2022 masih sama karena menggunakan angka tahun 2021 dan 2022 yaitu sebesar 10.45 Juta dan untuk tahun 2023 sama masih menggunakan realisasi tahun sebelumnya.

Selanjutnya realisasi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) perkapita tahun 2023 jika dibandingkan dengan Target Akhir Masa RPJMD Tahun 2021-202 perbandingannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 58
Perbandingan Realisasi Kinerja PDRB Perkapita Tahun 2023
denganTarget Akhir Masa RPJMD Tahun 2021-2026

Indikator	Target Akhir RPJMD 2021-2026	Realisasi 2023	Capaian (%)
1.1 PDRB Perkapita	12.26	10.45	85,23%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi Produk Domestik Regional Bruto perkapita tahun 2023 adalah 10,45% jika dibandingkan dengan Target Akhir Masa RPJMD tahun 2021-202 yaitu sebesar 12.26% maka capaiannya sebesar 85,23% masih belum mencapai target.

Selanjutnya Indikator Kinerja Sasaran Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Morowali Utara Keberhasilan capaian tersebut bila dibandingkan dengan capaian tingkat Nasional/Provinsi Sulawesi Tengah nampak sebagaimana dalam grafik berikut:

Tabel. 59
Perbandingan PDRB Perkapita dengan
Standar Nasional/Provinsi Tahun 2023

Indikator	Realisasi Tahun 2023	
	Kab.Morowali Utara	Nasional/Provinsi Sulteng/Kabupaten Banggai
1.1 PDRB Perkapita	10,45 *	18,3%

Keterangan: *) Realisasi tahun 2022

Perbandingan regional antar kabupaten di Sulawesi Tengah dilihat dari PDRB Atas Dasar Harga Berlaku. Pada tahun 2019 PDRB terendah adalah Kabupaten Banggai Laut yaitu sebesar Rp 2,43 Triliun, sedangkan tertinggi adalah Kabupaten Banggai dengan PDRB sebesar Rp 30,51 Triliun atau sekitar 18,3% dari seluruh PDRB se-Provinsi Sulawesi Tengah. Tahun 2019, Kabupaten Morowali Utara menempati urutan ke-6 dalam hal besaran PDRB. Bila dilihat dari Laju Pertumbuhan PDRB ADHK tahun 2022, Kabupaten Morowali Utara adalah kabupaten dengan pertumbuhan PDRB terbesar ke-2 di Sulawesi Tengah yaitu sebesar 10,45 persen, sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Buol sebesar 4,04 persen.

Sasaran Strategis 7
Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi Rata-rata Pertumbuhan Nilai Investasi (PMA+PMDN).

Capaian indikator sasaran"Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi Rata-rata Pertumbuhan Nilai Investasi (PMA+PMDN)." adalah sebagai berikut:

Tabel. 60
Capaian Indikator Sasaran Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi Rata-rata Pertumbuhan Nilai Investasi (PMA+PMDN)." Tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.1 Nilai Pertumbuhan Investasi (PMA + PMDN)	10.225.000.000.000	15.492.404.000.000	151,51%

Sumber: Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kab. Morowali Utara

1.1 Nilai Pertumbuhan Investasi (PMA + PMDN).

Pertumbuhan Investasi perlu didorong terus, karena dengan tumbuhnya investasi akan mendukung peningkatan aktivitas Industri dan Perdagangan dan sektor Tenaga Kerja, sehingga diharapkan mampu mendukung pengurangan pengangguran dan peningkatan kesejahteraan rakyat, atas capaian kinerja Pertumbuhan nilai Investasi dapat dijelaskan dalam tabel Perbandingan Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja *Nilai Pertumbuhan Investasi (PMA + PMDN)* Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel. 61
Perbandingan Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja *Nilai Pertumbuhan Investasi (PMA + PMDN)* Tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.1 Nilai Pertumbuhan Investasi (PMA + PMDN)	10.225.000.000.000	15.492.404.000.000	151,51%

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Morowali Utara

Pada tabel diatas dapat dilihat Nilai Pertumbuhan Investasi (PMA + PMDN) apabila dibandingkan dengan target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran tahun 2023 sebesar 15.492.404.000.000 sementara target yang ditentukan sebesar

10.225.000.000.000 dengan capaian sebesar 151,51%, maka *Nilai Pertumbuhan Investasi (PMA + PMDN)* tahun 2023 telah melebihi target yang telah ditetapkan pada tahun 2023.

Selanjutnya Nilai Pertumbuhan Investasi (PMA + PMDN) apabila dibandingkan realisasi kinerja tahun 2021 dengan realisasi kinerja tahun 2022, maka realisasi kinerja tahun 2021 sebesar 4.383.000.000.000 dan realisasi kinerja tahun 2022 sebesar 8.164.400.000.000, maka capaian kinerja tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 3.781.400.000.000 atau sekitar 86,27%. Selanjutnya jika dibandingkan realisasi nilai pertumbuhan investasi (PMA+PMDN) tahun 2023 dengan tahun 2021 dan 2022 maka pada tahun 2023 mengalami peningkatan yaitu sebesar 15.492.404.000.000 perbandingannya dapat lihat pada tabel. 62 di bawah.

Tabel. 62
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja
***Nilai Pertumbuhan Investasi (PMA + PMDN)* Tahun 2021-2023**

Indikator	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1.1 Nilai Pertumbuhan Investasi (PMA + PMDN)	4.383.000.000.000	8.164.400.000.000	15.492.404.000.000

Selanjutnya Nilai Pertumbuhan Investasi (PMA + PMDN) apabila dibandingkan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target akhir masa RPJMD yaitu tahun 2026 sebesar 10.300.000.000.000, sementara Realisasi kinerja sasaran pada tahun 2023 sebesar 15.492.404.000.000 telah melebihi target akhir RPJMD sehingga capain kinerja tahun 2023 sebesar 116,48%. perbandingannya dapat lihat pada tabel. 63 di bawah ini.

Tabel. 63
Perbandingan Realisasi Kinerja *Nilai Pertumbuhan Investasi (PMA + PMDN)* Tahun 2023 dengan Target Akhir Masa RPJMD Tahun 2021-2026

Indikator	Target Akhir RPJMD 2021-2026	Realisasi 2023	Capaian (%)
1.1 Nilai Pertumbuhan Investasi *(PMA + PMDN)*	13.300.000.000.000	15.492.404.000.000	116,48

Selanjutnya Nilai Pertumbuhan Investasi (PMA + PMDN) apabila dibandingkan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standar nasional/Provinsi yaitu untuk Kabupten Morowali Utara pada tahun 2023 Realisasi kinerja sasaran sebesar

15.492.404.000.000, sementara Realisasi kinerja sasaran pada standar nasional/Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 belum didapat data sampai disusunnya laporan kinerja ini. Perbandingannya dapat lihat pada tabel. 64 di bawah.

Tabel. 64
Perbandingan *Nilai Pertumbuhan Investasi (PMA + PMDN)*
Tahun 2023 dengan Standar Nasional/Provinsi

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	
	Kab.Morowali Utara	Nasional/Provinsi Sulteng
1.1 Nilai Pertumbuhan Investasi (PMA + *PMDN)*	15.492.404.000.000	Belum diketahui

Dikrenakan data nilai pertumbuhan investasi Provinsi Sulawesi Tengah atau Nasional tahun 2023 belum diketahui maka kami belum bisa menghitung perbandingan realisasi nilai pertumbuhan investasi (PMA+PMDN) dengan Provinsi/Nasional.

Sasaran Strategis 8
Meningkatnya Kemandirian Desa

Capaian indikator sasaran"Meningkatnya Kemandirian Desa" adalah sebagai berikut:

Tabel. 65
Capaian Indikator Sasaran
"Meningkatnya Kemandirian Desa" Tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.1 Indeks Desa Membangun	≥ 0,7072 Maju	0,6958 (berkembang)	98,38

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1.1 Indeks Desa Membangun

Pembangunan Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara

berkelanjutan diantaranya terdapat pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM), yaitu Indek Komposit yang dibentuk dari Indek Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indek Ketahanan Lingkungan (IKL) untuk mendukung upaya Pemerintah dalam menangani pengentasan Desa Sangat Tertinggal dan peningkatan Desa Maju menjadi Desa Mandiri. Tujuan penyusunan Indeks Desa Membangun adalah :

a. menetapkan status kemajuan dan kemandirian Desa; dan
b. menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan Desa.

Ruang lingkup pengaturan Indeks Desa Membangun ini meliputi :

a. komponen Indeks Desa Membangun;
b. status kemajuan dan kemandirian Desa; dan
c. penggunaan dan pengelolaan data Indeks Desa Membangun.

Untuk perbandingan target kinerja dan realisasi kinerja Indeks Desa Membangun tahun 2023 Kabupaten Morowali Utara dilakukan dengan membandingkan target rata-rata IDM Kabupaten/Kota dengan status IDM Mandiri yaitu target yang ditetapkan pada tahuun 2023 sebesar 0,7072 status IDM Desa Maju, sementara untuk realisasi kinerja Indeks Desa Membangun pada tahun 2023 yaitu rata-rata IDM Kabupaten/Kota sebesar 0,6958 dengan status IDM Desa Berkembang dan capaiannya sebesar 98,38 pada tahun 2023 berdasarkan rekomendasi IDM yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Desa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 66
Perbandingan Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja
***Indikator Indeks Desa Membangun* Tahun 2023**

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.1 Indeks Desa Membangun	≥ 0,7072 (Maju)	0,6958 (berkembang)	98,38

Selain dari rata-rata IDM Kabupaten/Kota sebagaimana yang tertuang pada tabel diatas, dijelaskan pula Status Indeks Desa Membangun Kabupaten Morowali Utara tahun 2023 sebagai berikut:

1. Desa Mandiri tahun 2023 sebesar 3,27% atau sebanyak 4 desa yang tergolong desa mandiri dari seluruh jumlah desa yaitu sebanyak 122 desa,.
2. Desa Maju pada tahun 2023 sebanyak 44 desa atau 36,06% dari total seluruh desa di Kabupaten Morowali Utara sebanyak 122 desa.
3. Desa Berkembang pada tahun 2023 tahun 2023 sebanyak 72 desa atau 59,01% dari total seluruh desa yaitu sebanyak 122 desa.
4. Desa Tertinggal pada tahun 2023 sebanyak 2 desa atau 1,63% dari total seluruh desa di kabupaten Morowali Utara yaitu sebanyak 122.

5. Desa Sangat Tertinggal pada tahun 2023 di Kabupaten Morowali Utara sudah tidak ada. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini;

Tabel. 67
Status Indek Desa Membangun Tahun 2023

Total Desa/%	Tahun 2023				
	Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal
122	4	44	72	2	0
%	3,27%	36,06%	59,01%	1,63%	0%

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Daerah Kab. Morowali utara

Untuk perbandingan realisasi kinerja indeks desa membangun tahun 2021 s.d 2023 yaitu; Realisasi kinerja Indeks Desa Membangun pada tahun 2021 dan tahun 2022 rata-rata IDM Kabupaten/Kota dengan status berkembang, selanjutnya realisasi kinerja indeks desa membangun tahun 2023 sebesar 0,6958 realitf sama yaitu rata-rata IDM Kabupaten/Kota dengan status berkembang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 68
Perbandingan Realisasi Indeks Desa Membangun
Tahun 2021-2023

Indikator	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1.1 Indeks Desa Membangun	>0,5989 Berkembang	>0,5989 (Berkembang)	0,6958 (berkembang)

Selanjutnya perbandingan Status Indeks Desa Membangun Kabupaten Morowali Utara tahun 2021 s/d 2023 dijelaskan sebagai berikut:

1. Desa mandiri pada tahun 2021 berjumlah 0 desa atau (0%) dari total jumlah desa sebanyak 122 desa, sedangkan tahun 2022 berjumlah 2 desa atau (1,63%) dari total jumlah desa sebanyak 122 desa, selanjutnya desa mandiri pada tahun 2023 berjumlah 4 desa atau (3,27%).
2. Desa maju pada tahun 2021 sebanyak 4 desa atau (3,27%) dari total jumlah desa sebanyak 122 desa, sedaangkan tahun 2022 sebanyak 21 desa atau (17,21%) dari total jumlah desa sebanyak 122 desa, selanjutnya desa maju pada tahun 2023 sebanyak 44 desa atau (36,06%).
3. Desa berkembang pada tahun 2021 sebanyak 78 desa atau (63,93%) dari total

jumlah desa sebanyak 122 desa, sedangkan tahun 2022 sebanyak 72 desa atau (59,01%) dari total jumlah desa sebanyak 122 desa, selanjutnya pada tahun 2023 desa berkembang sebanyak 72 desa atau (59,01%) jumlahnya masih sama dengan tahun 2022.

4. Desa tertinggal pada tahun 2021 sebanyak 37 desa atau (30,32 %) dari total desa sebanyak 122 desa, sedangkan tahun 2022 sebanyak 27 desa atau (22,13 %) dari total desa sebanyak 122 desa, selanjutnya pada tahun 2023 jumlah desa tertinggal sebanyak 2 desa atau (1,63).
5. Desa sangat tertinggal tahun 2021 sebanyak 3 desa atau (2,45%) dari total desa sebanyak 122 desa dari total desa sebanyak 122 desa, sedangkan untuk desa sangat tertinggal pada tahun 2022 dan tahun 2023 sebanyak 0 desa atau (0%) dari total seluruh desa di Kabupaten Morowali Utara sebanyak 122 desa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini;

Tabel. 69
Realisasi Indikator Kinerja Satatus
Indeks Desa Membangun Tahun 2021 s.d 2023

NO	Tahun	Jumlah Desa/ %	Status IDM Tahun 2021 s.d 2023				
			Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal
1	2021	122	0	4	78	37	3
		%	0	3,27	63,93	30,32	2,45
2	2022	122	2	21	72	27	0
		%	1,63%	17,21%	59,01%	22,13%	0%
3	2023	122	4	44	72	2	0
		%	3,27%	36,06%	59,01%	1,63%	0%

Sumber: Hasil penilaian Kemendesa dan Daerah tertinggal Tahun 2021-2023

Selanjutnya perbandingan target masa akhir RPJMD tahun 2026 Kabupaten Morowali Utara adalah seluruhnya rata-rata IDM Kabupaten/kota sebesar 0,8155 status desa Mandiri, sementara pada tahun 2023 rata-rata IDM Kabupaten/kota sebesar 0,6958 status Desa berkembang capaiannya sebesar 85,32%. Pada tahun 2023 sebanyak 4 desa yang berstatus desa mandiri dari jumlah seluruh desa di Kabupaten Morowali Utara sebanyak 122 desa capaiannya sebesar 3,27%. Pemerintah Kabupaten Morowali Utara harus bekerja keras dalam rangka meningkatkan status desa menjadi desa mandiri yaitu sebanyak 118 desa yang akan diupayakan tuntas sampai akhir RPJMD. Untuk perbandingan rata-rata IDM kabupaten/kota pada tahun 2023 dengan rata-rata IDM kabupaten/kota dengan target akhir RPJMD dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel. 70
Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Desa Membangun
Tahun 2023 dengan Target Akhir Masa RPJMD Tahun 2021-2026

Indikator	Target Akhir RPJMD 2021-2026	Realisasi 2023	Capaian (%)
1.1 Indeks Desa Membangun	0,8155 (Mandiri)	0,6958 (berkembang)	85,32

Selanjutnya Indikator Kinerja Indeks Desa Memabangun Kabupaten Morowali Utara Keberhasilan capaian tersebut bila dibandingkan dengan capaian tingkat Nasional/Provinsi Sulawesi Tengah nampak sebagaimana tabel berikut:

Tabel. 71
Perbandingan Realisasi Indeks Desa Membangun
Tahun 2023 dengan Standar Nasional/Provinsi

Indikator	Realisasi Tahun 2023	
	Kab.Morowali Utara	Nasional/Provinsi Sulteng
1.1 Indeks Desa Membangun	0,6958 (berkembang)	Belum diketahui

Dikarenakan data Indeks Desa Membangun Provinsi Sulawesi Tengah atau Nasional belum diketahui maka kami belum bisa menghitung perbandingan realisasi Indeks Desa Membangun Kabupaten Morowali Utara dengan Provinsi/Nasional tahun 2022 dengan tahun 2023.

Sasaran Strategis 9
Terjaganya Fungsi dan Kelestarian Sumberdaya Alam dan Lingkungan

Capaian indikator sasaran"Terjaganya Fungsi dan Kelestarian Sumberdaya Alam dan Lingkungan" adalah sebagai berikut:

Tabel. 72
Capaian Indikator Sasaran
"Terjaganya Fungsi dan Kelestarian Sumberdaya Alam dan Lingkungan"
Tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	81,06	77,31	95,37

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Daerah

1.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan istilah yang menggabungkan keseluruhan jenis indeks kualitas lingkungan dari semua matra yang mencakup udara, air, hutan, flora, dan fauna, dan kesehatan lingkungan. Dalam hal ini Pemerintah dapat mengatur dan meletakkan skala prioritas yang sesuai dengan tingkat kerusakan lingkungan yang telah terjadi atau prioritas akan terjadi. Kedudukan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) akan sangat penting karena mempunyai potensi besar sebagai dasar kuat dalam rangka implementasi nstrumen Analisis Risiko Lingkungan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) juga mengandung hasil penilaian aktual pada semua besaran penting aspek lingkungan hidup.

Realisasi capaian IKLH Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel. 73
Perbandingan Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	81,06	77,31	95,37

Sumber data: Data dari Dinas Lingkungan Hidup Kab.Morut

Tingkat kualitas lingkungan hidup suatu daerah atau area dapat dilihat dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang dikategorikan sebagai berikut :

- Indeks 90 – 100 = Sangat Baik
- Indeks 70 – 89,9 = Baik
- Indeks 50 – 69,9 = Sedang
- Indeks 25 – 49,9 = Buruk
- Indeks 0 – 24,9 = Sangat Buruk

Dari tabel tersebut di atas nampak bahwa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2023 realisasi sebesar 77,31 dari target yang ditetapkan sebesar 81,06 sehingga capainnya mencapai 95,37 termasuk kategori "baik" (indeks antara 70 s.d 89,9). Capaian tersebut hampir mencapai target IKLH yang ditetapkan dalam tahun 2023.

Adapun perbandingan perkembangan capaian Indeks Infrastruktur pada beberapa tahun terakhir yaitu antara tahun 2022 dengan tahun 2023 nampak dalam tabel sebagai berikut :

Tabel. 74
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja
IKLH Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021 s.d 2023

Indikator	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	50,60	55,79	77,31

Sumber data: Data dari Dinas Lingkungan Hidup Kab.Morut

Dari tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada tahun 2021 realisasi sebesar 50,60 pada tahun 2022 realisasi sebesar 55,79 meningkat sebesar 5,19 poin, selanjutnya realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada tahun 2023 sebesar 77,31 meningkat sebesar 26,71 poin dari realisasi tahun 2021 dan sebesar 21,52 poin dari realisasi tahun 2022.

Capaian IKLH tahun 2023 jika dibandingkan dengan kondisi yang diharapkan (target capaian IKLH) pada akhir periode RPJMD (tahun 2026) adalah sebagai berikut :

Tabel. 75
Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Tahun 2023 dengan Target Akhir Masa RPJMD Tahun 2021-2026

Indikator	Target Akhir RPJMD 2021-2026	Realisasi 2023	Capaian (%)
1.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	81,72	77,31	94,60

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa capaian nilai IKLH tahun 2023 sebesar 77,31 belum mendekati target tahun 2026 yaitu capaiannya mencapai 94,60%. Agar

kondisi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang diharapkan pada akhir periode RPJMD (tahun 2026) maka program pembangunan yang berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup harus tetap dilaksanakan dan ditingkatkan pada tahun tahun mendatang.

Untuk perbandingan tingkat Provinsi Sulawesi Tengah data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel. 76
Perbandingan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Tahun 2023 dengan Standar Nasional/Provinsi

Indikator	Realisasi Tahun 2023	
	Kab.Morowali Utara	Nasional/Provinsi Sulteng
1.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	77,31	78,66*

Keterangan: * Realisasi merupakan realisasi tahun 2022

Untuk perbandingan tingkat Provinsi Sulawesi Tengah data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel diatas bahwa realisasi indeks kualitas lingkungan Kabupaten Morowali Utara tahun 2023 yaitu sebesar 77,31 kemudian Provinsi Sulawesi Tengah data terbaru belum dirilis sehingga masih menampilkan data IKLH tahun 2022 yaitu sebesar 78,66.

Sasaran Strategis 10
Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Wilayah

Capaian indikator sasaran"Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Wilayah" adalah sebagai berikut:

Tabel. 77
Capaian Indikator Sasaran
"Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Wilayah" Tahun 2023

Indikator	Target (%)	Realisasi(%)	Capaian (%)
1.1 Indeks Rasa Aman	2,679	N/A	N/A

1.1 Indeks Rasa Aman.

Pada sasaran ini terdiri dari 1 indikator, yakni indeks rasa aman dimana pada tahun 2023 ini belum ada hasil survei yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Dan DAMKAR, dan indikator ini merupakan indikator pemerintah daerah yang baru

ditentukan diakhir tahun 2023 dimana telah dilakukan perbaikan IKU Pemerintah Daerah. Berikut realisasi dan target kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 78
Perbandingan Target Indikator Kinerja dengan Realisasi Kinerja
Indeks Rasa Aman Tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.1 Indeks Rasa Aman	2,679	N/A	N/A

Sumber data: Data dari Satpol PP dan Damkar Kab.Morut

Dikarenakan data realisasi Indeks Rasa Aman belum dilakukan survei berdasarkan informasi dari Satuan Pamong Polisi dan DAMKAR, maka kami belum bisa memaparkan hasilnya, akan tetapi kami akan paparkan informasi terkait rasio jumlah anggota Linmas dalam satu desa, dan jumlah kasus gangguan Trantibum serta jumlah kasus pelanggaran Peraturan Daerah sebagai berikut:

Tabel. 79
Jumlah Kasus Gangguan Trantibum serta Jumlah Kasus
Pelanggaran Peraturan Daerah Tahun 2023

Dimensi	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian %
Rasio Jumlah Anggota Linmas terhadap jumlah Desa	1:10	1:10	100
Penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang diselesaikan	42 kasus	42 Kasus	100%
Pelanggaran Peraturan Daerah yang ditangani	120 kasus	120 kasus	100%

Rasio jumlah anggota linmas terhadap jumlah RT (Permendagri Nomor 26 Tahun 2020) tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, satu RT sekurang kurangnya 1 anggota Linmas, tahun 2023 terdapat pengukuhan sebanyak 1.250 personil perbandingan satu anggota Linmas dalam satu desa di Kabupaten Morowali Utara yaitu 1:10. Penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang diselesaikan pada tahun 2023 sebanyak 120 gangguan dan tertangani semua sehingga capaiannya 100% jumlah kasus pelanggaran yang ditemukan sebanyak 120 sudah tertangani melalui yustisi/hukum. Pelanggaran Peraturan Daerah yang ditangani tahun 2023 tercapai 100% yaitu Kasus pelanggaran yang ditemukan sebanyak 42 seluruhnya tertangani.

Tabel. 80
Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Rasa Aman Tahun 2021-2023

Indikator	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1.1 Indeks Rasa Aman	N/A	N/A	N/A

Dari tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa Indeks Rasa Aman pada tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023 belum bisa dipaparkan karena belum ada data yang memberikan gambaran tentang indks rasa aman di Kabupaten Morowali Utara karena Perangkat Daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan DAMKAR daerah belum melaksanakan survei terkait dengan indeks rasa aman.

Tabel. 81
Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Rasa Aman
Tahun 2023 dengan Target Akhir Masa RPJMD Tahun 2021-2026

Indikator	Target Akhir RPJMD 2021-2026	Realisasi 2023	Capaian (%)
1.1 Indeks Rasa Aman	2,679/B (aman)	N/A	N/A

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa capaian nilai Indeks Rasa Aman tahun 2023 belum bisa dipaparkan karena tidak ada dari perangkat daerah penanggungjawab indikator.

Sasaran Strategis 11
Meningkatnya Kualitas Infrastuktur Daerah

Capaian indikator sasaran"Meningkatnya Kualitas Infrastuktur Daerah" adalah sebagai berikut:

Tabel. 82
Capaian Sasaran
"Meningkatnya Kualitas Infrastuktur Daerah" Tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.1 Indeks Infrastruktur Daerah	0,475**	0,282	59,36

Keterangan:**Revisi Target tahun 2023

1.1 Indeks Infrastruktur Daerah.

Diketahui bahwa Sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastuktur Daerah dengan indikator Indeks Infrastuktur Daerah, pada tahun 2023 bahwa mengalami perubahan target dimana pada tahun 2022 terjadi salah menghitung target khususnya pada komposit Kualitas Penerangan jalan Umum (PJU) dimana bobotnya seharusnya 0,05 akan tetapi yang terhitung dan tertuang pada laporan kinerja tahun 2022 0,5% sehingga angka menunjukkan 25% seharusnya 2,5% dan pada Komposit edukasi proteksi kebakaran terdapat salah hitung dimana bobotnya 0,10 di kalikan dengan 30 jumlahnya 15 yang seharusnya jumlahnya 3%, sehingga realisasi indikator kinerja sasaran tersebut akan terlihat lebih besar dengan tahun-tahun yang akan datang. Untuk laporan kinerja tahun 2023 targetnya sebesar 0,475% dan realisasi sebesar 0,282% dengan capaian rata-rata sebesar 59,36%. Indeks Infrastruktur mengukur secara agregat dari beberapa jenis infrastruktur yang antara lain meliputi jalan dan jembatan, saluran irigasi dan drainase, pemenuhan bangunan sesuai standar, pengurangan sampah, pengangkutan sampah, level of service (peningkatan jalan), kampung tangguh bencana, evakuasi korban bencana, rehabilitasi dan konstruksi, ketepatan waktu rekomendasi proteksi kebakaran, edukasi proteksi kebakaran, response time. Manfaat dari pengukuran indeks infrastruktur ini adalah untuk mengetahui tingkat ketersediaan, kelayakan, dan pelayanan dari pembangunan infrastruktur yang ada di Kabupaten Morowali Utara. Keberhasilan ini diperoleh dari Perhitungan Indeks Infrastruktur Kabupaten Morowali Utara dengan mengagregasi dari capaian setiap komposit yang mendukungnya sesuai dengan bobot masing–masing, yang sekaligus juga merupakan indikator kinerja sasaran yaitu:

- 25 % dari persentase kondisi jalan mantap (kondisi baik dan sedang)
- 15 % dari rata-rata persentase saluran irigasi dan drainase dalam kondisi baik
- 0,05 % dari persentase Kualitas Penerangan Jalan Umum (PJU)
- 10 % dari persentase pengurangan sampah
- 15 % dari persentase pengangkutan sampah
- 10 % dari persentase edukasi proteksi kebakaran
- 15 % dari persentase response time.

Adapun rincian capaian Indeks Infrastruktur Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel. 83
Rincian Capaian Indeks Infrastruktur Kabupaten Tahun 2023

No	Komposit	Bobot	Target		Capaian	
			Persentase	Indeks	Persentase	Indeks
1	Persentase jalan dan Jembatan mantap	0,25	63,06	15,8	58,68	14,8
2	Persentase saluran irigasi dan drainase dalam kondisi baik	0,15	51,50	7,7	50,9	7,6
3		0,05	50	2,5	8,24	0,4

	Kualitas Penerangan Jalan Umum (PJU)					
4	Persentase pengurangan sampah	0,10	50	5	12,15	1,2
5	pengangkutan sampah	0,15	50	7,5	12,15	1,8
6	Edukasi proteksi kebakaran	0,10	30	3	14	1,4
7	Response time	0,15	40	6	7	1
Jumlah				47,5		28,2
Indeks Infrastruktur		1,00		**0,475**		**0,282**

Sumber data: Data dari Dinas PUPR, Satpol PP dan Damkar, Dinas Lingkungan Hidup Kab.Morut

Dari tabel di atas nampak bahwa meningkatnya infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi dan sosial di Kabupaten Morowali Utara tahun 2023 yang diukur berdasarkan capaian Indeks Infrastruktur terealisasi sebesar 0,282 dari target yang diharapkan sebesar 0,475. Rincian Indeks Infrastruktur Daerah tersebut sebagaimana data dalam tabel berikut :

Tabel. 84
Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja
Indeks Infrastruktur Daerah Tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.1 Indeks Infrastruktur Daerah	0,475	0,282	59,36

Adapun perkembangan capaian Indeks Infrastruktur dalam beberapa tahun terakhir nampak dalam tabel sebagai berikut :

Tabel. 85
Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja
Indeks Infrastruktur Daerah Kabupaten Morowali Utara
Tahun 2021 s/d 2023

Indikator	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1.1 Indeks Infrastruktur Daerah	)*	0,497	0,282

Dari tabel tersebut terlihat bahwa capaian Indeks Infrastruktur Daerah Kabupaten Morowali Utara dari tahun 2021 realisasinya tidak dapat dipaparkan karena pada tahun 2022 terjadi perubahan indikator, selanjutnya pada tahun 2022 realisasinya sebesar 0,497% pada tahun ini terjadi salah hitung dalam menentukan target yaitu pada komposit kualitas Penerangan Jalan Umum (PJU) dan komposit Edukasi Proteksi Kebakaran, sementara tahun 2023 realisasi Indeks Infrastruktur Daerah sebesar 0,282%. Untuk tahun 2023 perhitungan Indeks Infrastruktur sudah meliputi infrastruktur pekerjaan umum, infrastruktur perhubungan, Infrastruktur Lingkungan Hidup dan Infrastruktur Ketertiban dan Keamanan.

Selanjutnya Realisasi Kinerja Indikator Indeks Infrastruktur Daerah tahun 2023 jika dibandingkan dengan Realisasi Kinerja tahun 2026 (Target RPJMD) adalah sebagai berikut :

Tabel. 86
Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja
Indeks Infrastruktur Daerah Kabupaten Morowali Utara
Tahun 2023 Dengan Target RPJMD 2021-2026

Indikator	Target Akhir RPJMD 2021-2026	Realisasi 2023	Capaian (%)
1.1 Indeks Infrastruktur Daerah	0,596	0,282	47,31

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi indikator kinerja Indeks Infrastruktur Daerah tahun 2023 sebesar 0,282% masih jauh dari yang harapkan pada target akhir RPJMD yaitu sebesar 0,596% dengan capaian rata-rata sebesar 47,31%.

Selanjutnya Realisasi Kinerja Indikator Indeks Infrastruktur Daerah tahun 2023 jika dibandingkan dengan target Nasional/Provinsi tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel. 87
Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja
Indeks Infrastruktur Daerah Kabupaten Morowali Utara
Tahun 2023 Dengan Target Nasional/Provinsi

Indikator	Realisasi Tahun 2023		Ket
	Kab. Morowali Utara	Nasional/provinsi Sulawesi Tengah	
1.1 Indeks Infrastruktur Daerah	0,282	*)	

Dikarenakan data Indeks Infrastruktur Daerah Nasional/Provinsi Sulawesi Tengah belum *release* maka kami belum bisa menghitung perbandingan Realisasi Indeks Infrastruktur Daerah Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dengan Realisasi Nasional/Provinsi Sulawesi Tengah, untuk realisasi indeks infrastruktur Kabupaten Morowali Utara sebesar 0,282.

Sasaran Strategis 12
Meningkatnya Konektifitas Wilayah

Capaian indikator sasaran"Meningkatnya Konektifitas Wilayah" adalah sebagai berikut:

Tabel. 88
Capaian Indikator Sasaran
"Meningkatnya Konektifitas Wilayah" Tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.1 Rasio Konektifitas Kabupaten	0,85	0,61	71,76

1.1 Rasio Konektivitas Kabupaten.

Indikator Sasaran Rasio Konektivitas Kabupaten realisasi kinerja sasaran pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 89
Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja
Rasio Konektivitas Kabupaten Tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.1 Rasio Konektifitas Kabupaten	0,85	0,61	71,76

Sumber data: Data dari Dinas Perhubungan Daerah Kab.Morut

Dari tabel tersebut nampak bahwa realisasi kinerja indikator Rasio Konektivitas tahun 2023 sebesar 0,61 dari target yang ditetapkan sebesar 0,85 sehingga capaiannya mencapai 71,76% belum mencapai target yang ditetapkan. Realisasi pencapaian target tersebut diperoleh dengan perhitungan yaitu: 0.6x0.8+0,33x0,42=0,61 dimana IK1 (Angkutan Jalan) = 3 x 0.8 /4 = 0.6 dan IK2 (Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan) = 3 x 0,42/4 = 0.33 (IK1 diperoleh dari penjumlahan jumlah trayek yang dilayani pada Kabupaten Morowali Utara, bobot trayek, serta jumlah kebutuhan trayek dan (IK2 diperoleh dari jumlah angkutan sungai, danau dan penyeberangan (jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pada kabupaten), jumlah bobot lintas serta jumlah kebutuhan lintas penyeberangan). Dan selanjutnya kegiatan tersebut didukung oleh indikator kinerja Dinas Perhubungan daerah Kabupaten Morowali Utara yaitu Kemantapan Jalan Kabupaten, Persentase desa dengan akses angkutan Umum dan Kinerja Lalu Lintas Kabupaten.

Selanjutnya Realisasi Kinerja Indikator Rasio Konektivitas Kabupaten tahun 2023 jika dibandingkan dengan Realisasi Kinerja tahun 2021 s.d 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel. 90
Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja
Rasio Konektivitas Kabupaten Tahun 2021-2023

Indikator	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1.1 Rasio Konektifitas Kabupaten	0,61	0,61	0,61

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa capaian Rasio Konektivitas Kabupaten pada tahun 2023 relatif sama dengan tahun 2021 s.d 2022, realisasi Rasio Konektivitas Kabupaten Morowali Utara berdasarkan sumber data dari Dinas Perhubungan Daerah pada tahun 2023 sebesar 0,61.

Selanjutnya Realisasi Kinerja Indikator Rasio Konektivitas Kabupaten tahun 2023 jika dibandingkan dengan Realisasi Kinerja tahun 2026 (Target RPJMD) adalah sebagai berikut :

Tabel. 91
Realisasi Kinerja
Rasio Konektivitas KabupatenTahun 2023
dengan Target Akhir Masa RPJMD Tahun 2021-2026

Indikator kinerja Sasaran	Target Akhir RPJMD 2021-2026	Realisasi 2023	Capaian (%)
1.1 Rasio Konektifitas Kabupaten	0,95	0,61	64,21

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa capaian nilai Rasio Konektivitas Kabupaen tahun 2023 sebesar 0,61 masih jauh dari yang harapkan pada target tahun 2026 (RPJMD) yaitu sebesar 0,95 dengan capaian rata-rata sebesar 64,21%. Agar kondisi Rasio Konektivitas Kabupaten yang diharapkan pada akhir periode RPJMD (tahun 2026) maka program pembangunan yang berkaitan dengan upaya peningkatan Rasio Konektivitas Kabupaten harus tetap dilaksanakan dan ditingkatkan pada tahun tahun mendatang.

Selanjutnya Realisasi Kinerja Indikator Rasio Konektivitas Kabupaten tahun 2023 jika dibandingkan dengan Realisasi Kinerja Standar Nasional atau Provinsi adalah sebagai berikut:

Tabel. 92
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran
Rasio Konektivitas Kabupaten
Tahun 2023 dengan Standar Nasional/Provinsi

Indikator	Realisasi Tahun 2023		Ket
	Kab. Morowali Utara	Nasional/Provinsi Sulawesi Tengah	
1.1 Rasio Konektivitas Kabupaten	0,61	*)	

Dikarenakan data Rasio Konektivitas Kabupaten Nasional/Provinsi Sulawesi Tengah belum *release* maka kami belum bisa menghitung perbandingan Realisasi Rasio Konektivitas Kabupaten Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dengan Realisasi Nasional/Provinsi Sulawesi Tengah.

Sasaran Strategis 13
Terwujudnya Pemerintahan yang Efisien dan Efektif

Capaian indikator sasaran"Terwujudnya Pemerintahan yang Efisien dan Efektif" adalah sebagai berikut:

Tabel. 93
Capaian Indikator Sasaran
"Terwujudnya Pemerintahan yang Efisien dan Efektif" Tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.1 Indeks Reformasi birokrasi	>70-80/BB	51,76/CC	64,7
1.2 Predikat SAKIP	>70-80/BB	53,35/CC	66,68
1.3 Nilai LPPD	4.21-5.00	N/A	N/A
1.4 Opini BPK	WTP	WTP*	100

Keterangan: * Ralisasi menggunakan realisasi tahun 2022

1.1 Indeks Reformasi birokrasi

Bahwa Reformasi menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Titik berat dari pemerintahan yang baik adalah pada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi secara terarah, sistematis, dan terpadu. Reformasi birokrasi merupakan perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi, antara lain Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan Organisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Oleh karena itu, untuk melaksanakan dan mengelola setiap 8 (delapan) area perubahan dalam reformasi birokrasi yang telah ditetapkan pada road map atau peta jalan reformasi birokrasi di Kabupaten Morowali Utara perlu di lakukan upaya-upaya strategis manajemen perubahan untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara komprehensif oleh seluruh pimpinan unit kerja dan aparatur di lingkungan pemerintah Kabupaten Morowali Utara.

Reformasi birokrasi diarahkan pada upaya-upaya mencegah dan mempercepat pemberantasan korupsi secara berkelanjutan, dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (*good governance*), pemerintah yang bersih (*clean government*), dan bebas KKN. Selain itu, dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat, pelaksanaan reformasi dalam rangka mencapai sasaran

terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif serta terciptanya budaya birokrasi BERAKHLAK dengan ASN yang profesional khususnya perangkat daerah yang langsung memberikan pelayanan publik. Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan dengan menilai komponen yaitu; RB General, RB Tematik dengan kesimpulan hasil evaluasi yang dicapai berupa capain Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2023 sebesar 51,76 dengan kategori "CC", untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

Tabel. 94
Perbandingan Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja
Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.1 Indeks Reformasi birokrasi	>70-80/BB	51,76/CC	64,7

Sumber data: Data dari Hasil Evaluasi Kementerian PANRB Tahun 2023

Pada tabel diatas dapat dilihat dari hasil evaluasi Kemeterian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2023 Kabupaten Morowali Utara mencapai predikat 51,76/CC dari target yang ditetapkan yaitu B (>60-70) dan capaiannya sebesar 64,7%.

Selanjutnya Perkembangan capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Morowali Utara dalam 3 tahun terakhir yaitu tahun 2021s.d 2023 dilakukan dengan cara Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 s.d 2022 dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel. 95
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja
Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2021-2022

Indikator	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1.1 Indeks Reformasi Birokrasi	41,72/C	49,81/CC	51,76/CC

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kurun waktu tahun 2021 sampai dengan 2022 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Morowali Utara mengalami peningkatan, dimana realisasi indikator kinerja Indeks RB pada tahun 2023 sebesar 51,76/CC sekitar 8,09 point untuk tahun 2021 dan 2022 yaitu realisasi indikator kinerja Indeks RB pada tahun 2023 sebesar 49,81/CC yaitu predikat cukup baik, jika dibandingkan

realisasi kinerja Indikator Indeks RB pada tahun 2021 yaitu sebesar 41,72/C yaitu predikat cukup.

Selanjutnya Capaian Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2022 bila dibandingkan dengan target atau kondisi yang diharapkan pada akhir periode RPJMD nampak dalam tabel berikut :

Tabel. 96
Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi
Tahun 2023 dengan Target Akhir Masa RPJMD Tahun 2021-2026

Indikator	Target Akhir RPJMD 2021-2026	Realisasi 2023	Capaian (%)
1.1 Indeks Reformasi Birokrasi	>80-90/A	51,76/CC	57,51%

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa capaian Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2023 masih di bawah target tahun 2026 (masa akhir RPJMD), sehingga masih perlu ditingkatkan pada tahun-tahun yang akan datang.

Selanjutnya Capaian Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2023 bila dibandingkan dengan capaian tingkat Nasional/Provinsi Sulawesi Tengah nampak sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel. 97
Perbandingan Realisasi Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2023
dengan Standar Nasional/Provinsi

Indikator	Realisasi Tahun 2023		Ket
	Kab. Morowali Utara	Nasional/Provinsi Sulawesi Tengah	
1.1 Indeks Reformasi Birokrasi	CC	B	

Pada tabel diatas digambarkan bahwa jika dibandingkan dengan angka Provinsi Sulawesi Tengah, Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Morowali Utara masih dibawah Provinsi yaitu masih kategori 51,76/CC sedangkan Pemerintah Provinsi kategori B. Kabupaten Morowali Utara predikat Reformasi Birokrasi masih satu tingkat di bawah provinsi Sulawesi Tengah.

1.2 Indikator Predikat SAKIP

Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan akuntabilitas kinerja menuju pemerintahan yang

berorientasi hasil, adalah dengan dilakukan suatu evaluasi terhadap implementasi SAKIP.

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Morowali Utara menunjukkan nilai 50,33 dengan predikat CC. Hasil tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "cukup"yaitu implementasi AKIP sudah cukup baik, namun masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya pada unit kerja.

Perbandingan target kinerja Sasaran dengan realisasi Indikator kinerja sasaran predikat Sakip Kabupaten Morowali Utara tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel. 98
Perbandingan Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja
Predikat SAKIP Tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.2 Predikat SAKIP	>70-80/BB	53,35/CC	66,68

Sumber data: Data dari Hasil Evaluasi Kementerian PANRB Tahun 2022

Pada tabel diatas dapat dilihat dari hasil evaluasi Kemeterian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2023 Kabupaten Morowali Utara mencapai predikat 53,35/CC dari target yang ditetapkan yaitu B (>60-70) dan capaiannya sebesar 76,21%.

Selanjutnya Perkembangan capaian Indikator Kinerja Sasaran Predikat SAKIP Kabupaten Morowali Utara dalam 2 tahun terakhir yaitu tahun 2022-2023 dilakukan dengan cara Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel. 99
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja
Predikat SAKIP Tahun 2021-2023

Indikator	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1.2 Predikat SAKIP	45,28/C	50,31/CC	53,35/CC

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 Predikat SAKIP Kabupaten Morowali Utara mengalami peningkatan. Pada tahun 2022 mengalami peningkatan sekitar 5,03 point jika dibandingkan dengan tahun 2021, selanjutnya untuk realisasi tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 8,07 poin dan jika dibandingkan dengan realisasi indikator kinerja Predikat SAKIP pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 3,04 poin.

Selanjutnya Capaian Predikat SAKIP pada tahun 2023 bila dibandingkan dengan target atau kondisi yang diharapkan pada akhir periode RPJMD nampak dalam tabel berikut :

Tabel. 100
Perbandingan Realisasi Kinerja Predikat SAKIP
Tahun 2022 dengan Target Akhir Masa RPJMD Tahun 2021-2026

Indikator	Target Akhir RPJMD 2021-2026	Realisasi 2023	Capaian (%)
1.2 Predikat SAKIP	>80-90/A	53,35/CC	59,27

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa capaian Predikat SAKIP tahun 2023 masih di bawah target tahun 2026 (masa akhir RPJMD), sehingga masih perlu ditingkatkan pada tahun-tahun yang akan datang.

Selanjutnya Capaian Predikat SAKIP tahun 2023 bila dibandingkan dengan capaian tingkat Nasional/Provinsi Sulawesi Tengah nampak sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel. 101
Perbandingan Realisasi Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2023
dengan Standar Nasional/Provinsi

Indikator	Realisasi Tahun 2023		Ket
	Kab. Morowali Utara	Nasional/Provinsi Sulawesi Tengah	
1.2 Predikat SAKIP	CC	BB	

Pada tabel diatas digambarkan bahwa jika dibandingkan dengan angka Provinsi Sulawesi Tengah, Predikat SAKIP Kabupaten Morowali Utara masih dibawah Provinsi yaitu masih kategori 50,33/CC sedangkan Pemerintah Provinsi kategori BB. Kabupaten Morowali Utara Predikat SAKIP masih dua tingkat di bawah provinsi Sulawesi Tengah.

1.3 Indikator Nilai LPPD

Untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerja untuk mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip tata kepemerintahan yang baik, salah satunya adalah dengan melakukan Evaluasi atas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) berdasarkan dari LPPD yang disusun. Target Kinerja Sasaran dengan Indikator Nilai Kinerja EKPPD Kabupaten Morowali Utara dengan realisasi capaian Kinerjanya adalah sebagai berikut:

Tabel. 102
Perbandingan Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja
Nilai LPPD Tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.3 Nilai LPPD	4.21-5.00 (Sangat Tinggi)	N/A	N/A

Sumber data: Data dari Bagian Pemerintahan Kab. Morowali Utara

Pada tabel diatas bahwa hasil Nilai LPPD tahun 2023 sampai dengan disusunnya LAKIP Pemerintah Daerah ini belum dirilis oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri karena Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun anggaran 2023 baru disusun pada awal tahun 2024.

Selanjutnya Perkembangan capaian Indikator Kinerja Sasaran Nilai LPPD Kabupaten Morowali Utara dalam 3 tahun terakhir yaitu tahun 2021-2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2021 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel. 103
Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Capaian Kinerja
Nilai LPPD Tahun 2021-2023

Indikator	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1.3 Nilai LPPD	N/A	2.78 (sedang)	N/A

Dikarenakan LPPD Kabupaten Morowali Utara tahun anggaran 2023 baru disusun pada awal tahun 2024 maka belum dirilis oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri sehingga belum bisa dibandingkan realisasi Nilai LPPD tahun 2021 dan 2022 dengan tahun 2023. Untuk tahun 2022 nilai LPPD telah dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor:100.2.1.7-6646 tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2023, nilai tahun 2022 dikeluarkan Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi dan Kabupaten/Kota tahun anggaran 2022.

Selanjutnya Perkembangan capaian Indikator Kinerja Sasaran Nilai LPPD bila dibandingkan dengan target atau kondisi yang diharapkan pada akhir periode RPJMD nampak dalam tabel berikut :

Tabel. 104
Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai LPPD Tahun 2023 dengan Target Akhir Masa RPJMD Tahun 2021-2026

Indikator	Target Akhir RPJMD 2021-2026	Realisasi 2023	Capaian (%)
1.3 Nilai LPPD	4.21-5.00 (Sangat Tinggi)	N/A	N/A

Dikarenakan LPPD Kabupaten Morowali Utara tahun anggaran 2023 baru disusun pada awal tahun 2024 maka belum dapat dinilai oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri sehingga belum bisa membandingkan realisasi Nilai LPPD tahun 2023 dengan target akhir RPJMD periode 2021-2026.

Selanjutnya Perkembangan capaian Indikator Kinerja Sasaran Nilai LPPD bila dibandingkan dengan capaian tingkat Nasional/Provinsi Sulawesi Tengah nampak sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel. 105
Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai LPPD Tahun 2023 dengan Standar Nasional/Provinsi Tahun

Indikator	Realisasi Tahun 2023		Ket
	Kab. Morowali Utara	Nasional/Provinsi Sulawesi Tengah	
1.3 Nilai LPPD	N/A	N/A	

Dikarenakan LPPD Kabupaten Morowali Utara tahun anggaran 2023 baru disusun pada awal tahun 2024 maka belum dapat dinilai oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri sehingga belum bisa membandingkan realisasi Nilai LPPD tahun 2023 dengan Standar Nasional/Provinsi tahun 2023.

1.4. Indikator Opini BPK

Untuk menilai akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah salah satunya adalah dengan melihat opini BPK atas laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah.

Perkembangan Target Kinerja dan Realisasi Opini BPK tahun 2023 untuk laporan keuangan yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dapat dilihat pada tabel dibawah bahwa hasil Opini BPK tahun 2023 sampai dengan disusunnya LAKIP Pemerintah Daerah ini belum dirilis oleh Badan Pemeriksa Keuangan masih dalam proses pemeriksaan keuangan. Sehingga dalam tabel. 85 belum dapat dipaparkan.

Tabel. 106
Perbandingan Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja
Opini BPK Tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.4 Opini BPK	WTP	WTP*	100

*Keterangan : *) Realisasi menggunakan realisasi tahun 2022*
Sumber data: Data dari BPKAD Kab.Moowali Utara

Selanjutnya Perkembangan capaian Indikator Kinerja Sasaran Opini BPK Kabupaten Morowali Utara dalam 2 tahun terakhir yaitu tahun 2022-2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel. 107
Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Capaian Kinerja
Opini BPK Tahun 2021-2023

Indikator	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
1.4 Opini BPK	WTP	WTP	WTP*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi kinerja indikator Opini BPK pada tahun 2021 dan 2022 yaitu predikat WTP, sementara realisasi kinerja indikator Opini BPK tahun 2023 belum dirilis oleh BPK masih dalam pemeriksaan keuangan maka belum bisa membandingkan realisasi Opini BPK tahun 2021, tahun 2022 dengan tahun 2023.

Selanjutnya Perkembangan capaian Indikator Kinerja Sasaran Opini BPK bila dibandingkan dengan target atau kondisi yang diharapkan pada akhir periode RPJMD nampak dalam tabel berikut :

Tabel. 108
Perbandingan Realisasi Kinerja Opini BPK Tahun 2023 dengan
Target Akhir Masa RPJMD Tahun 2021-2026

Indikator	Target Akhir RPJMD 2021-2026	Realisasi 2023	Capaian (%)
1.4 Opini BPK	WTP	WTP*	*)

Keterangan : * Realisasi menggunakan realisasi tahun 2022

Dari tabel di atas dijelaskan bahwa data Opini BPK pada tahun 2023 sampai saat ini belum dirilis oleh BPK maka belum bisa membandingkan realisasi Opini BPK tahun 2023 dengan target akhir RPJMD periode 2021-2026.

Selanjutnya Perkembangan realisasi Opini BPK tahun 2023 untuk laporan keuangan yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dapat dilihat pada tabel di bawah bahwa hasil Opini BPK tahun 2023 sampai dengan disusunnya LAKIP Pemerintah Daerah ini belum dirilis oleh Badan Pemeriksa Keuangan masih dalam proses pemeriksaan keuangan, maka belum bisa membandingkan realisasi Opini BPK tahun 2023 dengan capaian tingkat Nasional/Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana nampak dalam tabel berikut:

Tabel. 109
Perbandingan Realisasi Kinerja Opini BPK Tahun 2023 dengan Standar Nasional/Provinsi Tahun 2022-2023

Indikator	Realisasi Tahun 2023		Ket
	Kab. Morowali Utara	Nasional/Provinsi Sulawesi Tengah	
1.4 Opini BPK	WTP*	WTP*	

Keterangan : * Realisasi menggunakan realisasi tahun 2022

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2023 sedang melakukan proses audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Untuk memperoleh kinerja keuangan yang baik, melakukan upaya yaitu:

- pemantapan terhadap penatausahaan keuangan dengan pembinaan terhadap pegawai yang bertugas dibidang keuangan, penyempurnaan atas sistem aplikasi keuangan SIMDA menjadi terintegrasi dengan SIPD.
- penerapan kebijakan transaksi non tunai dalam pengeluaran belanja daerah.
- penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Selain itu pengelolaan aset daerah juga diupayakan perbaikan melalui upaya :
  - Menyelaraskan persepsi dan pemahaman serta peningkatan pengetahuan tentang pengelolaan barang milik daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara melalui kegiatan bimbingan teknis, workshop serta pembinaan pengelolaan barang milik daerah;
  - Peningkatan koordinasi antar instansi terkait (Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Morowali Utara), dalam rangka proses pensertifikatan aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Morowali Uatara, serta dalam rangka penelusuran dokumen kelengkapan pengurusan sertifikat tanah;
  - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan sewa barang milik daerah;
  - Penetapan/kode rekening pendapatan dan belanja secara tepat pada jenis pendapatan/belanja, obyek pendapatan/belanja, rincian obyek pendapatan dan

rincian obyek belanja belanja sehingga realisasi pendapatan maupunbelanja secara substansi tepat;
- Optimalisasi tatakelola barang persediaan atau barang pakai habis berbasis akrual.

Dari opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan menggambarkan bahwa pengelolaan keuangan daerah sudah terlaksana secara baik sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD yaitu opini WTP. Namun demikian Pemerintah Kabupaten Morowali Utara telah berkomitmen akan memperbaiki kinerja keuangan daerah sesuai dengan catatan yang telah dilakukan oleh BPK. Terlebih lagi BPK tidak hanya melakukan audit pada laporan keuangan saja, melainkan juga melakukan audit terhadap kinerja yang dimulai dari dokumen perencanaan, penganggaran, monev, hingga pelaporan. Dengan upaya tersebut diharapkan pengelolaan keuangan dan aset daerah dapat terkelola dengan baik, transparan dan akuntabel, menghindari adanya tindak pidana korupsi sehingga opini WTP dari hasil audit BPK dapat dipertahankan.

3.1.2 Analisis Penyebab Keberhasilan Atau Kegagalan Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alaternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.

Adapun pencapaian indikator kinerja sasaran berdasarkan sasaran strategis sesuai dengan skala pengukuran ordinal dirinci dalam tabel berikut :

- **Sasaran 1 Meningkatnya Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat**

Dari tabel diatas diketahui bahwa Sasaran **Meningkatnya Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat** dengan indikator Angka Harapan Hidup. Pada tahun 2023 bahwa indikator sasaran tersebut capaian rata-ratanya sebesar 99,24%, dengan predikat sangat baik. Pada tahun 2023 AHH masih berada dibawah target, ini disebabkan belum optimalnya derajat kesehatan masyarakat menjadi permasalahan utama. Usia Harapat Hidup atau UHH di Morowali Utara masih rendah. Banyak faktor yang mempengaruhi hal ini, terkait dari pihak individu atau keluarga yaitu kemungkinan faktor tingkat pengetahuan, ekonomi, budaya, perilaku dan kesadaran kesehatan serta nutrisi yang masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari angka *stunting* dan kematian ibu yang masih tinggi. Faktor kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan, jumlah dan kualitas tenaga kesehatan, sarana pelayanan yang belum mencukupi, serta akses menuju tempat kesehatan tidak mudah, sehingga identifikasi faktor risiko kegawatdaruratan atau penyakit, deteksi awal pencegahan komplikasi penyakit, dan pertolongan kurang optimal. Termasuk didalamnya keterbatasan sarana prasarana RSUD Kolonodale dan jumlah ketersediaan Puskesmas Pembantu. Pencegahan, pengendalian serta penanganan Triple Burden Diseases perlu perhatian serius, yaitu penyakit menular, penyakit tidak menular, dan penyakit yang harusnya bisa dicegah, misalnya dengan imunisasi. Akan tetapi dengan gaya hidup masyarakat, tidak hanya usia lanjut yang menderita, tetapi ada kecenderungan penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes mellitus,dan lain lain juga dialami pada masyarakat dewasa bahkan usia muda. Kasus pandemi yang terjadi pada tahun lalu juga menjadi permasalahan yaitu dengan semakin meningkatnya kasus COVID-19, sehingga ke depannya perlu persiapan dari pemerintah setempat untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap wabah yang tiba-tiba muncul dan berdampak luas.

- **Sasaran 2 Meningkatkan Jangkauan Layanan Pendidikan Dasar.**

Dari tabel diatas diketahui bahwa Sasaran **Meningkatkan Jangkauan Layanan Pendidikan Dasar** dengan 2 indikator yaitu: indikator Harapan Lama Sekolah capaiannya sebesar 98,32% dan Indikator Rata-Rata Lama Sekolah capaiannya sebesar 99,33. Pada tahun 2023 bahwa indikator sasaran tersebut capaian rata-ratanya sebesar 98,82%, dengan predikat sangat baik. Kualitas pendidikan masih merupakan salah satu penyebab utama rendahnya kesejahteraan masyarakat. Kondisi pendidikan di Kabupaten Morowali Utara khususnya pendidikan inklusif masih belum merata. Fakta dan permasalahan kualitas Pendidikan di Kabupaten Morowali Utara, antara lain:

1. Rendahnya Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan harapan lama sekolah (HLS) yang ditandai dengan:
   a. Angka melek huruf rendah, khususnya masyarakat di daerah daerah terpencil (daerah tertinggal), dan khususnya KAT.
   b. Angka putus sekolah masih tinggi.
   c. Bantuan beasiswa Pemerintah dan CSR untuk antisipasi angka putus sekolah sangat diperlukan.
   d. Pembelajaran kebencanaan belum menjadi bagian dari sistem pembelajaran sehingga diperlukan kurikulum lokal.
2. Sarana Prasarana pendidikan dasar belum memadai yang ditunjukkan dengan:
   a. Sarana Prasarana sekolah masih belum memadai.
   b. Pemeliharaan gedung sekolah yang belum memadai.
   c. Teknologi pembelajaran masih lemah dan belum mendukung model/sistem belajar berbasis daring.
3. Kuantitas dan kualitas Guru belum memadai dikarenakan:
   a. Pemerataan dan distribusi guru secara geografis maupun secara keahlian berdasarkan mata pelajaran yang belum optimal.
   b. Perlindungan jaminan sosial bagi tenaga pendidik (guru) dan tenaga honorer yang belum ada.
   c. Tingkat kesejahteraan guru belum maksimal.

Ada sejumlah faktor yang menyebabkan kualitas pendidikan di Kabupaten Morowali Utara cenderung masih rendah atau tertinggal.Pertama, berkaitan dengan rendahnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana Pendidikan yang berujung pada rendahnya akses masyarakat terhadap layanan Pendidikan. Hal ini berkaitan dengan masih banyaknya gedung sekolah yang tidak layak huni, tidak tersedia media belajar yang baik, serta tidak tersedia perpustakaan bagi siswa. Selain itu, di Kabupaten Morowali Utara, setiap wilayah belum tentu memiliki buku pelajaran dan referensi yang sama, bahkan masih ada sekolah-sekolah yang buku-bukunya tidak lengkap. Belum lagi ada sekolah-sekolah yang fasilitas lab, komputer dan kelasnya masih belum memadai. Kedua, belum meratanya tenaga guru dan tenaga kependidikan di sejumlah wilayah. Seringkali jumlah tenaga pengajar tetap tidak memadai, sehingga sangat dibutuhkan tenaga honorer atau tenaga kontrak untuk mencukupi kebutuhan guru yang kurang tersebut. Terjadinya pemusatan guru di daerah perkotaan menyebabkan tidak terlayaninya daerah yang lebih terpencil di Kabupaten Morowali Utara. Disamping itu, mutu dan kualitas pembelajaran juga sangat kurang karena banyak guru yang mengajar tidak pada kompetensinya. Selain itu, rendahnya kesejahteraan guru yang mengajar di Kabupaten Morowali Utara berpengaruh terhadap rendahnya pemerataan kualitas Pendidikan. Dengan pendapatan yang rendah, banyak guru terpaksa melakukan pekerjaan sampingan. Masalah kesejahteraan dan biaya hidup yang tinggi merupakan salah satu penyebab banyak guru yang tidak mau mengajar atau

ditempatkan di daerah non perkotaan dimana kesempatan untuk mencari penghasilan sampingan lebih kecil. Ketiga, rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan atau budaya pendidikan masih rendah. Faktor sosial yang berkaitan dengan kultur masyarakat, baik yang berupa pandangan, adat istiadat dan kebiasaan lainnya yang melekat di dalam suatu kelompok masyarakat, seringkali menjadi faktor penghambat bagi anak-anak usia sekolah untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Banyak para orang tua siswa yang lebih memilih untuk memperkerjakan anak-anak usia sekolah guna membantu kehidupan ekonomi keluarga. Tingginya angka putus sekolah dan rendahnya partisipasi pendidikan tentu sangat membutuhkan sebuah upaya yang dapat memperluas akses masyarakat agar dapat mengerti dan memahami tentang pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka. Kondisi usia anak-anak yang tidak lagi berada pada usia sekolah juga menjadi penghambat terhadap upaya-upaya pemerintah dalam mensukseskan program wajib belajar 9 tahun. Strategi yang dilakukan dalam meningkatkan derajat pendidikan masyarakat Kabupaten Morowali Utara yaitu meningkatkan akses pelayanan Pendidikan dasar dan menengah, Percepatan pemerataan akses pelayanan pendidikan dasar dan menengah, Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan pendidikan yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat serta Percepatan pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan dasar dan menengah.

Adapun arah kebijakan yang direncanakan antara lain:

- Peningkatan penyediaan prasarana dan sarana pelayanan dasar pendidikan dasar dan menengah pendukung pembelajaran yang memadai.
- Peningkatan perluasan dan akses Pendidikan dasar dan menengah
- Meningkatkan fasilitas pendidikan dasar dan menengah.
- Mengembangkan Desa Cerdas.
- Meningkatkan cakupan jaminan asuransi pendidikan masyarakat (Kartu Indionesia Pintar).
- Mengembagkan beasiswa bagi pelajar dari rumah tangga miskin.
- Mengantisipasi penyediaan dukungan akses data bagi proses belajar daring (*online*).
- Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga pendidik.
- Meningkatkan kompetensi dan kapasitas pendidik dan tenaga pengajar.
- Meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana Pendidikan.
- Menguatkan manajemen sekolah.
- Meningkatkan kesejahteraan tenaga pengajar.
- Meningkatkan pemberian penghargaan bagi siswa, guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah berprestasi.
- Meningkatkan kapasitas antisipatif sekolah dalam penyelenggaraan sistem belajar daring

- **Sasaran 3 Meningkatnya Partisipasi Perempuan.**

Dari tabel diatas diketahui bahwa sasaran **Meningkatnya Partisipasi Perempuan** dengan indikator Indeks Pembangunan Gender. Pada tahun 2023 bahwa indikator sasaran tersebut masih menampilkan realisasi tahun 2022 yaitu sebesar 96,53 berdasarkan data BPS Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 karena sampai disusunnya LAKIP tahun anggaran 2023 belum dikeluarkan nilai indeks Pembangunan Gender untuk tahun 2023. capaian rata-rata sasarannya sebesar 99,00% dengan predikat sangat baik. Upaya pemberdayaan perempuan di Kabupaten Morowali Utara belum didukung oleh kelembagaan pengarusutamaan gender yang efektif. Pemahaman terhadap pentingnya pengarusutamaan gender belum menjadi keberpihakan para pengambil kebijakan. Selain itu, permasalahan pembardayaan perempuan di Kabupaten Morowali Utara antara lain lemahnya kapasitas jaringan pemberdayaan perempuan dan adalah pengembangan pusat layanan terpadu pemberdayaan perempuan belum terfasilitasi. Hal ini ditunjukkan dengan Rendahnya keterlibatan

pekerja perempuan pada lembaga pemerintah dan DPRD kabupaten, belum tersedianya data potensi kelembagaan perempuan dan anak, belum kuatnya jaringan kerja sama kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak, dan belum adanya sistem informasi gender dan anak. Strategi yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan peran Perempuan dalam Pembangunan menuju keadilan dan kesetaraan Gender adalah Meningkatkan kualitas SDM dan kapasitas Lembaga/kelompok masyarakat serta gender dan Pengarusutama an keadilan dan kesetaraan jender. Adapun kebijakan yang dilakukan yaitu ;

- Peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan partisipasi gender dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- Penguatan kelembagaan dan dukungan program dan kegiatan perempuan.
- Peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesetaraan gender dalam pembangunan.
- Meningkatkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berbasis gender.
- Meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan pembangunan.
- Menguatkan organisasi perempuan.

- **Sasaran 4 Meningkatnya Peluang Lapangan Kerja**

Dari tabel diatas diketahui bahwa sasaran **Meningkatnya Peluang Lapangan Kerja** dengan indikator Tingkat Pengganguran Terbuka (TPT) , Pada tahun 2023 capaian rata-ratanya sebesar 47,44%, dengan predikat sangat rendah. Permasalahan pengangguran di Kabupaten Morowali Utara merupakan dampak dari rendahnya penyerapan tenaga kerja. Dimana permasalahan tersebut disebabkan oleh belum seimbangnya permintaan dan penawaran tenaga kerja dan rendahnya kompetensi calon tenaga kerja. Adanya *miss-match* tersebut terjadi karena tidak cocoknya persediaan/penawaran tenaga kerja dan permintaan tenaga kerja. Upaya peningkatan kualitas angkatan kerja dilakukan melalui membangun kompetensi tenaga kerja yang unggul, baik melalui jalur lembaga pendidikan maupun lembaga pelatihan. Jalur lembaga pendidikan bertujuan untuk mempersiapkan sumber daya manusia unggul sebelum menjadi angkatan kerja, sedangkan jalur lembaga pelatihan merupakan lembaga yang mempersiapkan sumber daya manusia unggul bagi angkatan kerja baik yang belum bekerja maupun yang sedang bekerja. Pendidikan vokasi formal (SMK) yang diharapkan bisa menjadi solusi dalam penyiapan tenaga kerja terdidik dan terlatih hingga saat ini belum mampu menjadi solusi dalam penyerapan tenaga kerja. Begitu pula dengan keberadaan lembaga pelatihan vokasi informal (BLK) yang masih belum memadai sehingga menyebabkan rendahnya jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi. Seirama dengan semakin dikembangkannya industri berteknologi tinggi saat ini, maka standar kompetensi kerja juga harus semakin tinggi menyesuaikan dengan tuntutan industri berteknologi tinggi. Hingga saat ini, jalinan kerjasama antara dunia pendidikan dengan dunia kerja (dunia usaha–dunia industri) masih belum optimal yang diduga berkorelasi dengan rendahnya rasio kesempatan kerja dan rendahnya pencari kerja yang ditempatkan. Rendahnya penyerapan tenaga kerja mengakibatkan terbatasnya kesempatan kerja yang kemudian menyebabkan rendahnya produktivitas tenaga kerja daerah. Ditambah dengan belum optimalnya pengawasan terhadap relasi pekerja, pemberi kerja, dan pemerintah, yang kemudian berdampak pada belum optimalnya perlindungan terhadap pekerja. Strategi yang dilakukan untuk Meningkatnya inovasi, Keterampilan dan produktivitas angkatan Kerja adalah Revitalisasi Balai Latihan Kerja, Pengembangan jaminan dan asuransi perlindungan tenaga kerja. Adapun arah kebijakan yang dilakukan yaitu; Meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana pendidikan dan latihan tenaga kerja dan meningkatkan kerjasama dengan swasta dalam pengembangan jaminan dan asuransi perlindungan tenaga kerja.

- **Sasaran 5 Meningkatnya kualitas Inovasi Daerah**

Dari tabel diatas diketahui bahwa **Sasaran Meningkatnya kualitas Inovasi Daerah** dengan indikator Indeks Inovasi Daerah. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan tujuan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Untuk mencapai tujuan tersebut diatas sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

a. peningkatan Pelayanan Publik;
b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
c. peningkatan daya saing Daerah.

Inovasi Daerah dapat berbentuk:

a. Inovasi tatakelola Pemerintahan Daerah.

Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.

b. Inovasi Pelayanan Publik.

Inovasi Pelayanan Publik merupakan inovasi dalam penyediaanpelayanan kepada masyarakat yang meliputi prosespemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.

c. Inovasi Daerah lainnya.

Inovasi Daerah lainnya merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Realisasi Target Kinerja Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023 ditetapkan sebagai **Inovatif**, dengan capaian kinerja berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor: 400.10.11-6287 Tahun 2023002 6-5848 Tahun 2023 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota adalah **Inovatif** dengan skore 35,18 poin (Inovativ) untuk Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2023 target tercapai sehingga capaian indikator kinerja sasaran rata-rata 58,63 dari target yang ditetapkan sebesar 35-60 poin sedangkan untuk Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah dengan skore 34,00 (Kurang inovatif) untuk tahun 2023. Angka Capaian Kinerja Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Morowali Utara masih diatas Provinsi Sulawesi Tengah karena pada tahun 2023 telah melaporkan banyak Inovasi Daerah ke Menteri Dalam Negeri melalui Aplikasi Indeks Inovasi Daerah Tahun 2023, dengan hasil tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara semakin mengoptimalkan inovasi dan kreasi inovasi tatakelola Pemerintahan Daerah, Inovasi Layanan Publik dan Inovasi Lainnya. Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah Revitalisasi pusat-pusat penelitian dan inovasi serta kebijakan yaitu menyelenggarakan festival teknologi tepat guna.

- **Sasaran 6 Meningkatnya Produktivitas Dan Nilai Tambah Sektor Strategis Daerah.**

Dari tabel diatas diketahui bahwa Sasaran **Meningkatnya Produktivitas Dan Nilai Tambah Sektor Strategis Daerah** dengan indikator PDRB Perkapita, Pada tahun 2023 capaian rata-rata sasarannya sebesar 110,25%, dengan predikat sagat baik. Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut.

Rata-rata pengeluaran perkapita di Kabupaten Morowali Utara tahun 2023 untuk konsumsi makanan adalah sebesar Rp. 807.993 dan non makanan adalah sebesar Rp. 683.736 Rata-rata konsumsi makanan perkapita terbesar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan dan minuman jadi masing-masing sebesar 13,52% Rata-rata konsumsi non makanan perkapita terbesar digunakan untuk memenuhi kebutuhan perumahan dan fasilitas rumah tangga yaitu sebesar 28,48%.

- **Sasaran 7 Meningkatnya kemudahan berinvestasi Rata-rata Pertumbuhan Nilai Investasi (PMA+PMDN).**

Dari tabel diatas diketahui bahwa Sasaran Meningkatnya jumlah investasi daerah (PMDN dan PMA) dengan indikator Realisasi PMDN dan PMA. Pada tahun 2023 bahwa indikator sasaran tersebut capaian rata-rata sasarannya sebesar 151,51%, dengan predikat sangat baik. Pertumbuhan Investasi perlu didorong terus, karena dengan tumbuhnya investasi akan mendukung peningkatan aktivitas Industri dan Perdagangan dan sektor Tenaga Kerja, sehingga diharapkan mampu mendukung pengurangan pengangguran dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Berikut ini adalah beberapa permasalahan yang berkenaan dengan urusan penanaman modal yaitu rendahnya realisasi nilai investasi di bidang agribisnis dan pariwisata, belum memadainya daya dukung jalan, pasokan energi dan faktor–faktor non teknis lainnya antara lain isu keamanan, dan perizinan, serta belum optimalnya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Secara Elektronik (SPIPISE).

Gambaran perkembangan nilai investasi PMDN/PMA di Kabupaten Morowali Utara cenderung mengalami peningkatan pada tahun 2023 dari target sebesar Rp.10.225.000.000.000 Triliun yang terealisasi sebesar Rp. 15.492.404.000.000 Trilun ini menunjukkan bahwa investasi yang terjadi mayoritas merupakan investasi oleh investor asing. Seperti diketahui Kabupaten Morowali Utara memiliki kekayaan alam menjadi daya tarik pada investor asing untuk menanamkan modalnya. Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah daerah adalah pengembangan investasi daerah, dan arah kebijakan yang dilakukan yaitu meningkatkan sistem pelayanan terpadu dalam penanaman modal (*Online Single Submission*), mengembangkan promosi dan kerjasama investasi.

- **Sasaran 8 Meningkatnya Kemandirian Desa.**

Dari tabel diatas diketahui bahwa Sasaran **Meningkatnya Kemandirian Desa** dengan indikator Indeks Desa Membangun, pada tahun 2023 bahwa indikator sasaran tersebut capaian rata-rata sasarannya sebesar 98,38%, dengan predikat Sangat Baik. Pembangunan Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan diantaranya terdapat pada Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM), yaitu Indek Komposit yang dibentuk dari Indek Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indek Ketahanan Lingkungan (IKL) untuk mendukung upaya Pemerintah dalam menangani pengentasan Desa Sangat Tertinggal dan peningkatan Desa Maju menjadi Desa Mandiri. Tujuan penyusunan Indeks Desa Membangun adalah :

a. menetapkan status kemajuan dan kemandirian Desa; dan
b. menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan Desa.

Ruang lingkup pengaturan Indeks Desa Membangun ini meliputi :
a. komponen Indeks Desa Membangun;
b. status kemajuan dan kemandirian Desa; dan
c. penggunaan dan pengelolaan data Indeks Desa Membangun.

Capain Kinerja:

Selain dari rata-rata capaian indikator sasaran IDM Kabupaten/Kota sebagaimana yang tertuang diatas, dijelaskan pula Status Indeks Desa Membangun Kabupaten Morowali Utara tahun 2023 sebagai berikut:

1. Desa Mandiri tahun 2023 sebesar 3,27% atau sebanyak 4 desa yang tergolong desa mandiri dari seluruh jumlah desa yaitu sebanyak 122 desa,.
2. Desa Maju pada tahun 2023 sebanyak 44 desa atau 36,06% dari total seluruh desa di Kabupaten Morowali Utara sebanyak 122 desa.
3. Desa Berkembang pada tahun 2023 tahun 2023 sebanyak 72 desa atau 59,01% dari total seluruh desa yaitu sebanyak 122 desa.
4. Desa Tertinggal pada tahun 2023 sebanyak 2 desa atau 1,63% dari total seluruh desa di kabupaten Morowali Utara yaitu sebanyak 122.
5. Desa Sangat Tertinggal pada tahun 2023 di Kabupaten Morowali Utara sudah tidak ada.

Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah Percepatan pengurangan kemiskinan, meningkatkan peran BUMDES dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, meningkatkan produktifitas rakyat, pengembangan ekonomi lokal dan kewirausahaan, pengembangan SDM dan infrastruktur Desa dan optimalisasi jasa perdagangan dan pariwisata dan arah kebijakan yaitu meningkatkan pemberdayaan keluarga miskin, mengembangkan kemitraan usaha antara BUMDes dengan pelaku usaha, mengembangkan kapasitas usaha BUMDesa, peningkatan kemitraan strategis antara BUMDes dengan pelaku usaha, Peningkatan kapasitas kelembagaan, Meningkatkan kapasitas masyarakat dan aparat desa, Peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat perdesaan, peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna, Meningkatkan pembangunan dan perbaikan sarana dan prasaran penunjang layanan pemerintahan desa dan kecamatan, mengembangkan desa wisata.

- **Sasaran 9 Terjaganya Fungsi Dan Kelestarian Sumberdaya Alam Dan Lingkungan.**

Dari tabel diatas diketahui bahwa **Sasaran Terjaganya Fungsi Dan Kelestarian Sumberdaya Alam Dan Lingkungan** dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, pada tahun 2022 bahwa indikator sasaran tersebut capaian rata-rata sasarannya sebesar 95,37%, dengan predikat sangat baik. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan istilah yang menggabungkan keseluruhan jenis indeks kualitas lingkungan dari semua matra yang mencakup udara, air, hutan, flora, dan fauna, dan kesehatan lingkungan. Dalam hal ini Pemerintah dapat mengatur dan meletakkan skala prioritas yang sesuai dengan tingkat kerusakan lingkungan yang telah terjadi atau prioritas akan terjadi. Kedudukan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) akan sangat penting karena mempunyai potensi besar sebagai dasar kuat dalam rangka implementasi nstrumen Analisis Risiko Lingkungan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) juga mengandung hasil penilaian aktual pada semua besaran penting aspek lingkungan hidup.

Tingkat kualitas lingkungan hidup suatu daerah atau area dapat dilihat dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang dikategorikan sebagai berikut :

- Indeks 90 – 100 = Sangat Baik
- Indeks 70 – 89,9 = Baik

- Indeks 50 – 69,9 = Sedang
- Indeks 25 – 49,9 = Buruk
- Indeks 0 – 24,9 = Sangat Buruk

Dari tabel tersebut di atas nampak bahwa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2023 realisasi sebesar 77,31 dari target yang ditetapkan sebesar 81,06 sehingga capainnya mencapai 95,37%, termasuk kategori "baik" (indeks antara 70 s.d 89,9). Capaian tersebut belum mencapai target IKLH yang ditetapkan dalam tahun 2023.

Permasalahan pokok dalam urusan lingkungan hidup adalah terjadinya Menurunnya kualitas sumber daya alam ditunjukkan dengan tingkat eksploitasi ikan maupun penambangan liar. Selain itu, kondisi ini diperparah oleh rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan dan perlindungan lingkungan sehingga masyarakat juga terus melakukan eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan konsekuensinya. Hal ini berujung pada tingginya kerusakan lahan yang berujung pada meningkatnya resiko bencana alam yang terkait dengan perubahan iklim seperti banjir dan kekeringan. Sedangkan, belum optimalnya penanganan dan pengendalian bencana banjir, longsor, dan kekeringan juga merupakan permasalahan yang mendasar. Strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah Revitalisasi pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan serta Penegakan hukum secara konsisten terhadap perusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dan arah kebijakan adalah;

- Mengembangkan sistem informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup secara terpadu.
- Mempertahankan daya dukung lahan.
- Meningkatkan pencegahan dan penanganan lahan kritis.
- Meningkatkan pencegahan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- Meningkatkan pencegahan pembalakan liar, penambangan liar dan perusakan lingkungan hidup.
- Meningkatkan pemberian sanksi hukum bagi pelaku pembalakan liar, penambangan liar dan perusak lingkungan.

- **Sasaran 10 Meningkatnya keamanan dan ketertiban wilayah.**

Dari tabel diatas diketahui bahwa **Sasaran Meningkatnya kualitas penyelenggaraan tatakelola pemerintahan** dengan indikator Indeks Rasa Aman, pada tahun 2023 bahwa indikator sasaran tersebut belum ada capaian rata-rata sasarannya karena belum dilakukan survei Indeks Rasa Aman oleh dinas penanggungjawab yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan DAMKAR Daerah. Strategi Pemerintah Kabupaten Morowali Utara yaitu Meningkatkan budaya hukum dan menegakan hukum secara adil, konsekuen, diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil dengan arah kebijakan Peningkatan jaminan keamanan dan ketertiban lingkungan, percepatan penyelesaian pelanggaran keamanan, ketentraman, dan ketertiban, peningkatan jaminan kemanan dan ketertiban lingkungan.

Untuk diketahui bahwa dimensi yang menunjang Indeks Rasa Aman adalah Rasio jumlah anggota linmas terhadap jumlah RT (Permendagri Nomor 26 Tahun 2020) tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, satu RT sekurang kurangnya 1 Satlinmas, Tahun 2023 terdapat Pengukuhan sebanyak 1.250 personil perbandingan satu anggota Linmas dalam satu desa di Kabupaten Morowali Utara yaitu 1:10. Penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang diselesaikan pada tahun 2023 sebanyak 42 gangguan yang dan tertangani semua sehingga capaiannya 100% jumlah kasus pelanggaran yang ditemukan sebanyak 42 sudah tertangani melalui yustisi/hukum. Pelanggaran Peraturan Daerah yang ditangani tahun 2023 tercapai 100% yaitu Kasus pelanggaran yang ditemukan sebanyak 120 seluruhnya tertangani.

- **Sasaran 11 Meningkatnya Kualitas Infrastuktur Daerah.**

Diketahui bahwa Sasaran **Meningkatnya Kualitas Infrastuktur Daerah** dengan indikator Indeks Infrastuktur Daerah, pada tahun 2023 bahwa indikator sasaran tersebut capaian rata-rata sasarannya sebesar 59,36%, dengan predikat rendah. Kondisi wilayah geografis Kabupaten Morowali Utara yang luas dan tidak meratanya penyebaran penduduk terutama pada daerah–daerah wilayah perdesaan, daerah perdalaman, dan terpencil menjadi penyebab terjadinya kesenjangan pembangunan. Kesenjangan tersebut juga ditunjukkan dengan belum memadainya aksesibilitas dan jangkauan pelayanan terhadap sarana dan prasarana infrastruktur antar daerah kecamatan seperti jalan dan jembatan, transportasi, irigasi teknis dan non teknis, perumahan dan pemukinan, telekomunikasi serta kelistrikan. Infrastruktur yang baik adalah modal fisik bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi dan usaha produktif. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan tingkat kesejahteraan masyarakat tidak mungkin dicapai tanpa jaminan ketersediaan infrastruktur yang baik dan memadai. Dengan kata lain, Pertumbuhan ekonomi akan terhambat apabila ketersediaan infrastruktur daerah belum tersedia dengan baik. Kinerja Jaringan jalan berdasarkan kondisi dapat dikatagorikan dengan jalan kondisi baik, sedang, rusak dan rusak berat. Kinerja jaringan jalan berdasarkan kondisi dapat dikategorikan dengan jalan kondisi baik, sedang, rusak, dan rusak berat. Kinerja Sistem Irigasi kewenangan Kabupaten masih belum optimal, di sisi lain daerah irigasi merupakan kewenangan Provinsi juga mengalami masalah. Kurang optimalnya kinerja sistem irigasi disebabkan antara lain oleh jaringan irigasi baik kewenangan Kabupaten maupun provinsi dan pusat banyak dalam kondisi rusak berat dan ringan sehingga kedepan perbaikan infrastruktur sangat di perlukan. Infrastruktur adalah fasilitas yang dibutuhkan khalayak umum guna mendukung kegiatan dan kehidupan kesehariannya. Infrastruktur juga dapat disimpulkan sebagai segala fasilitas, termasuk dalam bentuk fisik dan non-fisik yang dibangun pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam ruang lingkupnya yang meliputi sektor dan aspek sosial-ekonomi. Indeks Infrastruktur mengukur secara agregat dari beberapa jenis infrastruktur yang antara lain meliputi jalan dan jembatan, saluran irigasi dan drainase, pemenuhan bangunan sesuai standar, pengurangan sampah, pengangkutan sampah, level of service(peningkatan jalaan), kampung tangguh bencana, evakuasi korban bencana, rehabilitasi dan konstruksi, ketepatan waktu rekomendasi proteksi kebakaran, edukasi proteksi kebakaran, response time. Strategi serta upaya Pemerintah Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2023 untuk meningkatkan indeks Infrastruktur Daerah kabupaten Morowali Utara antara lain;

a. jalan dan jembatan
b. saluran irigasi dan drainase
c. Kualitas PJU
d. pengurangan sampah
e. pengangkutan sampah
f. edukasi proteksi kebakaran
g. response time

- **Sasaran 12 Meningkatnya Konektivitas Wilayah**

Diketahui bahwa Sasaran **Meningkatnya Konektivitas Wilayah,** dengan indikator Rasio Konektivitas Kabupten, Realisasi kinerja indikator Rasio Konektivitas Kabupaten tahun 2023 sebesar 0,61 dari target yang ditetapkan sebesar 0,75 sehingga capaian rata-rata sasarannya mencapai 81,33%, dengan predikat tinggi akan tetapi belum mencapai target yang ditetapkan. realisasi kinerja indikator Rasio Konektivitas tahun 2023 sebesar 0,61 dari target yang ditetapkan sebesar 0,85 sehingga capaiannya

mencapai 71,76% belum mencapai target yang ditetapkan. Realisasi pencapaian target tersebut diperoleh dengan perhitungan yaitu: 0.6x0.8+0,33x0,42=0,61 dimana IK1 (Angkutan Jalan) = 3 x 0.8 /4 = 0.6 dan IK2 (Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan) = 3 x 0,42/4 = 0.33 (IK1 diperoleh dari penjumlahan jumlah trayek yang dilayani pada Kabupaten Morowali Utara, bobot trayek, serta jumlah kebutuhan trayek dan (IK2 diperoleh dari jumlah angkutan sungai, danau dan penyeberangan (jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pada kabupaten), jumlah bobot lintas serta jumlah kebutuhan lintas penyeberangan). Dan selanjutnya kegiatan tersebut didukung oleh indikator kinerja Dinas Perhubungan daerah Kabupaten Morowali Utara yaitu Kemantapan Jalan Kabupaten, Persentase desa dengan akses angkutan Umum dan Kinerja Lalu Lintas Kabupaten.. Dan selanjutnya kegiatan tersebut didukung oleh indikator kinerja Dinas Perhubungan daerah Kabupaten Morowali Utara yaitu Kemantapan Jalan Kabupaten, Persentase desa dengan akses angkutan Umum dan Kinerja Lalu Lintas Kabupaten. Strategi yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam meningkatkan keterkaitan (konektivitas) antar desa dan antar kecamatan dengan ibukota kabupaten, dan antara Kabupaten Morowali Utara dengan kabupaten/ kota lainnya adalah dengan Pengembangan sistem transportasi terpadu. Dan arah kebijakan yang dilakukan antara lain;

- Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, serta sarana transportasi darat.
- Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan dermaga dan pelabuhan, serta sarana transportasi sungai dan laut.
- Pembangunan dan Peningkatan Prasarana Transportasi Jalan dan Jembatan.
- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Transpotasi Jalan dan jembatan.
- Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kebinamagaan.
- Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prsarana Kebinamagaan

- **Sasaran 13 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Tatakelola Pemerintahan.**

Diketahui bahwa **Sasaran Meningkatnya kualitas penyelenggaraan tatakelola pemerintahan** dengan 4 indikator Yaitu Predikat SAKIP, Indeks Reformasi Birokrasi, Nilai LPPD dan Opini BPK capaian rata-rata sasarannya sebesar 77,12%, dengan predikat tinggi. Keberhasilan yang diperoleh dari masing-masing indikator telah dipaparkan diatas, Keberhasilan atau kegagalan peningkatan/penurunan kinerja serta alaternatif solusi yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara misalnya pada peningkatan predikat SAKIP dan indeks RB pada tahun 2023 berdasarkan hasil dievaluasi pada pertengahan tahun 2023 nilainya untuk RB sebesar 51,76/CC dan predikat SAKIP sebesar 53,35/CC, selanjutnya untuknilai LPPD belum dirilis sampai disusunnya laporan LPPD tahun anggaran 2023 sementara untuk opini BPK masih menggunakan realisasi tahun 2022 yaitu. Tindak lanjut terhadap perbaikan nilai SAKIP/LAKIP dan RB, LPPD bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara akan berupaya memperbaiki kualitas perencanaan kinerja melalui langkah-langkah yaitu mereviu dan memperbaiki dokumen perencanaan baik tujuan dan sasaran, IKU yang digunakan serta ketepatan menentukan target-target jangka pendek dan jangka menengah, memperbaiki dokumen perjanjian kinerja pada tahun 2024 ditingkat satuan kerja dari level eselon II, eselon III, eselon IV/JF serta staf atau pelaksana secara berjenjang, dan melakukan reviu terhadap program, kegiatan serta komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan IKU dan menyusun rencana aksi sebagai rincian perjanjian kinerja dengan menentukan target kinerja secara priodik/triwulan, beberapa hal penting dari penilaian akuntabilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah sebagai berikut:

a. Nilai merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara.

b. Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara belum membangun akuntabilitas kinerja dengan OPD dengan system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja.
c. Secara umum, evaluasi atas kinerja Pemerintah daerah Kabupaten Morowali Utara adalah cukup memuaskan, namun ada beberapa hal atau solusi yang diperlukan guna perbaikan kedepan yaitu:
    - Pada aspek perencanaan: dimana tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra OPD belum sepenuhnya dilengkapi dengan indikator kinerja yang relepan dan terukur, rencana kerja tahunan OPD masih sebatas formalitas tidak dijadikan dasar pengajuan anggaran periode berikutnya. Hal tersebut mengurangi esensi keterkaitan antara anggaran yang diajukan dengan kinerja yang direncanakan.
    - Pada aspek pengukuran kinerja: IKU yang digunakan sebagai alat ukur keberhasilan tujuan/sasaran strategis belum menggambarkan hasil, dan belum cukup untuk mengukur keberhasilan atas pencapaian tujuan/sasaran strategis khususnya ditingkat OPD.
    - Pada aspek pelaporan kinerja: Laporan kinerja OPD belum sepenuhnya menggambarkan perbandingan kinerja yang memadai dan belum dapat menyajikan atau mengaitkan secara langsung informasi atau realisasi keuangan dengan sasaran atau outcome yang akan diwujudkan.
    - Pada aspek evaluasi kinerja: perlu diperhatikan bagi pihak APIP untuk lebih memahami terhadap sistem AKIP, sehingga mampu menggunakan instrument secara maksimal dan menerpkan professional judgment secara tepat.

Pada aspek capaian kinerja: yang perlu diperhatikan adalah capaian indikator outcome yang mempersentasikan sasaran dan kemajuan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara telah berupaya melakukan perbaikan dan tindak lanjut terhadap rekomendasi yang telah dikeluarkan Kementerian PAN RB pada tahun sebelumnya, diantaranya adalah sebagai berikut;

1. Telah Membentuk Tim Reformasi Birokrasi
2. Telah ada upaya perbaikan terhadap komponen hasil
3. Telah ada upaya pengelolaan Sistem SPBE
4. Telah melakukan penyederhanaan birokrasi
5. Telah melakukan penyetaraan jabatan
6. Telah menyusun proses bisnis dan sop di lingkungan Pemerintah Daerah.

Selain dari itu Pemerintah Kabupaten Morowali Utara juga berupaya meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi, namun terdapat hal-hal yang masih diperhatikan untuk mengoptimalkan programreformasi birokrasi diantaranya:

1. Implementasi program reformasi birokrasi masih fokus ditingkat Pemerintah Daerah, sedangkan di tingkat Peragkat Daerah belum sepenuhnya merata dan berjalan optimal. Selain itu pelaksanaan reformasi birokrasi masih berfokus pada pemenuhan dokumen sebagai hasil dari pelaksanaan kegiatan, sehingga belum memberikan dampak perubahan yang signifikan.
2. Pemerintah Kabupaten Morowali Utara sudah menyusun rencana aksi pelaksanaan reformasi birokrasi namun belum menggambarkan hasil/sasaran yang akan diwujudkanbeserta denganukuran keberhasilannya. Selain itu monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksibelum dilaksanakan secara berkala, pengendalian terhadap ketercapian target perubahan belum berjalan secara optimal.

3. Telah menunjuk agen perubahan sebagai pelopor perubahan, namun agen perubahan tersebut memiliki agenda kerja yang mampu mendorong peningkatan budaya kerja dan perubahan pada organisasi.
4. Telah melakukan identifikasi dan pemetaan terhadap terhadap sebagian kebijakan namun belum sepenuhnya melakukan harmonisasi dan revisi terhadap kebijaakan-kebijakan yang menghambat.
5. Penyederhanaan birokrasi telah dilakukan dengan menetapkan SOTK baru, namunpenyesuaian proses bisnis dan SOP untuk mendukung alur kerja belum selesai dilaksanakan secara menyeluruh pada Perangkat Daerah serta belum dilakukan evaluasi hasil pelaksanaan prose bisnis dan SOP.
6. Masih perlu ditingkatkan pengelolaan manajemen SDM mulai dari analisis beban kerja,identifikasi pengembangan pegawai, penyusunan standar kompetensi jabatan dan pemanfaatan sistem kepegawaian organisasi untuk memberikan kemudahan akses data kepegawaian.
7. Penerapan manajemen kinerja pada tata kelola akuntabilitas kinerja masih perlu ditingkatkan.
8. Penguatan kebijakan pengawasan internal dan integritas, seperti penanganan gratifikasi, WBS, pengelolaan pengaduaan masyarakat, kebijakan benturan kepentingan serta penerapan SPIP sudah dibentuk,namun belum dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
9. Belum dilakukan penetapan dan pembangunan zona integritas secara menyeluruh.
10. Survei kepuasan masyarakat dan evaluasi SOP pelayanan belum dilakukan secara berkala sehingga belum dapat memberikan umpan balik dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan hasil evaluasi dan untuk meningkatkan tata kelola birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas, kinerja dan melayani, maka perlu disempurnakan yaitu:

1. Melakukan penguatan dan penajaman program reformasi birokrasi pada tingkat Pemerintah Daerah sampai ke level Perangkat Daerah.
2. Menyusun kegiatan yang terpadu berdasarkan pada penetapan prioritas perbaikan yang dilakukan oleh organisasi.
3. Memaksimalkan peran Agen Perubahan dengan memilki rencana aksi selaras dan tepat mengacu pada isu masalah unit kerja maupun organisasi, dan dapat menciptakan budaya kerja yang lebih baik, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas keberhasilan Agen Perubahan.
4. Membangun budaya kerja pada tingkat Pemerintah Daerah maupun pada tingkat Perangkat Daerah dengan menerapkan nilai-nilai ASN Berakhlak.
5. Optimalisasi area deregulasi kebijakan.
6. Menyusun peta proses bisnis dan SOP.
7. Optimalisasi implementasi SPBE.
8. Mengoptimalkan perbaikan manajemen SDM secara menyeluruh.
9. Meningkat Implementasi SAKIP.
10. Membangun aplikasi manajemen kinerja yang terintegrasi.
11. Memanfaatkan zona integritas.
12. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan penanganan pengaduan masyaarakat dan keterbukaan informasi publik.
13. Meningkatkan kualitas pelanyanan publik, serta mendorong lahirnya inovasi-inovasi dalam hal pelayanan.

Untuk indikator nilai LPPD dan Opini BPK tersebut belum di ketahui nilainya karena belum dirilis hasilnya dari Kementerian Dalam Negeri dan BPK pada tahun 2023 ini sampai disusunnya LAKIP tahun 2023 realisasi yang dituangkan adalah realisasi tahun lalu yaitu WTP. Strategi yang digunakan oleh Pemerintah Daerah adalah dengan Mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan daerah dan mengefektifkan peran APIP. Pengawsan ini pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang dicapai. Melalui pengawasan ini diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efesien, utamanya penyelesaian atas rekomendasi BPK.

3.1.3 Analisis Atas Efesiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mencapai sasaran yang telahditentukan, diperlukan sumber daya yang tepat dan efesien guna mendukung keberhasilan capaian kinerja Pemerintah Daerah, Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Per-Sasaran Pembangunan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tabel 110 sebagai berikut;

Tabel. 110
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Per Sasaran Pembangunan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN RATA-RATA SASARAN KINERJA %	REALISASI CAPAIAN ANGGARAN (Rp)	TINGKAT EFISIENSI
	MISI 1	Meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan fisik), afordabilitas (keterjangkauan biaya), dan mutu pelayanan kesehatan secara merata					
	TUJUAN 1	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat					
1	Meningkatnya mutu layanan kesehatan masyarakat	1	Angka Harapan Hidup	Tahun	69,97		
		Tingkat Pencapaian sasaran I			99,24	81	17,61
	MISI 2	Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing					
	TUJUAN 2	Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat					
2	Meningkatkan jangkauan layanan Pendidikan dasar	1	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Tahun	12,29		
		2	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	Tahun	8,94		
		Tingkat Pencapaian sasaran 2			98,82	53	45,67

	TUJUAN 3	Meningkatkan peran Perempuan dalam Pembangunan menuju keadilan dan kesetaraan Gender					
3	Meningkatnya partisipasi perempuan	1	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	96,53		
		Tingkat Pencapaian sasaran 3			90,00%	96,04	- 1,57
	TUJUAN 4	Meningkatnya inovasi, Keterampilan dan produktivitas angkatan Kerja					
4	Meningkatnya peluang lapangan kerja	1	Tingkat Penggangguran Terbuka (TPT)	%	2,23		
		Tingkat Pencapaian sasaran 4			47,44	106,31	5,14
5	Meningkatnya kualitas Inovasi daerah	1	Indeks Inovasi daerah	Indeks	35,18 poin (Inovativ)		
		Tingkat Pencapaian sasaran 5			100,51		
	Misi 3	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditopang oleh kapasitas masyarakat mengelola potensi wilayah					
	Tujuan 5	Mewujudkan ekonomi daerah yang berdaya saing					
6	Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor strategis daerah	1	PDRB Perkapita	%	10,45%		
		Tingkat Pencapaian sasaran 6			107,73%	88,94	- 89
7	Meningkatnya kemudahan berinvestasi Rata-rata Pertumbuhan Nilai Investasi (PMA+PMDN)	1	Nilai Pertumbuhan Investasi (PMA + PMDN)	%	9.708.359.000.000		
		Tingkat Pencapaian sasaran 7			200,90	106,31	71,09
	Tujuan 6	Mewujudkan pembangunan desa yang berkualitas					
8	Meningkatnya kemandirian desa	1	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,6958 (berkembang)		
		Tingkat Pencapaian sasaran 8			98,38	94	6
	Tujuan 7	Memantapkan pengelolaan sumberdaya alam lingkungan secara berkelanjutan					
9	Terjaganya fungsi dan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	77,31		
		Tingkat Pencapaian sasaran 9			95,37	74,30	-5,29

	Tujuan 8	Mewujudkan kondisi yang tertib, aman, dan demokratis					
10	Meningkatnya keamanan dan ketertiban wilayah	1	Indeks Rasa Aman	Indeks	0		
		Tingkat Pencapaian sasaran 10			0	99,57	-99,57
	Misi 4	Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan infrastruktur wilayah untuk menunjang konektivitas dan pemerataan wilayah					
	Tujuan 9	Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur daerah					
11	Meningkatnya kualitas Infrastuktur Daerah	1	Indeks Infrastruktur Daerah	Indeks	0,282		
		Tingkat Pencapaian sasaran 11			59,36	82,36	-19,05
12	Meningkatnya Konektivitas Wilayah	1	Rasio Konektivitas Kabupaten		0,61		
		Tingkat Pencapaian sasaran 12			71,76	55,84	25,49
	Misi 5	Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik					
	Tujuan 10	Meningkatkan kinerja pelayanan Publik					
13	Terwujudnya pemerintahan yang efisien dan efektif	1	Predikat SAKIP	Kategori	50,33/CC		
		2	Indeks RB	Indeks	49,81/CC		
		3	Nilai LPPD	Poin	N/A		
		4	Opini BPK	Kategori	WTP		
		Tingkat Pencapaian sasaran 13			77,12	85,20	-13,20

3.1.4 Program Yang Menunjang Pencapaian Kinerja Tahun 2023

Adapun jumlah program yang menunjang pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel. 111
Program Yang Menunjang Pencapaian Kinerja Tahun 2023

A. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar		
I. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Daerah		
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	14.575.226.674,00
2.	Program Pengelolaan Pendidikan	68.776.735.865,00
3.	Program Pengembangan Kurikulum	607.848.994,00
4.	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	1.378.964.600,00
5.	Program Pengembangan Kebudayaan	147.055.200,00
6.	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	346.490.500,00
7.	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	246.269.758,00
II. Dinas Kesehatan Daerah		
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	16.370.134.203,00
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	52.367.276.374,00
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	44.703.800,00
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	29.343.500,00
III. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan kawasan Permukiman Daerah		
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.196.846.733,00
2.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	7.360.636.515,00
3.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	11.378.213.253,00

4.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	952.980.000,00
5.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	3.225.717.062,00
6.	Program Pengembangan Permukiman	17.673.012.485,00
7.	Program Penataan Bangunan Gedung	23.897.494.500,00
8.	Program Penyelenggaran Jalan	91.221.644.797,00
9.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	159.480.750,00
10.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	2.873.960.250,00
11.	Program Kawasan Permukiman	362.380.000,00
12.	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	3.366.779.400,00
13.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	628.496.944,00
14.	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	49.991.850,00
IV. Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran		
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.783.319.609,00
2.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	902.407.250,00
3.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	579.775.910,00
V. Dinas Sosial Daerah		
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**
1.	Program Penunjang Urusan Pemetintah Daerah	1.713.829.228,00
2.	Program Pemberdayaan Sosial	554.695.550,00
3.	Program Rehabilitasi Sosial	460.922.900,00
4.	Pogram Perlindungan dan Jaminan Sosial	2.707.024.900,00
5.	Program Penanganan Bencana	347.262.250,00
B. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar		
I. Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Daerah		

1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	1.224.605.847,00
2.	Program Penempatan Tenaga Kerja	901.714.900,00
3.	Program pengembangan wilayah transmigrasi	4.511.601.700,00
4.	Program Hubungan Industrial	171.538.000,00
II. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemeberdayaan Permpuan Dan Perlindungan Anak Daerah		
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.797.318.943,00
2.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	4.436.462.645,00
3.	Program Pengendalian Penduduk	226.930.050,00
4	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Kualitas Keluarga Sejahtera (KS)	241.939.936,00
5	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	424.999.500,00
6	Program Perlindungan Perempuan)	124.596.100,00
7	Program Perlindungan Khusus Anak	254.504.000,00
8	Program Pemenuhan Hak Anak(PHA)	54.779.000,00
III. Dinas Lingkungan Hidup Daerah		
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.133.060.062,50
2.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	535.942.850,00
3.	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	38.405.550,00
4.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	20.900.800,00
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	84.148.150,00
6	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh	34.055.600,00
7	Program Peningkatan Pendidikan,Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	73.015.100,00
8	Program Pengelolaan Persampahan	2.296.499.000,00
IV. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Daerah		

No	Program Pendanaan	Anggaran (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	2.125.146.930,00
2.	Program Pendaftaran Penduduk	1.022.504.558,00
3.	Program Pencatatan Sipil	121.718.040,00
4.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	164.223.000,00
5.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	20.613.400,00
V. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah		
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.696.764.485,00
2.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	975.087.168,00
3.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	3.254.356.746,00
VI. Dinas Perhubungan Daerah		
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	6,475,144,519,00
2.	'Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	6,404,910,000,00
3.	Program Pengelolaan Pelayaran	3.101.006.757,00
VII. Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah		
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**
1.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	1.846.915.191,00
2.	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	817.046.106,00
3.	Program pengelolaan Aplikasi Informatika	6.144.088.544,00
4.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	123.574.700,00
5.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	77.944.100,00
VIII. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Daerah		

No	Program Pendanaan	Anggaran (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.110.047.307,00
2.	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	30.000.000,00
3.	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	29.999.300,00
4.	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	30.000.000,00
5.	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	30.000.000,00
6.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro	260.000.000,00
7.	Program Pengembangan Umkm	1.093.467.500,00
8.	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	15.000.250,00
9.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	649.400.001,00
10.	Program Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	270.000.000,00
11.	Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen	36.499.950,00
12.	Program Perencanaan Dan Pengembangan Industri	176.949.300,00
13.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabuapten/Kota	20.000.000,00
14.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	50.000.000,00
IX.	**Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Daerah**	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.562.787.282,00
2.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	93.380.950,00
3.	Program Promosi Penanaman Modal	511.366.980,00
4.	Program Pelayanan Penanaman Modal	230.574.700,00
5.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	590.319.200,00
6.	Program Pengelolaan Data Dan Siste Informasi	65.911.000,00
X.	**Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah**	
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**

1.	Program Penunjang urusan pemerintahan Daerah	1.007.945.224,00
2.	Program Pembinaan Perpustakaan	865.011.386,00
3.	Program Pengelolaan Arsip	267.465.233,00
C. Urusan Pemerintah Pilihan		
I. Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga Daerah		
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.446.430.647,00
2.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.220.942.000,00
3.	Program Pemasaran Pariwisata	1.214.603.700,00
4.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	192.494.113,00
5.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	5.193.381.307,00
6.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	480.000.000,00
II. Dinas Perikanan Daerah		
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.769.494.048,00
2.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	4.551.206.200,00
3.	Program Pengelolaan Perikanan Budaya	2.645.938.200,00
4.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	172.870.800,00
III. Dinas Pertanian Dan Pangan Daerah		
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**
1.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	389.646.590,00
2.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	42.558.900,00
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	19.148.712.049,00
4.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	19.694.246.918,00
5.	Program Penyediaan Dan Pengembangan sarana Pertanian	8.843.273.050,00

6.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	277.379.803,00
7.	Program Perizinan Usaha Pertanian	245.032.100,00
8.	Program Penyuluhan Pertanian	1.413.121.790,00
9.	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	53.939.300,00
D. Urusan Penunjang		
I. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.494.077.267,00
2.	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.385.977.400,00
3.	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	424.177.115,00
4.	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	415.992.000,00
II. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.290.585.550,00
2.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	5.157.247.068,00
3.	Program Pengelolaan Barang milik daerah	1.210.430.683,00
III. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.671.308.903,00
2.	Program Kepegawaian Daerah	2.887.539.135,00
3.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.283.637.700,00
IV. Badan Pendapatan Daerah		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.725.656.274,00
2.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.665.962.762,00
V. Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.050.013.816,00
2.	Program Penanggulangan Bencana	14.176.315.350,00
VI. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.385.473.243.00

2.	Program peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	10.367.430.000.00
3.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Kewaspadaan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.	1.383.205.292.00
4.	Program Pembinaa dan Pengemnnagan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	271.059.000.00
E. Sekretariat Daerah		
I. Bagian Administrasi Pemerintahan		
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.346.323.900,00
2.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	6.188.497.154,00
II. Bagian Kesejahteraan Rakyat		
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	822.019.150,00
2.	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	40.607.499.222,00
III. Bagian Hukum Daerah		
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	685.006.229,00
2.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	333.406.900,00
IV. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya alam		**Anggaran (Rp)**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	626.534.950,00
2.	Program Perekonomian dan Pembangunan	198.464.500,00
V. Bagian Administrasi Pembangunan Dan Sumber Daya Alam Daerah		
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**
1.	Program Penunjang Urusan Pemrintahan Daerah	391.876.600,00
2.	Program Perekonomian Dan Pembangunan	358.348.050,00
VI. Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa		
No	**Program Pe ndanaan**	**Anggaran (Rp)**

1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.050.769.850,00
2.	Program Perekonomian Dan Pembangunan	916.230.000,00
VII. Bagian Umum Dan Perlengkapan		
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	21.560.280.933,00
VIII. Bagian Organisasi Daerah		
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**
1.	Program penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.112.309.004,00
IX. Bagian Hubungan Masyarakat Dan Protokoler Daerah		
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	2.098.359.100,00
F. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten\ Kota	14.020.890.006,00
2.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	7.827.422.800,00
G. Inspektorat Daerah		
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten\ Kota	7.371.910.248,00
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	3.366.209.450
H. RSUD Kolonodale		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	20.763.629.119,00
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	42.159.958.578,00
I. Kecamatan		
J. Kecamatan Petasia		
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.193.494.283,00
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa & Kelurahan	928.666.007,00
II. Kecamatan Lembo		

No	Program Pendanaan	Anggaran (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.253.848.820,00
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa & Kelurahan	6.990.000,00
III. Kecamatan Mori Atas		
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.963.262.054,00
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	142.628.762,00
IV. Kecamatan Bungku Utara		
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	4.278.679.494,00
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	34.400.000,00
V. Kecamatan Soyo Jaya		
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	1.938.426.404.00
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	148.645.000.00
VI. Kecamatan Mamosalato		
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	372.606.250,00
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	239.393.500,00
VII. Kecamatan Lembo Raya		
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	2.253.848.820,00
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	6.990.000,00
VIII. Kecamatan Mori Utara		
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	339.304.724,00
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	42.100.000,00
IX. Kecamatan Petasia Timur		
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**

1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabpaten / Kota	751.658.385,00
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	70.331.200,00
X. Kecamatan Petasia Barat		
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.540.500.491,00
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	178.198.000,00

2.2. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam RPJMD Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara, di mana arah dan kebijakan umum diupayakan pada program-program prioritas untuk mencapai sasaran pembangunan daerah yaitu pelayanan publik dan pelaksanaaan Pemerintah Daerah. Pelaksanaan program tersebut dilakukan secara berkesinambungan untuk mencapai target yang diinginkan dalam jangka waktu lima tahun.

Kebijakan penganggaran daerah diarahkan untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan yang merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi APBD merupakan kerangka kebijakan publik guna melaksanakan hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat. Penganggaran tersebut mengacu pada norma dan prinsip anggaran yang transparansi, akuntabel, disiplin, berkeadilan, efesiensi serta efektif.

Dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan untuk efisien, efektif dan proporsional. Belanja daerah ini disusun berdasarkan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan urgensi setiap Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara periode tahun 2023 memaparkan capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam bidang keuangan, yaitu membandingkan antara anggaran dan realisasi dari pencapaian program dan kegiatan. Akuntabilitas keuangan mempresentasikan realisasi keuangan yang telah dikelola dan menjadi keharusan setiap akhir tahun anggaran untuk dipertanggungjawabkan.

Anggaran yang dipertanggungjawabkan pada tahun 2023 Pagu Anggaran sebesar **Rp.743.972.390.116,50,** sedangkan untuk realisasinya sebesar **Rp.627.243.035.318,00.** Anggaran ini sudah terbagi dalam 46 Perangkat Daerah (PD) yang sudah terjabarkan dalam program dan kegiatan sebagaimana dalam DPA Perubahan tahun 2023, dengan realisasi pada tabel berikut :

Tabel. 112
Perencanaan dan Realisasi Anggaran Tahun 2023

A	**Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**			
I	**Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Daerah**			
No	**Program Pendanaan**	**Pagu Anggaran (Rp)**	**Realisasi Anggran (Rp)**	**Capaian**
	Total anggaran Program Pendanaan	**86.078.591.591,00**	**58.814.637.745,00**	**68,32**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	14.575.226.674,00	13.762.134.449,00	94,42%
2.	Program Pengelolaan Pendidikan	68.776.735.865,00	42.635.862.821,00	61,99%
3.	Program Pengembangan Kurikulum	607.848.994,00	589.576.755,00	96,99%
4.	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	1.378.964.600,00	1.207.573.823,00	87,57%
5.	Program Pengembangan Kebudayaan	147.055.200,00	145.880.880,00	99,20%
6.	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	346.490.500,00	227.522.912,00	65,66%
7.	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	246.269.758,00	246.086.105,00	99,92%
II	**Dinas Kesehatan Daerah**			
No	**Program Pendanaan**	**Pagu Anggaran (Rp)**	**Realisasi Anggran (Rp)**	**Capaian**
	Total anggaran Program Pendanaan	**68.811.457.877,00**	**47.916.641.321,00**	**69,63**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	16.370.134.203,00	12.092.438.306,00	73,86%
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	52.367.276.374,00	35.752.553.815,00	68,27%
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	44.703.800,00	44.569.200,00	99,69%
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	29.343.500,00	27.080.000,00	92,28%
III	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan kawasan Permukiman Daerah**			
NO	**Program Pendanaan**	**Pagu Anggaran (Rp)**	**Realisasi Anggran (Rp)**	**Capaian**
	Total anggaran Program Pendanaan	**167.347.634.539,00**	**151.108.069.146,00**	**90,29%**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.196.846.733,00	4.049.801.559,00	96,49%
2.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	7.360.636.515,00	6.807.793.198,00	92,48%

3.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	11.378.213.253,00	10.307.047.547,00	90,58%
4.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	952.980.000,00	549.946.000,00	57,70%
5.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	3.225.717.062,00	3.219.287.000,00	99,80%
6.	Program Pengembangan Permukiman	17.673.012.485,00	17.402.742.500,00	98,47%
7.	Program Penataan Bangunan Gedung	23.897.494.500,00	17.107.370.155,00	71,58%
8.	Program Penyelenggaran Jalan	91.221.644.797,00	84.373.215.857,00	92,49%
9.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	159.480.750,00	131.327.227,00	82,34%
10.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	2.873.960.250,00	2.832.392.738,00	98,55%
11.	Program Kawasan Permukiman	362.380.000,00	361.970.000,00	99,88%
12.	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	3.366.779.400,00	3.293.317.196,00	97,81%
13.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	628.496.944,00	621.896.319,00	98,94%
14.	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	49.991.850,00	49.961.850,00	99,93%
IV	**Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran**			
No	**Program Pendanaan**	**Pagu Anggaran (Rp)**	**Realisasi Anggran (Rp)**	**Capaian**
	Total anggaran Program Pendanaan	**11.265.502.769,00**	**11.264.414.538,00**	**99,99%**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.783.319.609,00	9.783.612.898,00	100,00%
2.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	902.407.250,00	901.400.730,00	99,88%
3.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	579.775.910,00	579.400.910,00	99,93%
V	**Dinas Sosial Daerah**			
No	**Program Pendanaan**	**Pagu Anggaran (Rp)**	**Realisasi Anggran (Rp)**	**Capaian**
	Total anggaran Program Pendanaan	**5.783.734.828,00**	**5.415.385.888,00**	**93,63**
1.	Program Penunjang Urusan Pemetintah Daerah	1.713.829.228,00	1.613.865.532,00	94,16%
2.	Program Pemberdayaan Sosial	554.695.550,00	402.927.730,00	72,63%
3.	Program Rehabilitasi Sosial	460.922.900,00	447.222.800,00	97,02%

4.	Pogram Perlindungan dan Jaminan Sosial	2.707.024.900,00	2.613.076.400,00	96,53%
5.	Program Penanganan Bencana	347.262.250,00	338.293.426,00	97,41%
B.	**Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**			
I	**Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Daerah**			
No	**Program Pendanaan**	**Pagu Anggaran (Rp)**	**Realisasi Anggran (Rp)**	**Capaian**
	Total anggaran Program Pendanaan	**6.809.460.447,00**	**6.035.454.547,00**	**88,63**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	1.224.605.847,00	1.100.555.800,00	89,87%
2.	Program Penempatan Tenaga Kerja	901.714.900,00	486.858.433,00	53,99%
3.	Program pengembangan wilayah transmigrasi	4.511.601.700,00	4.292.928.913,00	95,15%
4.	Program Hubungan Industrial	171.538.000,00	155.111.401,00	90,42%
II	**Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemeberdayaan Permpuan Dan Perlindungan Anak Daerah**			
No	**Program Pendanaan**	**Pagu Anggaran (Rp)**	**Realisasi Anggran (Rp)**	**Capaian**
	Total anggaran Program Pendanaan	**7.561.530.174,00**	**7.267.975.739,00**	**96,11%**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.797.318.943,00	1.752.369.321,00	97,49%
2.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	4.436.462.645,00	4.358.522.832,00	98,24%
3.	Program Pengendalian Penduduk	226.930.050,00	226.529.750,00	99,82%
4.	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Kualitas Keluarga Sejahtera (KS)	241.939.936,00	240.001.910,00	99,15%
5.	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	424.999.500,00	424.999.476,00	99,99%
6.	Program Perlindungan Perempuan)	124.596.100,00	92.075.550,00	73,89%
7.	Program Perlindungan Khusus Anak	254.504.000,00	119.714.900,00	47,03%
8.	Program Pemenuhan Hak Anak(PHA)	54.779.000,00	53.762.000,00	98,14%
III	**Dinas Lingkungan Hidup Daerah**			
No	**Program Pendanaan**	**Pagu Anggaran (Rp)**	**Realisasi Anggran (Rp)**	**Capaian**
	Total anggaran Program Pendanaan	**4.216.027.112,50**	**5.612.871.820,00**	**133,13%**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.133.060.062,50	2.053.168.985,00	181,20%

2.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	535.942.850,00	1.055.460.900,00	196,93%
3.	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	38.405.550,00	36.473.500,00	94,96%
4.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	20.900.800,00	20.676.000,00	98,92%
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	84.148.150,00	83.348.400,00	99,04%
6	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh	34.055.600,00	32.728.000,00	96,10%
7	Program Peningkatan Pendidikan,Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	73.015.100,00	36.721.000,00	50,29%
8	Program Pengelolaan Persampahan	2.296.499.000,00	2.294.295.035,00	99,90%
IV	**Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Daerah**			
No	**Program Pendanaan**	**Pagu Anggaran (Rp)**	**Realisasi Anggran (Rp)**	**Capaian**
	Total anggaran Program Pendanaan	**3.454.205.928,00**	**3.411.496.925,00**	**98,76%**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	2.125.146.930,00	2.097.277.137,00	98,68%
2.	Program Pendaftaran Penduduk	1.022.504.558,00	1.010.760.406,00	98,85%
3.	Program Pencatatan Sipil	121.718.040,00	120.990.298,00	99,40%
4.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	164.223.000,00	164.044.903,00	99,89%
5.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	20.613.400,00	18.424.181,00	89,37%
V	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah**			
No	**Program Pendanaan**	**Pagu Anggaran (Rp)**	**Realisasi Anggran (Rp)**	**Capaian**
	Total anggaran Program Pendanaan	**7.926.208.399,00**	**7.665.959.187,00**	**96,71%**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.696.764.485,00	3.555.032.262,00	96,16%
2.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	975.087.168,00	948.309.212,00	97,25%

3.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	3.254.356.746,00	3.162.617.713,00	97,18%
VI	**Dinas Perhubungan Daerah**			
No	**Program Pendanaan**	**Pagu Anggaran (Rp)**	**Realisasi Anggran (Rp)**	**Capaian**
	Total anggaran Program Pendanaan	**15.981.061.276,00**	**12.388.907.780,00**	**77,52%**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	6,475,144,519,00	3.044.056.649,00	47,01%
2.	'Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	6,404,910,000,00	6,243,844,374,00	97,48%
3.	Program Pengelolaan Pelayaran	3.101.006.757,00	3.101.006.757,00	100%
VII	**Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah**			
No	**Program Pendanaan**	**Pagu Anggaran (Rp)**	**Realisasi Anggran (Rp)**	**Capaian**
	Total anggaran Program Pendanaan	**9.009.568.641,00**	**6.824.328.838,00**	**75,74%**
1.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	1.846.915.191,00	666.184.847.00	36,07%
2.	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	817.046.106,00	675.620.749.00	82.69%
3.	Program pengelolaan Aplikasi Informatika	6.144.088.544,00	5.373.617.362.00	87,45%
4.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	123.574.700,00	90.520.000.00	73,25%
5.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	77.944.100,00	18.385.880,00	23,58%
VIII	**Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Daerah**			
No	**Program Pendanaan**	**Pagu Anggaran (Rp)**	**Realisasi Anggran (Rp)**	**Capaian**
	Total anggaran Program Pendanaan	**6.801.363.608,00**	**6.688.293.806,00**	**98,34%**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.110.047.307,00	4.101.274.102,00	99,79%
2.	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	30.000.000,00	29.823.200,00	99,41%
3.	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	29.999.300,00	28.937.100,00	96,45%
4.	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	30.000.000,00	29.900.000,00	69,66%
5.	Program Pemberdayaan Dan	30.000.000,00	29.811.600,00	99,37%

	Perlindungan Koperasi			
6.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro	260.000.000,00	252.340.294,00	97,05%
7.	Program Pengembangan Umkm	1.093.467.500,00	1.013.477.500,00	92,68%
8.	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	15.000.250,00	14.771.250,00	98,47%
9.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	649.400.001,00	638.800.000,00	98,37%
10.	Program Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	270.000.000,00	268.378.500,00	99,40%
11.	Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen	36.499.950,00	35.998.850,00	98,63%
12.	Program Perencanaan Dan Pengembangan Industri	176.949.300,00	175.699.660,00	99,29%
13.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabuapten/Kota	20.000.000,00	19.793.100,00	98,97%
14.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	50.000.000,00	49.288.450,00	98,58%
IX	**Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Daerah**			
No	**Program Pendanaan**	**Pagu Anggaran (Rp)**	**Realisasi Anggran (Rp)**	**Capaian**
	Total anggaran Program Pendanaan	**14.054.340.112,00**	**4.036.506.802,00**	**28,72%**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.562.787.282,00	2.732.725.139,00	21,75%
2.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	93.380.950,00	92.078.452,00	98,60%
3.	Program Promosi Penanaman Modal	511.366.980,00	510.591.211,00	99,84%
4.	Program Pelayanan Penanaman Modal	230.574.700,00	196.844.700,00	85,37%
5.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	590.319.200,00	438.678.800,00	74,31%
6.	Program Pengelolaan Data Dan Siste Informasi	65.911.000,00	65.588.500,00	99,51%
X	**Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah**			
No	**Program Pendanaan**	**Pagu Anggaran (Rp)**	**Realisasi Anggran (Rp)**	**Capaian**
	Total anggaran Program Pendanaan	**2.140.421.843,00**	**1.683.367.237,00**	**78,64%**
1.	Program Penunjang urusan pemerintahan Daerah	1.007.945.224,00	988.549.618,00	98,07%

2.	Program Pembinaan Perpustakaan	865.011.386,00	428.868.386,00	49,57%
3.	Program Pengelolaan Arsip	267.465.233,00	265.949.233,00	99,43%
C	**Urusan Pemerintah Pilihan**			
I	**Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga Daerah**			
No	**Program Pendanaan**	**Pagu Anggaran (Rp)**	**Realisasi Anggran (Rp)**	**Capaian**
	Total anggaran Program Pendanaan	**9.747.851.767,00**	**9.236.957.878,00**	**94,75%**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.446.430.647,00	1.402.204.766,00	96,94%
2.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.220.942.000,00	1.229.590.219,00	100,70%
3.	Program Pemasaran Pariwisata	1.214.603.700,00	1.192.599.700,00	98,18%
4.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	192.494.113,00	140.442.412,00	72,95%
5.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	5.193.381.307,00	4.807.120.781,00	92,56%
6.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	480.000.000,00	465.000.000,00	96,87%
II	**Dinas Perikanan Daerah**			
No	**Program Pendanaan**	**Pagu Anggaran (Rp)**	**Realisasi Anggran (Rp)**	**Capaian**
	Total anggaran Program Pendanaan	**9.139.509.248,00**	**8.229.390.321,00**	**90,04%**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.769.494.048,00	1.730.460.121,00	97,79%
2.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	4.551.206.200,00	3.971.816.000,00	87,26%
3.	Program Pengelolaan Perikanan Budaya	2.645.938.200,00	2.366.475.400,00	89,43%
4.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	172.870.800,00	160.638.800,00	92,92%
III	**Dinas Pertanian Dan Pangan Daerah**			
No	**Program Pendanaan**	**Pagu Anggaran (Rp)**	**Realisasi Anggran (Rp)**	**Capaian**
	Total anggaran Program Pendanaan	**50.107.910.500,00**	**49.146.216.403,00**	**98,08%**
1.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	389.646.590,00	386.984.365,00	99,31%
2.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	42.558.900,00	42.134.900,00	99,00%

3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	19.148.712.049,00	19.074.935.422,00	99,61%
4.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	19.694.246.918,00	19.088.856.075,00	96,92%
5.	Program Penyediaan Dan Pengembangan sarana Pertanian	8.843.273.050,00	8.587.888.176,00	97,11%
6.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	277.379.803,00	277.167.853,00	99,92%
7.	Program Perizinan Usaha Pertanian	245.032.100,00	241.005.349,00	98,35%
8.	Program Penyuluhan Pertanian	1.413.121.790,00	1.396.463.763,00	98,82%
9.	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	53.939.300,00	50.780.500,00	94,14%
D	**Urusan Penunjang**			
I	**Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah**			
No	**Program Pendanaan**	**Pagu Anggaran (Rp)**	**Realisasi Anggran (Rp)**	**Capaian**
	Total anggaran Program Pendanaan	**4.720.226.782,00**	**4.138.104.354,00**	**87,66%**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.494.077.267,00	2.319.681.953,00	93,00%
2.	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.385.977.400,00	1.103.130.854,00	79,59%
3.	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	424.177.115,00	386.795.008,00	91,18%
4.	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	415.992.000,00	328.494.539,00	78,96%
II	**Badan Pengelolaan Keuangan Daerah**			
No	**Program Pendanaan**	**Pagu Anggaran (Rp)**	**Realisasi Anggran (Rp)**	**Capaian**
	Total anggaran Program Pendanaan	**10.658.263.301,00**	**8.629.991.687,00**	**80,96%**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.290.585.550,00	3.541.161.062,00	82,53%
2.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	5.157.247.068,00	4.089.621.835,00	79,29%
3.	Program Pengelolaan Barang milik daerah	1.210.430.683,00	999.208.790,00	54
III	**Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**			
No	**Program Pendanaan**	**Pagu Anggaran (Rp)**	**Realisasi Anggran (Rp)**	**Capaian**

	Total anggaran Program Pendanaan	**7.842.485.700,00**	**7.095.079.441,00**	**90,46%**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.671.308.903,00	2.618.587.070,00	98,02%
2.	Program Kepegawaian Daerah	2.887.539.135,00	2.242.544.128,00	43,03%
3.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.283.637.700,00	2.233.948.441,00	97,82%
IV	**Badan Pendapatan Daerah**			
No	**Program Pendanaan**	**Pagu Anggaran (Rp)**	**Realisasi Anggran (Rp)**	**Capaian**
	Total anggaran Program Pendanaan	**3.391.619.036,00**	**3.370.080.683,00**	**99,36%**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.725.656.274,00	1.705.222.114,00	98,81%
2.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.665.962.762,00	1.664.858.569,00	99,93%
V	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**			
No	**Program Pendanaan**	**Pagu Anggaran (Rp)**	**Realisasi Anggran (Rp)**	**Capaian**
	Total anggaran Program Pendanaan	**15.226.329.166,00**	**15.128.136.562,00**	**99,35%**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.050.013.816,00	1.008.917.790.00	96,08%
2.	Program Penanggulangan Bencana	14.176.315.350,00	14.119.218.772,00	99,59%
V	**Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik**			
No	**Program Pendanaan**	**Pagu Anggaran (Rp)**	**Realisasi Anggran (Rp)**	**Capaian**
	Total anggaran Program Pendanaan	**13.407.167.535,00**	**13.119.475.235,00**	**97,85**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.385.473.243.00	1.352.760.343.00	97.63%
2.	Program peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	10.367.430.000.00	10.167.430.000.00	98,07%
3.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Kewaspadaan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.	1.383.205.292.00	1.358.125.892.00	75.24%
4.	Program Pembinaa dan Pengemnnagan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	271.059.000.00	241.159.000.00	88,96 %
D	**Sekretariat Daerah**			

I	Bagian Administrasi Pemerintahan			
No	Program Pendanaan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggran (Rp)	Capaian
	Total anggaran Program Pendanaan	**7.534.821.054,00**	**988.370.105,00**	**13,11%**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.346.323.900,00	834.011.244,00	61,94%
2.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	6.188.497.154,00	154.358.861,00	2,49%
II	**Bagian Kesejahteraan Rakyat**			
No	Program Pendanaan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggran (Rp)	Capaian
	Total anggaran Program Pendanaan	**41.429.518.372,00**	**38.993.544.534,00**	**94,12%**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	822.019.150,00	772.500.530,00	93,97%
2.	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	40.607.499.222,00	38.221.044.004,00	94,12%
III	**Bagian Hukum Daerah**			
No	Program Pendanaan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggran (Rp)	Capaian
	Total anggaran Program Pendanaan	**1.018.413.129,00**	**986.184.141,00**	**96,83%**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	685.006.229,00	668.165.245,00	97,54%
2.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	333.406.900,00	318.018.896,00	95,38%
IV	**Bagian Perekonomian dan Sumber Daya alam**			
No	Program Pendanaan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggran (Rp)	Capaian
	Total anggaran Program Pendanaan	**824.999.450,00**	**749.969.087,00**	**90,90%**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	626.534.950,00	585.488.200,00	93,44%
2.	Program Perekonomian dan Pembangunan	198.464.500,00	164.480.887,00	82,87%
V	**Bagian Administrasi Pembangunan Dan Sumber Daya Alam Daerah**			
No	Program Pendanaan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggran (Rp)	Capaian
	Total anggaran Program Pendanaan	**750.224.650,00**	**436.800.500,00**	**58,22%**
1.	Program Penunjang Urusan Pemrintahan Daerah	391.876.600,00	248.454.850,00	63,40%
2.	Program Perekonomian Dan Pembangunan	358.348.050,00	188.345.650,00	52,55%

VI	Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa			
No	Program Pe ndanaan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggran (Rp)	Capaian
	Total anggaran Program Pendanaan	**3.966.999.850,00**	**3.963.451.446,00**	**99%**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.050.769.850,00	3.047.871.446,00	99%
2.	Program Perekonomian Dan Pembangunan	916.230.000,00	915.580.000,00	99%
VII	**Bagian Umum Dan Perlengkapan**			
No	Program Pendanaan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggran (Rp)	Capaian
	Total anggaran Program Pendanaan	**21.560.280.933,00**	**19.996.993.030,00**	**92,74**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	21.560.280.933,00	19.996.993.030,00	92,74%
VIII	**Bagian Organisasi Daerah**			
No	Program Pendanaan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggran (Rp)	Capaian
	Total anggaran Program Pendanaan	**1.112.309.004,00**	**925.253.114,00**	**83,18%**
1.	Program penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.112.309.004,00	925.253.114,00	83,18%
IX	**Bagian Hubungan Masyarakat Dan Protokoler Daerah**			
No	Program Pendanaan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggran (Rp)	Capaian
	Total anggaran Program Pendanaan	**2.098.359.100,00**	**1.921.566.576,00**	**91,57%**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	2.098.359.100,00	1.921.566.576,00	91,57%
E	**Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**			
No	Program Pendanaan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggran (Rp)	Capaian
	Total anggaran Program Pendanaan	**21.848.312.806,00**	**13.417.684.260,00**	**61,41%**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten\ Kota	14.020.890.006,00	12.815.520.624,00	80,45%
2.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	7.827.422.800,00	602.163.636,00	76,59%
F	**Inspektorat Daerah**			
No	Program Pendanaan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggran (Rp)	Capaian
	Total anggaran Program Pendanaan	**10.738.119.698,00**	**10.738.119.698,00**	**100%**

1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten\ Kota	7.371.910.248,00	7.371.910.248,00	100%
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	3.366.209.450	3.366.209.450	100%
G	**RSUD Kolonodale**			
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**	**Realisasi Anggaran**	**Capaian**
	Total anggaran Program Pendanaan	**62.923.587.697,00**	**53.409.998.691,00**	**84,88%**
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	20.763.629.119,00	19.117.001.100,00	81,34%
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	42.159.958.578,00	34.292.997.591,00	81,34%
H	**Kecamatan**			
I	**Kecamatan Petasia**			
No	**Program Pendanaan**	**Pagu Anggaran (Rp)**	**Realisasi Anggran (Rp)**	**Capaian**
	Total anggaran Program Pendanaan	**8.122.160.290,00**	**8.080.157.403,00**	**99,48%**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.193.494.283,00	7.165.414.396,00	99,61%
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa & Kelurahan	928.666.007,00	924.233.469,00	99,53%
II	**Kecamatan Lembo**			
No	**Program Pendanaan**	**Pagu Anggaran (Rp)**	**Realisasi Anggran (Rp)**	**Capaian**
	Total anggaran Program Pendanaan	**2.260.838.820,00**	**2.249.990.725,00**	**99,52%**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.253.848.820,00	2.243.000.725,00	99,52%
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa & Kelurahan	6.990.000,00	6.990.000,00	100%
III	**Kecamatan Mori Atas**			
No	**Program Pendanaan**	**Pagu Anggaran (Rp)**	**Realisasi Anggran (Rp)**	**Capaian**
	Total anggaran Program Pendanaan	**3.105.890.816,00**	**3.105.890.816,00**	**100%**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.963.262.054,00	2.963.262.054,00	100%
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	142.628.762,00	142.628.762,00	100 %
IV	**Kecamatan Bungku Utara**			
No	**Program Pendanaan**	**Pagu Anggaran (Rp)**	**Realisasi Anggran (Rp)**	**Capaian**

	Total anggaran Program Pendanaan	**4.313.079.494,00**	**4.289.813.838,00**	**99,46%**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	4.278.679.494,00	4.255.673.838,00	99,46%
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	34.400.000,00	34.140.000,00	99,24%I
V	**Kcamatan Soyo Jaya**			
No	**Program Pendanaan**	**Pagu Anggaran (Rp)**	**Realisasi Anggran (Rp)**	**Capaian**
	Total anggaran Program Pendanaan	**2.087.071.404,00**	**1.987.071.404,00**	**95,20%**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	1.938.426.404.00	1.838.426.404.00	92,75%
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	148.645.000.00	148.645.000.00	100%
VI	**Kecamatan Mamosalato**			
No	**Program Pendanaan**	**Pagu Anggaran (Rp)**	**Realisasi Anggran (Rp)**	**Capaian**
	Total anggaran Program Pendanaan	**611.999.750,00**	**609.195.736,00**	**99,54%**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	372.606.250,00	369.825.236,00	99,25%
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	239.393.500,00	239.343.500,00	99,79%
VII	**Kecamatan Lembo Raya**			
No	**Program Pendanaan**	**Pagu Anggaran (Rp)**	**Realisasi Anggran (Rp)**	**Capaian**
	Total anggaran Program Pendanaan	**2.260.838.820,00**	**2.249.990.725,00**	**99,52%**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	2.253.848.820,00	2.243.000.725,00	99,52%
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	6.990.000,00	6.990.000,00	100%
VIII	**Kecamatan Mori Utara**			
No	**Program Pendanaan**	**Pagu Anggaran (Rp)**	**Realisasi Anggran (Rp)**	**Capaian**
	Total anggaran Program Pendanaan	**381.404.724,00**	**381.404.724,00**	**100%**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	339.304.724,00	339.304.724,00	100%
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	42.100.000,00	42.100.000,00	100%
IX	**Kecamatan Petasia Timur**			
No	**Program Pendanaan**	**Pagu Anggaran (Rp)**	**Realisasi Anggran (Rp)**	**Capaian**
	Total anggaran Program Pendanaan	**821.989.585,00**	**821.989.585,00**	**100%**

1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabpaten / Kota	751.658.385,00	751.658.385,00	100%
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	70.331.200,00	70.331.200,00	100%
X	**Kecamatan Petasia Barat**			
No	**Program Pendanaan**	**Pagu Anggaran (Rp)**	**Realisasi Anggran (Rp)**	**Capaian**
	Total anggaran Program Pendanaan	**2.718.698.491,00**	**2.711.851.297,00**	**99,74%**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.540.500.491,00	2.533.653.297,00	92,75%
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	178.198.000,00	178.198.000,00	100%

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. **1.268.912.217.458,00** dengan rincian sebagai berikut:

1. **Pendapatan:**
   Pendapatan sebelum perubahan sebesar Rp. **1.268.912.217.458,00** setelah perubahan sebesar Rp. **1.160.261.285.814,42**
   (berkurang Rp. 108.650.931.643,58)
2. **Belanja :**
   Belanja sebelum perubahan sebesar Rp. **189.973.904.628,00** setelah perubahan menjadi Rp. **1.195.739.458.386,40**
   (bertambah Rp.221.360.767.443,6)
3. **Pembiayaan :**
   a. **Penerimaan**
      Penerimaan sebelum perubahan sebesar Rp. **189.973.904.628,00** setelah perubahan sebesar Rp. **190.974.549.361,64**
   b. **Pengeluaran**
      Pengeluaran sebelum perubahan sebesar Rp. **41.785.896.256,00** setelah perubahan menjadi sebesar Rp. **41.085.896.256,00**

3.2.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026 pengelolaan pendapatan daerah lebih diarahkan pada optimalisasi pendapatan daerah melalui efektif dan efesien serta mendapat dukungan dari masyarakat. Upaya-upaya efektif dalam penggalian sumber-sumber pendapatan daerah harus terus dilakukan tanpa harus menambah beban bagi masyarakat sehingga nantinya pendapatan daerah tidak lagi harus bergantung pada satu atau dua jenis pajak daerah saja, diversifikasi sumber pendapatan daerah menjadi mutlak dicari agar ketergantungan dan resiko dapat disebar, maka dirancang berbagai tindakan yang dapat menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang berbasiskan pada sektor primer dan mata rantainya. Pendapatan daerah dikelompokkan ke dalam Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah, masing-masing mempunyai fungsi untuk meningkatkan pelayanan baik untuk aparatur maupun pelayanan publik/masyarakat dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 113
Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023
Per 31 Desember 2023

No.	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	%
I.	**Pendapatan :**	**1.268.912.217.458,00**	**1.160.261.285.814,42**	**91,43**
1.	**Pendapatan Asli Daerah**	**198.931.000.747,00**	**97.558.742.137,42**	**49,04**
a.	Pendapatan Pajak Daerah	84.670.335.500,00	35.264.448.424,00	41,64
b.	Pendapatan retribusi Daerah	58.168.751.621,00	34.752.147.686,00	59,74
c.	Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	3.500.000.000,00	3.864.163.872,00	110,40
d.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	52.591.913.626,00	23.677.982.155,42	445,02
2.	**Pendapatan Transfer**	**1.069.981.216.711,00**	**1.062.702.543.677,00**	**99,31**
A	Pendapatan Transfer Pemerintah pusat	1.032.336.356.645,00	1.020.291.062.577,00	9,88
B	Pendapatan Transfer Antar Daerah	37.644.860.006,00	42.411.481.100,00	112,66
Jumlah pendapatan daerah		**1.268.912.217.458,00**	**1.160.261.285.814,42**	**91,43**

Sumber data : BPKD Kab. Morowali Utara Tahun 2023

3.2.2 Pengelolaan Belanja Daerah

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Morowali Utara 2021-2026 bahwa dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan efesien, efektif dan proporsional. Dalam menentukan Belanja Daerah terdapat tiga elemen penting, yaitu masyarakat, Pemerintah Daerah, dan DPRD, dengan peran fungsinya masing-masing sebagai pelayan masyarakat, sehingga anggaran belanja daerah sebagai perwujudan dari amanat rakyat kepada Pemerintah Daerah dan DPRD dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Rencana Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja (berorientasi pada hasil). Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efesiensi penggunaan alokasi anggaran. Sedangkan orientasi Belanja Daerah diperioritaskan untuk efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Belanja Daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penggunaannya, belanja harus tetap mengedepankan efesiensi dan efektifitas sesuai dengan perioritas dan program-program strategis daerah. Belanja Daerah dikelompokkan ke dalam Belanja Operasional, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Transfer yang masing-masing mempunyai fungsi untuk meningkatkan pelayanan, baik untuk aparatur maupun pelayanan publik/masyarakat dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 114
Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
Per 31 Desember 2023

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi	%
II	**BELANJA DAERAH**	**1.417.100.225.830,00**	**1.264.103.293.146,53**	**89,20**
1.	**BELANJA OPERASI**	**929.933.776.562,0**	**819.037.686.336,26**	**88,07**
a.	Belanja Pegawai	459.585.031.337,00	409.306.626.873,00	89,06
b.	Belanja Barang Dan Jasa	407.227.903.085,00	352.340.338.018,00	8,67
c.	Belanja Bunga	1.967.811.331,00	1.659.124.491,00	84,31
d.	Belanja Hibah	25.917.718.109,00	22.516.369.666,00	86,87
e.	Belanja Bantuan Sosial	35.235.312.700,00	33.215.227.228,26	94,26
2	**BELANJA MODAL**	**267.160.777.374,00**	**229.851.836.221,27**	**86,03**
a.	Belanja Modal Tanah	4.152.591.554,00	1.110.890.900,00	26,71
b.	Belanja Peralatan dan Mesin	41.767.501.151,00	34.794.363.102,00	83,30
c.	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	99.757.230.741,00	80.182.171.788,27	80,37
d.	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	121.382.253.928,00	113.670.285.431,00	93,64
e.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	94.200.000,00	94.125.000,00	99,92
f.	Belanja Modal Aset Lainnya	7.000.000,00	0,00	0,00
2.	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**3.150.000.000,00**	**140,000.000,00**	**4,44**
a.	Belanja Tidak Terduga	3.150.000.000,00	140,000.000,00	4,44
3.	**BELANJA TRANSFER**	**216.855.671.894,00**	**215.073.770.589,00**	**99,17**
a.	Belanja Bagi Hasil	944.103.854.00	933.454.571,00	98,87
b.	Belanja Bantuan Keuangan	215.911.568.040,00	214.140.316.018,00	99,17
SURPLUS/(DEFISIT)		(148.188.008.372,00)	(103.842.007.332,11)	70,07
Jumlah Belanja Daerah		**1.417.100.225.830,00**	**1.264.103.293.146,53**	**89,20**

Sumber data : BPKD Kab. Morowali Utara Tahun 2023

3.2.3 Kondisi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan yang bertujuan untuk menutupi selisih antara pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun kebijakan umum pembiayaan daerah adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Manajemen pembiayaan daerah dalam rangka akurasi, efesiensi, efektifitas, dan profitabilitas;
2. Apabila APBD dalam keadaan surplus, kebijakan yang diambil adalah melakukan transfer ke persediaan Kas Daerah dalam bentuk Giro/Deposito, Penyertaan Modal, atau Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun berjalan;
3. Apabila APBD dalam keadaan defisit, kebijakan yang diambil adalah memanfaatkan anggaran yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun lalu, rasionalisasi belanja, pinjaman daerah, atau memperluas kemitraan;

Pembiayaan Daerah dikelompokkan ke dalam Penerimaan daerah, Pengeluaran Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang masing-masing mempunyai fungsi untuk meningkatkan pelayanann baik untuk aparatur maupun pelayanan publik/masyarakat dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 115
Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023
Per 31 Desember 2023

No.	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	%
1.	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**189.973.904.628,00**	**190.974.549.361,64**	**100,52**
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	189.973.904.628,00	190.974.549.361,64	100,52
	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
2.	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**41.785.896.256,00**	**41.085.896.256,00**	**98,32**
	Penyertaan Modal Daerah	4.200.000.000,00	3.500.000.000,00	83,33
	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	37.585.896.256,00	37.585.896.256,00	100
Jumlah Pembiayaan Daerah /NETTO		**148.188.008.372,00**	**149.888.653.105,64**	**101,14**
Sisa Lebih /Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan		**0,00**	**46.046.645.773,53**	**0,00**

Sumber data : BPKD Kab. Morowali Utara Tahun 2023

BAB IV
P E N U T U P

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Morowali Utara tahun 2023 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Morowali Utara tahun 2023 dan perkembangan tahun-tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).

Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan beberapa indikator kinerja membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society*. Secara umum, nampak bahwa kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2023 adalah sangat baik, karena dari 10 tujuan dan 12 Indikator Tujuan , dengan 13 sasaran yang terdiri dari 17 indikator kinerja sasaran yang ditetapkan berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel 25 di atas dapat diketahui:

1) Target dengan capaian realiasi di atas 100% sebanyak 3 target;
2) Target dengan capaian realiasi tepat 100% sebanyak 1 target;
3) Target dengan capaian realiasi di bawah 100% sebanyak 11 target: dan
4) Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 2 target;

Selain itu, indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Rata-rata Nasional dan Provinsi sebagian menggunakan realisasi tahun 2022, karena hasil pengukuran realisasi tahun 2023 belum dirilis.

Secara keseluruhan capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Morowali Utara tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Untuk mencapai sasaran tersebut berbagai upaya telah dilakukan seperti penerbitan kebijakan terkait penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai visi dan misi yaitu ***Terwujudnya Masyarakat Morowali Utara yang Sehat, Cerdas, Sejahtera,*** *serta* kordinasi antara seluruh Perangkat Daerah dalam pelaksanaan dan monitoring evaluasi atas pelaksanaan kebijakan tersebut sehingga terwujudnya pemerintahan yang berkepribadian, bersih, kompeten dan berkinerja tinggi untuk memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat, mengingat target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap Perangkat Daerah khususnya Perangkat Daerah klaster utama maupun klaster pendukung dan tambahan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan bertujuan melayani masyarakat. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama juga telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara dengan pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah maupun pusat secara lebih intensif.

4.1.2 STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Langkah awal Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara untuk memacu ketercapaian kinerja kegiatan utama adalah dengan cara menentukan langkah-langkah strategi serta terus melakukan peningkatan kinerja secara berkesinambungan dengan berbagai upaya agar dapat menyesuaikan diri dan sejajar dengan daerah-daerah lain yang ada di wilayah provinsi Sulawesi tengah, upaya tersebut antara lain sebagai berikut :

1) Mengoptimalkan peran Perangkat Daerah dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan.

2) Melakukan evaluasi atas capaian kinerja untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja.
3) Mengutamakan program-program prioritas yang mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah.

Akhirnya kami berharap kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah ini dapat menjadi bahan evaluasi yang memadai untuk menilai keberhasilan dan menentukan berbagai hal yang perlu mendapat perhatian untuk di sempurnakan pada masa yang akan datang.

Kolonodale, 18 Maret 2024

BUPATI MOROWALI UTARA,

Dr. dr. DELIS JULKARSON HEHI, MARS

LAMPIRAN

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA

PERJANJIAN KINERJA REVISI
TAHUN ANGGARAN PERUBAHAN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr. dr. DELIS JULKARSON HEHI, MARS**

Jabatan : **BUPATI MOROWALI UTARA**

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Kolonodale, 27 November 2023
BUPATI MOROWALI UTARA,

Dr. dr. DELIS JULKARSON HEHI, MARS

LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA REVISI TAHUN ANGGARAN PERUBAHAN 2023
PEMERINTAH DAERAH KEBUPATEN MOROWALI UTARA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatnya mutu layanan kesehatan masyarakat	18. Angka harapan hidup	70,50
2.	Meningkatkan jangkauan layanan pendidikan dasar	19. Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,50
		20. Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	9,00
3.	Meningkatnya partisipasi perempuan	21. Indeks Pemberdayaan Gender	97,50%
4.	Meningkatnya peluang lapangan kerja	22. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,7 %
5.	Meningkatnya kualitas Inovasi daerah	23. Indeks Inovasi Daerah	35,00-60,00 (Inovatif)
6.	Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor strategis daerah	24. PDRB Perkapita	9,70%
7.	Meningkatnya kemudahan berinvestasi Rata-rata Pertumbuhan Nilai Investasi (PMA + PMDN)	25. Nilai Pertumbuhan Investasi (PMA + PMDN)	10.225.000.000.000
8.	Meningkatnya kemandirian desa	26. Indeks Desa Membangun	≥ 0,7072 Maju
9.	Terjaganya fungsi dan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan	27. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	81,06

10.	Meningkatnya keamanan dan ketertiban wilayah	28. Indeks Rasa Aman	2,679/B (aman)
11.	Meningkatnya kualitas Infrastuktur Daerah	29. Indeks Infrastruktur Daerah	0,475
12.	Meningkatnya konektivitas wilayah	30. Rasio Konektivitas kabupaten	0,85
13.	Terwujudnya pemerintahan yang efisien dan efektif	31. Predikat SAKIP	>70-80/BB (sangat baik)
		32. Indeks RB	>70-80/BB (sangat baik)
		33. Nilai LPPD	4.21-5.00 (Sangat Tinggi)
		34. Opini BPK	WTP

Kolonodale, 27 November 2023
BUPATI MOROWALI UTARA,

Dr. dr. DELIS JULKARSON HEHI, MARS

PROGRAM PENDANAAN URUSAN KONKUREN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
TAHUN ANGGARAN PERUBAHAN 2023

A. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar		
I. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Daerah		
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	14.575.226.674,00
2.	Program Pengelolaan Pendidikan	68.776.735.865,00
3.	Program Pengembangan Kurikulum	607.848.994,00
4.	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	1.378.964.600,00
5.	Program Pengembangan Kebudayaan	147.055.200,00
6.	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	346.490.500,00
7.	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	246.269.758,00
II. Dinas Kesehatan Daerah		
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	16.370.134.203,00
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	52.367.276.374,00
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	44.703.800,00
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	29.343.500,00
III. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan kawasan Permukiman Daerah		
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.196.846.733,00
2.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	7.360.636.515,00
3.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	11.378.213.253,00
4.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	952.980.000,00
5.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	3.225.717.062,00

6.	Program Pengembangan Permukiman	17.673.012.485,00
7.	Program Penataan Bangunan Gedung	23.897.494.500,00
8.	Program Penyelenggaran Jalan	91.221.644.797,00
9.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	159.480.750,00
10.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	2.873.960.250,00
11.	Program Kawasan Permukiman	362.380.000,00
12.	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	3.366.779.400,00
13.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	628.496.944,00
14.	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	49.991.850,00
IV. Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran		
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.783.319.609,00
2.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	902.407.250,00
3.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	579.775.910,00
V. Dinas Sosial Daerah		
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**
1.	Program Penunjang Urusan Pemetintah Daerah	1.713.829.228,00
2.	Program Pemberdayaan Sosial	554.695.550,00
3.	Program Rehabilitasi Sosial	460.922.900,00
4.	Pogram Perlindungan dan Jaminan Sosial	2.707.024.900,00
5.	Program Penanganan Bencana	347.262.250,00
B. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar		
XI. Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Daerah		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	1.224.605.847,00
2.	Program Penempatan Tenaga Kerja	901.714.900,00
3.	Program pengembangan wilayah transmigrasi	4.511.601.700,00

4.	Program Hubungan Industrial	171.538.000,00
XII. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemeberdayaan Permpuan Dan Perlindungan Anak Daerah		
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.797.318.943,00
2.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	4.436.462.645,00
3.	Program Pengendalian Penduduk	226.930.050,00
4	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Kualitas Keluarga Sejahtera (KS)	241.939.936,00
5	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	424.999.500,00
6	Program Perlindungan Perempuan)	124.596.100,00
7	Program Perlindungan Khusus Anak	254.504.000,00
8	Program Pemenuhan Hak Anak(PHA)	54.779.000,00
XIII. Dinas Lingkungan Hidup Daerah		
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.133.060.062,50
2.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	535.942.850,00
3.	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	38.405.550,00
4.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	20.900.800,00
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	84.148.150,00
6	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh	34.055.600,00
7	Program Peningkatan Pendidikan,Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	73.015.100,00
8	Program Pengelolaan Persampahan	2.296.499.000,00
XIV. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Daerah		
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	2.125.146.930,00
2.	Program Pendaftaran Penduduk	1.022.504.558,00

3.	Program Pencatatan Sipil	121.718.040,00
4.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	164.223.000,00
5.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	20.613.400,00
XV. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah		
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.696.764.485,00
2.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	975.087.168,00
3.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	3.254.356.746,00
XVI. Dinas Perhubungan Daerah		
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	6,475,144,519,00
2.	'Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	6,404,910,000,00
3.	Program Pengelolaan Pelayaran	3.101.006.757,00
XVII. Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah		
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**
1.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	1.846.915.191,00
2.	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	817.046.106,00
3.	Program pengelolaan Aplikasi Informatika	6.144.088.544,00
4.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	123.574.700,00
5.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	77.944.100,00
XVIII. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Daerah		
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.110.047.307,00

2.	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	30.000.000,00
3.	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	29.999.300,00
4.	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	30.000.000,00
5.	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	30.000.000,00
6.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro	260.000.000,00
7.	Program Pengembangan Umkm	1.093.467.500,00
8.	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	15.000.250,00
9.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	649.400.001,00
10.	Program Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	270.000.000,00
11.	Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen	36.499.950,00
12.	Program Perencanaan Dan Pengembangan Industri	176.949.300,00
13.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabuapten/Kota	20.000.000,00
14.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	50.000.000,00
XIX. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Daerah		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.562.787.282,00
2.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	93.380.950,00
3.	Program Promosi Penanaman Modal	511.366.980,00
4.	Program Pelayanan Penanaman Modal	230.574.700,00
5.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	590.319.200,00
6.	Program Pengelolaan Data Dan Siste Informasi	65.911.000,00
XX. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah		
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**
1.	Program Penunjang urusan pemerintahan Daerah	1.007.945.224,00
2.	Program Pembinaan Perpustakaan	865.011.386,00

3.	Program Pengelolaan Arsip	267.465.233,00
C. Urusan Pemerintah Pilihan		
J. Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga Daerah		
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.446.430.647,00
2.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.220.942.000,00
3.	Program Pemasaran Pariwisata	1.214.603.700,00
4.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	192.494.113,00
5.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	5.193.381.307,00
6.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	480.000.000,00
II. Dinas Perikanan Daerah		
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.769.494.048,00
2.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	4.551.206.200,00
3.	Program Pengelolaan Perikanan Budaya	2.645.938.200,00
4.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	172.870.800,00
III. Dinas Pertanian Dan Pangan Daerah		
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**
1.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	389.646.590,00
2.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	42.558.900,00
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	19.148.712.049,00
4.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	19.694.246.918,00
5.	Program Penyediaan Dan Pengembangan sarana Pertanian	8.843.273.050,00
6.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	277.379.803,00
7.	Program Perizinan Usaha Pertanian	245.032.100,00

8.	Program Penyuluhan Pertanian	1.413.121.790,00
9.	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	53.939.300,00
D. Urusan Penunjang		
VII. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.494.077.267,00
2.	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.385.977.400,00
3.	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	424.177.115,00
4.	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	415.992.000,00
VIII. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.290.585.550,00
2.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	5.157.247.068,00
3.	Program Pengelolaan Barang milik daerah	1.210.430.683,00
IX. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.671.308.903,00
2.	Program Kepegawaian Daerah	2.887.539.135,00
3.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.283.637.700,00
X. Badan Pendapatan Daerah		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.725.656.274,00
2.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.665.962.762,00
XI. Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.050.013.816,00
2.	Program Penanggulangan Bencana	14.176.315.350,00
XII. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.385.473.243.00
2.	Program peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	10.367.430.000.00

3.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Kewaspadaan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.	1.383.205.292.00
4.	Program Pembinaa dan Pengemnnagan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	271.059.000.00
E. Sekretariat Daerah		
X. Bagian Administrasi Pemerintahan		
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.346.323.900,00
2.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	6.188.497.154,00
XI. Bagian Kesejahteraan Rakyat		
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	822.019.150,00
2.	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	40.607.499.222,00
XII. Bagian Hukum Daerah		
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	685.006.229,00
2.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	333.406.900,00
XIII. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya alam		**Anggaran (Rp)**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	626.534.950,00
2.	Program Perekonomian dan Pembangunan	198.464.500,00
XIV. Bagian Administrasi Pembangunan Dan Sumber Daya Alam Daerah		
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**
1.	Program Penunjang Urusan Pemrintahan Daerah	391.876.600,00
2.	Program Perekonomian Dan Pembangunan	358.348.050,00
XV. Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa		
No	**Program Pe ndanaan**	**Anggaran (Rp)**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.050.769.850,00

2.	Program Perekonomian Dan Pembangunan	916.230.000,00
XVI. Bagian Umum Dan Perlengkapan		
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	21.560.280.933,00
XVII. Bagian Organisasi Daerah		
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**
1.	Program penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.112.309.004,00
XVIII. Bagian Hubungan Masyarakat Dan Protokoler Daerah		
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	2.098.359.100,00
F. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten\ Kota	14.020.890.006,00
2.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	7.827.422.800,00
G. Inspektorat Daerah		
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten\ Kota	7.371.910.248,00
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	3.366.209.450
H. RSUD Kolonodale		
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	20.763.629.119,00
4.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	42.159.958.578,00
I. Kecamatan		
J. Kecamatan Petasia		
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.193.494.283,00
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa & Kelurahan	928.666.007,00
II. Kecamatan Lembo		
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.253.848.820,00

2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa & Kelurahan	6.990.000,00
III. Kecamatan Mori Atas		
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.963.262.054,00
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	142.628.762,00
IV. Kecamatan Bungku Utara		
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	4.278.679.494,00
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	34.400.000,00
XI. Kecamatan Soyo Jaya		
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	1.938.426.404.00
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	148.645.000.00
XII. Kecamatan Mamosalato		
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	372.606.250,00
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	239.393.500,00
XIII. Kecamatan Lembo Raya		
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	2.253.848.820,00
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	6.990.000,00
XIV. Kecamatan Mori Utara		
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	339.304.724,00
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	42.100.000,00
XV. Kecamatan Petasia Timur		
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabpaten / Kota	751.658.385,00

2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	70.331.200,00
XVI. Kecamatan Petasia Barat		
No	**Program Pendanaan**	**Anggaran (Rp)**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.540.500.491,00
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	178.198.000,00

Kolonodale, 27 November 2023

BUPATI MOROWALI UTARA,

Dr. dr. DELIS JULKARSON HEHI, MARS